Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024
DI TARAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DI TARAKAN

Nomor : 71.A/LHP/XIX.TJS/V/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024
DI TARAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DI TARAKAN

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

   Laporan ini memuat:

   a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;

   b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan

   c. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

   Laporan ini memuat:

   a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

   b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

   c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 i

DAFTAR ISI ii

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 3

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Tarakan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Tarakan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Tarakan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tarakan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Tarakan tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 71.B/LHP/XIX.TJS/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Tarakan, 26 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Dwi Sabardiana S.E., M.A., CFrA, CSFA, ERMCP

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kota Tarakan yang memiliki 30 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca per 31 Desember 2024;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan LPSAL per 31 Desember 2024;
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LPSAL, dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan;
f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan

g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 14 April s.d. 13 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 87/ST/XIX.TJS/04/2025 tanggal 14 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

2024

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

AUDITED

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

JL. KALIMANTAN NO 1
KOTA TARAKAN, KALIMANTAN UTARA

website.www.tarakankota.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**
DAFTAR TABEL **2**
DAFTAR GRAFIK **8**
DAFTAR LAMPIRAN **9**
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB **10**
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN **11**
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 11
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 13
C. NERACA 14
D. LAPORAN OPERASIONAL 16
E. LAPORAN ARUS KAS 18
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 20
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 21
BAB I PENDAHULUAN 21
BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI 26
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 32
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 67
BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN 108
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 248
BAB VII PENUTUP 250
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 33
Tabel 2 PDRB Harga Berlaku Kota Tarakan 33
Tabel 3 PDRB Harga Konstan Kota Tarakan 34
Tabel 4 Tingkat Inflasi 35
Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia (UHH LFSP2020) 36
Tabel 6 Program Pendukung Indikator Usia Harapan Hidup 37
Tabel 7 Program Pendukung Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 38
Tabel 8 *Gini Ratio* 38
Tabel 9 Tingkat Kemiskinan Nasional/Provinsi/Kota 40
Tabel 10 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan 41
Tabel 11 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Tarakan 41
Tabel 12 Program Pendukung dari Sasaran Menurunnya Kemiskinan 41
Tabel 13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan 42
Tabel 14 Program Pendukung dari Sasaran Menurunnya Pengangguran 43
Tabel 15 Faktor Determinan Penyebab *Stunting* di Kota Tarakan 45
Tabel 16 Alokasi Anggaran dan Program Penurunan Prevalensi *Stunting* 45
Tabel 17 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 50
Tabel 18 Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Tahun 2017-2024 51
Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Per Urusan TA 2024 53
Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Per Program TA 2024 54
Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 59
Tabel 22 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan TA 2024 60
Tabel 23 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan TA 2024 61
Tabel 24 Perhitungan Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2024 ... 61
Tabel 25 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Pengawasan TA 2024 62
Tabel 26 Masa Manfaat Aset Tetap 81
Tabel 27 Penambahan Masa Manfaat Karena Renovasi/Restorasi/*Overhaul* 84
Tabel 28 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud 95
Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023 109
Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 109
Tabel 31 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 110
Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023.....110
Tabel 33 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023 112

Tabel 34 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023 113
Tabel 35 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 114
Tabel 36 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023 114
Tabel 37 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023 115
Tabel 38 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Non Tunai 115
Tabel 39 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023 116
Tabel 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023 116
Tabel 41 Rincian Realisasi Insentif Fiskal TA 2024 118
Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2024 dan 2023 118
Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023 ..119
Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 119
Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023 120
Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisai Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 121
Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 121
Tabel 48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 122
Tabel 49 Rincian Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Kelompok Beban TA 2024 dan 2023 124
Tabel 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 124
Tabel 51 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 125
Tabel 52 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 125
Tabel 53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023 126
Tabel 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 127
Tabel 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 128

Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023 129
Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 130
Tabel 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 130
Tabel 59 Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Per SKPD Fungsional 131
Tabel 60 Rincian Belanja Tak Terduga Per Jenis Belanja TA 2024 131
Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Kepada Perumda TA 2024 132
Tabel 62 Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2024 dan 2023 133
Tabel 63 Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir TA 2024 dan 2023 135
Tabel 64 Rincian Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 136
Tabel 65 Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 137
Tabel 66 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 138
Tabel 67 Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2024 dan 2023 139
Tabel 68 Saldo Kas Dana BOS Per 31 Desember 2024 dan 2023 142
Tabel 69 Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 143
Tabel 70 Saldo Piutang Pajak per 31 Per 31 Desember 2024 dan 2023 144
Tabel 71 Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember 2024 dan 2023 145
Tabel 72 Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2024 dan 2023 146
Tabel 73 Saldo Piutang Transfer Per 31 Desember 2024 dan 2023 147
Tabel 74 Rincian Piutang Transfer - Pusat Per 31 Desember 2024 147
Tabel 75 Rincian Piutang Transfer - Provinsi Per 31 Desember 2024 147
Tabel 76 Rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 148
Tabel 77 Rincian Bagian Lancar Tuntutag Ganti Kerugian Per 31 Desember 2024 dan 2023 149
Tabel 78 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2024 150
Tabel 79 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2024 150
Tabel 80 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2024 151
Tabel 81 Rincian Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 152
Tabel 82 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 Berdasarkan Kelompok Barang 152
Tabel 83 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 Berdasarkan Jenis Barang 153

Tabel 84 Rincian Persediaan yang Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2024 dan 2023 154
Tabel 85 Rincian Persediaan Usang Per 31 Desember 2024 155
Tabel 86 Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2024 156
Tabel 87 Rincian Investasi Permanen - Penyertaan Modal Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 157
Tabel 88 Rincian Mutasi Masuk dan Keluar Investasi Permanen - Penyertaan Modal Daerah 157
Tabel 89 Rincian Aset Tetap Sebelum Penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 161
Tabel 90 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Tahun 2024 161
Tabel 91 Rincian Mutasi Tanah Tahun 2024 162
Tabel 92 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang atas Tanah Per SKPD Tahun 2024 163
Tabel 93 Rincian Tanah Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024 164
Tabel 94 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2024 166
Tabel 95 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2024 168
Tabel 96 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024 169
Tabel 97 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024 171
Tabel 98 Rincian Gedung dan Bangunan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024 172
Tabel 99 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 173
Tabel 100 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2024 174
Tabel 101 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024 175
Tabel 102 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 178
Tabel 103 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2024 179
Tabel 104 Rincian Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024 180
Tabel 105 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 181
Tabel 106 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2024 182
Tabel 107 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 183
Tabel 108 Rincian Penjelasan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 183
Tabel 109 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024 185

Tabel 110 Rincian Aset Tak Berwujud Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024.....186
Tabel 111 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tak Berwujud Per SKPD Tahun 2024.....189
Tabel 112 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.....190
Tabel 113 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-lain Tahun 2024.....190
Tabel 114 Rincian Kas yang Dibatsi Penggunaanya Per 31 Desember 2024 195
Tabel 115 Rincian Dana *Treasury Deposit Facility* Per 31 Desember 2024.....195
Tabel 116 Rincian Mutasi Properti Investasi Tanah Tahun 2024 196
Tabel 117 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Properti Investasi Tanah Per SKPD Tahun 2024.....197
Tabel 118 Rincian Mutasi Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024.....197
Tabel 119 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang PI Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024.....197
Tabel 120 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 ..199
Tabel 121 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Tahun 2024.....200
Tabel 122 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Pegawai Tahun 2024.....200
Tabel 123 Rincian Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 203
Tabel 124 Rincian Mutasi Utang Belanja Hibah Tahun 2024.....204
Tabel 125 Rincian Utang Transfer Per 31 Desember 2024 dan 2023 204
Tabel 126 Rincian Lebih Salur Dana Perimbangan Tahun 2024 205
Tabel 127 Rincian Mutasi Masuk dan Keluar Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024.....205
Tabel 128 Rincian Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2024.....207
Tabel 129 Rincian Realisasi Pendapatan - LO TA 2024 dan 2023 208
Tabel 130 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 dan 2023.....209
Tabel 131 Realisasi Pajak Daerah - LO TA 2024 dan 2023.....209
Tabel 132 Realisasi Retribusi Daerah – LO TA 2024 dan 2023 210
Tabel 133 Realisasi Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO TA 2024 dan 2023 212
Tabel 134 Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2024 dan 2023 213
Tabel 135 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2024 dan 2023 214
Tabel 136 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO TA 2024 dan 2023 ...214
Tabel 137 Rincian Dana Alokasi Umum – LO TA 2024 dan 2023 215
Tabel 138 Rincian Dana Alokasi Khusus – LO TA 2024 dan 2023 215

Tabel 139 Rincian Insentif Fiskal – LO TA 2024 216
Tabel 140 Rincian Pendapatan Bagi Hasil – LO TA 2024 dan 2023 217
Tabel 141 Rincian Bantuan Keuangan – LO TA 2024..... 217
Tabel 142 Rincian Pendapatan Hibah – LO TA 2024 dan 2023 218
Tabel 143 Rincian Pendapatan Hibah – LO berdasarkan SKPD TA 2024 dan 2023... 218
Tabel 144 Rincian Beban Operasi TA 2024 dan 2023 220
Tabel 145 Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023..... 221
Tabel 146 Rincian Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai TA 2024 221
Tabel 147 Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023 222
Tabel 148 Rincian Perbandingan Beban dengan Belanja Persediaan TA 2024 223
Tabel 149 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2024....224
Tabel 150 Rincian Beban Jasa TA 2024 dan 2023..... 225
Tabel 151 Rincian Perbandingan Beban Jasa dengan Belanja Jasa TA 2024 226
Tabel 152 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023..... 228
Tabel 153 Perbandingan Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan..... 228
Tabel 154 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023 229
Tabel 155 Rincian Beban Beban Hibah TA 2024 dan 2023 230
Tabel 156 Rincian Perbandingan Beban Hibah dengan Belanja Hibah TA 2024..... 230
Tabel 157 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 231
Tabel 158 Rincian Beban Penyusutan TA 2024 dan 2023..... 232
Tabel 159 Rincian Surplus Penjualan Aset Non Lancar TA 2024 233
Tabel 160 Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional TA 2024..... 234
Tabel 161 Rincian Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2024..... 235
Tabel 162 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023..... 237
Tabel 163 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023..... 238
Tabel 164 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023..... 239
Tabel 165 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023..... 239
Tabel 166 Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2024 dan 2023. 240
Tabel 167 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023..... 240
Tabel 168 Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2024 dan 2023 241
Tabel 169 Rekapitulasi Kenaikan/Penurunan Kas TA 2024 dan 2023 241
Tabel 170 Perubahan Saldo Kas TA 2024 dan 2023..... 242
Tabel 171 Saldo Akhir Kas Keseluruhan TA 2024 dan 2023 242
Tabel 172 Koreksi Ekuitas Lainnya 244

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2024.....34
Grafik 2 Indeks Pembangunan Manusia 2019-2024.....37
Grafik 3 *Gini Ratio* 2020-2024 39
Grafik 4 Prevalensi *Stunting* di Indonesia 43
Grafik 5 Gambaran *Stunting* di Kota Tarakan berdasarkan E – PPGBM dan SSGI ..44
Grafik 6 Prevalensi Balita Stunting berdasarkan Kecamatan di Kota Tarakan.....44
Grafik 7 Fluktuasi Pendapatan dan Belanja Kota Tarakan 51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Nomor Rekening Bank di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Tarakan Saldo Per 31 Desember 2024
Lampiran 2	Daftar Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 3	Daftar Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	Daftar Piutang Transfer Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 6	Daftar Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 7	Daftar Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 8	Daftar Persediaan Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 9	Daftar Dana Bergulir Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 10	Daftar Peralatan dan Mesin Berdasarkan Jenisnya Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 11	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 12	Daftar Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 13	Daftar Tanah Di Wilayah Kerja Pertamina Per 31 Desember 2024
Lampiran 14	Daftar Gedung Di Wilayah Kerja Pertamina Per 31 Desember 2024
Lampiran 15	Tanah yang Akan Diserahkan Ke Pemerintah Pusat
Lampiran 16	Gedung dan Bangunan yang Akan Diserahkan
Lampiran 17	Aset yang Masih dalam Penelusuran
Lampiran 18	Daftar Properti Investasi Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 19	Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 20	Daftar Utang Belanja Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 21	Daftar Kewajiban Belanja Honorarium DPUPR Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 22	Daftar Utang Transfer Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 23	Daftar Kewajiban Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 24	Daftar Dana Jaminan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024
Lampiran 25	Daftar Dana Jaminan Rusunawa Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024

WALI KOTA TARAKAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tarakan, 26 Mei 2025
WALI KOTA TARAKAN

WALIKOTA TARAKAN

dr. H. KHAIRUL, M. Kes

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**PENDAPATAN**	5.1.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.1.1.1				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	90.911.161.903,00	98.648.559.407,53	108,51	86.660.296.194,72
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	16.228.846.172,00	16.050.205.889,70	98,90	12.859.825.298,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	16.203.957.872,00	15.602.103.335,97	96,29	10.314.517.461,15
6	Lain-Lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	75.814.678.527,00	74.968.422.059,01	98,88	65.115.401.934,76
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**		**199.158.644.474,00**	**205.269.290.692,21**	**103,07**	**174.950.040.888,63**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.1.2				
10	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1	96.004.435.804,00	110.926.683.380,00	115,54	113.268.524.011,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.2	273.544.121.334,00	282.028.432.000,00	103,10	160.311.500.604,00
13	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.3	474.454.400.000,00	475.029.013.000,00	100,12	438.566.142.648,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.4	115.715.292.000,00	107.307.452.338,00	92,73	114.652.274.282,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**		**959.718.249.138,00**	**975.291.580.718,00**	**101,62**	**826.798.441.545,00**
16	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**					
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.5	0,00	6.607.594.000,00	0,00	23.343.638.000,00
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**		**0,00**	**6.607.594.000,00**	**0,00**	**23.343.638.000,00**
19	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**					
20	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.6	138.798.379.638,00	71.235.038.148,00	51,32	78.987.935.132,00
21	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.7	26.179.906.894,00	26.179.906.894,00	100,00	54.419.478.140,00
22	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (20 s/d 21)**		**164.978.286.532,00**	**97.414.945.042,00**	**59,05**	**133.407.413.272,00**
23	**Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 18 + 22)**		**1.124.696.535.670,00**	**1.079.314.119.760,00**	**95,96**	**983.549.492.817,00**
24						
25	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	5.1.1.3				
26	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	412.403.462,00
28	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (26 s/d 27)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.412.403.462,00**
29	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)**		**1.323.855.180.144,00**	**1.284.583.410.452,21**	**97,03**	**1.161.911.937.167,63**
30						
31	**BELANJA DAN TRANSFER**	5.1.2				
32	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.1				
33	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	480.448.162.731,24	440.355.806.870,00	91,66	398.818.594.574,00
34	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	386.025.526.188,00	353.588.944.803,57	91,60	325.517.556.206,81
35	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	169.756.541.176,00	164.745.043.401,97	97,05	141.649.793.597,00
36	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	4.757.904.000,00	4.557.572.086,00	95,79	2.724.179.010,00
37	**Jumlah Belanja Operasi (33 s/d 36)**		**1.040.988.134.095,24**	**963.247.367.161,54**	**92,53**	**868.710.123.387,81**
38						
39	**BELANJA MODAL**	5.1.2.2				
40	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	4.625.116.040,00	3.517.441.266,00	76,05	6.911.585.555,00
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	59.024.456.961,00	53.762.258.658,00	91,08	17.801.793.264,00
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	55.337.474.978,00	54.193.152.010,71	97,93	226.664.480.433,52
43	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	195.718.125.547,00	193.413.536.165,43	98,82	139.194.648.564,00
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	449.633.075,00	436.246.075,00	97,02	4.281.600.495,00
45	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	2.793.776.083,00	2.551.957.540,00	91,34	1.185.910.000,00
46	**Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)**		**317.948.582.684,00**	**307.874.591.715,14**	**96,83**	**396.040.018.311,52**

No.	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
47						
48	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.1.2.3				
49	Belanja Tidak Terduga		2.800.000.000,00	223.879.500,00	8,00	767.355.931,00
50	**Jumlah Belanja Tidak Terduga**		**2.800.000.000,00**	**223.879.500,00**	**8,00**	**767.355.931,00**
51	**JUMLAH BELANJA (37 + 46 + 50)**		**1.361.736.716.779,24**	**1.271.345.838.376,68**	**93,36**	**1.265.517.497.630,33**
52						
53	**TRANSFER**	5.1.2.4				
54	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Jumlah Transfer**		0,00	0,00	0,00	0,00
56	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 55)**		**1.361.736.716.779,24**	**1.271.345.838.376,68**	**93,36**	**1.265.517.497.630,33**
57	**SURPLUS / DEFISIT (29 - 56)**		**(37.881.536.635,24)**	**13.237.572.075,53**	**(34,94)**	**(103.605.560.462,70)**
58						
59	**PEMBIAYAAN**	5.1.3				
60	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	5.1.3.1				
61	Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		39.881.536.635,24	39.881.536.635,24	100,00	146.487.097.097,94
62	Koreksi SILPA		0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah (61 s/d 62)**		**39.881.536.635,24**	**39.881.536.635,24**	**100,00**	**146.487.097.097,94**
64						
65	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	5.1.3.2				
66	Penyertaan Modal Pemerintah		2.000.000.000,00	1.999.256.800,00	99,96	3.000.000.000,00
67	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah**		**2.000.000.000,00**	**1.999.256.800,00**	**99,96**	**3.000.000.000,00**
68	**PEMBIAYAAN NETO (63 - 67)**		**37.881.536.635,24**	**37.882.279.835,24**	**100,00**	**143.487.097.097,94**
69						
70	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (57 + 68)**	5.1.4	**0,00**	**51.119.851.910,77**	**0,00**	**39.881.536.635,24**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan

WALI KOTA TARAKAN

WALIKOTA TARAKAN

dr. H. KHAIRUL, M. Kes

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	**39.881.536.635,24**	**146.487.097.097,94**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	39.881.536.635,24	146.487.097.097,94
3	**Sub Total (1 - 2)**		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	51.119.851.910,77	39.881.536.635,24
5	**Sub Total (3 + 4)**		51.119.851.910,77	39.881.536.635,24
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	5.2.6	**51.119.851.910,77**	**39.881.536.635,24**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan

WALI KOTA TARAKAN

dr. H. KHAIRUL, M. Kes

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2024	2023
1	**ASET**	5.3.1		
2	**ASET LANCAR**	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	35.913.844.950,10	19.228.393.115,04
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	118.514.000,00	85.283.258,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	11.567.672.633,25	15.685.048.577,94
7	Kas Dana BOS	5.3.1.1.5	2.403.210.663,42	2.491.120.457,42
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.6	0,00	46.448.059,84
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	1.116.609.664,00	2.347.320.267,00
10	Piutang Pajak	5.3.1.1.8	63.465.528.714,79	60.397.386.207,53
11	Piutang Retribusi	5.3.1.1.9	2.117.565.706,00	1.407.079.503,00
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	5.3.1.1.10	156.664.900,00	0,00
13	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.11	3.927.439.371,00	4.640.488.870,00
14	Piutang Transfer	5.3.1.1.12	100.257.482.073,00	28.001.165.315,00
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.1.13	0,00	105.292.939,35
16	Piutang Lainnya	5.3.1.1.14	2.622.901.044,02	156.664.900,00
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.15	(47.498.609.019,07)	(44.743.756.874,00)
18	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.16	79.877.057,54	299.973.996,76
19	Persediaan	5.3.1.1.17	75.876.230.307,37	76.680.116.445,47
20	**Jumlah Aset Lancar (3 s/d 19)**		**252.124.932.065,42**	**166.828.025.038,35**
21				
22	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	5.3.1.2		
23	**Investasi Non Permanen**	5.3.1.2.1		
24	Dana bergulir		4.964.457.454,00	4.964.457.454,00
25	Penyisihan Dana bergulir		(1.886.843.806,69)	(1.898.278.806,69)
26	**Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 25)**		**3.077.613.647,31**	**3.066.178.647,31**
27	**Investasi Permanen**	5.3.1.2.2		
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		453.818.488.666,17	370.503.071.413,00
29	**Jumlah Investasi Permanen**		**453.818.488.666,17**	**370.503.071.413,00**
30	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 29)**		**456.896.102.313,48**	**373.569.250.060,31**
31				
32	**ASET TETAP**	5.3.1.3		
33	Tanah	5.3.1.3.1	2.158.674.371.945,00	2.185.318.151.262,00
34	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	595.394.778.865,32	552.928.049.826,43
35	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.751.787.450.162,91	2.663.750.139.489,32
36	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.817.921.099.216,89	2.702.269.781.293,32
37	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	15.600.663.301,20	15.155.179.301,20
38	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	33.845.610.173,49	13.396.887.346,15
39	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(3.279.236.275.634,18)	(3.032.579.251.817,69)
40	**Jumlah Aset Tetap (33 s/d 39)**		**5.093.987.698.030,63**	**5.100.238.936.700,73**
41				
42	**ASET LAINNYA**	5.3.1.4		
43	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.4.1	0,00	39.491.200,00
44	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.4.2	0,00	65.370.757,46
45	Aset Tak berwujud	5.3.1.4.3	15.520.217.354,00	13.341.554.814,00
46	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.4	(10.441.968.541,73)	(9.785.380.523,00)
47	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.5	392.773.382.679,15	596.567.915.043,81
48	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.4.6	(185.733.755.724,23)	(190.067.824.808,04)
49	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.7	426.575.000,00	0,00
50	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.8	3.935.791.000,00	0,00
51	**Jumlah Aset Lainnya (43 s/d 50)**		**216.480.241.767,19**	**410.161.126.484,23**

No.	URAIAN	REF	2024	2023
52				
53	**PROPERTI INVESTASI**	5.3.1.5		
54	Properti Investasi Tanah	5.3.1.5.1	34.241.793.600,00	1.020.600.000,00
55	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.5.2	203.995.676.423,12	235.544.352.754,25
56	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.3	(16.269.242.080,00)	(21.101.637.984,00)
57	**Jumlah Properti Investasi (54 s/d 56)**		**221.968.227.943,12**	**215.463.314.770,25**
58	**JUMLAH ASET (20 + 30 + 40 + 51 + 57)**		**6.241.457.202.119,84**	**6.266.260.653.053,87**
59				
60	**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**			
61	**KEWAJIBAN**	5.3.2		
62	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	5.3.2.1		
63	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	0,00
64	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	2.405.041.841,38	2.352.059.721,60
65	Utang Belanja	5.3.2.1.3	10.583.924.943,00	17.445.229.421,47
66	Utang Transfer	5.3.2.1.4	5.989.927.000,00	6.458.995.121,00
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	141.644.682.841,00	52.043.693.800,00
68	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (63 s/d 67)**		**160.623.576.625,38**	**78.299.978.064,07**
69	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	5.3.2.2		
70	Utang Jangka Panjang Lainnya		426.575.000,00	139.161.519.561,00
71	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**		**426.575.000,00**	**139.161.519.561,00**
72	**JUMLAH KEWAJIBAN (68 + 71)**		**161.050.151.625,38**	**217.461.497.625,07**
73				
74	**EKUITAS**			
75	Ekuitas	5.3.3	6.080.407.050.494,46	6.048.799.155.428,80
76	**JUMLAH EKUITAS**		**6.080.407.050.494,46**	**6.048.799.155.428,80**
77	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (72 + 76)**		**6.241.457.202.119,84**	**6.266.260.653.053,87**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan

WALI KOTA TARAKAN

WALIKOTA TARAKAN

dr. H. KHAIRUL, M. Kes

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**					
2	**PENDAPATAN**	5.4.1				
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.4.1.1				
4	Pajak Daerah	5.4.1.1.1	101.926.786.642,98	89.802.046.013,88	12.124.740.629,10	13,50
5	Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	16.497.625.244,73	12.948.447.043,68	3.549.178.201,05	27,41
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	3.577.244.945,92	3.494.957.872,30	82.287.073,62	2,35
7	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.4.1.1.4	74.072.132.195,48	64.802.549.853,66	9.269.582.341,82	14,30
8	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)**		**196.073.789.029,11**	**171.048.000.783,52**	**25.025.788.245,59**	**14,63**
9						
10	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.4.1.2				
11	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**					
12	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.1	122.197.728.780,00	109.196.214.762,00	13.001.514.018,00	11,91
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.2.2	159.060.244.985,00	282.637.385.581,00	(123.577.140.596,00)	(43,72)
14	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.3	475.029.013.000,00	438.566.142.648,00	36.462.870.352,00	8,31
15	Dana Alokasi Khusus	5.4.1.2.4	107.393.412.412,00	114.566.314.208,00	(7.172.901.796,00)	(6,26)
16	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s/d 15)**		**863.680.399.177,00**	**944.966.057.199,00**	**(81.285.658.022,00)**	**(8,60)**
17						
18	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA**					
19	Insentif Fiskal	5.4.1.2.5	6.607.594.000,00	23.343.638.000,00	(16.736.044.000,00)	(71,69)
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**		**6.607.594.000,00**	**23.343.638.000,00**	**(16.736.044.000,00)**	**(71,69)**
21						
22	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**					
23	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.6	92.214.421.568,00	78.130.273.067,00	14.084.148.501,00	18,03
24	Bantuan Keuangan	5.4.1.2.7	26.179.906.894,00	54.419.478.140,00	(28.239.571.246,00)	(51,89)
25	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (23 s/d 24)**		**118.394.328.462,00**	**132.549.751.207,00**	**(14.155.422.745,00)**	**(10,68)**
26	**Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 20 + 25)**		**988.682.321.639,00**	**1.100.859.446.406,00**	**(112.177.124.767,00)**	**(10,19)**
27						
28	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	5.4.1.3				
29	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	9.853.717.484,66	77.117.076.226,41	(67.263.358.741,75)	(87,22)
30	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	0,00	412.403.462,00	(412.403.462,00)	(100,00)
31	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (29 s/d 30)**		**9.853.717.484,66**	**77.529.479.688,41**	**(67.675.762.203,75)**	**(87,29)**
32	**JUMLAH PENDAPATAN (8 + 26 + 31)**		**1.194.609.828.152,77**	**1.349.436.926.877,93**	**(154.827.098.725,16)**	**(11,47)**
33						
34	**BEBAN**	5.4.2				
35	**BEBAN OPERASI**	5.4.2.1				
36	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	432.141.409.734,00	388.298.784.169,00	43.842.625.565,00	11,29
37	Beban Persediaan	5.4.2.1.2	98.422.610.337,75	121.179.973.856,67	(22.757.363.518,92)	(18,78)
38	Beban Jasa	5.4.2.1.3	218.903.661.655,73	235.488.010.311,96	(16.584.348.656,23)	(7,04)
39	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	11.263.187.867,52	8.528.082.554,06	2.735.105.313,46	32,07
40	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	39.600.311.810,00	29.311.041.907,00	10.289.269.903,00	35,10
41	Beban Hibah	5.4.2.1.6	159.465.149.055,89	130.006.069.515,36	29.459.079.540,53	22,66
42	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.7	4.557.572.086,00	2.704.403.259,00	1.853.168.827,00	68,52
43	Beban Penyusutan	5.4.2.1.8	260.678.320.850,86	248.596.532.533,13	12.081.788.317,73	4,86
44	Beban Amortisasi	5.4.2.1.9	758.692.292,72	766.290.951,00	(7.598.658,28)	(0,99)
45	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.10	2.754.980.218,49	2.859.859.424,62	(104.879.206,13)	(3,67)
46	Beban Transfer	5.4.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Beban Lain-lain	5.4.2.1.12	0,00	1.930.898.047,44	(1.930.898.047,44)	(100,00)
48	**JUMLAH BEBAN OPERASI (36 s/d 47)**		**1.228.545.895.908,96**	**1.169.669.946.529,24**	**58.875.949.379,72**	**5,03**
49	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (32 - 48)**	5.4.3	**(33.936.067.756,19)**	**179.766.980.348,69**	**(213.703.048.104,88)**	**(118,88)**

No.	URAIAN	Ref	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
50						
51	**SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	5.4.4				
52	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.4.1	123.941.500,00	0,00	123.941.500,00	0,00
53	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.2	13.615.209.666,60	0,00	13.615.209.666,60	0,00
55	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.3	(2.611.299.378,82)	(33.943.796.430,76)	31.332.497.051,94	(92,31)
57	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (52 s/d 56)**		**11.127.851.787,78**	**(33.943.796.430,76)**	**45.071.648.218,54**	**(132,78)**
58	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (49 - 57)**		**(22.808.215.968,41)**	**145.823.183.917,93**	**(168.631.399.886,34)**	**(115,64)**
59						
60	**POS LUAR BIASA**	5.4.5				
61	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Jumlah Pos Luar Biasa (61- 62)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	**SURPLUS / DEFISIT- LO (58 + 63)**	5.4.6	**(22.808.215.968,41)**	**145.823.183.917,93**	**(168.631.399.886,34)**	**(115,64)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan

WALI KOTA TARAKAN

dr. H. KHAIRUL, M. Kes

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref	2024	2023
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	5.5.1		
2	**Arus Masuk Kas**			
3	Penerimaan Pajak Daerah		98.648.559.407,53	86.660.296.194,72
4	Penerimaan Retribusi Daerah		16.050.205.889,70	12.859.825.298,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.602.103.335,97	10.314.517.461,15
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		74.832.980.559,01	64.603.884.057,76
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		110.926.683.380,00	113.268.524.011,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		282.028.432.000,00	160.311.500.604,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		475.029.013.000,00	438.566.142.648,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		107.307.452.338,00	114.652.274.282,00
11	Penerimaan Insentif Fiskal		6.607.594.000,00	23.343.638.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		71.235.038.148,00	78.987.935.132,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		26.179.906.894,00	54.419.478.140,00
14	Penerimaan Hibah		0,00	3.000.000.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		0,00	412.403.462,00
16	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)**		**1.284.447.968.952,21**	**1.161.400.419.290,63**
17				
18	**Arus Keluar Kas**			
19	Pembayaran Pegawai		440.355.806.870,00	398.818.594.574,00
20	Pembayaran Barang		353.588.944.803,57	325.517.556.206,81
21	Pembayaran Hibah		164.745.043.401,97	141.649.793.597,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		4.557.572.086,00	2.724.179.010,00
23	Pembayaran Tak Terduga		223.879.500,00	767.355.931,00
24	Pembayaran Transfer		0,00	0,00
25	**Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 24)**		**963.471.246.661,54**	**869.477.479.318,81**
26	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 25)**		**320.976.722.290,67**	**291.922.939.971,82**
27				
28	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	5.5.2		
29	**Arus Masuk Kas**			
30	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		135.441.500,00	511.517.877,00
31	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**135.441.500,00**	**511.517.877,00**
32	**Arus Keluar Kas**			
33	Perolehan Tanah		3.517.441.266,00	6.911.585.555,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		53.762.258.658,00	17.801.793.264,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		54.193.152.010,71	226.664.480.433,52
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		193.413.536.165,43	139.194.648.564,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		436.246.075,00	4.281.600.495,00
38	Perolehan Aset Lainnya		2.551.957.540,00	1.185.910.000,00
39	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		1.999.256.800,00	3.000.000.000,00
40	**Jumlah Arus Keluar Kas (33 s/d 39)**		**309.873.848.515,14**	**399.040.018.311,52**
41	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 40)**		**(309.738.407.015,14)**	**(398.528.500.434,52)**

No.	URAIAN	Ref	2024	2023
42				
43	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	5.5.3		
44	**Arus Masuk Kas**			
45	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
46	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**0,00**	**0,00**
47	**Arus Keluar Kas**			
48	Pembayaran pokok utang		0,00	0,00
49	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**0,00**	**0,00**
50	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 - 49)**		**0,00**	**0,00**
51				
52	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	5.5.4		
53	**Arus Masuk Kas**			
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		83.456.117.300,00	87.158.507.576,00
55	Penerimaan Lainnya		0,00	15.002.077.100,00
56	**Jumlah Arus Masuk Kas (54 s/d 55)**		**83.456.117.300,00**	**102.160.584.676,00**
57	**Arus Keluar Kas**			
58	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		83.456.117.300,00	87.158.507.576,00
59	Pengeluaran Lainnya		2.077.100,00	8.330.995,20
60	**Jumlah Arus Keluar Kas (58 s/d 59)**		**83.458.194.400,00**	**87.166.838.571,20**
61	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (56 - 60)**		**(2.077.100,00)**	**14.993.746.104,80**
62	**Kenaikan / Penurunan Kas (26 + 41 + 50 + 61)**	5.5.5	**11.236.238.175,53**	**(91.611.814.357,90)**
63	**Saldo Awal Kas**	5.5.6	39.883.613.735,24	131.495.428.093,14
64	**Saldo Akhir Kas (62 + 63)**		**51.119.851.910,77**	**39.883.613.735,24**
65	**Saldo Akhir Kas di Kas Daerah**		35.913.844.950,10	19.228.393.115,04
66	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran**		0,00	0,00
67	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**		118.514.000,00	85.283.258,00
68	**Saldo Akhir Kas di BLUD**		11.567.672.633,25	15.685.048.577,94
69	**Saldo Akhir Kas Dana BOS**		2.403.210.663,42	2.491.120.457,42
70	**Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP**		0,00	46.448.059,84
71	**Saldo Akhir Kas Lainnya**		1.116.609.664,00	2.347.320.267,00
72	**Saldo Akhir Kas (65 s/d 71)**	5.5.7	**51.119.851.910,77**	**39.883.613.735,24**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan

WALI KOTA TARAKAN

dr. H. KHAIRUL, M. Kes

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	**6.048.799.155.428,80**	**5.686.624.742.831,77**
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(22.808.215.968,41)	145.823.183.917,93
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.6.3		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	5.6.3.1	0,00	876.028.143,88
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	5.6.3.2	0,00	0,00
6	LAIN-LAIN	5.6.3.3	54.416.111.034,07	215.475.200.535,22
7	EKUITAS AKHIR	5.6.4	**6.080.407.050.494,46**	**6.048.799.155.428,80**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan

WALI KOTA TARAKAN

dr. H. KHAIRUL, M. Kes

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Tarakan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Tarakan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan

Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik atas sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Tarakan dengan menyediakan:

1) Informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2) Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
3) Informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluarannya;
4) Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Tarakan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
5) Informasi mengenai upaya Pemerintah Kota Tarakan mendanai seluruh aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6) Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Tarakan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dalam pungutan pajak dan pinjaman; dan
7) Informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Tarakan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan agar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Tarakan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

   LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran. Informasi tersebut diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan terhadap anggaran.

2. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

   LPSAL menyediakan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan paragraf 8 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, SAL adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

3. **Neraca**

   Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Tarakan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca per 31 Desember 2024 ini merupakan Neraca yang format penyajiannya telah disesuaikan dengan SAP. Penyusunan Neraca telah menggunakan *double entry system.* Neraca Pemerintah Daerah Kota Tarakan pertama kali disusun pada tahun 2006 dan tahun ini adalah tahun kedelapan belas penyajian Neraca.

4. **Laporan Operasional (LO)**

   LO menyediakan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-Pos Luar Biasa.

5. **Laporan Arus Kas (LAK)**

   Tujuan penyajian LAK adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2024. LAK Pemerintah Kota Tarakan disusun menggunakan metode langsung sebagaimana yang diatur dalam SAP.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyediakan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas Pemerintah Kota Tarakan tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. LPE berdasarkan Paragraf 101 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyajikan sekurang-kurangnya akun-akun Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman para penggunanya sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman akibat dari kesalahan persepsi. Setiap pos dalam Laporan Keuangan akan dijelaskan sesuai hasil konversi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan SAP yang menjadi pedoman dalam penatausahaan keuangan daerah dan pelaporannya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tarakan;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2024;

o. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2024;

p. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

q. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan

r. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

2.1 Domisili dan Bentuk Hukum Tempat Entitas

2.2 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

2.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Bab III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

3.2 Kebijakan Keuangan

3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.4 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Kebijakan Akuntansi Berkaitan Ketentuan yang Ada dalam SAP

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bab V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. Domisili dan Bentuk Hukum Tempat Entitas

Kota Tarakan merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Kalimantan Utara dikarenakan letaknya yang strategis bagi pusat transit perdagangan antar pulau. Hal tersebut juga dikarenakan Kota Tarakan merupakan tempat pertemuan arus muara Sungai Kayan, Sesayap dan Malinau. Selain itu, Kota Tarakan juga menjadi pusat transit perdagangan antar negara yaitu Indonesia, Malaysia maupun Filipina.

Secara geografis, Kota Tarakan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 18 meter di atas permukaan laut. Terletak pada posisi antara 3^0.14'30''-3^0.26'37'' Lintang Utara dan 117^0.30'50''-117^0.40'12''Bujur Timur. Luas wilayah Kota Tarakan adalah 657,33 km^2 dengan daratan seluas 250,80 km^2 dan lautan seluas 406,53 km^2. Adapun Kota Tarakan mempunyai batas-batas wilayah antara lain sebelah Utara dengan Kecamatan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan dan Laut Sulawesi; sebelah Selatan berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan; dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung.

Status Kota Madya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kota Tarakan. Selanjutnya dengan terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah berubah statusnya menjadi kota dan berdasarkan Undang-Undang tersebut terjadi perkembangan dan pemekaran wilayah yakni status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya berubah menjadi kelurahan yang berjumlah 20 (dua puluh) kelurahan. Akhir tahun 2024 wilayah administrasi Kota Tarakan terdiri dari 4 (empat) kecamatan, dengan luas daratan masing-masing Kecamatan, yaitu : Tarakan Timur (58,01 km^2), Tarakan Tengah (55,54 km^2), Tarakan Barat (27,89 km^2), dan Tarakan Utara (109,36 km^2). Berdasarkan jumlah Kelurahan sebanyak 20 Kelurahan, 7 (tujuh) Kelurahan berada di Kecamatan Tarakan Timur, 5 (lima) Kelurahan berada di Kecamatan Tarakan Tengah, 5 (lima) Kelurahan berada di Kecamatan Tarakan Barat dan 3 (tiga) Kelurahan berada di Kecamatan Tarakan Utara.

2.2. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Dalam laporan keuangan ini, yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Tarakan, dengan identitas sebagai berikut.

Nama Entitas	: Pemerintah Kota Tarakan
Alamat	: Jalan Kalimantan Nomor 1
Wali Kota	: dr. H. Khairul, M. Kes
Wakil Wali Kota	: Ibnu Saud Is
Sekretaris Daerah	: Ir. H. Jamaluddin

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kota Tarakan meliputi seluruh unsur entitas akuntansi yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Badan/Kantor. Perangkat Daerah tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Entitas Akuntansi atau Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tarakan meliputi:

a. Sekretariat Daerah terdiri dari:
    1) Bagian Pemerintahan;
    2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    3) Bagian Hukum;
    4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    5) Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa;
    6) Bagian Umum;
    7) Bagian Organisasi; dan
    8) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas Daerah, terdiri dari:
    1) Dinas Pendidikan;
    2) Dinas Kesehatan;
    3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan;
    5) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
    6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    7) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;
    8) Dinas Perikanan;
    9) Dinas Lingkungan Hidup;

10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11) Dinas Perhubungan;
12) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
17) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
18) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

e. Badan Daerah, terdiri dari:

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
2) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Kecamatan terdiri dari:

1) Kecamatan Tarakan Timur;
2) Kecamatan Tarakan Barat;
3) Kecamatan Tarakan Tengah; dan
4) Kecamatan Tarakan Utara.

Pada TA 2024, terdapat 8 (delapan) Badan Layanan Umum Daerah terdiri sebagai berikut.

1) Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;
2) Puskesmas Gunung Lingkas;
3) Puskesmas Karang Rejo;
4) Puskesmas Mamburungan;
5) Puskesmas Juata;
6) Puskesmas Sebengkok;
7) Puskesmas Pantai Amal; dan
8) Laboratorium Kesehatan Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah Kota Tarakan yang terdiri dari :

1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan;
2) Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha;
3) Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi;
4) Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri; dan
5) Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri.

1.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pemerintah Kota Tarakan berupaya menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tarakan telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Tarakan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang penerapannya ditetapkan dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Adapun dasar hukum landasan kegiatan operasional entitas dan perangkat daerah adalah sebagai berikut.

1) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
4) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
6) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
7) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
8) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
9) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

10) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
11) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
12) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
13) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
14) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
15) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
16) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
17) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
19) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
20) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
21) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;

22) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan;
23) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
24) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
25) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
27) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
28) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tarakan Utara;
29) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tarakan Timur;
30) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tarakan Tengah; dan
31) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tarakan Barat.

BAB III
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia pada tahun 2024 menunjukan pertumbuhan yang stabil meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan global yang masih membayangi, seperti fragmentasi Geokonomi, ketegangan geopolitik, hingga proyeksi ekonomi global yang tumbuh sebesar 3,2% pada 2024 dan 2025, dimana masih dibawah rata-rata historis. Pertumbuhan ekonomi ini tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat. Ekonomi Kota Tarakan Triwulan ke III-2024 terhadap Triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,79% (y-on-y) dan sebesar 5,94% (c-to-c). Secara Spasial, struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan III-2024 didominasi oleh Kota Tarakan sebesar 37,35% dan yang paling kecil Kabupaten Tana Tidung sebesar 5,99%. Pada Triwulan yang sama, kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara tercatat memiliki pertumbuhan sebesar 4,29% (y-on-y). Adapun dampaknya terhadap ekonomi makro dan regional Kota Tarakan dengan indikator berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tarakan pada Tahun 2024 sebagai berikut.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai positif 5,71%;
b. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah 56.213,80 Miliar rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010) adalah 27.112,12 Miliar rupiah;
c. Tingkat Inflasi senilai 1,60%;
d. Indeks Pembangunan Manusia senilai 77,96%;
e. *Gini Ratio* Provinsi Kalimantan Utara senilai 0,259%;
f. Tingkat Kemiskinan senilai 5,56%; dan
g. Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 5.11%.

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Kota Tarakan menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Kalimantan Utara.

Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Tarakan menempati urutan pertama dibanding laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara seperti yang ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

No.	Uraian	2022	2023	2024**
1	PDRB (harga konstan 2010)	24.218,41	25.646,82	27.112,12
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,59	5,90	5,71
3	Peringkat Provinsi	1	1	1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

3.1.2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan keadaan perekonomian pada tahun berjalan. Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam kegiatan/aktivitas memproduksi barang dan jasa sebagai hasil akhir. Struktur pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan berdasarkan harga berlaku tercermin melalui tabel berikut.

Tabel 2 PDRB Harga Berlaku Kota Tarakan

(Dalam Miliar)

Kategori	Uraian	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.127,38	5.688,26	5.744,12
B	Pertambangan dan Penggalian	2.099,13	1.983,89	2.010,97
C	Industri Pengolahan	5.236,18	5.531,01	5.789,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	45,07	56,22	58,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38,00	40,38	45,05
F	Konstruksi	7.397,37	8.116,22	8.854,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran	11.050,42	12.588,40	14.047,94
H	Transportasi dan Pergudangan	6.703,46	7.981,01	8.605,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.000,41	1.111,90	1.268,43
J	Informasi dan Komunikasi	2.016,57	2.185,36	2.309,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.095,24	1.241,00	1.337,37
L	*Real Estate*	478,51	506,06	545,70
M,N	Jasa Perusahaan	217,83	233,03	250,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.820,16	1.909,85	2.011,11
P	Jasa Pendidikan	1.408,25	1.532,72	1.681,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	966,17	1.001,10	1.021,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	505,74	565,60	633,04
Produk Domestik Regional Bruto		**47.205,89**	**52.272,01**	**56.213,80**

Grafik 1 Struktur PDRB Menurut lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2024

(Dalam Miliar)

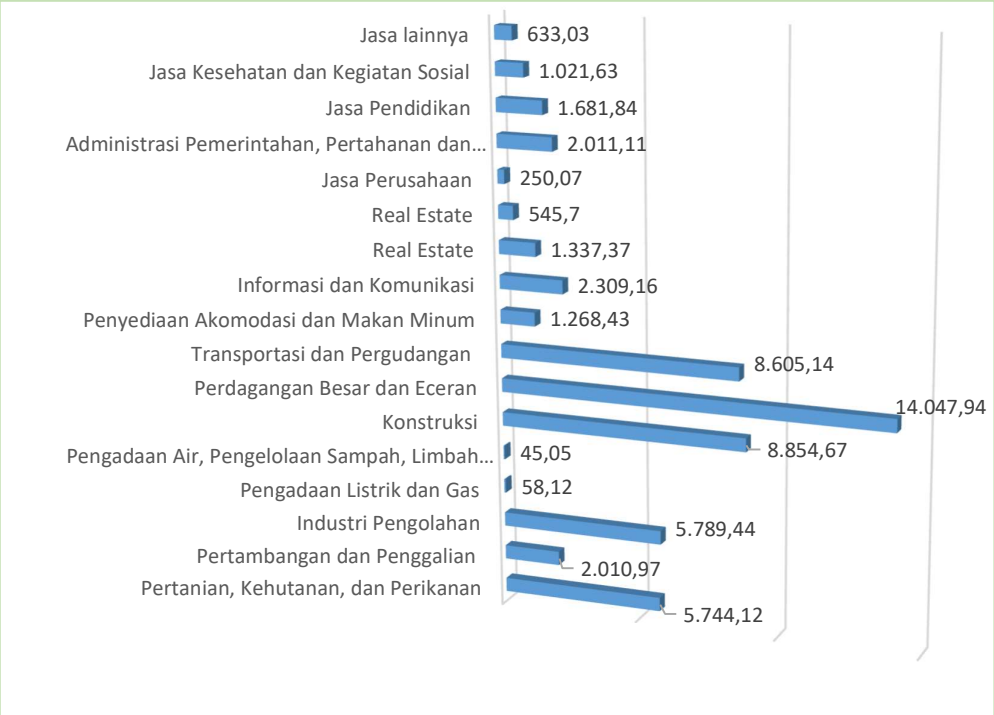

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

Berdasarkan grafik 1 tersebut di atas dapat dilihat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha, pada tahun 2024 distribusi tertinggi di Kota Tarakan terdapat pada perdagangan besar dan eceran. Kemudian diikuti oleh konstruksi, transportasi dan pergudangan serta industri pengolahan. Sedangkan struktur pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan berdasarkan harga konstan ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 3 PDRB Harga Konstan Kota Tarakan

(Dalam Miliar)

Kategori	Uraian	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.034,44	3.217,96	3.234,56
B	Pertambangan dan Penggalian	1.098,42	1.115,28	1.115,81
C	Industri Pengolahan	2.739,80	2.816,55	2.871,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33,13	39,36	40,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,97	22,12	23,99
F	Konstruksi	3.469,75	3.793,96	4.138,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran	5.361,36	5.750,02	6.296,67
H	Transportasi dan Pergudangan	2.947,40	3.087,89	3.266,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	429,47	461,76	512,79
J	Informasi dan Komunikasi	1.307,57	1.382,89	1.444,26

Kategori	Uraian	2022	2023*	2024**
Kategori	Uraian	2022	2023*	2024**
K	*Real Estate*	622,20	694,87	737,60
L	*Real Estate*	320,17	332,17	351,93
M,N	Jasa Perusahaan	126,37	132,59	140,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.092,54	1.109,51	1.159,35
P	Jasa Pendidikan	780,92	821,82	883,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	598,37	614,21	617,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	235,53	253,86	277,67
Produk Domestik Regional Bruto		**24.218,41**	**25.646,82**	**27.112,12**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

Pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan tahun 2024 berdasarkan harga konstan menurut lapangan usahanya tetap ditentukan sebagian besar oleh perdagangan, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, Transportasi, dan industri pengolahan.

Secara khusus pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan berdasarkan harga konstan menunjukkan nilai yang lebih rendah bila dibandingkan dasar harga berlaku. Kedua nilai PDRB tersebut sangat ditentukan dari komponen pembentuknya diantaranya komponen Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Lembaga Nirlaba, sedangkan Konsumsi Pemerintah juga sangat mempengaruhi PDRB Kota Tarakan.

3.1.3. Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Tarakan juga dipengaruhi tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Kondisi stabilitas ekonomi makro seperti laju inflasi yang mempengaruhi perekonomian Tarakan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4 Tingkat Inflasi

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	3,93	2,46	1,60
Tingkat Inflasi Provinsi (%)	4,74	2,44	1,29
Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57
Peringkat Nasional	87	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

Tingkat inflasi di Kota Tarakan tahun 2024 menurut data BPS Kota Tarakan menunjukkan angka senilai 1,60% atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2023 senilai 2,46%. Pada tahun 2024 inflasi Kota Tarakan masih tergolong lebih tinggi bila dibandingkan tingkat inflasi nasional yang senilai 1,57%.

3.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60≤IPM<70);
c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
d. Sangat Tinggi (>80).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kota Tarakan dalam kurun waktu 3 tahun, angka IPM Kota Tarakan terus meningkat dari 76,23 pada tahun 2021 menjadi 77,53 pada tahun 2023, dan menjadi peringkat pertama di antara Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara. IPM Kota Tarakan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia (UHH LFSP2020)

IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten/Kota	76,75	77,61	78,03
Provinsi	72,21	72,88	73,41
Indonesia/Nasional	73,77	74,39	75,02
Peringkat Provinsi	1	1	1
Peringkat Nasional	92	88	91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

Realisasi pencapaian IPM Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai 77,96 poin, dibandingkan tahun 2023 senilai 77,53 poin mengalami peningkatan senilai 0,43 poin. Peningkatan IPM tersebut sangat dipengaruhi tingkat Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup yang berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Pada tahun 2024 komponen IPM yaitu angka harapan hidup mencapai 74,11 tahun, rata-rata lama sekolah selama 10,37 tahun dengan harapan usia sekolah 14,22

tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun senilai Rp12.451.000,00 atau naik Rp459.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 2 Indeks Pembangunan Manusia 2019-2024

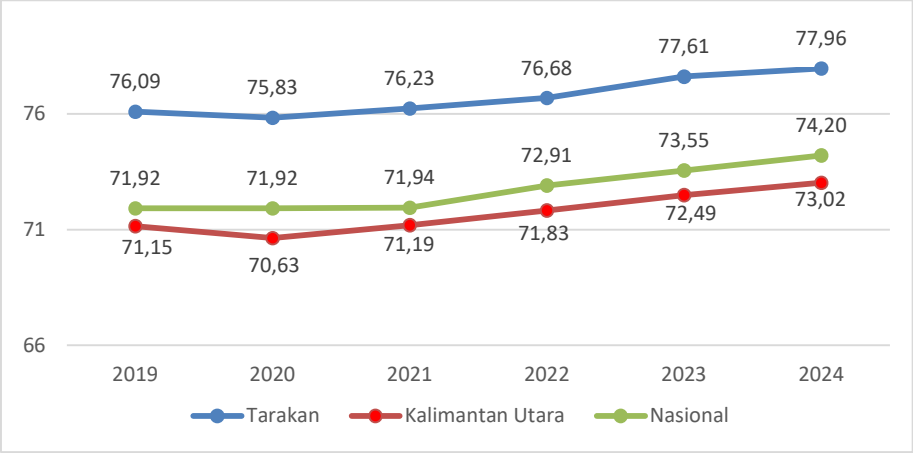

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar tersebut, selama lima tahun terakhir IPM Kota Tarakan selalu berada pada posisi teratas dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan pada tahun 2024 berada pada urutan ke- 81 untuk peringkat nasional dari 548 Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Upaya Pemerintah Kota Tarakan dalam meningkatkan IPM tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut.

a. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat demi tercapainya Indikator UHH. Hal tersebut sangat bergantung pada program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 6 Program Pendukung Indikator Usia Harapan Hidup

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	34.111.255.942,00	30.413.550.292,63	89,16
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	561.746.899,00	475.179.642,00	84,59
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	455.283.550,00	369.461.527,00	81,15
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.866.155.000,00	1.810.783.000,00	97,03
5	Program Pengendalian Penduduk	435.027.440,00	394.901.486,00	90,78
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.825.152.250,00	2.600.603.512,00	92,05

Sumber : LKPJ Kota Tarakan 2024

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan masyarakat demi tercapainya indikator HLS dan indikator RLS. Hal tersebut ditunjukkan dari pelaksanaan

program yang berjalan dengan baik oleh Pemerintah Kota Tarakan pada tabel berikut.

Tabel 7 Program Pendukung Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	101.584.031.495,00	96.807.182.623,76	95,30
2	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	24.999.940,00	23.700.000,00	94,80
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	553.193.200,00	526.796.898,00	95,23
4	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	375.000.000,00	357.420.000,00	95,31
5	Program Pembinaan Perpustakaan	496.114.380,00	450.670.900,00	90,84
6	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	34.973.960,00	34.339.000,00	98,18

Sumber : LKPJ Kota Tarakan 2024

3.1.5. *Gini Ratio*

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat di Kota Tarakan. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Realisasi pencapaian *Gini Ratio* tahun 2023 adalah senilai 0,292 sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dan grafik berikut.

Tabel 8 *Gini Ratio*

Provinsi / Nasional	*Gini Ratio*		
	2022	2023	2024
Kota Tarakan	0,267	0,253	0,232
Kalimantan Utara	0,270	0,292	0,259
Nasional	0,381	0,388	0,381
Peringkat Provinsi di Kalimantan	1	1	1
Peringkat Provinsi di Nasional	2	2	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

Grafik 3 *Gini Ratio* 2020-2024

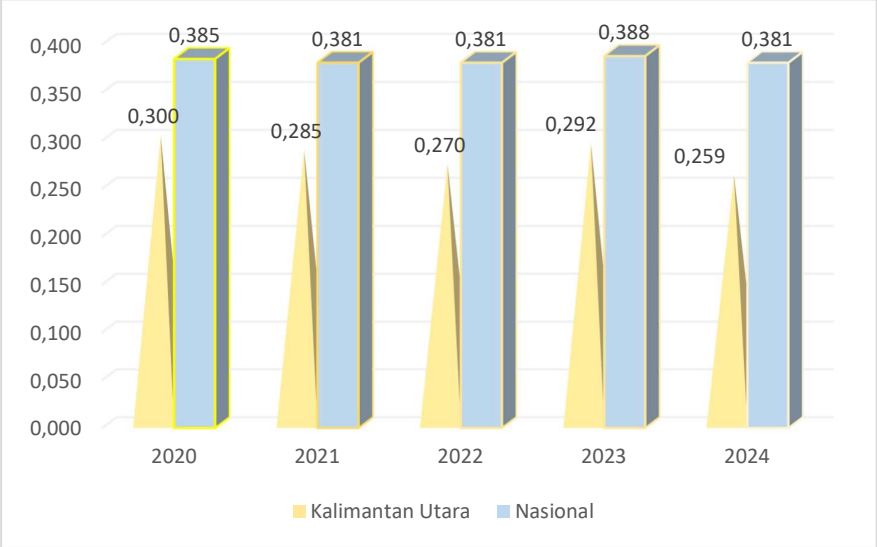

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024, diperoleh nilai *Gini Ratio* Kota Tarakan periode tahun 2022, 2023 masing senilai 0,267, 0,253 dan tahun 2024 senilai 0,232

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara diukur oleh *Gini Ratio* senilai 0,232 dan berada peringkat 2 dari provinsi lain atau lebih baik jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Nasional senilai 0,381.

3.1.6. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/kota periode tertentu.

Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di

satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah tingkat kemiskinannya.

Garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp854.967,00. Dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 17,33 ribu jiwa, meningkat menjadi 17,57 ribu jiwa pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya di 16,75 ribu jiwa pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 16,49 ribu jiwa dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi 15,32 ribu jiwa dengan persentase sebesar 5,56%.

Tabel 9 Tingkat Kemiskinan Nasional/Provinsi/Kota

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik / Turun
Tingkat Kemiskinan (%)					
1	Kota Tarakan	6,30	6,10	5,56	(0,54)
2	Provinsi Kalimantan Utara	6,77	6,45	6,32	(0,13)
3	Nasional	9,54	9,36	9,03	(0,33)
4	Peringkat Provinsi	3	3	4	
Jumlah Penduduk Misikn (Ribu Jiwa)					
1	Kota Tarakan	16,75	16,49	15,32	(1,17)
2	Provinsi Kalimantan Utara	49,47	47,97	47,83	(0,14)
3	Nasional	26.161,16	25.898,55	25.219,20	(679,35)
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara mengalami Penurunan pada tahun 2024 menjadi senilai 47,83 ribu jiwa (turun sebesar 0,14%). Sedangkan bila dirinci lagi dari jumlah tersebut, terdapat penduduk miskin di Kota Tarakan sebanyak 15,32 ribu jiwa (mengalami penurunan sebesar 1,17%) dibandingkan tahun 2023.

Upaya Pemerintah Kota Tarakan dalam menekan tingkat kemiskinan tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut.

a. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang secara empiris berkorelasi positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan; dan
b. Melaksanakan program penanggulangan kemiskinan berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Tabel 10 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan

No.	Uraian	Tahun			Naik/turun
		2022	2023	2024	
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	0,73	0,79	0,50	(0,29)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,89	0,64	0,82	0,18
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,59	1,53	1,46	(0,07)
4	Peringkat Provinsi	3	4	9	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

Tabel 11 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Tarakan

No.	Uraian	Tahun			Naik/turun
		2022	2023	2024	
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,13	0,19	0,08	(0,11)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,19	0,11	0,19	0,08
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,39	0,38	0,35	(0,03)
4	Peringkat Provinsi	3	1	10	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

Kenaikan garis kemiskinan yang diiringi dengan peningkatan tingkat kemiskinan membuktikan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya perihal persentase penduduk miskin, namun tingkat kemiskinan juga dilihat dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dari masyarakat daerah tersebut.

Tabel 12 Program Pendukung dari Sasaran Menurunnya Kemiskinan

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemberdayaan Sosial	99.836.580,00	68.043.001,00	68,15
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	197.002.120,00	157.278.840,00	79,84
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	102.777.045,00	81.578.940,00	79,37
4	Program Penanganan Bencana	49.990.000,00	14.950.000,00	29,91

Sumber : LKPJ Kota Tarakan 2024

3.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah, Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang, dan Harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja serta terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Tarakan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan tahun 2023 adalah senilai 5,25%.

Tabel 13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan

Tingkat Pengangguran	Tahun			Naik/turun
	2022	2023	2024	
Kota Tarakan	5,76	5,25	5,11	(0,14)
Provinsi Kalimantan Utara	4,33	4,01	3,90	(0,11)
Nasional	5,86	5,32	4,91	(0,41)
Peringkat Provinsi	23	24	14	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tarakan tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka senilai 5,11% bila dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2023 senilai 5,25% maka terdapat penurunan senilai 0,14%. TPT Kota Tarakan masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Utara 3,90% dan TPT Nasional yang senilai 4,91%.

Secara umum indikator ketenagakerjaan di Kota Tarakan mengalami perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Di tahun 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Tarakan sebesar 63,64% yang mana mengalami penurunan sebesar 2,50% dibanding dengan tahun 2023. Selain itu, TPT juga mengalami penurunan.

Upaya Pemerintah Kota Tarakan dalam menekan angka pengangguran adalah melaksanakan program-program di SKPD teknis terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Adapun Program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Upaya Pemerintah Kota Tarakan dalam menekan angka pengangguran adalah melaksanakan program-program di SKPD teknis terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Adapun Program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 14 Program Pendukung dari Sasaran Menurunnya Pengangguran

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	34.999.580,00	30.354.820,00	86,73
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	199.385.170,00	192.098.200,00	96,35
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	174.359.670,00	151.916.709,00	87,13
4	Program Hubungan Industrial	109.071.400,00	99.305.380,00	91,05

Sumber : LKPJ Kota Tarakan 2024

3.1.8. *Stunting*

Menurut organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) *stunting* adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Seorang anak didefinisikan sebagai *stunting* jika tinggi badan menurut usianya lebih dari dua standar deviasi, di bawah ketetapan Standar Pertumbuhan Anak WHO.

Penyebab *stunting* menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ada dua, yakni faktor lingkungan dan genetik. Lingkungan adalah aspek penting yang masih dapat diintervensi sehingga perawakan pendek atau *stunting* dapat diatasi. Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain status gizi ibu, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi pada anak. Selain disebabkan oleh lingkungan, *stunting* dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Namun sebagian besar *stunting* disebabkan oleh kekurangan gizi. Sesuai dengan Buku Saku SSGI 2022 tren status Gizi Balita Indonesia selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik 4 Prevalensi *Stunting* di Indonesia

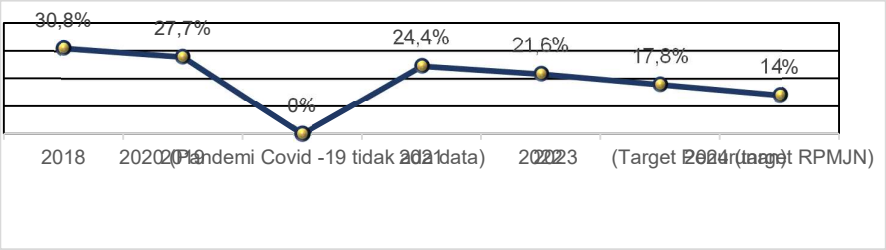

Grafik 5 Gambaran *Stunting* di Kota Tarakan berdasarkan E – PPGBM dan SSGI (%)

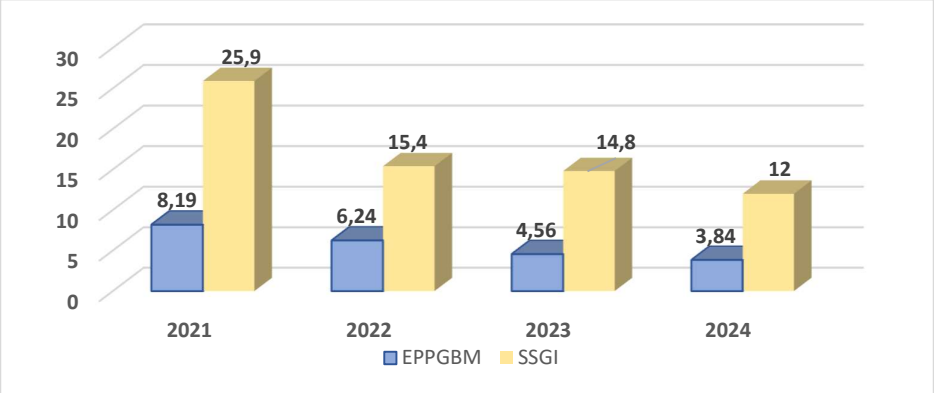

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Grafik 6 Prevalensi Balita *Stunting* berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

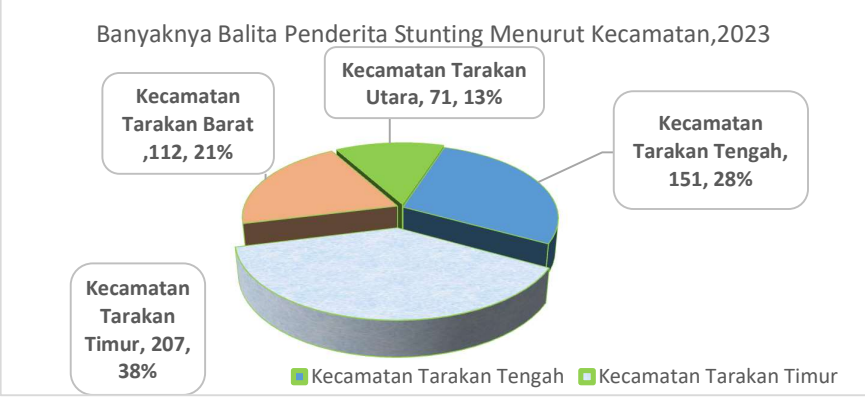

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Pemerintah Kota Tarakan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Optimis dapat menurunkan angka *Stunting* menjadi 12% pada 2025 dan di tahun 2026 sebesar 10% sesuai target *Prevalensi* Nasional, lebih dari itu pada 2030 Indonesia ditargetkan dapat bebas *stunting* sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui prinsip "*No One Left Behind*" memiliki peranan penting dalam pencegahan *stunting*. Adapun Pemerintahan Kota Tarakan berkomitmen terus melakukan percepatan penurunan *stunting* diantaranya melaksanakan program pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM, anggaran, dukungan logistik serta kemitraan. Selain itu, melakukan pembinaan dan pendampingan pada kecamatan maupun kelurahan di wilayahnya. Keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas yang telah terlaksana di masing-masing kelurahan juga diharapkan dapat mengambil peran, termasuk dalam hal deteksi dan penanganan terhadap kasus *stunting* di wilayah masing-masing.

Tabel 15 Faktor Determinan Penyebab *Stunting* di Kota Tarakan

No	Kelurahan	FAKTOR DETERMINAN																TOTAL BALITA STUNTING
		JKN		AIR BERSIH		KECACINGAN		JAMBAN SEHAT		IMUNISASI		KEBIASAAN MEROKOK		RIWAYAT IBU HAMIL		PENYAKIT PENYERTA		
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	
1	Mamburungan	27	6	33	0	1	32	27	6	28	5	26	7	8	25	0	33	33
2	Mamburungan Timur	10	4	14	0	0	14	14	0	9	5	12	2	1	13	0	14	14
3	Pantai Amal	51	43	77	17	3	91	44	50	89	5	78	16	11	83	0	94	94
4	Kampung Enam	8	1	9	0	1	8	9	0	8	1	7	2	6	3	0	9	9
5	Kampung Empat	12	2	14	0	1	13	14	0	12	2	7	7	1	13	0	14	14
6	Gunung Lingkas	16	2	18	0	0	18	17	1	17	1	10	8	0	18	0	18	18
7	Lingkas Ujung	22	3	25	0	1	24	22	3	24	1	19	6	1	24	0	25	25
8	Selumit Pantai	38	14	52	0	1	51	18	34	50	2	43	9	4	48	4	48	52
9	Selumit	13	0	13	0	0	13	13	0	13	0	10	3	1	12	1	12	13
10	Sebengkok	29	10	38	1	1	38	32	7	33	6	29	10	5	34	2	37	39
11	Pamusian	9	1	10	0	0	10	10	0	10	0	4	6	0	10	0	10	10
12	Kampung Satu Skip	34	3	37	0	3	34	33	4	35	2	29	8	3	34	0	37	37
13	Karang Rejo	14	5	19	0	0	19	11	8	19	0	19	0	0	19	0	19	19
14	Karang Balik	16	0	16	0	0	16	16	0	16	0	16	0	0	16	2	14	16
15	Karang Anyar	28	1	29	0	1	28	15	14	28	1	28	1	1	28	2	27	29
16	Karang Anyar Pantai	30	2	32	0	22	10	0	32	2	30	30	2	0	32	2	30	32
17	Karang Harapan	12	4	12	4	4	12	16	0	14	2	5	11	4	12	4	12	16
18	Juata Permai	16	11	27	0	11	16	13	14	27	0	12	15	0	27	8	19	27
19	Juata Kerikil	4	4	8	0	4	4	2	6	8	0	4	4	0	8	3	5	8
20	Juata Laut	31	5	31	5	0	36	36	0	20	16	10	26	5	31	0	36	36
	TOTAL	420	121	514	27	54	487	362	179	462	79	398	143	51	490	28	513	541
	%	22,37		4,99		9,98		33,09		14,60		73,57		9,43		5,18		

Berdasarkan Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan bahwa Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk percepatan penurunan *stunting* dengan meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pencegahan *stunting*. Sesuai dengan amanat tersebut Pemerintah Kota Tarakan telah mengalokasikan program pendukung pencegahan *stunting* sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 16 Alokasi Anggaran dan Program Penurunan Prevalensi *Stunting*

No.	Komponen Perhitungan	APBD TA 2024 (Rp)	Perubahan APBD TA 2024 (Rp)
1.	**DINKES**		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	138.500.000,00	138.492.630,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	219.767.000,00	246.717.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	187.360.900,00	150.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.817.900.000,00	2.113.571.027,00
2.	**DPPPAPPKB**		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	179.121.900,00	179.121.840,00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	29.700.000,00	29.700.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.800.000,00	2.800.000,00
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	114.770.800,00	114.770.800,00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB Petugas Lapangan KB (PKB PLKB)		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	60.000.000,00	60.000.000,00

No.	Komponen Perhitungan	APBD TA 2024 (Rp)	Perubahan APBD TA 2024 (Rp)
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Kota		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.700.000,00	29.700.000,00
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	423.779.000,00	476.830.850,00
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.409.672.600,00	1.409.672.600,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	80.000.000,00	140.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	10.000.000,00	10.000.000,00
3.	**DPUPR**		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.100.000.000,00	5.099.526.600,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
	Pembangunan penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	800.000.000,00	800.000.000,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.000.000,00	200.000.000,00
4.	**DINSOSPM**		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	46.199.585,00	46.199.585,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	36.592.500,00	36.592.500,00
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	19.984.960,00	19.984.960,00
5.	**DISKOMINFO**		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	70.000.000,00	70.000.000,00
	Pelayanan Informasi Publik	29.952.240,00	29.952.240,00
6.	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	63.047.190,00	117.347.190,00
TOTAL JUMLAH BELANJA PADA SKPD		**12.068.848.675,00**	**11.520.979.822,00**

Sumber : Data Diolah

3.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ditinjau dari APBD, keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik dalam bentuk peningkatan pelayanan.

Sebagai daerah yang mendapatkan mandat untuk mengelola keuangandi daerah, Pemerintah Daerah Kota Tarakan tidak hanya bertanggungjawab melaporkan peruntukkannya kepada masyarakat, DPRD, dan berbagai pihak lain secara terbuka, tetapi juga memastikan peruntukkannya benar-benar tepat. Unsur-unsur penting dalam tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah mencakup keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya. Praktik-praktik pemborosan dan penyalahgunaan keuangan daerah adalah hal utama yang harus dihindari, karena semua pelaksanaan program harus dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di semester kedua TA 2024, Kebijakan antisipatif perlu diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBD. Dalam rangka antisipasi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik dalam negeri di tengah tantangan kenaikan harga komoditas energi dunia, Pemerintah Kota Tarakan juga perlu melakukan langkah responsif bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasional Perangkat Daerah yang terdampak oleh kenaikan harga bahan baku komoditas energi, agar penyediaan energi dan pelayanan

kepada masyarakat dapat berjalan dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Kota Tarakan juga melakukan penebalan perlindungan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Sepanjang tahun 2024, beberapa agenda penting yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka pengelolaan APBD yang sehat, *prudent*, fleksibel, dan responsif, diantaranya adalah Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan APBD Perubahan TA 2024. Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Semester II Laporan Pelaksanaan APBD TA 2024 juga telah dilakukan sebagai dasar untuk Perubahan APBD TA 2024. Adapun terhadap kebijakan keuangan atas kewajiban atau utang, Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk mengelola utang dan perencanaan pembayarannya dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, Pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBD TA 2024. Adapun kebijakan keuangan Pemerintah Kota Tarakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan;
c. Penganggaran Retribusi Daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan telah memperhatikan biaya penanganan sampah;
d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
e. Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 telah memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
f. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
g. Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah telah mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah

(BMD) dalam bentuk sewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan penganggaran Belanja Pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
   1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2) Pemerintah Daerah Kota Tarakan mengalokasikan Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan.

b. Kebijakan penganggaran Belanja Barang dan Jasa memperhatikan ketentuan:
   1) Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Wali Kota, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan.

c. Kebijakan penganggaran Belanja Modal memperhatikan ketentuan Pemerintah Daerah Kota Tarakan harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;

b. Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
c. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

3.3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

APBD Kota Tarakan TA 2024 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Selama TA 2024, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember terdapat Realisasi Pendapatan yang diperoleh dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah senilai Rp1.284.583.410.452,21 atau mencapai 97,03% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp1.323.855.180.144,00. Sedangkan Realisasi Belanja senilai Rp1.271.345.838.376,68 atau 93,36% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.361.736.716.779,24 dan Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 adalah nihil. Adapun Pembiayaan Neto adalah senilai Rp37.882.279.835,24 sehingga menghasilkan SiLPA senilai Rp51.119.851.910,77. Tabel berikut menunjukkan gambaran lebih rinci tentang realisasi pendapatan dan belanja yang dicapai oleh Pemerintah Kota Tarakan TA 2024.

Tabel 17 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	199.158.644.474,00	205.269.290.692,21	103,07	174.950.040.888,63
Pendapatan Transfer	1.124.696.535.670,00	1.079.314.119.760,00	95,96	983.549.492.817,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	3.412.403.462,00
Jumlah Pendapatan	**1.323.855.180.144,00**	**1.284.583.410.452,21**	**97,03**	**1.161.911.937.167,63**
Belanja Operasi	1.040.988.134.095,24	963.247.367.161,54	92,53	868.710.123.387,81
Belanja Modal	317.948.582.684,00	307.874.591.715,14	96,83	396.040.018.311,52
Belanja Tak Terduga	2.800.000.000,00	223.879.500,00	8,00	767.355.931,00
Jumlah Belanja	**1.361.736.716.779,24**	**1.271.345.838.376,68**	**93,36**	**1.265.517.497.630,33**
Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus / (Defisit)	**(37.881.536.635,24)**	**13.237.572.075,53**	**(34,94)**	**(103.605.560.462,70)**
Pembiayaan Neto	37.881.536.635,24	37.882.279.835,24	100,00	143.487.097.097,94
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**	**51.119.851.910,77**	**0,00**	**39.881.536.635,24**

Pada tahun 2024 kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Tarakan tetap mengalami peningkatan positif dari segi realisasi pendapatan selama TA 2024 menjadi senilai Rp1.284.583.410.452,21 atau naik senilai 10,56%. Sedangkan dari segi pengeluaran atau belanja daerah terealisasi senilai Rp1.271.345.838.376,68 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya senilai 0,46%. Fluktuasi realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 18 Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Tahun 2017-2024

Tahun	Pendapatan (Rp)	%	Belanja (Rp)	%
2017	774.265.955.603,07	(23,68)	782.139.143.811,88	(15,61)
2018	885.538.700.521,69	14,37	880.654.610.999,49	12,60
2019	920.721.653.011,36	3,97	763.693.529.822,31	(13,28)
2020	924.448.557.055,66	0,40	990.158.020.064,64	29,65
2021	1.064.701.502.962,04	15,17	971.765.198.844,15	(1,86)
2022	1.096.423.300.213,83	2,98	1.098.635.335.157,23	13,06
2023	1.161.911.937.167,63	5,97	1.265.517.497.630,33	15,19
2024	1.284.583.410.452,21	10,56	1.271.345.838.376,68	0,46

Sumber : Data Diolah

Grafik 7 Fluktuasi Pendapatan dan Belanja Kota Tarakan

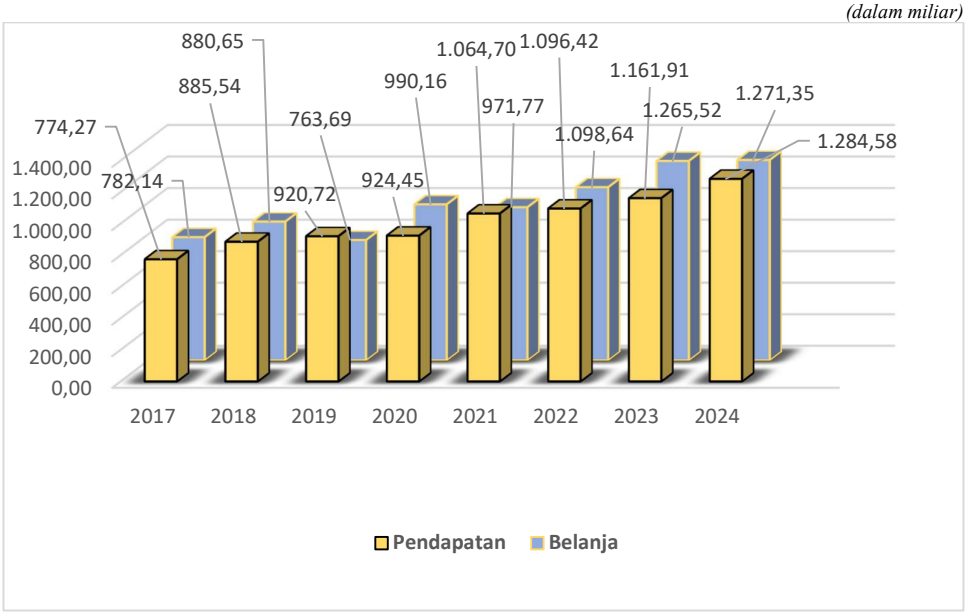

Sumber : Data Diolah

Peningkatan yang positif dari sisi Pendapatan Daerah pada tahun 2024 juga salah satunya disebabkan terdapat penetapan tambahan terhadap 1 (satu) buah Puskesmas dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis menjadi BLUD yang kemudian menunjukkan pengelolaan keuangan yang semakin jelas dan terarah sehingga turut mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Tarakan. Sedangkan dari sektor belanja telah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efisiensi dan efektivitas belanja daerah diantaranya memaksimalkan penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang cukup besar.

Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2024 mencapai 97,03%, dari pendapatan tersebut dapat diketahui bahwa capaian setiap item Pendapatan Asli Daerah berbeda beda yang dikarenakan berbagai situasi dan kondisi sebagai berikut.

a. Pajak Daerah dengan capaian 108,51%, dapat dikatakan sangat baik dan melebihi dari target yang telah ditetapkan mengingat tingkat kesadaran Wajib Pajak pada tahun 2024 terjadi peningkatan;
b. Retribusi Daerah dengan capaian 98,90%, terdapat Peningkatan pada retribusi tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 hal ini dikarenakan ada beberapa Retribusi Daerah yang melebihi dari target khususnya retribusi dari terminal yang memperoleh realisasi senilai Rp1.957.026.941,00 dari target senilai Rp68.000.000,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan capaian 96,29%, dapat dikatakan cukup baik terdapat peningkatan; dan
d. Lain-lain PAD yang Sah dengan capaian 98,88% dapat dikatakan sangat baik dan hampir mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2024 realisasi Belanja Daerah senilai Rp1.271.345.838.376,68 atau 93,36%. Beberapa Belanja Modal capaiannya masih di bawah dari yang ditargetkan dikarenakan beberapa hal khususnya Belanja Modal Tanah dengan capaian 76,05%, hal itu terjadi karena target tanah dan pembebasan lahan yang akan dibayarkan masih belum selesai administrasinya.

Adapun secara ringkas, pencapaian kinerja berdasarkan belanja urusan Pemerintah Kota Tarakan dalam pelaksanaan APBD TA 2024 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Per Urusan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(Kurang) / Lebih	(%)
A	**Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**862.261.886.442,24**	**820.759.473.171,86**	**41.502.413.270,38**	**95,19**
1	Pendidikan	317.421.569.854,24	307.428.080.973,28	9.993.488.880,96	96,85
2	Kesehatan	180.304.787.348,00	160.293.348.718,58	20.011.438.629,42	88,90
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	269.498.072.643,00	262.214.905.963,00	7.283.166.680,00	97,30
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	55.570.992.900,00	54.363.597.739,00	1.207.395.161,00	97,83
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	32.072.904.491,00	29.972.815.162,00	2.100.089.329,00	93,45
6	Sosial	7.393.559.206,00	6.486.724.616,00	906.834.590,00	87,73
B	**Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**168.315.954.484,00**	**158.031.902.451,79**	**10.284.052.032,21**	**93,89**
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.379.573.220,00	8.694.762.528,00	684.810.692,00	92,70
2	Pangan	14.359.475.863,00	14.147.166.843,00	212.309.020,00	98,52
3	Lingkungan Hidup	34.901.358.768,00	33.180.302.981,98	1.721.055.786,02	95,07
4	Administrasi Kependudukan dan Capil	5.617.372.679,00	5.248.365.986,00	369.006.693,00	93,43
5	Perhubungan	39.273.355.669,00	36.737.108.120,00	2.536.247.549,00	93,54
6	Komunikasi dan Informatika	7.760.915.369,00	7.368.771.950,00	392.143.419,00	94,95
7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.771.544.615,00	8.926.093.048,84	845.451.566,16	91,35
8	Penanaman Modal	7.555.917.012,00	7.160.959.899,00	394.957.113,00	94,77
9	Kebudayaan	34.034.601.212,00	31.196.590.184,00	2.838.011.028,00	91,66
10	Perpustakaan	5.661.840.077,00	5.371.780.910,97	290.059.166,03	94,88
C	**Urusan Pemerintah Pilihan**	**22.635.036.965,00**	**20.975.781.937,00**	**1.659.255.028,00**	**92,67**
1	Kelautan dan Perikanan	14.849.142.703,00	14.137.732.959,00	711.409.744,00	95,21
2	Perindustrian	7.785.894.262,00	6.838.048.978,00	947.845.284,00	87,83
D	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**108.777.377.875,00**	**103.108.005.720,00**	**5.669.372.155,00**	**94,79**
1	Sekretariat Daerah	56.384.977.356,00	52.497.985.953,00	3.886.991.403,00	93,11
2	Sekretariat DPRD	52.392.400.519,00	50.610.019.767,00	1.782.380.752,00	96,60
E	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintah**	**106.085.968.806,00**	**77.220.170.258,00**	**28.865.798.548,00**	**72,79**
1	Perencanaan	8.928.453.583,00	8.281.221.474,00	647.232.109,00	92,75
2	Keuangan	77.420.254.549,00	52.098.421.706,00	25.321.832.843,00	67,29
3	Kepegawaian	19.737.260.674,00	16.840.527.078,00	2.896.733.596,00	85,32
F	**Unsur Pengawasan Urusan pemerintah**	**8.653.856.416,00**	**8.157.351.476,00**	**496.504.940,00**	**94,26**
1	Inspektorat	8.653.856.416,00	8.157.351.476,00	496.504.940,00	94,26
G	**Unsur Kewilayahan**	**60.162.269.097,00**	**58.763.185.953,03**	**1.399.083.143,97**	**97,67**
1	Kecamatan	60.162.269.097,00	58.763.185.953,03	1.399.083.143,97	97,67
H	**Unsur Pemerintahan Umum**	**24.844.366.694,00**	**24.329.967.409,00**	**514.399.285,00**	**97,93**
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	24.844.366.694,00	24.329.967.409,00	514.399.285,00	97,93
	Jumlah Belanja Daerah	**1.361.736.716.779,24**	**1.271.345.838.376,68**	**90.390.878.402,56**	**93,36**

Pencapaian kinerja berdasarkan urusan tersebut sangat ditentukan dari pencapaian program yang berupa serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan representasi dari peran Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran Pembangunan. Pemerintah Kota Tarakan telah merencanakan dan merealisasikan program-program dalam pelaksanaan APBD TA 2024 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Per Program TA 2024

No.	Uraian Program	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	214.731.360.119,24	209.651.569.651,52	97,63
2	Pengelolaan Pendidikan	101.584.031.495,00	96.807.182.623,76	95,30
3	Pengembangan Kurikulum	152.985.100,00	61.411.800,00	40,14
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	553.193.200,00	526.796.898,00	95,23
5	Pengendalian Perizinan Pendidikan	24.999.940,00	23.700.000,00	94,80
6	Pengembangan Bahasa dan Sastra	375.000.000,00	357.420.000,00	95,31
7	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.665.255.898,00	53.683.458.934,53	87,06
8	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	34.111.255.942,00	30.413.550.292,63	89,16
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	561.746.899,00	475.179.642,00	84,59
10	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	455.283.550,00	369.461.527,00	81,15
11	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.866.155.000,00	1.810.783.000,00	97,03
12	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77.810.226.216,00	69.997.486.201,42	89,96
13	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.834.863.843,00	3.543.429.121,00	92,40
14	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.701.557.302,00	11.072.408.952,00	87,17
15	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	37.359.652.500,00	35.764.843.167,00	95,73
16	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.099.526.600,00	5.074.963.915,00	99,52
17	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	4.001.500.000,00	3.921.674.000,00	98,01
18	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.030.000.000,00	1.022.302.400,00	99,25
19	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	33.799.680.000,00	33.685.048.700,00	99,66
20	Penataan Bangunan Gedung	28.999.019.874,00	26.992.117.817,00	93,08
21	Penyelenggaraan Jalan	145.527.624.617,00	143.951.110.434,00	98,92
22	Pengembangan Jasa Konstruksi	49.729.360,00	39.297.274,00	79,02
23	Penyelenggaraan Penataan Ruang	929.782.390,00	691.139.304,00	74,33
24	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.896.121.470,00	6.608.812.666,00	95,83
25	Pengembangan Perumahan	155.346.050,00	145.242.900,00	93,50
26	Kawasan Permukiman	4.488.527.890,00	4.344.242.744,00	96,79
27	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.569.999.910,00	2.563.521.020,00	99,75
28	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	36.961.008.500,00	36.378.357.962,00	98,42
29	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.130.931.060,00	22.496.681.986,00	93,23
30	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	350.303.480,00	324.163.500,00	92,54
31	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.314.965.640,00	1.247.155.500,00	94,84

No.	Uraian Program	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian (%)
32	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.756.998.223,00	4.438.422.724,00	93,30
33	Penanggulangan Bencana	1.519.706.088,00	1.466.391.452,00	96,49
34	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.182.237.871,00	3.748.261.456,00	89,62
35	Pemberdayaan Sosial	99.836.580,00	68.043.001,00	68,15
36	Rehabilitasi Sosial	197.002.120,00	157.278.840,00	79,84
37	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	102.777.045,00	81.578.940,00	79,37
38	Penanganan Bencana	49.990.000,00	14.950.000,00	29,91
39	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	76.945.900,00	74.407.200,00	96,70
40	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.960.833.422,00	6.078.020.212,00	87,32
41	Perencanaan Tenaga Kerja	34.999.580,00	30.354.820,00	86,73
42	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	199.385.170,00	192.098.200,00	96,35
43	Penempatan Tenaga Kerja	174.359.670,00	151.916.709,00	87,13
44	Hubungan Industrial	109.071.400,00	99.305.380,00	91,05
45	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.958.759.083,00	3.793.455.952,00	95,82
46	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	263.842.640,00	263.053.800,00	99,70
47	Perlindungan Perempuan	283.388.190,00	244.040.307,00	86,12
48	Peningkatan Kualitas Keluarga	45.649.290,00	44.658.150,00	97,83
49	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	5.451.960,00	4.605.750,00	84,48
50	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	265.251.100,00	252.373.633,00	95,15
51	Perlindungan Khusus Anak	434.099.817,00	342.597.017,00	78,92
52	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.809.009.783,00	6.692.713.915,00	98,29
53	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	11.939.360,00	10.952.000,00	91,73
54	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	222.427.290,00	217.718.190,00	97,88
55	Penanganan Kerawanan Pangan	40.515.670,00	38.534.700,00	95,11
56	Pengawasan Keamanan Pangan	52.404.230,00	50.424.800,00	96,22
57	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	29.989.460,00	25.518.300,00	85,09
58	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	4.450.000.000,00	4.282.346.597,00	96,23
59	Penatagunaan Tanah	19.999.620,00	15.555.550,00	77,78
60	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.020.036.321,00	26.525.670.863,00	94,67
61	Perencanaan Lingkungan Hidup	256.550.000,00	208.439.500,00	81,25
62	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	631.031.183,00	606.136.726,65	96,05
63	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.928.038.334,00	1.901.750.803,33	98,64
64	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	68.066.940,00	63.961.271,00	93,97
65	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	72.162.800,00	43.270.863,00	59,96
66	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	97.779.280,00	92.325.275,00	94,42
67	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	76.188.350,00	73.302.119,00	96,21
68	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	16.653.000,00	14.910.000,00	89,53
69	Pengelolaan Persampahan	3.734.852.560,00	3.650.535.561,00	97,74
70	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.343.774.919,00	4.986.837.088,00	93,32
71	Pendaftaran Penduduk	153.091.120,00	147.187.098,00	96,14

No.	Uraian Program	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian (%)
72	Pencatatan Sipil	21.208.440,00	21.200.000,00	99,96
73	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	93.408.440,00	88.518.800,00	94,77
74	Pengelolaan Profil Kependudukan	5.889.760,00	4.623.000,00	78,49
75	Administrasi Pemerintahan Desa	43.885.410,00	37.754.909,00	86,03
76	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.640.884.280,00	2.304.450.270,00	87,26
77	Pengendalian Penduduk	435.027.440,00	394.901.486,00	90,78
78	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.825.152.250,00	2.600.603.512,00	92,05
79	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	862.951.450,00	754.472.921,00	87,43
80	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.639.538.105,00	13.356.945.576,00	85,40
81	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	22.897.777.434,00	22.698.776.038,00	99,13
82	Pengelolaan Pelayaran	736.040.130,00	681.386.506,00	92,57
83	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.321.292.747,00	5.063.545.893,00	95,16
84	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.416.959.332,00	1.371.264.000,00	96,78
85	Pengelolaan Aplikasi Informatika	917.815.000,00	844.810.057,00	92,05
86	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.288.564.815,00	5.650.266.440,00	89,85
87	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2.000.000,00	1.973.580,00	98,68
88	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10.000.000,00	9.971.676,00	99,72
89	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	10.000.000,00	9.916.180,00	99,16
90	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	50.000.000,00	41.848.550,00	83,70
91	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	5.000.000,00	4.989.360,00	99,79
92	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	450.000.000,00	414.519.173,00	92,12
93	Pengembangan UMKM	574.000.000,00	567.798.448,00	98,92
94	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.816.755.482,00	6.493.914.118,00	95,26
95	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	43.014.700,00	31.811.510,00	73,95
96	Promosi Penanaman Modal	55.973.440,00	49.001.300,00	87,54
97	Pelayanan Penanaman Modal	147.446.740,00	139.186.076,00	94,40
98	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	450.617.000,00	413.182.795,00	91,69
99	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	42.109.650,00	33.864.100,00	80,42
100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.832.202.828,00	9.133.551.947,00	84,32
101	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	939.623.130,00	430.023.689,00	45,77
102	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.848.927.702,00	8.692.012.065,00	98,23
103	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
104	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	69.889.910,00	64.425.400,00	92,18
105	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	34.958.380,00	24.726.600,00	70,73
106	Pengembangan Kebudayaan	2.849.979.780,00	2.751.902.710,00	96,56
107	Pengembangan Kesenian Tradisional	507.504.760,00	406.804.000,00	80,16
108	Pembinaan Sejarah	64.994.650,00	64.985.000,00	99,99
109	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	653.822.870,00	641.453.188,00	98,11
110	Pengelolaan Permuseuman	1.535.224.622,00	1.512.176.215,00	98,50
111	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.970.567.687,00	4.743.527.236,97	95,43
112	Pembinaan Perpustakaan	496.114.380,00	450.670.900,00	90,84
113	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	34.973.960,00	34.339.000,00	98,18
114	Pengelolaan Arsip	110.185.150,00	99.987.274,00	90,74

No.	Uraian Program	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian (%)
115	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	49.998.900,00	43.256.500,00	86,51
116	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.230.578.823,00	4.870.712.111,00	93,12
117	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.910.922.040,00	4.792.706.033,00	97,59
118	Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.168.539.810,00	3.074.957.129,00	97,05
119	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	201.410.180,00	159.319.304,00	79,10
120	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.337.691.850,00	1.240.038.382,00	92,70
121	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.186.351.860,00	6.065.620.980,00	98,05
122	Pemasaran Pariwisata	999.982.950,00	887.878.790,00	88,79
123	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	415.986.060,00	410.181.600,00	98,60
124	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.849.338.320,00	4.783.037.856,00	98,63
125	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.237.674.060,00	1.236.245.562,00	99,88
126	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	165.900.770,00	156.136.160,00	94,11
127	Perizinan Usaha Pertanian	13.294.000,00	12.890.000,00	96,96
128	Penyuluhan Pertanian	956.972.380,00	948.513.660,00	99,12
129	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	5.000.000,00	0,00	0,00
130	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.101.969.600,00	2.072.695.465,84	98,61
131	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	55.000.000,00	32.862.480,00	59,75
132	Pengembangan Ekspor	145.010.200,00	59.052.466,00	40,72
133	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	60.000.000,00	51.509.380,00	85,85
134	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	15.000.000,00	8.689.850,00	57,93
135	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	281.394.590,00	262.977.637,00	93,46
136	Pengendalian Izin Usaha Industri	3.998.660,00	3.948.000,00	98,73
137	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	21.851.770,00	19.428.020,00	88,91
138	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.551.023.420,00	34.318.867.738,00	93,89
139	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	18.919.021.316,00	17.429.105.902,00	92,12
140	Perekonomian dan Pembangunan	914.932.620,00	750.012.313,00	81,97
141	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.342.572.159,00	24.786.126.061,00	94,09
142	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26.049.828.360,00	25.823.893.706,00	99,13
143	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.349.236.972,00	5.926.365.089,00	93,34
144	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	700.794.520,00	686.210.616,00	97,92
145	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	757.780.790,00	714.954.913,00	94,35
146	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.540.861.217,00	44.579.406.073,00	68,02
147	Pengelolaan Keuangan Daerah	6.511.711.960,00	3.389.370.474,00	52,05
148	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.985.743.230,00	2.379.277.015,00	79,69
149	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.381.938.142,00	1.750.368.144,00	73,49
150	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.544.944.464,00	14.279.756.060,00	86,31
151	Kepegawaian Daerah	1.363.569.810,00	865.186.432,00	63,45
152	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.828.746.400,00	1.695.584.586,00	92,72
153	Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.120.641.301,00	953.690.856,00	85,10
154	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.310.254.046,00	6.067.160.494,00	96,15
155	Penyelenggaraan Pengawasan	1.678.155.370,00	1.514.945.339,00	90,27

No.	Uraian Program	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian (%)
156	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	665.447.000,00	575.245.643,00	86,44
157	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.415.915.989,00	10.236.424.718,07	98,28
158	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50.000.000,00	40.284.995,49	80,57
159	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.506.592.580,00	5.453.665.390,47	99,04
160	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.986.330,00	29.186.000,00	97,33
161	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	283.699.459,00	263.774.200,00	92,98
162	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.786.063.224,00	10.598.892.530,00	98,26
163	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.504.894.520,00	4.470.985.897,00	99,25
164	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.992.660,00	29.974.000,00	99,94
165	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	251.483.100,00	245.761.400,00	97,72
166	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.432.116.241,00	13.249.021.832,00	98,64
167	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.739.782.290,00	4.697.761.657,00	99,11
168	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	44.982.660,00	44.170.000,00	98,19
169	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	296.666.410,00	287.809.775,00	97,01
170	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.541.262.474,00	6.876.098.143,00	91,18
171	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.017.743.860,00	2.009.358.460,00	99,58
172	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.978.440,00	20.926.330,00	99,75
173	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	210.108.860,00	209.090.625,00	99,52
174	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.430.817.424,00	3.322.331.771,00	96,84
175	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.616.301.230,00	1.584.164.252,00	98,01
176	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	17.689.714.170,00	17.652.308.146,00	99,79
177	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.611.999.430,00	1.339.459.900,00	83,09
178	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	305.534.800,00	259.776.760,00	85,02
179	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	189.999.640,00	171.926.580,00	90,49
	Jumlah	**1.361.736.716.779,24**	**1.271.345.838.376,68**	**93,36**

Berdasarkan pencapaian kinerja serta dampaknya terhadap pembangunan dan kepentingan masyarakat selama TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Penerimaan Daerah

Dari sisi penerimaan, total pendapatan yang diperoleh dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah senilai Rp1.284.583.410.452,21 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp205.269.290.692,21, Pendapatan Transfer senilai Rp1.079.314.119.760,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp0,00. Adapun

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang khusus pengalokasiannya untuk kepentingan masyarakat diantaranya dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**22.676.898.000,00**	**21.892.490.518,00**	**96,54**
Bidang Pendidikan	6.096.696.000,00	6.049.493.452,00	99,23
Bidang Kesehatan dan KB	5.586.012.000,00	4.974.283.389,00	89,05
Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	5.993.147.000,00	5.957.128.230,00	99,40
Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.001.043.000,00	4.911.585.447,00	98,21
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**93.038.394.000,00**	**85.414.961.820,00**	**91,81**
Bantuan Operasional Sekolah-Reguler	41.625.730.000,00	39.364.974.401,00	94,57
Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	34.551.805.000,00	35.020.343.000,00	101,36
Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	361.441.000,00	361.441.000,00	100,00
Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.354.389.000,00	990.916.485,00	29,54
Bantuan Operasional Pendidikan	5.075.050.000,00	4.735.486.500,00	93,31
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.566.229.000,00	2.291.548.271,00	89,30
Bantuan Operasional Kesehatan	4.091.514.000,00	1.749.320.833,00	42,75
Bantuan Operasional Pengawasan Obat dan Makanan	420.901.000,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya	800.000.000,00	793.469.830,00	99,18
Fasilitasi Penanaman Modal	191.335.000,00	107.461.500,00	56,16
Jumlah	**115.715.292.000,00**	**107.307.452.338,00**	**92,73**

b. Pengeluaran Daerah

Dari sisi pengeluaran, terdapat *Mandatory Spending* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan. *Mandatory Spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *Mandatory Spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yang dijelaskan sebagai berikut.

1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Tabel 22 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan TA 2024

No.	Komponen Perhitungan				APBD 2024 (Rp)	APBD-P 2024 (Rp)
1	a	Urusan Bidang Pendidikan:				
		1)	Belanja Operasi:			
			a)	Belanja Pegawai;	172.469.224.501,00	171.470.776.302,00
			b)	Belanja Barang dan Jasa;	78.956.346.267,00	87.540.205.326,00
			c)	Belanja Hibah;	16.110.679.700,00	16.467.707.100,00
			d)	Belanja Bantuan Sosial	1.379.000.000,00	1.379.000.000,00
		2)	Belanja Modal;		40.051.152.040,00	40.563.881.126,00
	b	Urusan Bidang Kebudayaan:				
		1)	Belanja Operasi:			
			a)	Belanja Pegawai;	0,00	0,00
			b)	Belanja Barang dan Jasa;	0,00	0,00
			c)	Belanja Hibah;	0,00	0,00
			d)	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	Belanja Modal;		0,00	0,00
	c	Urusan Bidang Perpustakaan:				
		1)	Belanja Operasi:			
			a)	Belanja Pegawai;	3.997.420.764,00	4.232.030.557,00
			b)	Belanja Barang dan Jasa;	923.502.940,00	919.941.890,00
			c)	Belanja Hibah;	0,00	0,00
			d)	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	Belanja Modal;		501.117.630,00	509.867.630,00
	d	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:				
		1)	Belanja Operasi:			
			a)	Belanja Pegawai;	7.138.162.161,00	7.138.162.161,00
			b)	Belanja Barang dan Jasa;	11.024.885.291,00	11.227.555.071,00
			c)	Belanja Hibah;	2.347.500.000,00	2.347.500.000,00
			d)	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	Belanja Modal;		13.192.383.980,00	13.321.383.980,00
	e	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:				
		1)	Belanja Transfer:			
				Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
		2)	Sub Kegiatan pada SKPD			
				Belanja Lainnya	0,00	0,00
2	**Anggaran Fungsi Pendidikan**				**348.091.375.274,00**	**357.118.011.143,00**
3	**Total Belanja Daerah**				**1.285.345.340.972,00**	**1.361.736.716.779,24**
4	**Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%**				**27,08%**	**26,23%**

2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Tabel 23 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan TA 2024

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2024 (Rp)	APBD-P 2024 (Rp)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:		
	1) Belanja Operasi:		
	a) Belanja Pegawai;	45.930.682.800,00	47.166.622.535,00
	b) Belanja Barang dan Jasa;	93.092.488.747,00	111.268.307.145,00
	c) Belanja Hibah;	300.000.000,00	300.000.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	290.000.000,00	290.000.000,00
	2) Belanja Modal;	17.935.160.651,00	21.279.857.668,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		
	1) Belanja Transfer:		
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	2) Belanja Lainnya		
	Belanja Lainnya	0,00	0,00
2	**Anggaran Kesehatan**	**157.548.332.198,00**	**180.304.787.348,00**
3	**Total Belanja Daerah**	**1.285.345.340.972,00**	**1.361.736.716.779,24**
4	**Gaji ASN**	**255.193.797.745,00**	**254.212.792.559,00**
5	**Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)**	**1.030.151.543.227,00**	**1.107.523.924.220,24**
6	**Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%**	**15,29%**	**16,28%**

3) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa.

Tabel 24 Perhitungan Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2024

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2024 (Rp)	APBD-P 2024 (Rp)
A. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik			
1	Total Belanja Daerah	1.285.345.340.972,00	1.361.736.716.779,24
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a) Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
	b) Bantuan Keuangan	0,00	0,00
2	Jumlah (a+b)	0,00	0,00
3	**Selisih (1-2)**	**1.285.345.340.972,00**	**1.361.736.716.779,24**
4	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**	**514.138.136.388,80**	**544.694.686.711,70**

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2024 (Rp)	APBD-P 2024 (Rp)
B. Belanja Infrastruktur Daerah			
5	a) Belanja Modal		
	1) Tanah	4.673.392.640,00	4.625.116.040,00
	2) Peralatan dan Mesin	39.757.444.895,00	59.024.456.961,00
	3) Bangunan dan Gedung	55.769.518.978,00	55.337.474.978,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	194.725.513.147,00	195.718.125.547,00
	5) Aset tetap lainnya	9.751.701.450,00	449.633.075,00
	6) Aset lainnya	2.133.987.333,00	2.793.776.083,00
	b) Belanja pemeliharaan	10.321.384.703,00	12.975.844.087,00
6	a) Belanja Hibah	150.392.040.386,00	150.392.040.386,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	4.757.904.000,00	4.757.904.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
7	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)**	**472.282.887.532,00**	**486.074.371.157,00**
8	**Rasio Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (3:8) x 100%**	**36,74%**	**35,70%**

Pada TA 2024 alokasi *Mandatory Spending* Infrastruktur Pelayanan Publik yang tidak mencapai 40% (kurang kurang lebih 4%) dikarenakan terdapat kewajiban pemerintah kota untuk menganggarkan pengangkatan PPPK (terutama guru dan tenaga kesehatan) yang meningkatkan total pagu belanja APBD yang menjadi pembagi persentase perhitungan *Mandatory Spending* Infrastruktur Pelayanan Publik.

4) Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total Belanja Daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tabel 25 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Pengawasan TA 2024

No.	Kegiatan Pengawasan	Alokasi Anggaran		
		Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp)	APBD-P 2024 (Rp)
1a	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	89.760.000,00	78.370.000,00
1a	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	483.422.200,00	429.188.695,00
1a	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47.197.980,00	45.380.000,00

No.	Kegiatan Pengawasan	Alokasi Anggaran		
		Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp)	APBD-P 2024 (Rp)
1b	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah	Reviu Laporan Keuangan	197.750.000,00	189.530.000,00
1c	Reviu Laporan Keuangan			
1d	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	858.060.000,00	785.235.000,00
1e	Kegiatan Pengawasan Lainnya			
1e	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Reviu Laporan Kinerja	70.890.000	70.890.000,00
1e	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Pengawasan dengan TujuanTertentu	513.077.060,00	442.405.399,00
1f	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Kerja Sama PengawasanInternal	58.488.440,00	58.488.440,00
1f	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	101.960.000,00	76.550.000,00
1f	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	89.416.800,00	69.358.399,00
1f	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	99.993.600,00	85.619.847,00
1f	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	49.963.220,00	45.997.101,00
1f	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34.850.000,00	12.750.000,00
2	Peningkatan Kapabilitas APIP	Perumusan Kebijakan Teknisdi Bidang Fasilitasi Pengawasan	383.462.200,00	341.808.695,00
3	Sarana dan Prasarana Pengawasan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.025.970,00	129.025.970,00
TOTAL			**3.207.317.470,00**	**2.860.597.546,00**
APBD 2024			**1.323.855.180.144,00**	**1.284.464.896.452,21**
% DPA Inpektorat Terhadap APBD			**0,24%**	**0,22%**

Pada TA 2024 alokasi anggaran belanja pengawasan lebih kecil dari yang disyaratkan dikarenakan pada Pemerintah Kota Tarakan memproritaskan alokasi anggaran sebagian besar untuk pembayaran utang baik Utang Jangka Pendek maupun Utang Jangka Panjang Lainnya yang segera harus diselesaikan.

3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

3.4.1. Hambatan dan Kendala

Adapun yang menjadi hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan TA 2024 adalah sebagai berikut.

a) Penyerapan Belanja Daerah tahun 2024 terealisasi senilai 93,36% terdiri dari:

1) Belanja Operasi, terealisasi senilai 92,53%;

2) Belanja Modal, terealisasi senilai 96,83%; dan

3) Belanja Tak Terduga, terealisasi senilai 8,00%.

Penyerapan yang belum optimal antara lain disebabkan karena:

1) Tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan belanja daerah;

2) Adanya perubahan regulasi dan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;

3) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah terhadap memenuhi kewajiban daerah yang harus diselesaikan sehingga berdampak juga pada penganggaran belanja daerah; dan

4) Perubahan karena adanya pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

b) Sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan, serta sumber daya manusia yang masih sangat terbatasnya atau belum memadai.

3.4.2. Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target salah satunya target pendapatan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

a. Penggalian Potensi PAD terutama Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dilakukan lebih intensif untuk memaksimalkan pendapatan di tahun 2024 maupun dimasa yang akan datang;
b. Penerapan pelayanan prima untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam mendukung peningkatan PAD melalui kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak/Retribusi dan penghapusan Denda Pajak/Retribusi;

c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan sehingga pencapaian dapat lebih optimal;
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara baik;
e. Peningkatan baik *upgrade* maupun *update* sistem aplikasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Pemerintah Kota Tarakan ataupun sistem informasi atau aplikasi pengelolaan keuangan baru bila lebih baik dan optimal; dan
f. Langkah-langkah *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan akan terus diperkuat ke depannya.

3.4.3. Upaya Peningkatan Pelayanan

Demi memberikan pelayanan prima pada masyarakat, Pemerintah Kota Tarakan memiliki produk layanan yang dapat diandalkan, diantaranya:

a. Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota Tarakan untuk memberikan pelayanan dasar dibidang air minum yang bersih dan sehat guna memenuhi hajat hidup serta meningkatkan pemerataan cakupan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pemberian pemasangan Sambungan Rumah (SR) Air Minum Gratis. Secara garis besar mekanisme pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan adanya permohonan masyarakat yang kemudian diverifikasi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan, jika pemohon memenuhi syarat maka akan dilakukan pemasangan SR. Pada tahun 2023 telah terpasang lebih dari 25.000 SR.

Diharapkan dengan dilaksanakannya program ini akan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan PAD.

b. Tarakan *Command Center* dan *Call Center* 112

Tarakan *Command Center* (TCC) merupakan pusat layanan terintegrasi yang berfungsi sebagai penerima pengaduan/pelaporan insiden darurat dan monitoring serta pengawasan dan pengendalian operasi insiden darurat seperti kebakaran dan kegawatdaruratan lainnya. Kegiatan ini merupakan jawaban atas keluhan masyarakat selama ini yang kesulitan mendapatkan bantuan baik itu pemadam kebakaran, mobil ambulans dan mobil jenazah disaat mereka membutuhkan. Pemerintah Kota Tarakan bekerja sama dengan PT. Telkom telah menyiapkan

Call Center 112 yang dapat dihubungi oleh warga Tarakan secara gratis dan pelayanan yang diberikan juga gratis. Layanan ini akan terus dikembangkan sehingga membantu terwujudnya program Tarakan *Smart City*.

c. Mal Pelayanan Publik (MPP)

Inovasi pelayanan publik lainnya yang hadir di Kota Tarakan adalah MPP, yang saat ini dikelola oleh DPMPTSP Kota Tarakan. MPP Kota Tarakan ini menjadi MPP pertama di bumi Kalimantan Utara, MPP ini terdiri 18 instansi yang telah membuka *tenant*, baik instansi vertikal maupun daerah dengan total jumlah jenis layanan mencapai 220 layanan.

Sebagai langkah pengembangan kedepan, banyak hal yang masih dapat didayagunakan oleh MPP Kota Tarakan. Pertama adalah optimalisasi aset kantor yang digunakan MPP saat ini. Opsi yang mengemuka adalah pemanfaatan sebagian ruang dan lantai gedung sebagai '*UKM Center*' yang dapat dipergunakan para pelaku UKM kuliner dan kriya khas Tarakan, sehingga MPP juga benar-benar menjelma sebagai 'mal' dimana perputaran uang terjadi serta menjadi sentra belanja di Kota Tarakan**.**

d. Kawasan Ratu Intan Pantai Amal

Sebagai kota transit yang merupakan pintu keluar masuknya orang ke Kalimantan Utara, Tarakan terus membenahi dan mengembangkan destinasi wisata. Pengembangan dan pembenahan tempat wisata yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan cukup beralasan, sebab erat kaitannya dengan PAD dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk memanjakan lidah, kawasan ini juga sudah ada puluhan *tenant* yang menjual berbagai macam kuliner. Oleh karena itu, kawasan wisata Ratu Intan Pantai Amal ini cocok untuk tempat rekreasi keluarga, acara *gathering* dan lain sebagainya. Pengelola juga menyediakan kendaraan listrik, *banana boat* dan berbagai *spot selfie* menarik.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagai dasar penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi tersebut telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan praktik akuntansi, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tarakan mengacu pada prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan tersebut maka pemerintah telah menetapkan serangkaian produk hukum yang baru terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bagi Pemerintah Daerah yang diuraikan sebagai berikut.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Tarakan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan atau LKPD. Pada Tahun 2024, Laporan Keuangan tersebut merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan seperti SKPD dan SKPKD, termasuk BLUD. Adapun Komponen Laporan keuangan yang disusun adalah sebagai berikut.

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun dan konsolidasi semua laporan keuangan termasuk laporan keuangan BLUD yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen Laporan Keuangan tersebut.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan TA 2024 adalah basis akrual, yaitu pengakuan Pendapatan, Beban, Aset, Utang dan Ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas akuntansi/entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada LRA sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kota Tarakan menyajikan saldo akun-akun tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas perbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran akun-akun dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat senilai pengeluaran kas dan setara kas atau senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat senilai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Investasi jangka pendek dicatat senilai nilai perolehan. Piutang dicatat senilai nilai nominal. Persediaan dicatat senilai Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran akun-akun laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi terkait basis akuntansi dan pengukuran akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas terdiri dari uang tunai dan saldo simpanan di bank, Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kebijakan terkait Kas dan Setara Kas, terdiri dari:

1. Pengakuan

Kas dan Setara Kas diakui pada saat:

a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
b) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya telah beralih dari Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara BLUD.

Penerimaan Kas melalui Bendahara Umum Daerah diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan Pengeluaran kas melalui Bendahara Umum Daerah diakui pada saat ada pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

2. Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Saldo Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas termasuk Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

a) Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas
b) Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah
c) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
d) Informasi lainnya yang dianggap penting.

B. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Kebijakan terkait Investasi, terdiri dari:

1. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

2. Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat senilai biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasar.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan Dana Bergulir, Dana Bergulir dicatat senilai harga perolehan Dana Bergulir.

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:

a) Kualitas lancar, senilai 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar.

b) Kualitas kurang lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar.

c) Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

d) Kualitas macet, senilai 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Penyajian dan pengungkapan

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat senilai biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas; Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi senilai bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*); Metode nilai bersih diterapkan untuk Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian dan Investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

Penilaian Dana Bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b) Jenis-jenis investasi, Investasi Permanen dan Non Permanen;
c) Perubahan harga pasar baik Investasi Jangka Pendek maupun Investasi Jangka Panjang;
d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

e) Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi bila ada; dan

f) Perubahan pos investasi.

C. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain berdasarkan perkembangan kualitas piutang.

Penghapusbukuan Piutang adalah kebijakan intern manajemen yang merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*.

Penghapusan tagihan Piutang adalah penghapusan hak tagih atas piutang.

Kebijakan terkait Piutang, terdiri dari:

1. Pengakuan

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, yaitu pada saat:

a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;

b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan

c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat senilai nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya senilai jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang kerugian daerah diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) didukung dengan bukti/dokumen yang dipersamakan, atau menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

2. Pengukuran

Piutang diukur dan dicatat berdasarkan:

a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)*.

3. Penyajian dan pengungkapan

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut.

a) disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b) disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

c) disajikan senilai nilai nominal dari piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan; atau

d) disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut.

a) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan;

b) Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut ditambahkan kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya sesuai dengan naskah perjanjian pinjaman.

c) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan senilai nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan.

d) Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.

a) DBH disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) DAU senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota/Kabupaten;

c) DAK, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat; dan

d) Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi disajikan senilai nilai yang belum diterima sesuai dengan Peraturan atau Keputusan Gubernur mengenai kurang salur.

Pengukuran piutang tuntutan ganti rugi kerugian daerah berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

a) Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan

b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*.

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai Penyisihan Piutang.

Penentuan besaran Penyisihan Piutang pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) diklasifikasikan atas:

a) Kualitas lancar, senilai 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
b) Kualitas kurang lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
c) Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d) Kualitas macet, senilai 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan/nilai barang sitaan (jika ada).

Penghapusan piutang yang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

a) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
b) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan Aset yang berupa:

a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan; dan
e) Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan terkait Persediaan, terdiri dari:

1. Pengakuan

Persediaan diakui:

a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan dilakukan dengan pendekatan beban, yaitu bahwa setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

2. Pengukuran

Persediaan dicatat menggunakan metode *perpetual*, pengukuran persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang tersisa dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

3. Penyajian dan pengungkapan

Persediaan disajikan senilai:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi, meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

E. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut.

a) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Kebijakan terkait Aset Tetap, terdiri dari:

1. Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

a) Berwujud;
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
f) Nilai pembelian barang material atau pengeluaran untuk memperolehnya memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tetap yang memenuhi batas minimal kapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel sedangkan yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan disajikan dalam neraca Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan Aset Tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. KDP dipindahkan ke Aset Tetap sesuai jenis kelompok aset tetapnya setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

2. Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau biaya. konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya perencanaan, biaya pengawasan, biaya lelang, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*), biaya pemasangan (*installation cost*), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, biaya konstruksi dan biaya kepanitiaan.

Batasan minimal kapitalisasi (*treshold capitalization*) untuk setiap jenis aset untuk dapat dikategorikan Aset Tetap adalah sebagai berikut.

a) Peralatan dan Mesin senilai sama dengan Rp1.000.000,00 ke atas;

b) Bangunan dan Gedung senilai sama dengan Rp10.000.000,00 ke atas;

c) Aset Tetap Lainnya seperti buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sama dengan senilai Rp250.000,00 ke atas; dan

d) Aset Tetap Lainnya seperti Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga, Hewan/Ternak dan Tumbuhan sama dengan senilai Rp1.000.000,00 ke atas;

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai konstruksi dalam pengerjaan tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya *overhead* lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a) Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

3. Penyajian dan pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
e) Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 26 Masa Manfaat Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
1. PERALATAN DAN MESIN	
Alat Besar	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan	
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel dan Alat Ukur	
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pertanian	
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga	
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	15
Alat Kedokteran dan Kesehatan	
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Alat Laboratorium	
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronik	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
Alat Persenjataan	
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	4
Komputer	
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi	
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran	
Alat Pengeboran Mesin	10
Alat Pengeboran Non Mesin	10
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
Sumur	10
Produksi	10

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	
Alat Bantu Eksplorasi	10
Alat Bantu Produksi	10
Alat Keselamatan Kerja	
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat Sar	2
Alat Kerja Penerbangan	10
Alat Peraga	
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Peralatan Proses Produksi	
Unit Peralatan Proses/Produksi	8
Rambu-Rambu	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
Peralatan Olah Raga	
Peralatan Olah Raga	3
2. GEDUNG DAN BANGUNAN	
Bangunan Gedung	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Monumen	
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara	
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu Titik Kontrol/Pasti	
Tugu/Tanda Batas	50
3. JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	
Jalan dan Jembatan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air	
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa dan polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi	
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Instalasi Lain	5
Jaringan	
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
4. ASET TETAP LAINNYA	
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
Barang Bercorak Kesenian	
Alat Musik Modern	4

Penyusutan merupakan nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan yang diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*)

Penambahan masa manfaat ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi berdasarkan besarnya persentase *overhaul*/renovasi dari nilai perolehan Aset Tetap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27 Penambahan Masa Manfaat Karena Renovasi/Restorasi/*Overhaul*

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	1 3 5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	1 2 4
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	1 2 4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 2 3 4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 1 1 1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 3 4 6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 1 1 2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	3 6 9 12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 2 3 4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 0 1 1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 2 2 3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d. 20% >21% s.d. 40% >51% s.d. 75%	1 2 4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 1 2 3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75%	0 1 2
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 1 2 3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 1 2 3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 1 2 3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 3 4 5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 5 7 9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75%	0 1 2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 1 2 3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 3 4 4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	3 5 7 8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	3 5 7 8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektonika	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	3 5 7 8
Alat Proteksi radiasi/Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 4 5 5
Destructive Testing laboratory	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 4 5 5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 2 3 4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	3 5 7 8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 4 5 5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 2 3 4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 0 1 1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 0 0 2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 1 2 2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50%	1 1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 1 2 2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 2 2 3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 4 5 5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 4 6 7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 1 1 2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 1 1 2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 1 1 2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	3 5 7 8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 4 6 7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 4 6 7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 2 2 3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 0 1 2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	0 1 1 2
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75%	2 3 4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 4 5 5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses /Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	2 3 4 4
Rambu-Rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 2 3 4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 2 2 4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 1 2 2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 1 2 2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	5 10 15 50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Monumen			
Candi / Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 60% >60% s.d. 100%	2 5 10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5% >5% s.d. 10% >10% s.d. 20%	2 5 10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5% >5% s.d. 10% >10% s.d. 20%	2 5 10

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5% >5% s.d. 10% >10% s.d. 20%	1 3 5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5% >5% s.d. 10% >10% s.d. 20%	1 2 3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5% >5% s.d. 10% >10% s.d. 20%	1 2 3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45%	2 7
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	2 7 10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	1 3 5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	1 3 5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	1 3 5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	1 1 3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	1 1 3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	2 7 10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	2 5 10
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	2 7 10
Barang Bercorak Kesenian			
Alat Musik Modern	*Overhaul*	>0% s.d. 25% >25% s.d. 50% >50% s.d. 75% >75% s.d.100%	1 1 2 2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65%	5 10 15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi / *Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

Aset Tetap yang kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, dimasukkan ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan tidak dicantum dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

F. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif serta tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan terkait Properti Investasi, terdiri dari:

1. Pengakuan

Properti Investasi diakui pada saat:

a) Diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

- Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

b) Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.

c) Apabila suatu Properti Investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

d) Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya Properti Investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

e) Berdasarkan prinsip pengakuan sebelumnya, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat Properti Investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya.

f) Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi.

g) Pemerintah daerah memperlakukan aset sebagai Properti Investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.

h) Properti Investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

i) Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi Properti Investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan Properti Investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi.

2. Pengukuran

a) Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

b) Properti Investasi, kecuali Tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.

c) Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

d) Jika jumlah tercatat Properti Investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.

e) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

3. Penyajian dan pengungkapan

Properti Investasi disajikan sebagai aset non lancar pada Neraca dalam mata uang rupiah. Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi dalam CaLK antara lain:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b) Metode penyusutan yang digunakan;
c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e) Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode;
f) Properti Investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
g) Informasi lain terkait dengan Properti Investasi.

G. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Kebijakan terkait Dana Cadangan, terdiri dari:

1. Pengakuan

Pembentukan Dan Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan yang dikeluarkan atas persetujuan PPKD. Proses pemindahan melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

2. Pengukuran

a) Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan.
b) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dicatat sebagai pendapatan–LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pengelolaan hasil Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
c) Apabila Dana Cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca sebagai Aset Non Lancar. Pembentukan Dana Cadangan disajikan di LRA sebagai pengeluaran Pembiayaan dan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus keluar kas dari aktivitas investasi. Pencairan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

a) Tagihan Jangka Panjang, tagihan yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Diklasifikasikan sebagai Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah.

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga, perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

c) Aset Tidak Berwujud, Aset Tetap yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, meliputi: *Software,* Hak Paten dan Hak Cipta, Royalti, Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tidak Berwujud Lainnya, Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

d) Aset Lain-lain, Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat usang sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, tukar menukar, penyertaan modal).

Kebijakan terkait Aset Lainnya terdiri dari:

1. Pengakuan

Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit.

Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

a) Aset Kerja Sama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerja sama/kemitraan.

b) Aset Kerja Sama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

c) Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerja sama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.

d) Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

e) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerja sama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

f) Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Wali Kota Tarakan.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

a) Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan

b) Kriteria pengakuan.

Aset Lainnya dapat diakui pada saat:

a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

b) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Pengukuran

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai senilai nilai nominal tagihan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa dan kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan,

Bangun Guna Serah (BGS) dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.

3. Penyajian dan pengungkapan

Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca berdasarkan nilai perolehan setelah dikurang amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Perhitungan amortisasi dilakukan metode garis lurus (*straight line method*), dengan tanpa nilai sisa, dilakukan sejak tanggal perolehan, dan dihitung kembali apabila ada kapitalisasi, koreksi atau penghapusan.

Masa manfaat Aset Tidak Berwujud untuk menghitung tarif Amortisasi untuk masing-masing kelompok Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel 28 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	10
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta	10
Hak Paten	10
Paten Biasa	20
Merek	10
Kajian	10

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Jangka Panjang antara terdiri dari:

a) Utang Dalam Negeri; dan
b) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kebijakan terkait kewajiban terdiri dari:

1. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

2. Pengukuran

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

3. Penyajian dan pengungkapan

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) utang berdasarkan Kreditur.

Dalam perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

a) Pengurangan Pinjaman;
b) Modifikasi persyaratan utang;
c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

a) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

b) Jumlah saldo Kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;

d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian Kewajiban sebelum jatuh tempo;

e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: Pengurangan pinjaman; Modifikasi persyaratan utang; Pengurangan tingkat bunga pinjaman; Pengunduran jatuh tempo pinjaman; Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan; dan

f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

Biaya pinjaman meliputi: Perlakuan biaya pinjaman; Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

J. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos Ekuitas.

Kebijakan terkait Ekuitas, terdiri dari:

1. Pengakuan

Pengakuan Ekuitas berdasarkan saat pengakuan Aset dan Kewajiban.

2. Pengukuran

Pengukuran Ekuitas berdasarkan pengukuran atas Aset dan Kewajiban.

3. Penyajian dan pengungkapan

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya atau diungkapkan secara memadai dalam CaLK khususnya pada penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas.

K. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dikenal 2 (dua) istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Kebijakan terkait Pendapatan, terdiri dari:

1. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan; atau
b) Pendapatan direalisasi.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

a) Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
b) Diterima oleh SKPD atau Bendahara Penerimaan; atau
c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Khusus untuk Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah daerah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

a) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk pencatatan pendapatan-LO.
b) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA ketika saat realisasi kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas Daerah. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan

ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

c) Pengakuan Pendapatan terkait pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlewati sedangkan pendapatan-LRA diakui pada saat uang telah diterima.

d) Pengakuan pendapatan terhadap pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan Pendapatan LO dan pengakuan Pendapatan-LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

e) Pendapatan kas yang diterima SKPD/SKPKD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD diakui sebagai Pendapatan-LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

f) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas diakui sebagai Pendapatan-LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

g) Pendapatan yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek berupa Bunga Deposito dan Bunga Obligasi serta dividen tunai diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

h) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset non keuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.

i) Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan atau pelanggaran hukum lainnya diakui pada saat salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diterima oleh eksekutor yang dijadikan dasar penagihan.

2. Pengukuran

a) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah sebagaimana dokumen sumber bukti setornya dengan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai kas/non kas yang diterima atau akan diterima dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban-beban yang ada).

c) Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat. Selain itu, dalam hal

besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

d) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah, dicatat sebesar nilai barang/jasa dan/atau surat berharga yang diterima berdasarkan BAST.

e) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, pengukuran dilakukan dengan berdasarkan menurut biayanya atau harga pasar atau taksiran harga wajar.

f) Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

h) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan perpajakan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

i) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

j) Dalam hal Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Dihentikan telah terbit dan dinyatakan berlaku maka kebijakan akuntansi untuk koreksi adalah sebagai berikut.

   1) Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

   2) Apabila tidak terdapat realisasi pendapatan pada tahun berjalan, maka pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/atau ekuitas.

   3) Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan hibah yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/atau ekuitas.

3. Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional serta dijelaskan rinciannya atau diungkapkan secara memadai dalam CaLK khususnya pada penjelasan akun-akun laporan tersebut. Berikut adalah contoh penyajian Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

L. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) dan kewenangan atas beban tersebut:

a. Beban Pegawai;
b. Beban Persediaan;
c. Beban Barang dan Jasa;
d. Beban Pemeliharaan;
e. Beban Perjalanan Dinas;
f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat;
g. Beban Bunga;
h. Beban Subsidi;
i. Beban Hibah;
j. Beban Bantuan Sosial;
k. Beban Transfer;
l. Beban Lain-lain;
m. Beban Penyusutan dan Amortisasi; dan
n. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Kebijakan terkait Beban, terdiri dari:

1. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah;

b) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan;

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah Penyusutan Aset Tetap, atau Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Penyisihan Piutang.

d) Adanya pengesahan dari BUD untuk pengeluaran yang dibiayai dari Pendapatan non-APBD.

2. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

3. Penyajian dan pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan operasional entitas akuntansi/entitas pelaporan. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Belanja Daerah, dalam Laporan Arus Kas Keluar dalam kategori Aktivitas Operasi dan Aktivitas lnvestasi. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkap dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

M. Kebijakan Akuntansi Belanja

Akuntansi Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Transfer.

Kebijakan terkait Belanja, terdiri dari:

1. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD. Dalam hal Badan Layanan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengembalian Belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja atau beban tahun anggaran berjalan. Sedangkan pengembalian belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

2. Pengukuran

Pengukuran Belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran daerah yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

3. Penyajian dan pengungkapan

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga serta Transfer dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dinilai dalam mata uang rupiah. Penilaian mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

a) Rincian belanja;
b) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam Laporan Keuangan lembar muka;
c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

N. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan terkait Pembiayaan, terdiri dari:

1. Pengakuan

Pembiayaan diakui pada saat :

a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat Kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dai Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara umu Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

2. Pengukuran

Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban-beban yang ada). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah, dicatat sebesar nilai barang/jasa dan/atau surat berharga yang diterima berdasarkan BAST.

3. Penyajian dan pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA, dan disajikan pada Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan).

O. Kebijakan Akuntansi SILPA/SIKPA Dan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Adapun pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

1. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non - recurring*; dan
2. Koreksi terhadap penerimaan/pengeluaran pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain:

1) Koreksi kesalahan saldo Kas di BUD;
2) Kas di BLU; dan
3) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan Penyesuaian catatan SAL.

P. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam Laporan Keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya yang mempengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Q. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah

BLUD adalah Entitas Pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut.

1. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
6. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7. Mengelola sumber daya yang terpisah dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang membawahinya;
8. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
9. Laporan Keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal pemerintah.

Tujuan umum Laporan Keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai Kas dan Setara Kas meliputi Dana titipan pihak ketiga; uang jaminan; dan uang muka pasien rumah sakit.

Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD ke dalam Laporan Keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik *(reciprocal accounts)* seperti Pendapatan, Beban, Aset, dan Kewajiban yang berasal dari Entitas Akuntansi/Pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun Pendapatan dan Belanja pada LRA yang berasal dari Entitas Akuntansi/Pelaporan.

4.4 Kebijakan Akuntansi Berkaitan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Pada tahun 2020 dan 2021, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan empat PSAP, yaitu:

1. **PSAP Nomor 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan**

   PSAP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. Berdasarkan Paragraf 23 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai TA 2021.

2. **PSAP Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020)**

   PSAP ini ditetapkan melalui PMK nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020). Berdasarkan Paragraf 55 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai TA 2021.

3. **PSAP Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi**

   PSAP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2023 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi. Berdasarkan Paragraf 61 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai TA 2022.

4. **PSAP Nomor 17 Properti Investasi**

   PSAP ini ditetapkan melalui PMK Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 tentang Properti Investasi. Berdasarkan Paragraf 63 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai TA 2022.

   Keempat PSAP di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diatur pula dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan serta digunakan dalam menyusun Laporan Keuangan ini.

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Sejak awal tahun 2020, Indonesia dan seluruh dunia menghadapi pandemi Covid-19. Hingga pada tahun 2021 masih terdapat dampak dari Pandemi tersebut yang merupakan kejadian luar biasa namun dikarenakan penanganannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta didukung dengan penganggaran sehingga kejadian tersebut sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Atas dasar tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan akuntansi terhadap kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tersebut agar tidak disajikan dalam Pos Luar Biasa, melainkan pada pos-pos laporan keuangan yang terdampak atau serta menjelaskannya dalam CaLK.

Hal ini sesuai dengan publikasi KSAP yang menyatakan bahwa KSAP tidak menerbitkan pernyataan standar akuntansi yang bersifat khusus/tersendiri terkait dengan transaksi keuangan pemerintah selama masa Pandemi Covid-19, sehingga semua PSAP yang telah ada dapat menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan melalui Laporan Keuangan. Untuk itu, prinsip mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam pos-pos di laporan keuangan, baik itu Entitas Akuntansi maupun Entitas Pelaporan tetap mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang berlaku sehingga diperlukan tambahan informasi dalam catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan pada pos-pos laporan keuangan yang terdampak tersebut. Dengan adanya hal tersebut, segala dampak terkait langkah dan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Tarakan dalam menangani dampak Pandemi Covid-19 dijelaskan dan diungkapkan dalam laporan keuangan ini agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V
PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

APBD Kota Tarakan TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023, dan penjabarannya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 33 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023. Sedangkan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 21 September 2024, dan Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 33 Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024.

APBD TA 2024 dirancang untuk menjaga optimisme pemulihan ekonomi walaupun di saat yang sama perlu meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak ekonomi nasional dan global yang terus berlangsung. Pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan demi mewujudkan pendapatan dan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Oleh karenanya Pemerintah Kota Tarakan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan dan pemerintahan secara kolaboratif yang dapat berdampak pada pos-pos di Laporan Realisasi Anggaran ini.

Pada TA 2024 diketahui total seluruh Pendapatan Daerah yang terealisasi senilai Rp1.284.583.410.452,21 sedangkan Belanja Daerah terealisasi senilai Rp1.271.345.838.376,68 sehingga terdapat surplus senilai Rp13.237.572.075,53. Adapun Pembiayaan Neto senilai Rp37.882.279.835,24 dikarenakan Penerimaan Pembiayaan Daerah terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya senilai Rp39.881.536.635,24 sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan terdapat Penyertaan Modal Pemerintah senilai Rp1.999.256.800,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA senilai Rp51.119.851.910,77. Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1. PENDAPATAN

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	1.284.583.410.452,21	**1.161.911.937.167,63**

Pada TA 2024, realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tarakan senilai Rp1.284.583.410.452,21 atau 97,03% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp1.323.855.180.144,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2023 senilai Rp1.161.911.937.167,63 maka realisasi pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan yaitu senilai Rp122.671.473.284,58 atau 10,56%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan sebagai berikut.

Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	199.158.644.474,00	205.269.290.692,21	103,07	174.950.040.888,63
Pendapatan Transfer	1.124.696.535.670,00	1.079.314.119.760,00	95,96	983.549.492.817,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	3.412.403.462,00
Jumlah	**1.323.855.180.144,00**	**1.284.583.410.452,21**	**97,03**	**1.161.911.937.167,63**

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

31 Desember 2024	31 Desember 2023
205.269.290.692,21	174.950.040.888,63

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 senilai Rp205.269.290.692,21 atau 103,07% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp199.158.644.474,00 Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2023 senilai Rp174.950.040.888,63 maka realisasi PAD TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp30.319.249.803,58 atau 17,33%.

Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Daerah	90.911.161.903,00	98.648.559.407,53	108,51	86.660.296.194,72
Retribusi Daerah	16.228.846.172,00	16.050.205.889,70	98,90	12.859.825.298,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.203.957.872,00	15.602.103.335,97	96,29	10.314.517.461,15
Lain-lain PAD yang Sah	75.814.678.527,00	74.968.422.059,01	98,88	65.115.401.934,76
Jumlah	**199.158.644.474,00**	**205.269.290.692,21**	**103,07**	**174.950.040.888,63**

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen PAD tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
98.648.559.407,53	86.660.296.194,72

Pada TA 2024 realisasi Pajak Daerah adalah senilai Rp98.648.559.407,53 atau 108,51% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp90.911.161.903,00. Dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2023 senilai Rp86.660.296.194,72, Pajak Daerah TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp11.988.263.212,81 atau 13,83%. Rincian Realisasi Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Hotel	9.500.000.000,00	11.452.616.943,40	120,55	9.570.457.077,11
Pajak Restoran	20.000.000.000,00	24.257.200.888,59	121,29	19.790.228.987,68
Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.600.472.169,80	106,70	1.979.401.579,00
Pajak Reklame	4.100.000.000,00	4.612.463.362,80	112,50	4.473.635.224,95
Pajak Penerangan Jalan	18.500.000.000,00	18.825.308.004,00	101,76	17.458.209.729,00
Pajak Parkir	500.000.000,00	476.155.800,00	95,23	698.346.600,00
Pajak Air Tanah	650.000.000,00	701.300.999,64	107,89	779.708.145,68
Pajak Sarang Burung Walet	2.461.161.903,00	12.294.000,00	0,50	33.915.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	608.943.063,30	86,99	757.127.104,30
Pajak Bumi dan Bangunan P2	16.000.000.000,00	14.415.278.884,00	90,10	13.400.736.984,00
Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	21.686.525.292,00	127,57	17.718.529.763,00
Jumlah	**90.911.161.903,00**	**98.648.559.407,53**	**108,51**	**86.660.296.194,72**

Secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan Pajak Daerah melampaui target pendapatan yang ditetapkan, dengan capaian target tertinggi pada realisasi Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan sebesar 127,57% atau melebihi target senilai Rp4.686.525.292,00. Sedangkan pada Pajak Sarang Burung Walet realisasi hanya sebesar 0,50% dari target yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan masih lemahnya pendataan, penagihan dan pengawasan atas usaha sarang burung walet serta masih minimnya pengusaha yang memiliki izin.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
16.050.205.889,70	**12.859.825.298,00**

Pada TA 2024 realisasi Retribusi Daerah adalah senilai Rp16.050.205.889,70 atau 98,90% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp16.228.846.172,00. Dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah TA 2023 senilai Rp12.859.825.298,00 maka Retribusi Daerah TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp3.190.380.591,70 atau 24,81%. Rincian realisasi Retribusi Daerah TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

Jenis Retribusi	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pelayanan Kesehatan	3.020.000,00	3.426.300,00	113,45	731.800.600,00
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	251.280.000,00	324.188.000,00	129,01	265.120.000,00
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.612.800.000,00	612.851.040,00	38,00	678.646.200,00
Pelayanan Pasar	2.577.612.622,00	214.098.000,00	8,31	393.217.500,00
Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	327.242.700,00

Jenis Retribusi	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	134.055.000,00
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	35.200.000,00	117,33	23.600.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	26.021.160,00	0,00	329.625.963,00
Pelayanan Kebersihan	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum	**4.474.712.622,00**	**1.217.064.500,00**	**27,20**	**2.883.307.963,00**
Pemakaian Kekayaan Daerah	6.332.993.950,00	6.586.423.639,70	104,00	6.431.693.740,00
Terminal	68.000.000,00	1.957.026.941,00	2.877,98	72.600.000,00
Tempat Khusus Parkir	696.600.000,00	735.219.000,00	105,54	656.776.000,00
Rumah Potong Hewan	44.550.000,00	34.595.000,00	77,65	20.350.000,00
Pelayanan Kepelabuhan	270.000.000,00	392.228.895,00	145,27	291.576.595,00
Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.187.520.000,00	1.618.412.000,00	73,98	1.365.357.000,00
Penjualan Hasil Produksi Usaha	7.500.000,00	0,00	0,00	1.867.500,00
Pemanfaatan Aset Daerah	4.900.000,00	4.200.000,00	85,71	0,00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	**9.612.063.950,00**	**11.328.105.475,70**	**117,85**	**8.840.220.835,00**
Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.061.296.500,00
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	2.908.317.314,00	145,42	0,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	142.069.600,00	596.718.600,00	420,02	0,00
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	**2.142.069.600,00**	**3.505.035.914,00**	**163,63**	**1.136.296.500,00**
Jumlah	**16.228.846.172,00**	**16.050.205.889,70**	**98,90**	**12.859.825.298,00**

Secara keseluruahan capaian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar 98,90%, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dengan capaian diatas 100% terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 104,00%, Retribusi Terminal sebesar 2.877,98%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 105,54%, Retribusi Pelayanan Pelayanan Kepelabuhan sebesar 145,27%, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 145,42%. Pertumbuhan signifikan atas pencapaian target yaitu pada Retribusi Terminal sebesar 2.877,98% dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 420,02%.

Namun masih terdapat capaian realisasi Retribusi Daerah yang jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu pada Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebesar 38,00%, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 8,31%, dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha tidak terdapat realisasi. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya masih terdapat fasilitas yang belum memadai, kuantitas dan kualitas pelayanan SDM yang belum memadai, kurangnya sosialisasi, serta pengaruh dari faktor ekonomi dan masih rendahnya kesadaran masyarakat.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	15.602.103.335,97	10.314.517.461,15

Pada TA 2024 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yangditargetkan senilai Rp16.203.957.872,00 dan terealisasi senilai Rp15.602.103.335,97 atau 96,29%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp10.314.517.461,15 maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp5.287.585.874,82 atau 51,26% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	PT. Bank BPD Kaltim Kaltara (Bank Kaltimtara)	3.577.244.945,92	3.577.244.945,92	100,00	3.494.957.872,30
2	Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan	12.626.712.926,08	12.024.858.390,05	105,00	6.519.559.588,85
3	Perumda Energi Mandiri	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
	Jumlah	**16.203.957.872,00**	**15.602.103.335,97**		**10.314.517.461,15**

Pada realisasi senilai Rp15.602.103.335,97, dapat diungkapkan informasi sebagai berikut.

a. Dividen Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tarakan pada PT. BPD Kaltim Kaltara senilai Rp3.577.244.945,92 yang berasal porsi kepemilikan modal saham senilai Rp72.630.000.000,00 atau 0,96% dari total modal disetor.

b. Dividen dari Perumda Tarakan Air Minum Tirta Alam senilai Rp12.024.858.390,05 berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 16 Tahun 2024 ditetapkan tanggal 16 Februari 2024 tentang Penyerahan Dividen pada Pemerintah Kota Tarakan Tahun Buku 2023.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	74.968.422.059,01	65.115.401.934,76

Pada TA 2024 realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah senilai Rp74.968.422.059,01 atau 98,88% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp75.814.678.527,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp65.115.401.934,76 maka Lain-lain PAD yang Sah untuk TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp9.853.020.124,25 atau 15,13%. Rincian realisasi Lain-Lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	863.946.305,00	135.441.500,00	15,68	511.517.877,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	62.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah	436.218.000,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro	3.000.000.000,00	1.154.000.639,81	38,47	2.674.552.699,24
Pendapatan Bunga	4.103.308.570,00	5.514.465.672,00	134,39	1.361.871.211,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000,00	2.343.679.013,77	117,18	2.631.550.672,43
Pendapatan Denda Pajak Daerah	771.387.593,00	1.333.983.551,91	172,93	1.000.691.802,24
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.600.000,00	2.833.237,68	26,73	77.297.815,00
Pendapatan Dari Pengembalian	500.000.000,00	355.334.997,42	71,07	416.835.694,00
Pendapatan BLUD	64.066.718.059,00	64.128.683.446,42	100,10	56.441.084.163,85
Jumlah	**75.814.678.527,00**	**74.968.422.059,01**	**98,88**	**65.115.401.934,76**

Secara keseluruhan capaian Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar 98,88%, dengan realisasi capaian target tertinggi pada realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar 172,93%. Namun masih terdapat capaian yang rendah yaitu pada Hasil Kerja Sama Daerah dan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang telah dianggarkan namun tidak ada realisasi. Selain itu, Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar 15,68%, Pendapatan Denda Retribusi Daerah 26,73% dan Jasa Giro sebesar 38,47%. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2024, Pemerintah Kota Tarakan masih terfokus pada penataan dan pengklasifikasian aset-aset daerah dan masih belum maksimalnya penjualan atau lelang aset disebabkan keterbatasan waktu dan sumber daya manusia pada pihak penyelenggara pelelangan.

5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.079.314.119.760,00	**983.549.492.817,00**

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 senilai Rp1.079.314.119.760,00 atau 95,96% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp1.124.696.535.670,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 senilai Rp983.549.492.817,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp95.764.626.943,00 atau 9,74%. Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kota Tarakan terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Bagi Hasil Pajak	96.004.435.804,00	110.926.683.380,00	(2,07)	113.268.524.011,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	273.544.121.334,00	282.028.432.000,00	75,93	160.311.500.604,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	474.454.400.000,00	475.029.013.000,00	8,31	438.566.142.648,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	115.715.292.000,00	107.307.452.338,00	(6,41)	114.652.274.282,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Insentif Fiskal	0,00	6.607.594.000,00	(71,69)	23.343.638.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Pendapatan Bagi Hasil	138.798.379.638,00	71.235.038.148,00	(9,82)	78.987.935.132,00
Bantuan Keuangan	26.179.906.894,00	26.179.906.894,00	(51,89)	54.419.478.140,00
Jumlah	**1.124.696.535.670,00**	**1.079.314.119.760,00**	**9,74**	**983.549.492.817,00**

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, Pendapatan Transfer tahun 2024 mengalami peningkatan senilai Rp95.764.626.943,00 sehingga sangat membantu dalam pemulihan ekonomi secara cepat, membangun daya tahan ekonomi, serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan bagi Pemerintah Kota Tarakan.

5.1.1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2024	31 Desember 2023
110.926.683.380,00	113.268.524.011,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 senilai Rp110.926.683.380,00 atau 115,54% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp96.004.435.804,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp113.268.524.011,00 maka realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp2.341.840.631,00 atau 2,07%. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	82.098.015.000,00	95.891.123.000,00	116,80	98.424.300.283,00
DBH PPH Pasal 21	13.906.420.804,00	13.982.425.400,00	100,55	12.604.232.398,00
DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN	0,00	1.052.985.600,00	0,00	2.239.991.330,00
DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00	149.380,00	0,00	0,00
Jumlah	**96.004.435.804,00**	**110.926.683.380,00**	**115,54**	**113.268.524.011,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.2.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	**282.028.432.000,00**	**160.311.500.604,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 senilai Rp282.028.432.000,00 atau 103,10% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp273.544.121.334,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp160.311.500.604,00 maka Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk Tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp121.716.931.396,00 atau 75,93%. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 37 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
DBH SDA Minyak Bumi	10.331.482.466,00	8.145.339.400,00	78,84	14.774.327.271,00
DBH SDA Gas Bumi	0,00	1.205.061.600,00	0,00	723.978.924,00
Mineral dan Batubara - Royalti	256.155.996.868,00	242.565.589.400,00	94,69	140.465.378.368,00
Provisi Sumber Daya Hutan	1.195.345.000,00	24.251.144.600,00	2.028,80	2.499.100.830,00
Pungutan Hasil Perikanan	1.424.364.000,00	1.424.364.000,00	100,00	1.848.715.211,00
DBH Sawit	4.436.933.000,00	4.436.933.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**273.544.121.334,00**	**282.028.432.000,00**	**103,10**	**160.311.500.604,00**

Terkait DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam pada akhir TA 2024, Pemerintah Pusat telah menyalurkan Dana Bagi Hasil Non Tunai atau dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Bank Indonesia yang pengalokasiannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Non Tunai

Uraian	Nilai
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti s.d. TA 2023	3.849.599.000,00
DBH SDA Provisi Sumber Daya Hutan s.d. TA 2023	86.192.000,00
Jumlah	**3.935.791.000,00**

Dana Bagi Hasil Non Tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan-LRA pada saat dicairkan dari bentuk TDF di Bank Indonesia atau telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun berikutnya.

5.1.1.2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
475.029.013.000,00	438.566.142.648,00

Realisasi DAU TA 2024 senilai Rp475.029.013.000,00 atau 100,12% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp474.454.400.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp438.566.142.648,00 maka terjadi kenaikan senilai Rp36.462.870.352,00 atau 8,31%. Adapun rincian DAU sebagai berikut.

Tabel 39 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
DAU *Spesific Grant* (SG) atau yang ditentukan Penggunaannya:				
Bidang Pendidikan	14.836.688.000,00	14.836.688.000,00	100,00	29.050.898.000,00
Bidang Kesehatan	9.916.402.000,00	9.916.402.000,00	100,00	17.365.588.000,00
Bidang Pekerjaan Umum	3.237.467.000,00	3.237.467.000,00	100,00	7.300.000.000,00
Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	24.796.737.000,00	24.796.737.000,00	100,00	11.022.114.000,00
DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	417.667.106.000,00	418.241.719.000,00	100,14	369.827.542.648,00
Jumlah	**474.454.400.000,00**	**475.029.013.000,00**	**100,12**	**438.566.142.648,00**

5.1.1.2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
107.307.452.338,00	114.652.274.282,00

Realisasi DAK TA 2024 senilai Rp107.307.452.338,00 atau 92,73% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp115.715.292.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp114.652.274.282,00 maka terjadi penurunan senilai Rp7.344.821.944,00 atau 6,41%. DAK dapat dirinci menjadi DAK Fisik dan Non Fisik yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**22.676.898.000,00**	**21.892.490.518,00**	**96,54**	**28.567.452.502,00**
Bidang Pendidikan	6.096.696.000,00	6.049.493.452,00	99,23	8.055.425.350,00
Bidang Kesehatan dan KB	5.586.012.000,00	4.974.283.389,00	89,05	2.145.603.393,00
Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Jalan, Air Minum dan Sanitasi	10.994.190.000,00	10.868.713.677,00	98,86	18.366.423.759,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**93.038.394.000,00**	**85.414.961.820,00**	**91,81**	**86.084.821.780,00**

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Bantuan Operasional Sekolah - Reguler	0,00	0,00	0,00	38.548.280.117,00
Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	34.551.805.000,00	35.020.343.000,00	101,36	31.896.515.000,00
Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	361.441.000,00	361.441.000,00	100,00	316.800.000,00
Bantuan Operasional Pendidikan	46.700.780.000,00	44.100.460.901,00	94,43	5.097.503.600,00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bantuan Operasional Pengawasan Obat dan Makanan	2.987.130.000,00	2.291.548.271,00	76,71	1.491.529.722,00
Bantuan Operasional Kesehatan	7.445.903.000,00	2.740.237.318,00	36,80	7.348.937.948,00
Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya	800.000.000,00	793.469.830,00	99,18	722.645.982,00
Fasilitasi Penanaman Modal, Perkoperasian Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	191.335.000,00	107.461.500,00	56,16	167.736.777,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	494.872.634,00
Jumlah	**115.715.292.000,00**	**107.307.452.338,00**	**92,73**	**114.652.274.282,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut.

a. Secara keseluruhan capaian realisasi DAK sebesar 92,73%, namun pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas realisasi hanya tercapai sebesar 36,80%, hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman atas petunjuk teknis BOK dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Selain itu anggaran yang dibuat tanpa memperhatikan kondisi riil saat pelaksanaan kegiatan di lapangan.

b. Pada TA 2024, Dana Bantuan Operasional Kesehatan tersebut diatas dianggarkan senilai Rp7.445.903.000,00 yang realisasi pencairannya langsung disalurkan ke rekening enam puskesmas senilai total Rp2.740.237.318,00 atau 36,80%.

c. Selain realisasi Dana BOK yang rendah, terdapat juga Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bantuan Operasional Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 76,71% serta Dana Fasilitasi Penanaman Modal, Perkoperasian Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dengan capaian 56,16% diantaranya disebabkan dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala atau penghambat dalam penyerapannya berupa terbatasnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan perencanaan serta laporan pertanggungjawabannya.

5.1.1.2.5. Insentif Fiskal

31 Desember 2024	31 Desember 2023
6.607.594.000,00	23.343.638.000,00

Selama TA 2024 Realisasi Insentif Fiskal senilai Rp6.607.594.000,00 dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp23.343.638.000,00 maka terjadi penurunan senilai Rp16.736.044.000,00 atau 71,69%. Insentif Fiskal tersebut bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja tertentu, seperti pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, atau pelayanan dasar. Adapun kinerja Pemerintah Kota Tarakan yang dinilai berupa perbaikan atau pencapaian di bidang kesehatan masyarakat.

Tabel 41 Rincian Realisasi Insentif Fiskal TA 2024

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	19 September 2024	Insentif Fiskal Kinerja Kesehatan Masyarakat TA 2024	3.303.797.000,00
2	28 November 2024	Insentif Fiskal Kinerja Kesehatan Masyarakat TA 2024	3.303.797.000,00
		Jumlah	**6.607.594.000,00**

5.1.1.2.6. Pendapatan Bagi Hasil

31 Desember 2024	31 Desember 2023
71.235.038.148,00	78.987.935.132,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara TA 2024 senilai Rp71.235.038.148,00 atau 51,32% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp138.798.379.638,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp78.987.935.132,00 maka terjadi penurunan senilai Rp7.752.896.984,00 atau 9,82%. Adapun Rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Kendaraan Bermotor	14.712.735.406,00	6.987.843.898,00	47,50	9.897.595.952,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.142.163.810,00	7.026.960.743,00	57,87	9.392.009.302,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	97.185.148.010,00	44.435.780.693,00	45,72	47.915.779.350,00
Pajak Air Permukaan	358.811.212,00	196.969.989,00	54,90	233.589.086,00
Pajak Rokok	14.399.521.200,00	12.587.482.825,00	87,42	11.548.961.442,00
Jumlah	**138.798.379.638,00**	**71.235.038.148,00**	**51,32**	**78.987.935.132,00**

Bila dibandingkan TA 2023, secara keseluruhan terdapat penurunan pada realisasi TA 2024, namun terdapat peningkatan realisasi khususnya Pajak Rokok. Adapun penyebab Pendapatan Bagi Hasil TA 2024 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

realisasinya lebih rendah dibanding anggarannya dikarenakan anggarannya telah termasuk penyelesaian kurang salur pada TA 2023. Oleh karenanya pada akhir tahun anggaran saldo piutang transfer menjadi bertambah disebabkan masih terdapat kurang salur TA 2023 dan 2024 pada masing-masing jenis pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.

5.1.1.2.7. Bantuan Keuangan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
26.179.906.894,00	54.419.478.140,00

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara TA 2024 senilai Rp26.179.906.894,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp26.179.906.894,00. Bila dibandingkan TA 2023 terdapat realisasi senilai Rp54.419.478.140,00 maka terjadi penurunan senilai Rp28.239.571.246,00 atau 51,89%. Rincian Bantuan Keuangan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Bantuan Keuangan - Khusus	23.649.476.723,00	23.649.476.723,00	100,00	24.250.826.752,00
Bantuan Keuangan - Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE)	1.189.430.171,00	1.189.430.171,00	100,00	30.168.651.388,00
Bantuan Keuangan - Dana Insentif RT	1.341.000.000,00	1.341.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**26.179.906.894,00**	**26.179.906.894,00**	**100,00**	**54.419.478.140,00**

5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	3.412.403.462,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi pada Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2024, Sedangkan pada TA 2023 terdapat realisasi senilai Rp3.412.403.462,00 dan bila dibandingkan maka terdapat penurunan sebesar 100%. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Hibah /Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	3.000.000.000,00	(100,00)	3.000.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0,00	412.403.462,00	(100,00)	412.403.462,00
Jumlah	**0,00**	**3.412.403.462,00**	**(100,00)**	**3.412.403.462,00**

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	3.000.000.000,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2024. Bila dibandingkan TA 2023 mengalami penurunan 100% karena TA 2023 terdapat realisasi senilai Rp3.000.000.000,00 berupa Penerimaan Hibah Sektor Air Minum dari Pemerintah Pusat atau Kementerian PUPR.

5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	412.403.462,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2024. Bila dibandingkan TA 2023 mengalami penurunan 100% karena TA 2023 terdapat realisasi senilai Rp412.403.462,00 berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (PKM Pantai Amal). Hal ini disebabkan oleh status Puskesmas Pantai Amal yang telah berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada TA 2024.

5.1.2. BELANJA DAN TRANSFER	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	1.271.345.838.376,68	1.265.517.497.630,33

Pada TA 2024, Belanja dan Transfer telah ditargetkan oleh Pemerintah Kota Tarakan senilai Rp1.361.736.716.779,24. Sampai dengan 31 Desember 2024, Belanja dan Transfer yang telah direalisasikan adalah 93,36% atau senilai Rp1.271.345.838.376,68. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp1.265.517.497.630,33 maka terjadi kenaikan belanja yaitu 0,46% atau senilai Rp5.828.340.746,35. Adapun rincian Belanja dan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	1.040.988.134.095,24	963.247.367.161,54	10,88	868.710.123.387,81
Belanja Modal	317.948.582.684,00	307.874.591.715,14	(22,26)	396.040.018.311,52
Belanja Tak Terduga	2.800.000.000,00	223.879.500,00	(70,82)	767.355.931,00
Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.361.736.716.779,24**	**1.271.345.838.376,68**	**0,46**	**1.265.517.497.630,33**

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, Belanja dikelompokkan menjadi tiga yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer yang diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

31 Desember 2024	31 Desember 2023
963.247.367.161,54	868.710.123.387,81

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 senilai Rp963.247.367.161,54 atau 92,53% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp1.040.988.134.095,24. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp868.710.123.387,81 maka terjadi kenaikan senilai Rp94.537.243.773,73 atau 10,88%. Penjelasan anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2024 yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	480.448.162.731,24	440.355.806.870,00	91,66	398.818.594.574,00
Belanja Barang dan Jasa	386.025.526.188,00	353.588.944.803,57	91,60	325.517.556.206,81
Belanja Hibah	169.756.541.176,00	164.745.043.401,97	97,05	141.649.793.597,00
Belanja Bantuan Sosial	4.757.904.000,00	4.557.572.086,00	95,79	2.724.179.010,00
Jumlah	**1.040.988.134.095,24**	**963.247.367.161,54**	**92,53**	**868.710.123.387,81**

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

31 Desember 2024	31 Desember 2023
440.355.806.870,00	398.818.594.574,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 senilai Rp440.355.806.870,00 atau 91,66% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp480.448.162.731,24. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp398.818.594.574,00 maka terjadi kenaikan senilai Rp41.537.212.296,00 atau 10,42%. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 disajikan berikut.

Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	251.859.710.992,24	226.052.542.685,00	89,75	191.125.484.195,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Pertimbangan Objektif Lainnya	209.957.953.136,00	197.398.616.007,00	94,02	190.507.986.977,00
Belanja Gaji dan Tunjangan serta Lainnya DPRD dan KDH/WKDH	17.334.935.308,00	16.559.684.935,00	95,53	16.697.974.798,00
Belanja Pegawai BOS	111.165.000,00	78.260.000,00	70,40	280.367.000,00
Belanja Pegawai BLUD	1.184.398.295,00	266.703.243,00	22,52	206.781.604,00
Jumlah	**480.448.162.731,24**	**440.355.806.870,00**	**91,66**	**398.818.594.574,00**

Pada TA 2024 terdapat realisasi yang rendah atau capaian 22,52% pada Belanja Pegawai BLUD dikarenakan tidak terdapat realisasi atau terdapat belanja pegawai yang belum dibayarkan hingga akhir tahun sehingga menjadi utang belanja BLUD pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
353.588.944.803,57	325.517.556.206,81

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 senilai Rp353.588.944.803,57 atau 91,60% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp386.025.526.188,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp325.517.556.206,81 maka terjadi kenaikan senilai Rp28.071.388.596,76 atau 8,62%. Belanja Barang dan Jasa TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang Pakai Habis	55.778.835.020,00	51.257.529.177,00	91,89	35.416.188.925,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	15.094.740,00	14.411.000,00	95,47	2.519.240,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	331.330.000,00	330.000.000,00	99,60	0,00
Belanja Jasa Kantor	68.562.430.231,00	61.077.794.265,00	89,08	63.269.744.277,40
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.981.080.090,00	16.302.748.928,00	96,01	13.964.223.461,97
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.961.726.390,00	2.793.309.740,00	94,31	2.265.290.442,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	590.225.160,00	568.985.000,00	96,40	947.520.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	62.050.000,00	62.050.000,00	100,00	75.200.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	140.080.000,00	139.159.000,00	99,34	891.266.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	779.568.000,00	728.778.000,00	93,48	560.028.125,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	187.493.405,00	187.493.405,00	100,00	207.907.050,00
Belanja Pemeliharaan	12.975.844.087,00	12.568.077.634,13	96,86	9.770.985.436,00
Belanja Perjalanan Dinas	42.858.384.430,00	39.600.311.810,00	92,40	29.357.345.555,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71.325.231.936,00	66.619.788.827,49	93,40	67.608.537.490,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	40.002.873.021,00	37.308.842.424,00	93,27	48.463.671.164,00

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.829.367.000,00	2.738.453.089,00	71,51	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.643.912.678,00	61.291.212.503,95	89,29	52.717.129.040,44
Jumlah	**386.025.526.188,00**	**353.588.944.803,57**	**91,60**	**325.517.556.206,81**

Secara keseluruhan Belanja Barang dan Jasa terealisasi 91,60%, namun secara khusus terdapat realisasi dibawah 90,00% yaitu Belanja Jasa Kantor 83,72%, Belanja Barang Tak Habis Pakai 76,28, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 89,08%, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71,51% serta Belanja Barang dan Jasa BLUD 89,29%. Hal ini disebabkan oleh perencanaan anggaran yang kurang baik ataupun faktor lainnya yang juga mempengaruhi tidak terlaksananya pekerjaan seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia dan pengadaan barang/jasa.

Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp353.588.944.803,57 tersebut juga terdapat pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024 senilai Rp6.784.072.843,00 yang terdiri dari:

a) Pembayaran Utang Belanja rutin senilai Rp1.184.105.303,00 diantaranya untuk kebutuhan listrik, air, telepon, internet, serta belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga berupa belanja pengolahan sampah, dan belanja gas alam pada PT. PGN;

b) Pembayaran Utang Belanja BLUD pada RSUKT senilai Rp5.593.103.660,00, dan Puskesmas senilai Rp6.863.880,00; dan

c) Pembayaran Utang Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB berupa belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain, yaitu biaya rawat jalan kegiatan metode kontrasepsi jangka panjang berupa MOW/MOP dari RSUD senilai Rp13.451.850,00. Nilai utang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB tersebut pada tahun 2023 diklasifikasikan utang jangka Panjang karena pada APBD murni 2024 belum terdapat pagu anggaran untuk membayar utang tersebut.

Adapun Belanja Barang dan Jasa dapat diklasifikasikan juga sebagai berikut agar mudah dimappingkan dengan beban Operasional LO yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 49 Rincian Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Kelompok Beban TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Belanja Barang	51.601.940.177,00	35.418.708.165,00	16.183.232.012,00	45,69
Belanja Jasa Kantor	249.818.615.182,44	250.970.517.050,81	(1.151.901.868,37)	(0,46)
Belanja Pemeliharaan	12.568.077.634,13	9.770.985.436,00	2.797.092.198,13	28,63
Belanja Perjalanan Dinas	39.600.311.810,00	29.357.345.555,00	10.242.966.255,00	34,89
Jumlah	**353.588.944.803,57**	**325.517.556.206,81**	**28.071.388.596,76**	**8,62**

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
164.745.043.401,97	**141.649.793.597,00**

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 senilai Rp164.745.043.401,97 atau 97,05% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp169.756.541.176,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp141.649.793.597,00 maka terjadi kenaikan senilai Rp23.095.249.804,97 atau 16,30%. Rincian atas realisasi Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Hibah Kepada Pemerintah Pusat	3.815.093.740,00	2.794.951.700,00	73,26	12.099.624.578,00
Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	152.907.741.136,00	149.409.201.172,97	97,71	125.752.690.609,00
Hibah Dana BOS	11.977.215.000,00	11.484.399.233,00	95,89	2.783.733.600,00
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.056.491.300,00	1.056.491.296,00	100,00	1.013.744.810,00
Jumlah	**169.756.541.176,00**	**164.745.043.401,97**	**97,05**	**141.649.793.597,00**

Pada TA 2024 realisasi Belanja Hibah berupa uang dan barang senilai Rp164.745.043.401,97 diantaranya terdapat Hibah Dana BOS senilai Rp9.792.189.233,00 berupa hibah uang diterima oleh Satdikmen Swasta.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.557.572.086,00	**2.724.179.010,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 senilai Rp4.557.572.086,00 atau 95,79% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp4.757.904.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp2.724.179.010,00 maka terjadi kenaikan senilai Rp1.833.393.076,00 atau 67,30%. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 51 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Bantuan Sosial kepada Individu	2.304.000.000,00	2.113.668.086,00	91,74	1.772.835.009,00
Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.453.904.000,00	2.443.904.000,00	99,59	951.344.001,00
Jumlah	**4.757.904.000,00**	**4.557.572.086,00**	**95,79**	**2.724.179.010,00**

Pada realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp4.557.572.086,00 tersebut diantaranya terdapat bantuan pendidikan senilai Rp1.373.000.000,00, bantuan kesehatan senilai Rp181.451.586,00, bantuan korban bencana alam senilai Rp224.300.000,00, bantuan stimulan pasca bencana senilai Rp334.916.500,00, serta bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan terdampak bencana senilai Rp2.528.904.000,00.

5.1.2.2. BELANJA MODAL

31 Desember 2024	31 Desember 2023
307.874.591.715,14	**396.040.018.311,52**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode atau satu tahun anggaran. Realisasi Belanja Modal TA 2024 senilai Rp307.874.591.715,14 atau 96,83% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp317.948.582.684,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp396.040.018.311,52 maka Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp88.165.426.596,38 atau 22,26%. Adapun uraian Belanja Modal sebagai berikut.

Tabel 52 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah	4.625.116.040,00	3.517.441.266,00	76,05	6.911.585.555,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	59.024.456.961,00	53.762.258.658,00	91,08	17.801.793.264,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.337.474.978,00	54.193.152.010,71	97,93	226.664.480.433,52
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	195.718.125.547,00	193.413.536.165,43	98,82	139.194.648.564,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	449.633.075,00	436.246.075,00	97,02	4.281.600.495,00
Belanja Modal Aset Lainnya	2.793.776.083,00	2.551.957.540,00	91,34	1.185.910.000,00
Jumlah	**317.948.582.684,00**	**307.874.591.715,14**	**96,83**	**396.040.018.311,52**

Pada Realisasi Belanja Modal TA 2024 senilai Rp307.874.591.715,14 terdapat pembayaran Utang senilai Rp51.647.236.800,00 yaitu pada DPUPR senilai Rp50.000.000.000,00, DPRKPP Rp1.605.636.800,00, dan pada Dinas Lingkungan

Hidup senilai Rp41.600.000,00. Oleh karena itu Belanja Modal yang murni untuk kegiatan TA 2024 adalah senilai Rp256.227.354.915,14.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	3.517.441.266,00	6.911.585.555,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 senilai Rp3.517.441.266,00 atau 76,05% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp4.625.116.040,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp6.911.585.555,00 maka terjadi penurunan senilai Rp3.394.144.289,00 atau 49,11% yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Tanah Persil	3.625.116.040,00	3.517.441.266,00	97,03	6.459.061.302,00
Pengadaan Tanah Lapangan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	452.524.253,00
Jumlah	**4.625.116.040,00**	**3.517.441.266,00**	**76,05**	**6.911.585.555,00**

Pada realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 senilai Rp3.517.441.266,00 terdapat pembayaran utang senilai Rp1.647.236.800,00 atas pengadaan tanah tahun-tahun sebelumnya. Pembayaran tersebut terdapat pada DPRKPP senilai Rp1.242.327.000,00 untuk utang tahun 2020 dan Rp363.309.800,00 untuk utang tahun 2023. Selain itu, pembayaran utang tanah juga terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp41.600.000,00 untuk utang tahun 2023, sehingga Belanja Modal Tanah yang murni untuk kegiatan TA 2024 adalah senilai Rp1.870.204.466,00.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	53.762.258.658,00	17.801.793.264,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 senilai Rp53.762.258.658,00 atau 91,08% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp59.024.456.961,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp17.801.793.264,00 maka Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp35.960.465.394,00 atau 202,00%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Alat Besar	0,00	0,00	0,00	84.750.000,00
Pengadaan Alat Bantu	745.864.070,00	704.451.000,00	94,45	285.050.800,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	11.016.354.474,00	10.903.817.450,00	98,98	3.465.228.925,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	162.234.000,00	159.890.000,00	98,56	146.925.300,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	103.609.750,00	103.094.000,00	99,50	11.980.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	62.105.500,00	59.079.500,00	95,13	0,00
Pengadaan Alat Ukur	549.390.800,00	523.875.800,00	95,36	31.338.400,00
Pengadaan Alat Pengolahan	69.255.000,00	69.200.000,00	99,92	42.395.592,00
Pengadaan Alat Kantor	4.474.663.936,00	3.882.648.000,00	86,77	1.061.114.427,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.444.620.430,00	13.000.622.531,00	96,70	4.127.029.470,00
Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	33.900.000,00
Pengadaan Alat Studio	1.412.398.550,00	1.379.839.000,00	97,69	332.359.500,00
Pengadaan Alat Komunikasi	122.093.750,00	121.300.000,00	99,35	22.877.000,00
Pengadaan Peralatan Pemancar	26.633.400,00	26.400.000,00	99,12	0,00
Pengadaan Alat Kedokteran	2.969.730.215,00	2.774.136.189,00	93,41	740.917.900,00
Pengadaan Alat Kesehatan Umum	3.456.294.752,00	3.247.469.375,00	93,96	4.062.115.549,00
Pengadaan Unit Alat Laboratorium	338.358.373,00	333.809.000,00	98,66	94.500.000,00
Pengadaan Alat Peraga Praktik Sekolah	256.925.000,00	253.800.000,00	98,78	250.000.000,00
Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	49.500.000,00
Pengadaan Komputer Unit	1.084.179.521,00	1.040.199.800,00	95,94	1.458.917.808,00
Pengadaan Peralatan Komputer	4.407.394.815,00	4.294.542.645,00	97,44	881.006.907,00
Pengadaan Sumur	0,00	0,00	0,00	19.664.686,00
Pengadaan Pengolahan dan Pemurnian	480.000.000,00	440.000.000,00	91,67	0,00
Pengadaan Alat SAR	264.047.250,00	253.510.000,00	96,01	40.997.000,00
Pengadaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	219.833.610,00	218.360.000,00	99,33	196.344.000,00
Pengadaan Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	361.430.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS	4.579.014.101,00	4.247.631.963,00	92,76	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	8.769.455.664,00	5.714.682.405,00	65,17	0,00
Jumlah	**59.024.456.961,00**	**53.762.258.658,00**	**91,08**	**17.801.793.264,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 yang rendah terjadi pada Belanja Modal Alat Kantor 86,77% dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 65,17%. Rendahnya realisasi Belanja Modal tersebut disebabkan karena adanya

kendala teknis diantaranya lelang kontrak yang terlambat, tidak tersedianya peralatan sesuai kebutuhan atau penyedia peralatan terbatas.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
54.193.152.010,71	226.664.480.433,52

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 senilai Rp54.193.152.010,71 atau 97,93% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp55.337.474.978,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp226.664.480.433,52 maka Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp172.471.328.422,81 atau 76,09%. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	53.792.643.233,00	52.769.172.711,71	98,10	179.261.090.255,52
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	235.831.745,00	229.317.000,00	97,24	47.403.390.178,00
Pengadaan Tugu/Tanda Batas	175.000.000,00	174.753.000,00	99,86	0,00
Pengadaan Tugu/Tanda Batas	1.134.000.000,00	1.019.909.299,00	89,94	0,00
Jumlah	**55.337.474.978,00**	**54.193.152.010,71**	**97,93**	**226.664.480.433,52**

Pada realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 senilai Rp54.193.152.010,71 terdapat pembayaran utang tahun 2017 untuk pekerjaan penataan Kawasan *Sport Center* senilai Rp286.488.234,00 pada DPUPR. sehingga Belanja Gedung dan Bangunan yang murni untuk kegiatan Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 adalah senilai Rp53.906.663.776,71.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
193.413.536.165,43	139.194.648.564,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 senilai Rp193.413.536.165,43 atau 98,82% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp195.718.125.547,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp139.194.648.564,00, maka terjadi kenaikan senilai Rp54.218.887.601,43 atau 38,95% dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Jalan	129.903.090.647,00	128.666.662.280,00	99,05	59.982.977.149,00
Pengadaan Jembatan	10.215.000.000,00	9.990.510.600,00	97,80	2.625.937.155,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	200.000.000,00	199.900.000,00	99,95	0,00
Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	40.459.652.500,00	40.337.493.119,43	99,70	44.693.206.712,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih	1.600.000.000,00	1.097.829.737,00	68,61	0,00
Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku lainnya	231.743.400,00	228.858.579,00	98,76	2.382.671.316,00
Pengadaan Bangunan Penampung Sampah	3.891.500.000,00	3.822.888.000,00	98,24	20.633.441.000,00
Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	9.077.875.000,00	8.934.393.850,00	98,42	8.350.665.000,00
Pengadaan Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	12.940.000,00
Pengadaan Jaringan Listrik lainnya	139.264.000,00	135.000.000,00	96,94	0,00
Pengadaan Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	38.711.250,00
Pengadaan Jaringan Gas Lainnya	0,00	0,00	0,00	474.098.982,00
Jumlah	**195.718.125.547,00**	**193.413.536.165,43**	**98,82**	**139.194.648.564,00**

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 senilai Rp193.413.536.165,43 digunakan untuk pembayaran utang senilai Rp49.713.511.766,00, sehingga belanja yang murni untuk kegiatan TA 2024 adalah senilai Rp143.700.024.399,43. Adapun pembayaran utang tersebut untuk pengadaan jalan kota dan irigasi oleh DPUPR pada tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing senilai Rp7.457.811.000,00, Rp6.766.258.000,00 dan Rp35.489.442.766,00.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
436.246.075,00	**4.281.600.495,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 senilai Rp436.246.075,00 atau 97,02% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp449.633.075,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp4.281.600.495,00 maka Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp3.845.354.420,00 atau 89,81%. Hal tersebut terjadi karena pergeseran anggaran ke kode rekening Belanja Barang dan Jasa Dana BOS disebabkan pengadaan Aset Tetap Lainnya berupa buku yang dibawah batas nilai kapitalisasi. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Bahan Perpustakaan	400.000.000,00	399.610.000,00	99,90	120.850.000,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya Dana BOS	49.633.075,00	36.636.075,00	73,81	4.160.750.495,00
Jumlah	**449.633.075,00**	**436.246.075,00**	**97,02**	**4.281.600.495,00**

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.551.957.540,00	**1.185.910.000,00**

Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2024 berupa Aset Tak Berwujud berupa *software* senilai Rp2.551.957.540,00 atau 91,34% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp2.793.776.083,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp1.185.910.000,00 maka terjadi kenaikan senilai Rp1.366.047.540,00 atau 115,19%. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan *Software*	0,00	0,00	0,00	72.150.000,00
Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.773.776.083,00	2.551.957.540,00	92,00	1.113.760.000,00
Pengadaan Aset Lainnya BLUD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**2.793.776.083,00**	**2.551.957.540,00**	**91,34**	**1.185.910.000,00**

Penjelasan Belanja Modal Aset Lainnya sebagai berikut.

a. Terdapat pemilihan kode rekening Belanja Modal Aset Lainnya berupa Hak Cipta, dan *Goodwill* yang yang seharusnya merupakan pengadaan *Softwar*e dan terdapat juga penggunaan kode rekening tersebut yang berisi pembuatan video promosi layanan.

b. Pengadaan Aset Lainnya TA 2024 berupa pembuatan video layanan, publikasi dan promosi senilai total Rp271.000.000,00 terdapat pada DISDUKCAPIL senilai Rp7.000.000,00, DPPPAPPKB senilai Rp7.000.000,00, DKISP senilai Rp57.000.000,00, dan DISBUDPORAPAR senilai Rp200.000.000,00.

c. Pengadaan Aset Tak Berwujud berupa kajian senilai total Rp1.777.171.540,00 terdapat pada BAPPEDA LITBANG senilai Rp1.388.000.000,00, DLH senilai Rp277.206.100,00, DPPPAPPKB senilai Rp70.285.440,00 dan DPRKPP senilai Rp41.680.000,00.

d. Pengadaan ATB berupa *software* senilai total Rp503.786.000,00 terdapat pada DKISP senilai Rp80.950.000,00, DPUPR senilai Rp345.000.000,00, DISDIK senilai Rp10.500.000,00, DISKAN senilai Rp47.800.000,00, dan SETDA senilai Rp19.536.000,00.

5.1.2.3. BELANJA TAK TERDUGA

31 Desember 2024	31 Desember 2023
223.879.500,00	767.355.931,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada TA 2024 terdapat realisasi Belanja Tak Terduga senilai Rp223.879.500,00 atau 8,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp2.800.000.000,00. Bila dibanding TA 2023 realisasi Belanja Tidak Terduga senilai Rp767.355.931,00, terjadi penurunan senilai Rp543.476.431,00 atau 70,82%.

Belanja Tak Terduga dilaksanakan oleh perangkat daerah fungsional yang ditunjuk dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 59 Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Per SKPD Fungsional

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Dinas Kesehatan	223.879.500,00	14.500.000,00
2	Dinas Pendidikan	0,00	61.393.739,00
3	Bappeda Litbang	0,00	8.357.692,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	683.104.500,00
	Jumlah	**223.879.500,00**	**767.355.931,00**

Belanja Tak Terduga juga dapat diuraikan per jenis belanja menjadi rincian di bawah ini.

Tabel 60 Rincian Belanja Tak Terduga Per Jenis Belanja TA 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Tanggal
1	Belanja KLB Polio Makanan dan Minuman petugas dan Kader Kesehatan Putaran 1 Kota Tarakan Berdasarkan Kemenkes No. HK.01.07/MENKES/1031/2024	74.626.500,00	30 Oktober 2024
2	Belanja KLB Polio Makanan dan Minuman petugas dan Kader Kesehatan Putaran 2 Kota Tarakan Berdasarkan Kemenkes No. HK.01.07/MENKES/1031/2024	149.253.000,00	
Jumlah		**223.879.500,00**	

5.1.2.4. TRANSFER

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi pada Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023.

5.1.3. PEMBIAYAAN

31 Desember 2024	31 Desember 2023
37.882.279.835,24	**143.487.097.097,94**

Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Tarakan (Neto) TA 2024 dan TA 2023 terealisasi surplus masing-masing senilai Rp37.882.279.835,24 dan Rp143.487.097.097,94. Bila dibandingkan TA 2024 dan TA 2023 maka terdapat penurunan senilai Rp105.604.817.262,70 atau 73,60%. Adapun realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Tarakan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
39.881.536.635,24	**146.487.097.097,94**

Penerimaan Pembiayaan TA 2024 terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya senilai Rp39.881.536.635,24. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp146.487.097.097,94 maka Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp106.605.560.462,70 atau 72,77%.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.999.256.800,00	**3.000.000.000,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 senilai Rp1.999.256.800,00 yaitu Penyertaan Modal berupa uang kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan. Bila dibandingkan dengan TA 2023 yang senilai Rp3.000.000.000,00 maka terjadi penurunan senilai Rp1.000.743.200,00 atau 33,36%. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Kepada Perumda TA 2024

Dokumen Bukti	Tanggal	Anggaran	Realisasi	%
65.71/04.0/000001/Pembiayaan/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	13 Maret 2024	2.000.000.000,00	856.984.650,00	**99,96**
65.71/04.0/000002/Pembiayaan/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	13 Agustus 2024		1.142.272.150,00	
Jumlah		**2.000.000.000,00**	**1.999.256.800,00**	**99,96**

5.1.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

31 Desember 2024	31 Desember 2023
51.119.851.910,77	**39.881.536.635,24**

Dalam pelaksanaan APBD TA 2024 terdapat SILPA senilai Rp51.119.851.910,77 yang merupakan selisih lebih antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. Bila dibandingkan dengan SILPA TA 2023 senilai Rp39.881.536.635,24 maka SILPA TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp11.238.315.275,53 atau 28,18%. Adapun rincian SILPA tahun berkenaan adalah sebagai berikut.

Tabel 62 Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Sisa Dana Alokasi Umum (*Spesific Grant)*	6.490.583.996,00	9.970.182.599,04
Sisa Dana Bagi Hasil (*Spesific Grant)*	103.992.300,00	5.022.898.000,00
Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik	28.433.602,00	307.225,00
Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik	29.228.094.350,10	4.143.659.564,00
Sisa Dana Insentif Fiskal	57.217.554,00	89.980.342,00
Sisa Dana BLUD	11.567.672.633,25	15.685.048.577,94
Sisa Dana BOSP	2.403.210.663,42	2.491.120.457,42
Sisa Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	46.448.059,84
Sisa Dana BOK Puskesmas	1.116.609.664,00	2.345.243.167,00
Sisa Penerimaan PAD	124.037.148,00	86.648.643,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**51.119.851.910,77**	**39.881.536.635,24**

SiLPA sangat berguna sebagai penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit pada APBD tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga berguna untuk menopang belanja operasi untuk kegiatan pemerintahan pada awal tahun berikutnya sesuai peraturan perundangan-undangan. Rincian SiLPA dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Sisa Dana Alokasi Umum (*Spesific Grant*) atau yang telah jelas peruntukannya pada tahun 2024 senilai Rp6.490.583.996,00 sedangkan tahun sebelumnya senilai Rp9.970.182.599,04.
b. Sisa Dana Bagi Hasil (*Spesific Grant*) atau yang telah jelas peruntukannya pada tahun 2024 senilai Rp103.992.300,00 sedangkan tahun sebelumnya senilai Rp5.022.898.000,00.
c. Sisa Dana Alokasi Khusus tahun 2024 terdiri dari Fisik senilai Rp28.433.602,00 dan Non Fisik senilai Rp29.228.094.350,10 sedangkan tahun sebelumnya masing-masing senilai Rp307.225,00 dan Rp4.143.659.564,00.
d. Sisa Dana Insentif Fiskal senilai Rp57.217.554,00 sedangkan tahun sebelumnya senilai Rp89.980.342,00.
e. Sisa Dana BLUD senilai Rp11.567.672.633,25 yang terdapat pada 1 (satu) Rumah Sakit, 6 (enam) Puskesmas, dan 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Daerah sedangkan saldo tahun sebelumnya senilai Rp15.685.048.577,94.
f. Sisa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan senilai Rp2.403.210.663,42 sedangkan tahun sebelumnya senilai Rp2.491.120.457,42.
g. Sisa Dana BOK pada 6 (enam) Puskesmas pada SKPD Dinas Kesehatan senilai Rp1.116.609.664,00 terdapat pada rekening Bank BNI sedangkan tahun sebelumnya senilai Rp2.345.243.167,00.
h. Sisa Penerimaan PAD senilai Rp124.037.148,00 terdiri dari Saldo Rekening Penampungan PBB pada Bank BCA senilai Rp5.523.148,00 dan saldo di kas

Bendahara Penerimaan pada SKPD DKUKMP berupa penerimaan Retribusi Daerah senilai Rp118.514.000,00.

5.2. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	**39.881.536.635,24**	**146.487.097.097,94**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya atau SiLPA dari pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tarakan tahun anggaran sebelumnya untuk tahun 2024 senilai Rp39.881.536.635,24. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp146.487.097.097,94, maka terdapat penurunan senilai Rp106.605.560.462,70 atau 72,77%.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**39.881.536.635,24**	**146.487.097.097,94**

Penggunaan SAL TA 2024 merupakan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yaitu senilai Rp39.881.536.635,24. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp146.487.097.097,94, maka terdapat penurunan senilai Rp106.605.560.462,70 atau 72,77%.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**51.119.851.910,77**	**39.881.536.635,24**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp51.119.851.910,77. Bila dibandingkan dengan SILPA TA 2023 senilai Rp39.881.536.635,24 maka SILPA TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp11.238.315.275,53 atau 28,18%. Rincian SiLPA selengkapannya terdapat pada CaLK dengan Nomor **Referensi 5.1.4**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	**0,00**	**0,00**

Selama TA 2023 dan 2024 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya ataupun koreksi terhadap Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

5.2.5. Lain-lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Pada TA 2024 dan 2023 tidak terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi SAL atau nihil.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	51.119.851.910,77	39.881.536.635,24

Berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2024 diketahui Saldo Anggaran Lebih Akhir senilai Rp51.119.851.910,77. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp39.881.536.635,24, maka terdapat penurunan senilai Rp11.238.315.275,53 atau 28,18%. Berdasarkan kaitannya dengan saldo kas, maka Saldo Anggaran Lebih Akhir dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 63 Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kas di Kas Daerah	35.913.844.950,10	19.228.393.115,04
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	118.514.000,00	85.283.258,00
Kas di BLUD	11.567.672.633,25	15.685.048.577,94
Kas Dana BOS	2.403.210.663,42	2.491.120.457,42
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	46.448.059,84
Kas Dana BOK	1.116.609.664,00	2.345.243.167,00
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	**51.119.851.910,77**	**39.881.536.635,24**

Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kas di Kas Daerah senilai Rp35.913.844.950,10 terdiri atas saldo rekening Bank Kaltimtara senilai Rp35.908.321.802,10 dan saldo Rekening Bank BCA senilai Rp5.523.148,00.
b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp118.514.000,00 pada SKPD DKUKMP berupa penerimaan Retribusi Los senilai Rp45.579.000,00 dan retribusi tempat khusus parkir senilai Rp72,935,000.00.
c. Selain Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Penerimaan, terdapat juga saldo pada Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana BOK yang telah jelas peruntukannya terutama untuk kegiatan operasional tahun berikutnya sesuai peraturan perundangan-undangan.

5.3. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Neraca Pemerintah Kota Tarakan menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2024 dengan nilai Aset senilai Rp6.241.457.202.119,84, Kewajiban senilai Rp161.050.151.625,38 dan Ekuitas senilai Rp6.080.407.050.494,46. Bila dibandingkan dengan Neraca Per 31 Desember 2023, nilai Aset senilai Rp6.266.260.653.053,87, Kewajiban senilai Rp217.461.497.625,07 dan Ekuitas senilai Rp6.048.799.155.428,80. Terdapat penurunan nilai Aset pada tahun 2024 senilai Rp24.803.450.934,03 atau 0,40% dan nilai Kewajiban turun Rp56.411.345.999,69 atau 25,94% serta nilai Ekuitas atau kekayaan bersih mengalami penurunan senilai Rp31.607.895.065,66 atau 0,52%. Hal tersebut dijabarkan dengan rinci pada masing-masing akun Neraca sebagai berikut.

5.3.1. ASET

31 Desember 2024	31 Desember 2023
6.241.457.202.119,84	6.266.260.653.053,87

Saldo Aset per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp6.241.457.202.119,84 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp6.266.260.653.053,87, maka terdapat penurunan saldo Aset senilai Rp24.803.450.934,03 atau 0,40%. Saldo rincian Aset yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Properti Investasi dan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 64 Rincian Aset per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	252.124.932.065,42	166.828.025.038,35	85.296.907.027,07	51,13
Investasi Jangka Panjang	456.896.102.313,48	373.569.250.060,31	83.326.852.253,17	22,31
Aset Tetap	5.093.987.698.030,63	5.100.238.936.700,73	(6.251.238.670,10)	(0,12)
Aset Lainnya	216.480.241.767,19	410.161.126.484,23	(193.680.884.717,04)	(47,22)
Properti Investasi	221.968.227.943,12	215.463.314.770,25	6.504.913.172,87	3,02
Jumlah	**6.241.457.202.119,84**	**6.266.260.653.053,87**	**(24.803.450.934,03)**	**(0,40)**

5.3.1.1. ASET LANCAR

31 Desember 2024	31 Desember 2023
252.124.932.065,42	166.828.025.038,35

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, serta Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat digunakan atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp252.124.932.065,42 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp166.828.025.038,35 maka terdapat kenaikan saldo Aset Lancar senilai Rp85.296.907.027,07 atau 51,13%. Adapun rincian Aset Lancar terdiri dari:

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
35.913.844.950,10	19.228.393.115,04

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp35.913.844.950,10 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 dan Rp19.228.393.115,04 yang maka terdapat kenaikan saldo Kas di Kasda senilai Rp16.685.451.835,06 atau 86,78%. Saldo Kas di Kasda merupakan posisi saldo pada rekening giro Pemerintah Kota Tarakan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Saldo pada seluruh rekening di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Tarakan terdapat pada **lampiran 1**. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 65 Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	No. Rekening	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Bank Kaltimtara Cabang Tarakan	0051300021	35.908.321.802,10	19.227.027.730,04	16.681.294.072,06	86,76
Bank BCA Cabang Tarakan	7805706333	5.523.148,00	1.365.385,00	4.157.763,00	304,51
Jumlah		**35.913.844.950,10**	**19.228.393.115,04**	**16.685.451.835,06**	**86,78**

Pada Kas di Kas Daerah dapat dijelaskan diantaranya:

a. Rekening Bank Kaltimtara Cabang Tarakan merupakan Rekening Giro Kas Umum Daerah untuk mengelola seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat serta Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, rekening bank tersebut digunakan oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk melayani kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saldo pada rekening Bank Kaltim Cabang Tarakan per 31 Desember 2024 senilai Rp35.908.321.802,10 sedangkan posisi saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp19.227.027.730,04.

b. Rekening Bank BCA Cabang Tarakan digunakan sejak tahun 2023 untuk menampung pendapatan yang berasal dari pembayaran PBB-P2. Saldo rekening

tersebut setiap hari dipindahbukukan ke Rekening Bank Kaltimtara Cabang Tarakan kecuali pada akhir tahun, saldo per 31 Desember 2024 pada rekening tersebut senilai Rp5.523.148,00 adalah yang belum sempat dipindahbukukan atau baru dilakukan pada awal tahun berikutnya.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah nihil. Saldo rekening bank Bendahara Pengeluaran maupun saldo rekening lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
118.514.000,00	85.283.258,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp118.514.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp85.283.258,00, maka terdapat kenaikan saldo Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp33.230.742,00 atau 38,97%. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 66 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	17.736.263,00
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	0,00	11.752.000,00
3	Dinas Perhubungan	0,00	26.869.995,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	22.125.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	3.800.000,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	118.514.000,00	0,00
7	Kecamatan Tarakan Utara	0,00	3.000.000,00
	Jumlah	**118.514.000,00**	**85.283.258,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan senilai Rp118.514.000,00 berupa penerimaan retribusi daerah yang belum disetorkan per 31 Desember 2024 atau baru disetorkan pada tahun berikutnya yang terdiri dari :

a. Retribusi Pelayanan Pasar atau Retribusi Los senilai Rp45.579.000,00; dan
b. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir senilai Rp72.935.000,00.

5.3.1.1.4. Kas di BLUD	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	11.567.672.633,25	**15.685.048.577,94**

Kas di BLUD merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 pada 8 (delapan) BLUD adalah senilai Rp11.567.672.633,25 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp15.685.048.577,94, maka terdapat penurunan saldo Kas di BLUD senilai Rp4.117.375.944,69 atau 26,25%. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 67 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT)	8.173.189.956,57	50.237.037.520,99	53.787.306.484,42	4.622.920.993,14
Puskesmas Karang Rejo	3.919.527.103,97	4.782.440.109,10	5.820.430.994,88	2.881.536.218,19
Puskesmas Gunung Lingkas	1.045.080.599,65	1.914.281.611,85	1.773.040.369,00	1.186.321.842,50
Puskesmas Juata	1.007.978.556,73	2.121.709.728,29	2.356.579.492,60	773.108.792,42
Puskesmas Sebengkok	559.365.296,50	1.903.774.134,85	1.845.750.343,05	617.389.088,30
Puskesmas Mamburungan	979.907.064,52	1.470.111.889,07	1.759.681.380,00	690.337.573,59
Puskesmas Pantai Amal	0,00	752.563.052,33	523.779.432,00	228.783.620,33
Laboratorium Kesehatan Daerah	0,00	993.213.459,78	425.938.955,00	567.274.504,78
Jumlah	**15.685.048.577,94**	**64.175.131.506,26**	**68.292.507.450,95**	**11.567.672.633,25**

Kas di BLUD senilai Rp11.567.672.633,25 dengan uraian penjelasan sebagai berikut.

1) Rumah Sakit Kota Tarakan

Rumah Sakit Kota Tarakan membukukan pendapatan BLUD senilai Rp50.237.037.520,99 dan total mutasi kurang berupa belanja senilai Rp53.787.306.484,42 yang terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp166.128.416,00, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp49.533.325.111,42 dan

Belanja Modal senilai Rp4.087.852.957,00. RSUKT adalah satu-satunya BLUD Pemerintah Kota Tarakan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Saldo Kas pada RSUKT Per 31 Desember 2024 senilai Rp4.622.920.993,14 terdiri dari:

a) Saldo di Kas Bendahara Penerimaan RSUKT senilai Rp743.700,00;
b) Saldo Bank Mandiri Cabang Tarakan dengan nomor rekening 1490011560895 senilai Rp1.589.374.459,85;
c) Saldo Bank Kaltimtara Cabang Tarakan dengan nomor rekening 51406061 senilai Rp2.645.647.705,22;
d) Saldo Bank BNI Cabang Tarakan nomor rekening 1785978513 senilai Rp814.527,00;
e) Saldo Bank BRI Cabang Tarakan nomor rekening 18301002049301 senilai Rp310.949.326,45; dan
f) Saldo Bank BCA Cabang Tarakan nomor rekening 7805788895 senilai Rp75.391.274,62.

2) Puskesmas Karang Rejo

Puskesmas Karang Rejo membukukan Pendapatan BLUD senilai Rp4.782.440.109,10 dan total Belanja senilai Rp5.820.430.994,88 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp4.897.380.851,88 Belanja Modal senilai Rp867.763.867,00 dan Belanja Pegawai senilai Rp55.286.276,00.

3) Puskesmas Gunung Lingkas

Puskesmas Gunung Lingkas membukukan Pendapatan BLUD senilai Rp1.914.281.611,85 dan total Belanja senilai Rp1.773.040.369,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp13.447.455,00, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.660.677.914,00, Belanja Modal senilai Rp98.915.000,00.

4) Puskesmas Juata

Puskesmas Juata membukukan Pendapatan BLUD senilai Rp2.121.709.728,29 dan total belanja senilai Rp2.356.579.492,60 yang terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp10.468.910,00, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.687.540.202,60 dan Belanja Modal senilai Rp658.570.380,00.

5) Puskesmas Sebengkok

Puskesmas Sebengkok membukukan Pendapatan BLUD senilai Rp1.903.774.134,85 sedangkan total Belanja senilai Rp1.845.750.343,05 yang

terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp10.022.847,00, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.494.611.886,05 dan Belanja Modal senilai Rp341.115.610,00.

6) Puskesmas Mamburungan

Puskesmas Mamburungan membukukan Pendapatan BLUD senilai Rp1.470.111.889,07 sedangkan total Belanja senilai Rp1.759.681.380,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp7.681.750,00, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.165.946.630,00, dan Belanja Modal senilai Rp586.053.000,00.

7) Puskesmas Pantai Amal

Puskesmas Pantai Amal pada awal pembentukannya di tahun 2024 ini membukukan Pendapatan BLUD senilai Rp706.114.992,49 sedangkan total Belanja senilai Rp523.779.432,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp3.667.589,00, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp425.790.953,00 dan Belanja Modal senilai Rp94.320.890,00.

8) Laboratorium Kesehatan Daerah

Laboratorium Kesehatan Daerah yang baru terbentuk menjadi BLUD pada tahun 2024 membukukan Pendapatan BLUD senilai Rp993.213.459,78 sedangkan total Belanja yaitu Belanja Barang dan Jasa senilai Rp425.938.955,00.

5.3.1.1.5. Kas Dana BOS

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.403.210.663,42	**2.491.120.457,42**

Kas Dana BOS termasuk didalamnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana BOSP adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar dan juga mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Kas Dana BOS terdapat pada sekolah-sekolah di Dinas Pendidikan Kota Tarakan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.403.210.663,42 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.491.120.457,42, maka terdapat penurunan saldo Kas Dana BOS senilai Rp87.909.794,00 atau 3,53%. Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 68 Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
BOS SD dan SMP Negeri	2.491.120.457,42	32.307.526.668,00	32.398.522.033,00	2.400.125.092,42
BOS SD dan SMP Swasta	0,00	6.779.947.733,00	6.779.947.733,00	0,00
BOP PAUD	0,00	2.890.216.500,00	2.890.216.349,00	151,00
BOP Kesetaraan	0,00	2.122.770.000,00	2.119.684.580,00	3.085.420,00
Jumlah	**2.491.120.457,42**	**44.100.460.901,00**	**44.188.370.695,00**	**2.403.210.663,42**

Kas Dana BOS tersebut di atas bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan langsung diterima oleh rekening sekolah-sekolah serta telah melalui pengesahan Pendapatan dan Belanja yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Dana BOS SD dan SMP Negeri per 31 Desember 2024 membukukan Pendapatan senilai Rp32.307.526.668,00 dan total Belanja senilai Rp32.398.522.033,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp78.260.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp28.035.993.995,00 serta Belanja Modal senilai Rp4.284.268.038,00 Sehingga terdapat saldo akhir senilai Rp2.400.125.092,42 bila dibanding saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.491.120.457,42.

b) Dana BOS SD dan SMP Swasta per 31 Desember 2024 membukukan Pendapatan dan Belanja senilai yang sama senilai Rp6.779.947.733,00. Adapun saldo kas terakhir dan pada tahun sebelumnya tidak diakui dikarenakan anggaran dan realisasi belanja tersebut telah tercatat sebagai Belanja Hibah ke Satdikmen Swasta.

c) Dana BOP PAUD per 31 Desember 2024 membukukan Pendapatan senilai Rp2.890.216.500,00 dan juga belanja senilai Rp2.890.216.349,00 yang terdiri dari PAUD Negeri senilai Rp203.549.849,00 sedangkan Swasta senilai Rp2.686.666.500,00 sehingga terdapat saldo akhir kas pada PAUD Negeri senilai Rp151,00, sedangkan saldo kas PAUD Swasta Rp0,00.

d) Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2024 membukukan pendapatan senilai Rp2.122.770.000,00 dan juga belanja senilai Rp2.119.684.580,00 sehingga terdapat saldo akhir kas senilai Rp3.085.420,00.

Rekening sekolah dan saldonya per 31 Desember 2024 selengkapnya terdapat pada **Lampiran 1.**

5.3.1.1.6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	46.448.059,84

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 atau nihil dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp46.448.059,84, maka terdapat penurunan saldo Kas Dana BOS senilai Rp46.448.059,84 atau 100,00%. Tidak terdapat saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 dikarenakan Puskesmas Pantai Amal telah beralih statusnya menjadi BLUD sehingga saldo tersebut telah dimutasikan pada rekening BLUD.

5.3.1.1.7. Kas Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.116.609.664,00	2.347.320.267,00

Kas Lainnya merupakan saldo kas pada SKPD/Unit Kerja selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP. Kas Lainnya terdiri dari Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Prolanis pada Puskesmas.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.116.609.664,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.347.320.267,00, maka terdapat penurunan saldo Kas Lainnya senilai Rp1.230.710.603,00 atau 52,43%. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 69 Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Keterangan	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
Puskesmas Gunung Lingkas	BOK	447.641.794,00	230.855.499,00	497.294.606,00	181.202.687,00
Puskesmas Karang Rejo	BOK	389.671.988,00	308.791.606,00	523.751.419,00	174.712.175,00
Puskesmas Mamburungan	BOK	307.042.583,00	204.760.300,00	352.619.806,00	159.183.077,00
Puskesmas Juata	BOK	424.306.293,00	429.133.465,00	514.927.434,00	338.512.324,00
Puskesmas Sebengkok	BOK	575.281.609,00	271.957.726,00	700.367.971,00	146.871.364,00
Puskesmas Pantai Amal	BOK	201.298.900,00	303.822.237,00	388.993.100,00	116.128.037,00
Puskesmas Gunung Lingkas	Prolanis	0,00	5.539.300,00	5.539.300,00	0,00
Puskesmas Karang Rejo	Prolanis	0,00	108.130.100,00	108.130.100,00	0,00
Puskesmas Mamburungan	Prolanis	0,00	27.445.901,99	27.445.901,99	0,00

Uraian	Keterangan	Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2024
Puskesmas Juata	Prolanis	0,00	6.524.200,00	6.524.200,00	0,00
Puskesmas Sebengkok	Prolanis	0,00	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00
Puskesmas Pantai Amal	Prolanis	2.077.100,00	15.740.000,00	17.817.100,00	0,00
Jumlah		**2.347.320.267,00**	**1.933.350.334,99**	**3.164.060.937,99**	**1.116.609.664,00**

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024, Dinas Kesehatan memperoleh alokasi Dana BOK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pendapatan dan Belanja Dana BOK tersebut telah melalui pengesahan dan terdapat sisa saldo Kas BOK yang akan mempengaruhi jumlah salur/alokasi BOK untuk tahun berikutnya. Adapun yang pencairan dananya ditransfer atau diterima langsung pada rekening Bank Negera Indonesia (BNI) atas nama seluruh Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1**.

5.3.1.1.8. Piutang Pajak

31 Desember 2024	31 Desember 2023
63.465.528.714,79	**60.397.386.207,53**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp63.465.528.714,79 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp60.397.386.207,53, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Pajak senilai Rp3.068.142.507,26 atau 5,08%. Saldo Piutang Pajak merupakan tagihan pajak yang ditetapkan namun belum dilunasi sampai dengan akhir TA 2024 dengan rincian selengkapnya terdapat pada **Lampiran 2**. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 70 Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pajak Hotel	122.762.915,00	122.762.915,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	1.450.976.167,88	1.898.298.694,98	(447.322.527,10)	(23,56)
Pajak Hiburan	139.018.750,00	109.018.750,00	30.000.000,00	27,52
Pajak Reklame	1.823.933.020,18	1.684.108.280,58	139.824.739,60	8,30
Pajak Galian C	66.393.050,00	66.393.050,00	0,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan	300.003,00	300.003,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	124.277.179,73	124.079.016,97	198.162,76	0,16
Pajak Parkir	5.278.000,00	5.278.000,00	0,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan P2	59.732.589.629,00	56.387.147.497,00	3.345.442.132,00	5,93
Jumlah	**63.465.528.714,79**	**60.397.386.207,53**	**3.068.142.507,26**	**5,08**

5.3.1.1.9. Piutang Retribusi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.117.565.706,00	1.407.079.503,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.117.565.706,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.407.079.503,00, maka terdapat penurunan saldo Piutang Retribusi senilai Rp710.486.203,00 atau 50,49%. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 71 Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pengendalian Menara Telekomunikasi	170.124.700,00	196.145.860,00	(26.021.160,00)	(13,27)
Izin Gangguan	814.524.443,00	814.524.443,00	0,00	0,00
Pelayanan Kepelabuhanan	13.207.330,00	0,00	13.207.330,00	0,00
Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	355.044.443,00	0,00	355.044.443,00	0,00
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.122.000,00	0,00	14.122.000,00	0,00
Pemakaian Kekayaan Daerah	554.173.010,00	396.409.200,00	157.763.810,00	39,80
Pemakaian Laboratorium	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
Pemanfaatan Aset Daerah	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.917.120,00	0,00	5.917.120,00	0,00
Penyewaan Bangunan	87.750,00	0,00	87.750,00	0,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan	171.149.910,00	0,00	171.149.910,00	0,00
Jumlah	**2.117.565.706,00**	**1.407.079.503,00**	**710.486.203,00**	**50,49**

rincian atas Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.3.1.1.10. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
156.664.900,00	0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan per 31 Desember 2024 adalah saldo Piutang Dividen dari Perumda Tarakan Energi Mandiri senilai Rp156.664.900,00. Saldo tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3/HK-VIII/383/2023 ditetapkan senilai Rp456.664.900,00 namun baru disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp300.000.000,00.

5.3.1.1.11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
3.927.439.371,00	4.640.488.870,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.927.439.371,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp4.640.488.870,00, maka terdapat penurunan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp713.049.499,00 atau 15,37%. Saldo tersebut merupakan saldo Piutang BLUD pada 7 (tujuh) Puskesmas. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 72 Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Piutang BLUD RSUKT	3.842.328.871,00	4.554.499.170,00
Piutang BLUD Puskesmas Sebengkok	16.305.000,00	31.055.000,00
Piutang BLUD Puskesmas Juata	11.537.100,00	13.049.200,00
Piutang BLUD Puskesmas Mamburungan	10.582.100,00	4.894.200,00
Piutang BLUD Puskesmas Gunung Lingkas	6.392.100,00	9.919.200,00
Piutang BLUD Puskesmas Karang Rejo	33.747.100,00	27.072.100,00
Piutang BLUD Puskesmas Pantai Amal	6.547.100,00	0,00
Jumlah	**3.927.439.371,00**	**4.640.488.870,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Piutang pada RSU Kota Tarakan senilai Rp3.842.328.871,00 terdiri dari tagihan klaim BPJS Kesehatan senilai Rp3.385.036.700,00, dan tagihan konsultasi dokter spesialis, MCU, TCM, pendapatan jasa layanan serta pendapatan kerja sama yang belum dibayar hingga tahun 2024 oleh pihak ketiga maupun Perusahaan Asuransi Kesehatan lainnya senilai total Rp457.292.171,00.

b. Piutang BLUD pada 5 (lima) Puskesmas senilai Rp85.110.500,00 berupa tagihan klaim BPJS Kesehatan atas pendapatan jasa layanan bulan Desember 2024 sesuai Berita Acara Verifikasi.

Rincian selengkapnya atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah beserta penyisihannya terdapat pada **Lampiran 4**.

5.3.1.1.12. Piutang Transfer

31 Desember 2024	31 Desember 2023
100.257.482.073,00	28.001.165.315,00

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp100.257.482.073,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp28.001.165.315,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Transfer senilai Rp72.256.316.758,00 atau 258,05%.

Saldo Piutang Transfer merupakan kurang salur atas transfer Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang belum direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 73 Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Piutang Transfer Pusat	51.276.936.000,00	2.662,00	51.276.933.338,00
Piutang Transfer Provinsi	48.980.546.073,00	28.001.162.653,00	20.979.383.420,00
Jumlah	**100.257.482.073,00**	**28.001.165.315,00**	**72.256.316.758,00**

Berdasarkan tabel di atas, Piutang Transfer dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 Tanggal 29 Desember 2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 senilai Rp51.276.936.000,00 setelah dikurangi penyaluran Kurang Bayar (termasuk dalam bentuk TDF/DBH Non Tunai) yang telah diselesaikan sampai akhir tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74 Rincian Piutang Transfer – Pusat per 31 Desember 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	6.180.475.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	996.639.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi	16.834.711.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	27.265.111.000,00
Jumlah	**51.276.936.000,00**

b. Saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.89/2024 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 senilai Rp28.001.162.653 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 75 Rincian Piutang Transfer – Provinsi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Kurang Salur TA 2024	Kurang Salur TA 2023
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.344.262.702,00	4.692.735.406,00
Pajak Air Permukaan	177.687.547,00	3.802.163.810,00
Pajak Kendaraan Bermotor	8.099.398.574,00	19.407.452.225,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.359.197.250,00	98.811.212,00
Jumlah	**48.980.546.073,00**	**28.001.162.653,00**

Rincian atas Piutang Transfer dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.3.1.1.13. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	105.292.939,35

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 atau nihil dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp105.292.939,35, maka terdapat penurunan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah senilai Rp105.292.939,35 atau 100,00%. Saldo tahun 2024 bernilai Rp0,00 atau nihil dikarenakan telah disajikan dan direklasifikasi pada Piutang Lainnya sesuai kodefikasi dan rekening akun pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI).

5.3.1.1.14. Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	2.622.901.044,02	156.664.900,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.622.901.044,02 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp156.664.900,00, maka terdapat kenaikan saldo Piutang Lainnya senilai Rp2.466.236.144,02 atau 1.574,21%. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 76 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kelebihan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa	2.515.286.211,74	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	107.614.832,28	156.664.900,00
Jumlah	**2.622.901.044,02**	**156.664.900,00**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Terdapat kelebihan pembayaran bila dibandingkan progres fisik pekerjaan TA 2024 senilai total Rp2.515.286.211,74 terdiri dari:

- Kelebihan pembayaran pada pengadaan dari Belanja Modal senilai Rp2.244.596.991,00 dan pengadaan dari Belanja Hibah TA 2024 senilai Rp269.941.096,00 terdapat pada DPUPR.
- Pengadaan Belanja Bahan Habis Pakai senilai Rp748.125,00 pada Puskesmas Juata yang disebabkan barang belum diperoleh seluruhnya.

b. Terdapat Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp2.622.901.044,02 yang dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 77 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama	Nomor SKTJM	31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal	AngsuranTGR	31 Desember 2024
1	AS	700/SKTJM-5/2022	47.254.545,00		0,00	47.254.545,00
2	MB	700/SKTJM-6/2022	2.750.000,00		0,00	2.750.000,00
3	A	700/SKTJM-19/2022	5.199.500,00	(2.000.000,00)	3.199.500,00	0,00
4	HD	700/SKTJM-08/2022	559.746,65		559.746,65	0,00
5	ZF	700/SKTJM-11/2022	678.075,83		678.075,83	0,00
6	AJR	700/SKTJM-10/2022	11.194.896,00		4.400.000,00	6.794.896,00
7	S	700/SKTJM-12/2022	5.005.626,82		1.650.000,00	3.355.626,82
8	EJP	900.1.11.2/SKTJM-07/2023	6.750.000,00	(1.750.000,00)	5.000.000,00	0,00
9	W	900.1.11.2/SKTJM-06/2023	599.542,05		599.542,05	0,00
10	LEL	900.1.11.2/SKTJM-03/2023	50.100.704,29		27.336.000,00	22.764.704,29
11	HW	900.1.11.2/SKTJM-04/2023	40.571.060,17		15.876.000,00	24.695.060,17
Jumlah			**170.663.696,81**	**(3.750.000,00)**	**59.298.864,53**	**107.614.832,28**

Pada saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian senilai Rp107.614.832,28 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pada tahun 2024, seluruh saldo Tuntutan Ganti Kerugian diklasifikasikan sebagai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian.
b. Koreksi saldo awal dikarenakan terdapat 5 buah bukti Surat Tanda Setoran (STS) yang belum tercatat atau terlaporkan pada tahun sebelumnya yang dirincikan sebagai berikut.
   - 4 (empat) buah STS senilai Rp500.000,00 untuk TGR atas nama A sehingga nilai total STS adalah Rp2.000.000,00.
   - 1 (satu) buah STS Nomor 88/STS/SETDA/2023 tanggal 2023 senilai Rp1.750.000,00 untuk TGR atas nama EJP.

Rincian selengkapnya atas Tuntutan Ganti Kerugian terdapat pada **Lampiran 6**.

5.3.1.1.15. Penyisihan Piutang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(47.498.609.019,07)	**(44.743.756.874,00)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 adalah senilai (Rp47.498.609.019,07) dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai (Rp44.743.756.874,00), maka terdapat kenaikan saldo Penyisihan Piutang senilai (Rp2.754.852.145,07) atau 6,16%. Saldo Penyisihan Piutang terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah atau Piutang BLUD. Rincian Penyisihan Piutang Pajak, Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 78 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Neto (Setelah Penyisihan)
		0 s/d 1 Tahun Lancar 0,5%	1 s/d 2 Tahun Kurang Lancar 10%	2 s/d 5 Tahun Diragukan 50%	Lebih Dari 5 Tahun Macet 100%		
Pajak Hotel	122.762.915,00	0,00	0,00	0,00	122.762.915,00	122.762.915,00	0,00
Pajak Restoran	1.450.976.167,88	2.196.748,39	10.743.660,82	53.426.094,78	797.337.691,16	863.704.195,15	587.271.972,73
Pajak Hiburan	139.018.750,00	150.000,00	0,00	0,00	109.018.750,00	109.168.750,00	29.850.000,00
Pajak Reklame	1.823.933.020,18	1.966.910,36	903.375,00	13.892.625,00	1.393.731.948,06	1.410.494.858,42	413.438.161,76
Pajak Galian C	66.393.050,00	0,00	0,00	0,00	66.393.050,00	66.393.050,00	0,00
Pajak PJU	300.003,00	0,00	0,00	1,50	300.000,00	300.001,50	1,50
Pajak Air Bawah Tanah	124.277.179,73	94.604,26	45.704,00	11.386.979,00	82.125.330,13	93.652.617,39	30.624.562,34
Pajak Parkir	5.278.000,00	0,00	0,00	0,00	5.278.000,00	5.278.000,00	0,00
Pajak Bumi & Bangunan	59.732.589.629,00	32.113.282,84	523.974.107,90	5.135.598.473,50	37.798.995.035,00	43.490.680.899,24	16.241.908.729,76
Jumlah	**63.465.528.714,79**	**36.521.545,85**	**535.666.847,72**	**5.214.304.173,78**	**40.375.942.719,35**	**46.162.435.286,70**	**17.303.093.428,09**

Tabel 79 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Neto
		0 s/d 1 bulan	1 s/d 3 bulan	3 s/d 12 bulan	Lebih dari 12 bulan		
Pengendalian Menara Telekomunikasi	170.124.700,00	0,00	0,00	0,00	170.124.700,00	170.124.700,00	0,00
Izin Gangguan	814.524.443,00	0,00	0,00	0,00	814.524.443,00	814.524.443,00	0,00
Pelayana Kepelabuhanan	13.207.330,00	66.036,65	0,00	0,00		66.036,65	13.141.293,35
Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	6.000.000,00	7.500,00	300.000,00	750.000,00	0,00	1.057.500,00	4.942.500,00
Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	355.044.443,00	1.775.222,22	0,00	0,00	0,00	1.775.222,22	353.269.220,78
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.122.000,00	51.090,00	201.600,00	724.000,00	0,00	976.690,00	13.145.310,00
Pemakaian Kekayaan Daerah	554.173.010,00	1.261.289,35	0,00	0,00	264.101.140,00	265.362.429,35	288.810.580,65
Pemakaian Laboratorium	215.000,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	213.925,00
Pemanfaatan Aset Daerah	4.200.000,00	3.500,00	140.000,00	1.050.000,00	0,00	1.193.500,00	3.006.500,00
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.800.000,00	14.000,00	600.000,00	0,00	0,00	614.000,00	8.186.000,00
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.917.120,00	29.585,60	0,00	0,00	0,00	29.585,60	5.887.534,40
Penyewaan Bangunan	87.750,00	101,25	0,00	33.750,00	0,00	33.851,25	53.898,75
Penyewaan Tanah dan Bangunan	171.149.910,00	340.983,95	6.566.824,00	18.642.440,00	0,00	25.550.247,95	145.599.662,05
Jumlah	**2.117.565.706,00**	**3.550.384,02**	**7.808.424,00**	**21.200.190,00**	**1.248.750.283,00**	**1.281.309.281,02**	**836.256.424,98**

Tabel 80 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Neto (Setelah Penyisihan)
		0 s/d 1 Tahun Lancar 0,5%	1 s/d 2 Tahun Kurang Lancar 10%	2 s/d 5 Tahun Diragukan 50%	Lebih Dari 5 Tahun Macet 100%		
Rumah Sakit Kota Tarakan	3.842.328.871,00	0,00	17.621.819,75	17.666.791,10	19.575.840,50	54.864.451,35	3.787.464.419,65
Puskesmas Sebengkok	16.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.305.000,00
Puskesmas Juata	11.537.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537.100,00
Puskesmas Mamburungan	10.582.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582.100,00
Puskesmas Gunung Lingkas	6.392.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392.100,00
Puskesmas Karang Rejo	33.747.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.747.100,00
Puskesmas Pantai Amal	6.547.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547.100,00
Jumlah	**3.927.439.371,00**	**0,00**	**17.621.819,75**	**17.666.791,10**	**19.575.840,50**	**54.864.451,35**	**3.872.574.919,65**

Saldo Penyisihan Piutang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah senilai Rp17.303.093.428,09 setelah dikurangi penyisihan seluruh piutang pajak senilai Rp46.162.435.286,70.

b. Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah senilai Rp836.256.424,98 setelah dikurangi penyisihan piutang retribusi senilai Rp1.281.309.281,02.

c. Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah senilai Rp3.872.574.919,65 setelah dikurangi penyisihan piutang retribusi senilai Rp54.864.451,35.

5.3.1.1.16. Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2024	31 Desember 2023
79.877.057,54	**299.973.996,76**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp79.877.057,54 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp299.973.996,76, maka terdapat penurunan saldo Beban Dibayar Dimuka senilai Rp220.096.939,22 atau 73,37%.

Beban Dibayar Dimuka terdiri dari pengeluaran karena belanja sewa asrama di Kota Samarinda pada periode pelaporan tahun berjalan yang belum menjadi beban dan berakhir masa sewa pada tahun 2024 serta Premi Asuransi Barang Milik Daerah.

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 81 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Sewa	Jangka Waktu	Beban (Jumlah Hari)	Beban (Rp)	Belum Terpakai (hari)	Beban Dibayar Dimuka
Sewa Asrama Putri Samarinda	130.000.000,00	19 Mei 2024-19 Mei 2025	226	80.493.150,68	139	49.506.849,32
Premi Asuransi Barang Milik Daerah	149.799.000,00	15 Maret 2024-15 Maret 2025	291	119.428.791,78	74	30.370.208,22
Jumlah	**279.799.000,00**		**517**	**199.921.942,46**	**213**	**79.877.057,54**

Penjelasan Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut.

a. Sewa Asrama Putri Samarinda berdasarkan kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 67/L/IV/2024 tanggal 8 April 2024 dengan nama pemilik adalah SRS.

b. Premi Asuransi Barang Milik Daerah senilai Rp149.799.000,00 berupa asuransi terhadap 33 unit kendaraan roda empat (Minibus, Pick-up dan Bus) dengan tahun pembuatan kendaraan 2003-2023 pada Sekretariat Daerah TA 2024 dengan Polis Nomor 1048022124030001 dari PT. Asuransi Umum Daerah Bumida 1967.

Rincian atas Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.3.1.1.17. Persediaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
75.876.230.307,37	**76.680.116.445,47**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp75.876.230.307,37 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp76.680.116.445,47, maka terdapat penurunan saldo Persediaan senilai Rp803.886.138,10 atau 1,05%. Rincian Persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 82 Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 Berdasarkan Kelompok Barang

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan	13.813.359.549,03	15.612.202.143,63	(1.798.842.594,60)	(11,52)
Suku Cadang	118.988.388,00	127.631.196,68	(8.642.808,68)	(6,77)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.869.256.978,57	3.236.540.634,15	632.716.344,42	19,55
Obat-obatan	13.791.876.129,28	13.314.180.293,25	477.695.836,03	3,59
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	44.190.843.869,56	44.294.716.488,31	(103.872.618,75)	(0,23)
Natura dan Pakan	29.017.802,93	94.845.689,45	(65.827.886,52)	(69,41)
Komponen Rambu-Rambu	62.887.590,00	0,00	62.887.590,00	0,00
Jumlah	**75.876.230.307,37**	**76.680.116.445,47**	**(803.886.138,10)**	**(1,05)**

Tabel 83 Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 Berdasarkan Jenis Barang

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.529.905.516,78	15.249.580.687,48	(1.719.675.170,70)	(11,28)
Bahan Kimia	252.132.552,25	87.952.675,00	164.179.877,25	186,67
Bahan Bakar dan Pelumas	7.772.680,00	238.250.600,00	(230.477.920,00)	(96,74)
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	17.750.530,00	(17.750.530,00)	(100,00)
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.072.800,00	5.200.000,00	(3.127.200,00)	(60,14)
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	12.857.500,00	9.300.100,00	3.557.400,00	38,25
Bahan Lainnya	8.618.500,00	4.167.551,15	4.450.948,85	106.80
Suku Cadang Alat Angkutan	14.213.307,83	54.702.606,68	(40.489.298,85)	(74,02)
Suku Cadang Alat Laboratorium	61.030.655,00	17.931.000,00	43.099.655,00	240,36
Suku Cadang Lainnya	43.744.425,17	54.997.590,00	(11.253.164,83)	(20,46)
Alat Tulis Kantor	295.077.951,00	550.844.369,41	(255.766.418,41)	(46,43)
Bahan Cetak	253.430.207,25	852.718.137,70	(599.287.930,45)	(70,28)
Benda Pos	22.959.000,00	2.930.000,00	20.029.000,00	683,58
Bahan Komputer	157.463.650,00	8.288.900,00	149.174.750,00	1.799,69
Perabot Kantor	662.758.242,75	624.140.884,74	38.617.358,01	6,19
Alat Listrik	2.047.093.642,78	477.202.584,85	1.569.891.057,93	328,98
Perlengkapan Dinas	140.208.000,00	5.042.200,00	135.165.800,00	2.680,69
Suvenir/Cendera Mata	66.380.000,00	134.525.500,00	(68.145.500,00)	(50,66)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	223.886.284,78	580.848.057,45	(356.961.772,67)	(61,46)
Obat	12.859.776.494,42	11.990.910.496,98	868.865.997,44	7,25
Obat-Obatan Lainnya (Vaksin)	932.099.634,87	1.323.269.796,27	(391.170.161,40)	(29,56)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	44.190.843.869,56	44.294.716.488,31	(103.872.618,75)	(0,23)
Natura Pakan dan Lainnya	29.017.802,93	94.845.689,45	(65.827.886,52)	(69,41)
Komponen Rambu-Rambu	62.887.590,00	0,00	62.887.590,00	0,00
Jumlah	**75.876.230.307,37**	**76.680.116.445,47**	**(803.886.138,10)**	**(1,05)**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut.

a. Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi paling besar senilai Rp13.442.644.533,98 terdapat pada DPUPR, Dinas Perhubungan senilai Rp62.850.000,00 dan Dinas Lingkungan Hidup Rp11.600.000,00;

b. Persediaan Bahan Kimia terdiri dari bahan racun berbahaya dan bahan laboratorium yang sebagian besar nilainya terdapat pada Instalasi Farmakmin senilai Rp229.576.332,25 sisanya ada di beberapa puskesmas dan RSUKT;

c. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas terdapat pada Labkesda senilai Rp1.108.800,00 dan BPBD senilai Rp6.663.880,00;

d. Persediaan Bibit Ternak/Ikan terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp12.857.500,00;

e. Persediaan Alat Tulis Kantor sebagian besar berada pada Dinas Pendidikan atau sekolah-sekolah senilai Rp156.787.762,21;

f. Persediaan Bahan Cetak senilai Rp259.174.457,25 paling besar terdapat pada Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi Dan Pusat Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan senilai Rp89.748.947,00, Dinas Perhubungan Rp65.339.500,00, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Rp18.050.800,00, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Rp22.940.061,70, dan sisanya terdapat pada beberapa perangkat daerah yang lain;

g. Persediaan Obat dan Obat-obatan lainnya senilai Rp12.859.776.494,41 dan Rp932.099.634,87 merupakan saldo obat dan vaksin yang sebagian besar nilainya terdapat pada Dinas Kesehatan dan UPT dibawahnya senilai Rp7.501.018.037,73 dan RSUKT senilai Rp5.088.667.151,72 untuk saldo obat. Sedangkan saldo vaksin untuk Dinas Kesehatan beserta UPT senilai Rp946.411.384,89 dan RSUKT senilai Rp788.191,00. Sisanya tersebar pada perangkat daerah dan sekolah-sekolah berupa obat-obat P3K; dan

h. Persediaan Barang yang Akan Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat merupakan jenis Persediaan dengan jumlah terbesar yaitu senilai Rp44.190.843.869,56 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 84 Rincian Persediaan yang Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	43.670.602.574,56	44.220.502.450,31	(549.899.875,75)	(1,24)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	213.050.200,00	49.064.038,00	163.986.162,00	334,23
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.163.000,00	8.650.000,00	(4.487.000,00)	(51,87)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	286.286.895,00	0,00	286.286.895,00	0,00
Dinas Kesehatan	241.200,00	0,00	241.200,00	0,00
Jumlah	**44.190.843.869,56**	**44.294.716.488,31**	**(103.872.618,75)**	**(0,23)**

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 8**.

Selain saldo Persediaan tersebut diatas, dapat diungkapkan juga terkait persediaan usang senilai total Rp735.804.506,71 yang dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 85 Rincian Persediaan Usang per 31 Desember 2024

Uraian	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sembako Bantuan Bencana atau Tanggap Darurat, danRapid Test Antigen Covid19	83.945.078,00
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Karcis Penyediaan Tempat Parkir Khusus Roda Dua, Roda Empat dan Karcis Masuk Tempat Rekreasi	5.744.250,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	Pil KB yang telah melewati tanggal kadaluarsa	14.987.427,00
Dinas Kesehatan	Obat-obatan dan bahan medis lainnya yang telah melewati tanggal kadaluarsa	382.218.817,55
Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	Obat-obatan dan bahan medis lainnya yang telah melewati tanggal kadaluarsa	248.908.934,16
Jumlah		**735.804.506,71**

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
456.896.102.313,48	**373.569.250.060,31**

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp456.896.102.313,48 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp373.569.250.060,31, maka terdapat kenaikan saldo Investasi Jangka Panjang senilai senilai Rp83.326.852.253,17 atau 22,31%. Investasi Jangka Panjang dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

31 Desember 2024	31 Desember 2023
3.077.613.647,31	**3.066.178.647,31**

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.077.613.647,31 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp3.066.178.647,31, maka terdapat kenaikan saldo Investasi Non Permanen senilai Rp11.435.000,00 atau 0,37%. Nilai Investasi Non Permanen Kota Tarakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 merupakan dana bergulir yang dikelola oleh Bank Kaltimtara dan dimonitoring oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Penerapan penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) pada dana bergulir telah dilakukan sejak tahun 2013. Penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.898.278.806,69, sedangkan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.886.843.806,69 yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir

pada Pemerintah Daerah. Adapun penyisihan dana bergulir Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 86 Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2024

Kualitas	Saldo Per 31 Desember 2024	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan (NRV)
Saldo Bank	3.077.613.647,31			3.077.613.647,31
Lancar	0,00	0,5%	0,00	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00	0,00
Macet	1.886.843.806,69	100%	1.886.843.806,69	0,00
Jumlah	**4.964.457.454,00**		**1.886.843.806,69**	**3.077.613.647,31**

Saldo senilai Rp3.077.613.647,31 terdapat pada Bank Kaltimtara dengan nomor rekening 0051401441 atas nama rekening Proy.Pengemb.Ekt/ Disperindagkop atau saat ini bernama DKUKMP. Selain saldo pada rekening tersebut terdapat juga rekening penampungan sementara dengan nomor rekening 0059000845 atas nama R/P KWJBN SGR – Angsuran DBEK per 31 Desember 2024 yang merupakan milik Bank Kaltimtara dan diketahui terdapat saldo senilai Rp1.837.444,44. Saldo tersebut belum dipindahkan ke rekening Dana Bergulir DKUKMP karena kesulitan dalam menelusuri nama pemilik angsuran karena pembayaran angsuran menggunakan transfer bank lain.

Selama tahun 2024 terdapat pelunasan debitur atas nama W senilai Rp11.135.000,00 dan setoran angsuran atas nama ML senilai Rp300.000,00. Rincian dana bergulir selengkapnya terdapat pada **Lampiran 9.**

5.3.1.2.2. Investasi Permanen

31 Desember 2024	31 Desember 2023
453.818.488.666,17	**370.503.071.413,00**

Investasi Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp453.818.488.666,17 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp370.503.071.413,00, maka terdapat kenaikan saldo Investasi Permanen senilai Rp83.315.417.253,17 atau 22,49%.

Investasi Permanen tersebut berupa penyertaan Modal Pemerintah Kota Tarakan kepada BUMD seperti Bank Kaltimtara Cabang Tarakan dan Perusahaan Umum Daerah. Rincian Investasi Permanen - Penyertaan Modal Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 87 Rincian Investasi Permanen - Penyertaan Modal Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Nilai Investasi 2023	Penambahan Pembiayaan dan Penyertaan Aset 2024	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Koreksi Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya dan Dividen	Kepemilikan	Nilai Investasi 2024
Bank Kaltimtara	72.630.000.000,00	0,00	0,00	3.577.244.945,92	0,96%	72.630.000.000,00
Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan	267.404.588.831,00	7.032.943.449,00	13.224.672.060,00	79.141.350.274,05	100,00%	354.778.696.224,00
Perumda Tarakan Energi Mandiri	4.501.280.546,00	0,00	177.228.647,17	0,00	100,00%	4.678.509.193,17
Perumda Tarakan Media Telekomunikasi	975.720.010,00	0,00	(210.832.859,00)	0,00	100,00%	764.887.151,00
Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri	21.000.423.444,00	0,00	(2.239.062.629,00)	(1.886.905.294,00)	100,00%	16.874.455.521,00
Perumda Tarakan Aneka Usaha	3.991.058.582,00	0,00	(153.786.705,00)	254.668.700,00	100,00%	4.091.940.577,00
Jumlah	**370.503.071.413,00**	**7.032.943.449,00**	**10.798.218.514,17**	**81.086.358.625,97**		**453.818.488.666,17**

Tabel 88 Rincian Mutasi Masuk dan Keluar Investasi Permanen - Penyertaan Modal Daerah

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2024
Bank Kaltimtara	72.630.000.000,00	0,00	0,00	72.630.000.000,00
Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan	267.404.588.831,00	99.398.965.783,05	12.024.858.390,05	354.778.696.224,00
Perumda Tarakan Energi Mandiri	4.501.280.546,00	177.228.647,17	0,00	4.678.509.193,17
Perumda Tarakan Media Telekomunikasi	975.720.010,00	0,00	210.832.859,00	764.887.151,00
Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri	21.000.423.444,00	0,00	4.125.967.923,00	16.874.455.521,00
Perumda Tarakan Aneka Usaha	3.991.058.582,00	254.668.700,00	153.786.705,00	4.091.940.577,00
Jumlah	**370.503.071.413,00**	**99.830.863.130,22**	**16.515.445.877,05**	**453.818.488.666,17**

Investasi Permanen - Penyertaan Modal Daerah pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. PT. Bank BPD Kaltim Kaltara (Bank Kaltimtara)

Nilai Investasi pada PT Bank Kaltimtara per 31 Desember 2024 merupakan penyertaan modal senilai Rp72.630.000.000,00 atau sama dengan porsi senilai 0,96% dari total modal disetor. Penyertaan modal tersebut disajikan menggunakan metode harga perolehan sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Tarakan adalah senilai nominal modal yang sudah disetor. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Tarakan menerima Dividen tahun buku 2023 senilai

Rp3.577.244.945,92 yang tercatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

b. Perumda Tarakan Air Minum Tirta Alam

Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan disajikan menggunakan metode ekuitas atau bukan berbentuk saham dengan kepemilikan 100%. Adapun perubahan nilai investasinya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi Tambah

- Penambahan Pembiayaan berupa uang senilai Rp1.999.256.800,00 dan Penyertaan berupa aset tetap dengan nilai buku Rp5.033.686.649,00.
- Terdapat Laba Tahun Berjalan senilai Rp13.224.672.060,00 berdasarkan laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (*Audited*).
- Koreksi tambah senilai Rp79.141.350.274,05 yang disebabkan karena perubahan metode penyusutan dari metode saldo menurun ganda menjadi metode garis lurus.

Mutasi Kurang

- Koreksi kurang karena penerimaan dividen senilai Rp12.024.858.390,05 berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 16 Tahun 2024 ditetapkan tanggal 16 Februari 2024 tentang Penyerahan Dividen pada Pemerintah Kota Tarakan Tahun Buku 2023.

Saldo akhir senilai Rp354.778.696.224,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

- Penyertaan Modal berupa Aset secara keseluruhan senilai Rp455.423.799.169,91;
- Total Penyertaan Modal berupa uang senilai Rp38.951.694.832,09; dan
- Nilai penyertaan modal berkurang karena saldo Laba/Rugi/Dividen/Laba Ditahan dari sejak perumda tersebut didirikan senilai total Rp139.596.797.778,00.

c. Perumda Tarakan Energi Mandiri

Perumda Tarakan Energi Mandiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2019. Pada tahun 2024 terdapat penambahan dikarenakan mengalami laba tahun 2024 senilai Rp177.228.647,17 berdasarkan laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (*Audited*).

Saldo akhir senilai Rp4.678.509.193,17 dapat diuraikan sebagai berikut.

- Total Penyertaan Modal berupa uang senilai Rp5.500.000.000,00;
- Belum terdapat Penyertaan Modal berupa Aset; dan
- Nilai Penyertaan Modal berkurang karena saldo Laba/Rugi atau Laba Ditahan serta Dividen negatif senilai Rp821.490.806,83.

Terdapat Piutang Dividen senilai Rp156.664.900,00 berdasarkan Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3/HK-VIII/383/2023 bahwa dividen ditetapkan senilai Rp456.664.900,00 namun baru disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp300.000.000,00. Hal tersebut telah diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan Perumda tersebut.

d. Perumda Tarakan Media Telekomunikasi

Perumda Tarakan Media Telekomunikasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2019. Pada tahun 2024 terdapat mutasi kurang senilai Rp210.832.859,00 dikarenakan mengalami rugi tahun berjalan berdasarkan data laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (*Audited*).

Pada saldo akhir senilai Rp764.887.151,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Total Penyertaan Modal berupa uang senilai Rp3.750.000.000,00; dan
- Belum terdapat Penyertaan Modal berupa Aset;
- Nilai penyertaan modal berkurang karena saldo Laba/Rugi atau Laba Ditahan negatif senilai Rp2.985.112.849,00.

e. Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri

Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2019. Pada tahun 2024 terdapat mutasi kurang dikarenakan mengalami rugi/defisit tahun 2024 senilai Rp2.239.062.629,00 dan penyesuaian saldo laba/rugi atas tahun sebelumnya senilai Rp1.886.905.294,00 berdasarkan data laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (*Unaudited*).

Pada saldo akhir senilai Rp16.874.455.521,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penyertaan berupa aset senilai nilai riil Rp25.077.040.358,00;
- Total penyertaan berupa uang senilai Rp2.000.000.000,00; dan
- Nilai Penyertaan Modal berkurang karena saldo Laba/Rugi dan Laba Ditahan bernilai negatif Rp10.202.584.837,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2024 yang telah diserahkan, apabila dibandingkan dengan perumda lain, hanya Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri yang tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dikarenakan tidak didukung kemampuan keuangan untuk memperoleh jasa KAP tersebut. Oleh karenanya untuk penyajian nilai penyertaan modal pemerintah pada perumda ini berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited*.

f. Perumda Tarakan Aneka Usaha

Perumda Tarakan Aneka Usaha dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019. Mutasi pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Mutasi tambah karena penyesuaian saldo Rugi/Defisit pada Ekuitas senilai Rp254.668.700,00.
- Mutasi kurang karena Rugi/Defisit senilai Rp153.786.705,00 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (*Audited*).

Saldo akhir senilai Rp4.091.940.577,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

- Penyertaan Modal berupa Aset pada Perumda Tarakan Aneka Usaha senilai Rp204.303.826,60;
- Total Penyertaan Modal berupa uang senilai Rp4.000.000.000,00; dan
- Nilai Penyertaan Modal bertambah karena saldo Laba Rugi/Defisit yang ditahan senilai negatif Rp112.363.249,60.

5.3.1.3. Aset Tetap

31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.093.987.698.030,63	**5.100.238.936.700,73**

Saldo Aset Tetap setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp5.093.987.698.030,63 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp5.100.238.936.700,73, maka terdapat penurunan saldo Aset Tetap setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan senilai Rp6.251.238.670,10 atau 0,12%. Sedangkan, saldo Aset Tetap bruto sebelum dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp8.373.223.973.664,81 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp8.132.818.188.518,42, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap sebelum dikurangi Akumulasi Penyusutan senilai Rp240.405.785.146,39 atau 2,96%. Rincian Aset Tetap sebelum dikurangi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 89 Rincian Aset Tetap Sebelum Penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Nilai Buku Per 31 Desember 2024	Nilai Buku Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tanah	2.158.674.371.945,00	2.185.318.151.262,00	(26.643.779.317,00)	(1,22)
Peralatan dan Mesin	595.394.778.865,32	552.928.049.826,43	42.466.729.038,89	7,68
Gedung dan Bangunan	2.751.787.450.162,91	2.663.750.139.489,32	88.037.310.673,59	3,31
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.817.921.099.216,89	2.702.269.781.293,32	115.651.317.923,57	4,28
Aset Tetap Lainnya	15.600.663.301,20	15.155.179.301,20	445.484.000,00	2,94
Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.845.610.173,49	13.396.887.346,15	20.448.722.827,34	152,64
Jumlah	**8.373.223.973.664,81**	**8.132.818.188.518,42**	**240.405.785.146,39**	**2,96**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penatausahaan Barang Milik Daerah telah diterapkan sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah dan dilakukan penyusutan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tarakan menggunakan Aplikasi e-BMD versi V.01.BLD.A yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dalam implementasi peraturan tersebut.

Dalam penyajian nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024, Pemerintah Kota Tarakan telah menerapkan Kebijakan Akuntansi sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Adapun mutasi Aset Tetap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 90 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Tahun 2024

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2024
Tanah	2.185.318.151.262,00	77.104.604.268,00	103.748.383.585,00	2.158.674.371.945,00
Peralatan dan Mesin	552.928.049.826,43	66.125.600.761,91	23.658.871.723,02	595.394.778.865,32
Gedung dan Bangunan	2.663.750.139.489,32	131.810.173.452,87	43.772.862.779,28	2.751.787.450.162,91
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.702.269.781.293,32	194.350.096.380,57	78.698.778.457,00	2.817.921.099.216,89
Aset Tetap Lainnya	15.155.179.301,20	855.248.675,00	409.764.675,00	15.600.663.301,20
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.396.887.346,15	23.947.157.407,34	3.498.434.580,00	33.845.610.173,49
Nilai Perolehan Aset Tetap	**8.132.818.188.518,42**	**494.192.880.945,69**	**253.787.095.799,30**	**8.373.223.973.664,81**
Akumulasi Penyusutan	(3.032.579.251.817,69)	(274.057.264.542,77)	(27.400.240.726,28)	**(3.279.236.275.634,18)**
Nilai Buku Aset Tetap	**5.100.238.936.700,73**	**220.135.616.402,92**	**226.386.855.073,02**	**5.093.987.698.030,63**

Adapun nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Tarakan berdasarkan jenisnya secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.3.1. Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	2.158.674.371.945,00	2.185.318.151.262,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.158.674.371.945,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.185.318.151.262,00, maka terdapat penurunan saldo Aset Tetap Tanah senilai Rp26.643.779.317,00 atau 1,22%. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 91 Rincian Mutasi Tanah Tahun 2024

Uraian	Nilai
Saldo Per 31 Desember 2023	**2.185.318.151.262,00**
PENAMBAHAN TA 2024:	
Belanja Modal Tahun 2024	3.517.441.266,00
Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap yang lain	2.672.243.800,00
Reklasifikasi dari Properti Investasi	17.246.060.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	39.500.000,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	3.012.305.602,00
Mutasi dari SKPD Lain	50.617.053.600,00
Jumlah Penambahan 2024	**77.104.604.268,00**
PENGURANGAN TA 2024:	
Reklasifikasi ke Jenis Aset Tetap yang Lain	322.596.250,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa Pihak Ketiga	2.339.335,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	50.467.253.600,00
Pelunasan utang TA 2024	1.647.236.800,00
Pemberian Hibah	99.404.000,00
Koreksi Pencatatan TA 2024	592.500.000,00
Mutasi ke SKPD Lain	50.617.053.600,00
Jumlah Pengurangan 2024	**103.748.383.585,00**
Saldo Per 31 Desember 2024	**2.158.674.371.945,00**

Berdasarkan tabel di atas diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Modal Tanah tahun 2024 sebagian besar merupakan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Fisik Bidang Tanah Lantamal Rp1.106.031.131,00 dan pembayaran Utang Rp1.605.636.800,00 pada DPRKPP.

b. Reklasifikasi dari jenis Aset Tetap yang lain ini sebagian besar terjadi pada DPRKPP yaitu dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Tanah berupa Pengadaan Tanah Budidaya Perikanan senilai Rp612.899.800,00.

c. Utang Pengadaan Aset Tetap Tanah terdapat di DPRKPP senilai Rp3.012.305.602,00 yaitu Pembayaran Tanam Tumbuh, Bangunan Rumah Bangunan Pintu Tambak dan Investasi tambak senilai Rp2.471.619.502,00 dan Pengadaan Tanah Embung Persemaian Kelurahan Karang Harapan senilai Rp540.686.100,00.

d. Reklasifikasi ke jenis Aset Tetap yang lain sebagian besar terjadi pada DPRKPP yaitu senilai Rp322.596.250,00 yaitu Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dimana terdapat nilai Gedung di Tanah Asrama Makassar.

e. Terdapat Aset Tetap Tanah yang dihibahkan ke Kejaksaan Negeri Tarakan senilai Rp91.700.000,00 dengan BAST No.00.2.5/BPKPAD/BA/671/2024 tanggal 25 November 2024 pada DPRKPP dan senilai Rp7.704.000,00 atas hibah Aset Tetap Tanah ke Polres Tarakan dari Kecamatan Tarakan Tengah.

f. Koreksi Catat nilai Tanah pada DPRKPP senilai Rp242.500.000,00 dan koreksi pencatatan ganda atas tanah pada IFK Dinkes senilai Rp350.000.000,00.

g. Reklasifikasi ke Properti Investasi pada DKUKMP yaitu senilai Rp50.467.253.600,00 yaitu tanah yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman RT XIII Kel. Karang Balik.

h. Pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap Tanah pada tahun 2024 terdapat pada DPRKPP senilai Rp1.242.327.000,00 atas Utang tahun 2020 dan Rp363,309,800.00 atas Utang tahun 2023. Selain pada DPRKPP, terdapat pembayaran Utang pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp41.600.000,00 atas utang tahun 2023.

Tabel 92 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang atas Tanah per SKPD Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan	295.999.721.987,00	0,00	0,00	295.999.721.987,00
2	Dinas Kesehatan	8.440.348.100,00	0,00	350.000.000,00	8.090.348.100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	879.945.998.254,00	0,00	0,00	879.945.998.254,00
4	Dinas Perhubungan	6.644.618.964,00	0,00	0,00	6.644.618.964,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.269.004.000,00	0,00	20.000.000,00	1.249.004.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	416.100.000,00	129.800.000,00	0,00	545.900.000,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	83.945.000,00	0,00	0,00	83.945.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.823.404.000,00	20.000.000,00	0,00	1.843.404.000,00
10	DPRD	123.445.000,00		0,00	123.445.000,00
11	Sekretaris Daerah	24.623.500.000,00	0,00	0,00	24.623.500.000,00
12	Sekretariat DPRD	2.029.104.000,00	0,00	0,00	2.029.104.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	269.205.437.187,00	0,00	17.066.460.000,00	252.138.977.187,00
14	Inspektorat	271.500.000,00	0,00	0,00	271.500.000,00
15	Kecamatan Tarakan Tengah	4.804.621.000,00	0,00	137.504.000,00	4.667.117.000,00
16	Kecamatan Tarakan Barat	14.549.280.000,00	0,00	0,00	14.549.280.000,00
17	Kecamatan Tarakan Timur	3.920.806.909,22	0,00	0,00	3.920.806.909,22
18	Kecamatan Tarakan Utara	1.310.110.000,00	179.600.000,00	0,00	1.489.710.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.254.000.000,00	0,00	0,00	1.254.000.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.053.195.000,00	0,00	0,00	3.053.195.000,00
21	Dinas Perikanan	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	6.736.033.000,00	67.533.713.600,00	50.467.253.600,00	23.802.493.000,00
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	594.423.942.839,78	9.199.764.293,00	35.665.439.610,00	567.958.267.522,78
24	Dinas Lingkungan Hidup	50.284.035.333,00	41.726.375,00	41.726.375,00	50.284.035.333,00
25	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	1.091.242.748,00	0,00	0,00	1.091.242.748,00
26	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.189.570.000,00	0,00	0,00	3.189.570.000,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.920.005.000,00	0,00	0,00	5.920.005.000,00
28	RSU Kota Tarakan	2.701.182.940,00	0,00	0,00	2.701.182.940,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
	Jumlah	**2.185.318.151.262,00**	**77.104.604.268,00**	**103.748.383.585,00**	**2.158.674.371.945,00**

Tabel 93 Rincian Tanah Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024

Uraian	Nilai
Tanah Persil	
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	15.864.959.998,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	286.071.290.355,00

Uraian	Nilai
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	506.579.487.665,78
Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	101.831.021.214,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	10.663.350.000,00
Tanah Persil lainnya	32.238.639.627,22
Tanah Non Persil	
Tanah Basah	23.209.118.485,00
Tanah Kering	102.150.532.926,00
Tanah Perkebunan	5.914.915.500,00
Tanah Hutan	70.277.399.508,00
Tanah Tandus	37.329.036.540,00
Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	3.914.395.000,00
Tanah Pertanian	1.732.899.800,00
Tanah Non Persil Lainnya	1.208.438.000,00
Lapangan	
Tanah Lapangan Olah Raga	2.353.694.752,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	11.553.836.400,00
Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam	566.220.000,00
Tanah Lapangan Terbang	2.128.019.350,00
Tanah Untuk Jalan	838.369.472.506,00
Tanah Untuk Bangunan Air	6.262.307.246,00
Tanah Untuk Bangunan Instalasi	1.084.034.940,00
Tanah Untuk Bangunan Jaringan	1.101.125.000,00
Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	776.817.500,00
Tanah Untuk Makam	21.268.974.500,00
Tanah Untuk Taman	4.358.088.150,00
Tanah Kampung	69.866.296.982,00
Jumlah Tanah	**2.158.674.371.945,00**

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023
595.394.778.865,32	**552.928.049.826,43**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp595.394.778.865,32 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp552.928.049.826,43, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp42.466.729.038,89 atau 7,68%. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 94 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Uraian	Nilai
Saldo Per 31 Desember 2023	**552.928.049.826,43**
PENAMBAHAN TA 2024 :	
Belanja Modal Tahun 2024	53.762.258.658,00
Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap yang Lain	1.576.646.055,00
Hibah dari Provinsi atau Pusat	1.328.061.400,00
Reklasifikasi Dari Belanja DANA BOS	2.099.566.900,00
Reklasifikasi dari Persediaan	367.368.721,25
Utang Pengadaan Aset Tetap	474.607.638,00
Koreksi Pencatatan TA 2024	275.620.000,00
Koreksi PembulatanTA 2024	0,66
Mutasi Dari SKPD Lain	6.241.471.389,00
Jumlah Penambahan 2024	**66.125.600.761,91**
PENGURANGAN TA 2024 :	
Reklasifikasi ke Jenis Aset Tetap yang Lain	17.865.000,00
Penghapusan Aset Tetap	8.812.666.942,02
Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa BOS	3.000.000,00
Reklasifikasi ke Persediaan	52.737.500,00
Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	70.000.000,00
Dihibahkan	25.840.000,00
Nilai Aset Dibawah Batas Kapitalisasi	8.295.904.892,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	50.000.000,00
Koreksi Pencacatan TA 2024	89.386.000,00
Mutasi Ke SKPD Lain	6.241.471.389,00
Jumlah Pengurangan 2024	**23.658.871.723,02**
Saldo Per 31 Desember 2024	**595.394.778.865,32**

Berdasarkan tabel di atas diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagian besar diantaranya ada pada Dinkes senilai Rp7.374.657.629,00, RSUKT senilai Rp6.992.556.078,00, Disdik senilai Rp12.909.584.963,00 dan Satpol PPPMK senilai Rp5.630.060.000,00.

b. Reklasifikasi dari jenis Aset Tetap yang lain sebagian besar yaitu Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.424.276.980,00 dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp10.733.075,00 dan dari Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp141.636.000,00.

c. Hibah Aset Tetap Peralatan dan mesin sebagian besar diantaranya tercatat di BPBD senilai Rp1.091.803.400,00 yang merupakan hibah dari BNPB dalam rangka penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi di Kota Tarakan.

d. Reklasifikasi dari Persediaan sebagian besar ada pada Dishub senilai Rp134.760.000,00 dan RSUKT senilai Rp163.957.499,25 yang berasal dari Belanja Suku Cadang.

e. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Dana BOS ada pada Disdik senilai Rp2.099.566.900,00 yang direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

f. Utang Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ada di RSUKT senilai Rp474.607.638,00 berupa utang Alat Kesehatan Umum Lainnya.

g. Koreksi catat atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin berada di DKPP senilai Rp61.120.000,00 dan Diskan atas koreksi tambah catat mobil *hylux* senilai Rp214.500.000,00.

h. Reklasifikasi ke jenis Aset Tetap yang lain berupa Aset Tetap Lainnya senilai Rp7.500.000,00 dan ke Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp10.365.000,00.

i. Terdapat Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024 sebagian besar diantaranya ada pada Sekretariat DPRD senilai Rp1.138.007.100,00, Setda senilai Rp1.999.870.350,00, RSUKT senilai Rp2.132.787.718,00, Disdukcapil senilai Rp909.748.402,02, Disdik senilai Rp698.454.670,00 dan Bappeda Litbang senilai Rp578.122.500,00.

j. Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihibahkan yang terjadi pada DLH senilai Rp25.840.000,00 yang diberikan kepada LANUD Rp6.000.000,00, BPK senilai Rp6.000.000,00 dan Sekolah Swasta senilai Rp13.840.000,00.

k. Nilai Aset Dibawah Batas Kapitalisasi sebagian besar ada pada Disdik senilai Rp7.429.606.680,00 dan sisanya berada pada lainnya.

l. Reklasifikasi ke Persediaan sebagian besar ada pada Dishub senilai Rp34.590.000,00.

m. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan terjadi pada Dinkes senilai Rp70.000.000,00 yang merupakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Backdrop* Kantor).

n. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain pada BPKPAD senilai Rp50.000.000,00 merupakan mobil dalam kondisi rusak berat yang sebelumnya pernah tercatat sebagai Tagihan Penjualan Angsuran atas nama Bapak A.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD beserta mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 95 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan	97.166.209.049,63	15.853.189.318,00	8.138.561.350,00	104.880.837.017,63
2	Dinas Kesehatan	55.438.710.426,25	7.800.288.229,00	651.335.173,00	62.587.663.482,25
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.989.311.432,34	3.495.878.484,00	3.055.342.000,00	20.429.847.916,34
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Litbang	4.646.215.150,00	247.511.500,00	578.122.500,00	4.315.604.150,00
5	Dinas Perhubungan	23.987.967.527,92	2.918.958.000,00	446.024.500,00	26.460.901.027,92
6	Dinas Lingkungan Hidup	37.786.672.111,97	2.460.383.326,00	101.250.000,00	40.145.805.437,97
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.565.942.195,15	418.078.500,00	910.447.402,02	2.073.573.293,13
8	Dinas P3A, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.541.443.948,03	1.627.278.000,00	1.547.558.000,00	3.621.163.948,03
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.265.177.912,90	1.781.528.400,00	1.170.305.789,00	14.876.400.523,90
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.787.782.992,00	148.276.700,00	136.084.637,00	1.799.975.055,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.614.597.702,00	71.713.400,00	106.283.580,00	1.580.027.522,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.792.067.211,12	6.787.690.789,00	6.275.000,00	20.573.483.000,12
13	Wali Kota	2.917.375.800,00	0,00	0,00	2.917.375.800,00
14	Wakil Wali Kota	2.451.357.000,00	0,00	0,00	2.451.357.000,00
15	Sekretaris Daerah	27.241.344.559,00	2.397.996.000,00	2.035.475.350,00	27.603.865.209,00
16	Sekretariat DPRD	10.994.441.340,38	851.778.000,00	1.173.897.100,00	10.672.322.240,38
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16.534.850.601,06	821.388.368,00	129.186.222,00	17.227.052.747,06
18	Pengelola BMD	3.048.341.625,96	0,00	0,00	3.048.341.625,96
19	Inspektorat	2.503.542.295,00	126.000.000,00	54.193.000,00	2.575.349.295,00
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.993.757.651,00	160.905.500,00	58.858.682,00	2.095.804.469,00
21	Kantor PDE	1.238.114.250,00	0,00	0,00	1.238.114.250,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.392.489.888,00	335.622.822,00	16.588.470,00	4.711.524.240,00
23	Kecamatan Tarakan Tengah	8.107.153.853,18	253.634.000,00	65.339.400,00	8.295.448.453,18
24	Kecamatan Tarakan Barat	7.096.130.977,00	260.176.000,00	0,00	7.356.306.977,00
25	Kecamatan Tarakan Timur	11.796.292.035,00	680.928.000,00	0,00	12.477.220.035,00
26	Kecamatan Tarakan Utara	3.435.322.986,05	195.951.260,00	0,00	3.631.274.246,05
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.118.291.274,92	619.920.000,00	275.220.000,00	3.462.991.274,92
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12.817.179.242,20	380.960.000,00	231.470.000,00	12.966.669.242,20
29	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.739.058.419,02	210.764.500,00	102.226.000,00	6.847.596.919,02
30	Dinas Perikanan	12.468.657.756,00	630.028.140,00	11.690.000,00	13.086.995.896,00
31	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	11.791.652.565,97	4.315.866.160,00	188.955.300,00	15.918.563.425,97
32	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	8.524.357.866,96	285.935.600,00	135.675.300,00	8.674.618.166,96

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
33	RSU Kota Tarakan	105.032.472.129,99	9.016.979.215,91	2.150.837.268,00	111.898.614.077,90
34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	4.203.853.390,29	708.628.770,00	171.384.700,00	4.741.097.460,29
35	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.899.914.660,14	261.363.780,00	10.285.000,00	8.150.993.440,14
	Jumlah	**552.928.049.826,43**	**66.125.600.761,91**	**23.658.871.723,02**	**595.394.778.865,32**

Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.751.787.450.162,91	**2.663.750.139.489,32**

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.751.787.450.162,91 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.663.750.139.489,32, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp88.037.310.673,59 atau 3,31%. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 96 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Uraian	Nilai
Saldo Per 31 Desember 2023	**2.663.750.139.489,32**
PENAMBAHAN TA 2024 :	
Belanja Modal Tahun 2024	54.193.152.010,71
Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap yang Lain	2.942.368.736,64
Hibah dari Provinsi atau Pusat	1.179.000.000,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	6.491.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	300.796.997,97
Reklasifikasi dari Properti Investasi	45.539.067.428,97
Reklasifikasi Dari Persediaan	109.557.000,00
Koreksi Pembulatan TA 2024	1,06
Mutasi dari SKPD Lain	27.539.740.277,52
Jumlah Penambahan 2024	**131.810.173.452,87**
PENGURANGAN TA 2024 :	
Reklasifikasi Ke Jenis Aset Tetap yang Lain	1.742.791.480,00
Nilai Aset Dibawah Batas Kapitalisasi	3.934.000,00
Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	34.290.120,00
Reklasifikasi Ke Beban Jasa Pihak Ketiga	175.227.568,77
Koreksi Pembulatan TA 2024	1,15
Pelunasan Utang TA 2024	286.488.234,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	13.990.391.097,84
Mutasi ke SKPD Lain	27.539.740.277,52
Jumlah Pengurangan 2024	**43.772.862.779,28**
Saldo Per 31 Desember 2024	**2.751.787.450.162,91**

Berdasarkan tabel di atas diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagian besar ada pada DISDIK senilai Rp26.502.716.194,26, DPUPR senilai Rp7.992.946.839,00 dan Disbudporapar senilai Rp11.665.166.700,00.
b. Reklasifikasi dari jenis Aset Tetap yang lain sebagian besar ada pada DPUPR yaitu Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.817.217.500,00 dan pada DPRKPP yaitu Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp566.546.078,00.
c. Hibah yang diterima sebagian besar tercatat pada Disdik senilai Rp1.179.000.000,00 yang berasal dari Komite Pembangunan Mesjid SMPN 2.
d. Reklasifikasi dari Persediaan berasal dari DPUPR senilai Rp109.557.000,00 merupakan rehabilitasi Gedung Persatuan Tenis Meja dan Pengawasan Panti Eks Shelter dan Panti Harapan Kita.
e. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan sebagian besar ada pada Dispuspan senilai Rp216.854.124,97 yang merupakan pemeliharaan Gedung Kantor dan pada Kecamatan Tarakan Barat senilai Rp83.942.873,00 yang merupakan belanja pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Karang Balik dan Kelurahan Karang Harapan.
f. Terdapat Utang Pengadaan Aset Tetap pada Setda senilai Rp6.491.000,00 yang merupakan rehabilitasi Rumah Jabatan Walikota.
g. Reklasifikasi ke jenis Aset Tetap yang lain sebagian besar ada pada DPUPR senilai Rp318.514.500,00 yaitu Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan, Disdik senilai Rp748.204.380,00 dan Dispuspan senilai Rp327.240.000,00 yaitu Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
h. Nilai Aset Dibawah Batas Kapitalisasi ada pada DPRKPP senilai Rp3.934.000,00 yang merupakan pembangunan portal.
i. Reklasifikasi ke Beban Jasa Pihak Ketiga terjadi pada Disdik senilai Rp175.227.568,77 yang merupakan Biaya Tim Monev dan Evaluasi DAK.
j. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan ada pada Dinkes senilai Rp34.290.120,00 yaitu pemeliharaan IPAL.
k. Reklasifikasi ke Properti Investasi berasal dari DKUKMP senilai Rp12.130.325.765,84, BPKPAD senilai Rp750.085.832,00 dan Disbudporapar senilai Rp1.109.979.500,00.
l. Terdapat Pembayaran Utang senilai Rp286.488.234,00 yang ada pada DPUPR.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD beserta mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 97 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan	1.142.514.017.157,18	27.879.737.195,32	923.431.948,92	1.169.470.322.403,58
2	Dinas Kesehatan	186.043.106.271,12	2.043.292.977,63	208.369.720,00	187.878.029.528,75
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	278.106.203.687,52	9.919.721.339,00	9.969.431.244,00	278.056.493.782,52
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	7.859.433.300,00	0,00	0,00	7.859.433.300,00
5	Dinas Perhubungan	7.351.017.400,00	946.682.279,00	0,00	8.297.699.679,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	81.823.774.942,43	3.793.532.166,98	399.075.339,78	85.218.231.769,63
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.591.555.488,00	705.327.339,78	0,00	11.296.882.827,78
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.590.636.600,00	99.316.000,00	1.755.749.600,00	2.934.203.000,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.328.527.976,00	199.484.000,00	0,00	1.528.011.976,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	645.186.864,22	0,00	0,00	645.186.864,22
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.942.921.460,45	1.903.683.400,00	0,00	7.846.604.860,45
12	DPRD	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
13	Wali Kota	8.118.415.330,00	0,00	0,00	8.118.415.330,00
14	Wakil Wali Kota	7.946.438.640,00	0,00	0,00	7.946.438.640,00
15	Sekretaris Daerah	23.544.822.271,00	235.808.000,00	0,00	23.780.630.271,00
16	Sekretariat DPRD	7.280.824.928,00	0,00	0,00	7.280.824.928,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	218.934.451.397,01	750.085.832,00	16.526.622.832,00	203.157.914.397,01
18	Inspektorat	1.801.938.409,00	0,00	0,00	1.801.938.409,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41.812.888.357,00	99.507.985,00	0,00	41.912.396.342,00
20	Kecamatan Tarakan Tengah	19.280.890.509,50	346.212.243,64	0,00	19.627.102.753,14
21	Kecamatan Tarakan Barat	18.990.657.050,00	232.797.004,00	0,00	19.223.454.054,00
22	Kecamatan Tarakan Timur	22.774.004.498,30	51.090.921,30	0,30	22.825.095.419,30
23	Kecamatan Tarakan Utara	7.342.810.813,00	923.209.598,44	0,44	8.266.020.411,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.828.843.200,00	216.854.124,97	327.240.000,00	25.718.457.324,97
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.151.399.000,00	0,00	0,00	4.151.399.000,00
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.868.489.281,00	192.313.000,00	0,00	16.060.802.281,00
27	Dinas Perikanan	3.035.207.417,00	0,00	0,00	3.035.207.417,00

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
28	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	301.716.198.214,00	17.685.976.494,00	1.109.979.500,00	318.292.195.208,00
29	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	11.384.817.463,00	56.968.487.093,81	12.130.325.765,84	56.222.978.790,97
30	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.645.992.875,00	113.010.900,00	0,00	10.759.003.775,00
31	RSU Kota Tarakan	179.563.996.926,59	518.291.000,00	0,00	180.082.287.926,59
32	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	5.930.671.763,00	5.985.752.558,00	422.636.828,00	11.493.787.493,00
	Jumlah	**2.663.750.139.489,32**	**131.810.173.452,87**	**43.772.862.779,28**	**2.751.787.450.162,91**

Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 98 Rincian Gedung dan Bangunan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024

Uraian	Nilai
Bangunan Gedung Tempat Kerja	**2.638.207.305.970,07**
Bangunan Gedung Kantor	617.051.068.557,78
Bangunan Gudang	51.658.297.676,20
Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	280.295.836,00
Bangunan Gedung Instalasi	20.795.978.409,00
Bangunan Gedung Laboratorium	22.671.988.626,94
Bangunan Kesehatan	229.782.289.809,03
Bangunan Oceanarium/Observatorium	279.618.000,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	159.060.751.970,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40.676.548.540,86
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	907.155.162.519,58
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	210.262.488.866,00
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	192.814.421.423,13
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	5.856.240.274,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	19.332.000,00
Bangunan Gedung Pemotong Hewan	7.976.561.700,00
Bangunan Gedung Perpustakaan	39.649.920.271,96
Bangunan Gedung Museum	49.795.000,00
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.320.089.379,00
Bangunan Pengujian Kelaikan	910.690.000,00
Bangunan Terbuka	99.676.300,00
Bangunan Peternakan/Perikanan	113.593.400,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.105.465.724,58
Bangunan Fasilitas Umum	18.863.773.407,01
Bangunan Parkir	307.999.050,00
Taman	4.304.921.206,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.140.338.023,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	**69.410.575.171,00**
Rumah Negara Golongan I	1.024.225.003,00

Uraian	Nilai
Rumah Negara Golongan II	23.626.429.855,00
Rumah Negara Golongan III	5.241.997.467,00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.349.751.000,00
Asrama	32.604.241.346,00
Flat/Rumah Susun	5.147.002.000,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	416.928.500,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	**38.762.709.727,00**
Tugu	319.100.000,00
Bangunan Peninggalan	24.623.700.243,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	13.819.909.484,00
Tugu/Tanda Batas	**5.406.859.294,84**
Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.079.445.635,00
Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	154.542.610,00
Pagar	3.974.623.049,84
Tugu/Tanda Batas Lainnya	198.248.000,00
Jumlah Gedung dan Bangunan	**2.751.787.450.162,91**

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.817.921.099.216,89	2.702.269.781.293,32

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.817.921.099.216,89 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.702.269.781.293,32, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp115.651.317.923,57 atau 4,28%. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 99 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

Uraian	Nilai
Saldo Per 31 Desember 2023	**2.702.269.781.293,32**
PENAMBAHAN TA 2024 :	
Belanja Modal Tahun 2024	193.413.536.165,43
Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap yang Lain	10.365.000,00
Reklasifikasi dari Persediaan *Material on Site*	651.167.215,14
Mutasi dari SKPD Lain	275.028.000,00
Jumlah Penambahan 2024	**194.350.096.380,57**
PENGURANGAN TA 2024 :	
Reklasifikasi ke Jenis Aset Tetap yang Lain	26.030.919.150,34
Reklasifikasi ke Beban Jasa Pihak Ketiga	420.336.886,00
Reklasifikasi ke Persediaan	14.385.664,00
Pelunasan Utang 2024	49.713.511.766,00
Koreksi Pencatatan TA 2024	2.244.596.990,66
Mutasi ke SKPD Lain	275.028.000,00
Jumlah Pengurangan 2024	**78.698.778.457,00**
Saldo Per 31 Desember 2024	**2.817.921.099.216,89**

Berdasarkan tabel tersebut di atas diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebagian besar ada pada DPUPR senilai Rp183.780.130.811,00, dan Dishub senilai Rp8.800.642.000,00.

b. Reklasifikasi ke jenis aset tetap yang lain sebagian besar ada pada DPUPR senilai Rp25.587.496.407,34 yaitu Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp141.636.000,00, ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai senilai Rp2.260.640.243,00 dan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp23.628.642.907,34.

c. Reklasifikasi Ke Beban Jasa Pihak Ketiga ada pada DPUPR senilai Rp420.336.886,00 berupa biaya naskah akademik dan survey jalan dan jembatan.

d. Pembayaran utang terdapat pada DPUPR senilai Rp49.713.511.766,00.

e. Terdapat koreksi kurang pada pencatatan DPUPR senilai Rp2.244.596.990,66 yang merupakan koreksi pencatatan berdasarkan kelebihan pembayarannya bila dibanding dengan *progress* fisiknya. Oleh karenanya atas kelebihan pembayaran tersebut dicatat sebagai piutang akhir tahun 2024 yang mengakibatkan pencatatan nilai Aset Tetap lebih kecil dari nilai realisasinya dan pada Aset akan dicatat sebesar realisasinya pada saat selesai di tahun 2025.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD beserta mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 100 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan	624.289.303,34	0.00	0.00	624.289.303,34
2	Dinas Kesehatan	2.167.258.763,00	145.365.000,00	0.00	2.312.623.763,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.561.013.135.029,48	184.431.298.026,14	78.086.635.714,00	2.667.357.797.341,62
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	408.740.650,00	0.00	0.00	408.740.650,00
5	Dinas Perhubungan	88.804.427.440,50	8.969.362.000,00	0.00	97.773.789.440,50
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0.00	0.00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0.00	0.00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	684.274.690,00	0.00	0.00	684.274.690,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	136.381.500,00	0.00	0.00	136.381.500,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.905.000,00	0.00	0.00	5.905.000,00
11	DPRD	12.000.000,00	0.00	0.00	12.000.000,00
12	Sekretaris Daerah	914.967.200,00	138.751.850,00	0.00	1.053.719.050,00

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
13	Sekretariat DPRD	29.900.000,00	0.00	0.00	29.900.000,00
14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	9.757.000,00	0.00	0.00	9.757.000,00
15	Kecamatan Tarakan Tengah	366.992.000,00	149.638.589,43	0.00	516.630.589,43
16	Kecamatan Tarakan Barat	3.091.685.675,00	0.00	0.00	3.091.685.675,00
17	Kecamatan Tarakan Timur	210.601.540,00	0.00	0.00	210.601.540,00
18	Kecamatan Tarakan Utara	163.421.200,00	0.00	0.00	163.421.200,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.616.000,00	0.00	0.00	44.616.000,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	286.567.350,00	0.00	0.00	286.567.350,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.868.724.050,00	199.900.000,00	0.00	4.068.624.050,00
22	Dinas Perikanan	2.858.030.566,00	0.00	0.00	2.858.030.566,00
23	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	3.667.148.809,00	10.000.000,00	0.00	3.677.148.809,00
24	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	1.749.789.991,00	0.00	0.00	1.749.789.991,00
25	RSU Kota Tarakan	5.216.701.008,00	0.00	0.00	5.216.701.008,00
26	Dinas Lingkungan Hidup	4.514.860.728,00	305.780.915,00	199.472.915,00	4.621.168.728,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.482.026.000,00	0.00	0.00	1.482.026.000,00
28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	19.700.538.800,00	0.00	412.669.828,00	19.287.868.972,00
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00	0.00	0.00	30.000.000,00
30	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	207.041.000,00	0.00	0.00	207.041.000,00
	Jumlah	**2.702.269.781.293,32**	**194.350.096.380,57**	**78.698.778.457,00**	**2.817.921.099.216,89**

Tabel 101 Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024

Uraian	Nilai
Jalan	**1.950.576.307.669,23**
Jalan Kabupaten	1.857.242.449.633,49
Jalan Kota	45.545.881.558,04
Jalan Desa	28.314.888.119,70
Jalan Khusus	17.385.690.028,00
Jalan Lainnya	2.087.398.330,00
Jembatan	**77.337.539.914,60**
Jembatan Pada Jalan Nasional	7.959.170.735,00
Jembatan Pada Jalan Kabupaten	11.187.109.305,00
Jembatan Pada Jalan Kota	1.510.999.065,60
Jembatan Pada Jalan Khusus	857.156.000,00
Jembatan Penyeberangan	55.823.104.809,00

Uraian	Nilai
Bangunan Air Irigasi	**79.602.525.362,17**
Bangunan Pembawa Irigasi	32.886.207.699,50
Bangunan Pembuang Irigasi	15.289.230.098,75
Bangunan Pelengkap Irigasi	5.795.943.275,00
Bangunan Air Irigasi Lainnya	25.631.144.288,92
Bangunan Pengairan Pasang Surut	**19.329.145.636,00**
Bangunan Waduk Pasang Surut	48.457.000,00
Bangunan Pembawa Pasang Surut	14.621.704.066,00
Saluran Pembuang Pasang Surut	4.567.098.570,00
Bangunan Pelengkap Pasang Surut	91.886.000,00
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	**3.825.870.613,00**
Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	472.844.000,00
Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	466.036.722,00
Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	2.886.989.891,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	**585.046.167.981,05**
Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	62.945.000,00
Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	6.463.816.000,00
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	442.638.915.549,05
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	135.782.679.432,00
Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	97.812.000,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	**459.011.000,00**
Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	19.957.000,00
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	109.632.000,00
Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	147.422.000,00
Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	182.000.000,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	**6.837.681.163,00**
Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	340.000,00
Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	410.927.363,00
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	339.999.600,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.086.414.200,00
Bangunan Air Kotor	**422.557.200,00**
Bangunan Pembawa Air Kotor	376.752.000,00
Bangunan Pembuang Air Kotor	45.805.200,00

Uraian	Nilai
Instalasi Air Bersih / Air Baku	**4.269.506.410,00**
Instalasi Air Permukaan	10.000.000,00
Instalasi Air Sumber / Mata Air	41.941.000,00
Instalasi Air Tanah Dalam	117.863.000,00
Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	4.099.702.410,00
Instalasi Air Kotor	**1.269.225.600,00**
Instalasi Air Buangan Domestik	379.275.600,00
Instalasi Air Kotor Lainnya	889.950.000,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	**11.299.949.500,00**
Bangunan Penampung Sampah	9.306.484.500,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	1.993.465.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	**962.809.800,00**
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	23.595.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	441.338.200,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	247.216.600,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	123.981.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	1.000.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera / Gelombang Samudera	125.679.000,00
Instalasi Gardu Listrik	**16.073.797.088,00**
Instalasi Gardu Listrik Induk	206.343.500,00
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1.909.056.420,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	13.958.397.168,00
Instalasi Pertahanan	**17.000.000,00**
Instalasi Pertahanan Di Darat	17.000.000,00
Instalasi Gas	**556.576.800,00**
Instalasi Jaringan Pipa Gas	556.576.800,00
Instalasi Pengaman	**2.568.776.700,00**
Instalasi Pengaman Penangkal Petir	2.568.776.700,00
Instalasi Lain	**636.235.700,00**
Instalasi Lain	636.235.700,00
Jaringan Air Minum	**5.901.583.740,00**
Jaringan Pembawa	471.575.240,00

Uraian	Nilai
Jaringan Induk Distribusi	5.255.869.000,00
Jaringan Cabang Distribusi	83.364.000,00
Jaringan Sambungan ke Rumah	39.512.500,00
Jaringan Air Minum Lainnya	51.263.000,00
Jaringan Listrik	**49.239.486.391,84**
Jaringan Transmisi	15.356.846.710,34
Jaringan Distribusi	1.522.065.666,50
Jaringan Listrik Lainnya	32.360.574.015,00
Jaringan Telepon	**631.237.200,00**
Jaringan Telepon di atas Tanah	592.525.950,00
Jaringan Telepon Lainnya	38.711.250,00
Jaringan Gas	**1.058.107.748,00**
Jaringan Pipa Gas Transmisi	326.199.200,00
Jaringan Pipa Distribusi	223.509.916,00
Jaringan Pipa Dinas	34.299.650,00
Jaringan Gas Lainnya	474.098.982,00
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan	**2.817.921.099.216,89**

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
15.600.663.301,20	15.155.179.301,20

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Tarakan dan dalam kondisi siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp15.600.663.301,20 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp15.155.179.301,20, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Lainnya senilai Rp445.484.000,00 atau 2,94%. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 102 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

Uraian	Nilai
Saldo Per 31 Desember 2023	**15.155.179.301,20**
PENAMBAHAN TA 2024 :	
Belanja Modal Tahun 2024	436.246.075,00
Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap yang lain	7.500.000,00
Reklasifikasi Dari Belanja Dana BOS	212.502.600,00

Uraian	Nilai
Reklasifikasi Dari Beban Jasa Pihak KetigaAset	199.000.000,00
Jumlah Penambahan 2024	**855.248.675,00**
PENGURANGAN TA 2024 :	
Nilai Aset Dibawah Batas Kapitalisasi	399.031.600,00
Reklasifikasi ke Jenis Aset Tetap Yang Lain	10.733.075,00
Jumlah Pengurangan 2024	**409.764.675,00**
Saldo Per 31 Desember 2024	**15.600.663.301,20**

Berdasarkan tabel tersebut di atas diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagian besar ada pada Disdik senilai Rp236.246.075,00 dan Dispuspan senilai Rp200.000.000,00.

b. Reklasifikasi dari peralatan dan mesin senilai Rp7.500.000,00 pada Disdik.

c. Reklasifikasi dari Belanja Jasa Pihak Ketiga ada pada Disbudporapar senilai Rp199.000.000,00.

d. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Dana BOS ada pada Disdik senilai Rp212.502.600,00.

e. Reklasifikasi ke peralatan dan mesin pada Disdik senilai Rp10.733.075,00.

f. Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi sebagian besar ada pada Disdik senilai Rp216.622.600,00 dan Dispuspan senilai Rp182.409.000,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD, mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD, serta rincian Aset Tetap Lainnya berdasarkan jenis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 103 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan	1.986.893.392,20	456.248.675,00	227.355.675,00	2.215.786.392,20
2	Dinas Kesehatan	134.727.500,00	0,00	0,00	134.727.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.987.951.573,00	0,00	0,00	4.987.951.573,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	730.044.143,00	0,00	0,00	730.044.143,00
6	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sekretaris Daerah	2.359.943.500,00	0,00	0,00	2.359.943.500,00
8	Sekretariat DPRD	25.309.000,00	0,00	0,00	25.309.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	232.460.000,00	0,00	0,00	232.460.000,00
10	Inspektorat	12.485.000,00	0,00	0,00	12.485.000,00

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	183.035.000,00	0,00	0,00	183.035.000,00
12	Kecamatan Tarakan Tengah	106.481.000,00	0,00	0,00	106.481.000,00
13	Kecamatan Tarakan Timur	101.576.500,00	0,00	0,00	101.576.500,00
14	Kecamatan Tarakan Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Tarakan Utara	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	195.720.416,00	200.000.000,00	182.409.000,00	213.311.416,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	66.235.500,00	0,00	0,00	66.235.500,00
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perikanan	2.677.295.527,00	0,00	0,00	2.677.295.527,00
20	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	1.065.893.250,00	199.000.000,00	0,00	1.264.893.250,00
21	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00
22	RSU Kota Tarakan	197.800.000,00	0,00	0,00	197.800.000,00
23	Dinas Perhubungan	89.000.000,00	0,00	0,00	89.000.000,00
	Jumlah	**15.155.179.301,20**	**855.248.675,00**	**409.764.675,00**	**15.600.663.301,20**

Tabel 104 Rincian Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024

Nama (Jenis Barang)	Nilai
Bahan Perpustakaan Tercetak	**7.349.443.906,20**
Buku Umum	2.044.200.176,20
Buku Agama	60.180.312,00
Buku Ilmu Sosial	273.463.400,00
Buku Ilmu Bahasa	10.786.220,00
Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	27.658.991,00
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.791.605.000,00
Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	3.350.000,00
Buku Geografi, Biografi, Sejarah	8.397.200,00
Buku Laporan	2.128.583.003,00
Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	60.369.604,00
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	**1.382.185.000**
Bentuk Mikro (*Microform*)	1.265.000,00
Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	1.380.920.000,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	**2.691.930.527,00**
Bahan Kartografi	14.635.000,00
Naskah (Manuskrip) / Asli	2.677.295.527,00
Musik	**12.200.000,00**
Musik	12.200.000,00
Karya Grafika (*Graphic Material*)	**98.835.000,00**
Karya Grafika (*Graphic Material*)	98.835.000,00

Nama (Jenis Barang)	Nilai
Barang Bercorak Kesenian	**1.780.788.155,00**
Alat Musik	1.687.116.105,00
Alat Peraga Kesenian	34.522.050,00
Barang Bercorak Kesenian Lainnya	59.150.000,00
Alat Bercorak Kebudayaan	**561.580.000,00**
Pahatan	55.075.000,00
Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	208.055.000,00
Barang Kerajinan	72.950.000,00
Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	225.500.000,00
Ternak	**60.820.500,00**
Ternak Potong	60.820.500,00
Tanaman	**1.271.270.213,00**
Tanaman	1.271.270.213,00
Aset Tetap Renovasi	**391.610.000,00**
Aset Tetap Dalam Renovasi	391.610.000,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya	**15.600.663.301,20**

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
33.845.610.173,49	**13.396.887.346,15**

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp33.845.610.173,49 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp13.396.887.346,15, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp20.448.722.827,34 atau 152,64%. Rincian Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 11**. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 105 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

Uraian	Nilai
Saldo Per 31 Desember 2023	**13.396.887.346,15**
PENAMBAHAN TA 2024 :	
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	318.514.500,00
Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan	23.628.642.907,34
Jumlah Penambahan 2024	**23.947.157.407,34**
PENGURANGAN TA 2024	
Reklasifikasi Ke Gedung dan Bangunan	12.920.000,00
Reklasifikasi Ke Tanah	3.485.514.580,00
Jumlah Pengurangan 2024	**3.498.434.580,00**
Saldo Per 31 Desember 2024	**33.845.610.173,49**

Berdasarkan tabel di atas diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Reklasifikasi dari jenis Aset Tetap yang lain yang berasal dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp318.514.500,00 dan dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Rp23.628.642.907,34 pada SKPD yang sama yaitu DPUPR.

b. Reklasifikasi ke jenis aset tetap yang lain yang yaitu ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp12.920.000,00 pada Disbudporapar dan ke Aset Tetap Tanah senilai Rp612.899.800,00 pada DPRKPP.

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD beserta mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 106 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan	0,00	0.00	0,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.864.138.116,15	23.947.157.407,34	0.00	31.811.295.523,49
3	Dinas Lingkungan Hidup	49.800.150,00	0.00	0,00	49.800.150,00
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	1.884.909.500,00	0.00	0,00	1.884.909.500,00
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	12.920.000,00	0.00	12.920.000,00	0,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	3.485.514.580,00	0,00	3.485.514.580,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	99.605.000,00	0.00	0,00	99.605.000,00
8	RSU Kota Tarakan	0,00	0.00	0,00	0,00
	Jumlah	**13.396.887.346,15**	**23.947.157.407,34**	**3.498.434.580,00**	**33.845.610.173,49**

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(3.279.236.275.634,18)	**(3.032.579.251.817,69)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.279.236.275.634,18 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp3.032.579.251.817,69, maka terdapat kenaikan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp246.657.023.816,49 atau 8,13%. Pemerintah Kota Tarakan menggunakan program aplikasi e-BMD dengan metode garis lurus (*Straight Line Method*) untuk menghitung Penyusutan Aset Tetap sehingga nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 107 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d. TA 2024	Nilai Buku per 31 Desember 2024
Tanah	2.158.674.371.945,00	0,00	2.158.674.371.945,00
Peralatan dan Mesin	595.394.778.865,32	490.704.079.423,43	104.690.699.441,89
Gedung dan Bangunan	2.751.787.450.162,91	808.449.395.296,06	1.943.338.054.866,85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.817.921.099.216,89	1.979.031.385.147,69	838.889.714.069,20
Aset Tetap Lainnya	15.600.663.301,20	1.051.415.767,00	14.549.247.534,20
Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.845.610.173,49	0,00	33.845.610.173,49
Jumlah	**8.373.223.973.664,81**	**3.279.236.275.634,18**	**5.093.987.698.030,63**

Tabel 108 Rincian Penjelasan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

Akumulasi Penyusutan	Saldo Awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	455.590.182.437,09	43.488.718.729,48	(8.374.821.743,14)	490.704.079.423,43
Gedung dan Bangunan	754.967.109.253,00	48.746.586.238,70	4.735.699.804,36	808.449.395.296,06
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.821.562.727.424,60	157.487.950.181,09	(19.292.458,00)	1.979.031.385.147,69
Aset Tetap Lainnya	459.232.703,00	79.518.177,33	512.664.886,67	1.051.415.767,00
Jumlah	**3.032.579.251.817,69**	**249.802.773.326,60**	**(3.145.749.510,11)**	**3.279.236.275.634,18**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Koreksi kurang pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp3.145.749.510,11 terdiri dari:

- Koreksi kurang pencatatan Akumulasi Penyusutan terhadap Peralatan dan Mesin senilai Rp8.374.821.743,14.
- Koreksi tambah pencatatan Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan senilai Rp4.735.699.804,36.
- Koreksi kurang pencatatan Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan senilai Rp19.292.458,00.
- Koreksi tambah pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya senilai Rp512.664.886,67.

b. Beban Penyusutan tahun berjalan senilai Rp249.802.773.326,60 dapat dirinci sebagai berikut.

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp43.488.718.729,48.

- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp48.746.586.238,70.
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp157.487.950.181,09.
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya senilai Rp79.518.177,33.

5.3.1.4. Aset Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
216.480.241.767,19	410.161.126.484,23

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp216.480.241.767,19 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp410.161.126.484,23, maka terdapat penurunan saldo Aset Lainnya senilai Rp193.680.884.717,04 atau 47,22%. Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	39.491.200,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp39.491.200,00, maka terdapat penurunan saldo Tagihan Penjualan Angsuran senilai Rp39.491.200,00 atau 100,00%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp39.491.200,00 terdapat mutasi kurang karena koreksi pencatatan ganda dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Hal ini dilakukan karena tagihan penjualan angsuran atas nama AA, M.Si tidak dapat ditagihkan. Selain itu, Aset berupa kendaraan roda empat merk Mitsubishi Kuda KT 2104 FC dalam kondisi rusak berat masih tercatat dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.

5.3.1.4.2. Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	65.370.757,46

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp65.370.757,46, maka terdapat penurunan saldo Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp65.370.757,46 atau 100,00%. Tuntutan Ganti Rugi merupakan kerugian daerah yang penanggungjawabnya oleh pihak lain baik Bendahara maupun Bukan Bendahara pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan SKTJM yang diterbitkan. Adapun saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 atau nihil karena telah direklasifikasi menjadi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah.

5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	15.520.217.354,00	13.341.554.814,00

Saldo Aset Tak Berwujud yang berupa *Software* dan Kajian setelah dikurangi Amortisasi per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp5.078.248.812,27 dan jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp3.556.174.291,00, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tak Berwujud senilai Rp1.522.074.521,27. Saldo Aset Tak Berwujud sebelum dikurangi Amortisasi per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp15.520.217.354,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp13.341.554.814,00, maka terdapat kenaikan saldo Aset Tak Berwujud sebelum dikurangi Amortisasi senilai Rp2.178.662.540,00 atau 16,33%.

Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca berdasarkan nilai perolehan setelah dikurang Amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud untuk menghitung tarif amortisasi berdasarkan jenis dan kelompoknya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Perhitungan Amortisasi dilakukan metode garis lurus (*straight line method*), dengan tanpa nilai sisa, dilakukan sejak tanggal perolehan, dan dihitung kembali apabila ada kapitalisasi, koreksi atau penghapusan. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 109 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024

Uraian	Nilai
Saldo Per 31 Desember 2023	**13.341.554.814,00**
PENAMBAHAN TA 2024 :	
Belanja Modal Aset Lainnya yang memenuhi Kriteria ATB	2.258.757.540,00
Jumlah Penambahan 2024	**2.258.757.540,00**
PENGURANGAN TA 2024 :	
Koreksi Pencatatan ATB yang juga tercatat pada Peralatan dan Mesin	80.095.000,00
Jumlah Pengurangan 2024	**80.095.000,00**
Saldo Per 31 Desember 2024	**15.520.217.354,00**

Saldo Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Mutasi tambah senilai Rp2.258.757.540,00 merupakan Belanja Modal Aset Lainnya yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud berupa *Software* dan Kajian pada beberapa SKPD.

b) Mutasi kurang senilai Rp80.095.000,00 merupakan koreksi pencatatan Aset Tidak Berwujud yang tercatat ganda dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 110 Rincian Aset Tak Berwujud Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024

No	Jenis	Nama Opd	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Kajian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.440.000.000,00	1.388.000.000,00	0,00	2.828.000.000,00
2	Kajian	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	277.206.100,00	0,00	277.206.100,00
3	Kajian	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	70.285.440,00	0,00	70.285.440,00
4	Kajian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	393.760.000,00	0,00	0,00	393.760.000,00
5	Kajian	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	0,00	41.680.000,00	0,00	41.680.000,00
Sub Total			**1.833.760.000,00**	**1.777.171.540,00**	**0,00**	**3.610.931.540,00**
1	*Software*	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.339.028.000,00	0,00	0,00	1.339.028.000,00
2	*Software*	Dinas Lingkungan Hidup	130.300.000,00	0,00	0,00	130.300.000,00
3	*Software*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	71.100.000,00	0,00	0,00	71.100.000,00
4	*Software*	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.732.320.000,00	0,00	0,00	1.732.320.000,00
5	*Software*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	89.386.000,00	0,00	0,00	89.386.000,00
6	*Software*	Dinas Pendidikan	506.768.500,00	10.500.000,00	0,00	517.268.500,00
7	*Software*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	348.533.000,00	0,00	0,00	348.533.000,00
8	*Software*	Dinas Kesehatan	373.015.000,00	0,00	0,00	373.015.000,00
9	*Software*	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	200.425.000,00	0,00	0,00	200.425.000,00
10	*Software*	Dinas Perhubungan	337.829.000,00	0,00	0,00	337.829.000,00
11	*Software*	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	833.265.000,00	58.750.000,00	0,00	892.015.000,00
12	*Software*	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	395.187.180,00	345.000.000,00	0,00	740.187.180,00

No	Jenis	Nama Opd	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
13	*Software*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	631.361.200,00	0,00	0,00	631.361.200,00
14	*Software*	Kec. Tarakan Barat	285.449.999,00	0,00	0,00	285.449.999,00
15	*Software*	Kec. Tarakan Tengah	427.400.000,00	0,00	0,00	427.400.000,00
16	*Software*	Kec. Tarakan Utara	155.315.500,00	0,00	0,00	155.315.500,00
17	*Software*	Kec. Tarakan Timur	528.685.500,00	0,00	0,00	528.685.500,00
18	*Software*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69.900.000,00	0,00	0,00	69.900.000,00
19	*Software*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	521.100.000,00	0,00	0,00	521.100.000,00
20	*Software*	Sekretariat Daerah	2.166.222.000,00	19.536.000,00	0,00	2.185.758.000,00
21	*Software*	Sekretariat DPRD	132.181.500,00	0,00	0,00	132.181.500,00
22	*Software*	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87.135.000,00	0,00	80.095.000,00	7.040.000,00
23	*Software*	Inspektorat	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00
24	*Software*	Dinas Perikanan	44.000.000,00	47.800.000,00	0,00	91.800.000,00
25	*Software*	Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	52.887.435,00	0,00	0,00	52.887.435,00
Sub Total			**11.507.794.814,00**	**481.586.000,00**	**80.095.000,00**	**11.909.285.814,00**
Jumlah			**13.341.554.814,00**	**2.258.757.540,00**	**80.095.000,00**	**15.520.217.354,00**

Aset Tak Berwujud berupa *Software*

a) Pada DKISP senilai Rp58.750.000,00 berupa Pengadaan *Software* Aplikasi Simpeg dan Pengembangan Aplikasi *Streaming* CCTV.

b) Pada Disdik terdapat satu buah pembuatan website senilai Rp10.500.000,00.

c) Pada DPUPR senilai Rp345.000.000,00 berupa *Software* Geoportal *Enablement* ArcGIS PRO ESRI.

d) Pada SETDA terdapat satu *software* yaitu *Website* JDIH Kota Tarakan senilai Rp19.536.000,00.

e) Pada Diskan terdapat satu *software* yaitu *software* komputer Aplikasi Layanan SKAI senilai Rp47.800.000,00.

Aset Tak Berwujud berupa Kajian

a) Pada Bappeda Litbang terdapat 8 (delapan) buah Kajian Studi senilai Rp1.388.000.000,00 yang dirinci sebagai berikut.

1) Kajian Peningkatan Kualitas Rumput Laut Melalui Kultur Jaringan senilai Rp250.000.000,00.

2) Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kota Sehat Kota Tarakan senilai Rp100.000.000,00.

3) Survey IKLI Tahun 2024 senilai Rp110.000.000,00.

4) Kajian Pengembangan Modal Diseminasi Hasil Pembangunan di Kota Tarakan senilai Rp150.000.000,00.

5) Kajian Penguatan Zona Integritas Menuju Layanan Publik Prima di Pukesmas Kota Tarakan Tahun 2024 senilai Rp300.000.000,00.

6) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Tarakan senilai Rp58.000.000,00

7) Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029 senilai Rp120.000.000,00

8) Penyusunan Rancangan, Rancangan Akhir, Naskah Akademik, dan Ranperda RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 senilai Rp300.000.000,00.

b) Pada DLH terdapat 4 (satu) buah Kajian Studi masing-masing senilai Rp277.206.100,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Dokumen Inventarisasi Jenis Tanaman di Hutan Kota Sawah Lunto senilai Rp39.571.500,00.

2) Dokumen KLHS RPJMD senilai Rp94.489.000,00.

3) Dokumen Keanekaragaman Hayati senilai Rp99.400.500,00.

4) Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan Limbah B3 senilai Rp43.745.100,00.

c) Pada DPPPAPPKB terdapat satu buah Kajian Studi dokumen kajian *grand design* pembangunan kependudukan (GDPK) kegiatan penyediaan dan pengolahan data kependudukan senilai Rp70.285.440,00.

d) Pada DPRKPP terdapat satu *software* yaitu *Baseline* Pengurangan Kawasan Kumuh Kec. Tarakan Barat senilai Rp41.680.000,00.

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD beserta mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 111 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan	506.768.500,00	10.500.000,00	0,00	517.268.500,00
2	Dinas Kesehatan	373.015.000,00	0,00	0,00	373.015.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	788.947.180,00	345.000.000,00	0,00	1.133.947.180,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	71.100.000,00	70.285.440,00	0,00	141.385.440,00
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	89.386.000,00	0,00	0,00	89.386.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	130.300.000,00	277.206.100,00	0,00	407.506.100,00
7	Dinas Perhubungan	337.829.000,00	0,00	0,00	337.829.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	833.265.000,00	58.750.000,00	0,00	892.015.000,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	348.533.000,00	0,00	0,00	348.533.000,00
10	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	521.100.000,00	0,00	0,00	521.100.000,00
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata	200.425.000,00	0,00	0,00	200.425.000,00
12	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	631.361.200,00	0,00	0,00	631.361.200,00
13	Dinas Perikanan	44.000.000,00	47.800.000,00	0,00	91.800.000,00
14	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	87.135.000,00	0,00	80.095.000,00	7.040.000,00
15	Sekretariat Daerah	2.166.222.000,00	19.536.000,00	0,00	2.185.758.000,00
16	Inspektorat	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	2.779.028.000,00	1.388.000.000,00	0,00	4.167.028.000,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	1.732.320.000,00	0,00	0,00	1.732.320.000,00
19	Sekretariat DPRD	132.181.500,00	0,00	0,00	132.181.500,00
20	Kecamatan Tarakan Tengah	427.400.000,00	0,00	0,00	427.400.000,00
21	Kecamatan Tarakan Barat	285.449.999,00	0,00	0,00	285.449.999,00
22	Kecamatan Tarakan Timur	528.685.500,00	0,00	0,00	528.685.500,00
23	Kecamatan Tarakan Utara	155.315.500,00	0,00	0,00	155.315.500,00
24	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	69.900.000,00	0,00	0,00	69.900.000,00
25	Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUKT	52.887.435,00	0,00	0,00	52.887.435,00
26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	0,00	41.680.000,00	0,00	41.680.000,00
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**13.341.554.814,00**	**2.258.757.540,00**	**80.095.000,00**	**15.520.217.354,00**

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 112 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Per 31 Desember 2024
Saldo 31 Desember 2023	**(9.785.380.523,00)**
Beban Amortisasi Tahun Berjalan (TA 2024)	(758.692.292,72)
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi	102.104.273,99
Saldo Akhir 31 Desember 2024	**(10.441.968.541,73)**

Adapun Aset Tak Berwujud dan Amortisasinya lebih rinci terdapat pada **Lampiran 12**.

5.3.1.4.5. Aset Lain-lain

31 Desember 2024	31 Desember 2023
392.773.382.679,15	596.567.915.043,81

Saldo Aset Lain-lain sebelum dikurangi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp392.773.382.679,15 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp596.567.915.043,81, maka terdapat penurunan saldo Aset Lain-lain sebelum dikurangi Penyusutan senilai Rp203.794.532.364,66 atau 34,16%. Saldo Aset Lain-lain setelah dikurangi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp207.039.626.954,92 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp406.500.090.235,77, maka terdapat penurunan saldo Aset Lain-lain sebelum dikurangi Penyusutan senilai Rp199.460.463.280,85 atau 49,07%.

Kenaikan atau penurunan Aset Lain-lain ini antara lain dipengaruhi mutasi Kas Yang Dibatasi Penggunaannya, koreksi atas Aset Tanah, Gedung dan Jaringan yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga serta koreksi Aset Rusak Berat. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 113 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-Lain Tahun 2024

Uraian	Saldo 31 Des 2023 Sebelum Penyusutan	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Desember 2024 Sebelum Penyusutan	Penyisihan, Akumulasi Penyusutan	Saldo Setelah Penyusutan 31 Desember2024
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	167.652.424.000,00	4.059.391.000,00	171.711.815.000,00	0,00	0,00	0,00
Tanah dan Bangunan di Wilayah Kerja Pertamina	12.577.622.298,60	0,00	0,00	12.577.622.298,60	2.507.631.278,77	10.069.991.019,83
Tanah yang akan diserahkan	2.384.668.750,00	0,00	0,00	2.384.668.750,00	0,00	2.384.668.750,00
Peralatan dan Mesin yang akan diserahkan	321.244.770,00	0,00	300.262.270,00	20.982.500,00	20.982.500,00	0,00
Peralatan dan Mesin - Hilang	16.240.000,00	0,00	0,00	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00
Gedung yang akan diserahkan	94.806.660.271,02	0,00	34.312.084.226,00	60.494.576.045,02	9.968.440.942,40	50.526.135.102,62
Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) akan diserahkan	157.883.498.878,71	0,00	0,00	157.883.498.878,71	150.548.237.042,67	7.335.261.836,04
Aset yang masih dalam penelusuran	133.216.967.330,00	0,00	350.506.000,00	132.866.461.330,00	11.588.483.256,00	121.277.978.074,00

Uraian	Saldo 31 Des 2023 Sebelum Penyusutan	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Desember 2024 Sebelum Penyusutan	Penyisihan, Akumulasi Penyusutan	Saldo Setelah Penyusutan 31 Desember2024
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan dihapuskan	1.318.088.521,00	0,00	0,00	1.318.088.521,00	0,00	1.318.088.521,00
Aset Rusak Berat	15.863.557.466,60	50.000.000,00	1.407.527.050,00	14.506.030.416,60	11.083.740.704,39	3.422.289.712,21
TPTGR	10.526.942.757,88	178.271.181,3400	0,00	10.705.213.939,22	0,00	10.705.213.939,22
Jumlah	**596.567.915.043,81**	**4.287.662.181,34**	**208.082.194.546,00**	**392.773.382.679,15**	**185.733.755.724,23**	**207.039.626.954,92**

Saldo Aset Lain-lain pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya senilai Rp4.362.516.000,00 terdiri dari:

   1) Dana Jaminan Sewa Rusunawa pada DPRKPP yang bertambah senilai Rp123.600.000,00;

   2) Dana Jaminan Lingkungan Hidup pada DLH senilai Rp175.535.000,00 berupa 32 sertifikat bilyet deposito berjangka senilai Rp160.485.000,00 dan bentuk rekening tabungan senilai Rp15.050.000,00; dan

   3) DBH Non Tunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Bank Indonesia senilai Rp3.935.791.000,00.

   Seluruh saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya di reklas ke Aset Lainnya – Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan Dana TDF sesuai kodefikasi rekening SIPD.

   Penjelasan mutasi pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebagai berikut.

   1) Mutasi tambah senilai Rp4.059.391.000,00 berupa koreksi pencatatan DBH Non Tunai dalam bentuk TDF pada Bank Indonesia yang sebelumnya dicatat sebagai Investasi Jangka Pendek menjadi Aset Lain-lain - Kas yang Dibatasi Penggunaannya senilai Rp3.935.791.000,00 dan Penyesuaian Penerimaan Uang Jaminan Rusunawa pada DPRKPP 2024 senilai Rp123.600.000,00; dan

   2) Mutasi kurang senilai Rp167.349.299.000,00 merupakan mutasi dari pengembalian uang jaminan rusunawa senilai Rp56.325.000,00 dan Koreksi kurang catat Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Rekening Tabungan Giro dan Rekening Deposito senilai Rp10.000.000,00 dan reklasifikasi Saldo TDF TA 2024 senilai Rp167.292.974.000,00.

b. Tanah dan Bangunan di Wilayah Kerja Pertamina senilai Rp 12.577.622.298,60 terdiri dari:

1) Tanah senilai Rp7.145.929.998,00 yang merupakan Tanah Milik Pertamina yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tarakan sebagai Kantor Pemerintahan, Rumah Negara dan Fasilitas Pendukung Olahraga. Pemerintah Kota Tarakan telah beberapa kali bermohon untuk untuk pengajuan Hibah BMN Aset Eks. Pertamina Tarakan kepada PT. Pertamina EP akan tetapi sampai dengan saat ini belum terlaksana; dan

2) Gedung dan Bangunan berupa Rumah Negara senilai Rp5.431.692.300,60 adalah Aset Milik Pertamina. Pemerintah Kota Tarakan memberikan santunan tali asih kepada penghuni terdahulu sebagai ganti rugi terhadap bangunan yang ada.

Rincian Tanah dan Bangunan di Wilayah Kerja Pertamina dapat dilihat pada **Lampiran 13 dan 14**.

c. Tanah akan diserahkan senilai Rp2.384.668.750,00 merupakan Tanah yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

1) Sepuluh tanah DPRKPP dengan keterangan pembayaran ganti rugi berupa bangunan dan tanam tumbuh dalam rangka pelebaran jalan P. Aji Iskandar senilai Rp2.303.488.750,00 yang telah berubah status menjadi jalan nasional sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 Tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektir Primer-1 (JKP-1); dan

2) Tanah Kawasan Pangkalan Udara TNI AU yang terletak di Kelurahan Karang Anyar Pantai senilai Rp81.180.000,00.

Rincian Tanah yang akan diserahkan ke pemerintah pusat dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

d. Peralatan dan Mesin yang akan diserahkan senilai Rp20.982.500,00 merupakan *Longboat* dan Mesinnya yang terdapat pada Dishub. Peralatan dan Mesin ini sudah diserahkan sesuai dengan BAST No. 551.1/1042/DISHUB tanggal 6 Agustus 2010 tetapi belum dilakukan penghapusan karena menunggu SK Penghapusan. Mutasi kurang senilai Rp300.262.270,00 merupakan *Emergency Kit* pada Dinas Kesehatan yang diserahkan kepada Polres Tarakan.

e. Peralatan dan Mesin yang hilang terdapat pada Kelurahan Lingkas Ujung senilai Rp16.240.000,00. Aset hilang tersebut berupa satu unit kendaraan roda

dua pada Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur dengan nomor polisi KU 2491 J (Eks KT 4034 JK) yang hilang tahun 2023 dan telah dilengkapi dengan dokumen laporan kehilangan dari kepolisian tetapi belum terdapat pembebanan ganti ruginya.

f. Saldo Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan senilai Rp60.494.576.045,02 yang merupakan Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan pada DPUPR, BPKPAD, DPTK dan sekolah. Mutasi kurang pada Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan senilai Rp34.312.084.226,00 merupakan Aset lain-lain Gedung dan Bangunan yang sudah diserahkan pada tahun 2020 sesuai dengan BAST antara lain diserahkan ke Kementrian Agama Kota Tarakan, Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Tarakan, LPP RRI Tarakan, Universitas Borneo Tarakan, Kepolisian Resort Tarakan dan Palang Merah Indonesia Kota Tarakan. Rincian Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

g. Jalan Irigasi dan Jaringan akan diserahkan terdiri dari Jalan Irigasi dan Jaringan akan diserahkan ke Universitas Borneo senilai Rp127.977.000,00, PDAM senilai Rp2.431.602.190,30 dan yang akan diserahkan senilai Rp155.323.919.688,41 pada DPUPR dan empat Kecamatan.

h. Aset yang masih dalam penelusuran senilai Rp132.866.461.330,00 terdiri:

   1) Tanah senilai Rp121.262.019.380,00 berupa Tanah kantor veteran hibah dari Kabupaten Bulungan yang masih ditelusur status kepemilikannya senilai Rp1.897.796.414,00 dan Tanah Penataan eks. Kebakaran Kawasan Beringin senilai Rp119.364.222.966,00;

   2) Peralatan dan Mesin berupa Meja ½ Biro Rp11.577.458.950,00 pada Disdik; dan

   3) Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp26.983.000,00.

   Mutasi kurang senilai Rp350.506.000,00 berupa koreksi kurang atas Tanah yang sudah diserahkan yaitu Tanah bangunan Poliklinik senilai Rp311.066.000,00 dan reklasifikasi dari Aset Lain-lain tanah akan diserahkan ke Aset Tetap Tanah berupa tanah TPA Aki Babu Karang Anyar Pantai senilai Rp30.000.000,00 dan Tanah Lahan Cadangan Juata Krikil senilai Rp9.500.000,00.

   Atas dan Tanah Penataan eks. Kebakaran Kawasan Beringin senilai Rp119.364.222.966,00, Pemerintah Kota Tarakan telah membentuk tim berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-V/285/2025 tentang Tim Penelaahan Barang untuk Akun Aset Lain-lain Khusus Pencatatan Tanah Jalan Kawasan Eks. Kebakaran Pasar Beringin pada

Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain menghimpun, menelusuri, mengidentifikasikan, menyusun laporan hasil penelaahan, menyusun rencana tindak lanjut hingga menerbitkan surat keputusan.

Rincian Aset yang masih dalam penelusuran yang akan diserahkan dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

i. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang akan dihapuskan senilai Rp1.318.088.521,00 pada DPUPR, DLH dan Disdik yang antara lain berupa DED Pipa Transmisi Embung Rawasari-IPA Kampung Bugis, *Appraisal* Pengadaan Tanah Untuk Embung Indulung, perencanaan *review desain* DED abrasi pantai, Perencanaan Gedung Sekolah SDN 045 Binalatung dan SDN 047 Mamburungan Tarakan Timur.

j. Mutasi Tambah pada Aset Rusak Berat senilai Rp50.000.000,00 adalah reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin ke Aset Lain-lain yang merupakan mobil dalam kondisi rusak berat yang sebelumnya pernah tercatat sebagai Tagihan Penjualan Angsuran atas nama AA. Mutasi kurang pada aset rusak berat senilai Rp1.407.527.050,00 merupakan penghapusan aset rusak berat peralatan dan mesin dimana sebagian besar berasal dari Diskan senilai Rp1.130.192.200,00 (*Crawler Excavator and Attachment*). Terdapat saldo akhir senilai Rp14.506.030.416,60 yang terdiri dari aset rusak berat peralatan dan mesin senilai Rp13.946.331.011,60 dan Aset Rusak Berat Gedung dan Bangunan senilai Rp559.699.405,00.

k. Terdapat koreksi pencatatan pada TPTGR senilai Rp178.271.181,34 dari sebelumnya senilai Rp10.526.942.757,88 menjadi Rp10.705.213.939,22 berdasarkan Rekapitulasi Perkembangan Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah semester II tahun 2024. TPTGR tersebut merupakan saldo dari akumulasi kerugian daerah yang belum ditindaklanjuti penyelesaiannya dari tahun 2008.

5.3.1.4.7. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	426.575.000,00	0,00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah sejumlah uang yang tidak dapat digunakan secara bebas atau telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp426.575.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya senilai Rp426.575.000,00 atau 100,00%. Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 114 Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2024

Uraian	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	Jaminan Lingkungan Hidup	42.500.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jaminan Sewa Rusunawa	384.075.000,00
	Jumlah	**426.575.000,00**

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup pada DLH per 31 Desember 2024 bersaldo senilai Rp42.500.000,00 yang terdiri dari rekening tabungan senilai Rp6.500.000,00 dan lima buah Bilyet Deposito senilai total Rp36.500.000,00. Adapun selama tahun 2024 tidak terdapat perubahan saldo akhir ataupun mutasi dikarenakan tidak ada pengambilan atau pencairan dana jaminan. Rincian Dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

b) Pada per 31 Desember 2024 Dana Jaminan Sewa Rusunawa pada DPRKPP bersaldo senilai Rp384.075.000,00. Adapun yang selama TA 2024 terdapat mutasi tambah senilai Rp123.600.000,00 dan mutasi kurang senilai Rp56.325.000,00 serta koreksi kurang senilai Rp150.000,00 dikarenakan saldo lebih akibat perbedaan pengembalian nilai jaminan ke penyewa a.n. Febriani dan Ibrahim. Rincian Dana Jaminan Sewa Rusunawa dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.4.8. Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF)	**3.935.791.000,00**	**0,00**

Pemerintah Pusat menyalurkan pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO pada akhir tahun 2024 dalam bentuk Dana Bagi Hasil Non Tunai atau TDF pada Bank Indonesia yang pengalokasiannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024. Saldo Dana TDF per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.935.791.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00, maka terdapat kenaikan saldo Dana TDF senilai Rp3.935.791.000,00 atau 100,00%. Rincian Dana TDF dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 115 Rincian Dana *Treasury Deposit Facility* Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti s.d. TA 2023	3.849.599.000,00
DBH SDA Provisi Sumber Daya Hutan s.d. TA 2023	86.192.000,00
Jumlah	**3.935.791.000,00**

Dana Bagi Hasil Non Tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan-LRA pada saat dicairkan dari bentuk TDF di Bank Indonesia atau telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun berikutnya.

5.3.1.5. Properti Investasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
221.968.227.943,12	215.463.314.770,25

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan sewa, untuk meningkatkan nilai aset, keduanya yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif, atau dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk penerapan PSAP 17 tentang Properti Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021, sejak tahun 2022 Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan penyajian atas Aset Properti Investasi.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp221.968.227.943,12 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp215.463.314.770,25, maka terdapat kenaikan saldo Properti Investasi senilai Rp6.504.913.172,87 atau 3,02%. Properti Investasi disajikan per 31 Desember 2024 senilai Rp221.968.227.943,12 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi dapat dirinci sebagai berikut.

5.3.1.5.1. Properti Investasi Tanah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
34.241.793.600,00	1.020.600.000,00

Saldo Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp34.241.793.600,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.020.600.000,00, maka terdapat kenaikan saldo Properti Investasi Tanah senilai Rp33.221.193.600,00 atau 3.255,07%. Rincian mutasi Properti Investasi Tanah Pemerintah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 116 Rincian Mutasi Properti Investasi Tanah Tahun 2024

Uraian	Nilai
Saldo Per 31 Desember 2023	**1.020.600.000,00**
PENAMBAHAN TA 2024 :	
Belanja Modal Tahun 2024	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	33.400.793.600,00
Jumlah Penambahan 2024	**33.400.793.600,00**
PENGURANGAN TA 2024 :	
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	179.600.000,00
Jumlah Pengurangan 2024	**179.600.000,00**
Saldo Per 31 Desember 2024	**34.241.793.600,00**

Tabel 117 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Properti Investasi Tanah Per SKPD Tahun 2024

Jenis Properti Investasi	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2023
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	841.000.000,00	0,00	0,00	841.000.000,00
Kecamatan Tarakan Utara	179.600.000,00	0,00	179.600.000,00	0,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	33.400.793.600,00	0,00	33.400.793.600,00
Jumlah	**1.020.600.000,00**	**33.400.793.600,00**	**179.600.000,00**	**34.241.793.600,00**

5.3.1.5.2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
203.995.676.423,12	235.544.352.754,25

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp203.995.676.423,12 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp235.544.352.754,25, maka terdapat penurunan saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan senilai Rp31.548.676.331,13 atau 13,39%. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 118 Rincian Mutasi Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Uraian	Nilai
Saldo Per 31 Desember 2023	**235.544.352.754,25**
PENAMBAHAN TA 2024 :	
Belanja Modal Tahun 2024	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	1.159.159.231,00
Jumlah Penambahan 2024	**1.159.159.231,00**
PENGURANGAN TA 2024 :	
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	32.707.835.562,13
Jumlah Pengurangan 2024	**32.707.835.562,13**
Saldo Per 31 Desember 2024	**203.995.676.423,12**

Tabel 119 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Properti Investasi Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024

Jenis Properti Investasi	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2023
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	12.031.052.550,00	750.085.832,00	0,00	12.781.138.382,00
Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	116.501.967.384,12	409.073.399,00	0,00	116.911.040.783,12

Jenis Properti Investasi	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2023
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	43.225.543.562,13	0,00	32.707.835.562,13	10.517.708.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	63.785.789.258,00	0,00	0,00	63.785.789.258,00
Jumlah	**235.544.352.754,25**	**1.159.159.231,00**	**32.707.835.562,13**	**203.995.676.423,12**

Rincian Properti Investasi selengkapnya terdapat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.5.3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	(16.269.242.080,00)	**(21.101.637.984,00)**

Properti Investasi diukur senilai nilai perolehan dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan. Properti Investasi selain tanah disusutkan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sama dengan perhitungan penyusutan dan masa manfaat aset tetap sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp16.269.242.080,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp21.101.637.984,00, maka terdapat penurunan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi senilai Rp4.832.395.904,00 atau 22,90%.

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 senilai Rp16.269.242.080,00 berupa Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.3.2. KEWAJIBAN	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	161.050.151.625,38	**217.461.497.625,07**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp161.050.151.625,38 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp217.461.497.625,07, maka terdapat penurunan saldo Kewajiban senilai Rp56.411.345.999,69 atau 25,94%. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang dengan rincian dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	160.623.576.625,38	**78.299.978.064,07**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp160.623.576.625,38 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp78.299.978.064,07, maka terdapat kenaikan saldo Kewajiban Jangka

Pendek senilai Rp82.323.598.561,31 atau 105,14%. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga atau PFK, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut.

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah nihil dan tidak terdapat kewajiban karena telah diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir. Adapun Rekonsiliasi terkait kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan pihak Bank Kaltimtara dan KPP Pratama Tarakan.

5.3.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	2.405.041.841,38	2.352.059.721,60

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.405.041.841,38 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.352.059.721,60, maka terdapat kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp52.982.119,78 atau 2,25%. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 120 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Pajak Reklame	1.817.197.700,61	2.027.282.428,80
2	Sewa	587.844.140,77	321.409.836,07
3	Izin SIU Perikanan	0,00	3.367.456,73
	Jumlah	**2.405.041.841,38**	**2.352.059.721,60**

Pada pendapatan diterima dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan Diterima Dimuka dari Pajak Reklame sebanyak 867 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterbitkan untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2024 oleh BPKPAD.

b. Pendapatan Diterima Dimuka berupa Sewa BMD atau atas Sewa Ruko dan Lahan senilai Rp587.844.140,77 yang tercatat di BPKPAD.

Rincian atas Pendapatan Diterima Dimuka terdapat pada **Lampiran 19**.

5.3.2.1.2. Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	10.583.924.943,00	17.445.229.421,47

Utang Belanja timbul akibat kegiatan operasi yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum dilakukan pembayaran. Utang Belanja terdiri dari Utang Beban Pegawai, Barang dan Jasa serta Hibah.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp10.583.924.943,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp17.445.229.421,47, maka terdapat penurunan saldo Utang Belanja senilai Rp6.861.304.478,47 atau 39,33%. Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 121 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Tahun 2024

SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
Utang Belanja Pegawai	10.318.582.866,00	3.366.448.325,00	10.338.081.461,00	3.346.949.730,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	6.761.433.955,47	7.259.841.100,53	6.784.299.843,00	7.236.975.213,00
Utang Belanja Hibah	365.212.600,00	0,00	365.212.600,00	0,00
Jumlah	**17.445.229.421,47**	**10.626.289.425,53**	**17.487.593.904,00**	**10.583.924.943,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pada mutasi tambah Utang Belanja Pegawai senilai Rp3.366.448.325,00 merupakan penambahan nilai utang baru TA 2024, koreksi saldo awal pada Disbudporapar sebesar Rp289.100,00 dan reklas pada DPUPR senilai Rp1.326.823.495,00. Reklas pada DPUPR ini berasal dari dari Utang Jangka Panjang senilai Rp1.192.283.495,00 dan Belanja Hibah senilai Rp134.540.000,00.

   Penambahan Utang Belanja Pegawai tersebut terdiri dari kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan senilai Rp2.030.378.709,00 pada Disdik, Puskesmas Mamburungan, dan RSUKT. Selain itu, penambahan Utang Belanja juga karena kekurangan gaji dan tunjangan senilai Rp6.423.621,00 pada Dinkes, Dishub, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, DKPP. Kekurangan TPP terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp2.533.400,00.

   Pada mutasi kurang Utang Belanja Pegawai senilai Rp10.338.081.461,00 berupa pembayaran utang tahun 2024 atas kekurangan gaji dan tunjangan senilai Rp67.042.104,00 pada Dinkes dan Disbudporapar, dan kekurangan TPP PNS senilai Rp10.181.000.814,00 pada DPPPAPPKB dan BPKPAD. Terdapat selisih senilai Rp5.979.048,00 pada Dinkes yang merupakan koreksi saldo awal

perubahan nilai utang. Selain itu, pada mutasi kurang tersebut terdapat penghapusan nilai utang senilai Rp84.059.495,00 pada DPUPR.

b. Saldo Utang Belanja Pegawai senilai Rp3.346.949.730,00 terdiri dari utang Iuran Jaminan Kesehatan senilai Rp2.030.378.709,00, kekurangan gaji dan tunjangan senilai Rp7.563.621,00, kekurangan TPP senilai Rp2.533.400,00 dan Utang Belanja Honorarium pada DPUPR senilai Rp1.306.474.000,00. Rincian Utang Belanja Honorarium tersebut terdapat pada **Lampiran 21**.

   Utang atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan terdapat pada pada Disdik senilai Rp1.964.556.617,00, Puskesmas Mamburungan senilai Rp847.248,00, dan RSUKT senilai Rp64.974.844,00.

   Kekurangan gaji dan tunjangan terdapat pada Dinkes senilai Rp1.187.471,00, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp230.000,00, Dishub Rp4.296.250,00, DKPP senilai Rp709.9000,00 dan Satpol PP senilai Rp1.140.000,00 yang merupakan utang tahun 2023. Kekurangan TPP terdapat pada DKPP senilai Rp2.533.400,00.

c. Pada mutasi tambah Utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp7.259.841.100,53 terdapat pencatatan nilai utang baru tahun 2024 senilai Rp7.236.975.213,00 yang merupakan utang belanja rutin seperti listrik, air, telepon dan internet, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga berupa Retribusi Sampah, PGN, dan BBM, dan kekurangan pembayaran STNK senilai Rp1.225.322.242,00 dan utang kegiatan pada RSUKT sebesar Rp6.011.652.971,00. Selain itu, senilai Rp22.865.887,53 adalah koreksi tambah pencatatan nilai utang tahun sebelumnya pada Dinkes, RSUKT yang merupakan koreksi saldo awal, DKISP, Disbudporapar dan BPKPAD.

   Adapun mutasi kurang senilai Rp6.784.299.843,00, merupakan mutasi kurang yang terdiri dari pembayaran utang belanja rutin seperti seperti listrik, air, telepon, internet, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga berupa retribusi sampah,dan PGN senilai Rp1.184.105.303,00, utang belanja BLUD pada RSU Kota Tarakan senilai Rp5.593.103.660.00, utang belanja BLUD pada Puskesmas Sebengkok senilai Rp6,863,880.00.

   Selain itu, termasuk dalam mutasi kurang ini terdapat koreksi kurang pencatatan nilai utang tahun sebelumnya pada RSUKT senilai Rp227.000,00,00 yang merupakan koreksi saldo awal.

   Sebagai informasi tambahan, terdapat pembayaran utang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB berupa Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain, yaitu Biaya Rawat Jalan kegiatan Metode kontrasepsi jangka Panjang berupa MOW/MOP dari RSUD sebesar

13,451,850.00. Utang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB ini pada tahun 2023 diklasifikasikan utang jangka Panjang sehingga tidak termasuk dalam jumlah pada mutasi kurang utang belanja barang dan jasa ini.

d. Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp7.236.975.213,00 merupakan Utang Belanja Jasa Kantor seluruh SKPD dan BLUD seperti listrik, air, telepon dan internet serta Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga berupa Retribusi Sampah, PGN, BBM dan kekurangan pembayaran STNK senilai Rp1.225.322.242,00 serta utang kegiatan pada RSUKT senilai Rp6.011.652.971,00.

e. Saldo Utang Belanja Hibah senilai Rp0,00, karena direklasifikasikan ke Utang Jangka Pendek senilai Rp230.672.600,00 dan Utang Belanja Pegawai senilai Rp134.540.000,00. Utang Belanja hibah ini terdapat pada DPUPR yang merupakan Utang Honorarium pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

Adapun rincian mutasi Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Hibah, Utang Bantuan Sosial, serta Utang Belanja Modal dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 122 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Utang Belanja Pegawai Tahun 2024

No.	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan	0,00	1.964.556.617,00	0,00	1.964.556.617,00
2	Dinas Kesehatan	69.801.182,00	1.187.471,00	69.801.182,00	1.187.471,00
3	Puskesmas Mamburungan	0,00	847.248,00	0,00	847.248,00
4	RSUKT	0,00	64.974.844,00	0,00	64.974.844,00
5	Dinas PUPR	63.710.000,00	1.326.823.495,00	84.059.495,00	1.306.474.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
7	Satpol PP	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	6.190.200,00	0,00	6.190.200,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	0,00	4.296.250,00	0,00	4.296.250,00
10	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2.930.870,00	289.100,00	3.219.970,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	3.243.300,00	0,00	3.243.300,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	10.174.810.614,00	0,00	10.174.810.614,00	0,00
	Jumlah	**10.318.582.866,00**	**3.366.448.325,00**	**10.338.081.461,00**	**3.346.949.730,00**

Tabel 123 Rincian Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan	18.506.248,00	18.496.787,00	18.506.248,00	18.496.787,00
2	Dinas Kesehatan	36.181.185,00	34.173.821,00	36.183.935,00	34.171.071,00
	Puskesmas Gunung Lingkas	14.005.021,00	9.292.621,00	14.005.021,00	9.292.621,00
	Puskesmas Karang Rejo	13.953.330,00	13.618.180,00	13.953.330,00	13.618.180,00
	Puskesmas Sebengkok	15.404.121,00	8.072.441,00	15.404.121,00	8.072.441,00
	Puskesmas Mamburungan	5.070.054,00	6.801.850,00	5.070.054,00	6.801.850,00
	Puskesmas Juata	9.588.322,00	10.099.872,00	9.588.322,00	10.099.872,00
	Puskesmas Pantai Amal	0,00	2.942.050,00	0,00	2.942.050,00
	Labkesda	0,00	7.994.610,00	0,00	7.994.610,00
3	RSU Kota Tarakan	5.728.097.319,47	6.208.470.784,53	5.750.813.312,00	6.185.754.792,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.315.906,00	10.859.633,00	21.315.906,00	10.859.633,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.586.262,00	14.827.781,00	13.586.262,00	14.827.781,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.075.967,00	4.242.020,00	4.075.967,00	4.242.020,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.848.116,00	6.741.908,00	8.848.116,00	6.741.908,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	5.158.136,00	4.912.695,00	5.158.136,00	4.912.695,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.183.014,00	6.288.123,00	6.183.014,00	6.288.123,00
10	Dinas Perindustriandan Ketenagakerjaan	8.367.864,00	10.353.539,00	8.367.864,00	10.353.539,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	4.928.083,00	7.582.525,00	4.928.083,00	7.582.525,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	27.678.566,00	23.920.039,00	27.678.566,00	23.920.039,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.000.400,00	2.451.900,00	6.000.400,00	2.451.900,00
14	Dinas Perhubungan	283.182.301,00	326.788.659,00	283.182.301,00	326.788.659,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	44.578.968,00	26.342.104,00	44.593.554,00	26.327.518,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.747.727,00	36.037.920,00	29.747.727,00	36.037.920,00
17	Dinas Perikanan	6.806.184,00	6.843.267,00	6.806.184,00	6.843.267,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.110.613,00	7.255.486,00	7.110.613,00	7.255.486,00
19	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	24.810.729,00	47.625.717,00	24.940.779,00	47.495.667,00
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.273.667,00	5.995.505,00	5.273.667,00	5.995.505,00
21	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	23.085.980,00	22.854.912,00	23.085.980,00	22.854.912,00
22	Sekretariat Daerah	118.558.498,00	113.844.184,00	118.558.498,00	113.844.184,00
23	Sekretariat DPRD	31.517.758,00	29.643.590,00	31.517.758,00	29.643.590,00
24	Kecamatan Tarakan Tengah	14.747.173,00	14.613.428,00	14.747.173,00	14.613.428,00

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
25	Kecamatan Tarakan Barat	23.145.881,00	25.618.406,00	23.145.881,00	25.618.406,00
26	Kecamatan Tarakan Timur	16.089.959,00	16.146.084,00	16.089.959,00	16.146.084,00
27	Kecamatan Tarakan Utara	10.947.769,00	14.085.189,00	10.947.769,00	14.085.189,00
28	Inspektorat Kota Tarakan	4.696.480,00	7.590.261,00	4.696.480,00	7.590.261,00
29	Bappeda Litbang	12.278.974,00	14.362.565,00	12.278.974,00	14.362.565,00
30	BPKPAD	156.857.416,00	130.989.080,00	156.859.925,00	130.986.571,00
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.049.964,00	1.061.564,00	1.049.964,00	1.061.564,00
	Jumlah	**6.761.433.955,47**	**7.259.841.100,53**	**6.784.299.843,00**	**7.236.975.213,00**

Tabel 124 Rincian Mutasi Utang Belanja Hibah Tahun 2024

No.	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	365.212.600,00	0,00	365,212,600.00	0,00
	Jumlah	**365.212.600,00**	**0,00**	**365,212,600.00**	**0,00**

Rincian Utang Belanja selengkapnya terdapat pada **Lampiran 20**.

5.3.2.1.3. Utang Transfer

31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.989.927.000,00	**6.458.995.121,00**

Saldo Utang Transfer per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp5.989.927.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp6.458.995.121,00, maka terdapat penurunan saldo Utang Transfer senilai Rp469.068.121,00 atau 7,26%. Rincian Utang Transfer Pemerintah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 125 Rincian Utang Transfer Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
DAK Non Fisik – BOS Reguler	0,00	85.960.074,00	(85.960.074,00)	(100)
SDA Minyak bumi dan gas bumi	849.683.000,00	4.563.435.093,00	(3.713.752.093,00)	(81,38)
SDA Royalti Minerba	0,00	11,00	(11,00)	(100,00)
PSDH	1.514.337.000,00	1.514.337.191,00	(191,00)	(0,00)
Perikanan	1.192.976.000,00	295.261.545,00	897.714.455,00	304,04
PBB Bagi Rata	0,00	552,00	(552,00)	(100,00)
PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29	0,00	655,00	(655,00)	(100,00)
SDA Perkebunan Sawit	2.432.931.000,00	0,00	2.432.931.000,00	0,00
Jumlah	**5.989.927.000,00**	**6.458.995.121,00**	**(469.068.121,00)**	**(7,26)**

Utang Transfer karena lebih salur dana perimbangan dengan total senilai Rp5.989.927.000,00 berdasarkan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KMK.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 126 Rincian Lebih Salur Dana Perimbangan Tahun 2024

Uraian	Lebih Bayar s.d TA 2023	Penyelesaian	Utang Transfer
DBH PPh Pasal 25/29 TA sd 2023	513.138.000,00	513.138.000,00	0,00
DBH PBB - Sektor Pertambangan (Minyak Dan Gas Bumi) TA sd 2023	4.005.602.000,00	4.005.602.000,00	0,00
DBH PBB - Sektor Lainnya TA sd 2023	91.213.000,00	91.213.000,00	0,00
DBH PBB - Biaya Pemungutan Pertambangan (Minyak Dan Gas Bumi) sd TA 2023	463.449.000,00	463.449.000,00	0,00
DBH PBB - Biaya Pemungutan Sektor Lainnya sd TA 2023	3.166.000,00	3.166.000,00	0,00
DBH SDA Minyak Bumi Dan Gas Bumi - Minyak Bumi TA sd 2023	7.580.485.000,00	6.730.803.000,00	849.682.000,00
DBH SDA Minyak Bumi Dan Gas Bumi - Gas Bumi TA sd 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
DBH SDA Kehutanan - PSDH sd TA 2023	1.514.337.000,00	0,00	1.514.337.000,00
DBH SDA Perikanan sd TA 2023	1.192.976.000,00	0,00	1.192.976.000,00
DBH SDA Perkebunan Sawit sd TA 2023	2.432.931.000,00	0,00	2.432.931.000,00
Jumlah	**17.797.298.000,00**	**11.807.371.000,00**	**5.989.927.000,00**

Rincian selengkapnya atas Utang Transfer terdapat pada **Lampiran 22**.

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
141.644.682.841,00	**52.043.693.800,00**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp141.644.682.841,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp52.043.693.800,00, maka terdapat kenaikan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp89.600.989.041,00 atau 172,16%. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 127 Rincian Mutasi Masuk dan Keluar Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024

No.	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	0,00	474.607.638,00	0,00	474.607.638,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.000.000.000,00	131.171.168.489,00	50.072.180.000,00	131.098.988.489,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.002.093.800,00	9.668.143.929,00	1.605.642.015,00	10.064.595.714,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	41.600.000,00	0,00	41.600.000,00	0,00

No.	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
5	Sekretariat Daerah	0,00	6.491.000,00	0,00	6.491.000,00
	Jumlah	**52.043.693.800,00**	**141.320.411.056,00**	**51.719.422.015,00**	**141.644.682.841,00**

Berdasarkan tabel di atas diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Mutasi tambah pada:

1) RSUKT senilai Rp474.607.638,00 merupakan penambahan utang baru berupa Belanja Modal Alat Kesehatan dan Alat Penunjang yang mengalami gagal transfer pembayaran diakhir tahun 2024;

2) DPUPR senilai Rp131.171.168.489,00 merupakan reklasifikasi dari utang jangka Panjang senilai Rp130.940.495.889,00 dan Utang Belanja Hibah senilai Rp230.672.600,00;

3) DPRKPP senilai Rp9.668.143.929,00 merupakan reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang senilai Rp6.655.838.327,00 dan penambahan utang baru senilai Rp3.012.305.602,00 atas ganti rugi tanah Lantamal berupa Bangunan dan Tanam Tumbuh; dan

4) Sekretariat Daerah senilai Rp6.491.000,00 merupakan penambahan utang atas pemeliharaan bangunan rumah jabatan Wali Kota Tarakan bulan Desember.

b. Mutasi Kurang pada:

1) DPUPR senilai Rp50.072.180.000,00 merupakan penghapusan utang senilai Rp72.180.000,00 karena pihak ketiga menganggap utang tersebut telah lunas dan pembayaran utang pada tahun 2024 senilai Rp50.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

a) Utang Jangka Pendek Tahun 2016 senilai Rp7.457.811.000,00;

b) Utang Jangka Pendek Tahun 2017 senilai Rp7.052.746.234,00; dan

c) Utang Jangka Pendek Tahun 2016 senilai Rp35.489.442.766,00.

2) DPRKPP senilai Rp1.605.642.015,00 merupakan pembayaran utang pada tahun 2024 senilai Rp1.605.636.800,00 dan Rp5.215,00 adalah koreksi penghapusan nilai utang; dan

3) DLH merupakan pembayaran utang kegiatan Pengadaan Tanah Rimba Kota yang berdasarkan *appraisal* kurang senilai Rp41.600.000,00.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya selengkapnya terdapat pada **Lampiran 23.**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**426.575.000,00**	**139.161.519.561,00**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp426.575.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp139.161.519.561,00, maka terdapat penurunan saldo Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp138.734.944.561,00 atau 99,69%. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 128 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Kewajiban Jangka Panjang Lainnya Tahun 2024

No.	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.132.779.384,00	0,00	132.132.779.384,00	0,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Utang)	6.655.838.327,00	0,00	6.655.838.327,00	0,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	13.451.850,00	0,00	13.451.850,00	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup (Dana Jaminan Lingkungan Hidup)	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dana Jaminan Rusunawa)	316.950.000,00	123.600.000,00	56.475.000,00	384.075.000,00
	Jumlah	**139.161.519.561,00**	**123.600.000,00**	**138.858.544.561,00**	**426.575.000,00**

Pada saldo akhir kewajiban jangka panjang lainnya senilai Rp426.575.000,00 dapat dijelaskan mutasi sebagai berikut.

a. Mutasi kurang pada DPUPR senilai Rp132.132.779.384,00 merupakan reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp130.940.495.889,00 dan reklasifikasi ke Utang Belanja Pegawai senilai Rp1.192.283.495,00.

b. Mutasi kurang pada DPRKPP sebesar Rp6.655.838.327,00 merupakan reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek Lainnya.

c. Mutasi kurang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB senilai Rp13.451.850,00 merupakan pembayaran utang tahun 2022 yang tagihannya baru disampaikan pada tahun 2023, penambahan ini merupakan tagihan pembayaran rawat jalan pasien pada RSUD dr. H. Jusuf SK dan pembayarannya dilakukan pada tahun 2024.

d. Selain yang telah dijelaskan sebelumnya, pada kewajiban jangka panjang lainnya ini juga terdapat dana jaminan:

   - Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada DLH senilai Rp42.500.000,00 atau tidak terdapat perubahan saldo serta mutasi

dikarenakan tidak ada pengambilan atau pencairan dana jaminan yang dirincikan pada **Lampiran 24**.

- Dana Jaminan Sewa Rusunawa pada DPRKPP senilai Rp384.225.000,00 yang selama TA 2024 terdapat mutasi tambah senilai Rp123.600.000,00 dan mutasi kurang senilai Rp56.475.000,00 yang dirincikan pada **Lampiran 25**.

5.3.3. EKUITAS

31 Desember 2024	31 Desember 2023
6.080.407.050.494,46	6.048.799.155.428,80

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp6.080.407.050.494,46 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp6.048.799.155.428,80, maka terdapat kenaikan saldo Ekuitas senilai Rp31.607.895.065,66 atau 0,52%. Rincian selengkapnya terdapat pada penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

LO disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan TA 2024 dan disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya. Adapun penjelasan akun-akun LO adalah sebagai berikut.

5.4.1. PENDAPATAN - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.194.609.828.152,77	1.349.436.926.877,93

Pendapatan - LO adalah pendapatan yang diperoleh dan telah menjadi hak Pemerintah Kota Tarakan. Saldo Pendapatan - LO tahun 2024 adalah senilai Rp1.194.609.828.152,77 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp1.349.436.926.877,93, maka terdapat penurunan saldo Pendapatan - LO senilai Rp154.827.098.725,16 atau 11,47%. Rincian Pendapatan - LO TA 2024 dan 2023 disajikan tabel berikut.

Tabel 129 Rincian Realisasi Pendapatan - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	196.073.789.029,11	171.048.000.783,52	25.025.788.245,59	14,63
Pendapatan Transfer - LO	988.682.321.639,00	1.100.859.446.406,00	(112.177.124.767,00)	(10,19)
Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	9.853.717.484,66	77.529.479.688,41	(67.675.762.203,75)	(87,29)
Jumlah	**1.194.609.828.152,77**	**1.349.436.926.877,93**	**(154.827.098.725,16)**	**(11,47)**

5.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
196.073.789.029,11	171.048.000.783,52

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO tahun 2024 adalah senilai Rp196.073.789.029,11 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp171.048.000.783,52, maka terdapat penurunan saldo PAD - LO senilai Rp25.025.788.245,59 atau 14,63%. Rincian PAD - LO disajikan tabel berikut.

Tabel 130 Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pajak Daerah - LO	101.926.786.642,98	89.802.046.013,88	12.124.740.629,10	13,50
Retribusi Daerah - LO	16.497.625.244,73	12.948.447.043,68	3.549.178.201,05	27,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	3.577.244.945,92	3.494.957.872,30	82.287.073,62	2,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	74.072.132.195,48	64.802.549.853,66	9.269.582.341,82	14,30
Jumlah	**196.073.789.029,11**	**171.048.000.783,52**	**25.025.788.245,59**	**14,63**

5.4.1.1.1. Pajak Daerah - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
101.926.786.642,98	89.802.046.013,88

Saldo Pajak Daerah - LO tahun 2024 adalah senilai Rp101.926.786.642,98 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp89.802.046.013,88, maka terdapat kenaikan saldo Pajak Daerah - LO senilai Rp12.124.740.629,10 atau 13,50%. Rincian Pajak Daerah - LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 131 Realisasi Pajak Daerah - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pajak Hotel - LO	11.452.616.943,40	9.570.457.077,11	1.882.159.866,29	19,67
Pajak Restoran - LO	23.809.878.361,49	18.901.523.596,59	4.908.354.764,90	25,97
Pajak Hiburan - LO	1.630.472.169,80	1.979.401.579,00	(348.929.409,20)	(17,63)
Pajak Reklame - LO	4.962.372.830,59	4.220.691.274,60	741.681.555,99	17,57
Pajak Penerangan Jalan - LO	18.825.308.004,00	17.458.209.729,00	1.367.098.275,00	7,83
Pajak Parkir - LO	476.155.800,00	698.346.600,00	(222.190.800,00)	(31,82)
Pajak Air Tanah - LO	701.499.162,40	790.636.604,28	(89.137.441,88)	(11,27)
Pajak Sarang Burung Walet - LO	12.294.000,00	33.915.000,00	(21.621.000,00)	(63,75)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	608.943.063,30	757.127.104,30	(148.184.041,00)	(19,57)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	17.760.721.016,00	17.673.207.686,00	87.513.330,00	0,50

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	21.686.525.292,00	17.718.529.763,00	3.967.995.529,00	22,39
Jumlah	**101.926.786.642,98**	**89.802.046.013,88**	**12.124.740.629,10**	**13,50**

Bila dibandingkan dengan Pajak Daerah pada LRA senilai Rp98.648.559.407,53, maka pada LO terdapat selisih lebih senilai Rp3.278.227.235,45 yang terdiri dari penyesuaian Piutang Pajak senilai Rp3.068.142.507,26 dan penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp210.084.728,19.

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
16.497.625.244,73	**12.948.447.043,68**

Saldo Retribusi Daerah - LO tahun 2024 adalah senilai Rp16.497.625.244,73 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp12.948.447.043,68, maka terdapat kenaikan saldo Retribusi Daerah - LO senilai Rp3.549.178.201,05 atau 27,41%. Rincian Retribusi Daerah - LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 132 Realisasi Retribusi Daerah - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	3.426.300,00	731.800.600,00	(728.374.300,00)	(99,53)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	338.310.000,00	265.120.000,00	73.190.000,00	27,61
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	618.768.160,00	678.646.200,00	(59.878.040,00)	(8,82)
Retribusi Los - LO	214.098.000,00	393.217.500,00	(179.119.500,00)	(45,55)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0,00	327.242.700,00	(327.242.700,00)	(100,00)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	0,00	134.055.000,00	(134.055.000,00)	(100,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	44.000.000,00	23.600.000,00	20.400.000,00	86,44
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	380.896.823,00	(380.896.823,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Kebersihan - LO	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	6.652.573.261,73	6.469.044.625,68	183.528.636,05	2,84
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	2.318.071.384,00	72.600.000,00	2.245.471.384,00	3.092,94
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	735.219.000,00	656.776.000,00	78.443.000,00	11,94

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	34.595.000,00	20.350.000,00	14.245.000,00	70,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	405.436.225,00	291.576.595,00	113.859.630,00	39,05
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	1.618.412.000,00	1.365.357.000,00	253.055.000,00	18,53
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan - LO	0,00	1.867.500,00	(1.867.500,00)	(100,00)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO	0,00	1.061.296.500,00	(1.061.296.500,00)	(100,00)
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan - LO	596.718.600,00	0,00	596.718.600,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.908.317.314,00	0,00	2.908.317.314,00	0,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	**16.497.625.244,73**	**12.948.447.043,68**	**3.549.178.201,05**	**27,41**

Bila dibandingkan dengan Retribusi Daerah pada LRA senilai Rp15.931.691.889,70, maka pada LO terdapat selisih lebih senilai Rp268.779.072,73 yang disebabkan penambahan Piutang Retribusi tahun 2024 senilai senilai Rp847.475.563,00 dan pengurangan Piutang Retribusi Rp136.989.360,00 serta pengurangan penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp263.066.847,97 dan penerimaan di Kas Bendahara Penerimaan DKUKMP yang belum disetorkan senilai Rp118.514.000,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	**3.577.244.945,92**	**3.494.957.872,30**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2024 merupakan dividen atau bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tarakan pada Bank Kaltimtara. Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2024 adalah senilai Rp3.577.244.945,92 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp3.494.957.872,30, maka terdapat kenaikan saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO senilai Rp82.287.073,62 atau 2,35%.

Bila dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LRA senilai Rp15.602.103.335,97, maka pada LO terdapat selisih kurang senilai Rp12.024.858.390,05 karena menjadi pengurang Penyertaan Modal Pemerintah yaitu penerimaan Dividen dari Perumda Tarakan Air Minum Tirta Alam

senilai Rp12.024.858.390,05 berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyerahan Dividen Kepada Pemerintah Kota Tarakan Tahun Buku 2023.

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	74.072.132.195,48	64.802.549.853,66

Saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO tahun 2024 adalah senilai Rp74.072.132.195,48 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp64.802.549.853,66, maka terdapat kenaikan saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO senilai Rp9.269.582.341,82 atau 14,30%. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 133 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO	11.500.000,00	511.517.877,00	(500.017.877,00)	(97,75)
Penerimaan Jasa Giro - LO	1.154.000.639,81	2.674.552.699,24	(1.520.552.059,43)	(56,85)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	5.514.465.672,00	1.348.095.961,78	4.166.369.710,22	309,06
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah -LO	2.284.380.149,24	2.576.610.516,55	(292.230.367,31)	(11,34)
Pendapatan Denda Pajak - LO	1.333.983.551,91	1.000.691.802,24	333.291.749,67	33,31
Pendapatan Denda Retribusi - LO	2.833.237,68	77.297.815,00	(74.464.577,32)	(96,33)
Pendapatan dari Pengembalian - LO	355.334.997,42	416.835.694,00	(61.500.696,58)	(14,75)
Pendapatan BLUD - LO	63.415.633.947,42	56.196.947.487,85	7.218.686.459,57	12,85
Jumlah	**74.072.132.195,48**	**64.802.549.853,66**	**9.269.582.341,82**	**14,30**

Bila dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada LRA senilai Rp74.968.422.059,01, maka pada LO terdapat selisih kurang senilai Rp896.289.863,53 yang disebabkan penyelesaian Piutang BLUD senilai Rp713.049.499,00 dan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian TA 2024 senilai Rp59.298.864,53.

5.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	988.682.321.639,00	1.100.859.446.406,00

Saldo Pendapatan Transfer - LO tahun 2024 adalah senilai Rp988.682.321.639,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp1.100.859.446.406,00, maka terdapat penurunan saldo Pendapatan Transfer - LO senilai

Rp112.177.124.767,00 atau 10,19%. Rincian Pendapatan Transfer - LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 134 Realisasi Pendapatan Transfer - LO TA 2024 dan 2023

	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO				
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	122.197.728.780,00	109.196.214.762,00	13.001.514.018,00	11,91
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	159.060.244.985,00	282.637.385.581,00	(123.577.140.596,00)	(43,72)
Dana Alokasi Umum - LO	475.029.013.000,00	438.566.142.648,00	36.462.870.352,00	8,31
Dana Alokasi Khusus - LO	107.393.412.412,00	114.566.314.208,00	(7.172.901.796,00)	(6,26)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO				
Insentif Fiskal - LO	6.607.594.000,00	23.343.638.000,00	(16.736.044.000,00)	(71,69)
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO				
Pendapatan Bagi Hasil - LO	92.214.421.568,00	78.130.273.067,00	14.084.148.501,00	18,03
Bantuan Keuangan - LO	26.179.906.894,00	54.419.478.140,00	(28.239.571.246,00)	(51,89)
Jumlah	**988.682.321.639,00**	**1.100.859.446.406,00**	**(112.177.124.767,00)**	**(10,19)**

Bila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer pada LRA senilai Rp1.079.314.119.760,00, maka pada LO terdapat selisih kurang senilai Rp90.631.798.121,00 terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak - LO terdapat selisih lebih senilai Rp11.271.045.400,00 bila dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Pajak - LRA karena terdapat penyelesaian lebih dan kurang salur atas Transfer Pemerintah Pusat.

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO terdapat selisih kurang senilai Rp122.968.187.015,00 bila dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA karena terdapat penyelesaian lebih dan kurang salur atas Transfer Pemerintah Pusat.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO terdapat selisih lebih senilai Rp85.960.074,00 bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA karena terdapat penyelesaian lebih salur atas DAK Non Fisik - Dana BOS pada sekolah SDN 021 Tarakan atas kelebihan penyaluran Dana BOS tahun 2021 dan 2022.

d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO selisih lebih senilai Rp20.979.383.420,00 bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA karena terdapat penyelesaian lebih dan kurang salur atas Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Penyebab perubahan nilai LO dibanding LRA diuraikan lebih rinci pada masing-masing akun pendapatan Transfer.

5.4.1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	122.197.728.780,00	109.196.214.762,00

Saldo Dana Bagi Hasil Pajak - LO Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp122.197.728.780,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp109.196.214.762,00, maka terdapat kenaikan saldo Dana Bagi Hasil Pajak - LO senilai Rp13.001.514.018,00 atau 11,91%. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak - LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 135 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - LO	108.467.144.204,00	96.610.461.756,00	11.856.682.448,00	12,27
DBH PPh Pasal 21 - LO	12.734.040.941,00	11.838.073.651,00	895.967.290,00	7,57
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 - LO	996.394.255,00	747.679.355,00	248.714.900,00	33,26
DBH CHT - LO	149.380,00	0,00	149.380,00	0,00
Jumlah	**122.197.728.780,00**	**109.196.214.762,00**	**13.001.514.018,00**	**11,91**

Bila dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Pajak pada LRA senilai Rp110.926.534.000,00, maka pada LO terdapat selisih lebih senilai Rp11.271.045.400,00. Hal tersebut merupakan penyelesaian lebih salur atau Utang Transfer senilai Rp7.335.254.400,00 serta terdapat penerimaan Dana Bagi Hasil Non Tunai TA 2024 atau dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Bank Indonesia yang pengalokasiannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 senilai Rp3.935.791.000,00.

5.4.1.2.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	159.060.244.985,00	282.637.385.581,00

Saldo Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp159.060.244.985,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp282.637.385.581,00, maka terdapat penurunan saldo Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO senilai Rp123.577.140.596,00 atau 43,72%. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 136 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
DBH Pertambangan Minyak Bumi - LO	6.439.798.172,00	20.860.437.887,00	(14.420.639.715,00)	(69,13)
DBH Pertambangan Gas Bumi - LO	2.133.816.362,00	630.373.238,00	1.503.443.124,00	238,50
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty - LO	123.337.908.137,00	251.962.339.605,00	(128.624.431.468,00)	(51,05)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
DBH Royalti Pertambangan dan PSDH - LO	24.618.070.769,00	7.669.061.472,00	16.949.009.297,00	221,00
DBH SDA Perikanan - LO	526.649.545,00	1.515.173.379,00	(988.523.834,00)	(65,24)
DBH Sawit - LO	2.004.002.000,00	0,00	2.004.002.000,00	0,00
Jumlah	**159.060.244.985,00**	**282.637.385.581,00**	**(123.577.140.596,00)**	**(43,72)**

5.4.1.2.3. Dana Alokasi Umum - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
475.029.013.000,00	**438.566.142.648,00**

Saldo Dana Alokasi Umum - LO Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp475.029.013.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp438.566.142.648,00, maka terdapat kenaikan saldo Dana Alokasi Umum - LO senilai Rp36.462.870.352,00 atau 8,31%. Rincian Dana Alokasi Umum - LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 137 Rincian Dana Alokasi Umum - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	Nilai (Rp)
DAU *Spesific Grant* (SG) atau yang ditentukan Penggunaannya:	
Bidang Pendidikan	14.836.688.000,00
Bidang Kesehatan	9.916.402.000,00
Bidang Pekerjaan Umum	3.237.467.000,00
Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00
Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	24.796.737.000,00
DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	418.241.719.000,00
Jumlah	**475.029.013.000,00**

5.4.1.2.4. Dana Alokasi Khusus - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
107.393.412.412,00	**114.566.314.208,00**

Saldo Dana Alokasi Khusus - LO Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp107.393.412.412,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp114.566.314.208,00, maka terdapat penurunan saldo Dana Alokasi Khusus - LO senilai Rp7.172.901.796,00 atau 6,26%. Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu DAK Fisik dan Non Fisik yang dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 138 Rincian Dana Alokasi Khusus - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	**21.892.490.518,00**	**28.567.452.502,00**	**(6.674.961.984,00)**	**(23,37)**
Bidang Pendidikan	6.049.493.452,00	8.055.425.350,00	(2.005.931.898,00)	(24,90)
Bidang Kesehatan dan KB	4.974.283.389,00	2.145.603.393,00	2.828.679.996,00	131,84

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Bidang Kelautan dan Perikanan	4.911.585.447,00	0,00	4.911.585.447,00	0,00
Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Jalan, Air Minum dan Sanitasi	5.957.128.230,00	18.366.423.759,00	(12.409.295.529,00)	(67,57)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	**85.500.921.894,00**	**85.998.861.706,00**	**(497.939.812,00)**	**(0,58)**
Bantuan Operasional Sekolah - Reguler	44.186.420.975,00	38.462.320.043,00	5.724.100.932,00	14,88
Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	35.020.343.000,00	31.896.515.000,00	3.123.828.000,00	9,79
Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	361.441.000,00	316.800.000,00	44.641.000,00	14,09
Bantuan Operasional Pendidikan	793.469.830,00	5.097.503.600,00	(4.304.033.770,00)	(84,43)
Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bantuan Operasional Pengawasan Obat dan Makanan	2.291.548.271,00	1.491.529.722,00	800.018.549,00	53,64
Bantuan Operasional Kesehatan	2.740.237.318,00	7.348.937.948,00	(4.608.700.630,00)	(62,71)
Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya	0,00	722.645.982,00	(722.645.982,00)	(100,00)
Fasilitasi Penanaman Modal, Perkoperasian Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	107.461.500,00	167.736.777,00	(60.275.277,00)	(35,93)
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	494.872.634,00	(494.872.634,00)	(100,00)
Jumlah	**107.393.412.412,00**	**114.566.314.208,00**	**(7.172.901.796,00)**	**(6,26)**

5.4.1.2.5. Insentif Fiskal - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
6.607.594.000,00	**23.343.638.000,00**

Saldo Insentif Fiskal - LO Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp6.607.594.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp23.343.638.000,00, maka terdapat penurunan saldo Insentif Fiskal - LO senilai Rp16.736.044.000,00 atau 71,69%. Rincian Insentif Fiskal - LO tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 139 Rincian Insentif Fiskal - LO TA 2024

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	19 September 2024	Insentif Fiskal Kinerja Kesehatan Masyarakat Tahap 1 TA 2024	3.303.797.000,00
2	28 November 2024	Insentif Fiskal Kinerja Kesehatan Masyarakat Tahap 1 TA 2024	3.303.797.000,00
		Jumlah	**6.607.594.000,00**

5.4.1.2.6. Pendapatan Bagi Hasil - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
92.214.421.568,00	78.130.273.067,00

Saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp92.214.421.568,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp78.130.273.067,00, maka terdapat kenaikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO senilai Rp14.084.148.501,00 atau 18,03%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 140 Rincian Pendapatan Bagi Hasil – LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pajak Kendaraan Bermotor - LO	10.394.507.066,00	10.077.830.032,00	316.677.034,00	3,14
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	9.583.994.183,00	9.846.100.639,00	(262.106.456,00)	(2,66)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	59.372.591.170,00	46.436.200.532,00	12.936.390.638,00	27,86
Pajak Air Permukaan - LO	275.846.324,00	221.180.422,00	54.665.902,00	24,72
Pajak Rokok - LO	12.587.482.825,00	11.548.961.442,00	1.038.521.383,00	8,99
Jumlah	**92.214.421.568,00**	**78.130.273.067,00**	**14.084.148.501,00**	**18,03**

Bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada LRA senilai Rp71.235.038.148,00, maka pada LO terdapat selisih lebih senilai Rp20.979.383.420,00 yang disebabkan karena terdapat penambahan Piutang Transfer 2024 karena kurang salur Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/128/2025 senilai tersebut.

5.4.1.2.7. Bantuan Keuangan - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
26.179.906.894,00	54.419.478.140,00

Saldo Bantuan Keuangan - LO Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp26.179.906.894,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp54.419.478.140,00, maka terdapat penurunan Bantuan Keuangan - LO senilai Rp28.239.571.246,00 atau 51,89%. Rincian Bantuan Keuangan - LO tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 141 Rincian Bantuan Keuangan - LO TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Bantuan Keuangan - Khusus	23.649.476.723,00
Bantuan Keuangan - Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE)	1.189.430.171,00
Bantuan Keuangan - Dana Insentif RT	1.341.000.000,00
Jumlah	**26.179.906.894,00**

5.4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	9.853.717.484,66	77.529.479.688,41

Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp9.853.717.484,66 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp77.529.479.688,41, maka terdapat penurunan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO senilai Rp67.675.762.203,75 atau 87,29%. Akun ini terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah - LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	9.853.717.484,66	77.117.076.226,41

Saldo Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp9.853.717.484,66 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp77.117.076.226,41, maka terdapat penurunan Pendapatan Hibah - LO senilai Rp67.263.358.741,75 atau 87,22%. Rincian Pendapatan Hibah - LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 142 Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pemerintah Pusat - LO	1.474.840.901,99	75.895.885.976,51	(74.421.045.074,52)	(98,06)
Pemerintah Daerah Lainnya - LO	7.162.626.582,67	751.841.020,00	6.410.785.562,67	852,68
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri - LO	1.216.250.000,00	65.886.000,00	1.150.364.000,00	1.745,99
Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta/ Kelompok masyarakat - LO	0,00	403.463.229,90	(403.463.229,90)	(100,00)
Jumlah	**9.853.717.484,66**	**77.117.076.226,41**	**(67.263.358.741,75)**	**(87,22)**

Pendapatan Hibah - LO berdasarkan SKPD dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 143 Rincian Pendapatan Hibah - LO berdasarkan SKPD TA 2024 dan 2023

No.	Penerima Hibah	Sumber Dana	TA 2024	TA 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	0,00	24.350.000,00
2	Dinas Kesehatan	Kementerian, dan Pemerintah Provinsi	6.185.937.609,66	7.521.409.629,41
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	PT. Pelabuhan Indonesia dan Bank BTN	0,00	0,00
4	RSU Kota Tarakan	Direktorat P2M, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	0,00	3.239.717.552,00
5	DPPPAPPKB	BKKBN	399.250.375,00	329.201.250,00

No.	Penerima Hibah	Sumber Dana	TA 2024	TA 2023
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Kementerian Perdagangan	0,00	2.859.812.700,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	315.642.000,00	305.544.568,00
8	Dinas Pendidikan	Swasta/Masyarakat	1.213.500.000,00	15.346.317.519,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BNPB	1.571.243.400,00	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	10.547.100,00	101.344.200,00
11	Dinas Perhubungan	Kementerian Perhubungan	0,00	8.707.605.223,00
12	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Kementerian, PDAM	0,00	3.000.000.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Utara	0,00	189.319.000,00
14	Dinas Perumahan Rakyat KPP	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Persediaan Akhir Tahun	0,00	35.098.203.225,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan Pusat	0,00	0,00
16	Kecamatan Tarakan Utara	Perpustakaan Nasional, PT Phoenix	39.007.000,00	88.847.840,00
17	Kecamatan Tarakan Timur	Perpustakaan Nasional, Masyarakat	41.449.000,00	177.695.680,00
18	Kecamatan Tarakan Barat	Perpustakaan Nasional, Masyarakat	39.586.000,00	127.707.840,00
19	Kecamatan Tarakan Tengah	Perpustakaan Nasional, Masyarakat	37.555.000,00	0,00
Jumlah			**9.853.717.484,66**	**77.117.076.226,41**

Bila dibandingkan dengan Pendapatan Hibah - LRA diketahui tidak terdapat realisasi atas Pendapatan Hibah karena Pemerintah Kota Tarakan tidak menganggarkan penerimaan hibah terencana dari berbagai instansi seperti Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Provinsi, Perbankan, Swasta dan Kelompok Masyarakat sehingga hanya tercatat pada Pendapatan Hibah - LO.

5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	**412.403.462,00**

Saldo Pendapatan Lainnya - LO Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp412.403.462,00, maka terdapat penurunan Pendapatan Lainnya - LO senilai Rp412.403.462,00 atau 100,00%. Pendapatan Lainnya merupakan Pendapatan Dana Kapitasi, bila dibandingkan tahun lalu senilai Rp412.403.462,00 merupakan Pendapatan Puskesmas Pantai Amal sebelum beralih statusnya menjadi BLUD.

5.4.2. BEBAN

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.228.545.895.908,96	1.169.669.946.529,24

Beban adalah beban yang dibayarkan dan menjadi kewajiban Pemerintah Kota Tarakan untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024. Saldo Beban Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp1.228.545.895.908,96 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp1.169.669.946.529,24, maka terdapat kenaikan Beban senilai Rp58.875.949.379,72 atau 5,03% dengan penjabaran sebagai berikut.

5.4.2.1. BEBAN OPERASI

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.228.545.895.908,96	1.169.669.946.529,24

Saldo Beban Operasi Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp1.228.545.895.908,96 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp1.169.669.946.529,24, maka terdapat kenaikan Beban Operasi senilai Rp58.875.949.379,72 atau 5,03%. Rincian Beban Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 144 Rincian Beban Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Pegawai	432.141.409.734,00	388.298.784.169,00	43.842.625.565,00	11,29
Beban Persediaan	98.422.610.337,75	121.179.973.856,67	(22.757.363.518,92)	(18,78)
Beban Jasa	218.903.661.655,73	235.488.010.311,96	(16.584.348.656,23)	(7,04)
Beban Pemeliharaan	11.263.187.867,52	8.528.082.554,06	2.735.105.313,46	32,07
Beban Perjalanan Dinas	39.600.311.810,00	29.311.041.907,00	10.289.269.903,00	35,10
Beban Hibah	159.465.149.055,89	130.006.069.515,36	29.459.079.540,53	22,66
Beban Bantuan Sosial	4.557.572.086,00	2.704.403.259,00	1.853.168.827,00	68,52
Beban Penyusutan	260.678.320.850,86	248.596.532.533,13	12.081.788.317,73	4,86
Beban Amortisasi	758.692.292,72	766.290.951,00	(7.598.658,28)	(0,99)
Beban Penyisihan Piutang	2.754.980.218,49	2.859.859.424,62	(104.879.206,13)	(3,67)
Beban Lain-Lain	0,00	1.930.898.047,44	(1.930.898.047,44)	(100,00)
Jumlah	**1.228.545.895.908,96**	**1.169.669.946.529,24**	**58.875.949.379,72**	**5,03**

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

31 Desember 2024	31 Desember 2023
432.141.409.734,00	388.298.784.169,00

Saldo Beban Pegawai Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp432.141.409.734,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp388.298.784.169,00, maka terdapat kenaikan Beban Pegawai senilai Rp43.842.625.565,00 atau 11,29%. Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 145 Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan	227.950.790.871,00	191.176.923.786,00	36.773.867.085,00	19,24
Beban Tambahan Penghasilan ASN	187.220.148.593,00	179.936.736.981,00	7.283.411.612,00	4,05
Beban Gaji dan Tunjangan Lainnya DPRD, KDH/WKDH	16.559.684.935,00	16.697.974.798,00	(138.289.863,00)	(0,83)
Beban Pegawai BOS	78.260.000,00	280.367.000,00	(202.107.000,00)	(72,09)
Beban Pegawai BLUD	332.525.335,00	206.781.604,00	125.743.731,00	60,81
Jumlah	**432.141.409.734,00**	**388.298.784.169,00**	**43.842.625.565,00**	**11,29**

Pada Beban Pegawai senilai Rp432.141.409.734,00 bila dibandingkan dengan belanja pegawai senilai Rp440.355.806.870,00 terdapat selisih kurang senilai Rp8.214.397.136,00 dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 146 Rincian Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai TA 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Gaji dan Tunjangan	227.950.790.871,00	226.052.542.685,00	1.898.248.186,00
Tambahan Penghasilan ASN	187.220.148.593,00	197.398.616.007,00	(10.178.467.414,00)
Gaji dan Tunjangan Lainnya DPRD, KDH/WKDH	16.559.684.935,00	16.559.684.935,00	0,00
Pegawai BOS	78.260.000,00	78.260.000,00	0,00
Pegawai BLUD	332.525.335,00	266.703.243,00	65.822.092,00
Jumlah	**432.141.409.734,00**	**440.355.806.870,00**	**(8.214.397.136,00)**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Selisih senilai Rp1.898.248.186,00 pada Beban Gaji dan Tunjangan terdiri dari utang beban pegawai berupa kenaikan pangkat senilai Rp66.308.431,00 yang ditentukan pembayaran senilai Rp72.732.052,00 dan penambahan senilai Rp6.423.621,00. Selain terdapat penambahan Utang Jaminan BPJS Kesehatan pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.964.556.617,00;

b. Selisih senilai Rp10.178.467.414,00 pada Beban Tambahan Penghasilan ASN terdiri pembayaran utang TPP bulan Desember 2023 dibayar Januari Tahun 2024; dan

c. Selisih senilai Rp65.822.092,00 terdiri dari penambahan Utang Beban Pegawai BLUD pada RSUKT senilai Rp64.974.844,00 dan Puskesmas Mamburungan senilai Rp847.248,00.

5.4.2.1.2. Beban Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	98.422.610.337,75	121.179.973.856,67

Saldo Beban Persediaan Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp98.422.610.337,75 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp121.179.973.856,67, maka terdapat penurunan Beban Persediaan senilai Rp22.757.363.518,92 atau 18,78%. Rincian Beban Persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 147 Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Bahan Bangunan dan Konstruksi	894.439.277,17	1.159.425.607,33	(264.986.330,16)	(22.85)
Bahan Kimia	3.777.774.276,91	2.380.193.349,00	1.397.580.927,91	58,72
Bahan Bakar dan Pelumas	6.720.962.726,56	6.036.710.062,79	684.252.663,77	11,33
Bahan/Bibit Tanaman	75.986.080,00	810.727.100,00	(734.741.020,00)	(90,63)
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.045.000,00	8.194.000,00	(2.149.000,00)	(26,63)
Isi Tabung Gas	2.021.949.424,00	2.366.545.380,71	(344.595.956,71)	(14,56)
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	46.888.100,00	0,00	46.888.100,00	0,00
Bahan Lainnya	1.739.662.506,15	1.684.710.482,07	54.952.024,08	3,26
Suku Cadang	2.202.408.550,89	3.396.675.887,16	(1.194.267.336,27)	(35,16)
Alat Tulis Kantor	12.466.179.921,18	13.339.628.742,80	(873.448.821,62)	(6,55)
Bahan Cetak	4.709.921.388,70	3.167.901.965,07	1.542.019.423,63	48,68
Benda Pos	154.010.000,00	112.380.000,00	41.630.000,00	37,04
Bahan Komputer	381.770.300,00	882.790.924,00	(501.020.624,00)	(56,75)
Perabot Kantor	322.940.497,24	191.535.365,00	131.405.132,24	68,61
Peralatan Listrik, Olahraga dan Dinas	10.654.741.446,92	2.314.784.360,95	8.339.957.085,97	360,29
Suvenir/Cendera Mata	557.765.950,00	431.745.500,00	126.020.450,00	29,19
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.498.980.879,61	2.593.177.419,05	905.803.460,56	34,93
Obat-Obatan	17.593.018.376,40	18.210.572.330,41	(617.553.954,01)	(3,39)
Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.418.416.708,00	47.167.683.883,78	(42.749.267.175,78)	(90,63)
Natura dan Pakan	1.215.432.232,45	2.011.686.486,00	(796.254.253,55)	(39,58)
Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00	0,00
Makanan dan Minuman	13.971.902.403,57	11.295.487.785,55	2.676.414.618,02	23,69
Pakaian Dinas	1.981.782.800,00	1.608.397.985,00	373.384.815,00	23,21
Beban Barang Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.978.870.492,00	9.019.240,00	8.969.851.252,00	99.452,41
Beban Barang Tak Habis Pakai	14.411.000,00	0,00	14.411.000,00	0,00
Jumlah	**98.422.610.337,75**	**121.179.973.856,67**	**(22.757.363.518,92)**	**(18,78)**

Pada Beban Persediaan senilai Rp98.422.610.337,75 bila dibandingkan dengan Belanja Barang senilai Rp51.601.940.177,00 terdapat selisih kurang senilai Rp46.820.670.160,75 dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 148 Rincian Perbandingan Beban dengan Belanja Persediaan TA 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Barang Pakai Habis	89.429.328.845,75	51.257.529.177,00	38.171.799.668,75
Barang Tak Habis Pakai	14.411.000,00	14.411.000,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.978.870.492,00	330.000.000,00	8.648.870.492,00
Jumlah	**98.422.610.337,75**	**51.601.940.177,00**	**46.820.670.160,75**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Selisih senilai Rp38.171.799.668,75 pada Barang Pakai Habis terdiri dari:

Penambahan Beban Barang Habis Pakai senilai Rp48.412.831.535,31 sebagai berikut.

1) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD, BOS, BOK yang berupa belanja bahan habis pakai masing-masing senilai Rp18.815.601.457,42, Rp9.631.387.668,14, dan Rp1.074.741.800,00;

2) Penambahan Utang Belanja - Barang Habis Pakai senilai Rp1.416.790.573,00;

3) Penerimaan Hibah berupa Barang Habis Pakai senilai Rp7.162.626.582,67 terdiri dari pada Dinkes senilai Rp5.957.747.107,67 berupa obat-obatan dan alat medis, Disdukcapil senilai Rp315.642.000,00 berupa Blanko KTP, DKPP senilai Rp10.547.100,00 berupa obat-obatan dan bahan kimia, DPPPAPPKB senilai Rp399.250.375,00 berupa Obat dan Alat Kontrasepsi, BPBD senilai Rp479.440.000,00 berupa Bahan Sembako Bantuan Bencana atau Tanggap Darurat;

4) Koreksi tambah pencatatan Persediaan senilai Rp34.908.300,60 dan koreksi pembulatan senilai Rp1.401,35; dan

5) Reklasifikasi masing-masing dari Aset Tetap senilai Rp39.157.500,00, dari Beban Jasa senilai Rp632.220.115,13 dan dari Beban Pemeliharaan senilai Rp906.525.645,00.

Pengurangan Beban Barang Habis Pakai senilai Rp2.396.047.512,66 sebagai berikut.

1) Reklasifikasi masing masing ke Aset Tetap senilai Rp1.178.092.936,39, ke Beban Jasa senilai Rp148.331.000,00 dan ke Beban Pemeliharaan senilai Rp100.607.000,00;

2) Koreksi kurang pencatatan Persediaan senilai Rp748.125,00 dan pembulatan senilai Rp49.110,27; dan

3) Pembayaran Utang Belanja - Barang Habis Pakai senilai Rp 968.219.341,00 pada RSUKT masing-masing pada Utang Beban Makanan dan Minuman Pelayanan Kesehatan senilai Rp61.966.000,00, Utang Beban Obatan senilai Rp645.403.341,00 dan Utang Beban Tabung Gas/Oksigen senilai Rp260.850.000,00.

b. Selisih senilai Rp8.648.870.492,00 pada Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi berupa reklasifikasi dari Aset Tetap pada SKPD yang dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 149 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2024

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.451.080,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.675.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	79.186.222,00
4	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	53.280.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	699.000,00
6	Dinas Kesehatan	200.688.690,00
7	Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan	13.482.050,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.840.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.770.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	15.350.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.870.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.300.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16.588.470,00
14	Dinas Pendidikan	7.646.229.280,00
15	Dinas Perhubungan	138.253.000,00
16	Dinas Perikanan	11.690.000,00
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.285.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	210.029.000,00
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	175.318.700,00
20	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	10.895.000,00
21	Kecamatan Tarakan Tengah	800.000,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.275.000,00
23	Sekretariat Daerah	22.025.000,00
24	Sekretariat DPRD	35.890.000,00
	Jumlah	**8.698.870.492,00**

5.4.2.1.3. Beban Jasa	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	218.903.661.655,73	**235.488.010.311,96**

Saldo Beban Jasa Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp218.903.661.655,73 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp235.488.010.311,96, maka terdapat penurunan Beban Jasa senilai Rp16.584.348.656,23 atau 7,04%. Rincian Beban Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 150 Rincian Beban Jasa TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Jasa Kantor	55.487.513.578,00	67.924.394.332,40	(12.436.880.754,40)	(18,31)
Beban *Medical Check Up*	58.897.522,00	0,00	58.897.522,00	0,00
Beban Premi Asuransi	16.583.662.645,50	13.902.349.727,25	2.681.312.918,25	19,29
Beban Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	657.967.221,72	946.862.896,17	(288.895.674,45)	(30,51)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	62.050.000,00	144.390.000,00	(82.340.000,00)	(57,03)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.793.309.740,00	2.196.100.442,00	597.209.298,00	27,19
Beban Jasa Konsultasi	139.159.000,00	391.332.000,00	(252.173.000,00)	(64,44)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	728.778.000,00	550.075.000,00	178.703.000,00	32,49
Beban Honorarium PNS	5.849.995.500,00	5.179.476.270,00	670.519.230,00	12,95
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	157.493.405,00	178.407.050,00	(20.913.645,00)	(11,72)
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	30.000.000,00	29.500.000,00	500.000,00	1,69
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.336.826.240,00	4.912.519.500,00	(1.575.693.260,00)	(32,08)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.523.130.188,12	64.215.980.003,92	(692.849.815,80)	(1,08)
Beban Barang Dana BOS	25.368.385.255,86	37.642.863.565,64	(12.274.478.309,78)	(32,61)
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.663.711.289,00	0,00	1.663.711.289,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	42.462.782.070,53	37.273.759.524,58	5.189.022.545,95	13,92
Jumlah	**218.903.661.655,73**	**235.488.010.311,96**	**(16.584.348.656,23)**	**(7,04)**

Pada Beban Jasa senilai Rp218.903.661.655,73 bila dibandingkan dengan Belanja Pegawai senilai Rp249.818.615.182,44 terdapat selisih kurang senilai Rp30.914.953.526,71 dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 151 Rincian Perbandingan Beban Jasa dengan Belanja Jasa TA 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Jasa Kantor	61.396.406.600,00	61.077.794.265,00	318.612.335,00
Iuran Jaminan/Asuransi	16.583.662.645,50	16.302.748.928,00	280.913.717,50
Sewa Peralatan dan Mesin	2.793.309.740,00	2.793.309.740,00	0,00
Sewa Gedung dan Bangunan	657.967.221,72	568.985.000,00	88.982.221,72
Sewa Aset Tetap Lainnya	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00
Jasa Konsultansi Konstruksi	109.469.000,00	109.469.000,00	0,00
Jasa Konsultansi Non Konstruksi	29.690.000,00	29.690.000,00	0,00
Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	728.778.000,00	728.778.000,00	0,00
Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	157.493.405,00	157.493.405,00	0,00
Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.859.956.428,12	66.619.788.827,49	240.167.600,63
Barang dan Jasa BOS	25.368.385.255,86	37.308.842.424,00	(11.940.457.168,14)
Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.663.711.289,00	2.738.453.089,00	(1.074.741.800,00)
Barang dan Jasa BLUD	42.462.782.070,53	61.291.212.503,95	(18.828.430.433,42)
Jumlah	**218.903.661.655,73**	**249.818.615.182,44**	**(30.914.953.526,71)**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Selisih senilai Rp318.612.335,00 pada Beban Jasa Kantor terdiri dari penambahan dari reklasifikasi Aset Tak Berwujud ke Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan senilai Rp321.000.000,00, penyesuaian Utang Jasa Listrik Air Telepon dan Internet senilai Rp2.387.665,00.

b. Selisih senilai Rp280.913.717,50 pada Beban Iuran Jaminan/Asuransi terdiri dari penyesuaian Beban Dibayar Dimuka tahun sebelumnya senilai Rp311.283.925,72 dan Beban Dibayar Dimuka tahun berkenaan senilai Rp 30.370.208,22.

c. Selisih senilai Rp88.982.221,72 pada Beban Sewa Gedung dan Bangunan terdiri dari penyesuaian Beban Asrama Dibayar Dimuka tahun sebelumnya senilai Rp138.489.071,04 dan tahun berkenaan senilai Rp49.506.849,32.

d. Selisih senilai Rp240.167.600,63 pada Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Reklasifikasi ke Persediaan Souvenir hadiah perlombaan senilai Rp5.678.000,00 pada DLH dan senilai Rp146.381.000,00 pada Disbudporapar;

2) Reklasifikasi ke Beban Asuransi BMD senilai Rp149.799.000,00 pada Sekretariat Daerah;

3) Reklasifikasi ke Persediaan senilai Rp64.702.229,13, ke Aset Tetap senilai Rp199.000.000,00 pada Disbudporapar;

4) Pembayaran utang beban jasa senilai Rp 14.187.368,00 dan penambahan utang beban jasa senilai Rp20.206.192,00;

5) Reklasifikasi dari Prolanis senilai Rp186.106.601,99 pada Puskesmas di Dinas Kesehatan; dan

6) Reklasifikasi dari Belanja Tak Terduga senilai Rp223.879.500,00 berupa Beban Makan Minum Dinas Kesehatan berupa KLB Polio Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Kader Kesehatan Putaran 1 dan 2 berupa Snack atas RKB Dinas Kesehatan Kota Tarakan berdasarkan Kemenkes No. HK. 01.07/MENKES/1031/2024.

e. Selisih senilai Rp11.940.457.168,14 pada Beban Barang dan Jasa BOS terdiri dari:

1) Reklasifikasi ke Aset Tetap BOS senilai Rp2.312.069.500,00 berupa Ektrakomptabel dan Intrakomptabel di sekolah-sekolah dan Ke Persediaan BOS senilai Rp9.631.387.668,14 pada DISDIK; dan

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap senilai Rp3.000.000,00 berupa Belanja Habis Pakai SMPN 7 Aksesoris Tarian Adat.

f. Selisih senilai Rp1.074.741.800,00 pada Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas berupa reklasifikasi ke persediaan pada Dinas Kesehatan.

g. Selisih senilai Rp18.828.430.433,42 pada Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari Reklasifikasi ke Persediaan senilai Rp18.815.601.457,42, penambahan Utang Barang dan Jasa BLUD RSUKT dan Puskesmas senilai Rp4.827.785.843,00 dan pembayaran utang senilai Rp4.840.614.819,00.

5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	11.263.187.867,52	**8.528.082.554,06**

Saldo Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp11.263.187.867,52 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp8.528.082.554,06, maka terdapat kenaikan Beban Pemeliharaan senilai

Rp2.735.105.313,46 atau 32,07%. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 152 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.691.774.333,00	2.088.881.458,06	602.892.874,94	28,86
Beban Pemeliharaan Gedung Bangunan	5.112.804.727,52	2.711.599.896,00	2.401.204.831,52	88,55
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jaringan	3.428.518.807,00	3.700.860.600,00	(272.341.793,00)	(7,36)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.090.000,00	26.740.600,00	3.349.400,00	12,53
Jumlah	**11.263.187.867,52**	**8.528.082.554,06**	**2.735.105.313,46**	**32,07**

Pada Beban Pemeliharaan senilai Rp11.263.187.867,52 bila dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan pada LRA senilai Rp12.568.077.634,13 terdapat selisih kurang senilai Rp1.304.889.766,61 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 153 Perbandingan Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan TA 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.691.774.333,00	3.486.290.978,00	(794.516.645,00)
Pemeliharaan Gedung Bangunan	5.112.804.727,52	5.610.524.849,13	(497.720.121,61)
Pemeliharaan Jalan dan Jaringan	3.428.518.807,00	3.428.518.807,00	0,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.090.000,00	42.743.000,00	(12.653.000,00)
Jumlah	**11.263.187.867,52**	**12.568.077.634,13**	**(1.304.889.766,61)**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Selisih senilai Rp794.516.645,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri dari:

   1) Reklasifikasi ke Persediaan Suku Cadang senilai Rp29.999.500,00 pada Kecamatan Tarakan Utara; dan

   2) Reklasifikasi pada DLH ke Persediaan Bahan Kantor Lainnya senilai Rp834.500.145,00 dan senilai Rp1.495.000,00 dan dari Persediaan senilai Rp1.478.000,00.

b) Selisih senilai Rp497.720.121,61 pada Pemeliharaan Gedung Bangunan terdiri dari:

   1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Dan Bangunan senilai Rp34.290.120,00 pada Dinas Kesehatan;

2) Reklasifikasi senilai Rp114.999.000,00 berupa kegiatan pengawasan dan pemeliharaan dari Belanja Hibah Barang yang senilai Rp15.870.000,00 serta dari Belanja Barang senilai Rp99.129.000,00 pada Disbudporapar; dan

3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung Dan Bangunan senilai Rp83.942.873,00 pada Kecamatan Tarakan Barat dan Rp346.212.243,64 pada Kecamatan Tarakan Tengah dan senilai Rp216.854.124,97 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c) Selisih senilai Rp12.653.000,00 pada pemeliharaan Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1) Reklasifikasi ke Persediaan senilai Rp34.853.000,00 pada DLH; dan

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap senilai Rp22.200.000,00 Pada DKISP.

5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
39.600.311.810,00	**29.311.041.907,00**

Saldo Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp39.600.311.810,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp29.311.041.907,00, maka terdapat kenaikan Beban Perjalanan Dinas senilai Rp10.289.269.903,00 atau 35,10%. Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 154 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Luar Kota	37.992.881.810,00	27.186.785.007,00	10.806.096.803,00	39,75
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.607.430.000,00	2.124.256.900,00	(516.826.900,00)	(24,33)
Jumlah	**39.600.311.810,00**	**29.311.041.907,00**	**10.289.269.903,00**	**35,10**

5.4.2.1.6. Beban Hibah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
159.465.149.055,89	**130.006.069.515,36**

Saldo Beban Hibah Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp159.465.149.055,89 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp130.006.069.515,36, maka terdapat kenaikan Beban Hibah senilai Rp29.459.079.540,53 atau 22,66%. Rincian Beban Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 155 Rincian Beban Hibah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	2.808.531.700,00	10.302.493.035,84	(7.493.961.335,84)	(72,74)
Beban Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	28.515.267.360,00	39.972.716.640,00	(11.457.449.280,00)	(28,66)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	115.600.459.466,89	75.933.381.429,52	39.667.078.037,37	52,24
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.056.491.296,00	1.013.744.810,00	42.746.486,00	4,22
Beban Hibah Dana BOS	9.792.189.233,00	2.783.733.600,00	7.008.455.633,00	251,76
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.692.210.000,00	0,00	1.692.210.000,00	0,00
Jumlah	**159.465.149.055,89**	**130.006.069.515,36**	**29.459.079.540,53**	**22,66**

Pada Beban Hibah senilai Rp159.465.149.055,89 bila dibandingkan dengan Belanja Hibah pada LRA senilai Rp164.745.043.401,97 terdapat selisih kurang senilai Rp5.279.894.346,08 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 156 Rincian Perbandingan Beban Hibah dengan Belanja Hibah TA 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Hibah kepada Kelompok Masyarakat	2.808.531.700,00	2.794.951.700,00	13.580.000,00
Hibah Barang kepada BUMD	0,00	5.060.578.251,00	(5.060.578.251,00)
Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan	144.115.726.826,89	144.348.622.921,97	(232.896.095,08)
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.056.491.296,00	1.056.491.296,00	0,00
Hibah Dana BOS dan BOSP-BOP Kesetaraan	11.484.399.233,00	11.484.399.233,00	0,00
Jumlah	**159.465.149.055,89**	**164.745.043.401,97**	**(5.279.894.346,08)**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa senilai Rp13.580.000,00 pada Sekretariat Daerah;

b) Reklasifikasi ke penyertaan modal pemerintah berupa aset tetap kepada Perumda PDAM Tirta Alam Kota Tarakan senilai buku Rp5.033.686.649,00 ditambah reklasifikasi dari aset tetap senilai Rp14.385.664,00 lalu dikurangi

reklasifikasi ke beban penyusutan sebelum diserahkan senilai Rp41.277.266,00; dan

c) Selisih senilai Rp232.896.095,08 terdiri dari:

1) Reklasifikasi ke piutang lainnya dikarenakan kelebihan pembayaran dibandingkan progres fisik pekerjaan pada DPUPR senilai Rp269.941.096,08;

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap senilai Rp117.540.000,00 yang dihibahkan ke Lanud dan sekolah swasta senilai Rp25.840.000,00 pada DLH dan yang dihibahkan ke Kejaksaan RI senilai Rp91.700.000,00 pada DPRKPP; dan

3) Reklasifikasi ke beban Jasa yang diberikan pihak ketiga senilai Rp64.625.000,00 pada DISDIK dan reklasifikasi ke beban pemeliharaan senilai Rp15.870.000,00 pada Disbudporapar.

5.4.2.1.7. Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.557.572.086,00	**2.704.403.259,00**

Saldo Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp4.557.572.086,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp2.704.403.259,00, maka terdapat kenaikan Beban Bantuan Sosial senilai Rp1.853.168.827,00 atau 68,52%. Rincian Beban Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 157 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	334.916.500,00	240.138.000,00	94.778.500,00	39,47
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.778.751.586,00	1.512.921.258,00	265.830.328,00	17,57
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.443.904.000,00	951.344.001,00	1.492.559.999,00	156,89
Jumlah	**4.557.572.086,00**	**2.704.403.259,00**	**1.853.168.827,00**	**68,52**

5.4.2.1.8. Beban Penyusutan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
260.678.320.850,86	**248.596.532.533,13**

Saldo Beban Penyusutan Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp260.678.320.850,86 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp248.596.532.533,13, maka terdapat kenaikan Beban Penyusutan senilai Rp12.081.788.317,73 atau 4,68%. Rincian Beban Penyusutan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 158 Rincian Beban Penyusutan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	43.488.718.729,48	31.726.139.477,03	11.762.579.252,45	37,08
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	48.746.586.238,70	44.672.667.641,00	4.073.918.597,70	9,12
Beban Penyusutan Jalan Kota	157.487.950.181,09	162.115.439.773,60	(4.627.489.592,51)	(2,85)
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	79.518.177,33	98.832.105,00	(19.313.927,67)	(19,54)
Penyusutan Aset Properti Investasi	4.771.214.552,00	3.095.683.475,00	1.675.531.077,00	54,12
Penyusutan Aset Lain-lain	6.104.332.972,26	6.887.770.061,50	(783.437.089,24)	(11,37)
Jumlah	**260.678.320.850,86**	**248.596.532.533,13**	**12.081.788.317,73**	**4,86**

5.4.2.1.9. Beban Amortisasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
758.692.292,72	766.290.951,00

Saldo Beban Amortisasi Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp758.692.292,72 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp766.290.951,00, maka terdapat penurunan Beban Amortisasi senilai Rp7.598.658,28 atau 0,99%.

5.4.2.1.10. Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.754.980.218,49	2.859.859.424,62

Saldo Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp2.754.980.218,49 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp2.859.859.424,62, maka terdapat penurunan Beban Penyisihan Piutang senilai Rp104.879.206,13 atau 3,67%. Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 terdiri dari:

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak senilai Rp2.473.679.910,12. Hal tersebut disebabkan Penyisihan Piutang Pajak tahun lalu senilai Rp43.688.755.376,58 bertambah menjadi senilai Rp46.162.435.286,70;

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi senilai Rp226.435.857,02. Hal tersebut disebabkan Penyisihan Piutang Retribusi tahun lalu senilai Rp1.054.873.424,00 bertambah menjadi senilai Rp1.281.309.281,02; dan

c. Beban Penyisihan Piutang BLUD pada RSUKT senilai.Rp54.864.451,35 sedangkan pada tahun sebelumnya tidak terdapat penyisihan piutang BLUD.

5.4.2.1.11. Beban Transfer

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

Saldo Beban Transfer Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 dan 2023 adalah nihil atau Rp0,00.

5.4.2.1.12. Beban Lain-lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	1.930.898.047,44

Saldo Beban Lain-lain Pemerintah Kota Tarakan tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 senilai Rp1.930.898.047,44, maka terdapat penurunan Beban Lain-lain senilai Rp1.930.898.047,44 atau 100,00%. Saldo Beban Lain-lain Pemerintah Kota Tarakan tahun 2023 adalah berupa Beban Barang Ekstrakomptabel. Pada tahun 2024 beban tersebut nihil karena rekening khusus untuk Beban Barang Ekstrakomptabel telah disediakan pada aplikasi SIPD dengan nama rekening Beban Barang yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(33.936.067.756,19)	179.766.980.348,69

Surplus/Defisit dari Operasi berasal dari Pendapatan Operasi setelah dikurangi Beban Operasi. Terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kota Tarakan pada TA 2024 adalah senilai Rp33.936.067.756,19 sedangkan TA 2023 terdapat surplus senilai Rp179.766.980.348,69.

5.4.4. SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	11.127.851.787,78	(33.943.796.430,76)

Terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Tarakan pada TA 2024 adalah senilai Rp11.127.851.787,78 terdiri dari Surplus Penyisihan Dana Bergulir, Pelepasan Penyertaan Modal, Penghapusan Aset dan Kegiatan Non Operasional Lainnya sedangkan TA 2023 defisit senilai Rp33.943.796.430,76. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional disajikan pada tabel berikut.

5.4.4.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	123.941.500,00	0,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kota Tarakan untuk yang berakhir per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp123.941.500,00 yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 159 Rincian Surplus Penjualan Aset Non Lancar TA 2024

Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
Hasil Penjualan Barang Milik Daerah melalui lelang peralatan dan mesin kantor	BPKPAD	72.141.500,00
Hasil penjualan Barang Milik Daerah berupa mobil	Sekretariat DPRD	51.800.000,00
	Jumlah	**123.941.500,00**

5.4.4.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31 Desember 2024 13.615.209.666,60	31 Desember 2023 0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kota Tarakan untuk yang berakhir per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp13.615.209.666,60 yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 160 Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional TA 2024

No.	Uraian	Surplus
1	Surplus akibat Kenaikan Nilai Penyertaan Modal Pemerintah	13.401.900.707,17
2	Surplus akibat Penurunan Penyisihan Piutang	128.073,42
3	Surplus akibat Kenaikan Nilai Aset	213.180.886,01
	Jumlah	**13.615.209.666,60**

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

a). Terdapat surplus yang mengakibatkan perubahan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) senilai Rp13.401.900.707,17 berdasarkan laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (A*udited*) dengan rincian sebagai berikut.

1) Perumda PDAM Tirta Alam Tarakan memperoleh laba tahun berjalan senilai Rp13.224.672.060,00; dan

2) Perumda Tarakan Energi Mandiri memperoleh laba tahun berjalan senilai Rp177.228.647,17.

c) Terdapat Surplus Kegiatan Non Operasional akibat penurunan Penyisihan Piutang Pajak Restoran senilai Rp128.073,42 pada BPKPAD.

d) Surplus Kegiatan Non Operasional akibat kenaikan nilai Aset berupa Persediaan dan Aset Tetap senilai Rp213.180.886,01 yang terdiri atas:

1) Terdapat perubahan nilai Aset berupa Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi pada BPKPAD senilai Rp178.271.181,34 berdasarkan Laporan Kerugian Daerah tahun berjalan atau Semester II Tahun 2024;

2) Kenaikan nilai perolehan Persediaan disebabkan retur obat pada IFK pada awal tahun 2024 atas retur tahun sebelumnya senilai Rp29.353.281,60;

3) Kenaikan nilai perolehan Persediaan atas hasil reviu senilai Rp5.376.600,00 pada Puskesmas Juata;

4) Kenaikan nilai perolehan Persediaan dikarenakan selisih pembayaran dari pengakuan nilai utang senilai Rp166.411,00 pada RSUKT;

5) Kenaikan nilai perolehan Persediaan dikarenakan belum termasuk diinput nilai pajak senilai Rp12.000,00 pada Puskesmas Sebengkok; dan

6) Kenaikan nilai perolehan Persediaan dan Aset Tetap dikarenakan pembulatan senilai Rp1.412,07.

5.4.4.3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(2.611.299.378,82)	0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kota Tarakan untuk yang berakhir per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.611.299.378,82 yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 161 Rincian Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2024

No.	Uraian	Surplus
1	Defisit akibat Penurunan Nilai Penyertaan Modal Pemerintah	2.603.682.193,00
3	Defisit akibat Penurunan Nilai Aset	49.111,01
4	Defisit akibat Penghapusan Aset	7.568.074,81
	Jumlah	**2.611.299.378,82**

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Defisitnya Penyertaan Modal senilai Rp2.603.682.193,00 dipengaruhi hal sebagai berikut.

1) Perumda Tarakan Aneka Usaha memperoleh rugi tahun berjalan senilai Rp153.786.705,00 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited*;

2) Perumda Tarakan Media Telekomunikasi memperoleh rugi tahun berjalan senilai Rp210.832.859,00 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited*; dan

3) Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri memperoleh rugi tahun berjalan senilai Rp2.239.062.629,00 berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited*.

b) Defisit Kegiatan Non Operasional akibat penurunan nilai Aset senilai Rp49.111,01 yang terdiri atas:

1) Koreksi pencatatan atas nilai Persediaan pada DISHUB senilai Rp45.000,00 dikarenakan terdapat selisih pembayaran dengan nilai barang yang diperoleh.

2) Terdapat koreksi kurang atas nilai Persediaan Obat-obatan pada Puskesmas senilai Rp3.986,06 yang disebabkan oleh pembulatan pada aplikasi penatausahaan barang.

3) Terdapat koreksi kurang atas nilai Persediaan dan Aset Tetap pada SKPD senilai Rp124,95 yang disebabkan oleh pembulatan pada aplikasi penatausahaan barang.

c) Terdapat Defisit Kegiatan Non Operasional akibat penghapusan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp8.812.666.942,17 berdasarkan Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-XII/ 548/2024 yang ditetapkan tanggal 19 Desember 2024. Adapun nilai Akumulasi Aset Tetap yang dihapus tersebut senilai Rp8.805.098.867,36 sehingga nilai buku atau defisit penghapusan aset senilai Rp7.568.074,81.

5.4.5. POS LUAR BIASA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Pos Luar Biasa merupakan pos yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 atau nihil.

5.4.5.1. Pendapatan Luar Biasa	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Selama tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat transaksi Pendapatan Luar Biasa.

5.4.5.2. Beban Luar Biasa	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Selama tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat transaksi Beban Luar Biasa.

5.4.6. SURPLUS/DEFISIT – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(22.808.215.968,41)	145.823.183.917,93

Berdasarkan LO Pemerintah Kota Tarakan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat Defisit - LO senilai Rp22.808.215.968,41 atau mengalami penurunan senilai Rp168.631.399.886,34 atau 115,64% bila dibandingkan tahun 2023 yang surplus senilai Rp145.823.183.917,93.

5.5. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Tarakan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan terhadap Kas di Kas Daerah selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Laporan Arus Kas dapat diuraikan sebagapi berikut.

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	320.976.722.290,67	291.922.939.971,82

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional tanpa mengandalkan sumber dana dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama tahun 2024 adalah senilai Rp320.976.722.290,67 sedangkan tahun 2023 adalah senilai Rp291.922.939.971,82 dengan uraian sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk Operasi selama TA 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.284.447.968.952,21 dan Rp1.161.400.419.290,63. Adapun yang membedakan nilai Arus Kas Masuk Operasi dengan jumlah Pendapatan LRA TA 2024 dikarenakan lain-lain PAD yang sah berupa penjualan Aset Tetap senilai Rp135.441.500,00 disajikan dalam aktivitas Investasi. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Masuk Operasi TA 2023 senilai Rp1.161.400.419.290,63 terjadi kenaikan senilai Rp123.047.549.661,58 atau 10,59%. Rincian Arus Kas Masuk pada Tahun 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 162 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Penerimaan Pajak Daerah	98.648.559.407,53	86.660.296.194,72	11.988.263.212,81	13,83
Penerimaan Retribusi Daerah	16.050.205.889,70	12.859.825.298,00	3.190.380.591,70	24,81
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.602.103.335,97	10.314.517.461,15	5.287.585.874,82	51,26
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	74.832.980.559,01	64.603.884.057,76	10.229.096.501,25	15,83
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	110.926.534.000,00	113.268.524.011,00	(2.341.990.011,00)	(2,07)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	282.028.581.380,00	160.311.500.604,00	121.717.080.776,00	75,93
Penerimaan Dana Alokasi Umum	475.029.013.000,00	438.566.142.648,00	36.462.870.352,00	8,31
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	107.307.452.338,00	114.652.274.282,00	(7.344.821.944,00)	(6,41)
Penerimaan Insentif Fiskal	6.607.594.000,00	23.343.638.000,00	(16.736.044.000,00)	(71,69)
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	71.235.038.148,00	78.987.935.132,00	(7.752.896.984,00)	(9,82)
Penerimaan Bantuan Keuangan	26.179.906.894,00	54.419.478.140,00	(28.239.571.246,00)	(51,89)
Penerimaan Hibah	0,00	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	0,00	412.403.462,00	(412.403.462,00)	(100,00)
Jumlah	**1.284.447.968.952,21**	**1.161.400.419.290,63**	**123.047.549.661,58**	**10,59**

b. Arus Kas Keluar Operasi selama TA 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp963.471.246.661,54 dan Rp869.477.479.318,81. Bila dibandingkan dengan Arus Kas Keluar Operasi TA 2023 terdapat kenaikan senilai Rp93.993.767.342,73 atau 10,81%. Rincian Arus Kas Keluar dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 163 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pembayaran Pegawai	440.355.806.870,00	398.818.594.574,00	41.537.212.296,00	10,42
Pembayaran Barang	353.588.944.803,57	325.517.556.206,81	28.071.388.596,76	8,62
Pembayaran Hibah	164.745.043.401,97	141.649.793.597,00	23.095.249.804,97	16,30
Pembayaran Bantuan Sosial	4.557.572.086,00	2.724.179.010,00	1.833.393.076,00	67,30
Pembayaran Tak Terduga	223.879.500,00	767.355.931,00	(543.476.431,00)	(70,82)
Jumlah	**963.471.246.661,54**	**869.477.479.318,81**	**93.993.767.342,73**	**10,81**

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	(309.738.407.015,14)	**(398.528.500.434,52)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi/Non Keuangan pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing negatif senilai Rp309.738.407.015,14 dan Rp398.528.500.434,52 yang terdiri dari:

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi terdapat penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2023 adalah senilai Rp511.517.877,00 sedangkan TA 2024 senilai Rp135.441.500,00;

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi selama TA 2024 dan 2023 surplus masing-masing senilai Rp309.873.848.515,14 dan Rp399.040.018.311,52. Bila dibandingkan dengan arus kas keluar TA 2023 terdapat penurunan senilai Rp89.166.169.796,38 atau 22,35%. Rincian Arus Kas Keluar Investasi pada dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 164 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Perolehan Tanah	3.517.441.266,00	6.911.585.555,00	(3.394.144.289,00)	(49,11)
Perolehan Peralatan dan Mesin	53.762.258.658,00	17.801.793.264,00	35.960.465.394,00	202,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	54.193.152.010,71	226.664.480.433,52	(172.471.328.422,81)	(76,09)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	193.413.536.165,43	139.194.648.564,00	54.218.887.601,43	38,95
Perolehan Aset Tetap Lainnya	436.246.075,00	4.281.600.495,00	(3.845.354.420,00)	(89,81)
Perolehan Aset Lainnya	2.551.957.540,00	1.185.910.000,00	1.366.047.540,00	115,19
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.999.256.800,00	3.000.000.000,00	(1.000.743.200,00)	(33,36)
Jumlah	**309.873.848.515,14**	**399.040.018.311,52**	**(89.166.169.796,38)**	**(22,35)**

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Adapun Arus Kas Masuk, arus kas keluar serta arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2024 dan 2023 adalah nihil.

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(2.077.100,00)	14.993.746.104,80

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2024 senilai negatif Rp2.077.100,00 sedangkan TA 2023 senilai positif Rp14.993.746.104,80. Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut.

a. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris selama TA 2024 dan 2023 senilai Rp83.456.117.300,00 dan Rp102.160.584.676,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 165 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.456.117.300,00	87.158.507.576,00	(3.702.390.276,00)	(4,25)
Penerimaan Lainnya	0,00	15.002.077.100,00	(15.002.077.100,00)	(100,00)
Jumlah	**83.456.117.300,00**	**102.160.584.676,00**	**(18.704.467.376,00)**	**(18,31)**

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp83.456.117.300,00 dan Rp87.158.507.576,00 terdiri dari Pemotongan Iuran Wajib Pegawai, Asuransi Kesehatan, Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 166 Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Iuran Wajib Pegawai 1%	15.428.350.830,00	3.213.143.468,00	12.215.207.362,00	380,16
Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	10.579.310.378,00	(10.579.310.378,00)	(100,00)
Pajak Penghasilan Pasal 21	15.352.922.578,00	14.213.347.088,00	1.139.575.490,00	8,02
Pajak Penghasilan Pasal 22	1.286.691.329,00	429.926.155,00	856.765.174,00	199,28
Pajak Penghasilan Pasal 23	700.576.921,00	788.848.193,00	(88.271.272,00)	(11,19)
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	6.055.773.453,00	8.879.769.033,00	(2.823.995.580,00)	(31,80)
Pajak Penghasilan Pasal 26	0,00	18.781.955,00	(18.781.955,00)	(100,00)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	44.631.802.189,00	49.035.381.306,00	(4.403.579.117,00)	(8,98)
Jumlah	**83.456.117.300,00**	**87.158.507.576,00**	**(3.702.390.276,00)**	**(4,25)**

Penerimaan lainnya pada TA 2024 adalah nihil sedangkan TA 2023 senilai Rp15.002.077.100,00 adalah penerimaan pencairan Deposito BLUD RSUKT senilai Rp15.000.000.000,00 dan saldo rekening Prolanis dari BPJS Kesehatan Puskesmas Pantai Amal senilai Rp2.077.100,00.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris selama Tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp83.458.194.400,00 dan Rp87.166.838.571,20 terdiri dari:

Tabel 167 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.456.117.300,00	87.158.507.576,00	(3.702.390.276,00)	(4,25)
Pengeluaran Non Anggaran Lainnya	2.077.100,00	8.330.995,20	(6.253.895,20)	(75,07)
Jumlah	**83.458.194.400,00**	**87.166.838.571,20**	**(3.708.644.171,20)**	**(4,25)**

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2024 dan 2023 masing-masing Rp83.456.117.300,00 dan senilai Rp87.158.507.576,00 terdiri dari Pemotongan Iuran Wajib Pegawai, Asuransi Kesehatan, Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 168 Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Iuran Wajib Pegawai 1%	15.428.350.830,00	3.213.143.468,00	12.215.207.362,00	380,16
Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	10.579.310.378,00	(10.579.310.378,00)	(100,00)
Pajak Penghasilan Pasal 21	15.352.922.578,00	14.213.347.088,00	1.139.575.490,00	8,02
Pajak Penghasilan Pasal 22	1.286.691.329,00	429.926.155,00	856.765.174,00	199,28
Pajak Penghasilan Pasal 23	700.576.921,00	788.848.193,00	(88.271.272,00)	(11,19)
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	6.055.773.453,00	8.879.769.033,00	(2.823.995.580,00)	(31,80)
Pajak Penghasilan Pasal 26	0,00	18.781.955,00	(18.781.955,00)	(100,00)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	44.631.802.189,00	49.035.381.306,00	(4.403.579.117,00)	(8,98)
Jumlah	**83.456.117.300,00**	**87.158.507.576,00**	**(3.702.390.276,00)**	**(4,25)**

Pada Pengeluaran Non Anggaran Lainnya TA 2024 senilai Rp2.077.100,00 adalah saldo rekening Prolanis dari BPJS Kesehatan Puskesmas Pantai Amal sedangkan TA 2023 senilai Rp8.330.995,20 adalah saldo Prolanis pada Puskesmas Mamburungan.

5.5.5. KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	11.236.238.175,53	**(91.611.814.357,90)**

Pada TA 2024 terjadi kenaikan kas senilai Rp11.236.238.175,53 sedangkan tahun 2023 terjadi penurunan kas senilai Rp91.611.814.357,90 yang bersumber dari arus kas bersih yang terdiri sebagai berikut.

Tabel 169 Rekapitulasi Kenaikan/Penurunan Kas TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aktivitas Operasi	320.976.722.290,67	291.922.939.971,82	29.053.782.318,85	9,95
Aktivitas Investasi	(309.738.407.015,14)	(398.528.500.434,52)	88.790.093.419,38	(22,28)
Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivitas Transitoris	(2.077.100,00)	14.993.746.104,80	(14.995.823.204,80)	(100,01)
Jumlah	**11.236.238.175,53**	**(91.611.814.357,90)**	**102.848.052.533,43**	**(112,27)**

5.5.6. SALDO AWAL KAS

31 Desember 2024	31 Desember 2023
39.883.613.735,24	131.495.428.093,14

Saldo awal kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp39.883.613.735,24 dan Rp131.495.428.093,14 adalah berupa saldo kas akhir tahun sebelumnya.

5.5.7. SALDO AKHIR KAS

31 Desember 2024	31 Desember 2023
51.119.851.910,77	39.883.613.735,24

Berdasarkan Laporan Arus Kas dapat diketahui data kenaikan atau penurunan kas berpengaruh pada saldo awal sehingga diperoleh saldo akhir kas. Adapun rincian kenaikan atau perubahan kas dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 170 Perubahan Saldo Kas TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kenaikan (Penurunan) Kas	11.236.238.175,53	(91.611.814.357,90)
Saldo Awal Keseluruhan Kas	39.883.613.735,24	131.495.428.093,14
Saldo Akhir Keseluruhan Kas	**51.119.851.910,77**	**39.883.613.735,24**

Adapun saldo akhir total kas per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp51.119.851.910,77 naik senilai Rp11.236.238.175,53 atau 28,17% bila dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp39.883.613.735,24. Secara keseluruhan saldo akhir kas dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 171 Saldo Akhir Kas Keseluruhan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	35.913.844.950,10	19.228.393.115,04	16.685.451.835,06	86,78
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	118.514.000,00	85.283.258,00	33.230.742,00	38,97
Saldo Akhir Kas BLUD	11.567.672.633,25	15.685.048.577,94	(4.117.375.944,69)	(26,25)
Saldo Akhir Kas Dana BOS	2.403.210.663,42	2.491.120.457,42	(87.909.794,00)	(3,53)
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	46.448.059,84	(46.448.059,84)	(100,00)
Saldo Akhir Kas Lainnya	1.116.609.664,00	2.347.320.267,00	(1.230.710.603,00)	(52,43)
Jumlah	**51.119.851.910,77**	**39.883.613.735,24**	**11.236.238.175,53**	**28,17**

Berdasarkan tabel di atas, saldo akhir dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Saldo Akhir Kas di Kas Daerah TA 2024 dan TA 2023 masing-masing senilai Rp35.913.844.950,10 dan Rp19.228.393.115,04 merupakan posisi saldo yang terdapat pada Rekening Giro Pemerintah Kota Tarakan yang dikelola BUD.

b. Saldo Akhir Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan TA 2023 adalah nihil.

c. Saldo Akhir kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 adalah senilai Rp118.514.000,00 sedangkan TA 2023 senilai Rp85.283.258,00.

d. Saldo Akhir Kas BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp11.567.672.633,25 yang merupakan saldo akhir dari 8 (enam) buah Badan Layanan Umum Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Puskesmas Karang Rejo, Puskesmas Gunung Lingkas, Puskesmas Juata, Puskesmas Sebengkok, Puskesmas Mamburungan dan Puskesmas Pantai Amal.

e. Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP per Desember 2024 adalah nihil sedangkan TA 2023 senilai Rp46.448.059,84.

f. Saldo Akhir Kas Lainnya TA 2024 senilai Rp1.116.609.664,00 merupakan saldo akhir Dana BOK pada seluruh Puskesmas, sedangkan TA 2023 senilai Rp2.347.320.267,00.

5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

LPE merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berisi tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas Aktivitas Operasional pada tahun pelaporan. LPE Pemerintah Kota Tarakan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dengan angka perbandingan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1. EKUITAS AWAL

31 Desember 2024	31 Desember 2023
6.048.799.155.428,80	**5.686.624.742.831,77**

Jumlah Ekuitas Awal Pemerintah Kota Tarakan yang merupakan Ekuitas Akhir tahun sebelumnya senilai Rp6.048.799.155.428,80 pada TA 2024 dan TA 2023 senilai Rp5.686.624.742.831,77 atau naik senilai Rp362.174.412.597,03 atau 6,37%.

5.6.2. SURPLUS / DEFISIT - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(22.808.215.968,41)	**145.823.183.917,93**

Surplus/Defisit LO menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan pada ekuitas. Berdasarkan LO Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 terdapat defisit

senilai Rp22.808.215.968,41 atau turun senilai Rp168.631.399.886,34 atau 115,64% bila dibandingkan TA 2023 surplus senilai Rp145.823.183.917,93.

5.6.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari koreksi nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Lain-lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.3.1. Koreksi Nilai Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	876.028.143,88

Pada nilai Persediaan TA 2023 terdapat koreksi positif senilai Rp876.028.143,88, sedangkan pada TA 2024 senilai Rp0,00.

5.6.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Selama tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat penilaian kembali Aset Tetap.

5.6.3.3. Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	54.416.111.034,07	215.475.200.535,22

Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas dapat diketahui bahwa terdapat koreksi pada ekuitas TA 2023 senilai Rp215.475.200.535,22 sedangkan TA 2024 terdapat koreksi senilai negatif Rp54.416.111.034,07 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 172 Koreksi Ekuitas Lainnya

No.	Koreksi Akun	Penambah Ekuitas	Pengurang Ekuitas	Saldo 31 Desember 2024
1	Bagian Lancar TGR	0,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)
2	Investasi Non Permanen	11.435.000,00	0,00	11.435.000,00
3	Investasi Permanen	79.396.018.974,05	1.886.905.294,00	77.509.113.680,05
4	Aset Tetap	275.620.000,00	1.502.860.780,00	(1.227.240.780,00)
5	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	39.491.200,00	(39.491.200,00)
6	Aset Tak Berwujud	0,00	80.095.000,00	(80.095.000,00)
7	Aset Lain-Lain	0,00	36.330.879.546,00	(36.330.879.546,00)
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	17.437.626.958,45	13.222.035.179,96	4.215.591.778,49
9	Akumulasi Amortisasi ATB	103.787.609,51	1.683.335,52	102.104.273,99
10	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	10.438.402.056,07	0,00	10.438.402.056,07
11	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	1,00	312.607.947,00	(312.607.946,00)
12	Kewajiban	156.244.710,00	22.715.992,53	133.528.717,47
	Jumlah	**107.819.135.309,08**	**53.403.024.275,01**	**54.416.111.034,07**

Koreksi ekuitas lainnya di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Koreksi kurang catat saldo awal akun Bagian Lancar TGR senilai Rp3.750.000,00 disebabkan terdapat 5 (lima) buah STS angsuran TGR yang belum tercatat atau terlaporkan pada tahun sebelumnya.

b. Terdapat koreksi penambah Ekuitas akibat penurunan pokok dan Penyisihan Dana Bergulir senilai Rp11.435.000,00. Hal ini disebabkan terdapat setoran Dana Bergulir selama tahun 2024 oleh 2 (dua) orang debitur yaitu angsuran pelunasan atas nama Wi senilai Rp11.135.000,00 dan ML senilai total Rp300.000,00.

c. Terdapat koreksi penambah Ekuitas pada akun Investasi Permanen senilai Rp79.396.018.974,05 dampak peningkatan nilai Penyertaan Modal kepada BUMD atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda) berdasarkan laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (*Audited*) dengan rincian sebagai berikut.

   1) Terdapat penyesuaian Ekuitas pada Perumda PDAM Tirta Alam Tarakan karena perubahan metode Penyusutan Aset Tetap dari metode saldo menurun ganda menjadi metode garis lurus (*straight line method*) senilai Rp35.962.763.095,05 dan senilai Rp43.178.587.179,00.

   2) Terdapat penyesuaian saldo Laba/Rugi atau Ekuitas pada Perumda Tarakan Aneka Usaha senilai Rp254.668.700,00.

d. Selain itu terdapat juga pengurang Ekuitas pada akun Investasi Permanen senilai Rp1.886.905.294,00 dampak penyesuaian saldo Laba/Rugi atau Ekuitas pada Perumda Agrobisnis Mandiri.

e. Koreksi tambah atas pencatatan Aset Tetap senilai Rp275.620.000,00 berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp61.120.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta senilai Rp214.500.000,00 atas tambah catat mobil hylux pada Dinas Perikanan.

f. Koreksi kurang atas pencatatan Tanah senilai Rp1.502.860.780,00 diantaranya terdiri dari sebagai berikut.

   1) Koreksi pencatatan atas Aset ganda pada IFK Dinkes senilai Rp350.000.000,00 karena telah tercatat juga pada DPPPAPPKB;

   2) Koreksi atas aset yang telah dihibahkan ke Polres Tarakan pada tahun sebelumnya senilai Rp7.704.000,00;

   3) Koreksi atas nilai tanah pada DPRKPP senilai Rp242.500.000,00;

4) Koreksi kurang atas pencatatan Aset Tetap dikarenakan sudah tercatat pada Aset Tak Berwujud senilai Rp33.286.000,00 dan Rp56.100.000,00 pada DKPP;

5) Koreksi kurang atas Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa tanah jalan masuk sabindo kelurahan juata laut yang telah lunas tahun 2023 yang dimutasikan ke Aset Tetap Tanah senilai Rp320.000.000,00 pada DPRKPP; dan

6) Koreksi Kurang atas lebih catat Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanah Jalan masuk Perumahan PNS kelurahan Juata Permai yang telah lunas tahun 2023 senilai Rp493.270.780,00,00 pada DPRKPP.

g. Koreksi pengurang Ekuitas senilai Rp39.491.200,00 dikarenakan penghapusan Tagihan Penjualan Angsuran atas nama AA, M.Si yang asetnya telah tercatat dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.

a. Koreksi pengurang Ekuitas senilai Rp80.095.000,00 pada akun Aset Tak Berwujud di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Hal tersebut dikarenakan terdapat pencatatan senilai yang sama pada Peralatan dan Mesin SKPD tersebut.

b. Koreksi pencatatan atas Aset Lain-Lain karena telah diserahkan pada periode sebelumnya senilai Rp36.019.873.546,00 dari BPKPAD dan senilai Rp311.006.000,00 dari Sekretariat Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset atau naskah hibah kepada instansi vertikal, RRI, PMI dan Universitas Borneo.

c. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp4.215.591.778,49 terdiri dari koreksi tambah akumulasi penyusutan senilai Rp17.437.626.958,45 dan koreksi kurang senilai Rp13.222.035.179,96 yang berdasarkan klasifikasi jenis Akumulasi Penyusutannya dapat dirinci sebagai berikut.

1) Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin berkurang senilai Rp9.845.758.594,68 dan bertambah senilai Rp1.470.936.851,54.

2) Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berkurang senilai Rp7.588.545.171,77 dan bertambah senilai Rp12.297.105.610,13.

3) Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan berkurang bertambah senilai Rp21.984.808,00.

4) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya bertambah senilai Rp512.664.886,67.

d. Koreksi pencatatan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud senilai Rp102.104.273,99 terdiri sebagai berikut.

   1) Terdapat koreksi tambah catat Akumulasi Amortisasi ATB senilai Rp103.787.609,51 termasuk didalamnya koreksi tambah Akumulasi Amortisasi ATB senilai Rp80.095.000,00 di SKPD DPTK; dan

   2) Selain itu juga terdapat koreksi kurang Akumulasi Amortisasi ATB senilai Rp1.683.335,52 termasuk koreksi senilai Rp933.333,34 pada Diskan dan senilai Rp750.000,01 pada Dispuspan serta sisanya koreksi pembulatan senilai total Rp2,17.

e. Koreksi tambah Ekuitas karena koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain senilai Rp10.438.402.056,07 dikarenakan perbaikan penyusutan atas mutasi Aset Lain-lain dari dan ke Aset Tetap ataupun karena telah dihibahkan atau diserahkan.

f. Koreksi kurang catat atas saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi akibat penambahan Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang perolehannya dari tahun sebelumnya senilai Rp312.607.946,00 terdiri dari senilai Rp84.724.258,00 pada BPKPAD dan Rp227.883.689,00 pada DKUKMP. Selain itu terdapat koreksi kurang senilai Rp1,00 pada Disbudporapar.

g. Koreksi kurang catat akun Kewajiban berupa koreksi saldo awal Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD senilai Rp22.715.992,53 yang terdapat pada RSUKT.

h. Koreksi kurang akun Ekuitas senilai Rp156.244.710,00 berupa koreksi saldo Utang senilai Rp72.080.000,00 hasil konfirmasi utang, koreksi Utang Honorarium senilai Rp84.059.495,00, serta koreksi senilai Rp100.000,00. Semua koreksi tersebut terdapat pada DPUPR serta terdapat koreksi nilai utang berdasarkan selisih pembayaran senilai Rp5.215,00 pada DPRKPP.

5.6.4. Ekuitas Akhir	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	6.080.407.050.494,46	**6.048.799.155.428,80**

Berdasarkan LPE Pemerintah Kota Tarakan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 diketahui Ekuitas Akhir di Neraca adalah senilai Rp6.080.407.050.494,46 atau turun senilai Rp31.607.895.065,66 atau 0,52% bila dibandingkan tahun 2023 senilai Rp6.048.799.155.428,80.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi non keuangan dalam laporan keuangan ini adalah sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan TA 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Tarakan juga telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
2. Pemerintah Kota Tarakan telah menyusun Kebijakan Akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi tersebut telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan praktik akuntansi, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Adapun kebijakan akuntansi tersebut telah disesuaikan juga dengan PSAP baru diantaranya PSAP 16 Aset Konsesi Jasa dan PSAP 17 Properti Investasi yang telah diterapkan sejak Tahun 2022. Pada Kebijakan Akuntansi yang baru tersebut tidak terdapat perubahan estimasi, penilaian, metode yang signifikan terkait aset tetap maupun akun lainnya melainkan penambahan penjelasan dan penyajian kebijakan akuntansi secara sistematis sesuai sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Per 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan. Adapun proses penyusunan laporan keuangan ini telah melalui serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Kota Tarakan.

4. SKPD selaku entitas akuntansi diwajibkan menyusun Laporan Keuangan dan digabungkan oleh BPKPAD Kota Tarakan selaku PPKD menjadi Laporan Keuangan konsolidasian dari 30 Laporan Keuangan SKPD dan 8 Laporan Keuangan BLUD sehingga bisa menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tarakan TA 2024.
5. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui penggunaan Aplikasi Keuangan yang didesain oleh Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Aplikasi tersebut dirancang dengan berbasis *Web* untuk menghasilkan *output* berupa Laporan Keuangan Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Aplikasi tersebut baru pada tahun ini digunakan oleh Pemerintah Kota Tarakan. Selain SIPD, Pemerintah Kota Tarakan juga menggunakan aplikasi eBMD sebagai sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Penyusutannya sehingga membantu dalam penyajian nilai BMD pada Laporan Neraca serta Laporan Barang Milik Daerah.
6. Pemerintah Kota Tarakan juga menggunakan aplikasi khusus untuk pencatatan persediaan sejak tahun 2023 yang bernama simPerIN (Sistem Informasi Persediaan Terintegrasi). Kelebihan aplikasi simPerIN adalah sistem berbasis *web service* dan dimaksudkan untuk memudahkan Bidang Pengelolaan Aset BPKPAD Kota Tarakan selaku Pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta memudahkan Perangkat Daerah dalam menghasilkan Laporan Persediaan. Selain itu juga, aplikasi ini telah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 adalah senilai Rp1.284.583.410.452,21 atau 97,03% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu senilai Rp1.323.855.180.144,00. Pendapatan Daerah yang terealisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp205.269.290.692,21, Pendapatan Transfer senilai Rp1.079.314.119.760,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah nihil. Secara keseluruhan pendapatan mengalami kenaikan senilai Rp122.671.473.284,58 atau 10,56% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yang senilai Rp1.161.911.937.167,63.
2. Belanja Daerah dan Transfer Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 terealisasi senilai Rp1.271.345.838.376,68 atau dengan capaian 93,36% dari anggaran senilai Rp1.361.736.716.779,24. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp963.247.367.161,54, Belanja Modal senilai Rp307.874.591.715,14, Belanja Tak Terduga senilai Rp223.879.500,00, dan Transfer adalah nihil. Secara keseluruhan total belanja dan transfer mengalami kenaikan senilai Rp5.828.340.746,35 atau 0,46% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yang senilai Rp1.265.517.497.630,33.
3. Pada Laporan Realisasi Anggaran diketahui surplus senilai Rp13.237.572.075,53 yang ditambah oleh Pembiayaan Neto senilai Rp37.882.279.835,24. Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun anggaran sebelumnya senilai Rp39.881.536.635,24. Adapun dari sisi Pengeluaran Pembiayaan terdapat Penyertaan Modal Pemerintah senilai Rp1.999.256.800,00 sehingga SILPA menjadi senilai Rp51.119.851.910,77.
4. Berdasarkan Komponen Laporan Keuangan lainnya, diketahui Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir pada LPSAL TA 2024 adalah senilai Rp51.119.851.910,77 berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan. Adapun dari Laporan Operasional diketahui Jumlah Pendapatan-LO senilai Rp1.194.609.828.152,77 dan Beban Operasi senilai Rp1.228.545.895.908,96 serta terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai positif Rp11.127.851.787,78 sehingga diperoleh Defisit-LO senilai Rp22.808.215.968,41.

5. Berdasarkan Laporan Neraca diketahui posisi keuangan Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2024 menunjukkan Total Aset senilai Rp6.241.457.202.119,84. Total Kewajiban senilai Rp161.050.151.625,38 dan Total Ekuitas senilai Rp6.080.407.050.494,46. Adapun Laporan Perubahan Ekuitas diketahui terjadi perubahan nilai Ekuitas yang sangat dipengaruhi Defisit-LO senilai Rp22.808.215.968,41 dan Koreksi Ekuitas senilai Rp54.416.111.034,07.
6. Demi meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tarakan di masa mendatang perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, juga diperlukan sumber daya yang memadai seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan teknologi sistem informasi.
7. Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

WALI KOTA TARAKAN

dr. H. KHAIRUL, M. Kes

DAFTAR NOMOR REKENING BANK DI LINGKUNGAN INSTANSI

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SALDO PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Peruntukan Rekening	Nama Bank	Saldo per 31-12-2024
1	0051300021	Rek Kas Umum Daerah Pemkot TRK	Kas di Kas Daerah	Bankaltimtara	35.908.321.802,10
2	0183-01-000563-30-9	Rekening Penampungan PBB	Kas di Kas Daerah	BRI	-
3	0059000802	Rekening Penampungan PBB	Kas di Kas Daerah	Bankaltimtara	-
4	7805706333	Rekening Penampungan PBB	Kas di Kas Daerah	BCA	5.523.148,00
5	0051403517	PKM Sebengkok (BLUD)	Kas di BLUD	Bankaltimtara	617.389.088,30
6	0051403584	PKM Mamburungan (BLUD)	Kas di BLUD	Bankaltimtara	690.337.573,59
7	0051403576	PKM Juata Permai (BLUD)	Kas di BLUD	Bankaltimtara	773.108.792,42
8	0051403525	PKM Karang Rejo (BLUD)	Kas di BLUD	Bankaltimtara	2.879.597.218,19
9	0051403533	PKM Gn Lingkas (BLUD)	Kas di BLUD	Bankaltimtara	1.186.321.842,50
10	149-00-1156089-5	RSUKT (BLUD)	Kas di BLUD	Bank Mandiri	1.589.374.459,85
11	0051406061	RSUKT (BLUD)	Kas di BLUD	Bankaltimtara	2.645.647.705,22
12	00245-01-30-000105-1	RSUKT (BLUD)	Kas di BLUD	BCA	-
13	18301002049301	RSUKT (BLUD)	Kas di BLUD	BRI	310.949.326,45
14	7805788895	RSUKT (BLUD)	Kas di BLUD	BCA	75.391.274,62
15	1785978513	RSUKT (BLUD)	Kas di BLUD	BNI	814.527,00
16	0051403568	JKN PKM Pantai Amal	Kas Kapitasi JKN	Bankaltimtara	-
17	0051403886	Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
18	0051401913	Badan Peng.Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
19	0051400710	BAPPEDA KOTA TARAKAN	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
20	0051400623	Sekretariat DPRD Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
21	0051402006	Disdukcapil Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
22	0051401503	BKPSDM Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
23	0051401841	Badan Diklat Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
24	0051402014	Badan Kesbang dan Politik	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
25	0051403266	BPBD Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
26	0051402162	DPPPAPPKB	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
27	0051401867	Dinas Kesehatan Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
28	0051401346	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
29	0051403924	Disdagkop-UKM Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
30	0051403134	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
31	0051403843	DPKPAD Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
32	0051401875	DPPKA Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
33	0051403916	DKISP	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
34	0051403347	DISKOMINFO	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
35	0051403959	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
36	0051401735	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
37	0051403932	DISNAPER	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
38	0051401778	Dinas Pariwisata	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
39	0051402022	Dinas Perhubungan Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
40	0051402049	DPU dan Tata Ruang Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
41	0051401786	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
42	0051402031	Dinas Kelautan dan Perikanan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
43	0051403983	RSUD Mantri Raga Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
44	0051403941	Satpol PP dan PMK	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
45	0051401921	Satpol PP dan Linmas Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
46	0051403274	DPMPTSP	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
47	0051401335	Bendahara Rutin Camat Tarakan Timur	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
48	0051401293	Kecamatan Tarakan Barat	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
49	0051401305	Bend.Rutin Kecamatan Tar-Teng	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
50	0051401322	Bend.Kecamatan Tarakan Utara	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
51	0051403860	Dinas Pemuda dan Olahraga	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
52	0051401529	Bendaharawan Rutin Sekretariat	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
53	0051403207	Bendaharawan Rutin Sekretariat	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
54	0051403151	Inspektorat	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
55	0051403878	DPRKPSP Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
56	0051405901	Dinas Perikanan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
57	0051405684	RSU Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
58	0051405480	Kelurahan Pantai Amal	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
59	0051405455	Kelurahan Lingkas Ujung	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
60	0051405552	Kantor Kelurahan KP.1 Skip	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
61	0051405439	Kelurahan Kampung Empat	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
62	0051405625	Kel. Karang Balik	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
63	0051405501	Kelurahan Juata Permai	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
64	0051405536	Kelurahan Gunung Lingkas	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
65	0051405579	Kelurahan Karang Rejo	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
66	0051405609	Kelurahan Karang Anyar	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
67	0051405595	Kelurahan Karang Harapan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
68	0051405471	Kelurahan Mamburungan Timur	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-

DAFTAR NOMOR REKENING BANK DI LINGKUNGAN INSTANSI

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SALDO PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Peruntukan Rekening	Nama Bank	Saldo per 31-12-2024
69	0051405617	Kelurahan Sebengkok	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
70	0051405510	Kelurahan Mamburungan	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
71	0051405528	Kelurahan Juata Laut	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
72	0051401107	Kelurahan Kr Anyar Pantai	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
73	0051405447	Kelurahan Selumit Pantai	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
74	0051405587	Kelurahan Selumit	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
75	0051405544	Kelurahan Juata Kerikil	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
76	0051405561	Kelurahan Pamusian	Bendahara Pengeluaran	Bankaltimtara	-
77	0051403444	SDN UTAMA 1	BOP	Bankaltimtara	-
78	0051405650	SDN UTAMA 1	BANTAH	Bankaltimtara	-
79	0051404025	SDN UTAMA 2	BOP	Bankaltimtara	-
80	1161400196	SDN UTAMA 2	Operasional	Bankaltimtara	-
81	0051403762	SDN 001	BOP	Bankaltimtara	-
82	0051404050	SDN 001	Operasional	Bankaltimtara	-
83	0051404441	SDN 002	BOP	Beasiswa	-
84	0051404149	SDN 003	Operasional	Bankaltimtara	-
85	0051403827	SDN 004	BOP	Bankaltimtara	-
86	0051404106	SDN 004	Operasional	Bankaltimtara	-
87	1201400160	SDN 005	BOP	Bankaltimtara	-
88	0051404980	SDN 006	BOP	Bankaltimtara	-
89	0051404998	SDN 006	Operasional	Bankaltimtara	-
90	0051403657	SDN 007	BOP	Bankaltimtara	-
91	0051404921	SDN 007	Operasional	Bankaltimtara	-
92	0051402197	SDN 008	BOP	Bankaltimtara	-
93	0051404475	SDN 009	BOP	Bankaltimtara	-
94	0051404475	SDN 009	Operasional	Bankaltimtara	-
95	0051404246	SDN 010	Operasional	Bankaltimtara	-
96	0051404254	SDN 010	BOP	Beasiswa	-
97	0051404491	SDN 011	BOP	beasiswa	-
98	0051404076	SDN 012	Operasional	Bankaltimtara	-
99	0051403851	SDN 012	BOP	Bankaltimtara	-
100	1161400005	SDN 013	Operasional	Bankaltimtara	-
101	0051403436	SDN 014	Operasional	Bankaltimtara	-
102	1161400234	SDN 015	BOP	Bankaltimtara	2,00
103	0051404947	SDN 016	Operasional	Bankaltimtara	-
104	0051403835	SDN 017	BOP	Bankaltimtara	-
105	0051404131	SDN 017	Operasional	Bankaltimtara	-
106	0051404513	SDN 018	BOP	Bankaltimtara	-
107	0051404220	SDN 019	BOP	beasiswa	-
108	0051405862	SDN 019 TARAKAN	DAK	Bankaltimtara	-
109	0051403819	SDN 020	BOP	Bankaltimtara	-
110	0051404530	SDN 020	Operasional	Bankaltimtara	-
111	1161400145	SDN 021	BOP	Bankaltimtara	-
112	0051403401	SDN 023	BOP	Bankaltimtara	-
113	0051404271	SDN 023	Operasional	Bankaltimtara	-
114	0051404394	SDN 024	BOP	Bankaltimtara	-
115	0051403771	SDN 026	BOP	Bankaltimtara	-
116	0051404343	SDN 026	Operasional	Bankaltimtara	-
117	0051404858	SDN 027	BOP	Bankaltimtara	-
118	0051405242	SDN 027	DAK	Bankaltimtara	-
119	0051404459	SDN 028	BOP	Bankaltimtara	-
120	0051404416	SDN 029	BOP	Bankaltimtara	-
121	0051404424	SDN 029	Operasional	Bankaltimtara	-
122	1161400170	SDN 030	Operasional	Bankaltimtara	-
123	0051403738	SDN 030	BOP	Bankaltimtara	-
124	0051404823	SDN 031	BOP	Bankaltimtara	-
125	0051405269	SDN 031	DAK	Bankaltimtara	-
126	0051404874	SDN 032	BOP	Bankaltimtara	-
127	0051404866	SDN 032	Operasional	Bankaltimtara	-
128	1221400069	SDN 033	Operasional	Bankaltimtara	-
129	1221400051	SDN 033	BOP	Bankaltimtara	-
130	0051404351	SDN 034	BOP	Bankaltimtara	-
131	0051404360	SDN 034	Operasional	Bankaltimtara	-
132	0051405251	SDN 034	DAK	Bankaltimtara	-
133	1161400056	SDN 035	BOP	Bankaltimtara	-
134	1161400277	SDN 036	BOP	Bankaltimtara	-
135	1161400242	SDN 037	BOP	Bankaltimtara	-
136	0051403789	SDN 041	BOP	Bankaltimtara	-

DAFTAR NOMOR REKENING BANK DI LINGKUNGAN INSTANSI

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SALDO PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Peruntukan Rekening	Nama Bank	Saldo per 31-12-2024
137	0051404301	SDN 041	Operasional	Bankaltimtara	-
138	1221400115	SDN 042	BOP	Bankaltimtara	-
139	0051404386	SDN 043	Operasional	Bankaltimtara	-
140	0051403665	SDN 045	BOP	Bankaltimtara	-
141	0051404955	SDN 045	Operasional	Bankaltimtara	-
142	1161400099	SDN 047	BOP	Bankaltimtara	-
143	0051405005	SDN 047	Operasional	Bankaltimtara	-
144	1221400191	SDN 048	BOP	Bankaltimtara	-
145	1221400174	SDN 049	BOP	Bankaltimtara	-
146	1221400131	SDN 050	BOP	Bankaltimtara	-
147	1221400085	SDN 051	BOP	Bankaltimtara	-
148	0051405153	SDN 052	BOP	Bankaltimtara	-
149	0051405161	SDN 052	Operasional	Bankaltimtara	-
150	0051405871	SDN 052 TARAKAN	DAK	Bankaltimtara	-
151	0051404335	SMPN 1	BOP	Bankaltimtara	-
152	0061404297	SMPN 2	BOP	Bankaltimtara	-
153	0051403304	SMPN 2	Operasional	Bankaltimtara	-
154	0051403720	SMPN 3	BOP	Bankaltimtara	-
155	0051404882	SMPN 3	Operasional	Bankaltimtara	-
156	0051402073	SMPN 4	BOP	Bankaltimtara	-
157	1161400111	SMPN 5	BOP	Bankaltimtara	-
158	1221400158	SMPN 6	BOP	Bankaltimtara	-
159	0051401883	SMPN 7	BOP	Bankaltimtara	-
160	0051404009	SMPN 8	BOP	Bankaltimtara	-
161	0051404114	SMPN 8	Operasional	Bankaltimtara	-
162	0051404157	SMPN 9	BOP	Bankaltimtara	-
163	0051404173	SMPN 9	Operasional	Bankaltimtara	-
164	0051405030	SMPN 10	BOP	Bankaltimtara	-
165	0051405048	SMPN 10	Operasional	Bankaltimtara	-
166	1161400129	SMPN 11	BOP	Bankaltimtara	-
167	1161400293	SMPN 11	Operasional	Bankaltimtara	-
168	0051405218	SMPN 11	DAK	Bankaltimtara	-
169	0051403797	SMPN 12	BOP	Bankaltimtara	-
170	0051404033	SMPN 12 TARAKAN	P2S	Bankaltimtara	-
171	0051405773	SMPN 13	Operasional	Bankaltimtara	-
172	0051405765	SMPN 14	Operasional	Bankaltimtara	-
173	0051403509	SDN Utama 1	BOSNAS	Bankaltimtara	74.656.174,00
174	0051403398	SDN Utama 2	BOSNAS	Bankaltimtara	38.484.865,00
175	0051403975	SDN 001	BOSNAS	Bankaltimtara	5.115.399,08
176	0051404432	SDN 002	BOSNAS	Bankaltimtara	50.426.370,50
177	0051403355	SDN 003	BOSNAS	Bankaltimtara	17.904.525,00
178	0051403967	SDN 004	BOSNAS	Bankaltimtara	42.309.888,50
179	1201400178	SDN 005	BOSNAS	Bankaltimtara	25.282.400,35
180	1161400161	SDN 006	BOSNAS	Bankaltimtara	3.906.557,13
181	0051404912	SDN 007	BOSNAS	Bankaltimtara	5.051.330,85
182	0051404521	SDN 008	BOSNAS	Bankaltimtara	47.592.900,45
183	0051404483	SDN 009	BOSNAS	Bankaltimtara	63.063.549,51
184	0051403363	SDN 010	BOSNAS	Bankaltimtara	43.616.450,00
185	0051404664	SDN 011	BOSNAS	Bankaltimtara	8.869.419,68
186	0051404084	SDN 012	BOSNAS	Bankaltimtara	14.466.357,26
187	0051404963	SDN 013	BOSNAS	Bankaltimtara	9.122.334,04
188	0051404181	SDN 014	BOSNAS	Bankaltimtara	23.655.500,59
189	1161400226	SDN 015	BOSNAS	Bankaltimtara	45.803.769,45
190	0051404939	SDN 016	BOSNAS	Bankaltimtara	15.849.900,19
191	0051403410	SDN 017	BOSNAS	Bankaltimtara	23.567.130,00
192	0051404505	SDN 018	BOSNAS	Bankaltimtara	27.033.090,28
193	0051404238	SDN 019	BOSNAS	Bankaltimtara	20.685.935,87
194	0051404572	SDN 020	BOSNAS	Bankaltimtara	32.849.427,20
195	1161400218	SDN 021	BOSNAS	Bankaltimtara	149.075.200,83
196	0051403401	SDN 023	BOSNAS	Bankaltimtara	38.289.792,00
197	0051404408	SDN 024	BOSNAS	Bankaltimtara	6.201.300,96
198	0051404327	SDN 026	BOSNAS	Bankaltimtara	12.941.489,36
199	0051404840	SDN 027	BOSNAS	Bankaltimtara	8.114.300,42
200	0051404467	SDN 028	BOSNAS	Bankaltimtara	21.339.807,26
201	0051403371	SDN 029	BOSNAS	Bankaltimtara	9.574.826,00
202	1161400188	SDN 030	BOSNAS	Bankaltimtara	17.415.069,03
203	0051404831	SDN 031	BOSNAS	Bankaltimtara	4.046.680,04
204	1161400081	SDN 032	BOSNAS	Bankaltimtara	805.800,18

DAFTAR NOMOR REKENING BANK DI LINGKUNGAN INSTANSI

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SALDO PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Peruntukan Rekening	Nama Bank	Saldo per 31-12-2024
205	1221400077	SDN 033	BOSNAS	Bankaltimtara	25.742.865,86
206	0051403380	SDN 034	BOSNAS	Bankaltimtara	25.980.722,00
207	1161400285	SDN 035	BOSNAS	Bankaltimtara	27.224.575,92
208	1161400269	SDN 036	BOSNAS	Bankaltimtara	36.884.536,53
209	1161400251	SDN 037	BOSNAS	Bankaltimtara	20.123.783,47
210	0051404319	SDN 041	BOSNAS	Bankaltimtara	83.359.448,58
211	0051400107	SDN 042	BOSNAS	Bankaltimtara	3.232.226,00
212	0051404378	SDN 043	BOSNAS	Bankaltimtara	13.037.474,69
213	1161400072	SDN 045	BOSNAS	Bankaltimtara	4.273.725,49
214	0051405013	SDN 047	BOSNAS	Bankaltimtara	14.544.185,26
215	0051400182	SDN 048	BOSNAS	Bankaltimtara	30.290.725,05
216	1221400166	SDN 049	BOSNAS	Bankaltimtara	30.420.690,77
217	1221400123	SDN 050	BOSNAS	Bankaltimtara	23.709.630,70
218	1221400093	SDN 051	BOSNAS	Bankaltimtara	701.650,82
219	'0051405170	SDN 052	BOSNAS	Bankaltimtara	41.634.350,00
220	0051404068	SMPN 1	BOSNAS	Bankaltimtara	76.244.092,00
221	0051404289	SMPN 2	BOSNAS	Bankaltimtara	178.213.468,49
222	0051404904	SMPN 3	BOSNAS	Bankaltimtara	32.391.484,64
223	0051404556	SMPN 4	BOSNAS	Bankaltimtara	144.678.770,62
224	1161400153	SMPN 5	BOSNAS	Bankaltimtara	28.349.471,09
225	1221400140	SMPN 6	BOSNAS	Bankaltimtara	206.897.996,88
226	0051404122	SMPN 7	BOSNAS	Bankaltimtara	16.114.066,09
227	0051404041	SMPN 8	BOSNAS	Bankaltimtara	65.303.532,58
228	0051404165	SMPN 9	BOSNAS	Bankaltimtara	126.662.400,16
229	0051405021	SMPN 10	BOSNAS	Bankaltimtara	95.976.999,99
230	1161400137	SMPN 11	BOSNAS	Bankaltimtara	52.531.356,73
231	0051403801	SMPN 12	BOSNAS	Bankaltimtara	42.853.496,00
232	0051405714	SMPN 13	BOSNAS	Bankaltimtara	11.984.615,00
233	0051405722	SMPN 14	BOSNAS	Bankaltimtara	35.809.209,00
234	1202030501	SDIT Ulul Albab	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
235	1162040720	SDIT Muslimat 1	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
236	1202069106	SD Al Mustaqim	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
237	1162060488	SDIT Ibnu Abbas	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
238	1162041394	SD Muhammadiyah 1	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
239	0052384583	SD Muhammadiyah 2	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
240	1162041441	SD Al Irsyad	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
241	1162041432	SD Nurul Islam	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
242	0052413681	SD Muhammadiyah 3 Al Hilal	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
243	1162075183	SD Integral Arrabbani	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
244	0052381762	SD Patra Dharma	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
245	1162041238	SD Yaditra	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
246	1162041301	SD Citra Bangsa	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
247	1222037901	SDK ST Fransiskus Xaverius	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
248	1162040878	SDK Tunas Kasih	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
249	1162042111	SD Frater Don Bosco	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
250	1162040894	SD Indo Tionghoa	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
251	0052230969	SMP MUH 1	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
252	1162030066	SMP MUH 2	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
253	1162075574	SMP TAHFIZ QURAN	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
254	0052501946	SMP IT ULUL ALBAB	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
255	0052417546	SMP MBS	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
256	0052447402	SMP BUDI UTOMO	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
257	0052480868	INDO	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
258	1162040711	TUNAS KASIH	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
259	1162075604	IBNU ABBAS	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
260	1202004071	SMP KUMI	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
261	0052306973	SMP FR DON BOSCO	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
262	1222070488	SMP XAVERIUS	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
263	1162075515	SMP CITRA BANGSA	BOSSWASTA	Bankaltimtara	-
264	1161400358	P9959689 UPT SATUAN PNF SKB	KESETARAAN	Bankaltimtara	3.085.420,00
265	0051550692	P9934437 PKBM INSAN CITA	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
266	0052253276	P2970229 PKBM MELATI II	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
267	0052251567	P2970249 PKBM BINALATUNG	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
268	1162039730	P9945653 PKBM AMANAH	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
269	0052271339	P2970247 PKBM CAHAYA BENGAWAN	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
270	0052430259	P2970252 PKBM CORDOVA CENDIKIA	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
271	0052497132	P9996879 PKBM WIYATA ILMU	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
272	1222779088	P2970112 PKBM MELATI I	KESETARAAN	Bankaltimtara	-

DAFTAR NOMOR REKENING BANK DI LINGKUNGAN INSTANSI

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SALDO PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Peruntukan Rekening	Nama Bank	Saldo per 31-12-2024
273	0052205093	P9908647 PKBM BINA ANAK INDONESIA	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
274	1202017203	P2970248 PKBM DAYA TAKA	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
275	1202052467	P9908196 PKBM BINA ANAK BANGSA	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
276	0052314003	P2970251 PKBM AL- MARHAMAH	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
277	0052207053	P9945646 PKBM AL- MUJADDID	KESETARAAN	Bankaltimtara	-
278	1161400358	UPT SKB	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
279	0051404971	TK PANTAI AMAL	BOP PAUD	Bankaltimtara	20,00
280	0051404211	TK NEGERI PEMBINA 1	BOP PAUD	Bankaltimtara	50,00
281	0051404092	TK NEGERI PEMBINA 2	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
282	0051404190	TK NEGERI PEMBINA 3	BOP PAUD	Bankaltimtara	81,00
283	0052231493	TK KEMALA BHAYANGKARI 01	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
284	0052231213	TK ABA I	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
285	0052231094	TK AL-IRSYAD	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
286	0052478821	TK CITRA BANGSA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
287	0052425492	TK INDO TiONGHOA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
288	0052292476	TK PRIMAMULYA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
289	0052252032	TK CAHYA SURYA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
290	0052381916	TK. KARYA PERTIWI	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
291	0052230578	TK KRISTEN TUNAS KASIH	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
292	0052356741	TK MANSURIN	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
293	0052360480	TK HIZBULLAH YANAZIRA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
294	0052400651	TK PELITA KRISTEN JUATA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
295	0052420920	TK.CINTA AYAH BUNDA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
296	0052452724	TK.KASIH IBU	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
297	0052483212	TKIT AR-ROYYAN	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
298	0052499143	TK AL - AMIN	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
299	0052498651	TKIT INSAN LUHUR	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
300	1202120861	TK ALAM GREENARIS	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
301	1162204927	TK ANAK TERANG	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
302	1162019852	TK HANG TUAH	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
303	0052233364	TK IMMANUEL	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
304	0052231132	TK FRATER DON BOSCO	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
305	1202012333	TK KUNCUP MEKAR	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
306	0052230926	TK ABA II	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
307	0052233364	TK BUDI UTOMO	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
308	1162022985	TK CITRA BINA ISLAMY	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
309	1202073308	TK CARSA KIDS	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
310	0052359376	TK NUR AMALIA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
311	1162020249	TK ISLAM TERPADU ULUL ALBAB	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
312	0052358841	TKIT AL MUSTAQIM 2	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
313	1162068501	TK ANNISA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
314	1202120594	TK SI JEMPOL	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
315	1202122112	TK PAMBUDI MULYA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
316	0052206138	TK IT AL MUSTAKIM	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
317	1162019909	TK IT MUSLIMAT I	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
318	1162066125	TK AL ISTIQLAL	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
319	1162034266	TK BAITURROHIM	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
320	1162061239	TK. NUR IFTITAH	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
321	0052358621	TK ISLAM TERPADU IBNU ABBAS	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
322	1162054992	TK ADINDA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
323	0052413231	TKIT IBNU ABBAS 2	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
324	1162058025	TK ABA 3	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
325	0052520291	TK EKKLESIA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
326	0052232384	TK INTRACA PUTRA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
327	0052231523	TK KARTIKA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
328	0052323371	TK NURUL FALAH	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
329	1222009002	TK TUNAS HARAPAN	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
330	0052231582	TK TUNAS RIMBA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
331	0052248221	TK K FRANSISKUS XAVERIUS	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
332	1222046374	TKIT AL BINA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
333	0052491096	TK CAHAYA BENGAWAN	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
334	1222052447	TK BUDI LUHUR	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
335	1222061772	TK KRISTEN FILADELFIA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
336	1162029963	KB AMANAH	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
337	1162025763	KB HARAPAN BUNDA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
338	0052474809	KB FAJAR MENTARI	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
339	1162060275	KB AL MARHAMAH	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
340	1162024821	KB BINTANG TARAKANITA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-

DAFTAR NOMOR REKENING BANK DI LINGKUNGAN INSTANSI

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SALDO PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Peruntukan Rekening	Nama Bank	Saldo per 31-12-2024
341	0052224977	KB GENIUS	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
342	0052207924	KB MUSLIMAT	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
343	1162068284	KB MENTARI	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
344	1162018589	KB.AZ ZAHRA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
345	0052491118	KB.LENTERA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
346	0052451850	KB.AZ ZIKRI	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
347	0052175241	KB AL MUSTAQIM	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
348	0052248019	KB.INSAN CITA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
349	0052245168	KB. BUSAK SILOW	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
350	1162050539	KB PERMATA BUNDA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
351	0052305624	KB MUTIARA HATI	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
352	0052247993	KB SHANDY PUTRA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
353	0052173931	KB RAINBOW	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
354	1162026361	KB.BINA ANAPRASA ACI	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
355	1202075351	KB TUNAS BANGSA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
356	1202120608	KB SI JEMPOL	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
357	0052449766	KB. HARAPAN KASIH	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
358	0052454590	KB.HANG TUAH	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
359	1162088919	KB CAHAYA PELITA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
360	0052305381	KB ADITYAWARMAN	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
361	1202073294	KB CARSA KIDS	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
362	0052245664	KB. JUNJUNG BUIH	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
363	0052268915	KB KRISTEN TUNAS KASIH	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
364	0052248108	KB INDO TIONGHOA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
365	0052451302	KB CAHAYA FIRDAUS	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
366	0052256356	KB JASMINE	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
367	0052358191	KB YASINTA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
368	0052230900	KB. TUNAS CENDIKIA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
369	1162204412	KB KASIH BUNDA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
370	0052478324	KB ANGKASA MERPATI	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
371	1202127025	KB CINTA AYAH BUNDA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
372	1222778928	KB BALITA INOVATIF	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
373	0052414091	KB CAHAYA BENGAWAN	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
374	1222019016	PLAY GROUP BINAMUSTIKA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
375	1222055993	KB BINTANG HARAPAN	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
376	1222064372	KB BINA INSAN	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
377	0052338131	TPA ADITYAWARMAN	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
378	0052446171	TPA Cahaya Cinta Sasikirana	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
379	0052248078	TPA MIZAN TAMIMI	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
380	0052202825	TPA KASIH IBU	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
381	1222025687	TPA BINA CERIA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
382	1162076481	SPS. TARUMANEGARA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
383	0052477514	SPS MERAK	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
384	0052481937	SPS IMBAYA	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
385	0052411696	SPS SERUNI 2	BOP PAUD	Bankaltimtara	-
386	1590098775	PKM Sebengkok	BOK	BNI	146.871.364,00
387	1590098742	PKM Mamburungan	BOK	BNI	159.183.077,00
388	1590098731	PKM Pantai Amal	BOK	BNI	116.128.037,00
389	1590098786	PKM Juata Permai	BOK	BNI	338.512.324,00
390	1590098753	PKM Karang Rejo	BOK	BNI	174.712.175,00
391	1590098764	PKM Gn Lingkas	BOK	BNI	181.202.687,00
392	0051403614	UPTD Rusunawa DPKPP TRK	Dana Jaminan Penghuni Rusunawa	Bankaltimtara	384.225.000,00
393	0051405633	DLH/Dana Jaminan LH	Dana Jaminan Lingkungan Hidup	Bankaltimtara	6.500.000,00
394	0051401441	Proy.Pengemb.Ekt/Disperindagkop	DBEK	Bankaltim	3.077.613.647,31

Lampiran 2

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

JENIS PIUTANG	ASAL TAHUN PENETAPAN PAJAK										SALDO AKHIR
	1995-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31 DES 2024
Pajak Hotel	104.637.325,00	-	18.125.590,00	-		-	-	-	-	-	**122.762.915,00**
Pajak Restoran	243.300.000,00	-	554.037.691,17	-		83.700.593,00	-	23.151.596,55	107.436.608,16	439.349.679,00	**1.450.976.167,88**
Pajak Hiburan	109.018.750,00	-	-	-		-	-	-	-	30.000.000,00	**139.018.750,00**
Pajak Reklame	1.126.799.106,56	37.340.037,50	12.569.225,00	109.915.434,00	107.108.145,00	20.038.500,00	5.940.000,00	1.806.750,00	9.033.750,00	393.382.072,12	**1.823.933.020,18**
Pajak Galian C	66.393.050,00	-	-	-		-	-	-	-	-	**66.393.050,00**
Pajak PJU	300.000,00	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	**300.003,00**
Pajak Air Bawah Tanah	33.935.997,32	4.021.207,13	-	35.476.225,52	8.691.900,16	12.523.510,00	8.826.370,00	1.424.078,00	457.040,00	18.920.851,60	**124.277.179,73**
Pajak Parkir	5.278.000,00	-	-	-		-	-	-	-	-	**5.278.000,00**
Pajak Bumi dan Bangunan	26.880.284.087,00	1.625.718.700,00	3.205.835.280,00	3.377.082.776,00	2.710.074.192,00	3.059.158.451,00	2.678.538.093,00	4.533.500.403,00	5.239.741.079,00	6.422.656.568,00	**59.732.589.629,00**
Jumlah Piutang Pajak	**28.569.946.315,87**	**1.667.079.944,63**	**3.790.567.786,17**	**3.522.474.435,52**	**2.825.874.237,16**	**3.175.421.054,00**	**2.693.304.466,00**	**4.559.882.827,55**	**5.356.668.477,16**	**7.304.309.170,72**	**63.465.528.714,79**
Penyisihan	21,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	50,0%	50,0%	10,0%	0,5%	
Jumlah Penyisihan	28.569.946.315,87	1.667.079.944,63	3.790.567.786,17	3.522.474.435,52	2.825.874.237,16	1.587.710.527,00	1.346.652.233,00	2.279.941.413,78	535.666.847,72	36.521.545,85	**46.162.435.286,70**
Jumlah Piutang Pajak Netto	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.587.710.527,00**	**1.346.652.233,00**	**2.279.941.413,78**	**4.821.001.629,44**	**7.267.787.624,87**	**17.303.093.428,09**

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Jenis Piutang Retribusi	Objek Pendapatan	Tahun Piutang	Piutang Retribusi			Total Piutang per 31 Desember 2024	Penyisihan Piutang				Total Penyisihan	Piutang Bersih per 31 Desember 2024
					Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan / Penghapusan 2024		Lancar < 1 bulan (0,5%)	Kurang Lancar > 1 bulan (10%)	Diragukan > 3 bulan (50%)	Macet > 12 bulan (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6+7-8)	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=9-14
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rumah Susun dan Rumah Khusus	2024	-	128.700.000,00	-	**128.700.000,00**	252.750,00	5.580.000,00	11.175.000,00	-	**17.007.750,00**	**111.692.250,00**
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Food Court dan Kedai Makanan serta Sewa Lahan	2024	-	34.125.000,00	-	**34.125.000,00**	76.250,00	865.000,00	5.112.500,00	-	**6.053.750,00**	**28.071.250,00**
3	Dinas Perhubungan	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Parkir Inap Taman Berlabuh	2024	-	5.917.120,00	-	**5.917.120,00**	29.585,60	-	-	-	**29.585,60**	**5.887.534,40**
4	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Jasa Sandar Kapal	2024	-	13.207.330,00	-	**13.207.330,00**	66.036,65	-	-	-	**66.036,65**	**13.141.293,35**
5	Dinas Perhubungan	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Halte Maxim	2024	-	4.200.000,00	-	**4.200.000,00**	3.500,00	140.000,00	1.050.000,00	-	**1.193.500,00**	**3.006.500,00**
6	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Terminal	2024	-	6.000.000,00	-	**6.000.000,00**	7.500,00	300.000,00	750.000,00	-	**1.057.500,00**	**4.942.500,00**
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Tempat Usaha dan Ruko	2024	-	355.044.443,00	-	**355.044.443,00**	1.775.222,22	-	-	-	**1.775.222,22**	**353.269.220,79**
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Retribusi Penyewaan Bangunan	Rumah Dinas	2024	-	87.750,00	-	**87.750,00**	101,25	-	33.750,00	-	**33.851,25**	**53.898,75**
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rumah Dinas	2024	-	1.377.000,00	-	**1.377.000,00**	5.197,50	13.500,00	101.250,00	-	**119.947,50**	**1.257.052,50**
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Klinik Kesehatan Hewan	2024	-	215.000,00	-	**215.000,00**	1.075,00	-	-	-	**1.075,00**	**213.925,00**
11	Dinas Pendidikan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Sewa Kantin dan Rumah Dinas	2024	-	6.947.910,00	-	**6.947.910,00**	6.786,45	108.324,00	2.253.690,00	-	**2.368.800,45**	**4.579.109,55**
12	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Pelayanan Kebersihan	2024	-	14.122.000,00	-	**14.122.000,00**	51.090,00	201.600,00	724.000,00	-	**976.690,00**	**13.145.310,00**
13	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Penyedotan Kakus	2024	-	8.800.000,00	-	**8.800.000,00**	14.000,00	600.000,00		-	**614.000,00**	**8.186.000,00**
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Retribusi Menara	2021-2023	196.145.860,00	-	26.021.160,00	**170.124.700,00**	-	-	-	170.124.700,00	**170.124.700,00**	-
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Retribusi Izin Gangguan	HO	2007-2016	814.524.443,00	-		**814.524.443,00**	-	-	-	814.524.443,00	**814.524.443,00**	-
16	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Sewa Ruko dan Rumah Dinas dan Lainnya	2016-2017, 2022-2024	396.409.200,00	268.732.010,00	110.968.200,00	**554.173.010,00**	1.261.289,35	-	-	264.101.140,00	**265.362.429,35**	**288.810.580,65**
Jumlah					**1.407.079.503,00**	**847.475.563,00**	**136.989.360,00**	**2.117.565.706,00**	**3.550.384,02**	**7.808.424,00**	**21.200.190,00**	**1.248.750.283,00**	**1.281.309.281,02**	**836.256.424,99**

DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Piutang Lain-Lain	Saldo Akhir Piutang (per 31 Desember 2023)	Koreksi Saldo Awal Piutang	Saldo Awal (per 31 Desember 2023) setelah koreksian	Penambahan per 31 Desember 2024	Pengurangan per 31 Desember 2024	Total Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5+6-7
1	Rumah Sakit Kota Tarakan	4.554.499.170	-	4.554.499.170	-	712.170.299	3.842.328.871
2	Puskesmas Sebengkok	31.055.000	-	31.055.000	16.305.000	31.055.000	16.305.000
3	Puskesmas Juata	13.049.200	-	13.049.200	11.537.100	13.049.200	11.537.100
4	Puskesmas Mamburungan	4.894.200	-	4.894.200	10.582.100	4.894.200	10.582.100
5	Puskesmas Gunung Lingkas	9.919.200	-	9.919.200	6.392.100	9.919.200	6.392.100
6	Puskesmas Karang Rejo	27.072.100	-	27.072.100	33.747.100	27.072.100	33.747.100
7	Puskesmas Pantai Amal	-	-	-	6.547.100	-	6.547.100
Jumlah		**4.640.488.870**	**-**	**4.640.488.870**	**85.110.500**	**798.159.999**	**3.927.439.371**

No.	Jenis Piutang RSUD Wangaya	Saldo Akhir Sebelum Penyisihan (31 Desember 2024)	Kualitas Piutang (Berdasarkan Umur Piutang)				Jumlah Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Jumlah Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Jumlah Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Jumlah Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)
			Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Macet (Rp)	Macet (Rp)		
			S.d. 1 Tahun	diatas 1 s.d. 2 Tahun	diatas 2 s.d. 3 Tahun	diatas 3 s.d. 4 Tahun	diatas 4 s.d. 5 Tahun	diatas 5 Tahun		
			0,0%	25%	35%	50%	75%	100%		
1	Rumah Sakit Kota Tarakan	3.842.328.871,00	-	17.621.819,75	17.666.791,10	19.575.840,50	-	-	54.864.451,35	3.787.464.419,65
2	Puskesmas Sebengkok	16.305.000,00	-	-	-	-	-	-	-	16.305.000,00
3	Puskesmas Juata	11.537.100,00	-	-	-	-	-	-	-	11.537.100,00
4	Puskesmas Mamburungan	10.582.100,00	-	-	-	-	-	-	-	10.582.100,00
5	Puskesmas Gunung Lingkas	6.392.100,00	-	-	-	-	-	-	-	6.392.100,00
6	Puskesmas Karang Rejo	33.747.100,00	-	-	-	-	-	-	-	33.747.100,00
7	Puskesmas Pantai Amal	6.547.100,00	-	-	-	-	-	-	-	6.547.100,00
Jumlah		**3.927.439.371,00**	**-**	**17.621.819,75**	**17.666.791,10**	**19.575.840,50**	**-**	**-**	**54.864.451,35**	**3.872.574.919,65**

DAFTAR PIUTANG TRANSFER
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

A. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

(Dalam Rupiah)

KMK NOMOR 44/KM.7/2024 TENTANG PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL DAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2024				
No.	**Uraian**	**Kurang Bayar s.d. 2023**	**Penyelesaian**	**Piutang**
1	DBH PPh Pasal 21 TA sd 2023	1.302.629.000,00	305.990.000,00	996.639.000,00
2	DBH PBB - SEKTOR PERTAMBANGAN (MINYAK DAN GAS BUMI) TA sd 2023	20.789.439.000,00	4.883.483.000,00	15.905.956.000,00
3	DBH PBB - Non Migas TA sd 2023	7.058.599.000,00	1.658.080.000,00	5.400.519.000,00
4	DBH PBB - Bagian Daerah Perhutanan TA sd 2023	95.692.000,00	22.478.000,00	73.214.000,00
5	DBH PBB - Bagian Daerah Perkebunan TA sd 2023	483.458.000,00	113.565.000,00	369.893.000,00
6	DBH PBB - SEKTOR LAINNYA TA sd 2023	73.344.000,00	17.229.000,00	56.115.000,00
7	DBH SDA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI - MINYAK BUMI TA sd 2023	1.000,00	1.000,00	-
8	DBH SDA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI - GAS BUMI TA sd 2023	1.213.903.000,00	285.148.000,00	928.755.000,00
9	DBH SDA MINERBA - ROYALTI TA sd 2023	35.636.107.000,00	8.370.996.000,00	27.265.111.000,00
11	DBH SDA KEHUTANAN - PSDH TA sd 2023	366.926.000,00	86.192.000,00	280.734.000,00
Jumlah		**67.020.098.000,00**	**15.743.162.000,00**	**51.276.936.000,00**

B. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

(Dalam Rupiah)

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.396/2024 dan NOMOR 100.3.3.1/128/2025 TENTANG PENETAPAN DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023 - 2024				
No.	**Uraian**	**Kurang Bayar s.d. 2023**	**Penyelesaian**	**Piutang**
1	Pajak Kendaraan Bermotor	15.087.242.472,00	6.987.843.898,00	8.099.398.574,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.386.157.993,00	7.026.960.743,00	6.359.197.250,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	78.780.043.395,00	44.435.780.693,00	34.344.262.702,00
4	Pajak Air Permukaan	374.657.536,00	196.969.989,00	177.687.547,00
5	Pajak Rokok	12.587.482.825,00	12.587.482.825,00	-
Jumlah		**120.215.584.221,00**	**71.235.038.148,00**	**48.980.546.073,00**

	Total	**187.235.682.221,00**	**86.978.200.148,00**	**100.257.482.073,00**

DAFTAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Penanggungjawab	Runeg ID	Jenis Kasus/Tahun Kejadian	Nomor SKTJM	Nilai SKTJM	Saldo Tahun 2023	Angsuran 2024	Nomor dan Tanggal	Saldo Tahun 2024
1	**Drs. Amran, M.Si. (BBM)**	**20221439**	**TGR/2016**	**700/SKTJM-19/2022**	**10.199.500,00**	**3.199.500,00**	**3.199.500,00**		**-**
	10.199.500,00	(1138468)		7 November 2022			500.000,00	001/DLH/2024, 9 Jan 2024	
	SKL No.900/1246/BPKPAD			21 bulan cicilan			500.000,00	004/STS/DLH/2024, 6 Feb 2024	
	Tgl. 19 Juni 2024						500.000,00	008/STS/DLH/2024, 19 Mar 2024	
							500.000,00	009/STS/DLH/2024. 3 Apr 2024	
							500.000,00	012/STS/DLH/2024, 7 Mei 2024	
							699.500,00	013/STS/DLH/2024, 6 Jun 2024	
2	**Gurniansyah, SE.**	**30221983**	**TGR/2009**	**700/SKTJM-18/20222**	**350.000,00**	**-**			**-**
	700.000,00	(1338533)		19 Oct 2022					
	SKL No 900/2777.2/BPKPAD			3 bulan cicilan					
3	**Hendra Dinata, S. ST.Pi**	**30221996**	**TGR/2018**	**700/SKTJM-08/2022, 3 Agust 2022**	**7.909.746,65**	**559.746,65**	**559.746,65**		**-**
	8.109.746,65	(1338571)		3 Agust 2022			559.746,00	003/STS/CATARTIM/2024, 8 Mei 2024	
	SKL No.900/1079/BPKPAD			12 bulan cicilan			0,65	004/STS/CATARTIM/2024, 17 Mei 2024	
	Tgl. 27 Mei 2024								
4	**Zainal Fanani, SE.**	**30221995**	**TGR/2018**	**700/SKTJM-11/2022**	**2.951.075,83**	**678.075,83**	**678.075,83**		**-**
	3.201.075,83	(1338570)		15 August 2022			378.076,00	002/STS/CATARTIM/2024, 8 Mei 2024	
	SKL No.900/1078/BPKPAD			24 bulan cicilan			299.999,83	005/STS/CATARTIM/2024, 17 Mei 2024	
	Tgl. 27 Mei 2024								
5	**Ade Januar Rinaldy, SE**	**30221985**	**TGR/2016**	**700/SKTJM-10/2022**	**18.844.896,00**	**11.194.896,00**	**4.400.000,00**		**6.794.896,00**
	22.844.896,00	(1338536)		10 August 2022			400.000,00	003/STS/DLH/2024, 1 Feb 2024	
				24 bulan cicilan			400.000,00	007/STS/DLH/2024, 8 Mar 2024	
							400.000,00	010/STS/DLH/2024, 3 Apr 2024	
							400.000,00	011/STS/DLH/2024, 7 Mei 2024	
							400.000,00	014/STS/DLH/2024, 6 Jun 2024	
							400.000,00	021/STS/DLH/2024, 10 Jul 2024	
							400.000,00	022/STS/DLH/2024, 7 Agust 2024	
							400.000,00	023/STS/DLH/2024, 11 Sept 2024	
							400.000,00	024/STS/DLH/2024, 09 Okt 2024	
							400.000,00	026/STS/DLH/2024, 8 Nov 2024	
							400.000,00	028/STS/DLH/2024, 5 Des 2024	

DAFTAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Penanggungjawab	Runeg ID	Jenis Kasus/Tahun Kejadian	Nomor SKTJM	Nilai SKTJM	Saldo Tahun 2023	Angsuran 2024	Nomor dan Tanggal	Saldo Tahun 2024
10	**Soini 1 (Siring)**	**30221990**	**TGR/2014**	**700/SKTJM-12/2022**	**1.470.425,60**	**270.425,60**	**270.425,60**		**0,00**
	2.470.425,60	(1338565)		1 September 2022			100.000,00	005/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
				24 bulan cicilan			100.000,00	006/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
							70.425,60	007/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
11	**Soini 2 (Jembatan Kayu)**	**30221991**	**TGR/2014**	**700/SKTJM-12/2022**	**2.387.201,22**	**1.187.201,22**	**317.574,40**		**869.626,82**
	3.887.201,22	(1338566)		1 September 2022			100.000,00	005/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
				24 bulan cicilan			100.000,00	006/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
							117.574,40	007/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
12	**Soini 3 (Gapura)**	**30221992**	**TGR/2014**	**700/SKTJM-12/2022**	**3.000.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**		**-**
	4.500.000,00	(1338567)		1 September 2022			200.000,00	005/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
				24 bulan cicilan			200.000,00	006/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
							200.000,00	007/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
13	**Soini 4 (Perencanaan)**	**30221993**	**TGR/2014**	**700/SKTJM-12/2022**	**750.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**		**-**
	750.000,00	(1338568)		1 September 2022			50.000,00	005/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
				24 bulan cicilan			50.000,00	006/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
							62.000,00	007/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
14	**Soini 5 (Konsultan)**	**221994**	**TGR/2014**	**700/SKTJM-12/2022**	**3.986.000,00**	**2.786.000,00**	**300.000,00**		**2.486.000,00**
	3.986.000,00	(1338569)		1 September 2022			100.000,00	005/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
				24 bulan cicilan			100.000,00	006/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
							100.000,00	007/STS/CATARTIM/2024, 3 Jul 2024	
23	**Eva Julita Panjaitan, S.IP**	**20256722**	**TGR/2011**	**900.1.11.2/SKTJM-07/2023**	**8.050.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		**-**
	8.050.000,00	(1140827)		10 October 2023			1.000.000,00	03/STS/SETDA/2024, 29 Feb 2024	
	SKL No.900/1333/BPKPAD			9 bulan cicilan			1.000.000,00	04/STS/SETDA/2024, 20 Mar 2024	
	Tgl 28 Juni 2024						3.000.000,00	14/STS/SETDA/2024, 20 Jun 2024	
24	**Wahyudi, ST.**	**30221983**	**TGR/2012**	**900.1.11.2/SKTJM-06/2023**	**887.057,05**	**387.057,05**	**387.057,05**		**-**
	2.887.057,05	(1338533)		6 October 2023			387.057,05	900/001/DISDIK/2024	
	SKL No.900/0077/BPKPAD, 9 Jan 2024			12 bulan cicilan					
	Tgl 9 Jan 2024								
26	**Wahyudi, ST.**	**30221984**	**TGR/2012**	**900.1.11.2/SKTJM-06/2023**	**712.485,00**	**212.485,00**	**212.485,00**		**-**

DAFTAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Penanggungjawab	Runeg ID	Jenis Kasus/Tahun Kejadian	Nomor SKTJM	Nilai SKTJM	Saldo Tahun 2023	Angsuran 2024	Nomor dan Tanggal	Saldo Tahun 2024
	2.712.485,00	(1338534)		6 October 2023			212.485,00	900/001/DISDIK/2024	
	SKL No.900/0077/BPKPAD, 9 Jan 2024			12 bulan cicilan					
	Tgl 9 Jan 2024								
27	**Linda Erika Lubis, SH.**	**20221963**	**TGR/2020**	**900.1.11.2/SKTJM-03/2023**	**54.656.704,29**	**50.100.704,29**	**27.336.000,00**		**22.764.704,29**
	55.656.704,29	(1261085)		4 October 2023			2.278.000,00	016/STS/DPRKPP/2024, 13 Feb 2024	
				24 bulan cicilan			2.278.000,00	017/STS/DPRKPP/2024, 22 Feb 2024	
							2.278.000,00	018/STS/DPRKPP/2024, 28 Mar 2024	
							2.278.000,00	019/STS/DPRKPP/2024, 16 Apr 2024	
							2.278.000,00	020/STS/DPRKPP/2024, 14 Mei 2024	
							2.278.000,00	022/STS/DPRKPP/2024, 14 Jun 2024	
							2.278.000,00	025/STS/DPRKPP/2024, 15 Jul 2024	
							2.278.000,00	026/STS/DPRKPP/2024, 19 Agust 2024	
							2.278.000,00	027/STS/DPRKPP/2024, 12 Sept 2024	
							2.278.000,00	028/STS/DPRKPP/2024, 28 Okt 2024	
							2.278.000,00	030/STS/DPRKPP/2024, 28 Nov 2024	
							2.278.000,00	031/STS/DPRKPP/2024, 10 Des 2024	
28	**Hari Wijaya, S.Sos.**	**20221964**	**TGR/2020**	**900.1.11.2/SKTJM-04/2023, 4 Okt 2023**	**42.335.060,17**	**40.571.060,17**	**15.876.000,00**		**24.695.060,17**
	43.335.060,17	(1261086)		4 October 2023			1.764.000,00	01/STS/BPBD/2024, 8 Mar 2024	
				24 bulan cicilan			1.764.000,00	02/STS/BPBD/2024, 3 Mei 2024	
							1.764.000,00	03/STS/BPBD/2024, 12 Jun 2024	
							1.764.000,00	04/STS/BPBD/2024, 10 Jul 2024	
							1.764.000,00	05/STS/BPBD/2024, 13 Agust 2024	
							1.764.000,00	06/STS/BPBD/2024, 11 Sept 2024	
							1.764.000,00	07/STS/BPBD/2024, 4 Okt 2024	
							1.764.000,00	08/STS/BPBD/2024, 8 Nov 2024	
							1.764.000,00	09/STS/BPBD/2024, 6 Des 2024	
29	**Muhammad Basori, SE**	**20232737**	**TGR/2008**	**900.1.11.2/SKTJM-05/2023**	**3.000.000,00**	**2.750.000,00**			**2.750.000,00**
	4.741.000,00	(1138211)		6 Oct 2023					
				12 bulan cicilan			-		
Total Tuntutan Kerugian Daerah					**336.689.552,69**	**166.913.696,81**	**59.298.864,53**		**107.614.832,28**

DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Objek	Nama Pemilik / Penanggung	Nomor SP2D dan Tanggal	Penggunaan	Nilai Sewa	Mulai Masa Sewa	Masa Sewa Berakhir	Jumlah Hari Sewa	Tanggal Pelaporan	Nilai Sewa Per Hari	Belanja (Jumlah Hari)	Beban (Rp)	Belanja Diterima Dimuka (Jumlah Hari)	Belanja Diterima Dimuka (Rp)
1	Sewa Asrama Putri Samarinda	SRI RAHAYU SUSANTI	SP2D Nomor 65.71/04.0/000157/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/M/5/2024 Tgl. 14 Mei 2024	Sewa Asrama Putri Samarinda	130.000.000,00	19/05/2024	19/05/2025	365,00	31/12/2024	356.164,38	226	80.493.150,68	139	49.506.849,32
2	Asuransi Barang Milik Daerah	PT. ASURANSI UMUM BUMIDA	SP2D Nomor 65.71/04.0/000100/LS/4.01.0.00.0.00 .01.0000/M/3/2024 Tgl.22 Maret 2024	Asuransi Kendaraan Dinas Sekretariat Daerah	149.799.000,00	15/03/2024	15/03/2025	365,00	31/12/2024	410.408,22	291	119.428.791,78	74	30.370.208,22
Jumlah					**279.799.000,00**							**199.921.942,46**		**79.877.057,54**

DAFTAR PERSEDIAAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Alat/Bahan Kegiatan Kantor	Komponen	Bahan	Obat-Obatan	Natura Dan Pakan	Suku Cadang	Persediaan Penelitian Biologi	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Mesyarakat	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.322.400,00	-	-	-	-	-	-	-	2.322.400,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	742.680,00	-	-	-	-	-	-	-	742.680,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86.199.840,00	-	10.498.880,00	-	-	22.507.700,00		213.050.200,00	332.256.620,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	39.089.000,00	-	-	-	-	-	-	-	39.089.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.993.500,00	-	-	-	-		-	-	3.993.500,00
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	22.940.061,70	-	-	-	-	-	-	-	22.940.061,70
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kesehatan	15.477.627,00	-	-	-	-	-	-	-	15.477.627,00
9	Instalasi Farmasi Dan Pusat Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	89.748.947,00	-	232.505.311,45	5.878.084.889,68	-	847.000,00	-	-	6.201.186.148,13
10	Laboratorium Kesehatan Daerah	3.823.788,79	-	1.245.800,00	177.147.828,63	-	-	-	-	182.217.417,42
11	Puskesmas Gunung Lingkas	24.951.058,10	-	614.140,80	411.262.904,34	1.561.100,00	2.020.135,00	-	-	440.409.338,24
12	Puskesmas Juata	2.875.000,00	-	-	320.011.827,52	-	1.227.045,00	-	-	324.113.872,52
13	Puskesmas Karang Rejo	16.630.370,00	-	1.962.464,00	840.952.557,53	-	5.400.540,00	-	176.200,00	865.122.131,53
14	Puskesmas Mamburungan	-	-	94.483,20	310.889.777,33	-	4.471.435,00	-	-	315.455.695,53
15	Puskesmas Pantai Amal	24.324.680,00	-	16.475.916,40	243.310.952,82	-	360.000,00	-	-	284.471.549,22
16	Puskesmas Sebengkok	22.542.366,00	-	188.966,40	268.931.645,83	-	642.000,00	-	65.000,00	292.369.978,23
17	Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	219.288.825,75	-	16.323.752,80	5.091.056.794,72	25.969.702,93	33.757.440,00	-	-	5.386.396.516,19
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.604.787,80	-	12.857.500,00	167.988.395,87	-	-	-	-	209.450.683,67
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	1.561.414,00	-	-	-	-	-	-	-	1.561.414,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	520.451.981,34	-	11.600.000,00	67.779.000,00	-	33.570.093,00	-	-	633.401.074,34
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.509.915,00	-	13.442.644.533,98	-	-	13.260.000,00		43.670.602.574,56	57.157.017.023,54
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	286.286.895,00	286.286.895,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	16.500.000,00	18.500.000,00
26	Dinas Perhubungan	2.043.797.997,30	62.887.590,00	62.850.000,00	-	-	-	-	-	2.169.535.587,30
27	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	26.619.192,00	-	-	-	-	-	-	-	26.619.192,00
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	5.583.610,00	-	-	-	-	-	-	-	5.583.610,00
31	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	13.202.603,00	-	-	657.000,00	-	111.000,00	-	4.163.000,00	18.133.603,00
32	DPRD	66.839.950,00	-	-	621.600,00	-	-	-	-	67.461.550,00
33	Inspektorat Wilayah Kota	1.062.000,00	-	-	-	-	-	-		1.062.000,00
34	Sekretaris Daerah	119.607.300,00	-	-	-	-	-	-	-	119.607.300,00
35	Kec. Tarakan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kec. Tarakan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kec. Tarakan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kec. Tarakan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DAFTAR PERSEDIAAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Alat/Bahan Kegiatan Kantor	Komponen	Bahan	Obat-Obatan	Natura Dan Pakan	Suku Cadang	Persediaan Penelitian Biologi	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Mesyarakat	Jumlah
39	Kel. Gunung Lingkas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kel. Juata Kerikil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kel. Juata Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kel. Juata Permai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kel. Kampung Empat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kel. Kampung Enam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kel. Kampung I / SKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kel. Karang Anyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Kel. Karang Anyar Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Kel. Karang Balik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Kel. Karang Harapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Kel. Karang Rejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Kel. Lingkas Ujung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Kel. Mamburungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Kel. Mamburungan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Kel. Pamusian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Kel. Pantai Amal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Kel. Sebengkok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Kel. Selumit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Kel. Selumit Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Upt. Sanggar Kegiatan Belajar Lingkas Ujung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	TK. Negeri Pembina I	4.757.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.757.000,00
62	TK. Negeri Pembina II	2.642.700,00	-	292.000,00	-	-		-	-	2.934.700,00
63	TK. Negeri Pembina III	1.548.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.548.000,00
64	TK. Negeri Pantai Amal Tarakan Timur	406.000,00	-	-	-	-	-	-	-	406.000,00
65	Sekolah Dasar Negeri Utama I	660.845,00	-	-	-	-	-	-	-	660.845,00
66	Sekolah Dasar Negeri Utama II	16.513.000,00	-	-	108.000,00	-	-	-	-	16.621.000,00
67	Sekolah Dasar Negeri 001	1.160.000,00	-	-	852.000,00	-	30.000,00	-	-	2.042.000,00
68	Sekolah Dasar Negeri 002	2.216.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.216.000,00
69	Sekolah Dasar Negeri 003	8.934.000,00	-	-	-	-	-	-	-	8.934.000,00
70	Sekolah Dasar Negeri 004	8.096.000,00	-	-	508.000,00	-	-	-	-	8.604.000,00
71	Sekolah Dasar Negeri 005	412.000,00	-	-	110.000,00	-	-	-	-	522.000,00
72	Sekolah Dasar Negeri 006	623.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	673.000,00
73	Sekolah Dasar Negeri 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Sekolah Dasar Negeri 008	2.600.000,00	-	-	-	-		-	-	2.600.000,00
75	Sekolah Dasar Negeri 009	5.225.500,00	-	-	1.280.800,00	210.000,00	-	-	-	6.716.300,00
76	Sekolah Dasar Negeri 010	1.152.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.152.000,00

DAFTAR PERSEDIAAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Alat/Bahan Kegiatan Kantor	Komponen	Bahan	Obat-Obatan	Natura Dan Pakan	Suku Cadang	Persediaan Penelitian Biologi	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Mesyarakat	Jumlah
77	Sekolah Dasar Negeri 011	4.581.500,00	-	-	189.000,00	-	-	-	-	4.770.500,00
78	Sekolah Dasarnegeri 012	2.455.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.455.000,00
79	Sekolah Dasar Negeri 013	2.532.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.532.500,00
80	Sekolah Dasar Negeri 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Sekolah Dasar Negeri 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Sekolah Dasar Negeri 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Sekolah Dasar Negeri 017	2.413.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	2.493.000,00
84	Sekolah Dasar Negeri 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Sekolah Dasar Negeri 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Sekolah Dasar Negeri 020	156.870,00	-	-	-	-	-	-	-	156.870,00
87	Sekolah Dasar Negeri 021	4.731.500,00	-	-	111.000,00	-	-	-	-	4.842.500,00
88	Sekolah Dasar Negeri 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Sekolah Dasar Negeri 024	969.000,00	-	-	-	-	-	-	-	969.000,00
90	Sekolah Dasar Negeri 026	4.885.000,00	-	-	165.000,00	-	-	-	-	5.050.000,00
91	Sekolah Dasar Negeri 027	105.000,00	-	-	158.000,00	-	-	-	-	263.000,00
92	Sekolah Dasar Negeri 028	2.949.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	-	3.069.000,00
93	Sekolah Dasar Negeri 029	3.957.790,00	-	-	318.000,00	-	-	-	-	4.275.790,00
94	Sekolah Dasar Negeri 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Sekolah Dasar Negeri 031	3.283.250,00	-	-	-	-	-	-	-	3.283.250,00
96	Sekolah Dasar Negeri 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Sekolah Dasar Negeri 033	2.041.500,00	-	-	1.094.000,00	-	-	-	-	3.135.500,00
98	Sekolah Dasar Negeri 034	670.000,00	-	-	-	-	-	-	-	670.000,00
99	Sekolah Dasar Negeri 035	5.070.450,00	-	-	-	-		-	-	5.070.450,00
100	Sekolah Dasar Negeri 036	270.000,00	-	-	88.000,00	-	-	-	-	358.000,00
101	Sekolah Dasar Negeri 037	2.531.426,00	-	-	-	-	-	-	-	2.531.426,00
102	Sekolah Dasar Negeri 041	2.544.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.544.000,00
103	Sekolah Dasar Negeri 042	997.500,00	-	-	-	-	-	-	-	997.500,00
104	Sekolah Dasar Negeri 043	13.314.224,80	-	-	-	-	-	-	-	13.314.224,80
105	Sekolah Dasar Negeri 045	1.118.000,00	-	-	-	-	66.000,00	-	-	1.184.000,00
106	Sekolah Dasar Negeri 047	1.976.000,00	-	675.800,00	40.000,00	-	-	-	-	2.691.800,00
107	Sekolah Dasar Negeri 048	372.000,00	-	-	-	-	23.000,00	-	-	395.000,00
108	Sekolah Dasar Negeri 049	9.000.000,00	-	-	125.000,00	-	-	-	-	9.125.000,00
109	Sekolah Dasar Negeri 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Sekolah Dasar Negeri 051	345.800,00	-	-	68.000,00	-	-	-	-	413.800,00
111	Sekolah Dasar Negeri 052	1.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.610.000,00
112	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1	21.526.404,00	-	-	3.039.755,00	552.000,00	-	-	-	25.118.159,00
113	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2	59.748.459,00	-	140.000,00	250.000,00	-	650.000,00	-	-	60.788.459,00
114	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	42.610.573,19	-	-	385.500,00	-	-	-	-	42.996.073,19

DAFTAR PERSEDIAAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Alat/Bahan Kegiatan Kantor	Komponen	Bahan	Obat-Obatan	Natura Dan Pakan	Suku Cadang	Persediaan Penelitian Biologi	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Mesyarakat	Jumlah
115	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	51.973.166,81	-	-	492.000,00	-	-	-	-	52.465.166,81
116	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	32.077.540,00	-	-	579.000,00	-	-	-	-	32.656.540,00
117	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	7.671.800,00	-	-	-	-	-	-	-	7.671.800,00
118	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	1.651.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.651.500,00
119	Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	5.253.750,00	-	-	180.000,00	-	45.000,00	-	-	5.478.750,00
120	Sekolah Menengah Pertama Negeri 9	2.998.500,00	-	-	30.000,00	400.000,00	-	-	-	3.428.500,00
121	Sekolah Menengah Pertama Negeri 10	35.322.200,00	-	390.000,00	588.400,00	25.000,00	-	-	-	36.325.600,00
122	Sekolah Menengah Pertama Negeri 11	11.428.000,00	-	-	394.000,00	-	-	-	-	11.822.000,00
123	Sekolah Menengah Pertama Negeri 12	7.641.500,00	-	-	352.000,00	-	-	-	-	7.993.500,00
124	Sekolah Menengah Pertama Negeri 13	15.313.905,00	-	-	472.500,00	-	-	-	-	15.786.405,00
125	Sekolah Menengah Pertama Negeri 14	9.422.430,00	-	-	953.000,00	300.000,00	-	-	-	10.675.430,00
Total Nilai Persediaan		**3.869.256.978,57**	**62.887.590,00**	**13.813.359.549,03**	**13.791.876.129,27**	**29.017.802,93**	**118.988.388,00**	**-**	**44.190.843.869,56**	**75.876.230.307,37**

DAFTAR DANA BERGULIR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Nasabah	Plafond Kredit	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan	Kualitas Dana Bergulir
	Saldo Dana Bergulir di Bank				**3.077.613.647,31**			**3.077.613.647,31**	
1	Winarsih	35.000.000,00	23.09.16	2,00	-	5,00%	0,00	0,00	Lancar
2	Maria Lasmina	25.000.000,00	30.01.19	2,00	8.600.000,00	100,00%	8.600.000,00	0,00	Macet
3	Abd. Midin H. Puluadji	50.000.000,00	07.11.05	4,00	23.505.000,00	100,00%	23.505.000,00	0,00	Macet
4	Abdul Haris, S.Pi	25.000.000,00	13.10.11	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet
5	Abdul Main	10.000.000,00	23.03.06	6,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet
6	Achmad Syafei	10.000.000,00	28.11.04	6,00	7.499.998,00	100,00%	7.499.998,00	0,00	Macet
7	Agus Salim	20.000.000,00	10.10.15	2,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	0,00	Macet
8	Alyas Prantama	30.000.000,00	01.10.15	2,00	13.996.000,00	100,00%	13.996.000,00	0,00	Macet
9	Amiluddin	25.000.000,00	24.01.19	2,00	8.219.000,00	100,00%	8.219.000,00	0,00	Macet
10	Amin	10.000.000,00	20.11.04	6,00	4.994.541,48	100,00%	4.994.541,48	0,00	Macet
11	Ayrton Dean Haristya	28.000.000,00	06.12.15	2,00	12.062.200,97	100,00%	12.062.200,97	0,00	Macet
12	Azkari	10.000.000,00	05.03.07	4,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet
13	Azmu Azwar / Mebel Taka Jaya	30.000.000,00	10.03.04	6,00	27.500.000,00	100,00%	27.500.000,00	0,00	Macet
14	Bakir	10.000.000,00	14.12.08	2,00	6.360.000,00	100,00%	6.360.000,00	0,00	Macet
15	Basran	10.000.000,00	24.03.06	6,00	1.770.000,00	100,00%	1.770.000,00	0,00	Macet
16	Chairin Madjid, Ir	35.000.000,00	08.10.11	2,00	30.227.000,00	100,00%	30.227.000,00	0,00	Macet

No.	Nama Nasabah	Plafond Kredit	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan	Kualitas Dana Bergulir
17	CV. Mantap / H. Abd. Halid Ali	100.000.000,00	01.01.05	6,00	60.500.000,00	100,00%	60.500.000,00	0,00	Macet
18	Dahlan D./ Kel. Ulun Pagun	250.000.000,00	06.03.04	6,00	131.915.000,00	100,00%	131.915.000,00	0,00	Macet
19	Daraintan	5.000.000,00	10.01.05	6,00	4.791.666,00	100,00%	4.791.666,00	0,00	Macet
20	Desi Trimuliani	7.500.000,00	15.07.06	6,00	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	0,00	Macet
21	Drs. Suyono Ismu Putra	10.000.000,00	23.01.05	6,00	7.499.998,00	100,00%	7.499.998,00	0,00	Macet
22	Ediyanto	10.000.000,00	22.11.04	6,00	9.583.333,00	100,00%	9.583.333,00	0,00	Macet
23	Endang Sri Wahyuni	25.000.000,00	17.12.17	2,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0,00	Macet
24	H. Ambo Sakka / Koptan. Sinar Laut	200.000.000,00	06.03.04	6,00	68.254.087,00	100,00%	68.254.087,00	0,00	Macet
25	H. Ambo Sakka / Koptan. Sinar Laut	100.000.000,00	07.01.05	6,00	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	0,00	Macet
26	H. Ambo Tuwo Jamalu	10.000.000,00	26.11.04	6,00	8.749.999,00	100,00%	8.749.999,00	0,00	Macet
27	Hasan	10.000.000,00	14.10.07	4,00	8.635.000,00	100,00%	8.635.000,00	0,00	Macet
28	Hasanuddin	50.000.000,00	12.04.14	6,00	39.466.664,00	100,00%	39.466.664,00	0,00	Macet
29	Helmi Efendi	10.000.000,00	19.03.06	6,00	1.325.000,00	100,00%	1.325.000,00	0,00	Macet
30	Heny Kristanti	35.000.000,00	17.12.17	2,00	3.178.000,00	100,00%	3.178.000,00	0,00	Macet
31	Hery Juliansyah	25.000.000,00	07.01.05	6,00	23.958.333,00	100,00%	23.958.333,00	0,00	Macet
32	Ida	35.000.000,00	10.12.17	2,00	14.037.058,82	100,00%	14.037.058,82	0,00	Macet
33	Idawati	7.500.000,00	18.10.07	4,00	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	0,00	Macet
34	Idham Karim	10.000.000,00	05.03.07	4,00	6.315.000,00	100,00%	6.315.000,00	0,00	Macet
35	Iwan Suryadi	5.000.000,00	22.12.08	2,00	3.632.000,00	100,00%	3.632.000,00	0,00	Macet
36	Jainal M. Noor	50.000.000,00	10.01.05	6,00	43.749.998,00	100,00%	43.749.998,00	0,00	Macet

No.	Nama Nasabah	Plafond Kredit	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan	Kualitas Dana Bergulir
37	Jubaidah	30.000.000,00	24.01.19	2,00	19.088.000,00	100,00%	19.088.000,00	0,00	Macet
38	Julianti	2.500.000,00	30.01.06	6,00	2.386.000,00	100,00%	2.386.000,00	0,00	Macet
39	Kael	50.000.000,00	18.06.09	2,00	43.181.571,42	100,00%	43.181.571,42	0,00	Macet
40	Kamaria	10.000.000,00	08.03.13	2,00	5.906.333,33	100,00%	5.906.333,33	0,00	Macet
41	Kamis Suryani A.	5.000.000,00	28.10.07	4,00	4.315.901,00	100,00%	4.315.901,00	0,00	Macet
42	Kamsiyah	25.000.000,00	29.12.05	4,00	4.538.666,67	100,00%	4.538.666,67	0,00	Macet
43	KSU Amanah/A.Faisal	50.000.000,00	28.12.11	2,00	27.270.000,00	100,00%	27.270.000,00	0,00	Macet
44	Kube Pers. Angkot Jalur F	25.000.000,00	15.03.07	4,00	22.726.000,00	100,00%	22.726.000,00	0,00	Macet
45	Kube Pers. Angkot Jalur F	20.000.000,00	15.03.07	4,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	0,00	Macet
46	M. Hatta B.	50.000.000,00	13.12.04	6,00	22.663.332,00	100,00%	22.663.332,00	0,00	Macet
47	M. Said Mappatau	5.000.000,00	13.06.09	2,00	4.772.000,00	100,00%	4.772.000,00	0,00	Macet
48	Maskur Hadi	10.000.000,00	21.11.04	6,00	5.596.333,00	100,00%	5.596.333,00	0,00	Macet
49	Masran	20.000.000,00	30.12.05	6,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	0,00	Macet
50	Muchsin	10.000.000,00	20.02.08	4,00	9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	0,00	Macet
51	Muhammad Hamdani	35.000.000,00	09.10.16	2,00	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	0,00	Macet
52	Muhdar R.	50.000.000,00	20.11.04	6,00	48.000.000,00	100,00%	48.000.000,00	0,00	Macet
53	Mulyono, SE/Kube "Sejahtera"	30.000.000,00	24.10.05	6,00	27.065.000,00	100,00%	27.065.000,00	0,00	Macet
54	Muslimin	35.000.000,00	27.01.19	2,00	23.863.000,00	100,00%	23.863.000,00	0,00	Macet
55	Niko Alfianur/Mitra Cemerlang	30.000.000,00	31.12.05	6,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	0,00	Macet
56	Nur'aeni	5.000.000,00	05.03.07	4,00	2.850.000,00	100,00%	2.850.000,00	0,00	Macet

No.	Nama Nasabah	Plafond Kredit	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan	Kualitas Dana Bergulir
57	Paidi Saryanto	10.000.000,00	27.10.07	4,00	9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	0,00	Macet
58	Petrus Sani	25.000.000,00	25.09.16	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet
59	Ria Hamria / KSU. Citra Bangsa	200.000.000,00	06.03.04	6,00	183.333.332,00	100,00%	183.333.332,00	0,00	Macet
60	Rico Nasrun	10.000.000,00	15.03.06	6,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet
61	Rio Susanto	25.000.000,00	13.04.14	2,00	11.356.000,00	100,00%	11.356.000,00	0,00	Macet
62	Rustriadi, S.Hut	10.000.000,00	18.12.08	2,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet
63	Sabariah	25.000.000,00	24.01.19	2,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0,00	Macet
64	Sabri	50.000.000,00	07.10.16	6,00	41.666.664,00	100,00%	41.666.664,00	0,00	Macet
65	Salapa Hepa	10.000.000,00	17.07.05	6,00	7.499.998,00	100,00%	7.499.998,00	0,00	Macet
66	Siswanto	10.000.000,00	21.10.07	4,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet
67	Soemadi	10.000.000,00	08.01.05	6,00	8.749.999,00	100,00%	8.749.999,00	0,00	Macet
68	Subianto	35.000.000,00	06.11.16	2,00	30.227.000,00	100,00%	30.227.000,00	0,00	Macet
69	Sugianto	50.000.000,00	11.01.05	6,00	47.916.666,00	100,00%	47.916.666,00	0,00	Macet
70	Suhaibah	20.000.000,00	19.10.07	4,00	16.000.000,00	100,00%	16.000.000,00	0,00	Macet
71	Suliviansi	20.000.000,00	18.12.17	2,00	18.180.000,00	100,00%	18.180.000,00	0,00	Macet
72	Suprapto	15.000.000,00	10.10.16	2,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	0,00	Macet
73	Suyitno	25.000.000,00	25.09.16	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet
74	Syabariah	5.000.000,00	28.10.07	4,00	4.544.000,00	100,00%	4.544.000,00	0,00	Macet
75	Syahril (KSU RAMA JAYA)	50.000.000,00	05.12.15	2,00	22.724.000,00	100,00%	22.724.000,00	0,00	Macet
76	Syamsuddin Lamo	100.000.000,00	06.12.04	6,00	94.737.333,00	100,00%	94.737.333,00	0,00	Macet

No.	Nama Nasabah	Plafond Kredit	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan	Kualitas Dana Bergulir
77	Syilan Saleh	10.000.000,00	19.10.07	4,00	9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	0,00	Macet
78	Tantris	25.000.000,00	14.12.17	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet
79	Uspiati	10.000.000,00	14.12.08	2,00	6.360.000,00	100,00%	6.360.000,00	0,00	Macet
80	Wakifah	10.000.000,00	30.01.19	2,00	9.545.000,00	100,00%	9.545.000,00	0,00	Macet
81	Yohanis Kombongan	20.000.000,00	07.10.15	2,00	13.630.000,00	100,00%	13.630.000,00	0,00	Macet
82	Youce Sigarlaki	15.000.000,00	12.06.09	2,00	14.318.000,00	100,00%	14.318.000,00	0,00	Macet
83	Yuli Kartika Sari/Kop. HIPPIN	50.000.000,00	20.07.06	6,00	32.727.000,00	100,00%	32.727.000,00	0,00	Macet
84	Yusuf	10.000.000,00	06.01.06	6,00	8.181.800,00	100,00%	8.181.800,00	0,00	Macet
85	Zakaria	20.000.000,00	25.09.16	2,00	17.270.000,00	100,00%	17.270.000,00	0,00	Macet
Jumlah					**4.964.457.454,00**		**1.886.843.806,69**	**3.077.613.647,31**	

DAFTAR PERALATAN DAN MESIN BERDASARKAN JENISNYA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	PERALATAN DAN MESIN	**595.394.778.865,32**
I	**ALAT BESAR**	**41.092.285.023,07**
I A	**ALAT BESAR DARAT**	**35.794.625.606,37**
	GRADER	5.114.000.000,01
	EXCAVATOR	3.178.755.300,00
	HAULER	13.966.624.477,36
	ASPHALT EQUIPMENT	45.361.880,00
	COMPACTING EQUIPMENT	635.340.000,00
	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	8.879.500.000,00
	ALAT PENGANGKAT	2.146.993.000,00
	MESIN PROSES	1.683.891.024,00
	MESIN PROSES APUNG	144.159.925,00
I B	**ALAT BANTU**	**5.297.659.416,70**
	ALAT PENARIK	1.568.490,00
	COMPRESSOR	97.799.729,20
	ELECTRIC GENERATING SET	547.419.762,50
	POMPA	1.120.790.793,00
	MESIN BOR	24.695.000,00
	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	1.790.297.890,00
	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	461.919.900,00
	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	3.350.000,00
	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	1.010.775.000,00
	PERALATAN SAR MOUNTENERING	34.591.380,00
	ALAT BANTU LAINNYA	204.451.472,00
II	**ALAT ANGKUTAN**	**119.382.790.831,38**
II A	**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR**	**107.734.944.619,38**
	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	44.267.436.532,00
	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	16.630.835.269,20
	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7.421.063.000,82
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	13.406.001.916,01
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	1.223.721.000,00
	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	23.956.028.537,25
	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	29.948.392,00
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	799.909.972,10
II B	**ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR**	**1.834.202.211,00**
	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1.610.799.321,00
	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	223.402.890,00
II C	**ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR**	**9.813.644.001,00**
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	7.548.008.715,00
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	1.460.107.786,00
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	306.570.000,00
	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	6.500.000,00
	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	357.266.500,00
	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	129.191.000,00
	KAPAL TERBANG	6.000.000,00
III	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	**12.021.857.446,80**
III A	**ALAT BENGKEL BERMESIN**	**6.328.979.488,50**
	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	3.059.761.922,70
	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	97.572.710,30
	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	1.301.530.474,90
	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	91.242.610,00
	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	65.885.300,00
	PERKAKAS BENGKEL KAYU	490.864.331,00
	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	54.636.396,10
	PERALATAN LAS	116.081.043,40
	PERKAKAS PABRIK ES	788.297.693,10
	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	263.107.007,00

DAFTAR PERALATAN DAN MESIN BERDASARKAN JENISNYA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
III B	**ALAT BENGKEL TAK BERMESIN**	**1.240.467.135,10**
	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	21.425.000,00
	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	66.942.800,00
	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	248.819.850,00
	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	387.396.320,40
	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	109.397.000,00
	PERKAKAS BENGKEL KERJA	168.247.701,70
	PERALATAN TUKANG BESI	43.724.633,00
	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	14.310.000,00
	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	179.120.330,00
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	1.083.500,00
III C	**ALAT UKUR**	**4.452.410.823,20**
	ALAT UKUR UNIVERSAL	1.020.430.462,00
	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	1.950.000,00
	ALAT KALIBRASI	1.119.005.250,00
	OSCILLOSCOPE	5.930.400,00
	UNIVERSAL TESTER	472.114.076,00
	ALAT UKUR/PEMBANDING	496.593.238,20
	ALAT UKUR LAIN-LAIN	714.467.712,00
	ALAT TIMBANGAN/BIARA	313.170.285,00
	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	17.249.400,00
	SPECIFIC SET	37.000.000,00
	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	7.000.000,00
	ALAT UKUR LAINNYA	247.500.000,00
IV	**ALAT PERTANIAN**	**13.046.442.550,17**
IV A	**ALAT PENGOLAHAN**	**13.046.442.550,17**
	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	473.915.029,97
	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	167.949.300,00
	ALAT PANEN	39.900.000,00
	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	2.982.846.165,00
	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	6.446.269.977,20
	ALAT PROSESING	313.483.600,00
	ALAT PASCA PANEN	162.191.947,00
	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	1.858.146.439,00
	ALAT-ALAT PETERNAKAN	542.506.092,00
	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	59.234.000,00
V	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	**136.215.054.959,61**
V A	**ALAT KANTOR**	**44.523.853.343,67**
	MESIN KETIK	849.855.961,32
	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	437.133.094,00
	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	1.205.529.301,00
	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.455.795.913,41
	ALAT KANTOR LAINNYA	26.575.539.073,94
V B	**ALAT RUMAH TANGGA**	**83.791.827.737,27**
	MEUBELAIR	34.247.310.272,76
	ALAT PENGUKUR WAKTU	100.123.018,00
	ALAT PEMBERSIH	979.967.252,00
	ALAT PENDINGIN	15.970.701.149,02
	ALAT DAPUR	1.209.334.947,18
	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	24.157.751.672,31
	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	7.126.639.426,00
V C	**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT**	**7.899.373.878,67**
	MEJA KERJA PEJABAT	1.791.990.075,05
	MEJA RAPAT PEJABAT	624.477.052,00
	KURSI KERJA PEJABAT	1.570.259.825,90
	KURSI RAPAT PEJABAT	275.940.000,00
	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	53.032.000,00

DAFTAR PERALATAN DAN MESIN BERDASARKAN JENISNYA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	78.299.850,00
	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	3.505.375.075,72
VI	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**	**23.030.785.283,45**
VI A	**ALAT STUDIO**	**14.834.517.880,45**
	PERALATAN STUDIO AUDIO	3.899.799.960,44
	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	6.729.143.070,01
	PERALATAN STUDIO GAMBAR	54.290.900,00
	PERALATAN CETAK	3.430.402.450,00
	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	251.867.000,00
	ALAT STUDIO LAINNYA	469.014.500,00
VI B	**ALAT KOMUNIKASI**	**3.107.614.463,00**
	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	1.872.904.508,00
	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	122.428.500,00
	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	204.959.500,00
	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	232.041.504,00
	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	105.388.250,00
	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	355.361.000,00
	ALAT-ALAT SANDI	133.175.045,00
	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	14.270.000,00
	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	22.600.000,00
	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	44.486.156,00
VI C	**PERALATAN PEMANCAR**	**5.088.652.940,00**
	PERALATAN PEMANCAR UHF	7.595.000,00
	PERALATAN PEMANCAR SHF	1.000.000,00
	PERALATAN ANTENA HF/SW	206.500.000,00
	PERALATAN ANTENA VHF/FM	127.560.000,00
	PERALATAN ANTENA UHF	31.894.000,00
	PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	7.350.000,00
	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	7.600.000,00
	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	45.000.000,00
	SWITCHER ANTENA	18.328.900,00
	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	5.400.000,00
	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	34.130.000,00
	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	28.000.000,00
	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	21.700.000,00
	SUMBER TENAGA	4.546.595.040,00
VII	**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**	**98.789.284.542,90**
VII A	**ALAT KEDOKTERAN**	**96.144.872.963,90**
	ALAT KEDOKTERAN UMUM	25.637.143.232,00
	ALAT KEDOKTERAN GIGI	3.571.653.718,00
	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	2.023.756.185,00
	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	13.166.809.599,00
	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	3.573.064.243,99
	ALAT KEDOKTERAN THT	2.716.843.870,00
	ALAT KEDOKTERAN MATA	1.826.880.947,00
	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	6.825.714.195,00
	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	545.655.800,00
	ALAT KEDOKTERAN ANAK	4.505.778.030,00
	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	160.056.209,88
	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	1.335.183.347,00
	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	2.356.478.010,00
	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	6.222.776.300,00
	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	4.066.167.733,00
	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	3.176.446.545,00
	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	28.987.500,00
	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	662.612.098,00
	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	450.610.004,00
	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	6.278.022.953,00
	ALAT KEDOKTERAN I C U	1.828.219.400,03

DAFTAR PERALATAN DAN MESIN BERDASARKAN JENISNYA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	ALAT KEDOKTERAN I C C U	617.352.000,00
	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	1.082.731.712,00
	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	3.485.929.332,00
VII B	**ALAT KESEHATAN UMUM**	**2.644.411.579,00**
	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	135.465.500,00
	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	171.250.000,00
	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	4.315.700,00
	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	61.892.000,00
	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	2.271.488.379,00
VIII	**ALAT LABORATORIUM**	**52.791.593.491,72**
VIII A	**UNIT ALAT LABORATORIUM**	**34.440.300.116,45**
	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	621.249.400,00
	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	577.059.333,00
	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	327.383.860,00
	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	13.137.870,00
	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	62.154.000,00
	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	684.258.891,00
	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	263.696.560,00
	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	1.180.376.500,00
	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	1.235.070.762,00
	ALAT LABORATORIUM UMUM	5.144.185.125,00
	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	1.215.927.332,00
	ALAT LABORATORIUM KIMIA	2.495.840.707,00
	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	2.059.590.269,00
	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	512.272.830,00
	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	383.124.113,30
	ALAT LABORATORIUM FILM	334.963.010,00
	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	298.443.596,00
	ALAT LABORATORIUM FARMASI	228.844.200,00
	ALAT LABORATORIUM FISIKA	43.458.500,00
	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	14.430.000,00
	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8.020.000,00
	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	119.718.000,00
	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	11.900.000,00
	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	16.900.000,00
	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	48.950.000,00
	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	273.835.000,00
	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	273.492.000,00
	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	47.014.600,00
	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	20.645.500,00
	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	186.180.000,00
	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	122.303.400,00
	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	5.610.000,00
	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	6.345.766.649,00
	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	25.630.000,00
	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	20.250.000,00
	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	442.600.000,00
	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	132.083.500,00
	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	9.290.000,00
	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	10.478.445,00
	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	93.946.000,00
	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	1.117.607.064,00
	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	49.950.000,00
	LABORATORIUM KEARSIPAN	124.047.000,00
	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	758.112.737,00
	ALAT LABORATORIUM LAIN	3.725.641.553,15
	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	30.000.000,00
	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	37.832.965,00
	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	2.687.028.845,00
VIII B	**UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR**	**788.075.000,00**

DAFTAR PERALATAN DAN MESIN BERDASARKAN JENISNYA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	GENERAL LABORATORY TOOL	72.107.000,00
	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	164.293.000,00
	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	551.675.000,00
VIII C	**ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH**	**13.025.148.089,85**
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	1.350.709.400,00
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	982.772.671,00
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	514.970.000,00
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	5.863.218.170,85
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	619.737.268,00
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	146.260.160,00
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	18.709.263,00
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	9.400.000,00
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	2.354.005.880,00
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	708.099.625,00
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	344.339.152,00
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	7.902.500,00
	ALAT PERAGA PAUD/TK	13.750.000,00
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	91.274.000,00
VIII D	**ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA**	**899.075.526,00**
	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	115.013.000,00
	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	103.162.040,00
	RECORDER DISPLAY	276.617.105,00
	SYSTEM/POWER SUPPLY	92.346.500,00
	MEASURING/TESTING DEVICE	14.542.145,00
	OPTO ELECTRONICS	49.500.000,00
	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	244.831.550,00
	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	3.063.186,00
VIII E	**ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN**	**1.038.112.028,00**
	ALAT KESEHATAN KERJA	348.189.506,00
	PROTEKSI LINGKUNGAN	685.022.522,00
	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	4.900.000,00
VIII F	**RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA**	**95.593.920,00**
	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	87.653.920,00
	PERALATAN HIDROLOGI	7.940.000,00
VIII G	**ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP**	**871.447.000,00**
	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	231.093.000,00
	ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA	284.017.000,00
	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	21.250.000,00
	LABORATORIUM LINGKUNGAN	281.277.000,00
	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	52.310.000,00
	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	1.500.000,00
VIII H	**PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA**	**1.633.841.811,42**
	DATA ACCQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	829.233.000,00
	PERALATAN UMUM	305.463.144,00
	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	100.525.000,00
	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	114.881.354,00
	MOB	55.440.000,42
	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	110.662.923,00
	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	6.316.390,00
	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	111.320.000,00
IX	**ALAT PERSENJATAAN**	**2.059.333.433,00**
IX A	**SENJATA API**	**132.645.600,00**
	SENJATA GENGGAM	15.000.000,00
	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	15.000.000,00
	SENJATA LAIN-LAIN	102.645.600,00

DAFTAR PERALATAN DAN MESIN BERDASARKAN JENISNYA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
IX B	**PERSENJATAAN NON SENJATA API**	**814.447.487,00**
	ALAT KEAMANAN	681.572.487,00
	NON SENJATA API	96.375.000,00
	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	36.500.000,00
IX C	**SENJATA SINAR**	**15.500.000,00**
	LASER	15.500.000,00
IX D	**ALAT KHUSUS KEPOLISIAN**	**1.096.740.346,00**
	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	537.451.746,00
	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	45.550.000,00
	PERALATAN DETEKSI INTEL	7.000.000,00
	ALSUS LANTAS	38.410.000,00
	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	213.151.000,00
	ALSUS DAKTILOSKOPI	8.750.000,00
	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	246.427.600,00
X	**KOMPUTER**	**77.394.876.481,90**
X A	**KOMPUTER UNIT**	**54.717.319.015,69**
	KOMPUTER JARINGAN	5.457.699.627,00
	PERSONAL KOMPUTER	47.046.652.350,69
	KOMPUTER UNIT LAINNYA	2.212.967.038,00
X B	**PERALATAN KOMPUTER**	**22.677.557.466,21**
	PERALATAN MAINFRAME	1.920.410.026,05
	PERALATAN MINI KOMPUTER	1.389.473.584,00
	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	12.060.730.461,37
	PERALATAN JARINGAN	6.847.263.602,79
	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	459.679.792,00
XI	**ALAT EKSPLORASI**	**2.200.000,00**
XI A	**ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI**	**2.200.000,00**
	OPTIK	2.200.000,00
XII	**ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**	**22.964.686,00**
XII A	**SUMUR**	**19.664.686,00**
	SUMUR LAINNYA	19.664.686,00
XII B	**PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**	**3.300.000,00**
	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	3.300.000,00
XIV	**ALAT KESELAMATAN KERJA**	**6.227.514.115,90**
XIV A	**ALAT DETEKSI**	**11.880.000,00**
	ALAT DETEKSI LAINNYA	11.880.000,00
XIV B	**ALAT PELINDUNG**	**45.885.656,00**
	BAJU PENGAMAN	9.000.000,00
	SABUK PENGAMAN	3.900.000,00
	ALAT PELINDUNG LAINNYA	32.985.656,00
XIV C	**ALAT SAR**	**2.913.063.419,90**
	ALAT PENOLONG	7.700.000,00
	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	2.779.373.420,00
	ALAT KERJA BAWAH AIR	114.289.999,90
	ALAT SAR LAINNYA	11.700.000,00
XIV D	**ALAT KERJA PENERBANGAN**	**3.256.685.040,00**
	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	52.631.760,00
	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	3.185.088.280,00
	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	18.965.000,00
XVI	**ALAT PERAGA**	**9.263.800,00**
XVI A	**ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN**	**9.263.800,00**

DAFTAR PERALATAN DAN MESIN BERDASARKAN JENISNYA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	ALAT PERAGA PELATIHAN	3.313.800,00
	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	5.950.000,00
XVII	**PERALATAN PROSES/PRODUKSI**	**432.246.880,00**
XVII A	**UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI**	**432.246.880,00**
	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	65.112.600,00
	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	330.439.280,00
	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	28.300.000,00
	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	1.100.000,00
	MECHANICAL PROCES	7.295.000,00
XVIII	**RAMBU - RAMBU**	**10.563.773.945,42**
XVIII A	**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT**	**10.563.773.945,42**
	RAMBU BERSUAR	2.826.556.373,42
	RAMBU TIDAK BERSUAR	7.108.301.572,00
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	628.916.000,00
XIX	**PERALATAN OLAH RAGA**	**2.312.511.394,00**
XIX A	**PERALATAN OLAH RAGA**	**2.312.511.394,00**
	PERALATAN PERMAINAN	1.452.760.614,00
	PERALATAN SENAM	219.846.500,00
	PARALATAN OLAH RAGA AIR	5.550.000,00
	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	2.400.000,00
	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	631.954.280,00
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN		**595.394.778.865,32**

Lampiran 11

DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Alamat	Infrastruktur	Nilai (Rp)	Tanggal
1	DISHUB	Perencanaan pemasangan PJU		Instalasi gardu listrik lainnya	99.605.000,00	11/11/2021
2	DKUKMP	Kajian Penyusunan Master Plan Pasar Lingkas Ujung dan Pasar Sebengkok	Jl. Yos Sudarso	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	897.160.000,00	31/12/2017
3	DKUKMP	Pengadaan Pembuatan DED Pasar Sebengkok TH 2020	Jl. Yos Sudarso Pasar Sebengkok	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	687.417.500,00	30/12/2020
4	DKUKMP	Pengadaan UKL - UPL Pasar Sebengkok TH 2020	Jl.Yos sudarso Pasar Sebengkok	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	148.940.000,00	30/12/2020
5	DKUKMP	pengadaan Pembuatan Amdalalin Pasar Sebengkok TH 2020	Jl. Yos Sudarso Pasar Sebengkok	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	149.242.000,00	30/12/2020
6	DKUKMP	Honorarium Panitia Lelang DED Pasar Sebengkok TH 2020	Jl. Yos Sudarso Pasar Sebengkok	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2.150.000,00	30/12/2020
7	DPUPR	Perencanaan Pengadaan Tanah Embung Maya	Tarakan	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	102.954.006,20	29/12/2022
8	DPUPR	Perencanaan Pengadaan tanah Bangunan Pengairan Embung Indulung	Kel. Kampung I	Tanah Tandus Bekas Tambang/Galian	1.921.075.113,85	23/12/2019
9	DPUPR	Perencanaan Peningkatan Jalan	JL SUNGAI MAHAKAM	Jalan Kabupaten Lain-lain	48.334.000,00	10/12/2013
10	DPUPR	perencanaan IPA dan jaringan distribusi di kawasan pantai amal	pantai amal	Jalan Kabupaten Lain-lain	289.311.364,00	31/12/2013
11	DPUPR	Peningkatan Jalan	Jalan Juata Lembah	Jalan Kabupaten Lain-lain	49.434.000,00	31/12/2017
12	DPUPR	Perencanaan Peningkatan Jalan	Jalan Aki Balak- Misaya	Jalan Kabupaten Lain-lain	49.351.000,00	31/12/2017

DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Alamat	Infrastruktur	Nilai (Rp)	Tanggal
13	DPUPR	Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Paket Kegiatan Perencanaan Jalan Swasembada (Reguler)	Swasembada	Jalan kota	42.074.000,00	28/07/2021
14	DPUPR	Perencanaan Jalan Kamboja, Mamburungan Karungan, Sebengkok Tiram, dan Haji Wahab (Reguler)		Jalan kota	63.590.000,00	21/12/2021
15	DPUPR	Perencanaan jalan seroja da seroja1	Jl Seroja	Jalan kota	49.456.000,00	26/12/2022
16	DPUPR	Peningkatan Jalan (Honor)	aki balak	Jalan kota	12.000.000,00	26/12/2022
17	DPUPR	Perencanaan Jembatan dan Lingkungan	jl Harapan Baru RT.4 Kel Kr Harapan	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	49.412.000,00	31/12/2014
18	DPUPR	Perencanaan Jembatan		Jembatan pada jalan kota	98.213.000,00	26/12/2022
19	DPUPR	DED Pembangunan Saluran Selumit (Alternatif)	Selumit	Saluran Banjir	99.980.000,00	10/08/2020
20	DPUPR	Fasibility study Pembangunan Embung Handulung (swakelola)	Tarakan	Saluran Drainage	476.575.000,00	31/12/2015
21	DPUPR	DED Pembangunan Long Storage Sungai Kampung Satu	Kampung I	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lain-lain	146.376.500,00	22/07/2020
22	DPUPR	Feasibility Study Embung Sungai Maya	Juata	Bangunan Waduk Lapangan Pembuang Lain-lain	582.892.000,00	31/12/2019
23	DPUPR	Feasibility Study Embung Sungai Mangatal		Bangunan Waduk Lapangan Pembuang Lain-lain	588.686.800,00	31/12/2019
24	DPUPR	Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Embung Maya	embung maya	Bangunan Pengambilan Dari Waduk	99.081.039,36	26/12/2022
25	DPUPR	Perencanaan Pembangunan pipa Transmisi Intake Sungai Bengawan - IPA Bengawan	Sei bengawan	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	97.285.686,44	26/12/2022
26	DPUPR	SID Air bersih sungai sekatak - Tarakan (swakelola)	Tarakan	Sumur Resapan	740.602.000,00	31/12/2015

DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Alamat	Infrastruktur	Nilai (Rp)	Tanggal
27	DPUPR	Perencanaan pengembangan jaringan perpipaan boster dan reservoar	kampung empat	Jaringan Pembawa Lain-lain	180.455.000,00	22/12/2014
28	DPUPR	Perencanaan Pengembangan jaringan perpipaan Booster dan reserver	Gn Amal	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain	180.235.000,00	23/12/2014
29	DPUPR	Perencanaan dan Pemasangan Jaringan perpipaan Distribusi Zona Tanjung batu - Tanjung Pasir	Tanjung Batu - Tanjung Pasir	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain	72.160.000,00	22/12/2020
30	DPUPR	Perencanaan Jalan Lestari dan Aghatis	Jalan Lestari dan Aghatis	Jalan kota	50.129.854,00	03/05/2023
31	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Akasia	jalan Akasia	Jalan kota	19.893.150,60	24/10/2023
32	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Aki Babu	jalan Aki Babu	Jalan kota	100.076.565,20	17/10/2023
33	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Bengkirai	jalan Bengkirai	Jalan kota	39.887.865,10	17/10/2023
34	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Flamboyan	jalan Flamboyan	Jalan kota	100.067.508,70	16/10/2023
35	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Imam Bonjol	jalan Imam Bonjol	Jalan kota	100.236.704,60	17/10/2023
36	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Kusuma Bangsa	jalan Kusuma Bangsa	Jalan kota	99.923.610,60	23/10/2023
37	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Mahoni	jalan Mahoni	Jalan kota	19.954.533,70	24/10/2023
38	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Melati	jalan Melati	Jalan kota	100.413.165,90	17/10/2023
39	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Menuju SD 012		Jalan kota	40.008.497,90	17/10/2023
40	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Meranti	jalan Meranti	Jalan kota	40.019.667,70	17/10/2023
41	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan P. Irian	jalan P. Irian	Jalan kota	49.810.863,30	07/10/2023
42	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Purna Bakti	jalan Purna Bakti	Jalan kota	70.127.607,50	17/10/2023
43	DPUPR	Perencanaanpemeliharaanberkala/rehabilitasijalan Rusunawa	jalan Rusunawa	Jalan kota	100.311.028,50	17/10/2023
44	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Slamet Riyadi	jalan Slamet Riyadi	Jalan kota	100.190.274,90	17/10/2023
45	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Tengkawang	jalan Tengkawang	Jalan kota	39.820.846,80	17/10/2023
46	DPUPR	Perencanaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan WR. Supratman	jalan WR. Supratman	Jalan kota	90.238.165,00	16/10/2023
47	DPUPR	Perencanaan peningkatan kapasitas/struktur jalan Cahaya Baru	jalan Cahaya Baru	Jalan kota	69.409.687,10	17/10/2023
48	DPUPR	Perencanaan peningkatan kapasitas/struktur jalan Damai Bakti	jalan Damai Bakti	Jalan kota	99.923.610,60	16/10/2023
49	DPUPR	Perencanaan peningkatan kapasitas/struktur jalan Jembatan Bongkok	jalan Jembatan Bongkok	Jalan kota	69.986.778,60	07/11/2023
50	DPUPR	Perencanaan peningkatan kapasitas/struktur jalan Kenanga	jalan Kenanga	Jalan kota	59.429.491,90	17/10/2023
51	DPUPR	Perencanaan peningkatan kapasitas/struktur jalan Kenanga I	Perencanaan peningkatan kapasitas/struktur jalan Kenanga I	Jalan kota	29.683.048,10	17/10/2023

DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Alamat	Infrastruktur	Nilai (Rp)	Tanggal
52	DPUPR	Perencanaan peningkatan kapasitas/struktur jalan Pasar Rakyat	jalan Pasar Rakyat	Jalan kota	70.033.671,30	17/10/2023
53	DPUPR	Perencanaan peningkatan kapasitas/struktur jalan Rukun	jalan Rukun	Jalan kota	29.996.202,50	16/10/2023
54	DPUPR	Perencanaan peningkatan kapasitas/struktur jalan Sei Kayan	Jalan Sei Kayan	Jalan kota	100.487.127,50	17/10/2023
55	DPUPR	Perencanaan peningkatan kapasitas/struktur jalan SIKIM	jalan SIKIM	Jalan kota	99.551.890,70	17/10/2023
56	DPUPR	Perencanaan pemeliharaa berkala/rehabilitasi jalan Malundung	jalan Malundung	Jalan kota	34.993.188,00	17/10/2023
57	DPUPR	PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK DAN PRASARANA TPA JUATA KERIKIL	Juata Kerikil Tarakan Utara KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1.657.500.684,00	06/08/2024
58	DPUPR	Pembangunan Saluran Kr. Harapan (2024)	Karang Harapan Karang Harapan Tarakan Barat KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	8.715.664.108,48	19 Juni 2024
59	DPUPR	Pembangunan Siring RT.46 Kel.Karang Anyar	RT.46 Kel.Karang Anyar Karang Anyar Tarakan Barat KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	543.754.822,50	11 November 2024
60	DPUPR	Pengawasan Pembangunan Siring RT. 46 Kel.Karang Anyar	RT. 46 Kr. Anyar Karang Anyar Tarakan Barat KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	53.613.000,00	11 November 2024
61	DPUPR	Pengawasan Pembangunan Siring RT. 46 Kel.Karang Anyar (Honorarium)		Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	450.000,00	24/12/2024
62	DPUPR	Peningkatan Jalan Kasiba Juata Laut	kasiba juata laut Juata Laut Tarakan Utara KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	8.993.071.829,96	05 April 2024

DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Alamat	Infrastruktur	Nilai (Rp)	Tanggal
63	DPUPR	Peningkatan Jalan Mamburungan- Karungan	jl. mamburungan - karungan Mamburungan Tarakan Timur KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2.363.676.264,40	12 Juli 2024
64	DPUPR	Pengawasan Peningkatan Jalan Kasiba Juata Laut	Jl Kasiba Juata Laut Juata Laut Tarakan Utara KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	198.565.902,00	05 April 2024
65	DPUPR	Pengawasan Peningkatan Jalan Mamburungan-Karungan		Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	89.490.000,00	12 Juli 2024
66	DPUPR	Honor Peningkatan Jalan Mamburungan-Karungan		Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	900.000,00	19/12/2024
67	DPUPR	Pengawasan Pembangunan Saluran Kr. Harapan (2024)	jl. kr Harapan Karang Harapan Tarakan Barat KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	344.544.000,00	11 November 2024
68	DPUPR	Pengawasan Pembangunan Saluran Kr. Harapan (2024) (Honorarium)		Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1.350.000,00	13/12/2024
69	DPUPR	Pengawasan Pemasangan Jaringan Listrik dan Prasarana TPA Juata Kerikil	Jl. Juata Kerikil Juata Kerikil Tarakan Utara KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	59.598.000,00	27/05/2024
70	DPUPR	Pengawasan Pemasangan Jaringan Listrik dan Prasarana TPA Juata Kerikil (Honorarium)		Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	1.500.000,00	-

DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Alamat	Infrastruktur	Nilai (Rp)	Tanggal
71	DPUPR	Perencanaan Pembangunan Siring RT. 46 Kel.Karang Anyar	RT. 46 Karang anyar Karang Anyar Tarakan Barat KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	35.528.000,00	08 Oktober 2024
72	DPUPR	Perencanaan Pembangunan Jalan Bulan Bakti (TMMD)		Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	39.762.000,00	12 september2024
73	DPUPR	Perencanaan Pembangunan Jalan Bulan Bakti (TMMD) Honor		Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	450.000,00	10/10/2024
74	DPUPR	Perencanaan Kantor Kelurahan Karang Anyar dan Kecamatan Tarakan Barat	kelurahan karang anyar dn kecamatan tarakan barat Karang Anyar Tarakan Barat KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	318.514.500,00	04/05/2024
75	DPUPR	Perencanaan Pembangunan Saluran Kr. Harapan (2024)	karang harapan Karang Harapan Tarakan Barat KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	241.894.530,00	28 Maret 2024
76	DPUPR	Perencanaan Peningkatan Jalan Kasiba Juata Laut	kasiba juata laut Juata Laut Tarakan Utara KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	99.143.800,00	18/01/2024
77	DPUPR	Perencanaan Peningkatan Jalan Mamburungan-Karungan	mamburungan - karungan Mamburungan Tarakan Timur KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	89.042.800,00	18 Januari 2024

DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Alamat	Infrastruktur	Nilai (Rp)	Tanggal
78	DPUPR	Perencanaan Jalan Menuju SMP 12 - Rukun	Jl.Rukun SMP N 12 Karang Anyar Pantai Tarakan Barat KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	98.693.166,00	15 JANUARI 2024
79	DPUPR	Nama : Perencanaan Jalan Menuju SMP 12 - Jl. Rukun (Honorarium Pejabat Pengadaan)		Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	450.000,00	-
80	DLH	Penyusunan DED Pemakaman Mamburungan Timur PPTK : YUS ARI WIJAYANTI,S.Hut NO : 10718/SP2D/2023 Tggl : 19 Desember 2023 Oleh CV : INDOTEC NUSANTARA	Jl. Kelurahan RT. 9 RW. 2 Karungan, Kelurahan Mamburungan Timur	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	49.800.150,00	-
Jumlah					**33.845.610.173,49**	

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanggal	No. SP2D	Jenis	Uraian	Jumlah	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Akumulasi Amortisasi 2023	Nilai Buku
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	31/12/2009		Software	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen PKP	49.500.000,00	49.500.000,00	-	49.500.000,00	-
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	19/04/2010	01364/SP2D/2010	Software	Pengadaan Software Komputer dan perlengkapan untuk keperluan Bappeda Kota Tarakan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	30/11/2010	11686/SP2D/2010	Software	Pengadaan Software Komputer dan Belanja Modal Pengadaan Software Komputer kegiatan penyusunan aplikasi perkantoran dan Belanja Modal Pengadaan Software Komputer kegiatan penyusunan aplikasi perkantoran	125.050.000,00	125.050.000,00	-	125.050.000,00	-
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	29/12/2010		Software	Pengadaan SIM PKP	29.590.000,00	29.590.000,00	-	29.590.000,00	-
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	21/12/2011	13993/SP2D/2011	Software	Belanja Pengadaan Software Komputer (Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Perkantoran dan Belanja Pengadaan Software Komputer (Inventarisasi Database Pengembangan Pembangunan Daerah) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Perkantoran dan Belanja Pengadaan Software Komputer (Pengembangan Elektronik Office Management) Keg. Pengembangan Aplikasi Perkantoran	212.500.000,00	212.500.000,00	-	212.500.000,00	-
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	26/12/2012	16012/SP2D/2012	Software	Belanja Pengadaan Software Komputer (Pengembangan e-Plann) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik dan Belanja Pengadaan Software Komputer (SIM-PKP) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	94.750.000,00	94.750.000,00	-	94.750.000,00	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	08/10/2013	09228/SP2D/2013	Software	Pengadaan Sofware Komputer Aplikasi KLA	78.650.000,00	78.650.000,00	-	78.650.000,00	-
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17/12/2013	14882/SP2D/2013	Software	Belanja Pengadaan Software Komputer dan Belanja Modal Pengadaan Software Komputer berupa Aplikasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	85.500.000,00	85.500.000,00	-	85.500.000,00	-
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	19/12/2013	16192/SP2D/2013	Software	Pengadaan Software Komputer dan Belanja Modal Pengadaan Software	165.220.000,00	165.220.000,00	-	165.220.000,00	-
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	01/09/2014	17310/SP2D/2014	Software	Pengadaan sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Penannggulangan Kemiskinan	171.600.000,00	160.160.000,00	11.440.000,00	171.600.000,00	-
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12/11/2015	08807/SP2D/2015	Software	Pengadaan Software Komputer berupa Pengembangan Aplikasi Simusrenbang Kegiatan Penyusunan Informasi terhadap Pelayanan Publik	80.300.000,00	65.578.333,33	8.030.000,00	73.608.333,33	6.691.666,67
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10/06/2015	03602/SP2D/2015	Software	Pengadaan peralatan dan mesin berupa pengembangan aplikasi e-data	79.550.000,00	68.280.416,67	7.955.000,00	76.235.416,67	3.314.583,33
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	28/8/2017		Software	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan	48.400.000,00	31.056.666,67	4.840.000,00	35.896.666,67	12.503.333,33
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12/12/2017		Software	Pengadaan Software Pengembangan Aplikasi	33.440.000,00	20.342.666,67	3.344.000,00	23.686.666,67	9.753.333,33
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	30/11/2015		Software	Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan	2.500.000,00	2.041.666,67	250.000,00	2.291.666,67	208.333,33
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	31/12/2021		Software	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kota Tarakan	74.978.000,00	15.620.416,67	7.497.800,00	23.118.216,67	51.859.783,33

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanggal	No. SP2D	Jenis	Uraian	Jumlah	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Akumulasi Amortisasi 2023	Nilai Buku
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	25/06/2021		Kajian	Kajian Pengembangan Perencanaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Kedokteran Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan	230.000.000,00	59.416.666,67	23.000.000,00	82.416.666,67	147.583.333,33
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18/12/2023	09889/SP2D/2023	Kajian	Penyusunan Kajian Tata Niaga Perikanan Kota Tarakan pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.	270.000.000,00	2.250.000,00	27.000.000,00	29.250.000,00	240.750.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18/12/2023	09941/SP2D/2023	Kajian	Kajian Studi Penelitian dan bantuan teknik (Penyusunan Dokumen Evaluasi RPD) pada sub kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.	150.000.000,00	1.250.000,00	15.000.000,00	16.250.000,00	133.750.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	07/12/2023	08865/SP2D/2023	Kajian	Kajian Studi Penelitian dan bantuan teknik (Pengukuran Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur IKLI Pemerintah Kota Tarakan) pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.	90.000.000,00	750.000,00	9.000.000,00	9.750.000,00	80.250.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	02/10/2023	05567/SP2D/2023	Kajian	Kajian Studi Penelitian dan bantuan teknik (Penyusunan Dokumen RPD) pada sub kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.	150.000.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00	18.750.000,00	131.250.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	07/12/2023	08865/SP2D/2023	Kajian	Kajian Studi Penelitian dan bantuan teknik (Penyusunan Borang Fakultas Kedokteran Universitas Borneo Tarakan) pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.	250.000.000,00	2.083.333,33	25.000.000,00	27.083.333,33	222.916.666,67
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18/12/2023	09942/SP2D/2023	Software	Kajian Penyusunan Dokumen Rancangan Perwali RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045	300.000.000,00	2.500.000,00	30.000.000,00	32.500.000,00	267.500.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	22/07/2024	65.71/04.0/000154/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/P1/9/2024	Kajian	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029	120.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	114.000.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	05/08/2024	65.71/04.0/000151/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/P1/9/2024	Kajian	Penyusunan Rancangan, Rancangan Akhir, Naskah Akademik, dan Ranperda RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2029	300.000.000,00	-	12.500.000,00	12.500.000,00	287.500.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	24/07/2024	65.71/04.0/000160/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/PR/10/2024	Kajian	Kajian Peningkatan Kualitas Rumput Laut Melalui Kultur Jaringan	250.000.000,00	-	12.500.000,00	12.500.000,00	237.500.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18/10/2024	65.71/04.0/000177/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/PR/10/2024	Kajian	Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kota Sehat Kota Tarakan	100.000.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	97.500.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	28/11/2024	65.71/04.0/000226/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/PR/12/2024	Kajian	Survey IKLI Tahun 2024	110.000.000,00	-	1.833.333,33	1.833.333,33	108.166.666,67
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	05/12/2024	65.71/04.0/000244/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/PR/12/2024	Kajian	Kajian Pengembangan Modal Diseminasi Hasil Pembangunan di Kota Tarakan	150.000.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	148.750.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	05/12/2024	65.71/04.0/000245/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/PR/12/2024	Kajian	Kajian Penguatan Zona Integritas menuju Layanan Publik Prima di Pukesmas Kota Tarakan Tahun 2024	150.000.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	148.750.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	05/12/2024	65.71/04.0/000246/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/PR/12/2024	Kajian	Kajian Penguatan Zona Integritas menuju Layanan Publik Prima di Pukesmas Kota Tarakan Tahun 2024	150.000.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	148.750.000,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	29/10/2024	65.71/04.0/000247/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/PR/12/2024	Kajian	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD)Kota Tarakan	58.000.000,00	-	1.450.000,00	1.450.000,00	56.550.000,00
					SUBTOTAL	**4.167.028.000,00**	**1.283.340.166,68**	**227.890.133,33**	**1.511.230.300,01**	**2.655.797.699,99**
33	Dinas Lingkungan Hidup	17/12/2013	14828/SP2D/2013	Software	Pengadaan Software Komputer Kegiatan Pengembangan Informasi Lingkungan - BPLH	37.180.000,00	37.180.000,00		37.180.000,00	-
34	Dinas Lingkungan Hidup	19/12/2012	14707/SP2D/2012	Software	Pembuatan website DKPP Tarakan kepada CV Gloria Akar Daya - DKPP	25.300.000,00	25.300.000,00		25.300.000,00	-

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanggal	No. SP2D	Jenis	Uraian	Jumlah	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Akumulasi Amortisasi 2023	Nilai Buku
35	Dinas Lingkungan Hidup	24/12/2013	17624/SP2D/2013	Software	Pembuatan data base pemakaman di kecamatan tarakan timur kepada CV KOISSON PRATAMA - DKPP	29.820.000,00	29.820.000,00		29.820.000,00	-
36	Dinas Lingkungan Hidup	10/08/2016	-	Software	Aplikasi Pengawasan dan Pelaporan Tenaga Lapangan - DKPP	38.000.000,00	28.183.333,33	3.800.000,00	31.983.333,33	6.016.666,67
37	Dinas Lingkungan Hidup	29/11/2024	65.71/11.0/000049/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Kajian	Dokumen Inventarisasi Jenis Tanaman di Hutan Kota Sawah Lunto	39.571.500,00		659.525,00	659.525,00	38.911.975,00
38	Dinas Lingkungan Hidup	13/12/2024	65.71/11.0/000068/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Kajian	Dokumen KLHS RPJMD	94.489.000,00		787.408,33	787.408,33	93.701.591,67
40	Dinas Lingkungan Hidup	14/12/2024	65.71/11.0/000070/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Kajian	Dokumen Keanekaragaman Hayati	99.400.500,00		828.337,50	828.337,50	98.572.162,50
41	Dinas Lingkungan Hidup	17/12/2024	65.71/11.0/000064/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Kajian	Dokumen Inventarisasi Dan Identifikasi Pengelolaan Limbah B3	43.745.100,00		364.542,50	364.542,50	43.380.557,50
					SUBTOTAL	**407.506.100,00**	**120.483.333,33**	**6.439.813,33**	**126.923.146,66**	**280.582.953,34**
					Versi EBMD	407.506.100,00	120.483.333,33	6.439.813,33	126.923.146,67	280.582.953,33
					Selisih	-	-	-	(0,01)	0,01
42	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29/12/2010	17326/SP2D/2010	Software	Pengadaan Sistem E-Office BPMPPKB	71.100.000,00	71.100.000,00	-	71.100.000,00	-
43	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31/10/2024	65.71/11.0/000045/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.08.2.14.0.00.01.0000/11/2024	Kajian	dokumen kajian grand design pembangunan kependudukan (GDPK) kegiatan penyediaan dan pengolahan data kependudukan	70.285.440,00		1.757.136,00	1.757.136,00	68.528.304,00
					SUBTOTAL	**141.385.440,00**	**71.100.000,00**	**1.757.136,00**	**72.857.136,00**	**68.528.304,00**
44	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	22/11/2013	11325/SP2D/2013	Software	Pembuatan Website Bandiklat Kota Tarakan Tahun 2013	29.700.000,00	29.700.000,00	-	29.700.000,00	-
45	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	31/12/2009		Software	Pengadaan Aplikasi Info SPM dan SP2D	39.500.000,00	39.500.000,00	-	39.500.000,00	-
46	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	31/12/2009		Software	Pengadaan Software Simpatda	47.850.000,00	47.850.000,00	-	47.850.000,00	-
47	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	29/12/2010		Software	Pengembangan Aplikasi Info SPM dan SP2D	44.950.000,00	44.950.000,00	-	44.950.000,00	-
48	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	29/12/2010		Software	Pengembangan Software Simpatda	47.000.000,00	47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
49	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	28/12/2012	17120/SP2D/2012	Software	Pengadaan Software Komputer berupa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan PBB untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana PBB	198.000.000,00	198.000.000,00	-	198.000.000,00	-
50	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	07/05/2013	02078/SP2D/2013	Software	Pengadaan Software Mesin Sidik Jari Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Jaringan Informasi Keuangan untuk keperluan DPPKA Kota Tarakan	29.755.000,00	29.755.000,00	-	29.755.000,00	-
51	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	18/12/2013	15578/SP2D/2013	Software	Pengadaan Aplikasi e-office untuk keperluan DPPKA Kota Tarakan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	55.000.000,00	-
52	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	18/12/2013	15757/SP2D/2013	Software	Pengadaan 1 (Satu) Unit Electricity Treatment System (ETS) untuk keperluan DPPKA Kota Tarakan Tahun 2013	54.850.000,00	54.850.000,00	-	54.850.000,00	-
53	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	29/12/2014	16625/SP2D/2014	Software	Belanja Pengadaan Mainframe/Server, Peralatan E-Paper, Pengadaan Website dan Pembuatan E-Paper Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor - DISHUTAMBEN	99.990.000,00	90.824.250,00	9.165.750,00	99.990.000,00	-

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanggal	No. SP2D	Jenis	Uraian	Jumlah	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Akumulasi Amortisasi 2023	Nilai Buku
54	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16/09/2014	08282/SP2D/2014	Software	Pengadaan Software SMS Gateway untuk Keperluan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan	60.445.000,00	56.415.333,33	4.029.666,67	60.445.000,00	-
55	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16/09/2014	08283/SP2D/2014	Software	Pengadaan Software Komputer berupa Aplikasi Pengelolaan data BPHTB untuk Keperluan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan	104.885.000,00	97.892.666,67	6.992.333,33	104.885.000,00	-
56	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30/12/2016	09056/SP2D/2016	Software	Pengadaan Software Komputer Lab Bahasa	14.750.000,00	10.447.916,67	1.475.000,00	11.922.916,67	2.827.083,33
57	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	27/12/2016	08553/SP2D/2016	Software	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Perkantoran	199.700.000,00	141.454.166,67	19.970.000,00	161.424.166,67	38.275.833,33
58	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30/12/2016	08668/SP2D/2016	Software	Pengadaan Software Pengadaan Aplikasi Online Payment PBB	49.500.000,00	35.062.500,00	4.950.000,00	40.012.500,00	9.487.500,00
59	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	18/4/2017		Software	Pengadaan Aplikasi TPP PNS Berbasis Kehadiran dan Kinerja	99.700.000,00	67.297.500,00	9.970.000,00	77.267.500,00	22.432.500,00
60	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	17/09/2018		Software	Pengadaan Software Aplikasi TPP PNS Berbasis Kehadiran	29.350.000,00	15.653.333,33	2.935.000,00	18.588.333,33	10.761.666,67
61	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	21/12/2020		Software	Pengadaan Aplikasi Host To Host BPHTB Sesuai SPK Nomor 47/SPK/BPPRD/XI/2020 Tanggal 04 Nopember 2020 untuk Keperluan BPPRD Kota Tarakan Tahun 2020	120.835.000,00	37.257.458,33	12.083.500,00	49.340.958,33	71.494.041,67
62	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	21/12/2020		Software	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi PBB Sesuai SPK Nomor 46/SPK/BPPRD/XI/2020 Tanggal 02 Nopember 2020 untuk Keperluan BPPRD Kota Tarakan Tahun 2020	87.560.000,00	26.997.666,67	8.756.000,00	35.753.666,67	51.806.333,33
63	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	08/11/2021		Software	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jaringan Berdasarkan SPK No. 209.2/SPK/BPKPAD/XI/2021 TGL. 8 November 2021	165.000.000,00	35.750.000,00	16.500.000,00	52.250.000,00	112.750.000,00
64	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	11/11/2021		Software	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi PBB Berdasarkan SPK No.212/SPK/BPKPAD/XI/2021 TGL. 11 November 2021	154.000.000,00	33.366.666,67	15.400.000,00	48.766.666,67	105.233.333,33
					SUBTOTAL	**1.732.320.000,00**	**1.195.024.458,34**	**112.227.250,00**	**1.307.251.708,34**	**425.068.291,66**
67	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17/09/2013	08327/SP2D/2013	Software	Pengembangan sistem software Display informasi Harga Pasar Kegiatan Pembangunan Pusat Penampungan Produksi Hasil Tani dan Kebun Masyarakat	33.286.000,00	33.286.000,00	-	33.286.000,00	-
68	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19/12/2012	14467/SP2D/2012	Software	Pengadaan Website kegiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor	56.100.000,00	56.100.000,00	-	56.100.000,00	-
					SUBTOTAL	**89.386.000,00**	**89.386.000,00**	**-**	**89.386.000,00**	**-**
69	Dinas Pendidikan	08/12/2011	12407/SP2D/2011	Software	Pengadaan Software Management dan Laporan Keuangan Dana BOS	95.744.000,00	95.744.000,00	-	95.744.000,00	-
70	Dinas Pendidikan	29/12/2014	16544/SP2D/2014	Software	BELANJA PENGADAAN APLIKASI SIMPEG	198.500.000,00	180.304.166,67	18.195.833,33	198.500.000,00	-
71	Dinas Pendidikan	29/12/2015	12948/SP2D/2015	Software	Pengadaan Aplikasi SIMPTK	180.000.000,00	145.500.000,00	18.000.000,00	163.500.000,00	16.500.000,00
72	Dinas Pendidikan	31/12/2016	-	Software	(SDN 048) Aplikasi Tunjangan Kinerja	5.000.000,00	3.541.666,67	500.000,00	4.041.666,67	958.333,33
73	Dinas Pendidikan	31/12/2017		Software	(SMPN 2) Microsoft Office 2016	27.524.500,00	16.744.070,83	2.752.450,00	19.496.520,83	8.027.979,17
74	Dinas Pendidikan	18/12/2024	65.71/11.0/000095/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Software	PEMBUATAN WEBSITE	10.500.000,00		87.500,00	87.500,00	10.412.500,00
					SUBTOTAL	**517.268.500,00**	**441.833.904,17**	**39.535.783,33**	**481.369.687,50**	**35.898.812,50**
75	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	15/10/2014	09361/SP2D/2014	Software	Pengadaan software komputer berupa pengadaan pengembangan aplikasi operasional UKM Center (point of sales) pada keg. penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	14.960.000,00	13.838.000,00	1.122.000,00	14.960.000,00	-
76	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	01/12/2014	11581/SP2D/2014	Software	Pengadaan software komputer berupa pengadaan pengembangan aplikasi e-Commerce (online store) KUMKM pada keg. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	26.400.000,00	23.980.000,00	2.420.000,00	26.400.000,00	-

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanggal	No. SP2D	Jenis	Uraian	Jumlah	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Akumulasi Amortisasi 2023	Nilai Buku
77	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	09/12/2014	12021/SP2D/2014	Software	Pengadaan software IT Data Base KUKM tahap 2 pada kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	33.000.000,00	29.975.000,00	3.025.000,00	33.000.000,00	-
78	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	15/12/2014	13296/SP2D/2014	Software	Pengadaan software dan jaringan komputer (upgrade aplikasi website) pada keg. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	44.429.000,00	40.356.341,67	4.072.658,33	44.429.000,00	-
79	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	06/12/2012	11557/SP2D/2012	Software	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Database Koperasi pada kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Koperasi (RM)	62.315.000,00	62.315.000,00	-	62.315.000,00	-
80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	23/12/2013	17030/SP2D/2013	Software	Pengadaan software komputer kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dan Biaya belanja modal pengadaan software komputer berupa pengembangan sistem aplikasi pendataan (data base) keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	99.275.000,00	99.275.000,00	-	99.275.000,00	-
81	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	16/12/2022	17030/SP2D/2013	Software	Pengadaan Aplikasi Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Berupa Software Parkir Pasar Tenguyun	28.127.000,00	3.047.091,67	2.812.700,00	5.859.791,67	22.267.208,33
82	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	16/12/2022	17030/SP2D/2013	Software	Pengadaan Aplikasi Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Berupa Software Parkir Pasar THM	40.027.000,00	4.336.258,33	4.002.700,00	8.338.958,33	31.688.041,67
					SUBTOTAL	**348.533.000,00**	**277.122.691,67**	**17.455.058,33**	**294.577.750,00**	**53.955.250,00**
83	Dinas Kesehatan	27/12/2010	16664/SP2D/2010	Software	Pengadaan pengembangan software SIK on line	42.800.000,00	42.800.000,00	-	42.800.000,00	-
84	Dinas Kesehatan	29/12/2010	17324/SP2D/2010	Software	Pengadaan Jasa pengadaan software SIMPEG dan Software Barang	87.250.000,00	87.250.000,00	-	87.250.000,00	-
85	Dinas Kesehatan	28/12/2011	16243/SP2D/2011	Software	Pengadaan software program pelaporan P2TB	96.000.000,00	96.000.000,00	-	96.000.000,00	-
86	Dinas Kesehatan	28/12/2011	16277/SP2D/2011	Software	Pengadaan software klinik sanitasi survellans based	48.965.000,00	48.965.000,00	-	48.965.000,00	-
87	Dinas Kesehatan	28/12/2011	16278/SP2D/2011	Software	Pengadaan/pengembangan software SIMPUS on line	98.000.000,00	98.000.000,00	-	98.000.000,00	-
					SUBTOTAL	**373.015.000,00**	**373.015.000,00**	**-**	**373.015.000,00**	**-**
88	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	13/08/2012	06767/SP2D/2012	Software	Pembuatan software data base cagar budaya Kegiatan pengembangan Data base sistem informasi sejarah purbakala 2012 Disbudparpora Kota Tarakan - DISBUDPARPORA	36.025.000,00	36.025.000,00	-	36.025.000,00	-
89	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	31/03/2022	06767/SP2D/2012	Software	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tarakan Berupa Software Parking dan Ticketing Pantai Amal	164.400.000,00	30.140.000,00	16.440.000,00	46.580.000,00	117.820.000,00
					SUBTOTAL	**200.425.000,00**	**66.165.000,00**	**16.440.000,00**	**82.605.000,00**	**117.820.000,00**
90	Dinas Perhubungan	19/12/2012	14825/SP2D/2012	Software	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angk. berupa Pembuatan Software Komptr tentang Sist. Informasi dan Transp. Jalan Kota Tarakan berupa Aplikasi Adm. Trayek dan Ops Kend. (ATOK) dan Perlengkapannya kep. Dishub Tahun 2012	196.360.000,00	196.360.000,00	-	196.360.000,00	-
91	Dinas Perhubungan	19/12/2012	14826/SP2D/2012	Software	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ dan ASDP berupa Pembuatan Software tentang Pembuatan Sist. Infor. Data Kendaraan WAjib Uji berupa Pembuatan dan Pemasangan Aplikasi Sist. Adm. Hasil Uji Kend. Bermotor keperluan Dishub Tahun 2012	97.640.000,00	97.640.000,00	-	97.640.000,00	-
92	Dinas Perhubungan	06/09/2021		Software	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Uji PKB sebanyak 1 (satu) paket untuk keperluan dishub 2021 Berdasarkan No. 03/SPK/KIR/IX/DISHUB	43.829.000,00	10.226.766,67	4.382.900,00	14.609.666,67	29.219.333,33
					SUBTOTAL	**337.829.000,00**	**304.226.766,67**	**4.382.900,00**	**308.609.666,67**	**29.219.333,33**
93	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13/12/2011	12102/SP2D/2011	Software	Pengadaan Mail Server Kegiatan Pemeliharaan WLAN	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-
94	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13/12/2011	12232/SP2D/2011	Software	Pengadaan Aplikasi Bank Data Kegiatan Pemeliharaan WLAN	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-
95	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	26/12/2012	16291/SP2D/2012	Software	Pengadaan Software SIM e-Goverment Keperluan Diskominfo	195.000.000,00	195.000.000,00	-	195.000.000,00	-
96	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30/12/2016	-	Software	Pengadaan Aplikasi SMS Gateway	47.300.000,00	33.504.166,67	4.730.000,00	38.234.166,67	9.065.833,33

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanggal	No. SP2D	Jenis	Uraian	Jumlah	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Akumulasi Amortisasi 2023	Nilai Buku
97	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30/12/2016	-	Software	Pengadaan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	47.000.000,00	33.291.666,67	4.700.000,00	37.991.666,67	9.008.333,33
98	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30/12/2016	-	Software	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat	47.800.000,00	33.858.333,33	4.780.000,00	38.638.333,33	9.161.666,67
99	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30/12/2016	-	Software	Pengadaan Aplikasi Paperless System	47.350.000,00	33.539.583,33	4.735.000,00	38.274.583,33	9.075.416,67
100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19/12/2019		Software	Pengadaan Aplikasi Layanan Berbasis WEB (Programer Dokumentasi Aplikasi Sistem Pelayanan Customer Service Disdukcapil & Kecamatan) dan Aplikasi untuk Sistem Pelayanan (Customer Service)	38.032.500,00	15.529.937,50	3.803.250,00	19.333.187,50	18.699.312,50
101	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20/12/2019		Software	Pengadaan Aplikasi Layanan Publik Berbasis Web (Analisis Sistem Informasi Pelayanan Customer Service Disdukcapil dan Kecamatan)	38.032.500,00	15.529.937,50	3.803.250,00	19.333.187,50	18.699.312,50
102	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	03/08/2020		Software	Pengadaan Software Aplikasi untuk Layanan Publik (Aplikasi PPDB Online)	59.000.000,00	20.158.333,33	5.900.000,00	26.058.333,33	32.941.666,67
103	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10/12/2020		Software	Pengadaan Software Aplikasi untuk Layanan Publik (Aplikasi E-Parkir)	49.500.000,00	15.262.500,00	4.950.000,00	20.212.500,00	29.287.500,00
104	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10/12/2020		Software	Pengadaan Software Aplikasi Untuk Layanan Publik (Aplikasi Perpustakaan Online)	43.000.000,00	13.258.333,33	4.300.000,00	17.558.333,33	25.441.666,67
105	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10/12/2020		Software	Pengadaan Software Aplikasi Untuk Layanan Publik (Aplikasi Pelaporan Penanaman Modal)	13.500.000,00	4.162.500,00	1.350.000,00	5.512.500,00	7.987.500,00
106	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11/12/2020		Software	Pengadaan Software Aplikasi untuk Layanan Publik (E-Presensi)	63.800.000,00	19.671.666,67	6.380.000,00	26.051.666,67	37.748.333,33
107	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	28/06/2021		Software	Pengadaan Aplikasi untuk Layanan Publik (Pemeliharaan aplikasi PPDB)	23.800.000,00	6.148.333,33	2.380.000,00	8.528.333,33	15.271.666,67
108	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11/12/2023	09081/SP2D/2023	Software	Pengadaan Software Aplikasi Dashboard TCC keperluan TCC	72.150.000,00	601.250,00	7.215.000,00	7.816.250,00	64.333.750,00
109	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	22/11/2024		Software	Sofware Aplikasi Simpeg keperluan DKISP	31.000.000,00	-	516.666,67	516.666,67	30.483.333,33
110	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	22/11/2024		Software	Pengembangan Aplikasi Streaming CCTV keperluan DKISP	27.750.000,00	-	462.500,00	462.500,00	27.287.500,00
					SUBTOTAL	**892.015.000,00**	**487.516.541,66**	**60.005.666,67**	**547.522.208,33**	**344.492.791,67**
111	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27/12/2012	16880/SP2D/2012	Software	Pengadaan Software E-Office Sesuai dengan SPK No : 471.B/SPK/DPU-TR/XI/2012 Tanggal 23 Nopember 2012	49.742.000,00	49.742.000,00	-	49.742.000,00	-
112	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30/12/2013	18719/SP2D/2013	Software	Pembuatan Software SIM DPUTR Sesuai dengan SPK No : 613.A/SPK/DPUTR/HD/XII/2013 Tanggal 6 November 2013	199.070.000,00	199.070.000,00	-	199.070.000,00	-
113	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29/12/2014	17150/SP2D/2014	Software	Pengadaan Software Komputer Pembuatan Database Perencanaan, Sesusai dengan kontrak No : 02/SPK/PL-DBASE-PRC/2014 Tgl. 25 September 2014	146.375.180,00	132.957.455,17	13.417.724,83	146.375.180,00	-
114	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22/12/2023	10942/SP2D/2023	Kajian	Kajian Pembuatan dan Updating Sumber Data Peta dasar Kec.Trk Barat SPK No. 03/PPK/SPK/PETA DASAR TARBA/XI/2023 Tgl. 10 Nopember 2023	98.579.000,00	821.491,67	9.857.900,04	10.679.391,71	87.899.608,29
115	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22/12/2023	11049/SP2D/2023	Kajian	Kajian Pendampingan Pembuatan dan Updating Sumber Data Peta dasar Kec.Trk Tengah SPK No. 03/PPK/SPK/PETA DASAR TARTENG/XI/2023 Tgl. 10 Nopember 2023	98.579.000,00	821.491,67	9.857.900,04	10.679.391,71	87.899.608,29
116	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22/12/2023	11050/SP2D/2023	Kajian	Kajian Pendampingan Pembuatan dan Updating Sumber Data Peta dasar Kec.Trk Utara SPK No. 03/PPK/SPK/PETA DASAR TARUT/XI/2023 Tgl. 10 Nopember 2023	98.301.000,00	819.175,00	9.830.100,00	10.649.275,00	87.651.725,00
117	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22/12/2023	11051/SP2D/2023	Kajian	Kajian Pendampingan Pembuatan dan Updating Sumber Data Peta dasar Kec.Trk Timur SPK No. 03/PPK/SPK/PETA DASAR TARTIM/XI/2023 Tgl. 10 Nopember 2023	98.301.000,00	819.175,00	9.830.100,00	10.649.275,00	87.651.725,00
118	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22/11/2024		Software	Geoportal Enablement ArcGIS PRO ESRI	345.000.000,00	-	5.750.000,00	5.750.000,00	339.250.000,00
					SUBTOTAL	**1.133.947.180,00**	**385.050.788,51**	**58.543.724,91**	**443.594.513,42**	**690.352.666,58**
					Versi EBMD	1.133.947.180,00	388.332.121,80	58.543.724,91	446.875.846,75	687.071.333,25

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanggal	No. SP2D	Jenis	Uraian	Jumlah	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Akumulasi Amortisasi 2023	Nilai Buku
					Selisih	-	(3.281.333,29)	-	(3.281.333,33)	3.281.333,33
119	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17/04/2012	01563/SP2D/2012	Software	Pengadaan Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan Keperluan Kaperpus-KD dan Bayar Kegiatan Pendapatan / Penataan / Dokumen / Arsip Daerah Keperluan Kaperpus - KD	99.535.700,00	99.535.700,00	-	99.535.700,00	-
120	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16/07/2012	05022/SP2D/2012	Software	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Keperluan Kaperpus-KD	59.360.000,00	59.360.000,00	-	59.360.000,00	-
121	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26/04/2013	01714/SP2D/2013	Software	Biaya Penyempurnaan Software program Kearsipan Keperluan kaperpus-Kd	34.100.000,00	34.100.000,00	-	34.100.000,00	-
122	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22/07/2013	05546/SP2D/2013	Software	Biaya pemeliharaan Peralatan jaringan Informasi Kearsipan keperluan Kaperpus-Kd	34.985.000,00	34.985.000,00	-	34.985.000,00	-
123	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18/12/2013	15453/SP2D/2013	Software	Pengadaan Software Program Database Penyimpanan Data Dilingkungan Instansi Pemerintah	24.772.000,00	24.772.000,00	-	24.772.000,00	-
124	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12/07/2010	04650/SP2D/2010	Software	Pembelian software otomatis arsip in aktif	35.000.000,00	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
125	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	09/02/2011	00050/SP2D/2011	Software	Pembuatan database arsip on line dan Bayar Pengadaan maintenance program otomatis arsip in aktif	70.000.000,00	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-
126	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31/10/2011	08938/SP2D/2011	Software	Pengadaan software perpustakaan	74.096.000,00	74.096.000,00	-	74.096.000,00	-
127	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28/05/2013	02920/SP2D/2013	Software	Pengembangan Program data base dan Anjungan Kaperpus-Kd	79.612.500,00	79.612.500,00	-	79.612.500,00	-
128	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16/06/2014	03700/SP2D/2014	Software	Pengembangan Upgrade/Penyempurnaan Sofware Program Kearsipan Keperluan Kaperpus-KD Kota Tarakan	34.900.000,00	33.445.833,33	1.454.166,67	34.900.000,00	-
129	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	06/08/2017		Software	Penduplikatan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika	10.000.000,00	6.416.666,67	1.000.000,00	7.416.666,67	2.583.333,33
130	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18/9/2017		Software	Database Sistem Informasi arsip statis	20.000.000,00	12.666.666,67	2.000.000,00	14.666.666,67	5.333.333,33
131	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10/04/2017		Software	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
132	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10/04/2017		Software	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
133	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10/04/2017		Software	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
134	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10/04/2017		Software	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
135	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10/04/2017		Software	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
136	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29/11/2017		Software	Pembuatan website Perpustakaan	15.000.000,00	9.250.000,00	1.500.000,00	10.750.000,00	4.250.000,00
137	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	09/11/2018		Software	Pembangunan Sistem Keamanan Penyimoanan Data	25.000.000,00	12.916.666,67	2.500.000,00	15.416.666,67	9.583.333,33
					SUBTOTAL	**631.361.200,00**	**596.282.033,34**	**9.954.166,67**	**606.236.200,01**	**25.124.999,99**
138	Kec. Tarakan Barat	14/08/2012	06889/SP2D/2012	Software	Penyusunan Sistem Infomasi Tehadap Layanan Publik Berupa Pengadaan Sofware Komputer Sistem Informasi Simpaten Pada Kantor Camat Tarakan Barat Tahun 2012	51.500.000,00	51.500.000,00	-	51.500.000,00	-
139	Kec. Tarakan Barat	08/11/2013	10630/SP2D/2013	Software	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Berupa Belanja Perawatan Dan Update Software Sistem Informasi Layanan Publik Tahun 2013	34.450.000,00	34.450.000,00	-	34.450.000,00	-
140	Kec. Tarakan Barat	20/12/2012	15023/SP2D/2012	Software	Pengadaan Software Komputer Aplikasi Administrasi Pelayanan Informasi Kelurahan Kr. Anyar Pantai Th. 2012 - Kel. Kr. Anyar Pantai	194.600.000,00	194.600.000,00	-	194.600.000,00	-
141	Kec. Tarakan Barat	30/12/2013	18809/SP2D/2013	Software	Pengadaan Barang Hardware Kegiatan E-Document Kantor Kelurahan Karang Rejo Ta 2013 - Kel. Kr. Rejo	4.899.999,00	4.899.999,00	-	4.899.999,00	-
					SUBTOTAL	**285.449.999,00**	**285.449.999,00**	**-**	**285.449.999,00**	**-**
142	Kec. Tarakan Tengah	27/12/2011	16049/SP2D/2011	Software	Pengadaan Software Sistem Pelayanan Terpadu	82.500.000,00	82.500.000,00	-	82.500.000,00	-
143	Kec. Tarakan Tengah	14/12/2012	13330/SP2D/2012	Software	Pengadaan Software Komputer Software Sistem Informasi Surat (Speakless) (CV. TUNAS MUDA JAYA)	28.880.000,00	28.880.000,00	-	28.880.000,00	-
144	Kec. Tarakan Tengah	21/12/2012	15502/SP2D/2012	Software	Pengadaan Software Komputer (Pembuatan Aplikasi One Stop Service) (CV. Tunas Muda Jaya)	34.980.000,00	34.980.000,00	-	34.980.000,00	-
145	Kec. Tarakan Tengah	04/12/2013	12711/SP2D/2013	Software	Pengadaan Software Komputer (Pemutakhiran Aplikasi Surat) (CV. TUNAS MUDA JAYA)	14.850.000,00	14.850.000,00	-	14.850.000,00	-
146	Kec. Tarakan Tengah	24/12/2013	17616/SP2D/2013	Software	Pengadaan Aplikasi Electronic Management System (EDMS) Keg. Penyususnan Informasi Terhadap Layanan Publik 2013 - Kel Kampung 1 Skip	74.850.000,00	74.850.000,00	-	74.850.000,00	-

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanggal	No. SP2D	Jenis	Uraian	Jumlah	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Akumulasi Amortisasi 2023	Nilai Buku
147	Kec. Tarakan Tengah	31/12/2013	19134/SP2D/2013	Software	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik berupa (EDMS) Kantor Kelurahan Sebengkok tahun 2013	47.000.000,00	47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
148	Kec. Tarakan Tengah	12/12/2013	13633/SP2D/2013	Software	Pengadaan Sistem Informasi Kelurahan Selumit Thn. 2013 (Pembuatan Sarana Informasi Publik)	49.940.000,00	49.940.000,00	-	49.940.000,00	-
149	Kec. Tarakan Tengah	31/12/2013	19140/SP2D/2013	Software	Pengadaan Aplikasi EDMS Kel. Selumit Thn. 2013	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
150	Kec. Tarakan Tengah	31/12/2013	19130/SP2D/2013	Software	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Kelurahan Selumit Pantai TA 2013	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
					SUBTOTAL	**427.400.000,00**	**427.400.000,00**	**-**	**427.400.000,00**	**-**
151	Kec. Tarakan Utara	18/12/2013	15768/SP2D/2013	Software	Pengadaan Komputer/PC dan Software Komputer pada Kantor Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2013	34.215.500,00	34.215.500,00	-	34.215.500,00	-
152	Kec. Tarakan Utara	17/12/2013	14814/SP2D/2013	Software	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Pada Kelurahan Juata Laut Tahun Anggaran 2013 - Kel Juata Laut	73.900.000,00	73.900.000,00	-	73.900.000,00	-
153	Kec. Tarakan Utara	31/12/2013	19122/SP2D/2013	Software	Pengadaan Komputer Mainframe Server, Scanner, Software Aplikasi E-Document Manajemen System Kelurahan Juata Permai Tahun 2013 - Kel Juata Permai	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
					SUBTOTAL	**155.315.500,00**	**155.315.500,00**	**-**	**155.315.500,00**	**-**
154	Kec. Tarakan Timur	17/12/2013	15365/SP2D/2013	Software	Pengadaan Sistem Informasi Kelurahan Kampung Empat Tahun Anggaran 2013 - Kel Kampung Empat	49.940.000,00	49.940.000,00	-	49.940.000,00	-
155	Kec. Tarakan Timur	31/12/2013	19126/SP2D/2013	Software	Penyusunan system informasi terhadap layanan public berupa belanja, komputer PC, Scanner, Aplikasi - Kel Kampung Enam	47.000.000,00	47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
156	Kec. Tarakan Timur	19/12/2012	14385/SP2D/2012	Software	Pengadaan Software Komputer Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Kantor Kelurahan Mamburungan Tahun 2012 - Kel. Mamburungan	44.500.500,00	44.500.500,00	-	44.500.500,00	-
157	Kec. Tarakan Timur	31/12/2013	19129/SP2D/2013	Software	Pengadaan Aplikasi (EDMS) Kantor Kelurahan Mamburungan Tahun 2013 - Kel. Mamburungan	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
158	Kec. Tarakan Timur	31/12/2013	19146/SP2D/2013	Software	Pengadaan Aplikasi E-Document Management System (EDMS) untuk Kantor Kel. Mamburungan Timur Tahun 2013	71.800.000,00	71.800.000,00	-	71.800.000,00	-
159	Kec. Tarakan Timur	26/04/2013	01706/SP2D/2013	Software	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap layanan Publik TA 2013 - Kelurahan Lingkas Ujung	72.000.000,00	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-
160	Kec. Tarakan Timur	31/12/2013	19141/SP2D/2013	Software	Pengadaan Aplikasi E Document Management System Kelurahan Lingkas Ujung TA 2013	47.350.000,00	47.350.000,00	-	47.350.000,00	-
161	Kec. Tarakan Timur	09/05/2014	02083/SP2D/2014	Software	Pengadaan Aplikasi Sms Gateway Kelurahan Lingkas Ujung Tahun Anggaran 2014	65.000.000,00	62.833.333,33	2.166.666,67	65.000.000,00	-
162	Kec. Tarakan Timur	09/05/2014	02084/SP2D/2014	Software	Pengadaan Aplikasi E-Library dan Komputer Desktop Kelurahan Lingkas Ujung Tahun Anggaran 2014	75.000.000,00	72.500.000,00	2.500.000,00	75.000.000,00	-
163	Kec. Tarakan Timur	17/06/2014	03747/SP2D/2014	Software	Pengadaan Software Komputer Kantor Kelurahan Lingkas Ujung Tahun Anggaran 2014	8.895.000,00	8.524.375,00	370.625,00	8.895.000,00	-
					SUBTOTAL	**528.685.500,00**	**523.648.208,33**	**5.037.291,67**	**528.685.500,00**	**-**
164	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	05/12/2012	11390/SP2D/2012	Software	Pengadaan Software Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Badan Kesbang, Pol dan Linmas 2012	69.900.000,00	69.900.000,00	-	69.900.000,00	-
					SUBTOTAL	**69.900.000,00**	**69.900.000,00**	**-**	**69.900.000,00**	**-**
165	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30/04/2012	01912/SP2D/2012	Software	Pengadaan Software Sistem Informasi Administrasi Berkas pada KPPT Tarakan TA 2012	74.900.000,00	74.900.000,00	-	74.900.000,00	-
166	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12/11/2012	09941/SP2D/2012	Software	Penyempurnaan Software Pelayanan Administrasi Perizinan pada KPPT Kota Tarakan Tahun Anggaran 2012	99.900.000,00	99.900.000,00	-	99.900.000,00	-
167	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28/11/2012	11046/SP2D/2012	Software	Pengadaan Software SMS Gateway dan KartuTanda Anggota Pengurusan Izin Usaha pada KPPT Kota Tarakan Ta 2012	99.900.000,00	99.900.000,00	-	99.900.000,00	-
168	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13/12/2012	12874/SP2D/2012	Software	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah untuk KPPT Kota Tarakan TA 2012	99.740.000,00	99.740.000,00	-	99.740.000,00	-
169	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20/06/2013	04163/SP2D/2013	Software	Pengadaan Software Sistem Informasi Administrasi Berkas pada KPPT Kota Tarakan TA 2013	99.760.000,00	99.760.000,00	-	99.760.000,00	-

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanggal	No. SP2D	Jenis	Uraian	Jumlah	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Akumulasi Amortisasi 2023	Nilai Buku
170	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19/12/2014	14794/SP2D/2014	Software	Pengadaan Website u/ KPPT Kota Tarakan TA. 2014	3.000.000,00	2.725.000,00	275.000,00	3.000.000,00	-
171	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	05/12/2015	11793/SP2D/2015	Software	Pengadaan Sistem Perizinan daerah On-Line (Aplikasi Izin IMB dan Ho) 1 paket - KPPT	19.000.000,00	15.358.333,33	1.900.000,00	17.258.333,33	1.741.666,67
172	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	07/09/2016	05352/SP2D/2016	Software	Pengadaan Aplikasi Perizinan Online yang terintegrasi SPIPISE - KPPT	24.900.000,00	18.260.000,00	2.490.000,00	20.750.000,00	4.150.000,00
					SUBTOTAL	**521.100.000,00**	**510.543.333,33**	**4.665.000,00**	**515.208.333,33**	**5.891.666,67**
173	Sekretariat Daerah	05/12/2012	11344/SP2D/2012	Software	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (Simbangda) Kota Tarakan Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan, Sesuai Dengan Bukti Yang Terlampir.	104.385.000,00	104.385.000,00	-	104.385.000,00	-
174	Sekretariat Daerah	18/12/2012	14376/SP2D/2012	Software	Pembuatan program Sofware SPPD dan pelaporan serapan anggaran keperluan bagian umum setda kota tarakan	7.997.000,00	7.997.000,00	-	7.997.000,00	-
175	Sekretariat Daerah	21/12/2012	15420/SP2D/2012	Software	Pengembangan Sofware SIMEK Kep. Bagian Perkonomian Setda Kota Tarakan Tahun 2012 Pada CV. Cahaya Mas, Sesuai Dengan Bukti Yang terlampir.	24.200.000,00	24.200.000,00	-	24.200.000,00	-
176	Sekretariat Daerah	27/12/2012	16698/SP2D/2012	Software	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (Simbangda) pada bagian pembangunan setda kota tarakan	243.565.000,00	243.565.000,00	-	243.565.000,00	-
177	Sekretariat Daerah	27/12/2012	16986/SP2D/2012	Software	Pengadaan Software Rencana Kegiatan Walikota Tarakan Pada CV 3d, Sesuai Dengan Butki yang terlampir.	4.950.000,00	4.950.000,00	-	4.950.000,00	-
178	Sekretariat Daerah	20/12/2013	16874/SP2D/2013	Software	Pengadaan software keperluan Kantor Setda Kota Tarakan kepada CV.Gloria Akar Daya Tarakan, sesuai bukti terlampir.	14.960.000,00	14.960.000,00	-	14.960.000,00	-
179	Sekretariat Daerah	06/11/2014	10231/SP2D/2014	Software	Pengadaan Aplikasi Manajemen Geoserver Bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV. CLASNET	168.025.000,00	154.022.916,67	14.002.083,33	168.025.000,00	-
180	Sekretariat Daerah	25/11/2014	11308/SP2D/2014	Software	Pengadaan Aplikasi SIMKEL (Sistem Informasi Kelurahan) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Bagian Pemerintahan Setda Kota Tarakan pada CV. PROTIKA KOMPUTINDO	136.972.000,00	125.557.666,67	11.414.333,33	136.972.000,00	-
181	Sekretariat Daerah	27/11/2014	11533/SP2D/2014	Software	Pengembangan Software SIMEK Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik pada CV. SABDA GUNA	49.885.000,00	45.727.916,67	4.157.083,33	49.885.000,00	-
182	Sekretariat Daerah	29/12/2014	16638/SP2D/2014	Software	Pengadaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Daerah) Kegiatan penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV.DAMO IDEKU	193.500.000,00	175.762.500,00	17.737.500,00	193.500.000,00	-
183	Sekretariat Daerah	29/12/2014	17082/SP2D/2014	Software	Pengadaan Aplikasi SIMTA (Sistem Informasi Kecamatan) Bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV. CLASNET	71.918.000,00	65.325.516,67	6.592.483,33	71.918.000,00	-
184	Sekretariat Daerah	30/12/2014	17318/SP2D/2014	Software	Pengadaan Aplikasi Pemetaan Pertanahan Serta Kependudukan Bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV. PROTIKA KOMPUTINDO	181.555.000,00	164.912.458,33	16.642.541,67	181.555.000,00	-
185	Sekretariat Daerah	29/12/2015	13203/SP2D/2015	Software	Pengadaan Aplikasi Perjalanan Dinas 1 Paket & Aplikasi Surat Dinas 1 Paket	49.830.000,00	40.279.250,00	4.983.000,00	45.262.250,00	4.567.750,00
186	Sekretariat Daerah	29/12/2015	13204/SP2D/2015	Software	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Barang 1 Paket & Aplikasi Data Kepegawaian	49.830.000,00	40.279.250,00	4.983.000,00	45.262.250,00	4.567.750,00
187	Sekretariat Daerah	29/12/2015	13163/SP2D/2015	Software	Pengadaan Aplikasi SIMKEL Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Bagian Pemerintahan	160.875.000,00	130.040.625,00	16.087.500,00	146.128.125,00	14.746.875,00
188	Sekretariat Daerah	29/12/2015	13164/SP2D/2015	Software	Pengadaan Aplikasi SIMTA Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Bagian Pemerintahan	70.070.000,00	56.639.916,67	7.007.000,00	63.646.916,67	6.423.083,33
189	Sekretariat Daerah	30/12/2015	13372/SP2D/2015	Software	Biaya Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Utilitas dan Basis dan Jaringan Utilitas pada Bagian Pembangunan	391.765.000,00	316.676.708,33	39.176.500,00	355.853.208,33	35.911.791,67
190	Sekretariat Daerah	30/12/2016	08787/SP2D/2016	Software	Pengadaan Software Aplikasi TPP Berbasis Kinerja	199.700.000,00	141.454.166,67	19.970.000,00	161.424.166,67	38.275.833,33
191	Sekretariat Daerah	25/9/2017		Software	Pengadaan Aplikasi dan Peralatan Jaringan SIMEK Bag Perekonomian Setda	19.965.000,00	12.644.500,00	1.996.500,00	14.641.000,00	5.324.000,00
192	Sekretariat Daerah	14/12/2017		Software	Pengadaan Aplikasi dan Peralatan Jaringan PIHPS Bag Perekonomian	22.275.000,00	13.550.625,00	2.227.500,00	15.778.125,00	6.496.875,00
193	Sekretariat Daerah	27/09/2024		Software	Website JDIH Kota Tarakan	19.536.000,00		651.200,00	651.200,00	18.884.800,00

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanggal	No. SP2D	Jenis	Uraian	Jumlah	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Akumulasi Amortisasi 2023	Nilai Buku
					SUBTOTAL	**2.185.758.000,00**	**1.882.931.016,68**	**167.628.224,99**	**2.050.559.241,67**	**135.198.758,33**
194	Sekretariat DPRD	18/12/2014	14531/SP2D/2014	Software	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Perkantoran/Pengadaan Software Kantor Set.DPRD Kota Tarakan Tahun 2014	49.170.000,00	44.662.750,00	4.507.250,00	49.170.000,00	-
195	Sekretariat DPRD	14/07/2021		Software	Pengadaan Software website kantor	83.011.500,00	20.752.875,00	8.301.150,00	29.054.025,00	53.957.475,00
					SUBTOTAL	**132.181.500,00**	**65.415.625,00**	**12.808.400,00**	**78.224.025,00**	**53.957.475,00**
196	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	31/12/2017	14531/SP2D/2014	Software	Pengadaan Software keperluan Windows Server	7.040.000,00	4.282.666,67	704.000,00	4.986.666,67	2.053.333,33
					SUBTOTAL	**7.040.000,00**	**4.282.666,67**	**704.000,00**	**4.986.666,67**	**2.053.333,33**
197	Inspektorat	15/12/2020	14531/SP2D/2014	Software	Pengadaan (Aplikasi Sistem Informasi) Kantor Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2020	49.000.000,00	15.108.333,33	4.900.000,00	20.008.333,33	28.991.666,67
					SUBTOTAL	**49.000.000,00**	**15.108.333,33**	**4.900.000,00**	**20.008.333,33**	**28.991.666,67**
198	Dinas Perikanan	20/05/2014	14531/SP2D/2014	Software	Pengadaan sofware komputer (Pendataan dan pembuatan kartu nelayan) - DKP	30.000.000,00	29.000.000,00	1.000.000,00	30.000.000,00	-
199	Dinas Perikanan	22/12/2014		Software	Pengadaan software komputer keperluan DKP	14.000.000,00	12.716.666,67	1.283.333,33	14.000.000,00	-
200	Dinas Perikanan	19/12/2024	65.71/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Software	Pembuatan Aplikasi Layanan SKAI	47.800.000,00		398.333,33	398.333,33	47.401.666,67
					SUBTOTAL	**91.800.000,00**	**41.716.666,67**	**2.681.666,66**	**44.398.333,33**	**47.401.666,67**
201	Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	31/12/2021	6807/SP2D/2019	Software	Pengadaan Software SIMRS Khanza dan perjalanan dinas	52.887.435,00	11.018.215,63	5.288.743,50	16.306.959,13	36.580.475,87
					SUBTOTAL	**52.887.435,00**	**11.018.215,63**	**5.288.743,50**	**16.306.959,13**	**36.580.475,87**
202	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	21/12/2024	65.71/11.0/000071/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/01/2025	Kajian	Baseline Pengurangan Kawasan Kumuh Kec. Tarakan Barat Kepada CV. Faqih Engineering Konsultan	41.680.000,00	-	347.333,33	347.333,33	41.332.666,67
					SUBTOTAL	**41.680.000,00**	**-**	**347.333,33**	**347.333,33**	**41.332.666,67**
Total						**15.520.217.354,00**	**9.683.276.249,01**	**758.692.292,72**	**10.441.968.541,73**	**5.078.248.812,27**

DAFTAR TANAH DI WILAYAH KERJA PERTAMINA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Kode Barang	Kode	Panjang Ruas	Tahun perolehan	Alamat	Jenis	Rincian	Sumber	Nilai	SKPD
1	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.03	0001	1157	2001	Jl. P. Halmahera No. 1, Tarakan Tengah	Hak Pakai	Kec. Tarakan Tengah (Tanah Pertamina)		100.000.000,00	KEC. TARTENG
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0001	70	2001	Jl. Skip lap golf		Rumah Dinas	Pembelian	70.000.000,00	UMPER
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0002	70	2001	Jl. Skip Lap Golf		Rumah Dinas	Pembelian	70.000.000,00	UMPER
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0003	70	2001	Jl. Skip Lap. Golf		Rumah Dinas	Pembelian	70.000.000,00	UMPER
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0005	70	2001	Jl. Skip Lap. golf		Rumah Dinas	Pembelian	70.000.000,00	UMPER
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0006	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0009	70	2001	Jl. Skip Lap. golf		Rumah Dinas	Pembelian	70.000.000,00	UMPER
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0012	36	2001	Jl. Morkoni		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0013	36	2001	Jl. Markoni		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0014	36	2001	Jl. Markoni		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0021	36	2001	Jl. Kampung 1 No. 242 B		Rumah Dinas	Pembelian	360.000.000,00	UMPER
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0022	36	2001	Jl. Kampung 1 No. 423		Rumah Dinas	Pembelian	360.000.000,00	UMPER
13	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0023	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	360.000.000,00	UMPER
14	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0024	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	360.000.000,00	UMPER
15	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0025	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
16	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0026	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
17	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0027	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
18	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0028	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
19	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0029	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
20	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0030	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
21	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0031	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
22	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0032	36	2001	Jl. Kampung 1 No. 255		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
23	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0033	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
24	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0034	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
25	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0035	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
26	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0036	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
27	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0037	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
28	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0038	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
29	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0039	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
30	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0040	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
31	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0041	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
32	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0042	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
33	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0043	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
34	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0044	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
35	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0045	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
36	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0046	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
37	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0047	36	2001	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
38	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0048	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
39	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0049	36	2001	Jl. Kamping VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
40	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0050	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
41	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0051	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
42	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0052	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER

DAFTAR TANAH DI WILAYAH KERJA PERTAMINA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Kode Barang	Kode	Panjang Ruas	Tahun perolehan	Alamat	Jenis	Rincian	Sumber	Nilai	SKPD
43	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0053	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
44	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0054	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
45	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0055	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
46	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0056	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
47	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0057	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
48	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0058	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
49	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0059	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
50	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0060	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
51	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0061	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
52	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0062	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
53	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0063	36	2001	Jl. KAmpung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
54	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0064	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
55	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0065	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
56	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0066	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
57	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0067	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
58	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0068	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
59	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0069	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
60	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0070	36	2001	Jl. Kampung VI		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
61	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0071	36	2001	Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 2		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
62	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0072	36	2001	Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 3		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
63	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0073	36	2001	Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 4		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
64	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0074	36	2001	Jl. Kampung 1 No. 5 Sawah Lunto		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
65	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0075	36	2001	Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 6		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
66	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0076	36	2001	Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No.7		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
67	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0077	36	2001	Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 8		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
68	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0078	36	2001	Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 9		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
69	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0079	36	2001	Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 10		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
70	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0080	36	2001	Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 11		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
71	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0081	36	2001	Jl. kampung 1 Sawah lunto No. 12		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
72	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0082	70	2001	Jl. Ladang Camat Tengah		Rumah Dinas	Pembelian	70.000.000,00	UMPER
73	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0084	80	2001	Jl.P. Irian		Rumah Dinas	Pembelian	80.000.000,00	UMPER
74	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0085	1329,3	2001	Jl. P. Irian No .32		Rumah Dinas	Pinjam	132.929.998,00	UMPER
75	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0006	36	2001	Jl. Kampung 1 Tarakan Tengah		Kantor Bappeda	Pembelian	360.000.000,00	UMPER
76	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01.01.11.04.025	0004	70	2001	Jl. Mulawarman		Bangun Kantor Hanggar Helly	Pembelian	70.000.000,00	UMPER
77	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0007	36	2002	Jl. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
78	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0008	36	2002	Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
79	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0010	36	2002	J. Kampung 1		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
80	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0011	36	2002	Jl. Markoni		Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	UMPER
81	Tanah Utk Bangunan Gd. Perdagangan Lain-lain	01.01.11.02.015	0001	160	2000	Kantor DLH, Jalan Halmahera No. 171 RT. 7 Tarakan,		Kantor DLH (Pinjam Pakai Tanah Pertamina)	Hibah	1.500.000.000,00	DLH
82	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0001	70	2001	Jl. Skip Lap. golf	Hak Pakai	Rumah Dinas	Pinjam	70.000.000,00	DPRKPP
83	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0002	70	2001	Jl. Skip Lap. golf	Hak Pakai	Rumah Dinas	Pinjam	70.000.000,00	DPRKPP
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.003	0003	70	2001	Jl. Skip Lap. golf	Hak Pakai	Rumah Dinas	Pembelian	70.000.000,00	DPRKPP

DAFTAR TANAH DI WILAYAH KERJA PERTAMINA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Kode Barang	Kode	Panjang Ruas	Tahun perolehan	Alamat	Jenis	Rincian	Sumber	Nilai	SKPD
85	Tanah Peternakan Lainnya	01.01.11.06.002	0002	224	1998	jl strat buntu, tanah bangunan rumah potong babi	Hak Pakai	Lokasi Rumah Potong Babi	Hibah	224.000.000,00	DPPP
86	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.03	0007	36	2002	Jl. Kampung 1	Hak Pakai	Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	Setda
87	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.03	0008	36	2002	Kampung 1	Hak Pakai	Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	Setda
88	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.03	0010	36	2002	J. Kampung 1	Hak Pakai	Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	Setda
89	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	01.01.11.01.03	0011	36	2002	Jl. Markoni	Hak Pakai	Rumah Dinas	Pembelian	36.000.000,00	Setda
90	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	01.03.01.01.01.05.001	4	10000	2002	Tennis Indoor Kampung Enam			Pembelian	125.000.000,00	DPRKPP
Jumlah										**7.145.929.998,00**	

DAFTAR GEDUNG DI WILAYAH KERJA PERTAMINA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Alamat	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Bulan	Ak. Penyusutan 1 Jan 2024	Beban Penyusutan	Ak. Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku	Alamat	SKPD
1	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Sawah Lunto RT. 8	DPUTR
2	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Markoni	DPUTR
3	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Markoni	DPUTR
4	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1 No. 242 B	DPUTR
5	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1 No. 423	DPUTR
6	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
7	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
8	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
9	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
10	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
11	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
12	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
13	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	391.692.300,60	652.820,50	172.997.432,77	7.833.846,01	180.831.278,78	210.861.021,82	Jl. Kampung 1	DPUTR
14	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
15	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Kampung 1 No. 255	DPUTR
16	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
17	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
18	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
19	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
20	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
21	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
22	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
23	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
24	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	360.000.000,00	600.000,00	159.000.000,00	7.200.000,00	166.200.000,00	193.800.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
25	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
26	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
27	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
28	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
29	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR
30	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung 1	DPUTR

DAFTAR GEDUNG DI WILAYAH KERJA PERTAMINA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Alamat	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Bulan	Ak. Penyusutan 1 Jan 2024	Beban Penyusutan	Ak. Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku	Alamat	SKPD
31	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung VI	DPUTR
32	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung VI	DPUTR
33	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	31/12/2001	36.000.000,00	60.000,00	15.900.000,00	720.000,00	16.620.000,00	19.380.000,00	Jl. Kampung VI	DPUTR
Jumlah			**5.431.692.300,60**	**9.052.820,50**	**2.398.997.432,77**	**108.633.846,01**	**2.507.631.278,78**	**2.924.061.021,82**		

TANAH YANG AKAN DISERAHKAN KE PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Kode Barang	Kode	Tahun Perolehan	Alamat	Nilai	SKPD	Keterangan
1	Tanah Untuk Jalan Nasional	04030010011000559	2	2011	Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara	21.668.000,00	DPRKPP	Tanah Jalan yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat
2	Tanah Untuk Jalan Nasional	04030010011000561	4	2011	Kelurahan Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara	7.773.000,00	DPRKPP	Tanah Jalan yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat
3	Tanah Untuk Jalan Nasional	04030010011000563	6	2011	kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara	38.668.000,00	DPRKPP	Tanah Jalan yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat
4	Tanah Untuk Jalan Nasional	05040010011000291	40	2007	Kelurahan Juata Laut	155.782.000,00	DPRKPP	Tanah Jalan yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat
5	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	04030010011000595	2	2010	Jl.. Aji.Iskandar	799.502.650,00	DPRKPP	Tanah Jalan yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat
6	Tanah Untuk Jalan Desa	04030010011000603	5	2011	Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara	4.504.000,00	DPRKPP	Tanah Jalan yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat
7	Tanah Untuk Jalan Desa	04030010011000604	6	2011	kel.juata kerikil kecamatan tarakan utara	47.130.950,00	DPRKPP	Tanah Jalan yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat
8	Tanah Untuk Makam Umum	04030010011000089	20	2011	Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara	21.399.000,00	DPRKPP	Tanah Jalan yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat
9	Tanah Kampung	04030010011000005	5	2011	Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan	62.853.000,00	DPRKPP	Tanah Jalan yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat
10	Tanah Bangunan Terminal Udara	04030010011000161	3	2013	Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat	81.180.000,00	DPRKPP	Tanah Jalan yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat
11	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	05040010011000221	7	2009	Kel. Juata Laut	1.144.208.150,00	DPRKPP	Tanah yang masih ditelusuri status kepemiliknnya
Jumlah						**2.384.668.750,00**		

GEDUNG DAN BANGUNAN YANG AKAN DISERAHKAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Alamat	Tanggal Perolehan	No. Dokumen	Harga Perolehan	Ak Penyusutan 1 Jan 2024	Beban Penyusutan	Ak Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku	Keterangan	SKPD
1	Tarakan	30/10/2009	03/SPPP-SL/PRC-PRRRI.II/CK/DPU-TR	97.664.000,00	27.834.240,00	1.953.280,00	29.787.520,00	67.876.480,00	Pengawasan Teknis Pemb/Rehab Mesjid & Mushola (Zona 2)	DPUTR
2	RT.12 Kel Sebengkok	26/03/2010	03.1/PPK-SPK/MU BRT12/III/2010	51.368.185,00	14.211.864,52	1.027.363,70	15.239.228,22	36.128.956,78	Pemb Musholla Baburrahim Kontrak Rp. 49.285.000	DPUTR
3	RT.39 Kel Kr Anyar	08/04/2010	03.e/PPK-SPK/MU AMRT39/IV/2010	51.467.200,00	14.153.480,00	1.029.344,00	15.182.824,00	36.284.376,00	Pemb Menara Mushollah Al Mustofa Kontrak Rp. 49.380.000	DPUTR
4	RT.25 Jemb BongkokKr Anyar Pantai (tempat wudhu)	08/04/2010		51.480.750,00	14.157.206,25	1.029.615,00	15.186.821,25	36.293.928,75	Pemb Musholla Kontrak Rp. 49.393.000	DPUTR
5	Juata Permai	09/04/2010	03/PPK-SPK/MAS-02/CK/2010	51.768.343,80	14.236.294,55	1.035.366,88	15.271.661,42	36.496.682,38	Pemb Musholla Al-Anshar Kontrak Rp. 49.207.000	DPUTR
6	RT.14 Kel Kr Balik	16/04/2010		51.553.708,00	14.177.269,70	1.031.074,16	15.208.343,86	36.345.364,14	Pemb Musholla Sa'afii Huda Kontrak Rp. 49.463.000	DPUTR
7	Juata laut RT.1	26/04/2010	03/PPK-SPK/MAS-04/CK/2010	51.847.247,69	14.257.993,12	1.036.944,95	15.294.938,07	36.552.309,62	Pemb Mushollah NUR Kontrak Rp. 49.282.000	DPUTR
8	Jl Slamet Riyadi Kr Anyar	29/04/2010		50.358.200,00	13.848.505,00	1.007.164,00	14.855.669,00	35.502.531,00	Vihara Kasogata Tarakan Kontrak Rp. 48.854.000 Pengwsn Rp. 1.504.200	DPUTR
9		30/04/2010		96.240.000,00	26.466.000,00	1.924.800,00	28.390.800,00	67.849.200,00		DPUTR
10	RT.39 Kel Kr Anyar	30/04/2010	03/PPK-SPK/PMS-2-MUSTOFA/IV/2010	51.069.054,00	14.043.989,85	1.021.381,08	15.065.370,93	36.003.683,07	Pemb Musholla Al Mustofa Kontrak Rp. 48.998.000	DPUTR
11		30/04/2010		50.153.942,00	13.792.334,05	1.003.078,84	14.795.412,89	35.358.529,11		DPUTR
12		30/04/2010		51.250.408,00	14.093.862,20	1.025.008,16	15.118.870,36	36.131.537,64		DPUTR
13		03/05/2010		91.479.300,00	25.004.342,00	1.829.586,00	26.833.928,00	64.645.372,00		DPUTR
14	Kamp 4	03/05/2010	03/PPK-SPK/RMT/IV/2010	51.356.839,70	14.037.536,18	1.027.136,79	15.064.672,98	36.292.166,72	Mushola Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tarakan Kontrak Rp. 49224.000 Pengws Rp. 2.132.839,77	DPUTR
15	RT.8 Kp Enam	05/05/2010	06/PPK-SPPP/DARUR RAHIM/DPUTR/2010	102.614.563,20	28.047.980,61	2.052.291,26	30.100.271,87	72.514.291,33	Mushola Darurrahman Kontrak Rp. 98353.000 Pengwsn Rp. 4.261.563,26	DPUTR
16	Jl Teuku Umar Pamusian	05/05/2010	03/PPK-SPPP.PEML/KTPK/V/2010	101.882.223,00	27.847.807,62	2.037.644,46	29.885.452,08	71.996.770,92	Kelenteng Konghucu Kelenteng Toa Pek Kong Kontrak Rp. 98.839.000 Pengwsn Rp. 3.043.223	DPUTR
17	Kel Selumit	25/05/2010	03/PPK-SPPP/MAS-AMN/V/2010	162.369.000,00	44.380.860,00	3.247.380,00	47.628.240,00	114.740.760,00	Pembangunan/Rehab Mushollah Al Mukminin Kontrak Rp. 162.369.000	DPUTR
18	Kamp 6	02/06/2010	03/PPK-SPK/DARUL FATAH/VI/2010	51.399.616,20	13.963.562,40	1.027.992,32	14.991.554,73	36.408.061,48	Mushola Darul Fatah Kontrak Rp. 49.265.000 Pengwsn Rp. 2.134.616,27	DPUTR
19		07/06/2010		119.266.742,00	32.400.798,24	2.385.334,84	34.786.133,08	84.480.608,92		DPUTR
20	RT.11 Kr. Harapan	09/06/2010	03/PPK-SPK/MAS-10/CK/2010	51.636.837,20	14.028.007,44	1.032.736,74	15.060.744,18	36.576.093,02	Pemb Mushollah Babussalam Kontrak Rp. 49.082.000	DPUTR
21	Jl Lili RT.57	07/07/2010	03.c/PPK-SPK/MU.BRT57/III/2010	51.308.775,00	13.853.369,25	1.026.175,50	14.879.544,75	36.429.230,25	Pemb Musholla Barokah Kontrak Rp. 49.228.000	DPUTR
22	RT.13 Jl Lestari	08/07/2010		99.128.610,15	26.764.724,74	1.982.572,20	28.747.296,94	70.381.313,21	Pemb Musholla Miftahul Huda Kontrak Rp. 94.224.000	DPUTR
23	RT. 5 Kamp 4	06/08/2010		51.664.621,90	13.863.340,21	1.033.292,44	14.896.632,65	36.767.989,25	Mushola Al I'tidal Kontrak Rp. 49.519.000 Pengws Rp. 2.145.621,90	DPUTR
24		09/08/2010		102.192.305,00	27.421.601,84	2.043.846,10	29.465.447,94	72.726.857,06		DPUTR
25	Jl Bhayangkara Kr Anyar	14/09/2010	03/PPK-SPK/PSTI-PURA/IX/2010	50.844.733,00	13.558.595,47	1.016.894,66	14.575.490,13	36.269.242,87	Pure Giri Jagat Nata Kontrak Rp. 49.326.000 Pengws Rp. 1.518.733	DPUTR
26	RT.11 Kp.4	24/09/2010	03/PPK-SPK/AL JANNAH RT.11/IX/2010	51.833.641,20	13.822.304,32	1.036.672,82	14.858.977,14	36.974.664,06	Mushola Al Jannah Kontrak Rp. 49.681.000 Pengwsn Rp. 2.152.641,25	DPUTR
27	RT. 11 Kel Selumit	04/10/2010	04/PPK-SPPP/PMS.2-BABUL/VIII/2010	91.314.153,00	24.198.250,55	1.826.283,06	26.024.533,61	65.289.619,40	Pemb Musjolla Babul Hasana Kontrak Rp. 87.611.000	DPUTR
28	RT 2 Juata Permai	05/11/2010	03/PPK-SPPP/AL-MUTTAQIM/DPUTR/2010	102.195.320,80	26.911.434,48	2.043.906,42	28.955.340,89	73.239.979,91	Pemb Musholla Al Muttaqin Kontrak Rp. 97.139.000	DPUTR
29		30/12/2016	08841/SP2D/2016	609.294.000,00	86.316.650,00	12.185.880,00	98.502.530,00	510.791.470,00	Pembangunan Gedung Kantor Rehab Kantor Walikota No Kontrak 02/PPK/Rehab KWK/2016 tanggal 31 Oktober 2016	DPUTR
30		31/12/2016		85.205.000,00	12.070.708,33	1.704.100,00	13.774.808,33	71.430.191,67	Peningkatan Gedung Serbaguna, Pembangunan Pendopo	DPUTR
31		31/12/2016		14.323.000,00	2.029.091,67	286.460,00	2.315.551,67	12.007.448,33	Peningkatan Gedung Serbaguna, Perencanaan Teknis	DPUTR
32		31/12/2016		14.520.000,00	2.057.000,00	290.400,00	2.347.400,00	12.172.600,00	Peningkatan Gedung Serbaguna, Pengawasan Teknis	DPUTR
33		31/12/2016		49.610.000,00	7.028.083,33	992.200,00	8.020.283,33	41.589.716,67	Rehab Kantor Walikota, Pengawasan Teknis Rehab Walikota	DPUTR
34		31/12/2016		5.500.000,00	779.166,67	110.000,00	889.166,67	4.610.833,33	Rehab Kantor Walikota, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	DPUTR
35		31/12/2016		2.150.000,00	304.583,33	43.000,00	347.583,33	1.802.416,67	Rehab Kantor Walikota, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rehab Kantor Walikota)	DPUTR
36		31/12/2016		262.000.000,00	37.116.666,67	5.240.000,00	42.356.666,67	219.643.333,33	Pemeliharaan Keciptakaryaan	DPUTR
37		31/12/2016		29.720.000,00	4.210.333,33	594.400,00	4.804.733,33	24.915.266,67	Perencanaan rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan	DPUTR
38		31/12/2016		29.810.000,00	4.223.083,33	596.200,00	4.819.283,33	24.990.716,67	Pengawasan rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan	DPUTR
39	Jl Mulawarman	20/04/2007	06/PPK-SPPP/PCB-CK/DPU	677.539.000,00	226.975.565,00	13.550.780,00	240.526.345,00	437.012.655,00	Pemagaran Kawasan Bandara	DPUTR
40	Jl P Irian	26/06/2007	02/PPK-SPPP/GPMI-CK/VI/2007	276.521.000,00	91.712.798,33	5.530.420,00	97.243.218,33	179.277.781,67	Pemb Gedung PMI + Pengawasan	DPUTR
41	Kr Anyar Pantai	09/10/2008		94.391.000,00	28.789.255,00	1.887.820,00	30.677.075,00	63.713.925,00	Pembongkaran dan Perbaikan Kembali 2 Rumah (Eks Kebakaran Kr Anyar Pantai)	DPUTR
42	Jl Ladang Pamusian	15/01/2009	03/PPK-SPPP/PFUS-PGR MUH2/1/2009	159.570.000,00	47.871.000,00	3.191.400,00	51.062.400,00	108.507.600,00	Pagar SMP Muhammadiyah 2	DPUTR
43	Jl danau Jempang Kp Baru	08/10/2009	03/PPK-SPK/PFK-RK.I/LPM/VI/2009	44.060.000,00	12.557.100,00	881.200,00	13.438.300,00	30.621.700,00	Rehab Kantor LPM	DPUTR

GEDUNG DAN BANGUNAN YANG AKAN DISERAHKAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Alamat	Tanggal Perolehan	No. Dokumen	Harga Perolehan	Ak Penyusutan 1 Jan 2024	Beban Penyusutan	Ak Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku	Keterangan	SKPD
44		15/07/2010	04/PPK-SPPP/PP-KODIM.P.KOT/VII/2010	96.348.000,00	26.013.960,00	1.926.960,00	27.940.920,00	68.407.080,00	Perbaikan Pagar perbatasan KODIM dgn Perum. Pemkot Trk Kontrak Rp. 96.348.000	DPUTR
45		30/12/2013		164.960.032,00	33.266.939,79	3.299.200,64	36.566.140,43	128.393.891,57	Rehab Kantor Kwarcab Kontrak Rp. 143.867.000	DPUTR
46		30/12/2013		195.598.726,00	39.445.743,08	3.911.974,52	43.357.717,60	152.241.008,40	Rehab Kantor Kajari Kontrak Rp. 170.588.000	DPUTR
47		30/12/2013		155.138.130,00	31.286.189,55	3.102.762,60	34.388.952,15	120.749.177,85	Rehab rumah Dinas dan Yonif 613 Kontrak Rp. 135.301.000	DPUTR
48	tarakan	13/02/2014	02/SPK/PK-WISMA.PATRA/2014	93.080.176,00	18.460.901,57	1.861.603,52	20.322.505,09	72.757.670,91	rehab wisma patra kontrak Rp.87.314.000	DPUTR
49	Tarakan	31/12/2015		125.511.719,00	20.291.061,24	2.510.234,38	22.801.295,62	102.710.423,38	Rehab Rektorat UB dan Rumah jabatan	DPUTR
50	Pembuatan taman bermain di LANUD Oleh CV.PUSPA TAMARA OVAL	11/12/2012	684/SPK/DKPP	88.450.000,00	19.606.416,67	1.769.000,00	21.375.416,67	67.074.583,33	Lanud Tarakan	DPUTR
51	Pembuatan Taman Bermain, CV.Mustika Pratama, PPTK : Yus Ari W	12/12/2013	4.396/SPK/DKPP	45.728.800,00	9.221.974,67	914.576,00	10.136.550,67	35.592.249,33	TK ALMustakim Jembatan Besi	DPUTR
52	Pembuatan Taman, CV.Bina Agung, PPTK :Yus Ari W	12/09/2013	4.390/SPK/DKPP	46.649.000,00	9.640.793,33	932.980,00	10.573.773,33	36.075.226,67	Taman Bermain Panti Asuhan Putri Melati Sebengkok	DPUTR
53	Pembuatan Taman Bermain, CV. Bina Agung, PPTK : Yus Ari W	12/12/2013	4.376/SPK/DKPP	45.761.400,00	9.228.549,00	915.228,00	10.143.777,00	35.617.623,00	Panti Asuhan Achmad Dahlan INTRACA JUATA PERMAI	DPUTR
54	Pembuatan Taman Bermain, CV.Bina Agung, PPTK : Yus Ari	12/12/2013	4.393/SPK/DKPP	46.791.300,00	9.436.245,50	935.826,00	10.372.071,50	36.419.228,50	TK AL Irsyad Jl. Cendawasih	DPUTR
55	Pembuatan Taman, CV.Mustika Pratama, PPTK : Yus Ari W	12/12/2013	5.267/SPK/DKPP	79.784.000,00	16.089.773,33	1.595.680,00	17.685.453,33	62.098.546,67	SDN 024	DPUTR
56	Pembuatan Taman, CV.Bina Agung, PPTK : Yus Ari W	12/12/2013	3.470/SPK/DKPP	90.634.600,00	18.277.977,67	1.812.692,00	20.090.669,67	70.543.930,33	STIE Bulungan Tarakan	DPUTR
57	Pembuatan Taman, CV. Mustika Pratama. PPTK : Yus Ari w	12/12/2013	4.367/SPK/DKPP	90.700.900,00	18.291.348,17	1.814.018,00	20.105.366,17	70.595.533,83	Lembaga Pemasyarakatan	DPUTR
58	Pembuatan Taman. CV.Mustika Pratama, PPTK : Yus Ari W	12/12/2013	4,346/SPK/DKPP	90.691.500,00	18.289.452,50	1.813.830,00	20.103.282,50	70.588.217,50	BRIMOB	DPUTR
59	Lapangan Bulutangkis Kontrak Rp. 46.115.000	05/11/2010	07/PPK-SPK/CK-LB-RT.31.KR/2010	48.022.812,00	12.646.007,16	960.456,24	13.606.463,40	34.416.348,60	RT 31 Kr Anyar	DPUTR
60	Pembuatan Lap. Bulutangkis Kontrak Rp. 44.140.000	08/10/2010	02/PPK-SPK/CK-LB-RT.5.KH/2010	45.966.104,00	12.181.017,56	919.322,08	13.100.339,64	32.865.764,36	RT 5 Kr Harapan	DPUTR
61	Rehab Lap.Volly Kontrak Rp. 37.027.000	05/11/2010	013/PPK-SPK/CK-LV-RT.14KH/2010	38.558.834,00	10.153.826,29	771.176,68	10.925.002,97	27.633.831,03	RT 14 Kr Harapan	DPUTR
62	Rehab Lapangan Bulutangkis Kontrak Rp. 46.444.000	05/11/2010	010/PPK-SPK/CK-LB-RT.10JL/2010	48.365.423,00	12.736.228,06	967.308,46	13.703.536,52	34.661.886,48	RT 10 Juata Laut	DPUTR
63	pembuatan Lap. Bulutangkis Kontrak Rp. 46.204.000	05/11/2010	012/PPK-SPK/CK-LB-RT.16JP/2010	48.115.494,00	12.670.413,42	962.309,88	13.632.723,30	34.482.770,70	RT 16 Juata Permai	DPUTR
64	Pembuatan Lap Bulutangkis Kontrak Rp. 46.219.000	05/11/2010	011/PPK-SPK/CK-LB-RT.11.P/2010	48.131.114,00	12.674.526,69	962.622,28	13.637.148,97	34.493.965,03	RT 11 Pamusian	DPUTR
65	Pemb. Lap. Bulutangkis Kontrak Rp. 36.244.000	26/11/2010	15/PPK-SPK/CK-LB-RT.2.S/2010	37.743.441,00	9.939.106,13	754.868,82	10.693.974,95	27.049.466,05	RT 2 Selumit	DPUTR
66	Pemb. Lap. Bulutangkis Kontrak Rp. 46.097.000	05/11/2010	06/PPK-SPK/CK-LV-RT.10.S/2010	48.004.067,00	12.641.070,98	960.081,34	13.601.152,32	34.402.914,68	RT 10 Selumit	DPUTR
67	Pemb. Lap Volly Kontrak Rp. 46.831.000	05/11/2010	08/PPK-SPK/CK-LV-RT.8 KS/2010	48.768.433,00	12.842.354,02	975.368,66	13.817.722,68	34.950.710,32	RT 8 Kp 1	DPUTR
68	Pemb Lap. Volly Kontrak Rp. 37.507.000	05/11/2010	09/PPK-SPK/CK-LV-RT.7.PA/2010	39.058.692,00	10.285.455,56	781.173,84	11.066.629,40	27.992.062,60	RT 7 Pantai Amal	DPUTR
69	Pemb Lap. Volly Kontrak Rp. 43.959.000	08/10/2010	01/PPK-SPK/CK-LV-RT.11.PA/2010	45.777.616,00	12.131.068,24	915.552,32	13.046.620,56	32.730.995,44	RT 11 Pantai Amal	DPUTR
70	Pemb Lap. Volly Kontrak Rp. 44.166.000	26/11/2010	016/PPK-SPK/CK-PLV	45.993.180,00	12.111.537,40	919.863,60	13.031.401,00	32.961.779,00	Gn Amal Kp 6	DPUTR
71	Pemb. Lap. Volly Hidayatullah Kontrak Rp. 37.179.000	05/11/2010	NULL	38.717.123,00	10.195.509,06	774.342,46	10.969.851,52	27.747.271,48	RT. 11 Gn Lingkas	DPUTR
72	Pembangunan Pos Kamling	21/06/2010	NULL	41.692.918,00	11.326.576,06	833.858,36	12.160.434,42	29.532.483,58	RT.20 Juata Permai	DPUTR
73	Pembangunan Pos Kamling	22/06/2010	NULL	46.639.046,00	12.670.274,16	932.780,92	13.603.055,08	33.035.990,92	RT. 22 Selumit Pantai	DPUTR
74	Pembangunan Pos Kamling	22/06/2010	NULL	47.329.924,00	12.857.962,69	946.598,48	13.804.561,17	33.525.362,83	RT.12 Selumit Pantai	DPUTR
75	Pembangunan Pos Kamling	14/09/2010	NULL	32.905.851,00	8.774.893,60	658.117,02	9.433.010,62	23.472.840,38	RT. 01 Juata Laut	DPUTR
76	Pembangunan Pos Kamling	14/09/2010	NULL	37.204.883,00	9.921.302,13	744.097,66	10.665.399,79	26.539.483,21	RT. 6 Selumit	DPUTR
77	Pembangunan Pos Kamling	02/11/2007	08/SPPP-CK/DPU	26.886.900,00	8.693.431,00	537.738,00	9.231.169,00	17.655.731,00	Jl Selumit RT II	DPUTR
78	Pembuatan Pagar Kuburan Muslim Kontrak Rp. 46.029.000	22/10/2010	016/PPK-SPK/CK-PFUS-PPKM-ST/2010	49.044.199,03	12.996.712,74	980.883,98	13.977.596,72	35.066.602,31	Sebengkok tiram	DPUTR
79	Pembuatan Pembuangan/Bak sampah Kontrak Rp. 35.651.000	08/11/2010	022/PPK-SPK/C-PFUS-PBS.RT.7/2010	37.986.372,46	10.003.078,08	759.727,45	10.762.805,53	27.223.566,93	RT.7 Selumit Pantai	DPUTR
80	Pembuatan Pembuangan/bak sampah Kontrak Rp. 35.331.000	08/11/2010	023/PPK-SPK/CK-PFUS-PBS.RT24/2010	37.656.713,35	9.916.267,85	753.134,27	10.669.402,12	26.987.311,23	RT 24 Selumit Pantai	DPUTR
81	Renovasi Balai Pertemuan Kontrak Rp. 42.697.000	15/09/2010	06/PPK-SPK/CK-PFUS-RBP/2010	45.493.931,35	12.131.715,03	909.878,63	13.041.593,65	32.452.337,70	RT.20 Juata Permai	DPUTR
82	Pembangunan Posyandu Seruni	14/10/2010	NULL	46.491.992,00	12.320.377,88	929.839,84	13.250.217,72	33.241.774,28	RT. 16 Lingkas Ujung	DPUTR
83	Pembuatan tempat Penjemuran Ikan Kontrak Rp. 41.598.000	15/09/2010	07/PPK-SPK/CK-PFUS-PTP/2010	44.336.247,54	11.822.999,34	886.724,95	12.709.724,29	31.626.523,25	RT.8 Juata Laut	DPUTR
84	Pembuatan Tempat Pengeringan Rumput laut Kontrak Rp. 42.215.000	15/09/2010	08/PPK-SPK/CK-PFUS-PTPR/2010	44.993.862,45	11.998.363,32	899.877,25	12.898.240,57	32.095.621,88	RT.16 Lingkas Ujung	DPUTR
85	Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain (dst)	31/12/2019		46.648.265.269,00	3.731.861.221,76	932.965.305,38	4.664.826.527,14	41.983.438.741,86	SIKIM	DPTK

GEDUNG DAN BANGUNAN YANG AKAN DISERAHKAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Alamat	Tanggal Perolehan	No. Dokumen	Harga Perolehan	Ak Penyusutan 1 Jan 2024	Beban Penyusutan	Ak Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku	Keterangan	SKPD
86	Peningkatan Mushollah Al Dahri RT.10 & 18 Lingkas Ujung	01/08/2023		95.825.000,00	798.541,67	1.916.500,00	2.715.041,67	93.109.958,33	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	SDN 008
87	VIP room	01/12/1998		6.500.000.000,00	3.260.833.333,00	130.000.000,00	3.390.833.333,00	3.109.166.667,00	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	BPKPAD
88	Pemeliharaan Patok GSB dan GSS Kontrak Rp. 98.751.000	30/12/2013		99.351.000,00	20.035.785,00	1.987.020,00	22.022.805,00	77.328.195,00	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	DPUPR
89	Belanja Perencanaan, Pengawasan Pagar Hutan Kota Batu Mapan	23/10/2015		182.500.000,00	30.112.500,00	3.650.000,00	33.762.500,00	148.737.500,00	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	BPKPAD
Jumlah				**60.494.576.045**	**8.758.549.421**	**1.209.891.520,90**	**9.968.440.942**	**50.526.135.103**		

ASET YANG MASIH DALAM PENELUSURAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Kode Aset	Nomor Barang	Tahun Perolehan	Alamat	Nilai Perolehan	Nilai Buku	SKPD	Keterangan
1	Tanah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	000004	1998	kantor veteran	1.897.796.414,00	1.897.796.414,00	BPKAD	Tanah yang masih ditelusuri status kepemiliknnya
2	Tanah	Tanah Jalan	1.3.4.01.001.003.005	000087	2005	Jl. Pasar Beringin	119.364.222.966,00	119.364.222.966,00	DPUPR	Tanah Salah Penganggaran
3	Tanah	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	01.03.01.01.03.09.003	1	2001	TPA Aki Babu Karang Anyar Pantai	30.000.000,00	30.000.000,00	DPRKPP	Tanah yang masih ditelusuri status kepemiliknnya
4	Tanah	Tanah kampung lainnya (dst)	01.03.01.01.03.17.002	138	2002	Lahan Cadangan Juata Kerikil	9.500.000,00	9.500.000,00	DPRKPP	Tanah yang masih ditelusuri status kepemiliknnya
Jumlah Nilai Tanah							**121.301.519.380,00**			
5	Peralatan dan Mesin	Meja 1/2 Biro	1.3.2.05.002.001.024	000006	2012		11.577.458.950,00	-	DISDIK	
Jumlah Nilai Peralatan dan Mesin							**11.577.458.950,00**			
6	JIJ	instalasi speedey			2016		2.975.000,00	1.747.813,00	Sekretariat Dewan	
7	JIJ	JL.KENANGAN RT.X			2000		300.000,00	105.625,00	SDN 015	
8	JIJ	Sekretariat P2TP2A Sedungan 27/SPK/BPMPPKB			2013		2.753.000,00	1.690.037,00	DP3APPKB	
9	JIJ	Jl. Jendral Sudirman Gedung GADIS I RT.3, Kel. Pamusian 027/55.f/DKPs/2013			2013		9.900.000,00	4.331.250,00	CAPIL	
10	JIJ	Biaya Bongkar pasang lampu penerangan digedung puskesmas.JL.P.Diponegoro,Gg.Kamboja			2015		11.055.000,00	8.083.969,00	PKM SBK	
Jumlah Nilai JIJ							**26.983.000,00**	**15.958.694,00**		
Total Nilai Keseluruhan							**132.905.961.330,00**	**15.958.694,00**		

DAFTAR PROPERTI INVESTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	JENIS ASET	IDPEMDA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
1	BPKPAD	Tanah	07010100011000001	1971	585.000.000,00	-	585.000.000,00	Jl. Yos Sudarso (Eks Labkesda)
2	BPKPAD	Tanah	13010010011000028	2009	256.000.000,00	-	256.000.000,00	Jl. Yos Sudarso Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur
3	DKUKMP	Tanah	12010010011000002	1998	33.400.793.600,00	-	33.400.793.600,00	Jl. Jend Sudirma RT XIII Kel. Karang Balik
4	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000036	2003	115.691.000,00	48.783.038,00	66.907.962,00	Ruko Lingkas Ujung Nomor 1
5	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000037	2003	115.691.000,00	48.783.038,00	66.907.962,00	Ruko Lingkas Ujung Nomor 2
6	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000038	2003	115.691.000,00	48.783.038,00	66.907.962,00	Ruko Lingkas Ujung Nomor 3
7	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000039	2003	115.691.000,00	48.783.038,00	66.907.962,00	Ruko Lingkas Ujung Nomor 4
8	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000040	2003	115.691.000,00	48.783.038,00	66.907.962,00	Ruko Lingkas Ujung Nomor 5
9	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000041	2003	115.691.000,00	48.783.038,00	66.907.962,00	Ruko Lingkas Ujung Nomor 6
10	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000042	2003	115.691.000,00	48.783.038,00	66.907.962,00	Ruko Lingkas Ujung Nomor 7
11	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000043	2003	115.691.000,00	48.783.038,00	66.907.962,00	Ruko Lingkas Ujung Nomor 8
12	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000044	2002	115.691.000,00	51.096.858,00	64.594.142,00	Ruko Boom Panjang Nomor 1
13	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000045	2002	115.691.000,00	51.096.858,00	64.594.142,00	Ruko Boom Panjang Nomor 2
14	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000046	2002	115.691.000,00	51.096.858,00	64.594.142,00	Ruko Boom Panjang Nomor 3
15	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000047	2002	115.691.000,00	51.096.858,00	64.594.142,00	Ruko Boom Panjang Nomor 4
16	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000048	2002	115.691.000,00	51.096.858,00	64.594.142,00	Ruko Boom Panjang Nomor 5
17	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000049	2002	115.691.000,00	51.096.858,00	64.594.142,00	Ruko Boom Panjang Nomor 6
18	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000050	2002	115.691.000,00	51.096.858,00	64.594.142,00	Ruko Boom Panjang Nomor 7
19	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000051	2002	115.691.000,00	51.096.858,00	64.594.142,00	Ruko Boom Panjang Nomor 8
20	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000052	2002	422.969.000,00	186.811.308,00	236.157.692,00	Ruko Gajah Mada Nomor 3
21	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000053	2002	422.969.000,00	186.811.308,00	236.157.692,00	Ruko Gajah Mada Nomor 4
22	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000054	2002	422.969.000,00	186.811.308,00	236.157.692,00	Ruko Gajah Mada Nomor 5
23	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000055	2002	422.969.000,00	186.811.308,00	236.157.692,00	Ruko Gajah Mada Nomor 6
24	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000056	2002	422.969.000,00	186.811.308,00	236.157.692,00	Ruko Gajah Mada Nomor 7
25	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000057	2002	422.969.000,00	186.811.308,00	236.157.692,00	Ruko Gajah Mada Nomor 8
26	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000058	2002	422.969.000,00	186.811.308,00	236.157.692,00	Ruko Gajah Mada Nomor 9
27	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000060	2002	422.969.000,00	186.811.308,00	236.157.692,00	Ruko Gajah Mada Nomor 11
28	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000061	2002	422.969.000,00	186.811.308,00	236.157.692,00	Ruko Gajah Mada Nomor 12
29	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000062	2002	422.969.000,00	186.811.308,00	236.157.692,00	Ruko Gajah Mada Nomor 13
30	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000034	2010	5.527.337.550,00	1.420.596.686,00	4.106.740.864,00	Jl. Mulawarman (Eks Kantor Camat Barat)
31	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	13010010013000059	2002	422.969.000,00	186.811.308,00	236.157.692,00	Ruko Gajah Mada Nomor 10
32	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000033	30/12/2022	2.990.948.000	124.622.833,00	2.866.325.167,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
33	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000034	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
34	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000035	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
35	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000036	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
36	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000037	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
37	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000038	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
38	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000039	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
39	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000040	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
40	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000041	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)

DAFTAR PROPERTI INVESTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	JENIS ASET	IDPEMDA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
41	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000042	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
42	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000043	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
43	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000044	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
44	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000045	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
45	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000046	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
46	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000047	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
47	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000048	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
48	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000049	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
49	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000050	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
50	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000051	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
51	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000052	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
52	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000053	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
53	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000054	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
54	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000055	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
55	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000056	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
56	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000057	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
57	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000058	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023) Koreksi BPK Tahun 2022
58	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000059	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
59	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000060	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
60	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000061	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
61	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000062	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
62	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000063	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
63	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000064	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
64	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000065	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
65	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000066	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
66	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000067	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
67	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000068	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
68	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000069	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
69	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000070	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
70	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000071	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)

DAFTAR PROPERTI INVESTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	JENIS ASET	IDPEMDA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
71	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000072	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
72	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000073	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
73	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000074	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
74	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000075	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
75	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000076	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
76	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000077	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
77	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000078	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
78	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000079	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
79	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000080	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
80	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000081	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
81	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000082	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
82	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000083	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
83	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000084	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
84	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000085	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
85	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000086	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
86	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000087	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
87	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000088	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
88	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000089	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
89	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000090	30/12/2022	109.784.000	4.574.333,00	105.209.667,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
90	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000091	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
91	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000092	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
92	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000093	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
93	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000094	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
94	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000095	30/12/2022	17.874.000	744.750,00	17.129.250,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
95	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000096	30/12/2022	109.784.000	4.574.333,00	105.209.667,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
96	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000097	30/12/2022	109.784.000	4.574.333,00	105.209.667,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
97	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000098	30/12/2022	109.784.000	4.574.333,00	105.209.667,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
98	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000099	30/12/2022	109.784.000	4.574.333,00	105.209.667,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
99	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000100	30/12/2022	109.784.000	4.574.333,00	105.209.667,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
100	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000101	30/12/2022	109.784.000	4.574.333,00	105.209.667,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)

DAFTAR PROPERTI INVESTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	JENIS ASET	IDPEMDA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
101	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000102	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
102	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000103	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
103	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000104	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
104	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000105	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
105	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000106	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
106	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000107	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
107	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000108	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
108	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000109	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
109	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000110	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
110	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000111	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
111	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000112	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
112	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000113	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
113	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000114	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
114	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000115	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023) Koreksi BPK Tahun 2022
115	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000116	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
116	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000117	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
117	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000118	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
118	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000119	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
119	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000120	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
120	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000121	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
121	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000122	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
122	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000123	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebrurai 2023)
123	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000124	30/12/2022	109.784.000	4.574.333,00	105.209.667,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
124	DKUKMP	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	12010010013000125	30/12/2022	109.786.000	4.574.417,00	105.211.583,00	Bangunan Pusat Perbelanjaan THM (Hasil Penilaian BMD KPKNL TARAKAN Nomor S-41/KNL.1303/2023 Tanggal 10 Pebruari 2023)
125	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000001	2019	7.784.869.881,00	830.386.121,00	6.954.483.760,00	Hibah Khusus dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
126	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000002	2019	7.500.148.848,00	800.015.876,00	6.700.132.972,00	Hibah dari Irjen penyediaan perumahan
127	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000003	2016	13.732.646.000,00	2.906.743.403,00	10.825.902.597,00	Rumah Susun Sederhama Sewa (Rusunawa)
128	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000004	2014	17.140.448.529,00	2.885.308.835,00	14.255.139.694,00	Rumah Susun Sederhama Sewa (Rusunawa)
129	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000005	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
130	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000006	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
131	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000007	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
132	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000008	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
133	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000009	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR

DAFTAR PROPERTI INVESTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	JENIS ASET	IDPEMDA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
134	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000010	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
135	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000101	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
136	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000102	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
137	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000103	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
138	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000104	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
139	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000095	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
140	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000096	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
141	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000097	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
142	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000098	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
143	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000099	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
144	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000100	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
145	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000089	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
146	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000090	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
147	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000091	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
148	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000092	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
149	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000093	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
150	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000094	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
151	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000083	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
152	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000084	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
153	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000085	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
154	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000086	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
155	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000087	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
156	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000088	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
157	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000077	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
158	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000078	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
159	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000079	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
160	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000080	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
161	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000081	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
162	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000082	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
163	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000071	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
164	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000072	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
165	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000073	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
166	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000074	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
167	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000075	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
168	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000076	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
169	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000065	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
170	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000066	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
171	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000067	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
172	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000068	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
173	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000069	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
174	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000070	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
175	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000059	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
176	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000060	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
177	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000061	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR

DAFTAR PROPERTI INVESTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	JENIS ASET	IDPEMDA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
178	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000062	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
179	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000063	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
180	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000064	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
181	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000053	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
182	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000054	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
183	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000055	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
184	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000056	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
185	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000057	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
186	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000058	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
187	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000047	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
188	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000048	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
189	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000049	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
190	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000050	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
191	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000051	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
192	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000052	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
193	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000041	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
194	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000042	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
195	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000043	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
196	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000044	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
197	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000045	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
198	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000046	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
199	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000035	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
200	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000036	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
201	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000037	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
202	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000038	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
203	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000039	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
204	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000040	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
205	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000029	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
206	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000030	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
207	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000031	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
208	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000032	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
209	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000033	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
210	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000034	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
211	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000023	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
212	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000024	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
213	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000025	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
214	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000026	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
215	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000027	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
216	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000028	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
217	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000017	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
218	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000018	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
219	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000019	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
220	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000020	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
221	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000021	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR

DAFTAR PROPERTI INVESTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	JENIS ASET	IDPEMDA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
222	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000022	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
223	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000011	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
224	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000012	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
225	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000013	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
226	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000014	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
227	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000015	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
228	DPRKPP	Gedung Dan Bangunan	05040010013000016	2022	176.276.760,00	8.226.250,00	168.050.510,00	Hibah Dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR
229	DISBUDPORAPAR	Gedung Dan Bangunan	05010010013000310	2021	116.911.040.783,12	3.211.827.252,00	113.699.213.531,12	Kawasan Pantai Amal Ratu Intan
230	BPKPAD	Gedung Dan Bangunan	05010010013000347	2017	750.085.832,00	99.537.502,00	650.548.330,00	Gedung Eks SLB
JUMLAH PROPERTI INVESTASI					**238.237.470.023,12**	**16.269.242.080,00**	**221.968.227.943,12**	

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

A. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NAMA OBJEK	JENIS ASET	PENGGUNAAN	NILAI SEWA	MULAI MASA SEWA	MASA SEWA BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
1	Eks. Labkesda	Tanah	Butik Vr Fashion	30.000.000,00	01/11/2024	31/10/2025	5.013.698,63	24.986.301,37
2	STB Mulawarman	Tanah dan Gedung Bangunan	Supermarket	441.000.000,00	03/09/2024	02/09/2025	144.986.301,37	296.013.698,63
3	Eks. Batu Akik	Tanah	Supermarket	61.350.000,00	01/04/2024	31/03/2025	46.222.602,74	15.127.397,26
4	ATM BPD Gedung Gadis Dan Kantor Walikota	Tanah	ATM BPD Kaltim Kaltara	27.667.500,00	01/11/2024	31/10/2025	4.623.883,56	23.043.616,44
5	Gedung SLB	Tanah dan Gedung Bangunan	Kantor PPKIA	103.950.000,00	01/11/2024	30/04/2025	35.032.872,93	68.917.127,07
6	Gajah Mada No.6	Gedung dan Bangunan	Toko Baju DMT	86.614.000,00	01/01/2025	31/12/2025	-	86.614.000,00
7	Boom Panjang No.4	Gedung dan Bangunan	Toko Alat Rumah Tangga	36.571.000,00	01/01/2025	31/12/2025	-	36.571.000,00
8	Boom Panjang No.8	Gedung dan Bangunan	Toko Alat Rumah Tangga	36.571.000,00	01/01/2025	31/12/2025	-	36.571.000,00
Jumlah Pendapatan Sewa Diterima Dimuka				**823.723.500,00**			**235.879.359,23**	**587.844.140,77**

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
1	000027/SKPD/04/1/2024	02/01/2024	P . 2 . 0016521 . 93 . 1	1.525.293,00	07/01/2024	06/02/2024	1.525.293,00	-
2	000046/SKPD/04/1/2024	03/01/2024	P . 2 . 0016253 . 30 . 3	2.409.000,00	14/01/2024	13/01/2025	2.323.434,43	85.565,57
3	000061/SKPD/04/1/2024	04/01/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	2.409.000,00	09/01/2024	08/01/2025	2.356.344,26	52.655,74
4	000062/SKPD/04/1/2024	04/01/2024	P . 2 . 0000743 . 30 . 3	6.684.975,00	11/01/2024	10/01/2025	6.502.325,41	182.649,59
5	000063/SKPD/04/1/2024	04/01/2024	P . 2 . 0001259 . 20 . 3	2.168.100,00	11/01/2024	10/01/2025	2.108.862,30	59.237,70
6	000065/SKPD/04/1/2024	04/01/2024	P . 2 . 0002681 . 20 . 2	2.409.000,00	11/01/2024	10/01/2025	2.343.180,33	65.819,67
7	000071/SKPD/04/1/2024	09/01/2024	P . 2 . 0016826 . 108 . 1	23.126.400,00	09/01/2024	08/01/2025	22.620.904,92	505.495,08
8	000072/SKPD/04/1/2024	09/01/2024	P . 2 . 0004388 . 30 . 3	1.951.290,00	24/01/2024	23/01/2025	1.828.667,95	122.622,05
9	000074/SKPD/04/1/2024	09/01/2024	P . 2 . 0016007 . 20 . 3	2.409.000,00	11/01/2024	10/01/2025	2.343.180,33	65.819,67
10	000075/SKPD/04/1/2024	09/01/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	6.624.750,00	11/01/2024	10/01/2025	6.443.745,90	181.004,10
11	000076/SKPD/04/1/2024	11/01/2024	P . 2 . 0004257 . 30 . 4	4.095.300,00	27/01/2024	26/01/2025	3.804.377,05	290.922,95
12	000077/SKPD/04/1/2024	12/01/2024	P . 2 . 0003643 . 20 . 4	903.375,00	13/01/2024	12/01/2025	873.756,15	29.618,85
13	000078/SKPD/04/1/2024	12/01/2024	P . 1 . 0015081 . 20 . 2	15.768.000,00	09/01/2024	08/01/2025	15.423.344,26	344.655,74

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
14	000079/SKPD/04/1/2024	12/01/2024	P . 1 . 0015081 . 20 . 2	3.324.750,00	06/01/2024	05/02/2024	3.324.750,00	-
15	000080/SKPD/04/1/2024	12/01/2024	P . 2 . 0016241 . 30 . 3	1.642.500,00	03/01/2024	02/01/2025	1.633.524,59	8.975,41
16	000081/SKPD/04/1/2024	12/01/2024	P . 2 . 0016521 . 93 . 1	4.354.207,28	25/01/2024	24/01/2025	4.068.685,49	285.521,79
17	000082/SKPD/04/1/2024	12/01/2024	P . 2 . 0002010 . 30 . 3	6.022.500,00	24/01/2024	23/01/2025	5.644.036,89	378.463,11
18	000083/SKPD/04/1/2024	12/01/2024	P . 2 . 0016369 . 30 . 3	2.737.500,00	11/01/2024	10/01/2025	2.662.704,92	74.795,08
19	000084/SKPD/04/1/2024	12/01/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	6.730.746,00	26/01/2024	25/01/2025	6.270.995,59	459.750,41
20	000088/SKPD/04/1/2024	16/01/2024	P . 2 . 0012442 . 20 . 4	14.454.000,00	06/01/2024	05/01/2025	14.256.540,98	197.459,02
21	000090/SKPD/04/1/2024	16/01/2024	P . 2 . 0000234 . 30 . 1	2.409.000,00	16/01/2024	15/01/2025	2.310.270,49	98.729,51
22	000093/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.405.323,00	16/01/2024	15/01/2025	1.347.727,80	57.595,20
23	000093/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	9.401.670,00	16/01/2024	15/01/2025	9.016.355,66	385.314,34
24	000094/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.405.323,00	16/01/2024	15/01/2025	1.347.727,80	57.595,20
25	000094/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	9.401.670,00	16/01/2024	15/01/2025	9.016.355,66	385.314,34
26	000095/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.717.617,00	16/01/2024	15/01/2025	1.647.222,86	70.394,14
27	000095/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	11.490.930,00	16/01/2024	15/01/2025	11.019.990,25	470.939,75
28	000096/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.561.470,00	16/01/2024	15/01/2025	1.497.475,33	63.994,67
29	000096/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	5.518.800,00	16/01/2024	15/01/2025	5.292.619,67	226.180,33
30	000097/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.717.617,00	16/01/2024	15/01/2025	1.647.222,86	70.394,14
31	000097/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	11.490.930,00	16/01/2024	15/01/2025	11.019.990,25	470.939,75
32	000098/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.561.470,00	16/01/2024	15/01/2025	1.497.475,33	63.994,67
33	000098/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	7.982.550,00	16/01/2024	15/01/2025	7.655.396,31	327.153,69
34	000099/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.717.617,00	16/01/2024	15/01/2025	1.647.222,86	70.394,14
35	000099/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	8.780.805,00	16/01/2024	15/01/2025	8.420.935,94	359.869,06
36	000100/SKPD/04/1/2024	17/01/2024	P . 2 . 0016841 . 110 . 1	3.131.700,00	17/01/2024	16/01/2025	2.994.795,08	136.904,92
37	000101/SKPD/04/1/2024	18/01/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	2.737.500,00	13/01/2024	12/01/2025	2.647.745,90	89.754,10
38	000102/SKPD/04/1/2024	18/01/2024	P . 2 . 0016552 . 10 . 1	2.951.025,00	06/01/2024	05/01/2025	2.910.710,45	40.314,55
39	000102/SKPD/04/1/2024	18/01/2024	P . 2 . 0016552 . 10 . 1	3.613.500,00	06/01/2024	05/01/2025	3.564.135,25	49.364,75
40	000106/SKPD/04/1/2024	24/01/2024	P . 2 . 0014427 . 20 . 3	2.710.125,00	24/01/2024	23/01/2025	2.539.816,60	170.308,40
41	000107/SKPD/04/1/2024	24/01/2024	P . 2 . 0013331 . 30 . 4	4.553.010,00	11/01/2024	10/01/2025	4.428.610,82	124.399,18
42	000108/SKPD/04/1/2024	24/01/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	3.794.175,00	08/03/2024	07/03/2025	3.108.105,00	686.070,00
43	000109/SKPD/04/1/2024	24/01/2024	P . 2 . 0016014 . 71 . 1	1.204.500,00	25/01/2024	24/01/2025	1.125.516,39	78.983,61

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
44	000110/SKPD/04/1/2024	25/01/2024	P . 2 . 0004493 . 20 . 2	12.045.000,00	25/01/2024	24/01/2025	11.255.163,93	789.836,07
45	000115/SKPD/04/1/2024	26/01/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	6.435.000,00	26/01/2024	24/02/2024	6.435.000,00	-
46	000116/SKPD/04/1/2024	26/01/2024	P . 2 . 0005383 . 20 . 3	867.240,00	25/01/2024	24/01/2025	810.371,80	56.868,20
47	000117/SKPD/04/1/2024	26/01/2024	P . 2 . 0015092 . 60 . 1	231.000,00	27/01/2024	02/02/2024	231.000,00	-
48	000086/SKPD/04/1/2024	30/01/2024	P . 2 . 0016853 . 111 . 1	2.131.965,00	30/01/2024	29/01/2025	1.963.038,81	168.926,19
49	000086/SKPD/04/1/2024	30/01/2024	P . 2 . 0016853 . 111 . 1	4.818.000,00	30/01/2024	29/01/2025	4.436.245,90	381.754,10
50	000121/SKPD/04/1/2024	30/01/2024	P . 2 . 0016852 . 20 . 4	963.600,00	30/01/2024	29/01/2025	887.249,18	76.350,82
51	000122/SKPD/04/1/2024	30/01/2024	P . 2 . 0016568 . 54 . 3	843.150,00	30/01/2024	29/01/2025	776.343,03	66.806,97
52	000122/SKPD/04/1/2024	30/01/2024	P . 2 . 0016568 . 54 . 3	4.625.280,00	30/01/2024	29/01/2025	4.258.796,07	366.483,93
53	000123/SKPD/04/1/2024	30/01/2024	P . 2 . 0016854 . 30 . 4	2.710.000,00	30/01/2024	29/01/2025	2.495.273,22	214.726,78
54	000124/SKPD/04/1/2024	31/01/2024	P . 2 . 0016656 . 99 . 1	7.949.700,00	16/01/2024	15/01/2025	7.623.892,62	325.807,38
55	000125/SKPD/04/1/2024	31/01/2024	P . 2 . 0014364 . 30 . 2	2.409.000,00	11/01/2024	10/01/2025	2.343.180,33	65.819,67
56	000185/SKPD/04/1/2024	02/02/2024	P . 2 . 0005004 . 20 . 4	2.475.000,00	27/01/2024	25/02/2024	2.475.000,00	-
57	000186/SKPD/04/1/2024	05/02/2024	P . 2 . 0016521 . 93 . 1	1.476.090,00	07/02/2024	06/03/2024	1.476.090,00	-
58	000192/SKPD/04/1/2024	13/02/2024	P . 2 . 0013855 . 30 . 2	3.613.500,00	09/02/2024	08/02/2025	3.228.454,92	385.045,08
59	000193/SKPD/04/1/2024	13/02/2024	P . 2 . 0016910 . 20 . 3	963.600,00	12/02/2024	11/02/2025	853.022,95	110.577,05
60	000194/SKPD/04/1/2024	13/02/2024	P . 2 . 0015409 . 65 . 1	24.612.315,00	01/02/2024	31/01/2025	22.527.665,37	2.084.649,63
61	000201/SKPD/04/1/2024	20/02/2024	P . 2 . 0017095 . 10 . 2	7.227.000,00	20/02/2024	19/02/2025	6.239.704,92	987.295,08
62	000202/SKPD/04/1/2024	20/02/2024	P . 2 . 0015575 . 20 . 2	148.500,00	20/02/2024	24/02/2024	148.500,00	-
63	000206/SKPD/04/1/2024	26/02/2024	P . 2 . 0011617 . 10 . 1	577.500,00	26/02/2024	03/03/2024	577.500,00	-
64	000210/SKPD/04/1/2024	29/02/2024	P . 2 . 0015564 . 30 . 3	110.880,00	28/02/2024	06/03/2024	110.880,00	-
65	000211/SKPD/04/1/2024	29/02/2024	P . 2 . 0017280 . 112 . 1	110.880,00	28/02/2024	06/03/2024	110.880,00	-
66	000260/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	18/03/2024	17/03/2025	1.323.258,75	347.985,00
67	000260/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	18/03/2024	17/03/2025	5.436.090,00	1.429.560,00
68	000261/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.367.381,25	18/03/2024	17/03/2025	1.082.666,25	284.715,00
69	000261/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	5.617.350,00	18/03/2024	17/03/2025	4.447.710,00	1.169.640,00
70	000262/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.519.312,50	16/02/2024	15/02/2025	1.328.360,66	190.951,84
71	000262/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.241.500,00	16/02/2024	15/02/2025	5.457.049,18	784.450,82
72	000263/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	21/04/2024	20/04/2025	1.167.581,25	503.662,50
73	000263/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	21/04/2024	20/04/2025	4.796.550,00	2.069.100,00
74	000275/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	21/04/2024	20/04/2025	1.167.581,25	503.662,50

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
75	000275/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	21/04/2024	20/04/2025	4.796.550,00	2.069.100,00
76	000276/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	21/04/2024	20/04/2025	1.167.581,25	503.662,50
77	000276/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	21/04/2024	20/04/2025	4.796.550,00	2.069.100,00
78	000277/SKPD/04/1/2024	04/03/2024	P . 2 . 0006255 . 20 . 4	505.890,00	09/03/2024	08/03/2025	413.028,00	92.862,00
79	000282/SKPD/04/1/2024	06/03/2024	P . 2 . 0000666 . 30 . 1	1.960.200,00	04/03/2024	25/03/2024	1.960.200,00	-
80	000284/SKPD/04/1/2024	07/03/2024	P . 2 . 0014862 . 30 . 3	14.152.875,00	04/02/2024	03/02/2025	12.838.127,05	1.314.747,95
81	000285/SKPD/04/1/2024	07/03/2024	P . 2 . 0007604 . 20 . 2	9.636.000,00	03/03/2024	02/03/2025	8.025.600,00	1.610.400,00
82	000286/SKPD/04/1/2024	07/03/2024	P . 2 . 0006829 . 30 . 4	1.204.500,00	25/02/2024	24/02/2025	1.023.495,90	181.004,10
83	000287/SKPD/04/1/2024	07/03/2024	P . 2 . 0006671 . 30 . 4	1.204.500,00	25/02/2024	24/02/2025	1.023.495,90	181.004,10
84	000288/SKPD/04/1/2024	07/03/2024	P . 2 . 0007387 . 10 . 4	1.642.500,00	08/03/2024	07/03/2025	1.345.500,00	297.000,00
85	000289/SKPD/04/1/2024	07/03/2024	P . 2 . 0016580 . 20 . 5	876.000,00	01/03/2024	01/03/2025	732.393,44	143.606,56
86	000290/SKPD/04/1/2024	07/03/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	2.404.663,80	20/03/2024	19/03/2025	1.890.790,44	513.873,36
87	000290/SKPD/04/1/2024	07/03/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	11.490.930,00	20/03/2024	19/03/2025	9.035.334,00	2.455.596,00
88	000291/SKPD/04/1/2024	07/03/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	2.404.663,80	20/03/2024	19/03/2025	1.890.790,44	513.873,36
89	000291/SKPD/04/1/2024	07/03/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	11.490.930,00	20/03/2024	19/03/2025	9.035.334,00	2.455.596,00
90	000292/SKPD/04/1/2024	07/03/2024	P . 2 . 0000136 . 30 . 3	3.011.250,00	01/03/2024	28/02/2025	2.524.500,00	486.750,00
91	000293/SKPD/04/1/2024	08/03/2024	P . 2 . 0016031 . 40 . 3	473.040,00	05/03/2024	04/03/2025	391.392,00	81.648,00
92	000294/SKPD/04/1/2024	08/03/2024	P . 2 . 0014884 . 30 . 3	2.409.000,00	14/02/2024	13/02/2025	2.119.393,44	289.606,56
93	000295/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0015791 . 20 . 4	1.927.200,00	25/02/2024	24/02/2025	1.637.593,44	289.606,56
94	000296/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
95	000297/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.642.500,00	03/02/2024	02/02/2025	1.494.405,74	148.094,26
96	000298/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.642.500,00	03/02/2024	02/02/2025	1.494.405,74	148.094,26
97	000299/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.642.500,00	03/02/2024	02/02/2025	1.494.405,74	148.094,26
98	000300/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.478.250,00	03/02/2024	02/02/2025	1.344.965,16	133.284,84
99	000301/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
100	000302/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
101	000303/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
102	000304/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
103	000305/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
104	000306/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
105	000307/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
106	000308/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
107	000309/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
108	000310/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
109	000311/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
110	000312/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
111	000313/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016332 . 82 . 1	1.806.750,00	03/02/2024	02/02/2025	1.643.846,31	162.903,69
112	000314/SKPD/04/1/2024	13/03/2024	P . 2 . 0016753 . 104 . 1	1.962.675,00	07/03/2024	06/05/2024	1.962.675,00	-
113	000316/SKPD/04/1/2024	14/03/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.374.093,60	15/02/2024	14/02/2025	1.205.147,67	168.945,93
114	000316/SKPD/04/1/2024	14/03/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	8.780.805,00	15/02/2024	14/02/2025	7.701.197,83	1.079.607,17
115	000317/SKPD/04/1/2024	14/03/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.374.093,60	15/02/2024	14/02/2025	1.205.147,67	168.945,93
116	000317/SKPD/04/1/2024	14/03/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	11.490.930,00	15/02/2024	14/02/2025	10.078.110,74	1.412.819,26
117	000318/SKPD/04/1/2024	14/03/2024	P . 2 . 0013350 . 30 . 4	2.409.000,00	13/02/2024	12/02/2025	2.125.975,41	283.024,59
118	000319/SKPD/04/1/2024	14/03/2024	P . 2 . 0003136 . 30 . 4	1.011.780,00	13/02/2024	12/02/2025	892.909,67	118.870,33
119	000320/SKPD/04/1/2024	14/03/2024	P . 1 . 0015081 . 20 . 2	2.415.600,00	13/03/2024	12/05/2024	2.415.600,00	-
120	000327/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0017310 . 30 . 2	602.250,00	15/03/2024	14/03/2025	481.800,00	120.450,00
121	000328/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0001167 . 30 . 3	1.264.725,00	15/03/2024	14/03/2025	1.011.780,00	252.945,00
122	000330/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0016450 . 20 . 4	301.125,00	15/03/2024	14/03/2025	240.900,00	60.225,00
123	000332/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0013696 . 20 . 2	1.252.680,00	15/03/2024	14/03/2025	1.002.144,00	250.536,00
124	000335/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0006985 . 30 . 3	2.409.000,00	15/03/2024	14/03/2025	1.927.200,00	481.800,00
125	000336/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0017314 . 20 . 4	722.700,00	15/03/2024	14/03/2025	578.160,00	144.540,00
126	000337/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0017315 . 20 . 4	364.361,25	15/03/2024	14/03/2025	291.489,00	72.872,25
127	000338/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0001165 . 30 . 1	2.168.100,00	15/03/2024	14/03/2025	1.734.480,00	433.620,00
128	000340/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0017317 . 30 . 3	770.880,00	15/03/2024	14/03/2025	616.704,00	154.176,00
129	000341/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0016141 . 20 . 1	1.204.500,00	14/03/2024	13/03/2025	966.900,00	237.600,00
130	000342/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0017294 . 20 . 4	602.250,00	14/03/2024	13/03/2025	483.450,00	118.800,00
131	000343/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0005231 . 20 . 4	602.250,00	14/03/2024	13/03/2025	483.450,00	118.800,00
132	000344/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0017295 . 30 . 4	1.204.500,00	14/03/2024	13/03/2025	966.900,00	237.600,00
133	000345/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0001726 . 30 . 3	433.620,00	14/03/2024	13/03/2025	348.084,00	85.536,00
134	000346/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0017292 . 30 . 3	2.409.000,00	14/03/2024	13/03/2025	1.933.800,00	475.200,00
135	000347/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0017291 . 30 . 2	2.710.125,00	14/03/2024	13/03/2025	2.175.525,00	534.600,00
136	000348/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0015843 . 30 . 3	903.375,00	15/03/2024	14/03/2025	722.700,00	180.675,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
137	000349/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0017313 . 20 . 4	1.204.500,00	14/03/2024	13/03/2025	966.900,00	237.600,00
138	000350/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0017293 . 30 . 3	1.204.500,00	14/03/2024	13/03/2025	966.900,00	237.600,00
139	000351/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0015340 . 30 . 3	7.227.000,00	25/02/2024	24/02/2025	6.140.975,41	1.086.024,59
140	000352/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0015340 . 30 . 3	903.375,00	15/03/2024	14/03/2025	722.700,00	180.675,00
141	000353/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0015340 . 30 . 3	963.600,00	15/03/2024	14/03/2025	770.880,00	192.720,00
142	000354/SKPD/04/1/2024	19/03/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	6.435.000,00	20/03/2024	18/04/2024	6.435.000,00	-
143	000334/SKPD/04/1/2024	20/03/2024	P . 2 . 0014937 . 20 . 3	20.531.250,00	15/02/2024	14/02/2025	18.006.915,98	2.524.334,02
144	000355/SKPD/04/1/2024	20/03/2024	P . 2 . 0001056 . 30 . 4	3.011.250,00	20/03/2024	19/03/2025	2.367.750,00	643.500,00
145	000356/SKPD/04/1/2024	20/03/2024	P . 2 . 0012802 . 30 . 2	722.700,00	14/03/2024	13/03/2025	580.140,00	142.560,00
146	000357/SKPD/04/1/2024	20/03/2024	P . 2 . 0017320 . 113 . 1	5.420.250,00	20/03/2024	19/03/2025	4.261.950,00	1.158.300,00
147	000357/SKPD/04/1/2024	20/03/2024	P . 2 . 0017320 . 113 . 1	6.937.920,00	20/03/2024	19/03/2025	5.455.296,00	1.482.624,00
148	000358/SKPD/04/1/2024	21/03/2024	P . 2 . 0014838 . 10 . 4	1.576.800,00	11/02/2024	10/02/2025	1.400.163,93	176.636,07
149	000360/SKPD/04/1/2024	21/03/2024	P . 2 . 0013331 . 30 . 4	173.250,00	21/03/2024	27/03/2024	173.250,00	-
150	000363/SKPD/04/1/2024	21/03/2024	P . 2 . 0013329 . 20 . 3	4.215.750,00	10/02/2024	09/02/2025	3.755.012,30	460.737,70
151	000364/SKPD/04/1/2024	21/03/2024	P . 2 . 0013329 . 20 . 3	2.409.000,00	28/04/2024	27/04/2025	1.636.800,00	772.200,00
152	000365/SKPD/04/1/2024	21/03/2024	P . 2 . 0013329 . 20 . 3	2.409.000,00	14/05/2024	13/05/2025	1.531.200,00	877.800,00
153	000366/SKPD/04/1/2024	21/03/2024	P . 2 . 0016024 . 30 . 4	1.686.300,00	09/03/2024	08/03/2025	1.376.760,00	309.540,00
154	000367/SKPD/04/1/2024	21/03/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	33.655.050,00	21/03/2024	19/04/2024	33.655.050,00	-
155	000368/SKPD/04/1/2024	21/03/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	25.611.300,00	21/03/2024	19/04/2024	25.611.300,00	-
156	000369/SKPD/04/1/2024	21/03/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	25.611.300,00	28/03/2024	26/04/2024	25.611.300,00	-
157	000370/SKPD/04/1/2024	22/03/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	1.806.750,00	26/02/2024	25/02/2025	1.530.307,38	276.442,62
158	000371/SKPD/04/1/2024	22/03/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	903.375,00	26/02/2024	25/02/2025	765.153,69	138.221,31
159	000372/SKPD/04/1/2024	22/03/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	903.375,00	26/02/2024	25/02/2025	765.153,69	138.221,31
160	000372/SKPD/04/1/2024	22/03/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	1.806.750,00	26/02/2024	25/02/2025	1.530.307,38	276.442,62
161	000373/SKPD/04/1/2024	22/03/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	903.375,00	26/02/2024	25/02/2025	765.153,69	138.221,31
162	000373/SKPD/04/1/2024	22/03/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	1.806.750,00	26/02/2024	25/02/2025	1.530.307,38	276.442,62
163	000374/SKPD/04/1/2024	22/03/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	903.375,00	26/02/2024	25/02/2025	765.153,69	138.221,31
164	000374/SKPD/04/1/2024	22/03/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	1.806.750,00	26/02/2024	25/02/2025	1.530.307,38	276.442,62
165	000375/SKPD/04/1/2024	22/03/2024	P . 2 . 0013853 . 30 . 4	4.336.200,00	03/01/2024	02/01/2025	4.312.504,92	23.695,08
166	000376/SKPD/04/1/2024	22/03/2024	P . 2 . 0013851 . 20 . 4	4.336.200,00	03/01/2024	02/01/2025	4.312.504,92	23.695,08
167	000326/SKPD/04/1/2024	25/03/2024	P . 2 . 0016796 . 30 . 2	1.806.750,00	25/03/2024	24/03/2025	1.395.900,00	410.850,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
168	000326/SKPD/04/1/2024	25/03/2024	P . 2 . 0016796 . 30 . 2	3.011.250,00	25/03/2024	24/03/2025	2.326.500,00	684.750,00
169	000378/SKPD/04/1/2024	25/03/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	6.730.746,00	09/03/2024	08/03/2025	5.495.239,20	1.235.506,80
170	000379/SKPD/04/1/2024	25/03/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	32.566.668,75	01/01/2024	31/12/2024	32.566.668,75	-
171	000380/SKPD/04/1/2024	26/03/2024	P . 2 . 0016521 . 93 . 1	1.476.090,00	07/03/2024	06/04/2024	1.476.090,00	-
172	000381/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
173	000382/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
174	000383/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
175	000384/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	985.500,00	15/02/2024	14/02/2025	864.331,97	121.168,03
176	000385/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	985.500,00	15/02/2024	14/02/2025	864.331,97	121.168,03
177	000386/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	985.500,00	15/02/2024	14/02/2025	864.331,97	121.168,03
178	000387/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	985.500,00	15/02/2024	14/02/2025	864.331,97	121.168,03
179	000388/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	985.500,00	15/02/2024	14/02/2025	864.331,97	121.168,03
180	000389/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
181	000390/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
182	000391/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
183	000392/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
184	000393/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
185	000394/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
186	000395/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
187	000396/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
188	000397/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	985.500,00	15/02/2024	14/02/2025	864.331,97	121.168,03
189	000398/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
190	000399/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
191	000400/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
192	000401/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
193	000402/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.095.000,00	15/02/2024	14/02/2025	960.368,85	134.631,15
194	000403/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
195	000404/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0016341 . 46 . 5	1.204.500,00	15/02/2024	14/02/2025	1.056.405,74	148.094,26
196	000405/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0007693 . 30 . 1	602.250,00	05/02/2024	04/02/2025	544.657,79	57.592,21
197	000406/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0013331 . 30 . 4	2.735.720,62	10/03/2024	09/03/2025	2.226.052,12	509.668,50
198	000407/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0013331 . 30 . 4	3.035.340,00	10/03/2024	09/03/2025	2.469.852,00	565.488,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
199	000407/SKPD/04/1/2024	27/03/2024	P . 2 . 0013331 . 30 . 4	8.385.126,75	10/03/2024	09/03/2025	6.822.966,15	1.562.160,60
200	000459/SKPD/04/1/2024	01/04/2024	P . 2 . 0016553 . 94 . 1	18.790.200,00	07/03/2024	06/03/2025	15.444.000,00	3.346.200,00
201	000460/SKPD/04/1/2024	01/04/2024	P . 2 . 0016553 . 94 . 1	18.790.200,00	07/03/2024	06/03/2025	15.444.000,00	3.346.200,00
202	000462/SKPD/04/1/2024	01/04/2024	P . 2 . 0016553 . 94 . 1	18.790.200,00	07/03/2024	06/03/2025	15.444.000,00	3.346.200,00
203	000463/SKPD/04/1/2024	01/04/2024	P . 2 . 0000380 . 20 . 3	3.131.700,00	28/01/2024	27/01/2025	2.900.672,95	231.027,05
204	000464/SKPD/04/1/2024	01/04/2024	P . 2 . 0000380 . 20 . 3	7.046.325,00	28/01/2024	27/01/2025	6.526.514,14	519.810,86
205	000466/SKPD/04/1/2024	01/04/2024	P . 2 . 0000380 . 20 . 3	3.558.750,00	31/01/2024	01/02/2025	3.249.293,48	309.456,52
206	000477/SKPD/04/1/2024	01/04/2024	P . 2 . 0000380 . 20 . 3	2.847.000,00	01/12/2023	30/11/2024	2.847.000,00	-
207	000477/SKPD/04/1/2024	01/04/2024	P . 2 . 0000380 . 20 . 3	43.843.800,00	01/12/2023	30/11/2024	43.843.800,00	-
208	000478/SKPD/04/1/2024	01/04/2024	P . 2 . 0000380 . 20 . 3	1.921.725,00	06/03/2024	05/03/2025	1.584.765,00	336.960,00
209	000478/SKPD/04/1/2024	01/04/2024	P . 2 . 0000380 . 20 . 3	4.270.500,00	06/03/2024	05/03/2025	3.521.700,00	748.800,00
210	000478/SKPD/04/1/2024	01/04/2024	P . 2 . 0000380 . 20 . 3	42.277.950,00	06/03/2024	05/03/2025	34.864.830,00	7.413.120,00
211	000479/SKPD/04/1/2024	02/04/2024	P . 2 . 0016454 . 71 . 2	21.921.900,00	05/03/2024	04/03/2025	18.138.120,00	3.783.780,00
212	000480/SKPD/04/1/2024	02/04/2024	P . 2 . 0016454 . 71 . 2	12.526.800,00	02/01/2024	01/01/2025	12.492.573,77	34.226,23
213	000481/SKPD/04/1/2024	02/04/2024	P . 2 . 0016454 . 71 . 2	18.790.200,00	02/01/2024	01/01/2025	18.738.860,66	51.339,34
214	000482/SKPD/04/1/2024	02/04/2024	P . 2 . 0013782 . 10 . 1	15.658.500,00	01/04/2024	31/03/2025	11.797.500,00	3.861.000,00
215	000483/SKPD/04/1/2024	02/04/2024	P . 2 . 0016546 . 30 . 3	876.000,00	18/01/2024	17/01/2025	835.311,48	40.688,52
216	000484/SKPD/04/1/2024	02/04/2024	P . 2 . 0017335 . 10 . 2	2.409.000,00	02/04/2024	01/04/2025	1.808.400,00	600.600,00
217	000485/SKPD/04/1/2024	03/04/2024	P . 2 . 0004083 . 30 . 3	221.760,00	29/03/2024	11/04/2024	221.760,00	-
218	000486/SKPD/04/1/2024	03/04/2024	P . 2 . 0016608 . 30 . 3	73.986.412,50	03/04/2024	02/04/2025	55.337.782,50	18.648.630,00
219	000488/SKPD/04/1/2024	04/04/2024	P . 2 . 0016349 . 87 . 1	9.709.474,50	21/03/2024	20/03/2025	7.607.971,80	2.101.502,70
220	000489/SKPD/04/1/2024	04/04/2024	P . 2 . 0016348 . 86 . 1	2.409.000,00	21/03/2024	20/03/2025	1.887.600,00	521.400,00
221	000489/SKPD/04/1/2024	04/04/2024	P . 2 . 0016348 . 86 . 1	10.488.346,19	21/03/2024	20/03/2025	8.218.265,78	2.270.080,41
222	000493/SKPD/04/1/2024	04/04/2024	P . 2 . 0014633 . 30 . 3	3.613.500,00	10/04/2024	09/04/2025	2.633.400,00	980.100,00
223	000496/SKPD/04/1/2024	05/04/2024	P . 2 . 0016608 . 30 . 3	9.395.100,00	05/04/2024	04/04/2025	6.975.540,00	2.419.560,00
224	000499/SKPD/04/1/2024	16/04/2024	P . 2 . 0013782 . 10 . 1	1.204.500,00	16/04/2024	15/04/2025	858.000,00	346.500,00
225	000500/SKPD/04/1/2024	16/04/2024	P . 2 . 0013782 . 10 . 1	1.204.500,00	16/04/2024	15/04/2025	858.000,00	346.500,00
226	000501/SKPD/04/1/2024	16/04/2024	P . 2 . 0017283 . 10 . 2	1.204.500,00	16/04/2024	15/04/2025	858.000,00	346.500,00
227	000503/SKPD/04/1/2024	17/04/2024	P . 2 . 0016202 . 30 . 2	542.025,00	29/03/2024	28/03/2025	412.830,00	129.195,00
228	000503/SKPD/04/1/2024	17/04/2024	P . 2 . 0016202 . 30 . 2	2.409.000,00	29/03/2024	28/03/2025	1.834.800,00	574.200,00
229	000504/SKPD/04/1/2024	17/04/2024	P . 2 . 0016202 . 30 . 2	3.926.670,00	18/11/2024	17/11/2025	473.352,00	3.453.318,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
230	000505/SKPD/04/1/2024	17/04/2024	P . 2 . 0000678 . 10 . 2	481.800,00	18/03/2024	17/03/2025	381.480,00	100.320,00
231	000495/SKPD/04/1/2024	18/04/2024	P . 2 . 0007964 . 30 . 3	1.734.480,00	01/03/2024	28/02/2025	1.454.112,00	280.368,00
232	000509/SKPD/04/1/2024	18/04/2024	P . 2 . 0015361 . 20 . 2	650.430,00	06/03/2024	05/03/2025	536.382,00	114.048,00
233	000510/SKPD/04/1/2024	18/04/2024	P . 2 . 0006262 . 30 . 1	2.409.000,00	02/04/2024	01/04/2025	1.808.400,00	600.600,00
234	000510/SKPD/04/1/2024	18/04/2024	P . 2 . 0006262 . 30 . 1	2.409.000,00	02/04/2024	01/04/2025	1.808.400,00	600.600,00
235	000511/SKPD/04/1/2024	18/04/2024	P . 2 . 0016613 . 97 . 1	5.239.575,00	20/01/2024	19/01/2025	4.967.575,20	271.999,80
236	000512/SKPD/04/1/2024	22/04/2024	P . 2 . 0017349 . 30 . 3	505.890,00	14/03/2024	13/03/2025	406.098,00	99.792,00
237	000515/SKPD/04/1/2024	23/04/2024	P . 2 . 0015092 . 60 . 1	1.204.500,00	14/03/2024	13/03/2025	966.900,00	237.600,00
238	000516/SKPD/04/1/2024	23/04/2024	P . 2 . 0006784 . 20 . 4	22.206.600,00	31/03/2024	30/03/2025	16.791.840,00	5.414.760,00
239	000517/SKPD/04/1/2024	23/04/2024	P . 2 . 0006784 . 20 . 4	20.498.400,00	31/03/2024	30/03/2025	15.500.160,00	4.998.240,00
240	000519/SKPD/04/1/2024	24/04/2024	P . 2 . 0017354 . 30 . 3	1.204.500,00	24/04/2024	23/04/2025	831.600,00	372.900,00
241	000520/SKPD/04/1/2024	24/04/2024	P . 2 . 0015051 . 20 . 2	4.878.225,00	12/04/2024	11/04/2025	3.528.360,00	1.349.865,00
242	000521/SKPD/04/1/2024	24/04/2024	P . 2 . 0012605 . 30 . 4	867.240,00	28/04/2024	27/04/2025	589.248,00	277.992,00
243	000522/SKPD/04/1/2024	24/04/2024	P . 2 . 0006674 . 30 . 4	867.240,00	24/04/2024	23/04/2025	598.752,00	268.488,00
244	000524/SKPD/04/1/2024	30/04/2024	P . 2 . 0016521 . 93 . 1	1.476.090,00	07/04/2024	06/05/2024	1.476.090,00	-
245	000525/SKPD/04/1/2024	30/04/2024	P . 2 . 0005004 . 20 . 4	30.551.040,00	10/03/2024	09/01/2025	29.652.480,00	898.560,00
246	000526/SKPD/04/1/2024	30/04/2024	P . 2 . 0016579 . 30 . 3	1.871.136,00	28/02/2024	27/02/2025	1.574.617,18	296.518,82
247	000527/SKPD/04/1/2024	30/04/2024	P . 2 . 0007618 . 30 . 3	2.409.000,00	15/03/2024	14/03/2025	1.927.200,00	481.800,00
248	000528/SKPD/04/1/2024	30/04/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	2.404.663,80	11/04/2024	10/04/2025	1.745.851,80	658.812,00
249	000528/SKPD/04/1/2024	30/04/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	11.490.930,00	11/04/2024	10/04/2025	8.342.730,00	3.148.200,00
250	000529/SKPD/04/1/2024	30/04/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.561.470,00	11/04/2024	10/04/2025	1.133.670,00	427.800,00
251	000529/SKPD/04/1/2024	30/04/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	10.446.300,00	11/04/2024	10/04/2025	7.584.300,00	2.862.000,00
252	000585/SKPD/04/1/2024	02/05/2024	P . 2 . 0017361 . 30 . 3	876.000,00	30/04/2024	29/04/2025	590.400,00	285.600,00
253	000587/SKPD/04/1/2024	02/05/2024	P . 2 . 0016860 . 30 . 3	1.095.000,00	30/04/2024	29/04/2025	738.000,00	357.000,00
254	000588/SKPD/04/1/2024	02/05/2024	P . 2 . 0017362 . 30 . 3	1.576.800,00	30/04/2024	29/04/2025	1.062.720,00	514.080,00
255	000589/SKPD/04/1/2024	02/05/2024	P . 2 . 0017363 . 30 . 3	1.182.600,00	30/04/2024	29/04/2025	797.040,00	385.560,00
256	000593/SKPD/04/1/2024	02/05/2024	P . 2 . 0016581 . 30 . 3	1.261.440,00	03/03/2024	02/03/2025	1.050.624,00	210.816,00
257	000595/SKPD/04/1/2024	03/05/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	2.890.800,00	02/06/2024	01/06/2025	1.686.960,00	1.203.840,00
258	000596/SKPD/04/1/2024	03/05/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	6.504.300,00	13/05/2024	12/05/2025	4.152.060,00	2.352.240,00
259	000597/SKPD/04/1/2024	03/05/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	2.710.125,00	05/07/2024	04/07/2025	1.336.500,00	1.373.625,00
260	000598/SKPD/04/1/2024	03/05/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	4.398.834,00	10/03/2024	09/03/2025	3.579.325,20	819.508,80

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
261	000599/SKPD/04/1/2024	03/05/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	2.107.875,00	08/03/2024	07/03/2025	1.726.725,00	381.150,00
262	000600/SKPD/04/1/2024	03/05/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	794.970,00	13/05/2024	12/05/2025	507.474,00	287.496,00
263	000601/SKPD/04/1/2024	07/05/2024	P . 2 . 0017360 . 40 . 2	301.250,00	30/04/2024	29/04/2025	203.034,25	98.215,75
264	000602/SKPD/04/1/2024	07/05/2024	P . 2 . 0000209 . 30 . 3	1.806.750,00	25/01/2024	24/01/2025	1.688.274,59	118.475,41
265	000602/SKPD/04/1/2024	07/05/2024	P . 2 . 0000209 . 30 . 3	6.296.250,00	25/01/2024	24/01/2025	5.883.381,15	412.868,85
266	000602/SKPD/04/1/2024	07/05/2024	P . 2 . 0000209 . 30 . 3	25.053.600,00	25/01/2024	24/01/2025	23.410.740,98	1.642.859,02
267	000603/SKPD/04/1/2024	08/05/2024	P . 2 . 0013966 . 30 . 3	1.806.750,00	07/04/2024	06/04/2025	1.331.550,00	475.200,00
268	000604/SKPD/04/1/2024	08/05/2024	P . 2 . 0015409 . 65 . 1	965.250,00	09/05/2024	07/06/2024	965.250,00	-
269	000605/SKPD/04/1/2024	08/05/2024	P . 2 . 0016642 . 30 . 3	867.240,00	29/05/2024	28/05/2025	515.592,00	351.648,00
270	000606/SKPD/04/1/2024	08/05/2024	P . 2 . 0001014 . 30 . 3	578.160,00	08/04/2024	07/04/2025	424.512,00	153.648,00
271	000607/SKPD/04/1/2024	08/05/2024	P . 2 . 0016639 . 30 . 3	1.204.500,00	08/04/2024	07/04/2025	884.400,00	320.100,00
272	000608/SKPD/04/1/2024	08/05/2024	P . 2 . 0013243 . 20 . 2	66.825,00	08/05/2024	10/05/2024	66.825,00	-
273	000615/SKPD/04/1/2024	13/05/2024	P . 2 . 0001170 . 30 . 3	1.806.750,00	01/05/2024	30/04/2025	1.212.750,00	594.000,00
274	000617/SKPD/04/1/2024	13/05/2024	P . 2 . 0016633 . 73 . 1	1.806.750,00	12/05/2024	11/05/2025	1.158.300,00	648.450,00
275	000617/SKPD/04/1/2024	13/05/2024	P . 2 . 0016633 . 73 . 1	2.890.800,00	12/05/2024	11/05/2025	1.853.280,00	1.037.520,00
276	000614/SKPD/04/1/2024	14/05/2024	P . 2 . 0016047 . 20 . 5	1.204.500,00	19/04/2024	18/04/2025	848.100,00	356.400,00
277	000620/SKPD/04/1/2024	14/05/2024	P . 2 . 0005519 . 10 . 1	7.227.000,00	15/04/2024	14/04/2025	5.167.800,00	2.059.200,00
278	000621/SKPD/04/1/2024	14/05/2024	P . 2 . 0016521 . 93 . 1	2.737.500,00	02/05/2024	01/05/2025	1.830.000,00	907.500,00
279	000622/SKPD/04/1/2024	15/05/2024	P . 2 . 0017374 . 30 . 3	2.258.437,50	14/05/2024	13/05/2025	1.435.500,00	822.937,50
280	000622/SKPD/04/1/2024	15/05/2024	P . 2 . 0017374 . 30 . 3	4.336.200,00	14/05/2024	13/05/2025	2.756.160,00	1.580.040,00
281	000623/SKPD/04/1/2024	15/05/2024	P . 2 . 0013288 . 10 . 4	1.806.750,00	29/03/2024	28/03/2025	1.376.100,00	430.650,00
282	000624/SKPD/04/1/2024	15/05/2024	P . 1 . 0006953 . 30 . 4	1.324.950,00	11/02/2024	10/02/2025	1.176.526,64	148.423,36
283	000625/SKPD/04/1/2024	15/05/2024	P . 1 . 0015081 . 20 . 2	2.415.600,00	13/05/2024	12/07/2024	2.415.600,00	-
284	000626/SKPD/04/1/2024	15/05/2024	P . 2 . 0015416 . 20 . 2	12.647.250,00	18/04/2024	17/04/2025	8.939.700,00	3.707.550,00
285	000627/SKPD/04/1/2024	15/05/2024	P . 2 . 0015416 . 20 . 2	12.647.250,00	18/04/2024	17/04/2025	8.939.700,00	3.707.550,00
286	000628/SKPD/04/1/2024	15/05/2024	P . 2 . 0015416 . 20 . 2	3.613.500,00	18/04/2024	17/04/2025	2.554.200,00	1.059.300,00
287	000632/SKPD/04/1/2024	16/05/2024	P . 2 . 0016237 . 79 . 1	821.250,00	24/03/2024	23/03/2025	636.750,00	184.500,00
288	000632/SKPD/04/1/2024	16/05/2024	P . 2 . 0016237 . 79 . 1	1.182.600,00	24/03/2024	23/03/2025	916.920,00	265.680,00
289	000632/SKPD/04/1/2024	16/05/2024	P . 2 . 0016237 . 79 . 1	4.456.650,00	24/03/2024	23/03/2025	3.455.430,00	1.001.220,00
290	000633/SKPD/04/1/2024	17/05/2024	P . 2 . 0007566 . 20 . 3	2.409.000,00	17/05/2024	16/05/2025	1.511.400,00	897.600,00
291	000634/SKPD/04/1/2024	17/05/2024	P . 2 . 0011713 . 30 . 5	2.475.000,00	16/05/2024	15/06/2024	2.475.000,00	-

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
292	000636/SKPD/04/1/2024	20/05/2024	P . 2 . 0016613 . 97 . 1	2.409.000,00	17/05/2024	16/05/2025	1.511.400,00	897.600,00
293	000637/SKPD/04/1/2024	20/05/2024	P . 2 . 0010838 . 30 . 3	2.409.000,00	17/05/2024	16/05/2025	1.511.400,00	897.600,00
294	000640/SKPD/04/1/2024	20/05/2024	P . 2 . 0000240 . 30 . 1	903.375,00	03/05/2024	02/05/2025	601.425,00	301.950,00
295	000641/SKPD/04/1/2024	20/05/2024	P . 2 . 0015984 . 30 . 2	3.011.250,00	23/05/2024	22/05/2025	1.839.750,00	1.171.500,00
296	000642/SKPD/04/1/2024	20/05/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.235.817,00	20/05/2024	19/05/2025	765.190,80	470.626,20
297	000643/SKPD/04/1/2024	20/05/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.235.817,00	20/05/2024	19/05/2025	765.190,80	470.626,20
298	000644/SKPD/04/1/2024	20/05/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.235.817,00	20/05/2024	19/05/2025	765.190,80	470.626,20
299	000645/SKPD/04/1/2024	20/05/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.235.817,00	20/05/2024	19/05/2025	765.190,80	470.626,20
300	000646/SKPD/04/1/2024	20/05/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.235.817,00	20/05/2024	19/05/2025	765.190,80	470.626,20
301	000647/SKPD/04/1/2024	20/05/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.235.817,00	20/05/2024	19/05/2025	765.190,80	470.626,20
302	000648/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	21/05/2024	20/05/2025	742.500,00	462.000,00
303	000649/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	21/05/2024	20/05/2025	742.500,00	462.000,00
304	000650/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	21/05/2024	20/05/2025	742.500,00	462.000,00
305	000651/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	21/05/2024	20/05/2025	742.500,00	462.000,00
306	000652/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	21/05/2024	20/05/2025	742.500,00	462.000,00
307	000653/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	21/05/2024	20/05/2025	742.500,00	462.000,00
308	000654/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	21/05/2024	20/05/2025	742.500,00	462.000,00
309	000655/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	21/05/2024	20/05/2025	742.500,00	462.000,00
310	000656/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	21/05/2024	20/05/2025	742.500,00	462.000,00
311	000657/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	2.409.000,00	21/05/2024	20/05/2025	1.485.000,00	924.000,00
312	000658/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	2.409.000,00	21/05/2024	20/05/2025	1.485.000,00	924.000,00
313	000659/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	2.409.000,00	21/05/2024	20/05/2025	1.485.000,00	924.000,00
314	000660/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	2.409.000,00	21/05/2024	20/05/2025	1.485.000,00	924.000,00
315	000661/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	2.409.000,00	21/05/2024	20/05/2025	1.485.000,00	924.000,00
316	000662/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	2.409.000,00	21/05/2024	20/05/2025	1.485.000,00	924.000,00
317	000663/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	2.409.000,00	21/05/2024	20/05/2025	1.485.000,00	924.000,00
318	000664/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	2.409.000,00	21/05/2024	20/05/2025	1.485.000,00	924.000,00
319	000665/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	2.409.000,00	21/05/2024	20/05/2025	1.485.000,00	924.000,00
320	000666/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	4.336.200,00	21/05/2024	20/05/2025	2.673.000,00	1.663.200,00
321	000667/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0016344 . 30 . 2	6.022.500,00	15/03/2024	14/03/2025	4.818.000,00	1.204.500,00
322	000668/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0016064 . 47 . 4	10.840.500,00	03/05/2024	02/05/2025	7.217.100,00	3.623.400,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
323	000669/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0016064 . 47 . 4	2.409.000,00	03/05/2024	02/05/2025	1.603.800,00	805.200,00
324	000669/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0016064 . 47 . 4	6.980.077,50	03/05/2024	02/05/2025	4.647.010,50	2.333.067,00
325	000670/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0016064 . 47 . 4	1.013.948,10	03/05/2024	02/05/2025	675.039,42	338.908,68
326	000672/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017388 . 30 . 3	2.409.000,00	02/01/2023	01/01/2024	2.409.000,00	-
327	000673/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017397 . 30 . 3	2.409.000,00	02/01/2023	01/01/2024	2.409.000,00	-
328	000676/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017394 . 30 . 3	1.204.500,00	02/01/2023	01/01/2024	1.204.500,00	-
329	000677/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0017395 . 20 . 4	590.205,00	02/01/2023	01/01/2024	590.205,00	-
330	000679/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0013049 . 20 . 1	2.409.000,00	02/01/2023	01/01/2024	2.409.000,00	-
331	000680/SKPD/04/1/2024	22/05/2024	P . 2 . 0015915 . 30 . 3	1.204.500,00	31/08/2023	30/08/2024	1.204.500,00	-
332	000682/SKPD/04/1/2024	27/05/2024	P . 2 . 0017398 . 20 . 4	1.204.500,00	02/01/2023	01/01/2024	1.204.500,00	-
333	000683/SKPD/04/1/2024	27/05/2024	P . 2 . 0016753 . 104 . 1	683.100,00	27/05/2024	26/08/2024	683.100,00	-
334	000684/SKPD/04/1/2024	27/05/2024	P . 2 . 0016071 . 65 . 3	2.409.000,00	05/05/2024	04/05/2025	1.590.600,00	818.400,00
335	000686/SKPD/04/1/2024	27/05/2024	P . 2 . 0016071 . 65 . 3	2.409.000,00	05/05/2024	04/05/2025	1.590.600,00	818.400,00
336	000687/SKPD/04/1/2024	27/05/2024	P . 2 . 0016071 . 65 . 3	2.409.000,00	05/05/2024	04/05/2025	1.590.600,00	818.400,00
337	000688/SKPD/04/1/2024	27/05/2024	P . 2 . 0016071 . 65 . 3	2.409.000,00	05/05/2024	04/05/2025	1.590.600,00	818.400,00
338	000689/SKPD/04/1/2024	27/05/2024	P . 2 . 0016071 . 65 . 3	2.409.000,00	05/05/2024	04/05/2025	1.590.600,00	818.400,00
339	000690/SKPD/04/1/2024	27/05/2024	P . 2 . 0016071 . 65 . 3	2.409.000,00	05/05/2024	04/05/2025	1.590.600,00	818.400,00
340	000691/SKPD/04/1/2024	27/05/2024	P . 2 . 0016071 . 65 . 3	2.190.000,00	05/05/2024	04/05/2025	1.446.000,00	744.000,00
341	000694/SKPD/04/1/2024	28/05/2024	P . 2 . 0016237 . 79 . 1	990.000,00	28/05/2024	26/06/2024	990.000,00	-
342	000695/SKPD/04/1/2024	28/05/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	12.870.000,00	29/05/2024	27/06/2024	12.870.000,00	-
343	000696/SKPD/04/1/2024	28/05/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	6.435.000,00	01/06/2024	30/06/2024	6.435.000,00	-
344	000697/SKPD/04/1/2024	29/05/2024	P . 2 . 0016568 . 54 . 3	2.529.450,00	29/05/2024	28/05/2025	1.503.810,00	1.025.640,00
345	000697/SKPD/04/1/2024	29/05/2024	P . 2 . 0016568 . 54 . 3	7.516.080,00	29/05/2024	28/05/2025	4.468.464,00	3.047.616,00
346	000698/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	21/04/2024	20/04/2025	1.167.581,25	503.662,50
347	000698/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	21/04/2024	20/04/2025	4.796.550,00	2.069.100,00
348	000699/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.519.312,50	14/07/2024	13/07/2025	711.787,50	807.525,00
349	000699/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.241.500,00	14/07/2024	13/07/2025	2.924.100,00	3.317.400,00
350	000700/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	02/07/2024	01/07/2025	837.911,25	833.332,50
351	000700/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	02/07/2024	01/07/2025	3.442.230,00	3.423.420,00
352	000701/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.519.312,50	14/07/2024	13/07/2025	711.787,50	807.525,00
353	000701/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.241.500,00	14/07/2024	13/07/2025	2.924.100,00	3.317.400,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
354	000702/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	12/06/2024	11/06/2025	929.486,25	741.757,50
355	000702/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	12/06/2024	11/06/2025	3.818.430,00	3.047.220,00
356	000703/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	12/06/2024	11/06/2025	929.486,25	741.757,50
357	000703/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	12/06/2024	11/06/2025	3.818.430,00	3.047.220,00
358	000704/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	12/06/2024	11/06/2025	929.486,25	741.757,50
359	000704/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	12/06/2024	11/06/2025	3.818.430,00	3.047.220,00
360	000705/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	12/06/2024	11/06/2025	929.486,25	741.757,50
361	000705/SKPD/04/1/2024	31/05/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	12/06/2024	11/06/2025	3.818.430,00	3.047.220,00
362	000681/SKPD/04/1/2024	03/06/2024	P . 2 . 0016568 . 54 . 3	330.000,00	01/06/2024	05/06/2024	330.000,00	-
363	000717/SKPD/04/1/2024	03/06/2024	P . 2 . 0005004 . 20 . 4	2.310.000,00	03/06/2024	30/06/2024	2.310.000,00	-
364	000768/SKPD/04/1/2024	03/06/2024	P . 2 . 0016221 . 30 . 3	1.565.850,00	20/07/2024	19/07/2025	707.850,00	858.000,00
365	000771/SKPD/04/1/2024	04/06/2024	P . 2 . 0016221 . 30 . 3	1.806.750,00	14/12/2023	13/12/2024	1.806.750,00	-
366	000772/SKPD/04/1/2024	04/06/2024	P . 2 . 0016221 . 30 . 3	1.806.750,00	14/12/2023	13/12/2024	1.806.750,00	-
367	000773/SKPD/04/1/2024	04/06/2024	P . 2 . 0016221 . 30 . 3	1.806.750,00	14/12/2023	13/12/2024	1.806.750,00	-
368	000774/SKPD/04/1/2024	04/06/2024	P . 2 . 0016221 . 30 . 3	3.011.250,00	14/12/2023	13/12/2024	3.011.250,00	-
369	000775/SKPD/04/1/2024	04/06/2024	P . 2 . 0002010 . 30 . 3	18.067.500,00	14/06/2024	13/06/2025	9.949.500,00	8.118.000,00
370	000776/SKPD/04/1/2024	04/06/2024	P . 2 . 0002010 . 30 . 3	56.064.000,00	14/06/2024	13/06/2025	30.873.600,00	25.190.400,00
371	000777/SKPD/04/1/2024	04/06/2024	P . 2 . 0002010 . 30 . 3	38.544.000,00	14/06/2024	13/06/2025	21.225.600,00	17.318.400,00
372	000778/SKPD/04/1/2024	04/06/2024	P . 2 . 0002010 . 30 . 3	19.874.250,00	14/06/2024	13/06/2025	10.944.450,00	8.929.800,00
373	000778/SKPD/04/1/2024	04/06/2024	P . 2 . 0002010 . 30 . 3	56.064.000,00	14/06/2024	13/06/2025	30.873.600,00	25.190.400,00
374	000779/SKPD/04/1/2024	04/06/2024	P . 2 . 0002010 . 30 . 3	9.636.000,00	14/06/2024	13/06/2025	5.306.400,00	4.329.600,00
375	000780/SKPD/04/1/2024	04/06/2024	P . 2 . 0002010 . 30 . 3	2.409.000,00	14/07/2024	13/07/2025	1.128.600,00	1.280.400,00
376	000785/SKPD/04/1/2024	06/06/2024	P . 2 . 0016243 . 80 . 1	7.008.000,00	11/04/2024	10/04/2025	5.088.000,00	1.920.000,00
377	000786/SKPD/04/1/2024	06/06/2024	P . 2 . 0015145 . 61 . 1	3.116.643,75	09/12/2023	08/12/2024	3.116.643,75	-
378	000787/SKPD/04/1/2024	06/06/2024	P . 2 . 0015145 . 61 . 1	2.874.238,12	11/05/2024	10/05/2025	1.850.536,87	1.023.701,25
379	000788/SKPD/04/1/2024	06/06/2024	P . 2 . 0015984 . 30 . 2	2.409.000,00	12/06/2024	11/06/2025	1.339.800,00	1.069.200,00
380	000789/SKPD/04/1/2024	06/06/2024	P . 2 . 0016661 . 64 . 1	3.613.500,00	07/02/2024	06/02/2025	3.248.200,82	365.299,18
381	000790/SKPD/04/1/2024	06/06/2024	P . 2 . 0016661 . 64 . 1	3.613.500,00	07/02/2024	06/02/2025	3.248.200,82	365.299,18
382	000791/SKPD/04/1/2024	07/06/2024	P . 2 . 0016391 . 88 . 1	2.737.500,00	27/06/2024	26/06/2025	1.410.000,00	1.327.500,00
383	000792/SKPD/04/1/2024	07/06/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.249.176,00	19/06/2024	18/06/2025	670.790,40	578.385,60
384	000792/SKPD/04/1/2024	07/06/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	9.756.450,00	19/06/2024	18/06/2025	5.239.080,00	4.517.370,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
385	000793/SKPD/04/1/2024	07/06/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	936.882,00	19/06/2024	18/06/2025	503.092,80	433.789,20
386	000793/SKPD/04/1/2024	07/06/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	7.292.700,00	19/06/2024	18/06/2025	3.916.080,00	3.376.620,00
387	000794/SKPD/04/1/2024	07/06/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	1.717.617,00	19/06/2024	18/06/2025	922.336,80	795.280,20
388	000794/SKPD/04/1/2024	07/06/2024	P . 2 . 0016460 . 20 . 2	10.732.095,00	19/06/2024	18/06/2025	5.762.988,00	4.969.107,00
389	000795/SKPD/04/1/2024	10/06/2024	P . 2 . 0006841 . 20 . 2	60.225.000,00	21/06/2024	20/06/2025	32.010.000,00	28.215.000,00
390	000796/SKPD/04/1/2024	10/06/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	4.215.750,00	10/06/2024	09/06/2025	2.367.750,00	1.848.000,00
391	000797/SKPD/04/1/2024	12/06/2024	P . 2 . 0017518 . 20 . 4	547.500,00	11/06/2024	10/06/2025	306.000,00	241.500,00
392	000798/SKPD/04/1/2024	12/06/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	2.409.000,00	02/03/2024	01/03/2025	2.013.000,00	396.000,00
393	000799/SKPD/04/1/2024	12/06/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	2.409.000,00	02/03/2024	01/03/2025	2.013.000,00	396.000,00
394	000800/SKPD/04/1/2024	12/06/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	2.409.000,00	02/03/2024	01/03/2025	2.013.000,00	396.000,00
395	000801/SKPD/04/1/2024	12/06/2024	P . 2 . 0017390 . 20 . 3	2.018.742,00	12/06/2024	11/06/2025	1.122.752,40	895.989,60
396	000802/SKPD/04/1/2024	12/06/2024	P . 2 . 0017383 . 20 . 2	963.600,00	12/06/2024	11/06/2025	535.920,00	427.680,00
397	000802/SKPD/04/1/2024	12/06/2024	P . 2 . 0017383 . 20 . 2	1.156.320,00	12/06/2024	11/06/2025	643.104,00	513.216,00
398	000805/SKPD/04/1/2024	14/06/2024	P . 2 . 0016521 . 93 . 1	3.001.383,00	07/05/2024	06/07/2024	3.001.383,00	-
399	000820/SKPD/04/1/2024	18/06/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	4.516.875,00	20/06/2024	19/06/2025	2.413.125,00	2.103.750,00
400	000810/SKPD/04/1/2024	19/06/2024	P . 2 . 0017524 . 30 . 3	903.375,00	14/06/2024	13/06/2025	497.475,00	405.900,00
401	000813/SKPD/04/1/2024	20/06/2024	P . 2 . 0013343 . 30 . 2	2.409.000,00	01/03/2024	01/03/2025	2.014.081,97	394.918,03
402	000814/SKPD/04/1/2024	20/06/2024	P . 2 . 0013186 . 30 . 3	843.150,00	15/03/2024	14/03/2025	674.520,00	168.630,00
403	000815/SKPD/04/1/2024	20/06/2024	P . 2 . 0016014 . 71 . 1	985.500,00	28/06/2024	27/06/2025	504.900,00	480.600,00
404	000816/SKPD/04/1/2024	20/06/2024	P . 2 . 0016014 . 71 . 1	602.250,00	28/06/2024	27/06/2025	308.550,00	293.700,00
405	000817/SKPD/04/1/2024	20/06/2024	P . 2 . 0016014 . 71 . 1	1.204.500,00	28/06/2024	27/06/2025	617.100,00	587.400,00
406	000818/SKPD/04/1/2024	20/06/2024	P . 2 . 0013991 . 30 . 3	2.168.100,00	22/04/2024	21/04/2025	1.508.760,00	659.340,00
407	000819/SKPD/04/1/2024	20/06/2024	P . 2 . 0000430 . 20 . 4	2.710.125,00	27/05/2024	26/05/2025	1.626.075,00	1.084.050,00
408	000821/SKPD/04/1/2024	24/06/2024	P . 2 . 0012990 . 20 . 3	867.240,00	17/11/2024	16/11/2025	106.920,00	760.320,00
409	000822/SKPD/04/1/2024	24/06/2024	P . 2 . 0016068 . 30 . 4	867.240,00	10/05/2024	09/05/2025	560.736,00	306.504,00
410	000823/SKPD/04/1/2024	24/06/2024	P . 2 . 0005004 . 20 . 4	498.960,00	23/06/2024	28/06/2024	498.960,00	-
411	000824/SKPD/04/1/2024	24/06/2024	P . 2 . 0005004 . 20 . 4	792.000,00	23/06/2024	12/07/2024	792.000,00	-
412	000826/SKPD/04/1/2024	24/06/2024	P . 1 . 0015081 . 20 . 2	4.950.000,00	22/06/2024	20/08/2024	4.950.000,00	-
413	000827/SKPD/04/1/2024	25/06/2024	P . 2 . 0017527 . 20 . 4	1.204.500,00	11/06/2024	10/06/2025	673.200,00	531.300,00
414	000828/SKPD/04/1/2024	26/06/2024	P . 2 . 0004838 . 30 . 1	7.853.340,00	25/08/2024	24/08/2025	2.775.564,00	5.077.776,00
415	000829/SKPD/04/1/2024	26/06/2024	P . 2 . 0004838 . 30 . 1	2.661.945,00	25/08/2024	24/08/2025	940.797,00	1.721.148,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
416	000830/SKPD/04/1/2024	26/06/2024	P . 2 . 0016038 . 30 . 4	3.372.600,00	10/05/2024	09/05/2025	2.180.640,00	1.191.960,00
417	000831/SKPD/04/1/2024	26/06/2024	P . 2 . 0003922 . 30 . 3	1.231.875,00	16/04/2024	15/04/2025	877.500,00	354.375,00
418	000833/SKPD/04/1/2024	26/06/2024	P . 2 . 0007714 . 20 . 1	7.227.000,00	26/06/2024	25/06/2025	3.742.200,00	3.484.800,00
419	000834/SKPD/04/1/2024	26/06/2024	P . 2 . 0016656 . 99 . 1	6.730.746,00	19/06/2024	18/06/2025	3.614.318,40	3.116.427,60
420	000835/SKPD/04/1/2024	26/06/2024	P . 2 . 0002010 . 30 . 3	10.539.375,00	07/04/2024	06/04/2025	7.767.375,00	2.772.000,00
421	000836/SKPD/04/1/2024	26/06/2024	P . 2 . 0002010 . 30 . 3	10.599.600,00	11/04/2024	10/04/2025	7.695.600,00	2.904.000,00
422	000837/SKPD/04/1/2024	26/06/2024	P . 2 . 0002010 . 30 . 3	14.454.000,00	09/03/2024	08/03/2025	11.800.800,00	2.653.200,00
423	000839/SKPD/04/1/2024	27/06/2024	P . 2 . 0012959 . 30 . 3	2.409.000,00	17/06/2024	16/06/2025	1.306.800,00	1.102.200,00
424	000840/SKPD/04/1/2024	27/06/2024	P . 2 . 0014364 . 30 . 2	1.349.040,00	25/04/2024	24/04/2025	927.696,00	421.344,00
425	000841/SKPD/04/1/2024	27/06/2024	P . 2 . 0014364 . 30 . 2	1.445.400,00	25/04/2024	24/04/2025	993.960,00	451.440,00
426	000842/SKPD/04/1/2024	27/06/2024	P . 2 . 0015807 . 40 . 1	492.750,00	17/03/2024	16/03/2025	391.500,00	101.250,00
427	000843/SKPD/04/1/2024	28/06/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	8.494.200,00	28/06/2024	27/07/2024	8.494.200,00	-
428	000844/SKPD/04/1/2024	28/06/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	10.424.700,00	28/06/2024	27/07/2024	10.424.700,00	-
429	000845/SKPD/04/1/2024	28/06/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	22.007.700,00	28/06/2024	27/07/2024	22.007.700,00	-
430	000846/SKPD/04/1/2024	28/06/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	18.468.450,00	28/06/2024	27/07/2024	18.468.450,00	-
431	000847/SKPD/04/1/2024	28/06/2024	P . 2 . 0002708 . 30 . 2	7.227.000,00	06/03/2024	05/03/2025	5.959.800,00	1.267.200,00
432	000848/SKPD/04/1/2024	28/06/2024	P . 2 . 0002708 . 30 . 2	2.409.000,00	27/06/2024	26/06/2025	1.240.800,00	1.168.200,00
433	000888/SKPD/04/1/2024	01/07/2024	P . 2 . 0016702 . 20 . 3	1.204.500,00	01/07/2024	30/06/2025	607.200,00	597.300,00
434	000832/SKPD/04/1/2024	02/07/2024	P . 2 . 0016038 . 30 . 4	706.860,00	26/06/2024	25/12/2024	706.860,00	-
435	000912/SKPD/04/1/2024	02/07/2024	P . 2 . 0009846 . 20 . 4	30.112.500,00	04/06/2024	03/06/2025	17.407.500,00	12.705.000,00
436	000913/SKPD/04/1/2024	02/07/2024	P . 2 . 0008544 . 30 . 3	1.204.500,00	29/07/2024	28/07/2025	514.800,00	689.700,00
437	000913/SKPD/04/1/2024	02/07/2024	P . 2 . 0008544 . 30 . 3	1.927.200,00	29/07/2024	28/07/2025	823.680,00	1.103.520,00
438	000915/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	2.071.740,00	16/07/2024	15/07/2025	959.244,00	1.112.496,00
439	000916/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	3.658.668,75	16/07/2024	15/07/2025	1.694.013,75	1.964.655,00
440	000917/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	13.117.005,00	16/07/2024	15/07/2025	6.073.353,00	7.043.652,00
441	000918/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	903.375,00	08/07/2024	07/07/2025	438.075,00	465.300,00
442	000918/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	1.806.750,00	08/07/2024	07/07/2025	876.150,00	930.600,00
443	000919/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	903.375,00	08/07/2024	07/07/2025	438.075,00	465.300,00
444	000919/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	1.806.750,00	08/07/2024	07/07/2025	876.150,00	930.600,00
445	000920/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	903.375,00	08/07/2024	07/07/2025	438.075,00	465.300,00
446	000920/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	1.806.750,00	08/07/2024	07/07/2025	876.150,00	930.600,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
447	000921/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	2.258.437,50	08/07/2024	07/07/2025	1.095.187,50	1.163.250,00
448	000921/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	2.409.000,00	08/07/2024	07/07/2025	1.168.200,00	1.240.800,00
449	000922/SKPD/04/1/2023	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	903.375,00	08/07/2024	07/07/2025	438.075,00	465.300,00
450	000922/SKPD/04/1/2023	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	1.806.750,00	08/07/2024	07/07/2025	876.150,00	930.600,00
451	000923/SKPD/04/1/2023	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	903.375,00	08/07/2024	07/07/2025	438.075,00	465.300,00
452	000923/SKPD/04/1/2023	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	1.806.750,00	08/07/2024	07/07/2025	876.150,00	930.600,00
453	000924/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	903.375,00	08/07/2024	07/07/2025	438.075,00	465.300,00
454	000924/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	1.806.750,00	08/07/2024	07/07/2025	876.150,00	930.600,00
455	000925/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	903.375,00	08/07/2024	07/07/2025	438.075,00	465.300,00
456	000925/SKPD/04/1/2024	03/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	1.806.750,00	08/07/2024	07/07/2025	876.150,00	930.600,00
457	000927/SKPD/04/1/2024	04/07/2024	P . 2 . 0014950 . 20 . 4	722.700,00	30/03/2024	29/03/2025	548.460,00	174.240,00
458	000928/SKPD/04/1/2024	04/07/2024	P . 2 . 0015849 . 20 . 4	1.204.500,00	01/07/2024	30/06/2025	607.200,00	597.300,00
459	000929/SKPD/04/1/2024	04/07/2024	P . 2 . 0000021 . 30 . 3	3.613.500,00	21/07/2024	20/07/2025	1.623.600,00	1.989.900,00
460	000930/SKPD/04/1/2024	04/07/2024	P . 2 . 0000040 . 30 . 2	3.372.600,00	21/07/2024	20/07/2025	1.515.360,00	1.857.240,00
461	000933/SKPD/04/1/2024	05/07/2024	P . 2 . 0017538 . 10 . 2	722.700,00	01/07/2024	30/06/2025	364.320,00	358.380,00
462	000934/SKPD/04/1/2024	05/07/2024	P . 2 . 0016069 . 30 . 3	722.700,00	06/05/2024	05/05/2025	475.200,00	247.500,00
463	000935/SKPD/04/1/2024	05/07/2024	P . 2 . 0014882 . 10 . 1	1.806.750,00	03/06/2024	02/06/2025	1.049.400,00	757.350,00
464	000936/SKPD/04/1/2024	05/07/2024	P . 2 . 0007788 . 30 . 3	198.000,00	03/07/2024	05/07/2024	198.000,00	-
465	000939/SKPD/04/1/2024	09/07/2024	P . 2 . 0016237 . 79 . 1	2.376.000,00	06/07/2024	04/08/2024	2.376.000,00	-
466	000940/SKPD/04/1/2024	09/07/2024	P . 2 . 0017546 . 20 . 2	2.047.650,00	05/07/2024	04/07/2025	1.009.800,00	1.037.850,00
467	000941/SKPD/04/1/2024	09/07/2024	P . 2 . 0011713 . 30 . 5	39.146.250,00	15/08/2024	14/08/2025	14.907.750,00	24.238.500,00
468	000942/SKPD/04/1/2024	10/07/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	10/07/2024	09/07/2025	577.500,00	627.000,00
469	000943/SKPD/04/1/2024	10/07/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	10/07/2024	09/07/2025	577.500,00	627.000,00
470	000944/SKPD/04/1/2024	10/07/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	1.204.500,00	10/07/2024	09/07/2025	577.500,00	627.000,00
471	000945/SKPD/04/1/2024	11/07/2024	P . 2 . 0017547 . 102 . 1	495.000,00	08/07/2024	22/07/2024	495.000,00	-
472	000946/SKPD/04/1/2024	11/07/2024	P . 2 . 0014364 . 30 . 2	939.510,00	26/06/2024	25/06/2025	486.486,00	453.024,00
473	000947/SKPD/04/1/2024	11/07/2024	P . 2 . 0007917 . 30 . 3	2.409.000,00	19/01/2024	18/01/2025	2.290.524,59	118.475,41
474	000948/SKPD/04/1/2024	12/07/2024	P . 2 . 0015803 . 10 . 1	1.204.500,00	29/06/2024	28/06/2025	613.800,00	590.700,00
475	000949/SKPD/04/1/2024	12/07/2024	P . 2 . 0016128 . 10 . 2	1.084.050,00	26/06/2024	25/06/2025	561.330,00	522.720,00
476	000950/SKPD/04/1/2024	12/07/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	4.504.500,00	15/07/2024	28/07/2024	4.504.500,00	-
477	000951/SKPD/04/1/2024	12/07/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	50.107.200,00	01/04/2024	31/03/2025	37.752.000,00	12.355.200,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
478	000953/SKPD/04/1/2024	15/07/2024	P . 2 . 0015181 . 46 . 2	6.106.815,00	15/07/2024	14/07/2025	2.844.270,00	3.262.545,00
479	000955/SKPD/04/1/2024	15/07/2024	P . 2 . 0015181 . 46 . 2	5.420.250,00	30/08/2024	29/08/2025	1.841.400,00	3.578.850,00
480	000955/SKPD/04/1/2024	15/07/2024	P . 2 . 0015181 . 46 . 2	7.227.000,00	30/08/2024	29/08/2025	2.455.200,00	4.771.800,00
481	000956/SKPD/04/1/2024	15/07/2024	P . 2 . 0006782 . 30 . 2	1.806.750,00	23/05/2024	22/05/2025	1.103.850,00	702.900,00
482	001008/SKPD/04/1/2024	15/07/2024	P . 2 . 0016660 . 20 . 2	2.529.450,00	20/06/2024	19/06/2025	1.351.350,00	1.178.100,00
483	000957/SKPD/04/1/2024	16/07/2024	P . 2 . 0015181 . 46 . 2	2.409.000,00	05/08/2024	04/08/2025	983.400,00	1.425.600,00
484	000957/SKPD/04/1/2024	16/07/2024	P . 2 . 0015181 . 46 . 2	16.802.775,00	05/08/2024	04/08/2025	6.859.215,00	9.943.560,00
485	000961/SKPD/04/1/2024	16/07/2024	P . 2 . 0014652 . 20 . 2	2.190.000,00	12/07/2024	11/07/2025	1.038.000,00	1.152.000,00
486	000961/SKPD/04/1/2024	16/07/2024	P . 2 . 0014652 . 20 . 2	4.927.500,00	12/07/2024	11/07/2025	2.335.500,00	2.592.000,00
487	000962/SKPD/04/1/2024	16/07/2024	P . 2 . 0010740 . 30 . 1	602.250,00	18/07/2024	17/07/2025	275.550,00	326.700,00
488	000963/SKPD/04/1/2024	16/07/2024	P . 2 . 0010740 . 30 . 1	1.806.750,00	18/07/2024	17/07/2025	826.650,00	980.100,00
489	000963/SKPD/04/1/2024	16/07/2024	P . 2 . 0010740 . 30 . 1	2.890.800,00	18/07/2024	17/07/2025	1.322.640,00	1.568.160,00
490	000964/SKPD/04/1/2024	17/07/2024	P . 2 . 0015181 . 46 . 2	1.806.750,00	05/10/2024	04/10/2025	435.600,00	1.371.150,00
491	000965/SKPD/04/1/2024	17/07/2024	P . 2 . 0017548 . 30 . 2	867.240,00	17/07/2024	16/07/2025	399.168,00	468.072,00
492	000966/SKPD/04/1/2024	17/07/2024	P . 2 . 0015575 . 20 . 2	99.000,00	16/07/2024	20/07/2024	99.000,00	-
493	000968/SKPD/04/1/2024	19/07/2024	P . 2 . 0016521 . 93 . 1	8.758.134,00	07/07/2024	31/12/2024	8.758.134,00	-
494	000969/SKPD/04/1/2024	19/07/2024	P . 2 . 0016719 . 93 . 1	1.023.825,00	06/07/2024	05/07/2025	502.095,00	521.730,00
495	000970/SKPD/04/1/2024	19/07/2024	P . 2 . 0016521 . 93 . 1	1.154.818,50	06/07/2024	31/12/2024	1.154.818,50	-
496	000971/SKPD/04/1/2024	19/07/2024	P . 2 . 0016521 . 93 . 1	1.446.637,50	18/07/2024	17/07/2025	661.886,20	784.751,30
497	000973/SKPD/04/1/2024	19/07/2024	P . 2 . 0016664 . 101 . 1	21.078.750,00	03/07/2024	02/07/2025	10.510.500,00	10.568.250,00
498	000976/SKPD/04/1/2024	23/07/2024	P . 2 . 0016078 . 30 . 4	2.737.500,00	18/05/2024	17/05/2025	1.710.000,00	1.027.500,00
499	000977/SKPD/04/1/2024	23/07/2024	P . 2 . 0016078 . 30 . 4	2.409.000,00	18/05/2024	17/05/2025	1.504.800,00	904.200,00
500	000978/SKPD/04/1/2024	23/07/2024	P . 2 . 0016078 . 30 . 4	3.161.812,50	18/05/2024	17/05/2025	1.975.050,00	1.186.762,50
501	000979/SKPD/04/1/2024	23/07/2024	P . 2 . 0016078 . 30 . 4	1.314.000,00	25/05/2024	24/05/2025	795.600,00	518.400,00
502	000979/SKPD/04/1/2024	23/07/2024	P . 2 . 0016078 . 30 . 4	2.190.000,00	25/05/2024	24/05/2025	1.326.000,00	864.000,00
503	000980/SKPD/04/1/2024	23/07/2024	P . 2 . 0016078 . 30 . 4	2.409.000,00	25/05/2024	24/05/2025	1.458.600,00	950.400,00
504	000980/SKPD/04/1/2024	23/07/2024	P . 2 . 0016078 . 30 . 4	2.409.000,00	25/05/2024	24/05/2025	1.458.600,00	950.400,00
505	000981/SKPD/04/1/2024	23/07/2024	P . 2 . 0016078 . 30 . 4	2.409.000,00	25/05/2024	24/05/2025	1.458.600,00	950.400,00
506	000981/SKPD/04/1/2024	23/07/2024	P . 2 . 0016078 . 30 . 4	5.781.600,00	25/05/2024	24/05/2025	3.500.640,00	2.280.960,00
507	000982/SKPD/04/1/2024	23/07/2024	P . 2 . 0016078 . 30 . 4	2.190.000,00	18/05/2024	17/05/2025	1.368.000,00	822.000,00
508	000982/SKPD/04/1/2024	23/07/2024	P . 2 . 0016078 . 30 . 4	2.874.375,00	18/05/2024	17/05/2025	1.795.500,00	1.078.875,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
509	000975/SKPD/04/1/2024	24/07/2024	P . 2 . 0007788 . 30 . 3	3.487.500,00	29/06/2024	29/07/2024	3.487.500,00	-
510	000983/SKPD/04/1/2024	24/07/2024	P . 2 . 0016369 . 30 . 3	5.962.275,00	19/05/2024	18/05/2025	3.708.045,00	2.254.230,00
511	000987/SKPD/04/1/2024	24/07/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	2.529.450,00	04/07/2024	03/07/2025	1.254.330,00	1.275.120,00
512	000989/SKPD/04/1/2024	24/07/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	2.529.450,00	04/07/2024	03/07/2025	1.254.330,00	1.275.120,00
513	001006/SKPD/04/1/2024	24/07/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	2.529.450,00	04/07/2024	03/07/2025	1.254.330,00	1.275.120,00
514	000988/SKPD/04/1/2024	25/07/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.897.087,50	04/07/2024	03/07/2025	940.747,50	956.340,00
515	000990/SKPD/04/1/2024	25/07/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.897.087,50	04/07/2024	03/07/2025	940.747,50	956.340,00
516	000991/SKPD/04/1/2024	25/07/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.897.087,50	04/07/2024	03/07/2025	940.747,50	956.340,00
517	000992/SKPD/04/1/2024	25/07/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.897.087,50	04/07/2024	03/07/2025	940.747,50	956.340,00
518	000993/SKPD/04/1/2024	25/07/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.897.087,50	04/07/2024	03/07/2025	940.747,50	956.340,00
519	000994/SKPD/04/1/2024	25/07/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.897.087,50	04/07/2024	03/07/2025	940.747,50	956.340,00
520	000995/SKPD/04/1/2024	25/07/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.897.087,50	04/07/2024	03/07/2025	940.747,50	956.340,00
521	000996/SKPD/04/1/2024	25/07/2024	P . 2 . 0016361 . 20 . 3	1.897.087,50	04/07/2024	03/07/2025	940.747,50	956.340,00
522	000997/SKPD/04/1/2024	25/07/2024	P . 2 . 0003547 . 30 . 2	903.375,00	10/08/2024	09/08/2025	356.400,00	546.975,00
523	000998/SKPD/04/1/2024	25/07/2024	P . 2 . 0016045 . 30 . 4	5.058.900,00	12/07/2024	11/07/2025	2.397.780,00	2.661.120,00
524	000999/SKPD/04/1/2024	26/07/2024	P . 2 . 0006651 . 30 . 2	867.240,00	04/07/2024	03/07/2025	430.056,00	437.184,00
525	001001/SKPD/04/1/2024	26/07/2024	P . 2 . 0016108 . 20 . 3	289.080,00	15/07/2024	14/07/2025	134.640,00	154.440,00
526	001003/SKPD/04/1/2024	26/07/2024	P . 2 . 0005303 . 30 . 3	963.600,00	21/04/2024	20/04/2025	673.200,00	290.400,00
527	001004/SKPD/04/1/2024	26/07/2024	P . 2 . 0015891 . 30 . 4	963.600,00	27/07/2024	26/07/2025	417.120,00	546.480,00
528	001005/SKPD/04/1/2024	26/07/2024	P . 2 . 0016180 . 30 . 4	602.250,00	16/06/2024	15/06/2025	328.350,00	273.900,00
529	001005/SKPD/04/1/2024	26/07/2024	P . 2 . 0016180 . 30 . 4	2.409.000,00	16/06/2024	15/06/2025	1.313.400,00	1.095.600,00
530	001007/SKPD/04/1/2024	30/07/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	7.722.000,00	01/08/2024	30/08/2024	7.722.000,00	-
531	001010/SKPD/04/1/2024	30/07/2024	P . 2 . 0005179 . 30 . 3	451.687,50	07/07/2024	06/07/2025	220.275,00	231.412,50
532	001012/SKPD/04/1/2024	30/07/2024	P . 2 . 0016753 . 104 . 1	297.000,00	29/07/2024	26/09/2024	297.000,00	-
533	001013/SKPD/04/1/2024	31/07/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	12.918.262,50	29/07/2024	28/07/2025	5.521.230,00	7.397.032,50
534	001014/SKPD/04/1/2024	01/08/2024	P . 2 . 0007665 . 20 . 4	722.700,00	05/01/2024	04/01/2025	714.801,64	7.898,36
535	001015/SKPD/04/1/2024	01/08/2024	P . 2 . 0004903 . 30 . 3	7.588.350,00	15/06/2024	14/06/2025	4.158.000,00	3.430.350,00
536	001045/SKPD/04/1/2024	01/08/2024	P . 2 . 0003831 . 30 . 2	3.131.700,00	29/07/2024	28/07/2025	1.338.480,00	1.793.220,00
537	001076/SKPD/04/1/2024	01/08/2024	P . 2 . 0016343 . 30 . 2	650.430,00	15/03/2024	14/03/2025	520.344,00	130.086,00
538	001077/SKPD/04/1/2024	01/08/2024	P . 2 . 0016343 . 30 . 2	2.409.000,00	15/09/2024	14/09/2025	712.800,00	1.696.200,00
539	001078/SKPD/04/1/2024	01/08/2024	P . 2 . 0016094 . 20 . 3	1.204.500,00	25/06/2024	24/06/2025	627.000,00	577.500,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
540	001081/SKPD/04/1/2024	02/08/2024	P . 2 . 0011713 . 30 . 5	30.112.500,00	01/08/2024	31/08/2025	11.634.375,00	18.478.125,00
541	001092/SKPD/04/1/2024	06/08/2024	P . 2 . 0016045 . 30 . 4	4.336.200,00	25/08/2024	24/08/2025	1.532.520,00	2.803.680,00
542	001095/SKPD/04/1/2024	06/08/2024	P . 2 . 0016243 . 80 . 1	1.204.500,00	14/09/2024	13/09/2025	359.700,00	844.800,00
543	001096/SKPD/04/1/2024	06/08/2024	P . 2 . 0016243 . 80 . 1	7.227.000,00	28/07/2024	27/07/2025	3.108.600,00	4.118.400,00
544	001097/SKPD/04/1/2024	06/08/2024	P . 2 . 0016243 . 80 . 1	1.806.750,00	06/08/2024	05/08/2025	732.600,00	1.074.150,00
545	001098/SKPD/04/1/2024	06/08/2024	P . 2 . 0013243 . 20 . 2	7.287.225,00	15/08/2024	14/08/2025	2.775.135,00	4.512.090,00
546	001101/SKPD/04/1/2024	08/08/2024	P . 2 . 0013782 . 10 . 1	1.204.500,00	08/08/2024	07/08/2025	481.800,00	722.700,00
547	001102/SKPD/04/1/2024	08/08/2024	P . 2 . 0007788 . 30 . 3	970.200,00	08/08/2024	14/08/2024	970.200,00	-
548	001103/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0016237 . 79 . 1	3.600.000,00	09/08/2024	07/09/2024	3.600.000,00	-
549	001104/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	43.800.000,00	15/09/2024	14/09/2025	12.960.000,00	30.840.000,00
550	001105/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	8.059.200,00	15/09/2024	14/09/2025	2.384.640,00	5.674.560,00
551	001106/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	6.447.360,00	15/09/2024	14/09/2025	1.907.712,00	4.539.648,00
552	001107/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	10.840.500,00	13/09/2024	12/09/2025	3.267.000,00	7.573.500,00
553	001108/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	7.829.250,00	13/09/2024	12/09/2025	2.359.500,00	5.469.750,00
554	001110/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	10.238.250,00	13/09/2024	12/09/2025	3.085.500,00	7.152.750,00
555	001111/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	10.117.800,00	09/08/2024	08/08/2025	4.019.400,00	6.098.400,00
556	001112/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	3.131.700,00	09/08/2024	08/08/2025	1.244.100,00	1.887.600,00
557	001113/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	18.820.312,50	13/09/2024	12/09/2025	5.671.875,00	13.148.437,50
558	001114/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	15.056.250,00	09/08/2024	08/08/2025	5.981.250,00	9.075.000,00
559	001115/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	3.613.500,00	09/08/2024	08/08/2025	1.435.500,00	2.178.000,00
560	001116/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	14.454.000,00	09/08/2024	08/08/2025	5.742.000,00	8.712.000,00
561	001117/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	4.516.875,00	13/09/2024	12/09/2025	1.361.250,00	3.155.625,00
562	001118/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	4.818.000,00	20/11/2023	19/11/2024	4.818.000,00	-
563	001119/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	2.409.000,00	20/11/2023	19/11/2024	2.409.000,00	-
564	001120/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	3.011.250,00	22/11/2023	21/11/2024	3.011.250,00	-
565	001121/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0006871 . 30 . 1	867.240,00	14/12/2024	13/12/2025	42.768,00	824.472,00
566	001122/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0006871 . 30 . 1	10.840.500,00	08/08/2024	07/08/2025	4.336.200,00	6.504.300,00
567	001123/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0017560 . 30 . 5	558.888,00	12/08/2024	11/08/2025	217.430,40	341.457,60
568	001124/SKPD/04/1/2024	12/08/2024	P . 2 . 0005702 . 10 . 1	5.167.305,00	29/07/2024	28/07/2025	2.208.492,00	2.958.813,00
569	001126/SKPD/04/1/2024	14/08/2024	P . 2 . 0000553 . 30 . 3	3.468.960,00	14/08/2024	13/08/2025	1.330.560,00	2.138.400,00
570	001130/SKPD/04/1/2024	19/08/2024	P . 2 . 0016377 . 30 . 3	1.445.400,00	06/06/2024	05/06/2025	827.640,00	617.760,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
571	001131/SKPD/04/1/2024	19/08/2024	P . 2 . 0001744 . 20 . 2	1.204.500,00	07/06/2024	06/06/2025	686.400,00	518.100,00
572	001131/SKPD/04/1/2024	19/08/2024	P . 2 . 0001744 . 20 . 2	3.021.849,60	07/06/2024	06/06/2025	1.722.040,32	1.299.809,28
573	001132/SKPD/04/1/2024	19/08/2024	P . 2 . 0001744 . 20 . 2	3.372.600,00	30/08/2024	29/08/2025	1.145.760,00	2.226.840,00
574	001133/SKPD/04/1/2024	20/08/2024	P . 2 . 0013942 . 30 . 3	915.000,00	29/03/2024	28/07/2024	915.000,00	-
575	001133/SKPD/04/1/2024	20/08/2024	P . 2 . 0013942 . 30 . 3	2.415.600,00	29/03/2024	28/07/2024	2.415.600,00	-
576	001133/SKPD/04/1/2024	20/08/2024	P . 2 . 0013942 . 30 . 3	12.078.000,00	29/03/2024	28/07/2024	12.078.000,00	-
577	001135/SKPD/04/1/2024	20/08/2024	P . 2 . 0011510 . 30 . 3	843.150,00	07/07/2024	06/07/2025	411.180,00	431.970,00
578	001136/SKPD/04/1/2024	20/08/2024	P . 2 . 0004568 . 20 . 4	1.806.750,00	14/09/2024	13/09/2025	539.550,00	1.267.200,00
579	001136/SKPD/04/1/2024	20/08/2024	P . 2 . 0004568 . 20 . 4	2.649.900,00	14/09/2024	13/09/2025	791.340,00	1.858.560,00
580	001137/SKPD/04/1/2024	20/08/2024	P . 2 . 0016679 . 30 . 3	1.385.175,00	14/08/2024	13/08/2025	531.300,00	853.875,00
581	001137/SKPD/04/1/2024	20/08/2024	P . 2 . 0016679 . 30 . 3	11.324.709,00	14/08/2024	13/08/2025	4.343.724,00	6.980.985,00
582	001138/SKPD/04/1/2024	20/08/2024	P . 2 . 0000430 . 20 . 4	9.238.515,00	23/08/2024	22/08/2025	3.315.741,00	5.922.774,00
583	001139/SKPD/04/1/2024	20/08/2024	P . 2 . 0015093 . 20 . 4	3.613.500,00	31/07/2024	30/07/2025	1.524.600,00	2.088.900,00
584	001140/SKPD/04/1/2024	20/08/2024	P . 2 . 0002982 . 30 . 2	1.686.300,00	20/08/2024	19/08/2025	619.080,00	1.067.220,00
585	001143/SKPD/04/1/2024	21/08/2024	P . 2 . 0016696 . 30 . 2	1.806.750,00	10/08/2024	09/08/2025	712.800,00	1.093.950,00
586	001143/SKPD/04/1/2024	21/08/2024	P . 2 . 0016696 . 30 . 2	3.730.938,75	10/08/2024	09/08/2025	1.471.932,00	2.259.006,75
587	001144/SKPD/04/1/2024	21/08/2024	P . 2 . 0016695 . 20 . 2	1.806.750,00	10/08/2024	09/08/2025	712.800,00	1.093.950,00
588	001144/SKPD/04/1/2024	21/08/2024	P . 2 . 0016695 . 20 . 2	3.730.938,75	10/08/2024	09/08/2025	1.471.932,00	2.259.006,75
589	001145/SKPD/04/1/2024	22/08/2024	P . 2 . 0000040 . 30 . 2	742.500,00	21/08/2024	19/09/2024	742.500,00	-
590	001146/SKPD/04/1/2024	22/08/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	26.576.550,00	19/08/2024	17/09/2024	26.576.550,00	-
591	001147/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0007204 . 20 . 3	975.645,00	23/08/2024	22/08/2025	350.163,00	625.482,00
592	001148/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0007204 . 20 . 3	590.205,00	23/08/2024	22/08/2025	211.827,00	378.378,00
593	001149/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0007204 . 20 . 3	590.205,00	23/08/2024	22/08/2025	211.827,00	378.378,00
594	001150/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0017546 . 20 . 2	1.836.862,50	26/08/2024	25/08/2025	644.160,00	1.192.702,50
595	001151/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
596	001152/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	3.613.500,00	31/08/2024	30/08/2025	1.217.700,00	2.395.800,00
597	001153/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
598	001154/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
599	001155/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
600	001156/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
601	001157/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
602	001158/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
603	001159/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
604	001160/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
605	001161/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
606	001162/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
607	001163/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
608	001164/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
609	001165/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0016718 . 20 . 4	1.445.400,00	31/08/2024	30/08/2025	487.080,00	958.320,00
610	001167/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0017562 . 114 . 1	2.107.875,00	26/08/2024	25/08/2025	739.200,00	1.368.675,00
611	001168/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0017554 . 30 . 3	1.445.400,00	26/08/2024	25/08/2025	506.880,00	938.520,00
612	001168/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0017554 . 30 . 3	1.686.300,00	26/08/2024	25/08/2025	591.360,00	1.094.940,00
613	001169/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0017554 . 30 . 3	306.900,00	26/08/2024	25/09/2024	306.900,00	-
614	001170/SKPD/04/1/2024	26/08/2024	P . 2 . 0017554 . 30 . 3	153.450,00	26/08/2024	25/09/2024	153.450,00	-
615	001171/SKPD/04/1/2024	27/08/2024	P . 2 . 0015145 . 61 . 1	3.116.643,75	20/08/2024	19/08/2025	1.144.192,50	1.972.451,25
616	001172/SKPD/04/1/2024	27/08/2024	P . 2 . 0015145 . 61 . 1	3.116.643,75	20/08/2024	19/08/2025	1.144.192,50	1.972.451,25
617	001173/SKPD/04/1/2024	27/08/2024	P . 2 . 0015145 . 61 . 1	6.070.680,00	20/08/2024	19/08/2025	2.228.688,00	3.841.992,00
618	001174/SKPD/04/1/2024	27/08/2024	P . 2 . 0005009 . 30 . 4	1.806.750,00	26/08/2024	25/08/2025	633.600,00	1.173.150,00
619	001176/SKPD/04/1/2024	30/08/2024	P . 2 . 0016635 . 43 . 2	178.200,00	31/08/2024	01/09/2024	178.200,00	-
620	001177/SKPD/04/1/2024	30/08/2024	P . 2 . 0016493 . 30 . 3	1.386.000,00	29/08/2024	11/09/2024	1.386.000,00	-
621	001178/SKPD/04/1/2024	30/08/2024	P . 2 . 0014967 . 57 . 1	9.033.750,00	02/08/2024	01/08/2025	3.762.000,00	5.271.750,00
622	001179/SKPD/04/1/2024	30/08/2024	P . 2 . 0014967 . 57 . 1	9.033.750,00	02/08/2024	01/08/2025	3.762.000,00	5.271.750,00
623	001180/SKPD/04/1/2024	30/08/2024	P . 2 . 0015409 . 65 . 1	965.250,00	01/09/2024	15/09/2024	965.250,00	-
624	001242/SKPD/04/1/2024	02/09/2024	P . 2 . 0000334 . 20 . 2	3.613.500,00	28/08/2024	27/08/2025	1.247.400,00	2.366.100,00
625	001244/SKPD/04/1/2024	03/09/2024	P . 2 . 0000334 . 20 . 2	1.642.500,00	28/08/2024	27/08/2025	567.000,00	1.075.500,00
626	001244/SKPD/04/1/2024	03/09/2024	P . 2 . 0000334 . 20 . 2	8.869.500,00	28/08/2024	27/08/2025	3.061.800,00	5.807.700,00
627	001244/SKPD/04/1/2024	03/09/2024	P . 2 . 0000334 . 20 . 2	41.555.250,00	28/08/2024	27/08/2025	14.345.100,00	27.210.150,00
628	001248/SKPD/04/1/2024	03/09/2024	P . 2 . 0000380 . 20 . 3	225.225,00	04/09/2024	10/09/2024	225.225,00	-
629	001249/SKPD/04/1/2024	03/09/2024	P . 2 . 0000380 . 20 . 3	225.225,00	14/09/2024	21/09/2024	225.225,00	-
630	001252/SKPD/04/1/2024	09/09/2024	P . 2 . 0016429 . 10 . 4	2.190.000,00	07/09/2024	06/09/2025	696.000,00	1.494.000,00
631	001253/SKPD/04/1/2024	09/09/2024	P . 2 . 0016090 . 30 . 3	30.112.500,00	02/08/2024	01/08/2025	12.540.000,00	17.572.500,00
632	001254/SKPD/04/1/2024	09/09/2024	P . 2 . 0016090 . 30 . 3	30.112.500,00	02/08/2024	01/08/2025	12.540.000,00	17.572.500,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
633	001255/SKPD/04/1/2024	09/09/2024	P . 2 . 0005127 . 30 . 2	547.500,00	18/08/2024	17/08/2025	204.000,00	343.500,00
634	001255/SKPD/04/1/2024	09/09/2024	P . 2 . 0005127 . 30 . 2	1.064.340,00	18/08/2024	17/08/2025	396.576,00	667.764,00
635	001255/SKPD/04/1/2024	09/09/2024	P . 2 . 0005127 . 30 . 2	1.182.600,00	18/08/2024	17/08/2025	440.640,00	741.960,00
636	001255/SKPD/04/1/2024	09/09/2024	P . 2 . 0005127 . 30 . 2	2.737.500,00	18/08/2024	17/08/2025	1.020.000,00	1.717.500,00
637	001255/SKPD/04/1/2024	09/09/2024	P . 2 . 0005127 . 30 . 2	6.468.165,00	18/08/2024	17/08/2025	2.410.056,00	4.058.109,00
638	001255/SKPD/04/1/2024	09/09/2024	P . 2 . 0005127 . 30 . 2	29.004.360,00	18/08/2024	17/08/2025	10.807.104,00	18.197.256,00
639	001257/SKPD/04/1/2024	10/09/2024	P . 2 . 0004100 . 30 . 3	1.806.750,00	28/07/2024	27/07/2025	777.150,00	1.029.600,00
640	001258/SKPD/04/1/2024	10/09/2024	P . 2 . 0016719 . 93 . 1	894.341,25	05/09/2024	04/09/2025	289.129,50	605.211,75
641	001259/SKPD/04/1/2024	10/09/2024	P . 2 . 0016130 . 30 . 4	1.156.320,00	30/08/2024	29/08/2025	392.832,00	763.488,00
642	001260/SKPD/04/1/2024	10/09/2024	P . 2 . 0005527 . 30 . 3	590.205,00	02/05/2024	01/05/2025	394.548,00	195.657,00
643	001260/SKPD/04/1/2024	10/09/2024	P . 2 . 0005527 . 30 . 3	2.409.000,00	02/05/2024	01/05/2025	1.610.400,00	798.600,00
644	001261/SKPD/04/1/2024	11/09/2024	P . 2 . 0015543 . 30 . 2	843.150,00	21/08/2024	20/08/2025	307.230,00	535.920,00
645	001262/SKPD/04/1/2024	11/09/2024	P . 2 . 0011509 . 30 . 1	3.613.500,00	27/05/2024	26/05/2025	2.168.100,00	1.445.400,00
646	001263/SKPD/04/1/2024	12/09/2024	P . 2 . 0017573 . 20 . 4	867.240,00	11/09/2024	10/09/2025	266.112,00	601.128,00
647	001265/SKPD/04/1/2024	12/09/2024	P . 2 . 0005578 . 30 . 1	2.737.500,00	07/09/2024	06/09/2025	870.000,00	1.867.500,00
648	001266/SKPD/04/1/2024	13/09/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	07/09/2024	06/09/2025	531.135,00	1.140.108,75
649	001266/SKPD/04/1/2024	13/09/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	07/09/2024	06/09/2025	2.181.960,00	4.683.690,00
650	001267/SKPD/04/1/2024	13/09/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	07/08/2024	06/08/2025	673.076,25	998.167,50
651	001267/SKPD/04/1/2024	13/09/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	07/08/2024	06/08/2025	2.765.070,00	4.100.580,00
652	001268/SKPD/04/1/2024	13/09/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	07/09/2024	06/09/2025	531.135,00	1.140.108,75
653	001268/SKPD/04/1/2024	13/09/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	07/09/2024	06/09/2025	2.181.960,00	4.683.690,00
654	001269/SKPD/04/1/2024	13/09/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	1.671.243,75	06/12/2024	05/12/2025	119.047,50	1.552.196,25
655	001269/SKPD/04/1/2024	13/09/2024	P . 2 . 0016055 . 69 . 1	6.865.650,00	06/12/2024	05/12/2025	489.060,00	6.376.590,00
656	001270/SKPD/04/1/2024	13/09/2024	P . 2 . 0017575 . 30 . 3	74.250,00	13/09/2024	15/09/2024	74.250,00	-
657	001271/SKPD/04/1/2024	17/09/2024	P . 2 . 0014582 . 30 . 1	1.445.400,00	22/09/2024	21/09/2025	399.960,00	1.045.440,00
658	001272/SKPD/04/1/2024	17/09/2024	P . 2 . 0012843 . 20 . 1	722.700,00	05/09/2024	04/09/2025	233.640,00	489.060,00
659	001273/SKPD/04/1/2024	17/09/2024	P . 2 . 0015188 . 20 . 3	4.516.875,00	14/09/2024	13/09/2025	1.348.875,00	3.168.000,00
660	001276/SKPD/04/1/2024	17/09/2024	P . 2 . 0015370 . 30 . 1	1.565.850,00	18/08/2024	17/08/2025	583.440,00	982.410,00
661	001277/SKPD/04/1/2024	17/09/2024	P . 2 . 0011022 . 30 . 3	4.599.000,00	25/07/2024	24/07/2025	2.016.000,00	2.583.000,00
662	001278/SKPD/04/1/2024	17/09/2024	P . 2 . 0016738 . 20 . 3	770.880,00	21/09/2024	20/09/2025	215.424,00	555.456,00
663	001284/SKPD/04/1/2024	19/09/2024	P . 2 . 0002679 . 20 . 3	5.475.000,00	19/09/2024	18/09/2025	1.560.000,00	3.915.000,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
664	001286/SKPD/04/1/2024	23/09/2024	P . 2 . 0006452 . 30 . 3	903.375,00	01/09/2024	31/08/2025	301.950,00	601.425,00
665	001287/SKPD/04/1/2024	23/09/2024	P . 2 . 0013942 . 30 . 3	922.500,00	29/07/2024	28/11/2024	922.500,00	-
666	001287/SKPD/04/1/2024	23/09/2024	P . 2 . 0013942 . 30 . 3	2.435.400,00	29/07/2024	28/11/2024	2.435.400,00	-
667	001287/SKPD/04/1/2024	23/09/2024	P . 2 . 0013942 . 30 . 3	12.177.000,00	29/07/2024	28/11/2024	12.177.000,00	-
668	001288/SKPD/04/1/2024	23/09/2024	P . 2 . 0015912 . 20 . 4	15.610.320,00	24/08/2024	23/08/2025	5.559.840,00	10.050.480,00
669	001289/SKPD/04/1/2024	23/09/2024	P . 2 . 0015409 . 65 . 1	37.580.400,00	01/11/2024	31/10/2025	6.280.560,00	31.299.840,00
670	001290/SKPD/04/1/2024	24/09/2024	P . 2 . 0000220 . 30 . 2	2.211.462,00	06/10/2024	05/10/2025	527.115,60	1.684.346,40
671	001291/SKPD/04/1/2004	24/09/2024	P . 2 . 0000220 . 30 . 2	2.682.662,40	06/10/2024	05/10/2025	639.429,12	2.043.233,28
672	001291/SKPD/04/1/2004	24/09/2024	P . 2 . 0000220 . 30 . 2	15.111.000,00	06/10/2024	05/10/2025	3.601.800,00	11.509.200,00
673	001292/SKPD/04/1/2024	24/09/2024	P . 2 . 0015409 . 65 . 1	37.580.400,00	01/09/2024	31/08/2025	12.561.120,00	25.019.280,00
674	001293/SKPD/04/1/2024	24/09/2024	P . 2 . 0015409 . 65 . 1	2.562.300,00	23/09/2024	22/09/2025	702.000,00	1.860.300,00
675	001293/SKPD/04/1/2024	24/09/2024	P . 2 . 0015409 . 65 . 1	5.694.000,00	23/09/2024	22/09/2025	1.560.000,00	4.134.000,00
676	001293/SKPD/04/1/2024	24/09/2024	P . 2 . 0015409 . 65 . 1	6.263.400,00	23/09/2024	22/09/2025	1.716.000,00	4.547.400,00
677	001294/SKPD/04/1/2024	24/09/2024	P . 2 . 0011744 . 10 . 4	2.102.400,00	03/08/2024	02/08/2025	869.760,00	1.232.640,00
678	001296/SKPD/04/1/2024	25/09/2024	P . 2 . 0016742 . 83 . 1	18.067.500,00	16/09/2024	15/09/2025	5.296.500,00	12.771.000,00
679	001297/SKPD/04/1/2024	25/09/2024	P . 2 . 0016742 . 83 . 1	5.781.600,00	16/09/2024	15/09/2025	1.694.880,00	4.086.720,00
680	001298/SKPD/04/1/2024	25/09/2024	P . 2 . 0016742 . 83 . 1	7.227.000,00	16/09/2024	15/09/2025	2.118.600,00	5.108.400,00
681	001299/SKPD/04/1/2024	25/09/2024	P . 2 . 0016742 . 83 . 1	7.227.000,00	16/09/2024	15/09/2025	2.118.600,00	5.108.400,00
682	001300/SKPD/04/1/2024	25/09/2024	P . 2 . 0016742 . 83 . 1	7.227.000,00	16/09/2024	15/09/2025	2.118.600,00	5.108.400,00
683	001302/SKPD/04/1/2024	27/09/2024	P . 2 . 0011713 . 30 . 5	25.053.600,00	27/09/2024	26/09/2025	6.589.440,00	18.464.160,00
684	001303/SKPD/04/1/2024	27/09/2024	P . 2 . 0006811 . 10 . 2	10.840.500,00	09/07/2024	08/07/2025	5.227.200,00	5.613.300,00
685	001305/SKPD/04/1/2024	27/09/2024	P . 2 . 0005519 . 10 . 1	4.336.200,00	07/09/2024	06/09/2025	1.378.080,00	2.958.120,00
686	001306/SKPD/04/1/2024	27/09/2024	P . 2 . 0005519 . 10 . 1	3.547.800,00	07/09/2024	06/09/2025	1.127.520,00	2.420.280,00
687	001307/SKPD/04/1/2024	27/09/2024	P . 2 . 0005519 . 10 . 1	3.942.000,00	07/09/2024	06/09/2025	1.252.800,00	2.689.200,00
688	001308/SKPD/04/1/2024	27/09/2024	P . 2 . 0005519 . 10 . 1	4.336.200,00	07/09/2024	06/09/2025	1.378.080,00	2.958.120,00
689	001309/SKPD/04/1/2024	27/09/2024	P . 2 . 0005519 . 10 . 1	14.454.000,00	07/09/2024	06/09/2025	4.593.600,00	9.860.400,00
690	001310/SKPD/04/1/2024	27/09/2024	P . 2 . 0005519 . 10 . 1	4.336.200,00	07/09/2024	06/09/2025	1.378.080,00	2.958.120,00
691	001311/SKPD/04/1/2024	27/09/2024	P . 2 . 0005519 . 10 . 1	4.336.200,00	07/09/2024	06/09/2025	1.378.080,00	2.958.120,00
692	001312/SKPD/04/1/2024	27/09/2024	P . 2 . 0005519 . 10 . 1	3.942.000,00	07/09/2024	06/09/2025	1.252.800,00	2.689.200,00
693	001313/SKPD/04/1/2024	27/09/2024	P . 2 . 0005519 . 10 . 1	7.227.000,00	29/06/2024	28/06/2025	3.682.800,00	3.544.200,00
694	001314/SKPD/04/1/2024	30/09/2024	P . 2 . 0014967 . 57 . 1	6.022.500,00	22/09/2024	21/09/2025	1.666.500,00	4.356.000,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
695	001315/SKPD/04/1/2024	30/09/2024	P . 2 . 0014967 . 57 . 1	15.056.250,00	14/09/2024	13/09/2025	4.496.250,00	10.560.000,00
696	001316/SKPD/04/1/2024	30/09/2024	P . 2 . 0014451 . 30 . 3	4.818.000,00	20/09/2024	19/09/2025	1.359.600,00	3.458.400,00
697	001378/SKPD/04/1/2024	01/10/2024	P . 2 . 0006366 . 30 . 3	1.300.860,00	20/09/2024	19/09/2025	367.092,00	933.768,00
698	001379/SKPD/04/1/2024	01/10/2024	P . 2 . 0000135 . 30 . 4	25.294.500,00	25/11/2024	24/11/2025	2.564.100,00	22.730.400,00
699	001380/SKPD/04/1/2024	01/10/2024	P . 2 . 0000135 . 30 . 4	7.425.742,50	24/09/2024	23/09/2025	2.014.105,50	5.411.637,00
700	001383/SKPD/04/1/2024	02/10/2024	P . 2 . 0016733 . 30 . 4	1.349.040,00	18/09/2024	17/09/2025	388.080,00	960.960,00
701	001384/SKPD/04/1/2024	02/10/2024	P . 2 . 0016013 . 46 . 4	2.409.000,00	19/08/2024	18/08/2025	891.000,00	1.518.000,00
702	001385/SKPD/04/1/2024	02/10/2024	P . 2 . 0004663 . 10 . 2	1.445.400,00	01/08/2024	30/08/2025	559.863,80	885.536,20
703	001386/SKPD/04/1/2024	02/10/2024	P . 2 . 0014364 . 30 . 2	1.734.480,00	22/10/2024	21/10/2025	337.392,00	1.397.088,00
704	001387/SKPD/04/1/2024	02/10/2024	P . 2 . 0000443 . 20 . 3	782.925,00	02/10/2024	01/10/2025	195.195,00	587.730,00
705	001392/SKPD/04/1/2024	07/10/2024	P . 2 . 0003011 . 30 . 4	903.375,00	20/08/2024	19/08/2025	331.650,00	571.725,00
706	001393/SKPD/04/1/2024	07/10/2024	P . 2 . 0016748 . 20 . 3	963.600,00	04/10/2024	03/10/2025	234.960,00	728.640,00
707	001397/SKPD/04/1/2024	08/10/2024	P . 2 . 0015171 . 30 . 3	1.355.062,50	20/08/2024	19/08/2025	497.475,00	857.587,50
708	001398/SKPD/04/1/2024	08/10/2024	P . 2 . 0016458 . 20 . 1	289.080,00	12/10/2024	11/10/2025	64.152,00	224.928,00
709	001399/SKPD/04/1/2024	08/10/2024	P . 2 . 0015520 . 30 . 4	722.700,00	19/09/2024	18/09/2025	205.920,00	516.780,00
710	001400/SKPD/04/1/2024	08/10/2024	P . 2 . 0006500 . 30 . 1	3.596.531,40	26/04/2024	25/10/2024	3.596.531,40	-
711	001400/SKPD/04/1/2024	08/10/2024	P . 2 . 0006500 . 30 . 1	4.827.900,00	26/04/2024	25/10/2024	4.827.900,00	-
712	001402/SKPD/04/1/2024	09/10/2024	P . 2 . 0007714 . 20 . 1	14.454.000,00	15/10/2024	14/10/2025	3.088.800,00	11.365.200,00
713	001403/SKPD/04/1/2024	09/10/2024	P . 2 . 0000509 . 20 . 4	4.336.200,00	24/01/2024	23/01/2025	4.063.706,56	272.493,44
714	001404/SKPD/04/1/2024	09/10/2024	P . 2 . 0000509 . 20 . 4	1.204.500,00	21/10/2024	20/10/2025	237.600,00	966.900,00
715	001405/SKPD/04/1/2024	09/10/2024	P . 2 . 0003816 . 30 . 1	361.350,00	11/03/2024	10/03/2025	293.040,00	68.310,00
716	001406/SKPD/04/1/2024	09/10/2024	P . 2 . 0016070 . 74 . 1	6.022.500,00	06/05/2024	05/05/2025	3.960.000,00	2.062.500,00
717	001407/SKPD/04/1/2024	09/10/2024	P . 2 . 0016070 . 74 . 1	2.409.000,00	11/03/2024	10/03/2025	1.953.600,00	455.400,00
718	001408/SKPD/04/1/2024	09/10/2024	P . 2 . 0002369 . 20 . 2	1.806.750,00	14/06/2024	13/06/2025	994.950,00	811.800,00
719	001409/SKPD/04/1/2024	09/10/2024	P . 2 . 0005276 . 30 . 3	2.409.000,00	15/12/2024	14/12/2025	112.200,00	2.296.800,00
720	001410/SKPD/04/1/2024	09/10/2024	P . 2 . 0001544 . 30 . 2	2.107.875,00	14/06/2024	13/06/2025	1.160.775,00	947.100,00
721	001411/SKPD/04/1/2024	09/10/2024	P . 2 . 0006648 . 20 . 2	2.529.450,00	02/11/2024	01/11/2025	415.800,00	2.113.650,00
722	001412/SKPD/04/1/2024	09/10/2024	P . 2 . 0006851 . 40 . 2	5.913.000,00	06/08/2024	05/08/2025	2.397.600,00	3.515.400,00
723	001413/SKPD/04/1/2024	10/10/2024	P . 2 . 0000666 . 30 . 1	7.528.125,00	08/10/2024	07/10/2025	1.753.125,00	5.775.000,00
724	001414/SKPD/04/1/2024	10/10/2024	P . 2 . 0000666 . 30 . 1	2.710.125,00	08/10/2024	07/10/2025	631.125,00	2.079.000,00
725	001416/SKPD/04/1/2024	10/10/2024	P . 2 . 0015712 . 40 . 1	1.852.740,00	13/02/2024	12/02/2025	1.635.068,36	217.671,64

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
726	001417/SKPD/04/1/2024	10/10/2024	P . 2 . 0015711 . 40 . 1	1.852.740,00	13/02/2024	12/02/2025	1.635.068,36	217.671,64
727	001418/SKPD/04/1/2024	10/10/2024	P . 2 . 0010742 . 20 . 2	2.360.820,00	11/10/2024	10/10/2025	530.376,00	1.830.444,00
728	001419/SKPD/04/1/2024	11/10/2024	P . 2 . 0010886 . 20 . 3	2.890.800,00	07/10/2024	06/10/2025	681.120,00	2.209.680,00
729	001420/SKPD/04/1/2024	11/10/2024	P . 2 . 0010886 . 20 . 3	2.737.500,00	07/10/2024	06/10/2025	645.000,00	2.092.500,00
730	001422/SKPD/04/1/2024	11/10/2024	P . 2 . 0000666 . 30 . 1	2.890.800,00	08/10/2024	07/10/2025	673.200,00	2.217.600,00
731	001423/SKPD/04/1/2024	11/10/2024	P . 2 . 0016150 . 76 . 1	2.890.800,00	29/09/2024	28/09/2025	744.480,00	2.146.320,00
732	001424/SKPD/04/1/2024	11/10/2024	P . 2 . 0016150 . 76 . 1	2.890.800,00	29/09/2023	28/09/2024	2.890.800,00	-
733	001426/SKPD/04/1/2024	14/10/2024	P . 2 . 0001666 . 20 . 1	867.240,00	23/08/2024	22/08/2025	311.256,00	555.984,00
734	001428/SKPD/04/1/2024	14/10/2024	P . 2 . 0016180 . 30 . 4	5.475.000,00	11/10/2024	10/10/2025	1.230.000,00	4.245.000,00
735	001431/SKPD/04/1/2024	14/10/2024	P . 2 . 0014652 . 20 . 2	1.314.000,00	09/10/2024	08/10/2025	302.400,00	1.011.600,00
736	001431/SKPD/04/1/2024	14/10/2024	P . 2 . 0014652 . 20 . 2	2.737.500,00	09/10/2024	08/10/2025	630.000,00	2.107.500,00
737	001433/SKPD/04/1/2024	14/10/2024	P . 2 . 0014652 . 20 . 2	2.409.000,00	09/10/2024	08/10/2025	554.400,00	1.854.600,00
738	001433/SKPD/04/1/2024	14/10/2024	P . 2 . 0014652 . 20 . 2	3.764.062,50	09/10/2024	08/10/2025	866.250,00	2.897.812,50
739	001434/SKPD/04/1/2024	15/10/2024	P . 2 . 0012233 . 20 . 3	10.539.375,00	15/10/2024	14/10/2025	2.252.250,00	8.287.125,00
740	001435/SKPD/04/1/2024	15/10/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	5.781.600,00	14/10/2024	13/10/2025	1.251.360,00	4.530.240,00
741	001436/SKPD/04/1/2024	15/10/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	12.948.375,00	14/10/2024	13/10/2025	2.802.525,00	10.145.850,00
742	001437/SKPD/04/1/2024	15/10/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	4.697.550,00	14/10/2024	13/10/2025	1.016.730,00	3.680.820,00
743	001438/SKPD/04/1/2024	15/10/2024	P . 2 . 0013294 . 30 . 3	5.420.250,00	14/10/2024	13/10/2025	1.173.150,00	4.247.100,00
744	001440/SKPD/04/1/2024	15/10/2024	P . 2 . 0000040 . 30 . 2	742.500,00	20/09/2024	19/10/2024	742.500,00	-
745	001441/SKPD/04/1/2024	15/10/2024	P . 2 . 0017382 . 20 . 2	153.450,00	01/10/2024	31/10/2024	153.450,00	-
746	001442/SKPD/04/1/2024	16/10/2024	P . 2 . 0014652 . 20 . 2	3.613.500,00	25/10/2024	24/10/2025	673.200,00	2.940.300,00
747	001443/SKPD/04/1/2024	16/10/2024	P . 2 . 0000846 . 30 . 2	1.806.750,00	01/07/2024	30/06/2025	910.800,00	895.950,00
748	001444/SKPD/04/01/2024	16/10/2024	P . 2 . 0017528 . 30 . 1	142.560,00	12/10/2024	19/10/2024	142.560,00	-
749	001444/SKPD/04/01/2024	16/10/2024	P . 2 . 0017528 . 30 . 1	316.800,00	12/10/2024	19/10/2024	316.800,00	-
750	001445/SKPD/04/1/2024	16/10/2024	P . 2 . 0017585 . 64 . 1	3.613.500,00	16/10/2024	15/10/2025	762.300,00	2.851.200,00
751	001448/SKPD/04/1/2024	16/10/2024	P . 2 . 0017585 . 64 . 1	1.806.750,00	16/10/2024	15/10/2025	381.150,00	1.425.600,00
752	001449/SKPD/04/1/2024	16/10/2024	P . 2 . 0017585 . 64 . 1	1.806.750,00	16/10/2024	15/10/2025	381.150,00	1.425.600,00
753	001450/SKPD/04/1/2024	17/10/2024	P . 2 . 0017588 . 10 . 2	495.000,00	16/10/2024	25/10/2024	495.000,00	-
754	001451/SKPD/04/1/2024	17/10/2024	P . 2 . 0017588 . 10 . 2	2.348.775,00	16/10/2024	15/10/2025	495.495,00	1.853.280,00
755	001452/SKPD/04/1/2024	17/10/2024	P . 2 . 0017588 . 10 . 2	105.600,00	16/10/2024	25/10/2024	105.600,00	-
756	001455/SKPD/04/1/2024	18/10/2024	P . 2 . 0003581 . 30 . 3	18.067.500,00	01/03/2024	28/02/2025	15.147.000,00	2.920.500,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
757	001457/SKPD/04/1/2024	18/10/2024	P . 2 . 0006365 . 30 . 4	1.927.200,00	12/08/2024	11/08/2025	749.760,00	1.177.440,00
758	001458/SKPD/04/1/2024	18/10/2024	P . 2 . 0000574 . 30 . 3	602.250,00	22/09/2024	21/09/2025	166.650,00	435.600,00
759	001459/SKPD/04/1/2024	18/10/2024	P . 2 . 0013611 . 30 . 4	3.613.500,00	13/06/2024	12/06/2025	1.999.800,00	1.613.700,00
760	001460/SKPD/04/1/2024	18/10/2024	P . 2 . 0011051 . 30 . 1	4.818.000,00	20/09/2024	19/09/2025	1.359.600,00	3.458.400,00
761	001461/SKPD/04/1/2024	18/10/2024	P . 2 . 0012994 . 40 . 2	13.687.500,00	11/11/2024	10/11/2025	1.912.500,00	11.775.000,00
762	001461/SKPD/04/1/2024	18/10/2024	P . 2 . 0012994 . 40 . 2	18.067.500,00	11/11/2024	10/11/2025	2.524.500,00	15.543.000,00
763	001463/SKPD/04/1/2024	21/10/2024	P . 2 . 0005578 . 30 . 1	2.737.500,00	23/08/2024	22/08/2025	982.500,00	1.755.000,00
764	001464/SKPD/04/1/2024	21/10/2024	P . 2 . 0015865 . 20 . 2	2.409.000,00	21/10/2024	20/10/2025	475.200,00	1.933.800,00
765	001465/SKPD/04/1/2024	21/10/2024	P . 2 . 0000332 . 20 . 2	9.636.000,00	21/10/2024	20/10/2025	1.900.800,00	7.735.200,00
766	001467/SKPD/04/1/2024	23/10/2024	P . 2 . 0005004 . 20 . 4	277.200,00	22/10/2024	28/10/2024	277.200,00	-
767	001468/SKPD/04/1/2024	23/10/2024	P . 2 . 0017592 . 30 . 4	4.215.750,00	21/10/2024	20/10/2025	831.600,00	3.384.150,00
768	001469/SKPD/04/1/2024	23/10/2024	P . 2 . 0017592 . 30 . 4	722.700,00	21/10/2024	20/10/2025	142.560,00	580.140,00
769	001470/SKPD/04/1/2024	23/10/2024	P . 2 . 0017592 . 30 . 4	2.737.500,00	21/10/2024	20/10/2025	540.000,00	2.197.500,00
770	001471/SKPD/04/1/2024	24/10/2024	P . 2 . 0014424 . 30 . 3	2.890.800,00	07/10/2024	06/10/2025	681.120,00	2.209.680,00
771	001472/SKPD/04/1/2024	24/10/2024	P . 2 . 0002868 . 30 . 1	2.168.100,00	25/10/2024	24/10/2025	403.920,00	1.764.180,00
772	001473/SKPD/04/1/2024	24/10/2024	P . 2 . 0002868 . 30 . 1	1.207.800,00	25/10/2024	25/04/2025	448.800,00	759.000,00
773	001474/SKPD/04/1/2024	29/10/2024	P . 2 . 0013942 . 30 . 3	900.000,00	29/11/2024	28/03/2025	247.500,00	652.500,00
774	001474/SKPD/04/1/2024	29/10/2024	P . 2 . 0013942 . 30 . 3	1.188.000,00	29/11/2024	28/03/2025	326.700,00	861.300,00
775	001474/SKPD/04/1/2024	29/10/2024	P . 2 . 0013942 . 30 . 3	11.880.000,00	29/11/2024	28/03/2025	3.267.000,00	8.613.000,00
776	001475/SKPD/04/1/2024	29/10/2024	P . 2 . 0007913 . 20 . 2	22.162.800,00	11/11/2024	10/11/2025	3.096.720,00	19.066.080,00
777	001476/SKPD/04/1/2024	29/10/2024	P . 2 . 0016747 . 30 . 2	6.247.150,20	06/10/2024	05/10/2025	1.489.046,76	4.758.103,44
778	001476/SKPD/04/1/2024	29/10/2024	P . 2 . 0016747 . 30 . 2	16.471.152,06	06/10/2024	05/10/2025	3.926.000,63	12.545.151,43
779	001477/SKPD/04/1/2024	29/10/2024	P . 2 . 0017593 . 30 . 2	2.409.000,00	29/10/2024	28/10/2025	422.400,00	1.986.600,00
780	001478/SKPD/04/1/2024	30/10/2024	P . 2 . 0016747 . 30 . 2	22.945.725,00	30/11/2024	29/11/2025	2.011.680,00	20.934.045,00
781	001479/SKPD/04/1/2024	31/10/2024	P . 2 . 0017594 . 20 . 3	2.168.100,00	31/10/2024	30/10/2025	368.280,00	1.799.820,00
782	001479/SKPD/04/1/2024	31/10/2024	P . 2 . 0017594 . 20 . 3	3.613.500,00	31/10/2024	30/10/2025	613.800,00	2.999.700,00
783	001480/SKPD/04/1/2024	31/10/2024	P . 2 . 0017594 . 20 . 3	415.800,00	25/10/2024	31/10/2024	415.800,00	-
784	001544/SKPD/04/1/2024	04/11/2024	P . 2 . 0010715 . 10 . 1	10.840.500,00	22/10/2024	21/10/2025	2.108.700,00	8.731.800,00
785	001545/SKPD/04/1/2024	04/11/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	34.234.200,00	08/11/2024	07/12/2024	34.234.200,00	-
786	001546/SKPD/04/1/2024	04/11/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	17.117.100,00	08/11/2024	07/12/2024	17.117.100,00	-
787	001547/SKPD/04/1/2024	04/11/2024	P . 2 . 0010717 . 40 . 2	10.840.500,00	22/10/2024	21/10/2025	2.108.700,00	8.731.800,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
788	001548/SKPD/04/1/2024	04/11/2024	P . 2 . 0016759 . 10 . 4	9.855.000,00	10/10/2024	09/10/2025	2.241.000,00	7.614.000,00
789	001549/SKPD/04/1/2024	04/11/2024	P . 2 . 0000035 . 30 . 3	10.840.500,00	22/10/2024	21/10/2025	2.108.700,00	8.731.800,00
790	001553/SKPD/04/1/2024	05/11/2024	P . 2 . 0016234 . 30 . 2	602.250,00	06/12/2024	05/12/2025	42.900,00	559.350,00
791	001555/SKPD/04/1/2024	06/11/2024	P . 2 . 0013243 . 20 . 2	450.450,00	06/11/2024	20/11/2024	450.450,00	-
792	001557/SKPD/04/1/2024	06/11/2024	P . 2 . 0016378 . 20 . 3	903.375,00	05/11/2024	04/11/2025	141.075,00	762.300,00
793	001558/SKPD/04/1/2024	06/11/2024	P . 2 . 0017599 . 20 . 3	152.361,00	05/11/2024	31/12/2024	152.361,00	-
794	001559/SKPD/04/1/2024	06/11/2024	P . 2 . 0012017 . 20 . 3	843.150,00	05/11/2024	04/11/2025	131.670,00	711.480,00
795	001560/SKPD/04/1/2024	06/11/2024	P . 2 . 0001569 . 20 . 4	1.445.400,00	05/11/2024	04/11/2025	225.720,00	1.219.680,00
796	001561/SKPD/04/1/2024	06/11/2024	P . 2 . 0017600 . 20 . 4	1.445.400,00	05/11/2024	04/11/2025	225.720,00	1.219.680,00
797	001564/SKPD/04/1/2024	06/11/2024	P . 2 . 0012442 . 20 . 4	2.409.000,00	25/11/2024	24/11/2025	244.200,00	2.164.800,00
798	001564/SKPD/04/1/2024	06/11/2024	P . 2 . 0012442 . 20 . 4	12.045.000,00	25/11/2024	24/11/2025	1.221.000,00	10.824.000,00
799	001565/SKPD/04/1/2024	06/11/2024	P . 2 . 0012442 . 20 . 4	843.150,00	25/11/2024	24/11/2025	85.470,00	757.680,00
800	001566/SKPD/04/1/2024	06/11/2024	P . 2 . 0016761 . 30 . 4	14.454.000,00	07/11/2024	06/11/2025	2.178.000,00	12.276.000,00
801	001567/SKPD/04/1/2024	07/11/2024	P . 2 . 0016496 . 76 . 2	9.040.320,00	22/11/2024	21/11/2025	990.720,00	8.049.600,00
802	001568/SKPD/04/1/2024	07/11/2024	P . 2 . 0000040 . 30 . 2	1.445.400,00	21/11/2024	20/11/2025	162.360,00	1.283.040,00
803	001568/SKPD/04/1/2024	07/11/2024	P . 2 . 0000040 . 30 . 2	4.818.000,00	21/11/2024	20/11/2025	541.200,00	4.276.800,00
804	001569/SKPD/04/1/2024	07/11/2024	P . 2 . 0003071 . 30 . 4	1.806.750,00	08/11/2024	07/11/2025	267.300,00	1.539.450,00
805	001569/SKPD/04/1/2024	07/11/2024	P . 2 . 0003071 . 30 . 4	12.647.250,00	08/11/2024	07/11/2025	1.871.100,00	10.776.150,00
806	001571/SKPD/04/1/2024	07/11/2024	P . 2 . 0017603 . 20 . 3	2.409.000,00	07/11/2024	06/11/2025	363.000,00	2.046.000,00
807	001572/SKPD/04/1/2024	08/11/2024	P . 2 . 0017604 . 20 . 2	1.475.512,50	07/11/2024	06/11/2025	222.337,50	1.253.175,00
808	001573/SKPD/04/1/2024	08/11/2024	P . 2 . 0017604 . 20 . 2	1.475.512,50	07/11/2024	06/11/2025	222.337,50	1.253.175,00
809	001574/SKPD/04/1/2024	08/11/2024	P . 2 . 0017604 . 20 . 2	1.806.750,00	07/11/2024	06/11/2025	272.250,00	1.534.500,00
810	001575/SKPD/04/1/2024	08/11/2024	P . 2 . 0017604 . 20 . 2	1.475.512,50	07/11/2024	06/11/2025	222.337,50	1.253.175,00
811	001576/SKPD/04/1/2024	08/11/2024	P . 2 . 0017605 . 30 . 3	394.200,00	07/11/2024	06/11/2025	59.400,00	334.800,00
812	001579/SKPD/04/1/2024	11/11/2024	P . 2 . 0015610 . 30 . 1	295.102,50	20/11/2024	19/11/2025	33.957,00	261.145,50
813	001579/SKPD/04/1/2024	11/11/2024	P . 2 . 0015610 . 30 . 1	7.543.181,25	20/11/2024	19/11/2025	867.982,50	6.675.198,75
814	001580/SKPD/04/1/2024	11/11/2024	P . 2 . 0014582 . 30 . 1	2.409.000,00	11/11/2024	10/11/2025	336.600,00	2.072.400,00
815	001581/SKPD/04/1/2024	11/11/2024	P . 2 . 0015257 . 64 . 1	18.069.500,00	21/11/2024	20/11/2025	2.029.724,66	16.039.775,34
816	001582/SKPD/04/1/2024	11/11/2024	P . 2 . 0017608 . 20 . 3	9.937.125,00	11/11/2024	10/11/2025	1.388.475,00	8.548.650,00
817	001583/SKPD/04/1/2024	12/11/2024	P . 2 . 0005560 . 30 . 3	2.737.500,00	25/11/2024	24/11/2025	277.500,00	2.460.000,00
818	001584/SKPD/04/1/2024	12/11/2024	P . 2 . 0016192 . 20 . 2	4.065.187,50	26/11/2024	25/11/2025	400.950,00	3.664.237,50

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
819	001585/SKPD/04/1/2024	12/11/2024	P . 2 . 0016192 . 20 . 2	2.737.500,00	10/05/2024	09/05/2025	1.770.000,00	967.500,00
820	001586/SKPD/04/1/2024	12/11/2024	P . 2 . 0005512 . 20 . 2	4.818.000,00	15/11/2024	14/11/2025	620.400,00	4.197.600,00
821	001589/SKPD/04/1/2024	14/11/2024	P . 2 . 0016424 . 89 . 1	2.737.500,00	31/08/2024	30/08/2025	922.500,00	1.815.000,00
822	001595/SKPD/04/1/2024	18/11/2024	P . 2 . 0016013 . 46 . 4	2.737.500,00	21/12/2024	20/12/2025	82.500,00	2.655.000,00
823	001596/SKPD/04/1/2024	18/11/2024	P . 2 . 0004940 . 10 . 2	1.806.750,00	20/11/2024	19/11/2025	207.900,00	1.598.850,00
824	001597/SKPD/04/1/2024	18/11/2024	P . 2 . 0004940 . 10 . 2	4.065.187,50	19/11/2024	18/11/2025	478.912,50	3.586.275,00
825	001598/SKPD/04/1/2024	18/11/2024	P . 2 . 0016237 . 79 . 1	2.880.000,00	15/11/2024	14/12/2024	2.880.000,00	-
826	001599/SKPD/04/1/2024	19/11/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	900.900,00	20/11/2024	03/12/2024	900.900,00	-
827	001600/SKPD/04/1/2024	19/11/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	450.450,00	20/11/2024	03/12/2024	450.450,00	-
828	001601/SKPD/04/1/2024	19/11/2024	P . 2 . 0002481 . 30 . 2	2.890.800,00	19/11/2024	18/11/2025	340.560,00	2.550.240,00
829	001604/SKPD/04/1/2024	20/11/2024	P . 2 . 0005578 . 30 . 1	2.737.500,00	01/11/2024	30/11/2025	422.753,16	2.314.746,84
830	001605/SKPD/04/1/2024	20/11/2024	P . 2 . 0000320 . 20 . 2	5.757.291,00	04/11/2024	03/11/2025	914.857,20	4.842.433,80
831	001605/SKPD/04/1/2024	20/11/2024	P . 2 . 0000320 . 20 . 2	7.905.900,00	04/11/2024	03/11/2025	1.256.280,00	6.649.620,00
832	001605/SKPD/04/1/2024	20/11/2024	P . 2 . 0000320 . 20 . 2	29.511.454,50	04/11/2024	03/11/2025	4.689.491,40	24.821.963,10
833	001607/SKPD/04/1/2024	21/11/2024	P . 2 . 0012767 . 30 . 3	24.911.250,00	27/11/2024	26/11/2025	2.388.750,00	22.522.500,00
834	001609/SKPD/04/1/2024	21/11/2024	P . 2 . 0013991 . 30 . 3	4.010.985,00	28/10/2024	27/10/2025	714.285,00	3.296.700,00
835	001615/SKPD/04/1/2024	22/11/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	7.227.000,00	13/10/2024	12/10/2025	1.584.000,00	5.643.000,00
836	001616/SKPD/04/1/2024	22/11/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	2.409.000,00	02/11/2024	01/11/2025	396.000,00	2.013.000,00
837	001617/SKPD/04/1/2024	22/11/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	2.409.000,00	17/11/2024	16/11/2025	297.000,00	2.112.000,00
838	001618/SKPD/04/1/2024	22/11/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	14.454.000,00	02/11/2024	01/11/2025	2.376.000,00	12.078.000,00
839	001621/SKPD/04/1/2024	22/11/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	1.084.050,00	05/09/2024	04/09/2025	350.460,00	733.590,00
840	001622/SKPD/04/1/2024	22/11/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	2.409.000,00	05/09/2024	04/09/2025	778.800,00	1.630.200,00
841	001623/SKPD/04/1/2024	22/11/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	722.700,00	05/09/2024	04/09/2025	233.640,00	489.060,00
842	001624/SKPD/04/1/2024	22/11/2024	P . 2 . 0017616 . 30 . 3	475.200,00	21/11/2024	20/01/2025	319.396,72	155.803,28
843	001625/SKPD/04/1/2024	22/11/2024	P . 2 . 0017616 . 30 . 3	4.047.120,00	21/11/2024	20/11/2025	454.608,00	3.592.512,00
844	001625/SKPD/04/1/2024	22/11/2024	P . 2 . 0017616 . 30 . 3	13.532.399,71	21/11/2024	20/11/2025	1.520.077,78	12.012.321,93
845	001629/SKPD/04/1/2024	22/11/2024	P . 2 . 0013172 . 20 . 2	7.227.000,00	19/11/2024	18/11/2025	851.400,00	6.375.600,00
846	001630/SKPD/04/1/2024	25/11/2024	P . 2 . 0016790 . 20 . 4	33.762.135,00	28/11/2024	27/11/2025	3.144.966,00	30.617.169,00
847	001631/SKPD/04/1/2024	25/11/2024	P . 2 . 0011588 . 10 . 1	3.709.860,00	15/12/2024	14/12/2025	172.788,00	3.537.072,00
848	001631/SKPD/04/1/2024	25/11/2024	P . 2 . 0011588 . 10 . 1	14.454.000,00	15/12/2024	14/12/2025	673.200,00	13.780.800,00
849	001632/SKPD/04/1/2024	25/11/2024	P . 2 . 0016795 . 30 . 4	5.685.240,00	29/11/2024	28/11/2025	514.008,00	5.171.232,00

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

B. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka **(Dalam Rupiah)**

No.	NOMOR SKPD	TGL SKPD	NPWPD	NILAI PAJAK	MULAI MASA PAJAK	MASA PAJAK BERAKHIR	PENDAPATAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
850	001632/SKPD/04/1/2024	25/11/2024	P . 2 . 0016795 . 30 . 4	12.965.238,00	29/11/2024	28/11/2025	1.172.199,60	11.793.038,40
851	001633/SKPD/04/1/2024	29/11/2024	P . 2 . 0004208 . 30 . 1	168.300,00	28/11/2024	31/12/2024	168.300,00	-
852	001684/SKPD/04/1/2024	02/12/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	2.702.700,00	02/12/2024	15/12/2024	2.702.700,00	-
853	001704/SKPD/04/1/2024	03/12/2024	P . 2 . 0017528 . 30 . 1	792.000,00	01/12/2024	20/12/2024	792.000,00	-
854	001705/SKPD/04/1/2024	04/12/2024	P . 2 . 0012205 . 20 . 2	3.011.250,00	27/11/2024	26/11/2025	288.750,00	2.722.500,00
855	001709/SKPD/04/1/2024	09/12/2024	P . 2 . 0017623 . 20 . 5	252.945,00	05/12/2024	04/12/2025	18.711,00	234.234,00
856	001711/SKPD/04/1/2024	10/12/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	3.861.000,00	09/12/2024	07/01/2025	2.960.100,00	900.900,00
857	001712/SKPD/04/1/2024	10/12/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	33.397.650,00	08/12/2024	06/01/2025	26.718.120,00	6.679.530,00
858	001718/SKPD/04/1/2024	16/12/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	34.749.000,00	13/12/2024	11/01/2025	22.007.700,00	12.741.300,00
859	001719/SKPD/04/1/2024	16/12/2024	P . 2 . 0013348 . 30 . 4	2.702.700,00	17/12/2024	30/12/2024	2.702.700,00	-
860	001720/SKPD/04/1/2024	16/12/2024	P . 2 . 0005537 . 20 . 4	6.311.580,00	20/12/2024	19/12/2025	207.504,00	6.104.076,00
861	001721/SKPD/04/1/2024	16/12/2024	P . 2 . 0005537 . 20 . 4	2.737.500,00	20/12/2024	19/12/2025	90.000,00	2.647.500,00
862	001724/SKPD/04/1/2024	17/12/2024	P . 2 . 0016238 . 20 . 5	657.000,00	23/12/2024	22/12/2025	16.200,00	640.800,00
863	001732/SKPD/04/1/2024	18/12/2024	P . 2 . 0002659 . 20 . 3	779.625,00	19/12/2024	08/01/2025	482.625,00	297.000,00
864	001741/SKPD/04/1/2024	23/12/2024	P . 2 . 0016812 . 106 . 1	4.818.000,00	08/12/2024	07/12/2025	316.800,00	4.501.200,00
865	001743/SKPD/04/1/2024	24/12/2024	P . 2 . 0015564 . 30 . 3	198.000,00	25/12/2024	03/01/2025	138.600,00	59.400,00
866	001744/SKPD/04/1/2024	24/12/2024	P . 2 . 0005004 . 20 . 4	277.200,00	26/12/2024	01/01/2025	237.600,00	39.600,00
867	001745/SKPD/04/1/2024	30/12/2024	P . 2 . 0013782 . 10 . 1	1.204.500,00	26/12/2024	25/12/2025	19.800,00	1.184.700,00
Jumlah Pajak Diterima Dimuka				**4.358.906.030,28**			**2.541.708.329,67**	**1.817.197.700,61**
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka				**5.182.629.530,28**			**2.777.587.688,90**	**2.405.041.841,38**

DAFTAR UTANG BELANJA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	No. Rekening	Nama Rekening	Uraian	Tahun Utang	Jumlah Belum Terbayar	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa
1	Dinas Pendidikan	5.1.01.01.09.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Kenaikan IWP	2024	1.964.556.617,00	1.964.556.617,00	
2	Dinas Pendidikan	5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan telepon kantor	Telepon pemakaian bulan Desember 2024	2024	151.689,00		151.689,00
3	Dinas Pendidikan	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Belanja Air DISDIK KANTOR IDWIL pemakaian Desember 2024	2024	1.608.600,00		1.608.600,00
4	Dinas Pendidikan	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Belanja Listrik IDWILDA (DISDIK) pemakaian Desember 2024	2024	9.602.248,00		9.602.248,00
5	Dinas Pendidikan	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Internet/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	Pemakaian Internet Desember 2024	2024	7.134.250,00		7.134.250,00
			Jumlah DINAS PENDIDIKAN			**1.983.053.404,00**	**1.964.556.617,00**	**18.496.787,00**
1	Dinas Kesehatan	5.1.1.01.04.0001	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Pembayaran kekurangan Tunjangan Fungsional 2024	2024	1.187.471,0	1.187.471,00	
2	Dinas Kesehatan	5.1.2.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon Pemakaian Desember 2024	2024	650.250,0		650.250,00
3	Dinas Kesehatan	5.1.2.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	3.147.700,0		3.147.700,00
4	Dinas Kesehatan	5.1.2.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	27.325.930,0		27.325.930,00
5	Dinas Kesehatan	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Internet	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2024	3.047.191,0		3.047.191,00
			Jumlah DINAS KESEHATAN			**35.358.542,00**	**1.187.471,00**	**34.171.071,00**
1	Puskesmas Gunung Lingkas	5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Desember 2024	2024	200.000,0		200.000,00
2	Puskesmas Gunung Lingkas	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	860.950,0		860.950,00
3	Puskesmas Gunung Lingkas	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	7.684.050,0		7.684.050,00
4	Puskesmas Gunung Lingkas	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Internet/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	Kawat/Internet/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan Pemakaian Desember 2024	2024	547.621,0		547.621,00
			Jumlah PUSKESMAS GUNUNG LINGKAS			**9.292.621,00**	**-**	**9.292.621,00**
1	Puskesmas Karang Rejo	5.1.2.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	1.263.000,00		1.263.000,00
2	Puskesmas Karang Rejo	5.1.2.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	11.566.800,00		11.566.800,00
3	Puskesmas Karang Rejo	5.1.2.02.01.0063	Belanja Internet	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Pemakaian Desember 2024	2024	788.380,00		788.380,00
			Jumlah PUSKESMAS KARANG REJO			**13.618.180,00**	**-**	**13.618.180,00**
1	Puskesmas Sebengkok	5.1.2.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	1.687.600,00		1.687.600,00
2	Puskesmas Sebengkok	5.1.2.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	5.690.700,00		5.690.700,00
3	Puskesmas Sebengkok	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Internet	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Pemakaian Desember 2024	2024	694.141,00		694.141,00
			Jumlah PUSKESMAS SEBENGKOK			**8.072.441,00**	**-**	**8.072.441,00**
1	Puskesmas Mamburungan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (IWP 4% Bulan Desember 2024)	2024	847.248,00	847.248,00	
2	Puskesmas Mamburungan	5.1.2.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	353.850,00		353.850,00
3	Puskesmas Mamburungan	5.1.2.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik Pemakaian Desember 2024	2024	5.957.100,00		5.957.100,00
4	Puskesmas Mamburungan	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Internet	Wifi pemakaian Desember 2024	2024	490.900,00		490.900,00
			Jumlah PUSKESMAS MAMBURUNGAN			**7.649.098,00**	**847.248,00**	**6.801.850,00**
1	Puskesmas Juata	5.1.02.02.10.010	Belanja Retribusi Sampah	Belanja Gas Alam Bulan Desember 2024	2024	20.672,00		20.672,00
2	Puskesmas Juata	5.1.02.02.01.059	Belanja Telepon	Belanja Tagihan Telepon Bulan Desember 2024	2024	125.100,00		125.100,00
3	Puskesmas Juata	5.1.02.02.01.060	Belanja Kawat/Internet	Belanja Tagihan Air Bulan Desember 2024	2024	2.863.350,00		2.863.350,00
4	Puskesmas Juata	5.1.02.02.01.061	Belanja Tagihan telepon kantor	Belanja Tagihan Listrik kantor Bulan Desember 2024	2024	6.461.100,00		6.461.100,00
5	Puskesmas Juata	5.1.02.02.01.063	Belanja Internet	Belanja Kawat/Internet Bulan Desember 2024	2024	629.650,00		629.650,00
			Jumlah PUSKESMAS JUATA			**10.099.872,00**	**-**	**10.099.872,00**
1	Puskesmas Pantai Amal	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		2024	616.750,00		616.750,00
2	Puskesmas Pantai Amal	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		2024	1.889.900,00		1.889.900,00
3	Puskesmas Pantai Amal	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Internet		2024	435.400,00		435.400,00
			Jumlah PUSKESMAS PANTAI AMAL			**2.942.050,00**	**-**	**2.942.050,00**
1	LABKESDA	5.1.2.02.01.0060	Belanja Air		2024	246.300,00		246.300,00
2	LABKESDA	5.1.2.02.01.0061	Belanja Listrik		2024	5.511.510,00		5.511.510,00
3	LABKESDA	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Internet		2024	479.800,00		479.800,00
4	LABKESDA	5.1.2.02.01.0000	bbm		2024	1.757.000,00		1.757.000,00
			Jumlah LABKESDA			**7.994.610,00**	**-**	**7.994.610,00**
1	RSUKT	5.1.01.01.09.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 4% Gaji Tenaga Kontrak Bulan Desember 2024	2024	55.615.648,00	55.615.648,00	
2	RSUKT	5.1.01.01.09.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 4% Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan Desember 2024	2024	5.137.193,00	5.137.193,00	
3	RSUKT	5.1.01.01.09.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Belanja jasa tenaga keamanan bulan Desember 2024	2024	4.222.003,00	4.222.003,00	
4	RSUKT	5.1.01.01.09.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Gagal Transfer No.PD-LS/XII/2024/01303 IWP 4% Jasa Medis PNS dan P3K Bulan Agustus 2021 s/d Desember 2021	2024	35.541.216,00		35.541.216,00
5	RSUKT	5.1.01.01.09.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Gagal Transfer No. PD-LS/XII/2024/01302IWP 4% Jasa Medis PNS dan P3K Bulan Oktober 2024	2024	5.393.244,00		5.393.244,00
6	RSUKT	5.1.02.01.01.003	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Gagal Transfer No. PD-LS/XII/2024/01296 Belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan Bulan Desember 2024	2024	4.450.000,00		4.450.000,00
7	RSUKT	5.1.02.01.01.009	Bahan-bahan isi tabung gas	Belanja Obat-obatan	2024	41.250.000,00		41.250.000,00
8	RSUKT	5.1.02.01.01.009	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01306 Belanja Isi Tabung Gas Oksigen 20-11-2024 s/d 30-11-2024 - PT. SURYA BIRU MURNI ACETYLENE	2024	145.092.974,00		145.092.974,00
9	RSUKT	5.1.02.01.01.014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01237 Belanja Obat dan BMHP - PT. ALJOEN MAKMUR ABADI	2024	6.845.750,00		6.845.750,00
10	RSUKT	5.1.02.01.01.014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01290 Belanja Obat dan BMHP - PT. MAKAM SEJAHTERA ABADI	2024	1.774.775,00		1.774.775,00
11	RSUKT	5.1.02.01.01.014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01292 Belanja Obat dan BMHP - PT. AFINA SINAR CEMERLANGI	2024	3.549.550,00		3.549.550,00

No.	SKPD	No. Rekening	Nama Rekening	Uraian	Tahun Utang	Jumlah Belum Terbayar	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa
12	RSUKT	5.1.02.01.01.014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01293 Belanja Obat dan BMHP - PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA	2024	21.670.000,00		21.670.000,00
13	RSUKT	5.1.02.01.01.014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01294 Honor Dewas Bulan Oktober 2024	2024	10.959.235,00		10.959.235,00
14	RSUKT	5.1.02.01.01.014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01299 Belanja Obat dan BMHP - PT. MURINDO MULTI SARANA	2024	3.344.075,00		3.344.075,00
15	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	5.544.000,00		5.544.000,00
16	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	21.159.320,00		21.159.320,00
17	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	82.461.315,00		82.461.315,00
18	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	35.875.200,00		35.875.200,00
19	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	23.474.890,00		23.474.890,00
20	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	32.065.013,00		32.065.013,00
21	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	39.321.820,00		39.321.820,00
22	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	53.724.000,00		53.724.000,00
23	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	5.550.000,00		5.550.000,00
24	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	21.828.150,00		21.828.150,00
25	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	5.915.262,00		5.915.262,00
26	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	7.245.747,00		7.245.747,00
27	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	8.817.840,00		8.817.840,00
28	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	6.732.982,00		6.732.982,00
29	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	6.551.275,00		6.551.275,00
30	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	1.030.193,00		1.030.193,00
31	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	755.910,00		755.910,00
32	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	815.396,00		815.396,00
33	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	809.939,00		809.939,00
34	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	2.875.021,00		2.875.021,00
35	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	7.958.034,00		7.958.034,00
36	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	3.897.000,00		3.897.000,00
37	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	5.128.200,00		5.128.200,00
38	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	2.669.994,00		2.669.994,00
39	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-obatan	2024	13.875.000,00		13.875.000,00
40	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01214 Belanja Obat dan BMHP -PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	2.109.000,00		2.109.000,00
41	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01221 Belanja Obat dan BMHP - PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA	2024	427.199,00		427.199,00
42	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01222 Belanja Obat dan BMHP - PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA	2024	5.347.980,00		5.347.980,00
43	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01226 Belanja Suku Cadang Alat Kesehatan/ Alat Penunjang (Lampu Biolish) PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	12.000.000,00		12.000.000,00
44	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01227 Belanja Obat dan BMHP - PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	21.777.023,00		21.777.023,00
45	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01229 Belanja Obat dan BMHP - PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	12.397.500,00		12.397.500,00

No.	SKPD	No. Rekening	Nama Rekening	Uraian	Tahun Utang	Jumlah Belum Terbayar	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa
46	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01230 Belanja Obat dan BMHP - PT. SURGIKA ALKESINDO	2024	155.999,00		155.999,00
47	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01232 Belanja Obat dan BMHP - PT. MAHAKAM SEJAHTERA ABADI	2024	3.092.900,00		3.092.900,00
48	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01233 Belanja Bahan Logistik Untuk Makan Minum Pasien (Susu Untuk Nutrisi Pasien) PT. MAHAKAM SEHAHTERA ABADI	2024	17.414.055,00		17.414.055,00
49	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01236 Belanja Obat dan BMHP - PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	2024	17.077.706,00		17.077.706,00
50	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01238 Belanja Obat dan BMHP - PT. PARIT PADANG GLOBAL	2024	71.498.195,00		71.498.195,00
51	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal TransferKerekanan No. PD-LS/XII/2024/01247 Belanja Obat dan BMHP - PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	58.172.327,00		58.172.327,00
52	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01248 Belanja Obat dan BMHP - PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	7.222.051,00		7.222.051,00
53	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01249 Belanja Obat dan BMHP - PT. MADESA SEJAHTERA ABADI	2024	2.319.232,00		2.319.232,00
54	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01210 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Dialisis Bagi Perawat di Rumah Sakit dan Klinik Khusus Dialisis RSUD Dr. Moewardi An. Eni Dwi Wahyuni, A.Md.Kep	2024	5.417.500,00		5.417.500,00
55	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal TransferKerekanan No. PD-LS/XII/2024/01216 Belanja Obat dan BMHP - PT. BINA INSANI MANDIRI PRATAMA	2024	16.252.500,00		16.252.500,00
56	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01253 Belanja Obat dan BMHP - PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA	2024	26.683.207,00		26.683.207,00
57	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01254 Belanja Obat dan BMHP - PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA	2024	81.086.907,00		81.086.907,00
58	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01255 Belanja Obat dan BMHP - PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	2024	47.486.161,00		47.486.161,00
59	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01256 Belanja Obat dan BMHP - PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	2024	5.005.918,00		5.005.918,00
60	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01257 Belanja Obat dan BMHP - PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	2024	11.239.974,00		11.239.974,00
61	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01259 Belanja Obat dan BMHP - PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI	2024	11.918.500,00		11.918.500,00
62	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01260 Belanja Obat dan BMHP - PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI	2024	24.325,00		24.325,00
63	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01260 Belanja Obat dan BMHP - PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI	2024	1.459.460,00		1.459.460,00
64	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01262 Belanja Obat dan BMHP - PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	2024	11.016.487,00		11.016.487,00
65	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. SD-LS/XII/2024/01263 Belanja Obat dan BMHP - PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	2024	5.419.312,00		5.419.312,00
66	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01264 Belanja Obat dan BMHP - PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	2024	6.055.741,00		6.055.741,00
67	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01266 Belanja Obat dan BMHP - PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	2024	13.061.100,00		13.061.100,00
68	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01267 Belanja Obat dan BMHP - PT. LAKSA NUSANTARA FARMA	2024	6.384.770,00		6.384.770,00
69	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal TransferKerekanan No. PD-LS/XII/2024/01268 Belanja Obat dan BMHP - PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	1.270.294,00		1.270.294,00
70	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01269 Belanja Obat dan BMHP - PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	9.844.681,00		9.844.681,00
71	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01270 Belanja Obat dan BMHP - PT. PENTA VALENT	2024	20.329.169,00		20.329.169,00
72	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01271 Belanja Obat dan BMHP - PT. PARIT PADANG GLOBAL	2024	4.432.500,00		4.432.500,00
73	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01273 Belanja Obat dan BMHP - PT. ALKESINDO	2024	6.316.313,00		6.316.313,00
74	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01277 Belanja Obat dan BMHP - PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL	2024	12.422.844,00		12.422.844,00
75	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01278 Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran (Probe Pulse Oxymetri) - PT. ALAMASRI PHARMINDO	2024	3.737.635,00		3.737.635,00
76	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01279 Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran (Probe Pulse Oxymetri) - PT. ALAMASRI PHARMINDO	2024	20.662.452,00		20.662.452,00
77	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01280 Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran (Konektor Sentral Gas ICU) - PT. SURICON GEMILANG KARYA	2024	14.036.694,00		14.036.694,00
78	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01281 Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran (o2 Sensor Capsul Mesin Anestesi) - PT. ANUGRAH MEDIKA MANDIRI	2024	37.806.640,00		37.806.640,00
79	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01282 Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran (Poltier Plate Biolish) - PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	4.761.012,00		4.761.012,00
80	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01288 Belanja Obat dan BMHP - PT. PARIT PADANG GLOBAL	2024	138.750,00		138.750,00
81	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01289 Belanja Obat dan BMHP - PT. TRI SAPTA JAYA	2024	4.082.821,00		4.082.821,00
82	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01300 Belanja Obat dan BMHP - PT. AFINA SINAR CEMERLANGI	2024	9.823.380,00		9.823.380,00
83	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01211 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Dialisis Bagi Perawat di Rumah Sakit dan Klinik Khusus Dialisis RSUD Dr. Moewardi An.Rinda Astutik, A.Md.Kep	2024	19.966.197,00		19.966.197,00

No.	SKPD	No. Rekening	Nama Rekening	Uraian	Tahun Utang	Jumlah Belum Terbayar	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa
84	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer No. PPD-LS/XII/2024/01213 Gaji Insentif Dokter Spesialis Non ASN Bulan November & Desember 2024 An. Melissa Tan	2024	34.672.788,00		34.672.788,00
85	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer No. PPD-LS/XII/2024/01225 Biaya Mengikuti Webiner Optimalisasi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) Sesuai Standar Akreditasi An. Devita Praditya Indriani, S.Farm.,Apt & dr. Muhammad Saiful Rahman, Sp.P.K	2024	18.190.980,00		18.190.980,00
86	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer No. PPD-LS/XII/2024/01239 Biaya Perawatan Pasien Rujukan Periode 11-10-2024 s/d 10-12-2024 - RS. PERTAMEDIKA	2024	21.842.562,00		21.842.562,00
87	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal TransferPPD-LS/XII/2024/01303 IWP 4% Jasa Medis PNS dan P3K Bulan Agustus 2021 s/d Desember 2021	2024	8.276.078,00		8.276.078,00
88	RSUKT	5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-obatan	Gagal Transfer PPD-LS/XII/2024/01302IWP 4% Jasa Medis PNS dan P3K Bulan Oktober 2024	2024	6.063.660,00		6.063.660,00
89	RSUKT	5.1.02.01.01.054	Belanja makan dan minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Belanja Obat-obatan	2024	37.505.250,00		37.505.250,00
90	RSUKT	5.1.02.01.01.054	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan UrusanKesehatan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01250 Belanja Obat dan BMHP - PT. MAHAKAM SEJAHTERA ABADI	2024	6.066.984,00		6.066.984,00
91	RSUKT	5.1.02.02.01.004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Gagal Transfer No. PD-LS/XII/2024/01307 Honor Instruktur Klinik Bulan Januari s/d Desember 2024	2024	21.709.676,00		21.709.676,00
92	RSUKT	**5.1.02.02.01.014**	Belanja jasa tenaga kesehatan	Gaji tenaga kontrak bulan Desember 2024	2024	658.664.408,00		658.664.408,00
93	RSUKT	5.1.02.02.01.014	Belanja jasa tenaga kesehatan	Jasa pelayanan Medis bulan November 2024	2024	833.561.274,00		833.561.274,00
94	RSUKT	5.1.02.02.01.014	Belanja jasa tenaga kesehatan	Jasa pelayanan Medis bulan Desember 2024	2024	686.416.853,00		686.416.853,00
95	RSUKT	5.1.02.02.01.014	Belanja jasa tenaga kesehatan	Jasa pelayanan Medis 13 Tahun 2024	2024	779.961.695,00		779.961.695,00
96	RSUKT	5.1.02.02.01.014	Belanja jasa tenaga kesehatan	Honor dewan pengawas bulan November 2024	2024	334.269.299,00		334.269.299,00
97	RSUKT	5.1.02.02.01.029	Belanja jasa tenaga kesehatan	Gaji Dokter Tamu Bulan November 2024	2024	407.165.513,00		407.165.513,00
98	RSUKT	5.1.02.02.01.029	Belanja jasa tenaga kesehatan	Gaji Dokter Tamu Bulan Desember 2024	2024	252.747.040,00		252.747.040,00
99	RSUKT	5.1.02.02.01.029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Honorarium Fisikawan Medis bulan Desember 2024	2024	6.000.000,00		6.000.000,00
100	RSUKT	5.1.02.02.01.029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja isi ulang tabung gas medis	2024	181.060,00		181.060,00
101	RSUKT	5.1.02.02.01.029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja bahan logistik Gizi Untuik makan minum pasien	2024	307.670,00		307.670,00
102	RSUKT	5.1.02.02.01.029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Gagal Transfer PPD-LS/XII/2024/01307 Honor Instruktur Klinik Bulan Januari s/d Desember 2024	2024	16.000.000,00		16.000.000,00
103	RSUKT	5.1.02.02.01.030	Belanja Jasa tenaga Kebersihan	Belanja Obat-obatan	2024	249.475.000,00		249.475.000,00
104	RSUKT	5.1.02.02.01.031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Belanja Obat-obatan	2024	78.622.575,00		78.622.575,00
105	RSUKT	5.1.02.02.01.051	Belanja Jasa pengolahan sampah	Belanja Obat-obatan	2024	1.200.000,00		1.200.000,00
106	RSUKT	5.1.02.02.01.059	Belanja TELPON	TELPON Pemakaian Desember 2024	2024	1.094.350,00		1.094.350,00
107	RSUKT	5.1.02.02.01.059	Belanja TELPON SELULER	TELPON SELULER Pemakaian Desember 2024	2024	353.100,00		353.100,00
108	RSUKT	5.1.02.02.01.060	Belanja AIR PDAM	PDAM Pemakaian Desember 2022	2024	44.332.500,00		44.332.500,00
109	RSUKT	5.1.02.02.01.061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	116.011.341,00		116.011.341,00
110	RSUKT	5.1.02.02.01.063	Belanja INTERNET	INTERNET Pemakaian Desember 2024	2024	12.310.530,00		12.310.530,00
111	RSUKT	5.1.02.02.01.075	Belanja Jasa rujukan pasien	Belanja Jasa Tenaga kebersihan bulan Desember 2024	2024	17.880.000,00		17.880.000,00
112	RSUKT	5.1.02.02.01.075	Belanja Jasa rujukan pasien	Belanja Jasa Sewa Alat Urologi bulan Desember 2024	2024	11.400.000,00		11.400.000,00
113	RSUKT	5.1.02.02.01.075	Belanja Jasa rujukan pasien	Retribusi pengangkutan sampah bulan Desember 2024	2024	39.385.950,00		39.385.950,00
114	RSUKT	5.1.02.02.01.075	Belanja Jasa rujukan pasien	Belanja Obat-obatan	2024	11.070.400,00		11.070.400,00
115	RSUKT	5.1.02.02.01.075	Belanja Jasa Rujukan Pasien	Gagal Transfer No. PD-LS/XII/2024/01239 Biaya Perawatan Pasien Rujukan Periode 11-10-2024 s/d 10-12-2024 - RS. PERTAMEDIKA	2024	13.300.000,00		13.300.000,00
116	RSUKT	5.1.02.02.01.077	Honorarium Dewan Pengawas	Honor dewan pengawas bulan Desember 2024	2024	23.203.726,00		23.203.726,00
117	RSUKT	5.1.02.02.01.077	Honorarium Dewan Pengawas	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 4% Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan November 2024	2024	22.330.065,00		22.330.065,00
118	RSUKT	5.1.02.02.01.077	Honorarium Dewan Pengawas	No. PPD-LS/XII/2024/01296 Belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan Bulan Desember 2024	2024	13.848.650,00		13.848.650,00
119	RSUKT	5.1.02.02.04.054	Belanja sewa alat Kesehatan Umum Lainnya	Belanja Obat-obatan	2024	24.697.500,00		24.697.500,00
120	RSUKT	5.1.02.02.12.001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Gagal Transfer Kerekanan No. PD-LS/XII/2024/01258 Belanja Obat dan BMHP - PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	2024	25.164.792,00		25.164.792,00
121	RSUKT	5.1.02.02.12.001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Gagal Transfer Kerekanan PPD-LS/XII/2024/01306 Belanja Isi Tabung Gas Oksigen 20-11-2024 s/d 30-11-2024 - PT. SURYA BIRU MURNI ACETYLENE	2024	25.164.792,00		25.164.792,00
122	RSUKT	5.1.02.02.12.001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Gagal Transfer No. PD-LS/XII/2024/01225 Biaya Mengikuti Webiner Optimalisasi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) Sesuai Standar Akreditasi An. Devita Praditya Indriani, S.Farm.,Apt & dr. Muhammad Saiful Rahman, Sp.P.K	2024	200.000,00		200.000,00
Jumlah RSUKT						**6.250.729.636,00**	**64.974.844,00**	**6.185.754.792,00**
1	DPUPR	rincian di lampiran 17	Belanja Pegawai	Belanja Honoraium	2016-2018	1.306.474.000,00	1.306.474.000,00	
2	DPUPR	5.1.2.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	641.200,00		641.200,00
3	DPUPR	5.1.2.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	7.401.349,00		7.401.349,00
4	DPUPR	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Internet	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit pemakaian 2024	2024	2.753.650,00		2.753.650,00
5	DPUPR	5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Gas Bumi Kantor (PGN) pemakaian Desember 2024	2024	63.434,00		63.434,00
Jumlah DPUPR						**1.317.333.633,00**	**1.306.474.000,00**	**10.859.633,00**
1	DPRKPP	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2021	2024	2.128.150,00		2.128.150,00
2	DPRKPP	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2021	2024	10.353.000,00		10.353.000,00
3	DPRKPP	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2021	2024	2.346.631,00		2.346.631,00
Jumlah DPRKPP						**14.827.781,00**	**-**	**14.827.781,00**

No.	SKPD	No. Rekening	Nama Rekening	Uraian	Tahun Utang	Jumlah Belum Terbayar	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa
1	BAKESBANGPOL	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kekurangan Gaji	2024	230.000	230.000,00	
2	BAKESBANGPOL	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	990.791,00		990.791
3	BAKESBANGPOL	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	640.650,00		640.650
4	BAKESBANGPOL	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	2.610.579,00		2.610.579
			Jumlah BAKESBANGPOL			**4.472.020,00**	**230.000,00**	**4.242.020,00**
1	SATPOL PP & PMK	5.1.01.01.01.0001	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Kekurangan Tunjangan Fungsional	2023	1.140.000,00	1.140.000,00	
2	SATPOL PP & PMK	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	2.619.850,00		2.619.850,00
3	SATPOL PP & PMK	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	2.882.458,00		2.882.458,00
4	SATPOL PP & PMK	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	1.239.600,00		1.239.600,00
			Jumlah SATPOL PP & PMK			**7.881.908,00**	**1.140.000,00**	**6.741.908,00**
1	DINSOSPM	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Air PDAM pemakaian bulan Desember 2024	2024	46.900,00		46.900,00
2	DINSOSPM	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Air pemakaian bulan Desember 2024	2024	253.600,00		253.600,00
3	DINSOSPM	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Listrik PLN pemakaian bulan Desember 2024	2024	2.228.185,00		2.228.185,00
4	DINSOSPM	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Internet (Indihome dan wifi.id) pemakaian bulan Desember 2024		2.384.010,00		2.384.010,00
			Jumlah DINSOS PM			**4.912.695,00**	**-**	**4.912.695**
1	BPBD	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	210.450,00		210.450,00
2	BPBD	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik Pemakaian Desember 2024	2024	3.855.723,00		3.855.723,00
3	BPBD	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Indihome Pemakaian Desember 2024	2024	2.221.950,00		2.221.950,00
			Jumlah BPBD			**6.288.123,00**	**-**	**6.288.123,00**
1	DPTK	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024 & Pembayaran Januari 2024	2024	61.441,00		61.441,00
2	DPTK	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024 & Pembayaran Januari 2024	2024	1.745.250,00		1.745.250,00
3	DPTK	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024 & Pembayaran Januari 2024	2024	6.193.754,00		6.193.754,00
4	DPTK	5.1.02.02.01.0063	BelanjaKawat/ Internet	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Pemakaian Desember 2024 & Pembayaran Januari 2024	2024	2.289.660,00		2.289.660,00
5	DPTK	5.1.02.05.02.0001	Belanja PGN/Gas	Belanja Tagihan Gas Bumi/PGN Pemakaian Desember 2024 & Pembayaran Januari 2024	2024	63.434,00		63.434,00
			Jumlah DPTK			**10.353.539,00**	**-**	**10.353.539,00**
1	DPPPAPPKB	5.1.2.02.01.0061	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	1.086.400,00		1.086.400,00
2	DPPPAPPKB	5.1.2.02.01.0060	Belanja Listrik	Listrik Pemakaian Desember 2024	2024	724.101,00	-	724.101,00
3	DPPPAPPKB	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	3.825.350,00	-	3.825.350,00
4	DPPPAPPKB	5.1.2.05.02.00001	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain	Belanja Jasa PemerikasaanPenunjang	2024	1.946.674,00		1.946.674,00
			Jumlah DPPPAPPKB			**7.582.525,00**	**-**	**7.582.525,00**
1	DLH	5.1.2.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM PemakaianNovember Desember 2024	2024	789.400,00		789.400,00
2	DLH	5.1.2.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	19.367.449,00		19.367.449,00
3	DLH	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Internet Pemakaian Desember 2024	2024	3.763.190,00		3.763.190,00
			Jumlah DLH			**23.920.039,00**	**-**	**23.920.039,00**
1	DISDUKCAPIL	5.1.2.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	675.900,00		675.900,00
2	DISDUKCAPIL	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/ Internet	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2024	1.776.000,00		1.776.000,00
			Jumlah DISDUKCAPIL			**2.451.900,00**	**-**	**2.451.900,00**
	DISHUB	5.1.01.01.01.0001	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Gaji dan Tunjangan PNS Dishub Ahmadi Burhan, dkk bulan Desember 2024	2024	4.296.250,00	4.296.250,00	
1	DISHUB	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	17.592.998,00		17.592.998,00
2	DISHUB	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	146.139,00		146.139,00
3	DISHUB	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	1.504.250,00		1.504.250,00
4	DISHUB	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	305.495.924,00		305.495.924,00
5	DISHUB	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2024	2.049.348,00		2.049.348,00
			Jumlah DISHUB			**331.084.909,00**	**4.296.250,00**	**326.788.659,00**
1	DKISP	5.1.02.02.01.0059	Belanja tagihan telepon	Telepon Desember 20212	2024	351.558,00		351.558,00
2	DKISP	5.1.02.02.01.0061	Belanja tagihan listrik	Listrik Desember 2024	2024	16.792.960,00		16.792.960,00
3	DKISP	5.1.02.02.01.0063	Belanja tagihan internet	Pemakian internet bulan desember 2024	2024	8.880.000,00		8.880.000,00
4	DKISP	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	STNK	2024	303.000,00		303.000,00
			Jumlah DKISP			**26.327.518,00**	**-**	**26.327.518,00**
1	DPMPTSP	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2021	2024	461.799,00		461.799,00
2	DPMPTSP	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2021	2024	26.696.121,00		26.696.121,00
3	DPMPTSP	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Internet/Faksimili/Satelit	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2024	8.880.000,00		8.880.000,00
			Jumlah DPMPTSP			**36.037.920,00**	**-**	**36.037.920,00**
1	DINAS PERIKANAN	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2021	2024	246.300,00		246.300,00
2	DINAS PERIKANAN	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2021	2024	4.108.067,00		4.108.067,00
3	DINAS PERIKANAN	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2024	2.488.900,00		2.488.900,00
			Jumlah DINAS PERIKANAN			**6.843.267,00**	**-**	**6.843.267,00**
1	DISPUSPAN	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	198.500,00		198.500,00
2	DISPUSPAN	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	5.489.386,00		5.489.386,00
3	DISPUSPAN	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Pemakaian Des 2024	2024	1.567.600,00		1.567.600,00
			Jumlah DIPUSPAN			**7.255.486,00**	**-**	**7.255.486,00**
1	DISBUDPORAPAR	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	7.847.250,00		7.847.250,00
2	DISBUDPORAPAR	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	34.509.107,00		34.509.107,00
3	DISBUDPORAPAR	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Pemakaian Desember 2024	2024	5.139.310,00		5.139.310,00

No.	SKPD	No. Rekening	Nama Rekening	Uraian	Tahun Utang	Jumlah Belum Terbayar	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa
			Jumlah DISBUDPORAPAR			**47.495.667,00**	**-**	**47.495.667,00**
1	DKPP	5.1.01.01.01.0001	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Kekurangan Gaji	2024	709.900,00	709.900,00	
2	DKPP	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPP)	Kekurangan TPP	2024	2.533.400,00	2.533.400,00	
3	DKPP	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	55.891,00		55.891,00
4	DKPP	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	168.000,00		168.000,00
5	DKPP	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	2.272.473,00		2.272.473,00
6	DKPP	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Pemakaian Desember 2024	2024	3.499.141,00		3.499.141,00
			Jumlah DKPP			**9.238.805,00**	**3.243.300,00**	**5.995.505,00**
1	DKUKMP	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	167.673,00		167.673,00
2	DKUKMP	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	1.420.050,00		1.420.050,00
3	DKUKMP	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	15.531.189,00		15.531.189,00
4	DKUKMP	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Pemakaian Desember 2024	2024	5.328.000,00		5.328.000,00
5	DKUKMP	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	STNK	2024	408.000,00		408.000,00
			Jumlah DKUKMP			**22.854.912,00**	**-**	**22.854.912,00**
1	SETDA	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	3.131.667,00		3.131.667,00
2	SETDA	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	14.445.250,00		14.445.250,00
3	SETDA	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	72.458.181,00		72.458.181,00
4	SETDA	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Pemakaian Desember 2024	2024	23.573.350,00		23.573.350,00
5	SETDA	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Gas Bumi Kantor (PGN)	2024	235.736,00		235.736,00
			Jumlah SETDA			**113.844.184,00**	**-**	**113.844.184,00**
1	SEKRETARIAT DPRD	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	1.924.300,00		1.924.300,00
2	SEKRETARIAT DPRD	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	17.063.290,00		17.063.290,00
3	SEKRETARIAT DPRD	5.1.02.05.02.0001	Belanja Kawat	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2024	10.656.000,00		10.656.000,00
			Jumlah SEKRETARIAT DPRD			**29.643.590,00**	**-**	**29.643.590,00**
1	KEC. TARAKAN TENGAH	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	739.550,00		739.550,00
2	KEC. TARAKAN TENGAH	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	11.324.271,00		11.324.271,00
3	KEC. TARAKAN TENGAH	5.1.02.02.01.0063	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	2.374.141,00		2.374.141,00
4	KEC. TARAKAN TENGAH	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Gas Bumi Kantor (PGN)	2024	175.466,00		175.466,00
			Jumlah KEC. TARAKAN TENGAH			**14.613.428,00**	**-**	**14.613.428,00**
1	KEC. TARAKAN BARAT	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	1.733.950,00		1.733.950,00
2	KEC. TARAKAN BARAT	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Listrik PLN Kel. Krg Balik Pemakaian Desember 2024	2024	16.549.832,00		16.549.832,00
3	KEC. TARAKAN BARAT	5.1.02.02.01.0063	Belanja Telpon dan Internet	Telepon / Indihome / Speedy Perumda Pemakaian Nopember, Desember 2024	2024	7.201.362,00		7.201.362,00
4	KEC. TARAKAN BARAT	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	STNK	2024	87.500,00		87.500,00
5	KEC. TARAKAN BARAT	5.1.02.05.02.0001	Beanja Jasa Gas/ PGN	Iuran Jasa Gas/ PGN Bulan Desember 2024	2024	45.762,00		45.762,00
			Jumlah KEC. TARAKAN BARAT			**25.618.406,00**	**-**	**25.618.406,00**
1	KEC. TARAKAN TIMUR	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	1.284.600,00	-	1.284.600,00
2	KEC. TARAKAN TIMUR	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	10.992.228,00	-	10.992.228,00
3	KEC. TARAKAN TIMUR	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2024	3.786.568,00	-	3.786.568,00
4	KEC. TARAKAN TIMUR	5.1.02.05.02.0001	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2024	82.688,00	-	82.688,00
			Jumlah KEC. TARAKAN TIMUR			**16.146.084,00**	**-**	**16.146.084,00**
1	KEC. TARAKAN UTARA	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	2.968.430,00		2.968.430,00
2	KEC. TARAKAN UTARA	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	1.734.950,00		1.734.950,00
3	KEC. TARAKAN UTARA	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	9.381.809,00		9.381.809,00
			Jumlah KEC. TARAKAN UTARA			**14.085.189,00**	**-**	**14.085.189,00**
1	INSPEKTORAT	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	111.782,00		111.782,00
2	INSPEKTORAT	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	449.450,00		449.450,00
3	INSPEKTORAT	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	5.875.179,00		5.875.179,00
4	INSPEKTORAT	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Desember 2024	2024	1.153.850,00		1.153.850,00
			Jumlah INSPEKTORAT			**7.590.261,00**	**-**	**7.590.261,00**
1	BAPPEDA LITBANG	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telpon Pemakaian Desember 2024	2024	61.441,00		61.441,00
2	BAPPEDA LITBANG	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	160.150,00		160.150,00
3	BAPPEDA LITBANG	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	7.700.474,00		7.700.474,00
4	BAPPEDA LITBANG	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2024	6.440.500,00		6.440.500,00
			Jumlah BAPPEDA LITBANG			**14.362.565,00**	**-**	**14.362.565,00**
2	BPKPAD	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon Pemakaian Desember 2024	2024	10.299.030,00		10.299.030,00
3	BPKPAD	5.1.02.02.01.0060	Belanja Air	Air PDAM Pemakaian Desember 2024	2024	14.537.950,00		14.537.950,00
4	BPKPAD	5.1.02.02.01.0061	Belanja Listrik	Listrik PLN Pemakaian Desember 2024	2024	106.149.591,00		106.149.591,00
			Jumlah BPKPAD			**130.986.571,00**	**-**	**130.986.571,00**
1	BKPSDM	5.1.02.02.01.0059	Belanja Telepon	Telepon / Indihome / Speedy Pemakaian Desember 2024	2024	270.964,00		270.964,00
2	BKPSDM	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat	Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2024	790.600,00		790.600,00
			Jumlah BKPSDM			**1.061.564,00**	**-**	**1.061.564,00**
			Total			**10.583.924.943,00**	**3.346.949.730,00**	**7.236.975.213,00**

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
1	Honorarium PPTK, Pengawas Lapangan, Pengelola Administrasi Kegiatan	Pembangunan Jalan	2016	2.500.000,00	2.500.000
2	Honorarium Pejabat Pengadaan Non Konstruksi (Perencanaan & Pengawasan)	Pembangunan Jalan	2016	600.000,00	600.000
3	Honorarium Pejabat Pengadaan Non Konstruksi (Perencanaan & Pengawasan)	Pembangunan Jalan	2016	600.000,00	600.000
4	Honorarium Pejabat Pengadaan Konstruksi	Pembangunan Jalan	2016	600.000,00	600.000
5	Honorarium Pejabat Pengadaan Konstruksi	Pembangunan Jalan	2016	1.200.000,00	1.200.000
6	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	Pembangunan Jalan	2016	880.000,00	880.000
7	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	Pembangunan Jalan	2016	660.000,00	660.000
8	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Perencanaan & Pengawasan)	Pembangunan Jalan	2016	520.000,00	520.000
9	Honorarium PPTK,Pengawas Lapangan ,Administrasi (kegiatan Amal Lama BBU)	Pembukaan Badan Jalan Amal Lama BBU	2016	11.000.000,00	4.000.000
					3.500.000
					3.500.000
10	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa (Fisik)	Pembukaan Badan Jalan Amal Lama BBU	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
11	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa (Pengawasan)	Pembukaan Badan Jalan Amal Lama BBU	2016	895.000,00	390.000
					280.000
					225.000
12	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa (Perencanaan)	Pembukaan Badan Jalan Amal Lama BBU	2016	895.000,00	390.000
					280.000
					225.000
13	Honorarium PPHP (Perencanaan)	Pembukaan Badan Jalan Amal Lama BBU	2016	690.000,00	320.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					220.000
					150.000
14	Honorarium PPHP (Pengawasan)	Pembukaan Badan Jalan Amal Lama BBU	2016	690.000,00	320.000
					220.000
					150.000
15	Honorarium PPTK,Pengawas Lapangan, Administrasi (RingRoad)	Peningkatan Jalan Outer Ring	2016	13.000.000,00	5.000.000
					4.500.000
					3.500.000
16	Honorarium PPHP Ring Road (Pengawasan)	Peningkatan Jalan Outer Ring	2016	1.290.000,00	520.000
					420.000
					350.000
17	Honorarium PPHP Ring Road (fisik)	Peningkatan Jalan Outer Ring	2016	3.230.000,00	1.160.000
					1.060.000
					1.010.000
18	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa ULP (Pengawasan)	Peningkatan Jalan Outer Ring	2016	1.670.000,00	620.000
					550.000
					500.000
19	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa (Pengawasan)	Peningkatan Jalan Outer Ring	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
20	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Ring Road (fisik)	Peningkatan Jalan Outer Ring	2016	4.500.000,00	2.000.000
					1.500.000
					1.000.000
21	Honoraraium PPTK,Pengawas Lapangan,Pengelola Administrasi, Akses menuju Sentra Industri Kecil Menengah Kr. Harapan	Akses menuju Sentra Industri Kecil Menengah Kr. Harapan	2016	8.500.000,00	3.500.000
					3.000.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					2.000.000
22	Honoraraium Pejabat Penerima Hasil pekerjaan Non Konstruksi Akses menuju Sentra Industri Kecil Menengah Kr. Harapan	Akses menuju Sentra Industri Kecil Menengah Kr. Harapan	2016	130.000,00	130.000
23	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Rehabiliasi/Pemeliharaan Jalan	2016	4.200.000,00	2.100.000
					2.100.000
24	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Rehabiliasi/Pemeliharaan Jalan	2016	1.320.000,00	1.320.000
25	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan KRehabilitasi/Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan	Rehabiliasi/Pemeliharaan Jalan	2016	10.000.000,00	4.000.000
					3.500.000
					2.500.000
26	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi (Bankeu) 50 jt s/d 500 jt Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Sebengkok Waru (Bankeu)	2016	3.940.000,00	800.000
					750.000
					600.000
					780.000
					560.000
					450.000
27	Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Bankeu) 100 jt s/d 250 jt Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Sebengkok Waru (Bankeu)	2016	1.130.000,00	230.000
					130.000
					80.000
					320.000
					220.000
					150.000
28	Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Bankeu) 2,5 M s/d 5 M Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah (Jalan Lingitan Stadion Datu Adil)	PENINGKATAN JALAN LIGITAN STADIUN DATU ADIL	2016	3.310.000,00	810.000
					710.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					660.000
					320.000
					220.000
					150.000
					230.000
					130.000
					80.000
29	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bankeu) Mangkudulis Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah	PENINGKATAN JALAN MANGKUDULIS	2016	5.500.000,00	3.500.000
					2.000.000
30	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Sebengkok Waru (Bankeu)	2016	2.000.000,00	2.000.000
31	Belanja Honorarium PPTK (Ligitan) Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah	PENINGKATAN JALAN LIGITAN STADIUN DATU ADIL	2016	10.000.000,00	4.000.000
					3.500.000
					2.500.000
32	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi (Peningkatan Jalan Cenderawaish)	Peningkatan Jalan Cendrawasih	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
33	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi (Perencanaan) (Peningkatan Jalan Cenderawaish)	Peningkatan Jalan Cendrawasih	2016	895.000,00	390.000
					280.000
					225.000
34	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi (Pengawasan) (Peningkatan Jalan Cenderawaish)	Peningkatan Jalan Cendrawasih	2016	895.000,00	390.000
					280.000
					225.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
35	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Peningkatan Jalan Cenderawaish)	Peningkatan Jalan Cendrawasih	2016	1.760.000,00	670.000
					570.000
					520.000
36	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Perencanaan & Pengawasan) (Peningkatan Jalan Cenderawaish)	Peningkatan Jalan Cendrawasih	2016	880.000,00	460.000
					260.000
					160.000
37	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi 50 Jt s/d 500 Jt (Peningkatan Jalan Jl.Melati-Karang Balik)	Peningkatan Jalan Jl.Melati-Karang Balik	2016	1.790.000,00	700.000
					570.000
					520.000
38	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi 500 Jt s/d 10 M	Peningkatan Jalan Jl.Melati-Karang Balik	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
39	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jalan Jl.Melati-Karang Balik	2016	600.000,00	600.000
40	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi 1 s/d 2,5 M	Peningkatan Jalan Jl.Melati-Karang Balik	2016	1.760.000,00	670.000
					570.000
					520.000
41	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi	Peningkatan Jalan Jl.Melati-Karang Balik	2016	260.000,00	260.000
42	Honorarium Pelaksana Kegiatan Bankeu Jalan Melati - Karang balik	Peningkatan Jalan Jl.Melati-Karang Balik	2016	2.000.000,00	2.000.000
43	Honorarium Pelaksana Kegiatan Bankeu Jalan Jembatan Bongkok, Anggrek dan Celebes	Peningkatan Jalan Jembt. Bongkok, Anggrek, Selebes	2016	10.000.000,00	4.000.000
					3.500.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					2.500.000
44	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi 50 Jt s/d 500 Jt	Peningkatan Jalan Jembt. Bongkok, Anggrek, Selebes	2016	1.250.000,00	500.000
					450.000
					300.000
45	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi 500 Jt s/d 10 M	Peningkatan Jalan Jembt. Bongkok, Anggrek	2016	4.300.000,00	800.000
					750.000
					600.000
		Peningkatan Jalan Jembatan Bongkok			800.000
					750.000
					600.000
46	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M	Peningkatan Jalan Jembt. Bongkok, Anggrek	2016	3.520.000,00	1.340.000
					1.140.000
					1.040.000
47	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan NonKonstruksi 100 Jt s/d 250 Jt	Peningkatan Jalan Jembt. Bongkok, Anggrek, Selebes	2016	1.380.000,00	640.000
					440.000
					300.000
48	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan NonKonstruksi 250 Jt s/d 500 Jt	Peningkatan Jalan Jembt. Bongkok, Anggrek, Selebes	2016	990.000,00	420.000
					320.000
					250.000
49	Honorarium PPTK, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi (Peningkatan Jalan Gajah Mada)	Peningkatan Jalan Gajah Mada	2016	11.500.000,00	4.500.000
					4.000.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					3.000.000
50	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi (Peningkatan Jalan Gajah Mada)	Peningkatan Jalan Gajah Mada	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
51	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Kontruksi (Peningkatan Jalan Gajah Mada)	Peningkatan Jalan Gajah Mada	2016	1.790.000,00	780.000
					560.000
					450.000
52	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Peningkatan Jalan Gajah Mada)	Peningkatan Jalan Gajah Mada	2016	2.630.000,00	960.000
					860.000
					810.000
53	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Kontruksi (Perencanaan & Pengawasan) (Peningkatan Jalan Gajah Mada)	Peningkatan Jalan Gajah Mada	2016	1.980.000,00	840.000
					640.000
					500.000
54	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Peningkatan Jalan Veteran Dwikora	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
55	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Kontruksi (Perencanaan)	Peningkatan Jalan Veteran Dwikora	2016	895.000,00	390.000
					280.000
					225.000
56	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Kontruksi (Pengawasan)	Peningkatan Jalan Veteran Dwikora	2016	895.000,00	390.000
					280.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					225.000
57	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	Peningkatan Jalan Veteran Dwikora	2016	1.760.000,00	670.000
					570.000
					520.000
58	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Perencanaan)	Peningkatan Jalan Veteran Dwikora	2016	440.000,00	230.000
					130.000
					80.000
59	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengawasan) (Peningkatan Jalan Veteran Dwikora)	Peningkatan Jalan Veteran Dwikora	2016	690.000,00	320.000
					220.000
					150.000
60	Honorarium PPTK, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi Kegiatan Peningkatan Jalan Aki Babu	Kegiatan Peningkatan Jalan Aki Babu	2016	6.000.000,00	3.500.000
					2.500.000
61	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Kegiatan Peningkatan Jalan Aki Babu	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
62	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi	Kegiatan Peningkatan Jalan Aki Babu	2016	895.000,00	390.000
					280.000
					225.000
63	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi	Kegiatan Peningkatan Jalan Aki Babu	2016	895.000,00	390.000
					280.000
					225.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
64	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	Kegiatan Peningkatan Jalan Aki Babu	2016	2.180.000,00	810.000
					710.000
					660.000
65	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Perencanaan)	Kegiatan Peningkatan Jalan Aki Babu	2016	990.000,00	420.000
					320.000
					250.000
66	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengawasan)	Kegiatan Peningkatan Jalan Aki Babu	2016	690.000,00	320.000
					220.000
					150.000
67	Honorarium Pengadaan barang/jasa (Peningkatan Jalan cahaya baru)	Peningkatan Jalan Cahaya Baru	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
68	Honoraraium panitia penerima Hasil pekerjaan Konstruksi (Fisik)	Peningkatan Jalan Cahaya Baru	2016	2.180.000,00	810.000
					710.000
					660.000
69	Honorarium Pengadaan barang/jasa Non Konstruksi (Perencanaan) (Jl. Akses menuju TPA)	Jl. Akses menuju TPA	2016	750.000,00	300.000
					250.000
					200.000
70	Honoraraium Panitia penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Perencanaan) (Jl. Akses menuju TPA)	Jl. Akses menuju TPA	2016	690.000,00	320.000
					220.000
					150.000
71	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa (Peningkatan Jalan Dermaga Ferry)	Peningkatan Jalan Dermaga Ferry	2016	1.250.000,00	500.000
					450.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					300.000
72	Honoraraium Panitia penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Peningkatan Jalan Dermaga Ferry)	Peningkatan Jalan Dermaga Ferry	2016	990.000,00	420.000
					320.000
					250.000
73	Honoraraium Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Peningkatan Jalan Dermaga Ferry)	Peningkatan Jalan Dermaga Ferry	2016	260.000,00	260.000
74	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi (Peningkatan Jalan Belalung)	Peningkatan Jalan Belalung	2016	750.000,00	300.000
					250.000
					200.000
75	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi (Pengawasan) (Peningkatan Jalan Belalung)	Peningkatan Jalan Belalung	2016	750.000,00	300.000
					250.000
					200.000
76	Honoraraium Panitia penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Perencanaan) (Peningkatan Jalan Belalung)	Peningkatan Jalan Belalung	2016	690.000,00	320.000
					220.000
					150.000
77	Honoraraium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Pengawasan) K(Peningkatan Jalan Belalung)	Peningkatan Jalan Belalung	2016	690.000,00	320.000
					220.000
					150.000
78	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi (Pematangan Lahan untuk IAIN)	Pematangan Lahan IAIN	2016	300.000,00	300.000
79	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pematangan Lahan untuk IAIN)	Peningkatan Jalan Belalung	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
80	Honorarium Panitia/Tim Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 2,5 M S/D 5 M (Pematangan Lahan untuk IAIN)	Peningkatan Jalan Belalung	2016	2.180.000,00	810.000
					710.000
					660.000
81	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (BANKEU) (Pematangan Lahan untuk IAIN)	Peningkatan Jalan Belalung	2016	2.500.000,00	2.500.000
82	Honorarium PPTK, Pengawas Lapangan, Pengelola Administrasi Kegiatan (Peningkatan Jalan Amal Lama)	Peningkatan Jalan Amal Lama	2016	4.000.000,00	500.000
					3.500.000
83	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa (Peningkatan Jalan Amal Lama)	Peningkatan Jalan Amal Lama	2016	4.500.000,00	2.000.000
					1.500.000
					1.000.000
84	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Peningkatan Jalan Amal Lama)	Peningkatan Jalan Amal Lama	2016	3.230.000,00	1.160.000
					1.060.000
					1.010.000
85	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Perencanaan) (Amal Lama)	Peningkatan Jalan Amal Lama	2016	990.000,00	420.000
					320.000
					250.000
86	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Pengawasan) (Amal Lama)	Peningkatan Jalan Amal Lama	2016	1.290.000,00	520.000
					420.000
					350.000
87	Honorarium PPTK, Pengawas Lapangan, Pengelola Administrasi (Peningkatan Jalan Sei Sesayap)	Peningkatan Jalan Sei Sesayap	2016	5.000.000,00	3.000.000
					2.000.000
88	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa (Fisik)	Peningkatan Jalan Sei Sesayap	2016	2.150.000,00	800.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					750.000
					600.000
89	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi (Pengawasan)	Peningkatan Jalan Sei Sesayap	2016	750.000,00	300.000
					250.000
					200.000
90	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	Peningkatan Jalan Sei Sesayap	2016	2.180.000,00	810.000
					710.000
					660.000
91	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Pengawasan) (Sei Sesayap)	Peningkatan Jalan Sei Sesayap	2016	690.000,00	320.000
					220.000
					150.000
92	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi (Perencanaan) - Peningkatan Jalan Sungai Berantas dan Kapuas	Peningkatan Jalan Sungai Berantas dan Kapuas	2016	895.000,00	390.000
					280.000
					225.000
93	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Pengawasan) (Sei Berantas)	PENINGKATAN JALAN SEI BERANTAS	2016	1.290.000,00	520.000
					420.000
					350.000
94	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Perencanaan) (Sei Berantas)	PENINGKATAN JALAN SEI BERANTAS	2016	990.000,00	420.000
					320.000
					250.000
95	Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa konstruksi 10 M / 1 T	PENINGKATAN JALAN TANJUNG PASIR	2016	4.500.000,00	2.000.000
					1.500.000
					1.000.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
96	Honorarium Panitia/Tim Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 10 M s/d 25 M	PENINGKATAN JALAN TANJUNG PASIR	2016	3.230.000,00	1.160.000
					1.060.000
					1.010.000
97	Honorarium Panitia/Tim Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi 250 Jt s/d 500 Jt	PENINGKATAN JALAN TANJUNG PASIR	2016	990.000,00	420.000
					320.000
					250.000
98	Honorarium Panitia/Tim Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi 500 Jt s/d 1 M	PENINGKATAN JALAN TANJUNG PASIR	2016	1.290.000,00	520.000
					420.000
					350.000
99	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Tanjung Pasir)	PENINGKATAN JALAN TANJUNG PASIR	2016	21.500.000,00	5.000.000
					4.500.000
					4.500.000
					3.500.000
					4.000.000
100	Honorarium Pengadaan Barang danJjasa Non Konstruksi 500 Jt / 10 M	PENINGKATAN JALAN TANJUNG PASIR	2016	1.670.000,00	620.000
					550.000
					500.000
101	Honorarium Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (Sport Center)	Peningkatan Jalan Kawasan Sport Center	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
102	Honorarium Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi (Sport Center)	Peningkatan Jalan Kawasan Sport Center	2016	1.790.000,00	390.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					280.000
					225.000
					390.000
					280.000
					225.000
103	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Peningkatan Jalan Kawasan Sport Center	2016	3.310.000,00	810.000
					710.000
					660.000
					320.000
					220.000
					150.000
					230.000
					130.000
					80.000
104	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan r (SPORT CENTER)	Peningkatan Jalan Kawasan Sport Center	2016	2.500.000,00	2.500.000
105	Honorarium Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Jl. Karungan - Angin-Angin)	Kegiatan Peningkatan Jalan Sei Mahakam	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
106	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jl. Karungan - Angin-Angin)	Kegiatan Peningkatan Jalan Sei Mahakam	2016	2.180.000,00	810.000
					710.000
					660.000
107	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Jalan Sei. Berantas dan Kapuas	Peningkatan Jalan Sei Berantas dan Jalan Sei Kapuas	2016	13.000.000,00	5.000.000
					4.500.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					3.500.000
108	Honorarium Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Sei Kapuas)	Sei Kapuas	2016	4.500.000,00	2.000.000
					1.500.000
					1.000.000
109	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Sei Kapuas)	Sei Kapuas	2016	2.180.000,00	810.000
					710.000
					660.000
110	Honorarium PPTK, Pengawas Lapangan, Pengelola Administrasi Kegiatan Peningkatan Jalan Karungan - Angin-Angin K	Kegiatan Peningkatan Sei Mahakam dan Peningkatan Jalan Karungan - Angin-Angin	2016	3.000.000,00	3.000.000
111	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kontruksi(Peningkatan Jalan Karungan - Angin-Angin)	Kegiatan Peningkatan Jalan Karungan - Angin-Angin	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
112	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kontruksi (Peningkatan Jalan Karungan - Angin-Angin)	Kegiatan Peningkatan Jalan Sei Mahakam	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
113	Honorarium Panitia Pengadaan Barang danJasa Non Kontruksi (Peningkatan Jalan Karungan - Angin-Angin)	Kegiatan Peningkatan Jalan Sei Mahakam dan Jalan Karungan-Angin-angin	2016	1.500.000,00	600.000
					500.000
					400.000
114	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Peningkatan Jalan Amal Lama)	Kegiatan Peningkatan Jalan Karungan - Angin-Angin	2016	2.180.000,00	810.000
					710.000
					660.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
115	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Perencanaan) (Jalan Karungan - Angin-Angin)	Kegiatan Peningkatan Jalan Sei Mahakam dan Jalan Karungan-Angin-angin	2016	690.000,00	320.000
					220.000
					150.000
116	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Pengawasan) (Halan Karungan - Angin-Angin)	Kegiatan Peningkatan Jalan Sei Mahakam dan Jalan Karungan-Angin-angin	2016	990.000,00	420.000
					320.000
					250.000
117	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jalan Juata Lembah	2017	2.000.000,00	500.000
		Peningkatan Jalan BBU			500.000
		Peningkatan Jalan Pasar Beringin			500.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Sei Mahakam-Jalan Peningki Laid			500.000
118	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi	Peningkatan Jalan Juata Lembah	2017	1.840.000,00	460.000
		Peningkatan Jalan Mangkudulis			460.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Sei Mahakam-Jalan Peningki Laid			460.000
		Rehabilitasi Jalan Ikn Bawal I/Cendawan I			460.000
119	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2017	9.000.000,00	4.500.000
					4.500.000
120	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2017	2.500.000,00	2.500.000
121	Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2017	2.300.000,00	2.070.000
					230.000
122	Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2017	2.300.000,00	2.300.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
123	Belanja Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (DAK - Sharing) Ikan Bawal II / Cendawan II	Pemeliharaan Jalan Ikan Bawal II/Cendawan II	2017	2.400.000,00	800.000
					800.000
					800.000
124	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi (DAK - Sharing) Ikan Bawal II / Cendawan II	Pemeliharaan Jalan Ikan Bawal II/Cendawan II	2017	500.000,00	250.000
					250.000
125	Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (DAK - Sharing) Ikan Bawal II / Cendawan II	Pemeliharaan Jalan Ikan Bawal II/Cendawan II	2017	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
126	Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (DAK - Sharing) Ikan Bawal II / Cendawan II	Pemeliharaan Jalan Ikan Bawal II/Cendawan II	2017	460.000,00	230.000
					230.000
127	Belanja Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (DAK- Sharing) P.Banda	Pemeliharaan Jalan P. Banda	2017	2.400.000,00	800.000
					800.000
					800.000
128	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi (DAK- Sharing) P.Banda	Pemeliharaan Jalan P. Banda	2017	500.000,00	250.000
					250.000
	Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (DAK - Sharing) P.Banda	Pemeliharaan Jalan P. Banda	2017	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
128	Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (DAK- Sharing) P. Banda	Pemeliharaan Jalan P. Banda	2017	460.000,00	230.000
					230.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
129	Belanja Honorarium PPTK	Pemeliharaan Jalan Ikan Bawal II/Cendawan II (DAK)	2017	30.000.000,00	4.500.000
					4.000.000
					2.500.000
					3.500.000
		Pemeliharaan Jalan P. Banda			4.000.000
					2.500.000
		Pemeliharaan Jalan P. Pepabri			2.500.000
					4.000.000
		Pemeliharaan Jalan P. Sumatera			2.500.000
130	Belanja Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 2,5 M s/d 5 M (DAK-Sharing) P. Sumatera	Pemeliharaan Jalan P. Sumatera	2017	3.000.000,00	1.000.000
					1.000.000
					1.000.000
131	Belanja Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Non Konstruksi 100 Jt s/d 250 Jt (DAK - Sharing) P. Sumatera	Pemeliharaan Jalan P. Sumatera	2017	900.000,00	300.000
					300.000
					300.000
132	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi (DAK - Sharing) P. Sumatera	Pemeliharaan Jalan P. Sumatera	2017	250.000,00	250.000
133	Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 2,5 M s/d 5 M (DAK-Sharing) P. Sumatera	Pemeliharaan Jalan P. Sumatera	2017	2.010.000,00	670.000
					670.000
					670.000
134	Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi s/d 200 Jt (DAK - Sharing) P. Sumatera	Pemeliharaan Jalan P. Sumatera	2017	690.000,00	320.000
					220.000
					150.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
135	Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (DAK-Sharing) P. Sumatera	Pemeliharaan Jalan P. Sumatera	2017	230.000,00	230.000
136	Belanja Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (DAK-Sharing) Pepabri	Pemeliharaan Jalan P. Pepabri	2017	2.400.000,00	800.000
					800.000
					800.000
137	Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (DAK - Sharing) Pepabri	Pemeliharaan Jalan P. Pepabri	2017	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
138	Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (DAK - Sharing) Pepabri	Pemeliharaan Jalan P. Pepabri	2017	230.000,00	230.000
139	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Jalan Aki Balak	Peningkatan Jalan Aki Balak	2017	25.500.000,00	10.000.000
					5.500.000
					5.500.000
					4.500.000
140	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Jalan Anggrek	Peningkatan Jalan Anggrek	2017	12.500.000,00	4.500.000
					4.500.000
					3.500.000
141	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 10 M s/d 25 M Jalan Anggrek RT. 11 Kel. Karang Harapan tembus SMP 8	Peningkatan Jalan Anggrek RT. 11 Kel. Karang Harapan tembus SMP 8	2017	4.800.000,00	960.000
					960.000
					960.000
					960.000
					960.000
142	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi 500 jt s/d 1 M Jalan Anggrek RT. 11 Kel. Karang Harapan tembus SMP 8	Peningkatan Jalan Anggrek RT. 11 Kel. Karang Harapan tembus SMP 8	2017	2.100.000,00	420.000
					420.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					420.000
					420.000
					420.000
143	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Jalan Juata Lembah Kegiatan	Peningkatan Jalan Juata Lembah (DAK)	2017	5.000.000,00	3.000.000
					2.000.000
144	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi 1 M s/d 2,5 M Juata Lembah	Peningkatan Jalan Juata Lembah (DAK)	2017	2.400.000,00	800.000
					800.000
					800.000
145	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi Juata Lembah	Peningkatan Jalan Juata Lembah (DAK)	2017	500.000,00	500.000
146	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M Juata Lembah	Peningkatan Jalan Juata Lembah (DAK)	2017	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
147	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi Juata Lembah	Peningkatan Jalan Juata Lembah (DAK)	2017	460.000,00	460.000
148	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM)	2017	10.000.000,00	4.000.000
					3.500.000
					2.500.000
149	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 1 M s/d 2,5 M Akses Menuju Kawasan Industri Kecil Menengah (SIKIM)	Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM)	2017	1.800.000,00	600.000
					600.000
					600.000
150	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Non Konstruksi 50 Jt s/d 100 Jt Akses Menuju Kawasan Industri Kecil Menengah (SIKIM)	Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM)	2017	750.000,00	250.000
					250.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					250.000
151	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi Akses Menuju Kawasan Industri Kecil Menengah (SIKIM)	Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM)	2017	250.000,00	250.000
152	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M Akses Menuju Kawasan Industri Kecil Menengah (SIKIM)	Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM)	2017	1.455.000,00	485.000
					485.000
					485.000
153	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi s/d 200 Jt Akses Menuju Kawasan Industri Kecil Menengah (SIKIM)	Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM)	2017	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
154	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi Akses Menuju Kawasan Industri Kecil Menengah (SIKIM)	Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM)	2017	230.000,00	230.000
155	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 2,5 M s/d 5 M Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Tahap II	Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Tahap II	2017	1.824.000,00	608.000
					608.000
					608.000
156	Honorariumm Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi s/d 200 Jt Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Tahap II	Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Tahap II	2017	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
157	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Perumahan PNS)	Peningkatan Jalan Perumahan PNS	2017	17.500.000,00	5.000.000
					4.500.000
					4.500.000
					3.500.000
158	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 10 M s/d 25 M Perumahan PNS	Peningkatan Jalan Perumahan PNS	2017	4.800.000,00	960.000
					960.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					960.000
					960.000
					960.000
159	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi 500 jt s/d 1 M Perumahan PNS	Peningkatan Jalan Perumahan PNS	2017	2.100.000,00	420.000
					420.000
					420.000
					420.000
					420.000
160	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Jalan Jembatan Kuning dan Jalan Intraca)	Peningkatan Jalan Jembatan Kuning dan Jalan Intraca	2017	5.000.000,00	3.000.000
					2.000.000
161	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 500 Jt s/d 1 M (Jalan Jembatan Kuning)	Peningkatan Jalan Jembatan Kuning	2017	1.950.000,00	650.000
					650.000
					650.000
162	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi Konstruksi (Jembatan Kuning dan Intraca)	Peningkatan Jalan Jembatan Kuning dan Jalan Intraca	2017	450.000,00	450.000
163	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 500 Jt M s/d 1 M (Jalan Jembatan Kuning)	Peningkatan Jalan Jembatan Kuning	2017	1.260.000,00	420.000
					420.000
					420.000
164	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Jalan Intraca)	Peningkatan Jalan Intraca	2017	230.000,00	230.000
165	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi Jembatan Kuning dan Intraca	Peningkatan Jalan Jembatan Kuning dan Jalan Intraca	2017	460.000,00	460.000
166	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Jalan S. Bengawan)	Peningkatan Jalan Sei Bengawan	2017	8.500.000,00	3.500.000
					3.000.000
					2.000.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
167	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (DAK - Sharing) S. Bengawan	Peningkatan Jalan Sei Bengawan	2017	2.400.000,00	800.000
					800.000
					800.000
168	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi S. Bengawan	Peningkatan Jalan Sei Bengawan	2017	500.000,00	250.000
					250.000
169	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (S.Bengawan)	Peningkatan Jalan Sei Bengawan	2017	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
170	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (S. Bengawan)	Peningkatan Jalan Sei Bengawan	2017	460.000,00	230.000
					230.000
171	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan Sei. Kayan/Tanjakan Gunung Amal	Peningkatan Jalan Sei. Kayan/Tanjakan Gunung Ama	2017	8.000.000,00	3.000.000
					3.000.000
					2.000.000
172	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kasiba Fasum Kampung Empat	Pematangan Lahan Kasiba Fasum Kampung Empat	2017	13.500.000,00	4.000.000
					3.500.000
					3.500.000
					2.500.000
173	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Jl. Bengkirai - Jl. Malundung)	Peningkatan Jalan Bengkirai dan Jalan Malundung	2017	9.500.000,00	3.000.000
					2.500.000
					1.500.000
					2.500.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
174	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 500 Jt s/d 1 M Malundung	Peningkatan Jalan Malundung	2017	1.950.000,00	650.000
					650.000
					650.000
175	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 500 Jt s/d 1 M Bengkirai	Peningkatan Jalan Bengkirai	2017	1.950.000,00	650.000
					650.000
					650.000
176	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi Bengkirai - Malundung	Peningkatan Jalan Bengkirai	2017	1.000.000,00	500.000
		Peningkatan Jalan Malundung			500.000
177	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 500 Jt M s/d 1 M (Bengkirai - Malundung)	Peningkatan Jalan Bengkirai	2017	2.520.000,00	420.000
					420.000
					420.000
					420.000
					420.000
					420.000
178	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Bengkirai - Malundung)	Peningkatan Jalan Bengkirai	2017	460.000,00	230.000
		Peningkatan Jalan Malundung			230.000
179	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (Jalan BBU)	Peningkatan Jalan BBU (DAK)	2017	2.400.000,00	800.000
					800.000
					800.000
180	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi (Jalan BBU)	Peningkatan Jalan BBU (DAK)	2017	500.000,00	250.000
					250.000
181	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (Jl. BBU)	Peningkatan Jalan BBU (DAK)	2017	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
182	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Jl. BBU)	Peningkatan Jalan BBU (DAK)	2017	460.000,00	230.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					230.000
183	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan Timur (Tanjung Pasir)	Peningkatan Jalan Tanjung Pasir	2017	13.700.000,00	4.500.000
					4.000.000
					2.200.000
					3.000.000
184	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (Karungan angin-angin)	Peningkatan Jalan Karungan Angin-angin (DAK)	2017	2.400.000,00	800.000
					800.000
					800.000
185	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Non Konstruksi 50 Jt s/d 100 Jt (Karungan angin-angin)	Peningkatan Jalan Karungan Angin-angin (DAK)	2017	750.000,00	250.000
					250.000
					250.000
186	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi (Karungan angin-angin)	Peningkatan Jalan Karungan Angin-angin (DAK)	2017	250.000,00	250.000
187	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M (Karungan angin-angin)	Peningkatan Jalan Karungan Angin-angin (DAK)	2017	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
188	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi (Karungan angin-angin)	Peningkatan Jalan Karungan Angin-angin (DAK)	2017	230.000,00	230.000
189	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi Jalan sei. Mahakam - Jalan Peningki Laid	Peningkatan Jalan sei. Mahakam - Jalan Peningki Laid	2017	500.000,00	500.000
190	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M Jalan sei. Mahakam - Jalan Peningki Laid	Peningkatan Jalan sei. Mahakam - Jalan Peningki Laid	2017	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
191	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Jalan sei. Mahakam - Jalan Peningki Laid	Peningkatan Jalan sei. Mahakam - Jalan Peningki Laid	2017	460.000,00	460.000
192	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Database Jalan dan Jembatan Berbasis WEB	Penguatan Database Jalan dan Jembatan Berbasis WEB	2018	600.000,00	600.000
193	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2,5 M s/d 5 M	Penguatan Database Jalan dan Jembatan Berbasis WEB	2018	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
194	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	2018	2.550.000,00	1.050.000
					900.000
					600.000
195	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	2018	1.800.000,00	900.000
					900.000
196	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Barat dan Utara serta Timur dan Tengah	2018	500.000,00	500.000
197	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Barat dan Utara serta Timur dan Tengah	2018	460.000,00	460.000
198	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pengelola Administrasi (Peningkatan Jl. Ikan Bawal/Cendawan I dan Pasar Beringin)	Peningkatan Jl. Ikan Bawal/Cendawan I dan Pasar Beringin (DAK)	2018	750.000,00	150.000
					600.000
199	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 M s/d 2,5 M (penunjang Dak) 3 Orang (Sharing)	Peningkatan Jalan Pasar Beringin (DAK)	2018	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
200	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200 jt s/d 500 jt (penunjang Dak) 3 Orang (Sharing)	Peningkatan Jl. Ikan Bawal/Cendawan I (DAK)	2018	960.000,00	320.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					320.000
					320.000
201	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s/d 200 jt (penunjang Dak) 3 orang (Sharing)	Peningkatan Jl. Ikan Bawal/Cendawan I dan Pasar Beringin (DAK)	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
202	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl. Kusuma Bangsa)	Peningkatan Jl. Kusuma Bangsa	2018	750.000,00	750.000
203	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2,5 M s/d 5 M	Peningkatan Jl. Pulau Bunyu (DAK)	2018	2.010.000,00	670.000
					670.000
					670.000
204	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan s/d 200 jt	Peningkatan Jl. Pulau Bunyu (DAK)	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
205	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl. Bismillah)	Peningkatan Jl. Bismillah	2018	600.000,00	600.000
206	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi 1 M s/d 2,5 M	Peningkatan Jl. Bismillah	2018	2.400.000,00	800.000
					800.000
					800.000
207	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Non Konstruksi 1 M s/d 2,5 M	Peningkatan Jl. Bismillah	2018	750.000,00	250.000
					250.000
					250.000
208	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 M s/d 2,5 M	Peningkatan Jl. Bismillah	2018	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
209	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s/d 200 jt	Peningkatan Jl. Bismillah	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
210	Honorarium Penjabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jl. Lumpuran	2018	500.000,00	500.000
211	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500 jt s/d 1 M	Peningkatan Jl. Lumpuran	2018	1.260.000,00	420.000
					420.000
					420.000
212	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Peningkatan Jl. Bismillah	2018	230.000,00	230.000
213	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl Kampung Baru Dalam)	Peningkatan Jl. Kampung Baru Dalam	2018	1.500.000,00	900.000
					600.000
214	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jl. Kampung Baru Dalam	2018	500.000,00	500.000
215	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 1 M s/d 2,5 M		2018	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
216	Honorarium Penjabat Penerima Hasil Pekerjaan	Peningkatan Jl. Kampung Baru Dalam	2018	460.000,00	460.000
217	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl. Ladang Dalam)	Peningkatan Jl. Ladang Dalam	2018	450.000,00	450.000
218	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jl. Ladang Dalam	2018	500.000,00	500.000
219	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500 jt s.d 1 M	Peningkatan Jl. Ladang Dalam	2018	1.260.000,00	420.000
					420.000
					420.000
220	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Peningkatan Jl. Ladang Dalam	2018	460.000,00	460.000
221	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl Cendana)	Peningkatan Jl. Cendana	2018	450.000,00	450.000
222	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200 jt s.d 500jt .(peningkt Jln Cendana)	Peningkatan Jl. Cendana	2018	960.000,00	320.000
					320.000
					320.000
223	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jl. Cendana	2018	500.000,00	500.000
224	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Perbaikan Box Culvert Jl. Sumatera	2018	500.000,00	500.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
225	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 500 jt s.d 1 M	Perbaikan Box Culvert Jl. Sumatera	2018	1.260.000,00	420.000
					420.000
					420.000
226	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Perbaikan Box Culvert Jl. Sumatera	2018	460.000,00	460.000
227	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl P.Bunyu) (penunjang DAK) - Sharing	Peningkatan Jl. Pulau Bunyu (DAK)	2018	750.000,00	750.000
228	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 2,5 s/d 5 M (penunjang Dak) 3 Orang (Sharing)	Peningkatan Jl. Pulau Bunyu (DAK)	2018	2.010.000,00	670.000
					670.000
					670.000
229	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s/d 200 jt (penunjang Dak)3 Orang (Sharing)	Peningkatan Jl. Pulau Bunyu (DAK)	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
230	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl Mangkudulis (penunjang Dak) - Sharing	Peningkatan Jl. Mangkudulis (DAK)	2018	1.800.000,00	1.050.000
					750.000
231	Honorarium Panitia penerima Hasil pekerjaan 2,5 M s/d 5 M (penunjang Dak) 3 Orang (Sharing)	Peningkatan Jl. Mangkudulis (DAK)	2018	2.010.000,00	670.000
					670.000
					670.000
232	Honorarium Panitia Hasil pekerjaan s/d 200 jt (penunjang Dak)3 Orang - Sharing	Peningkatan Jl. Mangkudulis (DAK)	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
233	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl. Bhayangkara)	Peningkatan Jl. Bhayangkara	2018	750.000,00	750.000
234	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 2,5 M s/d 5 M	Peningkatan Jl. Bhayangkara	2018	2.010.000,00	670.000
					670.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					670.000
235	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan s/d 200 jt	Peningkatan Jl. Bhayangkara	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
236	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl. Dwikora)	Peningkatan Jl. Dwikora	2018	600.000,00	600.000
237	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jl. Dwikora	2018	250.000,00	250.000
238	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2,5 M s/d 4 M	Peningkatan Jl. Dwikora	2018	2.010.000,00	670.000
					670.000
					670.000
239	Honorraium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s.d 200 juta	Peningkatan Jl. Dwikora	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
240	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Peningkatan Jl. Dwikora	2018	230.000,00	230.000
241	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl. Teratai)	Peningkatan Jl. Teratai	2018	1.500.000,00	900.000
					600.000
242	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 M s./d 2,5 M	Peningkatan Jl. Teratai	2018	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
243	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s./d 200jt	Peningkatan Jl. Teratai	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
244	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Peningkatan Jl. Teratai	2018	230.000,00	230.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl. Salak)	Peningkatan Jl. Salak	2018	600.000,00	600.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jl. Salak	2018	500.000,00	500.000
245	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 M s./d 2,5 M		2018	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
246	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s./d 200jt	Peningkatan Jl. Salak	2018	460.000,00	460.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl. Hasanuddin I)	Peningkatan Jl. Hasanuddin I	2018	450.000,00	450.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jl. Hasanuddin I	2018	500.000,00	500.000
247	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 M s./d 2,5 M	Peningkatan Jl. Hasanuddin I	2018	1.260.000,00	420.000
					420.000
					420.000
248	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s./d 200jt	Peningkatan Jl. Hasanuddin I	2018	460.000,00	460.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl. Slamet Riyadi)	Peningkatan Jl. Slamet Riyadi	2018	750.000,00	750.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200 jt s./d 500 jt	Peningkatan Jl. Slamet Riyadi	2018	960.000,00	320.000
249					320.000
					320.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 M s./d 10 M	Peningkatan Jl. Slamet Riyadi	2018	2.430.000,00	810.000
250					810.000
					810.000
	Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan (Peningkatan Jl Aki Balak)	Peningkatan Jl. Aki Balak	2018	2.400.000,00	1.500.000
251					900.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 50 M s/d 75 M	Peningkatan Jl. Aki Balak	2018	1.150.000,00	230.000
					230.000
					230.000
					230.000
					230.000
252	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 1 M s/d 2,5 M	Peningkatan Jl. Aki Balak	2018	1.600.000,00	320.000
					320.000
					320.000
					320.000
					320.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
253	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl. Agathis (penunjang Dak) - sharing	Peningkatan Jl. Agathis	2018	600.000,00	600.000
254	Honorarium Panitia penerima Hasil pekerjaan 2,5 M s/d 5 M (penunjang Dak) 3 Orang (Sharing)	Peningkatan Jl. Agathis	2018	2.010.000,00	670.000
					670.000
					670.000
255	Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan s/d 200 jt (penunjang Dak)3 orang	Peningkatan Jl. Agathis	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
256	Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan (Peningkatan Jl Damai Bhakti (penunjang Dak)	Peningkatan Jl. Damai Bhakti	2018	2.100.000,00	1.200.000
					900.000
257	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 5 M s/d 10 M (penunjang Dak) Sharing	Peningkatan Jl. Damai Bhakti	2018	2.430.000,00	810.000
					810.000
					810.000
258	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 200 jt s/d 500 jt (penunjang Dak) Sharing	Peningkatan Jl. Damai Bhakti	2018	960.000,00	320.000
					320.000
					320.000
259	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 1 M s/d 2,5 M (penunjang Dak) Sharing	Peningkatan Jl. Jagung	2018	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
260	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan s/d 200 jt (penunjang Dak) Sharing	Peningkatan Jl. Jagung	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
261	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jl Aki Babu (penunjang Dak) Sharing	Peningkatan Jl. Aki Babu	2018	3.450.000,00	1.350.000
					1.200.000
					900.000
262	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 5 M s/d 10 M (penunjang Dak) Sharing	Peningkatan Jl. Aki Babu	2018	2.430.000,00	810.000
					810.000
					810.000
263	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 200 jt s/d 500 jt (penunjang Dak) Sharing	Peningkatan Jl. Aki Babu	2018	960.000,00	320.000
					320.000
					320.000
264	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jalan Belalung)	Peningkatan Jl. Belalung	2018	600.000,00	600.000
265	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jl. Belalung	2018	250.000,00	250.000
266	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 M s/d 2,5 M	Peningkatan Jl. Belalung	2018	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
267	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s/d 200jt	Peningkatan Jl. Belalung	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
268	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan	Peningkatan Jl. Jeruk	2018	230.000,00	230.000
269	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jalan Jeruk)	Peningkatan Jl. Jeruk	2018	600.000,00	600.000
270	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 M s/d 2,5 M	Peningkatan Jl. Jeruk	2018	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
271	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s/d 200jt	Peningkatan Jl. Jeruk	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
272	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan	Peningkatan Jl. Bengawan	2018	230.000,00	230.000
273	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jalan Bengawan)	Peningkatan Jl. Bengawan	2018	600.000,00	600.000
274	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jl. Bengawan	2018	250.000,00	250.000
275	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 M s/d 2,5 M	Peningkatan Jl. Bengawan	2018	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
276	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s/d 200jt	-	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
277	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jalan Ring Road Juata)	Peningkatan Jl. Ring Road Juata	2018	2.400.000,00	1.350.000
					1.050.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 10 M s/d 25 M	Peningkatan Jl. Ring Road Juata	2018	2.880.000,00	960.000
278					960.000
					960.000
279	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 250jt s/d 500jt	Peningkatan Jl. Ring Road Juata	2018	960.000,00	320.000
					320.000
					320.000
280	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jalan karungan Angin-angin)	Peningkatan Jl. Karungan Angin-angin	2018	2.100.000,00	1.200.000
					900.000
281	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 5 M s/d 10 M	Peningkatan Jl. Karungan Angin-angin	2018	2.430.000,00	810.000
					810.000
					810.000
282	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 200 jts/d 500 jt	Peningkatan Jl. Karungan Angin-angin	2018	960.000,00	320.000
					320.000
					320.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
283	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pematangan Lahan KASIBA Fasum Kp. 4) (MY)	Pematangan Lahan KASIBA Fasum Kp. 4	2018	10.500.000,00	3.000.000
					2.700.000
					2.700.000
					2.100.000
284	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 25 M s/d 5 M	Pematangan Lahan KASIBA Fasum Kp. 4	2018	4.800.000,00	960.000
					960.000
					960.000
					960.000
					960.000
285	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 500 Jt s/d 1 M	Pematangan Lahan KASIBA Fasum Kp. 4	2018	2.100.000,00	420.000
					420.000
					420.000
					420.000
					420.000
286	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jalan Bengkirai)	Peningkatan Jalan Bengkirai	2018	1.500.000,00	900.000
					600.000
287	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 1 M s/d 2,5 M	Peningkatan Jalan Bengkirai	2018	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
288	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan s/d 200 jt	Peningkatan Jalan Bengkirai	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
289	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jalan Malundung)	Peningkatan Jalan Malundung	2018	1.800.000,00	1.050.000
					750.000
290	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2,5 M s/d 5 M	Peningkatan Jalan Malundung	2018	2.010.000,00	670.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					670.000
					670.000
291	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s/d 200 jt	Peningkatan Jalan Malundung	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
292	Honoraraium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jalan Tanjung Pasir)	Peningkatan Jalan Tanjung Pasir	2018	3.900.000,00	1.500.000
					1.350.000
					1.050.000
293	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 10 M s/d 25 M	Peningkatan Jalan Tanjung Pasir	2018	2.880.000,00	960.000
					960.000
					960.000
294	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 500 jt s/d 1 M	Peningkatan Jalan Tanjung Pasir	2018	1.260.000,00	420.000
					420.000
					420.000
295	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jalan Sei. Mahakam -Peningki)	Peningkatan Jalan Sei. Mahakam - Peningk	2018	750.000,00	750.000
296	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 5 M s/d 10 M	Peningkatan Jalan Sei. Mahakam - Peningk	2018	2.430.000,00	810.000
					810.000
					810.000
297	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s/d 200 jt	Peningkatan Jalan Sei. Mahakam - Peningk	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
298	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jalan BBU)	Peningkatan Jalan BBU	2018	1.500.000,00	900.000
					600.000
299	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2,5 M s/d 5 M	Peningkatan Jalan BBU	2018	2.010.000,00	670.000
					670.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					670.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan s/d 200 jt		2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
301	Honoraraium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peningkatan Jalan Sport Center)	Peningkatan Jalan Sport Center	2018	750.000,00	750.000
302	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2,5 M s/d 5 M		2018	2.010.000,00	670.000
					670.000
					670.000
303	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 200 jts/d 500 jt		2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
304	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan		2018	230.000,00	230.000
305	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Non Konstruksi	Peningkatan Jalan Kopral	2018	500.000,00	250.000
					250.000
306	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 500 jt s/d 1 M	Peningkatan Jalan Kopral	2018	1.260.000,00	420.000
					420.000
					420.000
307	Honorarium pejabat pengadaan jasa non Konstruksi	Peningkatan Jalan Pesanteran Hidayatullah	2018	500.000,00	500.000
308	Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 200 jt s/d 500 JT	Peningkatan Jalan Pesanteran Hidayatullah	2018	960.000,00	320.000
					320.000
					320.000
309	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Peningkatan Jalan Pesanteran Hidayatullah	2018	460.000,00	460.000
310	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi s/d 200 Jt (Karungan angin-angin)	Peningkatan Jalan Karungan Angin-angin (DAK)	2017	690.000,00	230.000
					230.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					230.000
311	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Perencanaan)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2016	1.500.000,00	600.000
					500.000
					400.000
312	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (DAK -Sharing)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2016	5.400.000,00	1.500.000
					1.200.000
					900.000
					900.000
					900.000
313	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi (DAK - Sharing)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2016	1.500.000,00	600.000
					500.000
					400.000
314	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (DAK - Sharing)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2016	4.800.000,00	1.100.000
					1.000.000
					900.000
					900.000
					900.000
315	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi (DAK - Sharing)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2016	1.490.000,00	420.000
					320.000
					250.000
					250.000
					250.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
316	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (DAK - Sharing)	Optimalisasi Dan Pengembangan Zona Kampung Satu Dan Zona Persemaian	2016	26.500.000,00	5.000.000
					4.500.000
					4.500.000
					3.500.000
					4.500.000
					4.500.000
317	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (REGULER)	Optimalisasi Dan Pengembangan Zona Kampung Satu Dan Zona Persemaian	2016	9.500.000,00	3.000.000
					2.500.000
					2.500.000
					1.500.000
318	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (GOR)	Pembangunan Gedung OlahRaga (GOR)	2016	3.350.000,00	800.000
					750.000
					600.000
					600.000
					600.000
319	Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa Konstruksi (Sport Center)	Pembangunan Sport Center	2016	3.350.000,00	800.000
					750.000
					600.000
					600.000
					600.000
320	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan (Sport Center)	Pembangunan Sport Center	2016	1.500.000,00	600.000
					500.000
					400.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
321	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sport Center)	Pembangunan Sport Center	2016	6.600.000,00	4.200.000
					2.400.000
322	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konsutruksi Pembangunan Gedung Wanita	Pembangunan Gedung Wanita	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
323	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi Gedung Wanita	Pembangunan Gedung Wanita	2016	750.000,00	300.000
					250.000
					200.000
324	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pembangunan Gedung Wanita	2016	4.200.000,00	1.800.000
					1.500.000
					900.000
325	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pembuatan Pagar dan Lansekap Rusunawa	Pembuatan Pagar dan Lansekap Rusunawa	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
326	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi Pembuatan Pagar dan Lansekap Rusunawa	Pembuatan Pagar dan Lansekap Rusunawa	2016	1.500.000,00	600.000
					500.000
					400.000
327	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pemeliharaan Keciptakaryaan	2016	7.000.000,00	3.000.000
					2.500.000
					1.500.000
328	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pemeliharaan Keciptakaryaan	2016	600.000,00	600.000
329	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Pemeliharaan Keciptakaryaan	2016	900.000,00	900.000
330	Honorarium Belanja Pengadaan barang dan Jasa Konsultansi Perencanaan Sistem Penyediaan air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2017	805.000,00	300.000
					280.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					225.000
331	Honorarium Belanja Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Sistem Penyediaan air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2017	900.000,00	300.000
					300.000
					300.000
332	Honorarium Pejabat Pengadaan Perencanaan Sambungan MBR 4 Kecamatan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2017	300.000,00	300.000
333	Honorarium Pejabat Penerima HAsil Pekerjaan Perencanaan Sambungan MBR 4 Kecamatan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2017	230.000,00	230.000
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2017	500.000,00	250.000
					150.000
					100.000
334	Honorarium Pengadaan barang dan Jasa Konstruksi (DAK - Sharing)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2017	2.850.000,00	1.000.000
					950.000
					900.000
335	Honorarium Pengadaan barang dan Jasa Konsultansi (DAK - Sharing)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2017	830.000,00	300.000
					280.000
					250.000
336	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (DAK - Sharing)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2017	1.830.000,00	620.000
					620.000
					590.000
337	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi (DAK - Sharing)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2017	600.000,00	230.000
					200.000
					170.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
338	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan / Tim Koordinasi (DAK - Sharing)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2017	19.200.000,00	4.800.000
					3.600.000
					3.600.000
					3.600.000
					3.600.000
339	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sport Center)	Pengembangan Sport Center Dan Pariwista (Sport Center)	2017	3.450.000,00	1.350.000
					1.200.000
					900.000
340	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (GOR)	Pengembangan Sport Center Dan Pariwista (GOR)	2017	18.600.000,00	5.400.000
					4.800.000
					4.800.000
					3.600.000
341	Honorarium Panitia Pelaksan Kegiatan (Gedung Wanita)	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Umum (Gedung Wanita)	2017	13.800.000,00	5.400.000
					4.800.000
					3.600.000
342	Honorarium Panitia Pelaksan Kegiatan (Lansecape rusunawa)	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Umum	2017	7.800.000,00	4.800.000
					3.000.000
343	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa	Pemeliharaan Keciptakaryaan	2017	600.000,00	600.000
344	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pemeliharaan Keciptakaryaan	2017	600.000,00	600.000
345	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pemeliharaan Keciptakaryaan	2017	6.500.000,00	3.000.000
					2.000.000
					1.500.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
346	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2018	1.950.000,00	650.000
					650.000
					650.000
347	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konsultansi)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
348	Honorarium TimP elaksana Teknis Kegiatan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2018	5.100.000,00	1.200.000
					1.050.000
					1.050.000
					1.050.000
					750.000
349	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi)	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum	2018	1.950.000,00	650.000
					650.000
					650.000
350	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konsultansi)	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum	2018	690.000,00	230.000
					230.000
					230.000
351	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum	2018	2.850.000,00	-
					1.050.000
					1.050.000
					750.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
352	Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi (APBD)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2018	600.000,00	200.000
					200.000
					200.000
353	Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (DAK Penugasan - Sharing)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2018	600.000,00	200.000
					200.000
					200.000
354	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan / Tim Koordinasi (Penunjang DAK Penugasan)	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2018	1.050.000,00	1.050.000
355	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Kawasan Sport Center dan Pariwisata	Pembangunan Sport Center	2018	4.600.000,00	1.800.000
					1.600.000
					1.200.000
356	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pemeliharaan Keciptakaryaan	2018	690.000,00	690.000
357	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	Pemeliharaan Keciptakaryaan	2018	1.350.000,00	900.000
					450.000
358	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pembangunan Gedung Kantor	2016	5.500.000,00	3.500.000
					2.000.000
359	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rehab Kantor Walikota)	Pembangunan Gedung Kantor	2016	2.150.000,00	800.000
					750.000
					600.000
360	Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Umum	2016	2.000.000,00	2.000.000
361	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Polres)	Pembangunan Polres	2016	6.600.000,00	4.200.000
					2.400.000
362	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (Sub Datasemen)	Pembangunan Sub Detasemen	2016	2.100.000,00	2.100.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
363	Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa (Masjid / Paket A)	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Sosial (Masjid)	2016	900.000,00	900.000
364	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PNS) (Paket A)	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Sosial (Masjid)	2016	600.000,00	600.000
365	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Masjid / Paket B)	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Sosial (Masjid)	2016	600.000,00	600.000
366	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PNS) (Paket B)	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Sosial (Masjid)	2016	400.000,00	400.000
367	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Masjid)	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Sosial (Masjid)	2016	2.000.000,00	2.000.000
368	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Gereja)	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Sosial (Gereja))	2016	2.000.000,00	2.000.000
369	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	2016	600.000,00	600.000
370	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultansi)	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	2016	1.500.000,00	600.000
					500.000
					400.000
371	Honorarium PPTK, Pengelola Administrasi, dan Pengawas Lapangan	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	2016	16.000.000,00	4.000.000
					3.500.000
					3.500.000
					2.500.000
					2.500.000
372	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	2016	900.000,00	900.000
373	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultansi)	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	2016	750.000,00	300.000
					250.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					200.000
375	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	2016	600.000,00	600.000
376	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	2016	460.000,00	230.000
					230.000
377	Honorarium PPTK, Pengelola Administrasi, dan Pengawas Lapangan	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	2016	8.100.000,00	2.660.000
					2.400.000
					-
					1.520.000
					1.520.000
378	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	2016	400.000,00	200.000
					200.000
379	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konsultansi)	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	2016	460.000,00	230.000
380					230.000
381	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultansi)	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	2016	600.000,00	600.000
382	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	2016	200.000,00	200.000
383	Honorarium PPTK, Pengelola Administrasi, dan Pengawas Lapangan	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	2016	**11.500.000,00**	3.500.000
					3.000.000
					3.000.000
					2.000.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
384	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi (Perencanaan Kejaksaan)	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Instansi Vertikal (Kejaksaan)	2017	1.050.000,00	400.000
					350.000
					300.000
385	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi (Perencanaan Kejaksaan)	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Instansi Vertikal (Kejaksaan)	2017	810.000,00	320.000
					270.000
					220.000
386	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	2016	27.300.000,00	4.800.000
					3.000.000
					4.200.000
					4.200.000
					4.200.000
					4.200.000
					900.000
					900.000
					900.000
387	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Penataan Kawasan Pesisir)	Penataan Kawasan Pesisir	2016	3.350.000,00	800.000
					750.000
					600.000
					600.000
					600.000
388	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pengawasan Penataan Kawasan Pesisir)	Penataan Kawasan Pesisir	2016	2.300.000,00	600.000
					500.000
					400.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					400.000
					400.000
389	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2016	2.685.000,00	1.170.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi				840.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi				675.000
390	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2016	600.000,00	600.000
391	Honorarium Tim Penerima Hasil pekerjaan (PNS) Non Konstruksi	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2016	2.070.000,00	960.000
					660.000
					450.000
392	Honorarium Pejabat Penerima Hasil pekerjaan (PNS) Non Konstruksi	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2016	600.000,00	600.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2016	69.300.000,00	11.000.000
					6.050.000
					6.050.000
					6.050.000
					6.050.000
					6.050.000
					6.050.000
					6.050.000
					6.050.000
					4.950.000
					4.950.000
393	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi (Penilaian Tanah)	Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok	2016	895.000,00	390.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					280.000
					225.000
394	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi	Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok	2016	600.000,00	600.000
	Honorarium Tim PPHP Non Konstruksi Penilaian Tanah	Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok	2016	320.000,00	320.000
	Honorarium Pejabat PPHP Non Konstruksi	Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok	2016	300.000,00	300.000
395	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok	2016	49.200.000,00	12.000.000
					6.600.000
					6.600.000
					6.600.000
					6.600.000
					5.400.000
					5.400.000
396	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	2016	37.800.000,00	9.000.000
					6.000.000
					6.000.000
					6.000.000
					6.000.000
					4.800.000
397	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	2016	2.300.000,00	600.000
					500.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					400.000
					400.000
					400.000
398	Honorarium Tim PPHP Non Konstruksi	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	2016	990.000,00	420.000
					320.000
					250.000
399	Honorarium Tim PPHP Non Konstruksi Penilai Tanah	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	2016	690.000,00	320.000
					220.000
					150.000
400	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	2016	300.000,00	300.000
401	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Balik - Selumit	2016	300.000,00	300.000
402	Honorarium Pejabat PPHP	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Balik - Selumit	2016	300.000,00	300.000
403	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Balik - Selumit	2016	15.600.000,00	6.000.000
					5.400.000
					4.200.000
404	Honorarium Panitia Pengadaan Tanah (appresial)	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Balik - Selumit	2016	895.000,00	390.000
					280.000
					225.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
405	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	Pengendalian Banjir Kawasan Pamusian	2016	3.350.000,00	800.000
					750.000
					600.000
					600.000
					600.000
406	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi	Pengendalian Banjir Kawasan Pamusian	2016	750.000,00	300.000
					250.000
					200.000
407	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2017	5.500.000,00	3.500.000
					2.000.000
408	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi) di atas Rp250 Jt s.d. Rp500 Jt	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2017	1.170.000,00	390.000
					390.000
					390.000
409	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi) di atas Rp500 Jt s.d. Rp1 miliar	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2017	1.650.000,00	550.000
					550.000
					550.000
410	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi) di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2017	1.860.000,00	620.000
					620.000
					620.000
412	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi di atas Rp500 Jt s.d. Rp1 M	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2017	1.260.000,00	420.000
					420.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					420.000
413	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi di atas Rp200 Jt s.d. Rp500 Jt	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2017	960.000,00	320.000
					320.000
					320.000
414	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi di atas di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2017	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
415	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2017	460.000,00	460.000
416	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2017	5.500.000,00	3.500.000
					2.000.000
417	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi	Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok	2017	450.000,00	450.000
418	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi	Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok	2017	230.000,00	230.000
419	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok	2017	12.300.000,00	3.000.000
					1.650.000
					1.650.000
					1.650.000
					1.650.000
					1.350.000
					1.350.000
420	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pengendalian Banjir Kawasan Kr. Anyar - Kr.Anyar Pantai	2017	4.800.000,00	1.000.000
					1.000.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
					1.000.000
					1.000.000
					800.000
421	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Balik - Selumit	2017	13.200.000,00	4.800.000
					4.800.000
					3.600.000
422	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai pagu s.d. Rp50 juta (Perencanaan Pengadaan Tanah dan Appraisal Embung Rawasari)	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2018	500.000,00	500.000
423	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (Perencanaan Pengadaan Tanah dan Appraisal Embung Rawasari)	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2018	460.000,00	460.000
424	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai pagu s.d. Rp50 juta (Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan masuk dan Long Storage Embung Bengawan)	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2018	250.000,00	250.000
425	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan masuk dan Long Storage Embung Bengawan)	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2018	230.000,00	230.000
426	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase Se Kota Tarakan (swakelola)	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase Se Kota Tarakan (Swakelola)	2016	2.100.000,00	2.100.000
427	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase Se Kota Tarakan (swakelola)	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase Se Kota Tarakan (Swakelola)	2016	1.500.000,00	1.500.000
428	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pembangunan Saluran Drainase (Wilayah Utara)	2016	600.000,00	600.000
429	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Saluran Drainase (Wilayah Utara)	2016	900.000,00	900.000
430	Honorarium PPTK, Pengelola Administrasi, dan Pengawas Lapangan	Pembangunan Saluran Drainase (Wilayah Utara)	2016	4.000.000,00	2.400.000
					1.600.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
431	Honorarium PPTK, Pengelola Administrasi, dan Pengawas Lapangan	Pembangunan Saluran Drainase (Wilayah Barat)	2016	5.200.000,00	2.800.000
					2.400.000
432	Honorarium PPTK, Pengelola Administrasi, dan Pengawas Lapangan	Pembangunan Saluran Drainase (Wilayah Tengah)	2016	6.000.000,00	2.800.000
					1.600.000
					1.600.000
433	Honorarium PPTK, Pengelola Administrasi, dan Pengawas Lapangan	Pembangunan Saluran Drainase (Wilayah Timur)	2016	6.000.000,00	2.800.000
					1.600.000
					1.600.000
434	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	-	2017	300.000,00	300.000
435	Honorarium PPHP Pemeliharaan	-	2017	130.000,00	130.000
436	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KwH Meter di Median Jl. Sesayap)	-	2017	2.400.000,00	800.000
					800.000
					800.000
437	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	-	2017	300.000,00	300.000
438	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi	-	2017	300.000,00	300.000
439	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	2017	6.000.000,00	2.400.000
					2.100.000
					1.500.000
440	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan LED	-	2017	300.000,00	300.000
441	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M	-	2017	1.560.000,00	520.000
					520.000
					520.000
442	Honorarium PPHP Pengadaan LED	-	2017	320.000,00	320.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
443	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	-	2017	600.000,00	600.000
444	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	-	2017	300.000,00	300.000
445	Honorarium PPHP Konsultansi	-	2017	130.000,00	130.000
446	Honorarium PPHP Konstruksi	-	2017	220.000,00	220.000
447	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penimbunan Taman Dekat Pelabuhan Fery	-	2017	670.000,00	250.000
					225.000
					195.000
448	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang	Pemasangan KWH meter LPJU di keLURAHAN SELUMIT PANTAI	2018	300.000,00	300.000
449	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pemasangan KWH meter LPJU di keLURAHAN SELUMIT PANTAI	2018	130.000,00	130.000
450	Honorarium Pejabat Pengadaan Konstruksi	Pemasangan LPJU	2018	300.000,00	300.000
451	Honorarium Pejabat Pengadaan Konsultasi	perencanaan lampu LED	2018	300.000,00	300.000
452	Honorarium Pejabat Pengadaan LED	Pengadaan LED	2018	300.000,00	300.000
453	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	Pemasangan LPJU	2018	130.000,00	130.000
454	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	perencanaan lampu LED	2018	130.000,00	130.000
455	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerajaan LED	Pengadaan LED	2018	130.000,00	130.000
456	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang	Belanja bahan kimia dan pupuk	2018	300.000,00	300.000
457	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Belanja bahan kimia dan pupuk	2018	130.000,00	130.000
458	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	-	2017	230.000,00	230.000
459	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Belanja bahan / bibit tanaman	2017	230.000,00	230.000
460	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	Penetapan raperda RDTR Kota Tarakan	2017	750.000,00	300.000
					250.000
					200.000
461	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang	Pemeliharaan LPJU Sekota Tarakan	2018	300.000,00	300.000
462	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaaan truk tangki air bersih	2018	390.000,00	390.000

DAFTAR KEWAJIBAN BELANJA HONORARIUM DPUPR
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nama Kegiatan	Tahun Utang	Saldo Akhir Desember 2024	Jumlah Honor
463	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang	Pengadaaan truk tangki air bersih	2018	300.000,00	300.000
464	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2016	9.570.000,00	4.620.000
					3.300.000
					1.650.000
465	Honororarium PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)		2018	6.910.000,00	1.520.000
					1.640.000
					2.230.000
					700.000
					820.000
Total				**1.306.474.000,00**	**1.306.474.000,00**

DAFTAR UTANG TRANSFER
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian Dana Bagi Hasil	Lebih Bayar (LB)		
	LB s.d. TA 2023	Penyelesaian LB s.d. TA 2024	Sisa LB s.d. TA 2024
Pajak	**5.076.568.000**	**5.076.568.000**	**-**
PPh	513.138.000	513.138.000	-
PPh Pasal 21	-	-	-
PPh Pasal 25/29	513.138.000	513.138.000	-
PBB	4.563.430.000	4.563.430.000	-
Bagi Rata	-	-	-
Bagian Daerah	4.096.815.000	4.096.815.000	-
Bagian Daerah Migas	4.005.602.000	4.005.602.000	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	91.213.000	91.213.000	-
Biaya Pemungutan	466.615.000	466.615.000	-
Biaya Pemungutan Migas	463.449.000	463.449.000	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	3.166.000	3.166.000	-
CHT	-	-	-
SDA	**12.720.730.000**	**6.730.803.000**	**5.989.927.000**
Migas	7.580.486.000	6.730.803.000	849.683.000
Minyak Bumi	7.580.485.000	6.730.803.000	849.682.000
Minyak Bumi	7.580.485.000	6.730.803.000	849.682.000
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-
Gas Bumi	1.000	-	1.000
Gas Bumi	1.000	-	1.000
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-
Minerba	-	-	-
Landrent	-	-	-
Royalti	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-
Kehutanan	1.514.337.000	-	1.514.337.000
DR	-	-	-
IIUPH	-	-	-
PSDH	1.514.337.000	-	1.514.337.000
Perikanan	1.192.976.000	-	1.192.976.000
Perkebunan Sawit	2.432.931.000	-	2.432.931.000
Total	**17.797.298.000**	**11.807.371.000**	**5.989.927.000**

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Tahun Utang	Jumlah Belum Terbayar
1	DPUPR	Pembukaan Badan Jalan Amal Lama BBU (Bankeu) Kegiatan Pembangunan Jalan	2016	4.625.000.000,00
2	DPUPR	Pembangunan Jalan Outer Ring Road	2017	2.820.180.000,00
3	DPUPR	Aspal Jalan Masuk Rumah Sakit Angkatan Laut	2017	149.315.000,00
4	DPUPR	Aspal Depan sekolah Indo Tionghoa (kampung Bugis)	2017	193.920.000,00
5	DPUPR	Agregat Badan Jalan dan Jembatan Kayu RT 03 Kel. Pantai Amal	2017	125.870.000,00
6	DPUPR	Peningkatan Jalan Aki Balak	2017	2.489.500.000,00
7	DPUPR	Peningkatan Jalan Anggrek RT. 11 Kel. Karang Harapan tembus SMP 8 (Multiyears)	2017	1.110.145.000,00
8	DPUPR	Pematangan Lahan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Tahap II	2017	137.972.150,00
9	DPUPR	Peningkatan Jalan Perumahan PNS	2017	375.600.000,00
10	DPUPR	Peningkatan Jalan Sei. Kayan/Tanjakan Gunung Amal	2017	1.440.495.000,00
11	DPUPR	Pengawasan Peningkatan Jalan Tanjung Pasir	2017	106.975.000,00
12	DPUPR	Aspal Jalan Masuk Balai Adat Kampung Enam	2018	103.808.000,00
13	DPUPR	Aspal Jalan Merpati (Samping STB)	2018	147.202.000,00
14	DPUPR	Aspal Perempatan Trafic Light Ladang (Halmahera)	2018	174.769.000,00
15	DPUPR	Perbaikan Jalan Belakang Polres	2018	107.825.000,00
16	DPUPR	Peningkatan Jalan Belalung	2018	2.344.212.000,00
17	DPUPR	Peningkatan Jalan Bengawan	2018	1.829.429.000,00
18	DPUPR	Pembangunan Jalan Outer Ring Road	2018	33.457.635.000,00
19	DPUPR	Peningkatan Jalan Anggrek RT. 11 Kel. Karang Harapan tembus SMP 8 (Multiyears)	2018	6.538.949.000,00
20	DPUPR	Peningkatan Jalan Aki Balak	2018	39.076.517.780,00
21	DPUPR	Peningkatan Jalan Perumahan PNS	2018	1.327.311.734,00
22	DPUPR	Pengawasan Jalan Perumahan PNS	2018	44.764.000,00
23	DPUPR	Peningkatan Jalan Sei. Kayan/Tanjakan Gunung Amal	2018	10.372.444.000,00
24		Pengawasan Peningkatan Jalan Lingitan Stadion Datu Adil (Bankeu) Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah	2016	102.231.658,00
25	DPUPR	Pengawasan Penataan Kawasan Sport Center	2017	82.650.000,00
26	DPUPR	Pengawasan Penataan Kawasan Sport Center	2018	74.740.000,00
27	DPUPR	Perencanaan Pembangunan Alat Penyimpanan (Fasum PL)	2016	19.383.000,00
28	DPUPR	Pengawasan Pembangunan Kantor Polres	2017	41.820.000,00
29	DPUPR	Review Desain Perencanaan Pembangunan Kantor Polres	2017	48.290.000,00
30	DPUPR	Perencanaan Kantor Polres	2017	49.099.600,00
31	DPUPR	Perencanaan Pengadaan Tanah Kegiatan Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok	2016	49.511.000,00
32	DPUPR	Feasibility Study Kegiatan Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok	2016	49.511.000,00
33	DPUPR	Perencanaan Pengadaan Tanah Saluran Kr.Anyar - Kr.Anyar Pantai	2016	49.511.000,00
34	DPUPR	Perencanaan tanah Saluran Karang Balik - Selumit - Selumit Pantai	2016	49.500.000,00
35	DPUPR	Pengadaan Tanah Untuk Saluran Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	2017	178.935.000,00
36	DPUPR	Pembangunan Saluran Induk Sebengkok (Multi Years)	2018	21.203.967.567,00
Jumlah DPUPR				**131.098.988.489,00**
1	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Agroforestry (Winarti)	2020	6.425.000,00
2	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lanud (Sindang)	2020	262.032.000,00
3	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Kasiba(Henry Sere Tilo) ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi pengembangan lanjutan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) Sabindo Kel. Juata Laut	2020	6.655.833.112,00
4	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Saluran Mulawarman (Sayid Yahya)	2020	128.000.000,00
5	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Embung Persemaian (Allen Teddy)	2024	540.686.100,00
6	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Kasiyana)	2024	71.830.727,00
7	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Samasang)	2024	62.598.866,00
8	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Irmawanto)	2024	29.732.333,00
9	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Abdul Majid)	2024	94.964.297,00
10	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Rustam)	2024	132.811.196,00
11	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Bunak)	2024	131.221.387,00
12	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Walikanta)	2024	37.156.550,00
13	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Baco)	2024	67.032.647,00
14	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Sira)	2024	44.512.453,00
15	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Hj. Semuk)	2024	8.836.632,00
16	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Rismawati)	2024	141.748.242,00

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Tahun Utang	Jumlah Belum Terbayar
17	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Nurliati)	2024	46.410.000,00
18	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Kumara Gusni Hardi)	2024	65.450.000,00
19	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Alimuddin)	2024	126.616.000,00
20	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Tare)	2024	107.870.000,00
21	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Alpionita)	2024	68.320.000,00
22	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (H. Lahaji)	2024	145.700.000,00
23	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Masjid)	2024	312.480.000,00
24	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Ade Imran)	2024	32.256.000,00
25	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Baharuddin)	2024	117.936.000,00
26	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Nurlaela)	2024	52.549.000,00
27	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Nasruddin)	2024	22.680.000,00
28	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Nasruddin)	2024	45.023.588,00
29	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Nasruddin)	2024	393.856.749,00
30	DPRKPP	Pengadaan Bidang Tanah - Lantamal (Fatimah)	2024	112.026.835,00
Jumlah DPRKPP				**10.064.595.714,00**
1	RSUKT	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01215 Belanja Modal Alat Kesehatan dan Alat Penunjang (Infusion Pump) PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	59.410.870,00
2	RSUKT	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01216 Belanja Modal Alat Kesehatan dan Alat Penunjang (Sealing Machine & Pulverizer) PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	11.918.500,00
3	RSUKT	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01217 Belanja Modal Alat Kesehatan dan Alat Penunjang (Syringe Pump) PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	52.206.775,00
4	RSUKT	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01218 Belanja Modal Alat Kesehatan dan Alat Penunjang (Scoop Strecher) PT. NUANSA CEMPALA INDAH	2024	5.413.063,00
5	RSUKT	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01219 Belanja Modal Alat Kesehatan dan Alat Penunjang (Phlebotomy Chair) PT. FARID MITRA UTAMA	2024	25.645.496,00
6	RSUKT	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01276 Belanja Modal Alat Kesehatan dan Alat Penunjang (Bed Transfer Patient) PT. ANUGRAH YADEN UTAMA	2024	49.693.694,00
7	RSUKT	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01283 Belanja Modal Alat Kesehatan dan Alat Penunjang (Pulse Oxymetri Bayi) - PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA	2024	3.264.442,00
8	RSUKT	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01284 Belanja Modal Alat Kesehatan dan Alat Penunjang (Smart Air For Isolation Room) - PT. MEDICARE INTERNASIONAL INDONESIA	2024	112.698.199,00
9	RSUKT	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01285 Belanja Modal Alat Kesehatan dan Alat Penunjang (B5 Medical Hospital Bed) - PT. DELTAMAS MANDIRI SEJAHTERA	2024	55.412.905,00
10	RSUKT	Gagal Transfer Kerekanan No. PPD-LS/XII/2024/01286 Belanja Modal Alat Kesehatan dan Alat Penunjang (Gerlink Patient Monitor 01 Varian 2/Pluss Trolly) - PT. GLOBAL SURYA MEDIKA	2024	98.943.694,00
Jumlah RSUKT				**474.607.638,00**
1	SETDA	Belanja pemeliharaan bangunan rumah jabatan Wali Kota Trk bln Desember	2024	6.491.000,00
Jumlah SETDA				**6.491.000,00**
Total				**141.644.682.841,00**

DAFTAR DANA JAMINAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Nama	Jenis Izin	Bentuk Jaminan	Jangka Waktu	Suku Bunga (%)	Nomor Dokumen	Tanggal Perolehan	Nilai
1	HJ. TASBIKAH	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
2	HJ. NURJANAH (HOTEL GATRA)	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
3	H. LAWU MARSUKI	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
4	PT. CHIPDECO INTI UTAMA	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
5	SLAMET	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
6	CV. TIRTA ALAM	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
7	INDO NURSIAH	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
8	SUGENG	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
9	HD. SYARIF M. IKSAN	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
10	H. SYAHRIL	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
11	ANDRIS KUNDRAT	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
12	ADNAN HG	SIPA	Rekening Giro	-	-	0051405633	-	500.000,00
13	SUMIATI	SIPMA	Rekening Giro			0051405633		500.000,00
14	PT. INTRACAWOOD MFG.	SIPA/SIPAP	Deposito Berjangka	1 Bulan	9,00 / Tahun	E001611	31/08/2006	6.000.000,00

DAFTAR DANA JAMINAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Nama	Jenis Izin	Bentuk Jaminan	Jangka Waktu	Suku Bunga (%)	Nomor Dokumen	Tanggal Perolehan	Nilai
15	PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI	IPPB	Deposito Berjangka	1 Bulan	9,00 / Tahun	E001616	13/09/2006	10.000.000,00
17	PT. ADHI KARYA	IUP	Deposito Berjangka	1 Bulan	8,5 / Tahun	E001636	06/11/2006	7.500.000,00
18	ZED ZEHDY	IUP	Deposito Berjangka	1 Bulan	5,75 / Tahun	E001160	28/02/2008	2.500.000,00
19	ELVINAE	IUP	Deposito Berjangka	1 Bulan	5,75 / Tahun	E001170	06/05/2008	10.000.000,00
Jumlah								**42.500.000,00**

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian/Nama	Jenis Izin	Bentuk Jaminan	Jangka Waktu	Suku Bunga (%)	Nomor Dokumen	Tanggal Perolehan	Nilai
1	Giro	SIPA	Tabungan	-	-	0051405633	-	6.500.000,00
2	PT. INTRACAWOOD MFG.	SIPA/SIPAP	Deposito Berjangka	1 Bulan	9,00 / Tahun	E001611	31/08/2006	6.000.000,00
3	PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI	IPPB	Deposito Berjangka	1 Bulan	9,00 / Tahun	E001616	13/09/2006	10.000.000,00
4	PT. ADHI KARYA	IUP	Deposito Berjangka	1 Bulan	8,5 / Tahun	E001636	06/11/2006	7.500.000,00
5	ZED ZEHDY	IUP	Deposito Berjangka	1 Bulan	5,75 / Tahun	E001160	28/02/2008	2.500.000,00
6	ELVINAE	IUP	Deposito Berjangka	1 Bulan	5,75 / Tahun	E001170	06/05/2008	10.000.000,00
Jumlah								**42.500.000,00**

DAFTAR DANA JAMINAN RUSUNAWA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Tempat	Nama	Nomor Unit	Saldo awal		Mutasi Masuk		Mutasi Keluar		Saldo Akhit
				Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	RUSUNAWA TB. 2	M. Boby Samany	Dif 1	11 Desember 2017	1.500.000,00					1.500.000,00
2	RUSUNAWA TB. 2	Darwis Mulaisa	Dif 2	2 Maret 2017	1.500.000,00					1.500.000,00
3	RUSUNAWA TB. 2	Yoslin Bayani	201	19 Juli 2022	1.500.000,00					1.500.000,00
4	RUSUNAWA TB. 2	Beby Maulina Moren.JRP	202			7 Agustus 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
5	RUSUNAWA TB. 2	Rais	203			24 Januari 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
6	RUSUNAWA TB. 2	Karticha	204	16 November 2022	1.500.000,00					1.500.000,00
7	RUSUNAWA TB. 2	Abdilah Hasan	205	20 September 2022	1.500.000,00					1.500.000,00
8	RUSUNAWA TB. 2	Achmad Saiful Rahmadhan	206	18 Februari 2021	1.500.000,00					1.500.000,00
9	RUSUNAWA TB. 2	M. Rizky Nur Ervan	207	3 Mei 2021	1.500.000,00					1.500.000,00
10	RUSUNAWA TB. 2	Evianti	208			23 Februari 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
11	RUSUNAWA TB. 2	Rahmat Faisal	209	4 Oktober 2023	1.500.000,00					1.500.000,00
12	RUSUNAWA TB. 2	Arya Anggara	210	16 April 2020	1.500.000,00					1.500.000,00
13	RUSUNAWA TB. 2	Latifah Cahyani	211	2 September 2019	1.500.000,00					1.500.000,00
14	RUSUNAWA TB. 2	Syahwal Ramadhanna	212	13 September 2023	1.500.000,00					1.500.000,00
15	RUSUNAWA TB. 2	Meriani	213	1 Oktober 2021	1.500.000,00					1.500.000,00
16	RUSUNAWA TB. 2	Mustari	214	16 Oktober 2017	1.500.000,00					1.500.000,00
17	RUSUNAWA TB. 2	Bayu Priyadi	215	28 Juni 2018	1.500.000,00			8 Juli 2024	1.500.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 2	Yulpan				12 Agustus 2024	1.650.000,00			1.650.000,00
18	RUSUNAWA TB. 2	M. Iskandar	216	10 Agustus 2021	1.500.000,00					1.500.000,00
19	RUSUNAWA TB. 2	Rully Adriyanto	217	30 April 2020)	1.500.000,00			19 Juni 2024	1.500.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 2	Iswandi				17 Juli 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
20	RUSUNAWA TB. 2	Adrianus Menasa Boro	218	13 Agustus 2020	1.500.000,00					1.500.000,00
21	RUSUNAWA TB. 2	Rahmawati (Alim)	219	4 September 2017	1.500.000,00					1.500.000,00
22	RUSUNAWA TB. 2	Panji Satrio Pangestu	220	13 Januari 2023	1.500.000,00					1.500.000,00
23	RUSUNAWA TB. 2	Rahmiyana	221	7 September 2022	1.500.000,00					1.500.000,00
24	RUSUNAWA TB. 2	Rindy Anthika Putri	222	13 Mei 2022	1.500.000,00			28 Agust 2024	1.500.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 2	Arya Pratama				3 Desember 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
25	RUSUNAWA TB. 2	Abdul Madjid	223	2 April 2019	1.500.000,00					1.500.000,00
26	RUSUNAWA TB. 2	Ari siswanto	224	6 Januari 2020	1.500.000,00					1.500.000,00
27	RUSUNAWA TB. 2	Bachtiar Baso	301	2 Maret 2018	1.425.000,00					1.425.000,00
28	RUSUNAWA TB. 2	Ruslan	302	6 Desember 2022	1.425.000,00					1.425.000,00
29	RUSUNAWA TB. 2	M. Depi	303	23 Januari 2019	1.425.000,00					1.425.000,00
30	RUSUNAWA TB. 2	Yosefin Tandi P	304	29 Januari 2020	1.425.000,00			20 Sept 2024	1.425.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 2	Tasruddin				23 Sept 2024	1.050.000,00	29 Oktober 2024	1.050.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 2	Y u s u f				18 Desember 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
31	RUSUNAWA TB. 2	Dame Kalbuhadi	305	2 Maret 2018	1.425.000,00			13 Februari 2024	1.425.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 2	Aliana Putri Saskia				14 Maret 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
32	RUSUNAWA TB. 2	Marang	306	13 Juli 2023	1.425.000,00			16 April 2024	1.425.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 2	Supriyanto				19 April 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
33	RUSUNAWA TB. 2	Agus Cahyono	307	15 Maret 2017	1.425.000,00					1.425.000,00
34	RUSUNAWA TB. 2	Baso Larasati	308	15 Mei 2018	1.425.000,00					1.425.000,00
35	RUSUNAWA TB. 2	Anatenriani	309	13 Januari 2023	1.425.000,00					1.425.000,00
36	RUSUNAWA TB. 2	Rachman	310	2 Agustus 2023	1.425.000,00					1.425.000,00
37	RUSUNAWA TB. 2	Cici Novianti	311			20 Mei 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
38	RUSUNAWA TB. 2	Irvan Wahyudi	312	12 Maret 2018	1.425.000,00					1.425.000,00
39	RUSUNAWA TB. 2	Vendy Rian Yudha	313	2 April 2018	1.425.000,00					1.425.000,00

DAFTAR DANA JAMINAN RUSUNAWA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Tempat	Nama	Nomor Unit	Saldo awal		Mutasi Masuk		Mutasi Keluar		Saldo Akhit
				Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
40	RUSUNAWA TB. 2	Irvan Maulana	314			2 Januari 2024	1.425.000,00			1.425.000,00
41	RUSUNAWA TB. 2	Mustafa Kamal	315	2 Agustus 2023	1.425.000,00			8 Juli 2024	1.425.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 2	Irwansyah				8 Juli 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
42	RUSUNAWA TB. 2	Sarah Septiani	316	15 Desember 2023	1.425.000,00					1.425.000,00
43	RUSUNAWA TB. 2	Aprianus Pontiku	317	6 Desember 2021	1.425.000,00					1.425.000,00
44	RUSUNAWA TB. 2	Supandi	318	19 Februari 2020	1.425.000,00					1.425.000,00
45	RUSUNAWA TB. 2	Atang	319	19 Januari 2018	1.425.000,00					1.425.000,00
46	RUSUNAWA TB. 2	Sri Wahyuni	320			29 November 2024	1.050.000,00	30 Des 2024	1.050.000,00	-
46	RUSUNAWA TB. 2	Moh.Fajrul	321			29 April 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
47	RUSUNAWA TB. 2	Imran	322			4 April 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
48	RUSUNAWA TB. 2	Zulkifli	323	6 Juli 2018	1.425.000,00					1.425.000,00
49	RUSUNAWA TB. 2	Juniarsih	324	2 Februari 2023	1.425.000,00					1.425.000,00
50	RUSUNAWA TB. 2	Martinus	401			20 Februari 2024	900.000,00			900.000,00
51	RUSUNAWA TB. 2	Kadri Lauto	402	3 Agustus 2021	1.350.000,00					1.350.000,00
52	RUSUNAWA TB. 2	Jasirah	403	13 Juli 2022	1.350.000,00					1.350.000,00
53	RUSUNAWA TB. 2	Dewi Jaya	404			5 Maret 2024	900.000,00			900.000,00
54	RUSUNAWA TB. 2	Teguh Imam	405	15 Desember 2023	1.350.000,00					1.350.000,00
55	RUSUNAWA TB. 2	Novi Arbiya	406	10 Oktober 2023	1.350.000,00					1.350.000,00
56	RUSUNAWA TB. 2	Endarwati	407	3 Oktober 2018	1.350.000,00					1.350.000,00
57	RUSUNAWA TB. 2	Juriansyah	408	3 Maret 2020	1.350.000,00					1.350.000,00
58	RUSUNAWA TB. 2	Muhammad Parisiwan	409	22 Agustus 2023	1.350.000,00					1.350.000,00
59	RUSUNAWA TB. 2	Z a k y	410	2 Oktober 2018	1.350.000,00					1.350.000,00
60	RUSUNAWA TB. 2	M a n d u	411	1 November 2022	1.350.000,00					1.350.000,00
61	RUSUNAWA TB. 2	Erika Yuliana	412	26 Oktober 2023	1.350.000,00					1.350.000,00
62	RUSUNAWA TB. 2	Makruf Ansari	413	19 Juli 2022	1.350.000,00					1.350.000,00
	RUSUNAWA TB. 2	Marta Maryani	414			13 September 2024	900.000,00			900.000,00
64	RUSUNAWA TB. 2	Yulpan	415							-
	RUSUNAWA TB. 2	Rafika		26 Oktober 2023	1.350.000,00					1.350.000,00
	RUSUNAWA TB. 2	Issandy Muhammad	416	21 Oktober 2019	1.350.000,00			04 Januari 2024	1.350.000,00	-
65	RUSUNAWA TB. 2	Wina Florensia				1 Februari 2024	900.000,00			900.000,00
66	RUSUNAWA TB. 2	Sudirjan	417			5 Februari 2024	900.000,00	12 Agustus 2024	900.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 2	Hendra				14 Agustus 2024	900.000,00			900.000,00
67	RUSUNAWA TB. 2	Ahmad Yanto	418	21 November 2022	1.350.000,00					1.350.000,00
68	RUSUNAWA TB. 2	Rahmat Wahyudi	419	9 Oktober 2019	1.350.000,00					1.350.000,00
69	RUSUNAWA TB. 2	Rusli	420			25 September 2024	900.000,00			900.000,00
70	RUSUNAWA TB. 2	Febriani	421	20 Mei 2019	1.425.000,00			5 Sept 2024	1.350.000,00	75.000,00
	RUSUNAWA TB. 2	Prima Regista Sapta				5 September 2024	900.000,00			900.000,00
71	RUSUNAWA TB. 2	Dede Kurniadi	422			18 Maret 2024	900.000,00			900.000,00
72	RUSUNAWA TB. 2	Sulfania	423	26 Oktober 2023	1.350.000,00			20 Sept 2024	1.350.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 2	Asriansyah				25 September 2024	900.000,00			900.000,00
73	RUSUNAWA TB. 2	Floris Rozulsupi	424	15 November 2023	1.350.000,00			5 Maret 2024	1.350.000,00	-
74	RUSUNAWA TB. 2	Agustianto				13 Maret 2024	900.000,00			900.000,00
75	RUSUNAWA TB. 2	Rio Kovizal	501			2 Februari 2024	750.000,00			750.000,00
76	RUSUNAWA TB. 2	Stenley Hendrik	502			25 Januari 2024	750.000,00			750.000,00
77	RUSUNAWA TB. 2	Risqan Abdillah	506			5 Januari 2024	1.275.000,00	5 Maret 2024	1.275.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 2	Untung Wahyudi				25 April 2024	750.000,00			750.000,00

DAFTAR DANA JAMINAN RUSUNAWA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Tempat	Nama	Nomor Unit	Saldo awal		Mutasi Masuk		Mutasi Keluar		Saldo Akhit
				Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
78	RUSUNAWA TB. 2	E k o	512	29 Juli 2022	1.275.000,00					1.275.000,00
79	RUSUNAWA TB. 2	Ainul Haq	513			25 Januari 2024	750.000,00			750.000,00
80	RUSUNAWA TB. 2	Rena	514			25 Januari 2024	750.000,00			750.000,00
81	RUSUNAWA TB. 2	Muhammad Iqbal H	515			25 Januari 2024	750.000,00			750.000,00
82	RUSUNAWA TB. 2	Muafirudin Pamungkas	516			25 Januari 2024	750.000,00			750.000,00
83	RUSUNAWA TB. 2	Krostiyon	517			25 Januari 2024	750.000,00			750.000,00
Jumlah Jaminan Rusunawa TB. 2					**87.225.000,00**		**35.700.000,00**		**19.875.000,00**	**103.050.000,00**
1	RUSUNAWA TB. 1	Sutikno	Dif 1	13 Juli 2017	1.500.000,00					1.500.000,00
2	RUSUNAWA TB. 1	Wanriyanto Amping	202	6 Oktober 2023	1.500.000,00					1.500.000,00
3	RUSUNAWA TB. 1	Herman Hutajulu	203	26 Oktober 2020	1.500.000,00					1.500.000,00
4	RUSUNAWA TB. 1	Arif Wicaksono	204	15 April 2021	1.500.000,00					1.500.000,00
5	RUSUNAWA TB. 1	Robi	205	6 November 2020	1.500.000,00					1.500.000,00
6	RUSUNAWA TB. 1	Aris Mustijadi	206	2 Mei 2016	1.500.000,00					1.500.000,00
7	RUSUNAWA TB. 1	Simatang Welen	207	3 Februari 2022	1.500.000,00					1.500.000,00
8	RUSUNAWA TB. 1	Arthur Mussanto	208			4 April 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
9	RUSUNAWA TB. 1	Hendra Supandy	209	9 Desember 2023	1.500.000,00					1.500.000,00
10	RUSUNAWA TB. 1	M. Azhari Fahmi	210			4 April 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
11	RUSUNAWA TB. 1	Muhajirin	211	7 Februari 2023	1.500.000,00			26 Maret 2024	1.500.000,00	-
12	RUSUNAWA TB. 1	Bima Widaswara.P				20 Mei 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
13	RUSUNAWA TB. 1	Fajar Setyawan	212	5 November 2020	1.500.000,00					1.500.000,00
14	RUSUNAWA TB. 1	Hasnawati Rachim	213	6 Maret 2023	1.500.000,00					1.500.000,00
15	RUSUNAWA TB. 1	Asriadi	214			23 Februari 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
16	RUSUNAWA TB. 1	Andriyani	215	2 April 2018	1.500.000,00					1.500.000,00
17	RUSUNAWA TB. 1	Nurhidayah	216	9 Desember 2021	1.500.000,00					1.500.000,00
18	RUSUNAWA TB. 1	Lukman	217	6 November 2019	1.500.000,00					1.500.000,00
19	RUSUNAWA TB. 1	Zainal Fuad	218	6 Februari 2017	1.500.000,00					1.500.000,00
20	RUSUNAWA TB. 1	Massarapi	219	4 Februari 2016	1.500.000,00					1.500.000,00
21	RUSUNAWA TB. 1	Wiyanto Arismunandar	220			4 April 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
22	RUSUNAWA TB. 1	Mardiansyah Risky P	221			2 Mei 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
23	RUSUNAWA TB. 1	Rusli Tamrin	222	7 Maret 2023	1.500.000,00			3 Juni 2024	1.500.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 1	Komarudin				11 Juli 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
24	RUSUNAWA TB. 1	Penni Rizki Ananda	223			28 Februari 2024	1.200.000,00	3 Juni 2024	1.200.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 1	Ismail Parno				7 Agustus 2024	1.200.000,00			1.200.000,00
25	RUSUNAWA TB. 1	Windarto	224	16 Agustus 2023	1.500.000,00					1.500.000,00
26	RUSUNAWA TB. 1	Fast Ernesto Hully	301			7 Februari 2024	1.050.000,00	25 April 2024	1.050.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 1	Nanang Budi Utomo				18 April 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
27	RUSUNAWA TB. 1	Roito Simorangkir	302	28 Agustus 2021	1.425.000,00					1.425.000,00
28	RUSUNAWA TB. 1	Imam Thobrom	303	9 Oktober 2020	1.425.000,00					1.425.000,00
29	RUSUNAWA TB. 1	S u l t a n	304	2 Juni 2022	1.425.000,00					1.425.000,00
30	RUSUNAWA TB. 1	Lidia Lusing	305			29 Februari 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
31	RUSUNAWA TB. 1	Fery Julianto	306	4 Februari 2022	1.425.000,00					1.425.000,00
32	RUSUNAWA TB. 1	Silvia Christanti	307	1 November 2021	1.425.000,00					1.425.000,00
33	RUSUNAWA TB. 1	Masita Dalila	309	6 Januari 2020	1.425.000,00					1.425.000,00
34	RUSUNAWA TB. 1	N a s i r	308	19 November 2016	1.425.000,00					1.425.000,00
35	RUSUNAWA TB. 1	Yuni Lestari	310			29 Februari 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
36	RUSUNAWA TB. 1	Supriadi	311			13 Maret 2024	1.050.000,00			1.050.000,00

DAFTAR DANA JAMINAN RUSUNAWA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Tempat	Nama	Nomor Unit	Saldo awal		Mutasi Masuk		Mutasi Keluar		Saldo Akhit
				Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
37	RUSUNAWA TB. 1	Ronal	312	30 Oktober 2023	1.425.000,00			13 Februari 2024	1.425.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 1	Joharun				23 Feberuari 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
38	RUSUNAWA TB. 1	Dedi Setiawan	313	6 Agustus 2016	1.425.000,00					1.425.000,00
39	RUSUNAWA TB. 1	Afriyanto	314			5 Juni 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
40	RUSUNAWA TB. 1	Rahman Ramli	315	9 Januari 2017	1.425.000,00					1.425.000,00
41	RUSUNAWA TB. 1	Sutriyanda	316			25 April 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
42	RUSUNAWA TB. 1	Rasman	317	11 Juli 2023	1.425.000,00			20 Sept 2024	1.425.000,00	-
	RUSUNAWA TB. 1	Siti Hajar				25 September 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
43	RUSUNAWA TB. 1	Rudi Hartono	318			12 Februarui 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
44	RUSUNAWA TB. 1	Agus	319			14 Mei 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
45	RUSUNAWA TB. 1	Arif Suhendra	320	13 Desember 2019	1.425.000,00					1.425.000,00
46	RUSUNAWA TB. 1	Galang Ramadhan	321			14 Oktober 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
47	RUSUNAWA TB. 1	Andi Muh.Alif Farhan Arif	322	16 Mei 2023	1.425.000,00					1.425.000,00
48	RUSUNAWA TB. 1	Heriyono	323			13 Maret 2024	1.050.000,00			1.050.000,00
49	RUSUNAWA TB. 1	Ari Yanto	324	3 Juli 2021	1.425.000,00					1.425.000,00
Jumlah Jaminan Rusunawa TB. 1					**46.950.000,00**		**24.450.000,00**		**8.100.000,00**	**63.300.000,00**
1	Rusus Kaltara 1	Zulkifli	01	10 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
2	Rusus Kaltara 1	Minanti Diah Pratiwi	02	21 April 2020	2.100.000,00			12 Agustus 2024	2.100.000,00	-
	Rusus Kaltara 1	Harwida				14 Agustus 2024	2.400.000,00			2.400.000,00
3	Rusus Kaltara 1	Awaludin	03	3 Juli 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
4	Rusus Kaltara 1	Tessalonika Alycta	04	20 September 2023	2.100.000,00					2.100.000,00
5	Rusus Kaltara 1	Noviansyah	05	22 Juli 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
6	Rusus Kaltara 1	M. Yanudin	06	7 Februari 2020	2.100.000,00			28 Agustus 2024	2.100.000,00	-
	Rusus Kaltara 1	Rindy Anthika Putri				8 Oktober 2024	2.400.000,00			2.400.000,00
7	Rusus Kaltara 1	Amirudin	07	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
8	Rusus Kaltara 1	Nurhaenah Muis	08	7 Juli 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
	Rusus Kaltara 1									-
9	Rusus Kaltara 1	Rahmat Lalu	09	5 Mei 2020	2.100.000,00			05 Maret 2024	2.100.000,00	-
	Rusus Kaltara 1	Jemi Rumario				6 Maret 2024	2.400.000,00	18 April 2024	2.400.000,00	-
	Rusus Kaltara 1	Fitria Handayani				19 April 2024	2.400.000,00			2.400.000,00
10	Rusus Kaltara 1	Wahid Assar	10	18 April 2023	2.100.000,00					2.100.000,00
11	Rusus Kaltara 1	Nurhisbah Amar	11	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
12	Rusus Kaltara 1	Mahaputra Andesyanto	12	3 April 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
13	Rusus Kaltara 1	Sitti Hatijah	13	13 Mei 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
14	Rusus Kaltara 1	Amrullah Taqwa	14	8 November 2021	2.100.000,00					2.100.000,00
15	Rusus Kaltara 1	Yudah Prasetyawan	15	1 Agustus 2023	2.100.000,00					2.100.000,00
16	Rusus Kaltara 1	Herlinda	16	27 Maret 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
17	Rusus Kaltara 1	M. Saifudin Zupri	17	19 Mei 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
18	Rusus Kaltara 1	Muhlis	18	10 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
19	Rusus Kaltara 1	Sudirman	19	2 November 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
20	Rusus Kaltara 1	Chandra Yusuf	20	1 Februari 2021	2.100.000,00					2.100.000,00
21	Rusus Kaltara 1	Eko Hamdiansyah	21	6 Januari 2022	2.100.000,00					2.100.000,00
22	Rusus Kaltara 1	Kasran	22	15 Juli 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
23	Rusus Kaltara 1	Andriyani	23	3 Juli 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
24	Rusus Kaltara 1	Andi Tawakkal	24	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
25	Rusus Kaltara 1	Gadri Yusuf	25	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00

DAFTAR DANA JAMINAN RUSUNAWA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Tempat	Nama	Nomor Unit	Saldo awal		Mutasi Masuk		Mutasi Keluar		Saldo Akhit
				Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
26	Rusus Kaltara 1	Andre Suandi Simbolon	26	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
27	Rusus Kaltara 1	Indra Rahim	27	25 Agustus 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
28	Rusus Kaltara 1	Erick Karunia	28	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
29	Rusus Kaltara 1	Taisar Prihatin	29	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
30	Rusus Kaltara 1	M. Dimas Maulana	30	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
31	Rusus Kaltara 1	Andi Asniati	31	13 Agustus 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
32	Rusus Kaltara 1	Arif	32	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
33	Rusus Kaltara 1	Dwi A Sarna	33	3 Desember 2021	2.100.000,00					2.100.000,00
34	Rusus Kaltara 1	Arif Zunaedi	34	7 September 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
35	Rusus Kaltara 1	Erawati	35	9 Juni 2020	2.100.000,00			5 Nov 2024	2.100.000,00	-
	Rusus Kaltara 1	Riswan				6 Des 2024	2.400.000,00			2.400.000,00
36	Rusus Kaltara 1	Arifin	36	10 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
37	Rusus Kaltara 1	Ryan Andriawan	37	26 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
38	Rusus Kaltara 1	Herman	38	6 Maret 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
39	Rusus Kaltara 1	Ramli Amir	39	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
40	Rusus Kaltara 1	Prihadi	40	26 Mei 2020	2.100.000,00			11 Sept 2024	2.100.000,00	-
	Rusus Kaltara 1	Akbar Nugraha				13 September 2024	2.400.000,00			2.400.000,00
41	Rusus Kaltara 1	Ramla	41	7 Ferbruari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
42	Rusus Kaltara 1	Dwi Lusianti H	42	22 Desember 2023	2.100.000,00					2.100.000,00
43	Rusus Kaltara 1	Anneke Indra Dewi	43	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
44	Rusus Kaltara 1	Alifah	44	5 Desember 2022	2.100.000,00					2.100.000,00
45	Rusus Kaltara 1	Muhammad Saleh	45	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
Jumlah Jaminan Rusus Kaltara 1					**94.500.000,00**		**14.400.000,00**		**12.900.000,00**	**96.000.000,00**
1	Rusus Kaltara 2	Rizky Zulfikar. S	01	5 Mei 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
2	Rusus Kaltara 2	Khaerunissa	02	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
3	Rusus Kaltara 2	Tuty Alawiyah	03	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
4	Rusus Kaltara 2	Jenal Arifin	04	15 Juli 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
5	Rusus Kaltara 2	Rini Ariyanti	05	21 Juni 2023	2.100.000,00					2.100.000,00
6	Rusus Kaltara 2	M.Gandri Haryono	06	18 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
7	Rusus Kaltara 2	Rusmiati	07	21 Juli 2023	2.100.000,00					2.100.000,00
8	Rusus Kaltara 2	Husniadi	08	2 Februari 2022	2.100.000,00					2.100.000,00
9	Rusus Kaltara 2	Tartiningsih	09	18 Februari 2020	2.100.000,00			5 Nov 2024	2.100.000,00	-
	Rusus Kaltara 2	Heruliansyah				11 Des 2024	2.400.000,00			2.400.000,00
10	Rusus Kaltara 2	Pikaludin	10	19 Mei 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
11	Rusus Kaltara 2	Jumrah	11	1 Desember 2021	2.100.000,00					2.100.000,00
12	Rusus Kaltara 2	Arsiah	12	18 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
13	Rusus Kaltara 2	Farid Ferdiansyah	13	18 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
14	Rusus Kaltara 2	Elly Abdianah	14	1 Juli 2021	2.100.000,00					2.100.000,00
15	Rusus Kaltara 2	Mukhtar	15	4 Juni 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
16	Rusus Kaltara 2	Adi Pranoto	16	26 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
17	Rusus Kaltara 2	Edy Yuliarno	17	4 Juni 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
18	Rusus Kaltara 2	Umar	18	4 Juni 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
19	Rusus Kaltara 2	Fajrian Noor	19	4 Mei 2021	2.100.000,00					2.100.000,00
20	Rusus Kaltara 2	Aci Islamadini	20	8 April 2022	2.100.000,00					2.100.000,00
21	Rusus Kaltara 2	M. Suhadi	21	16 Februari 2023	2.100.000,00					2.100.000,00
22	Rusus Kaltara 2	Lika	22	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00

DAFTAR DANA JAMINAN RUSUNAWA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Tempat	Nama	Nomor Unit	Saldo awal		Mutasi Masuk		Mutasi Keluar		Saldo Akhit
				Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
23	Rusus Kaltara 2	Imam Hanafi	23	3 Juli 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
24	Rusus Kaltara 2	Baswara Ahmad. S	24	3 Mei 2021	2.100.000,00					2.100.000,00
25	Rusus Kaltara 2	Lia Widyastuti	25	3 April 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
26	Rusus Kaltara 2	Rudi	26	3 April 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
27	Rusus Kaltara 2	Ana Damayanti	27	15 November 2023	2.100.000,00					2.100.000,00
28	Rusus Kaltara 2	Hendra	28	2 Juni 2021	2.100.000,00					2.100.000,00
29	Rusus Kaltara 2	Lisa Oktaviani	29	2 Juli 2021	2.100.000,00					2.100.000,00
30	Rusus Kaltara 2	Rachmila	30	18 Febrari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
31	Rusus Kaltara 2	Lukman Hakim	31	18 Februari 2020	2.100.000,00			3 Des 2024	2.100.000,00	-
	Rusus Kaltara 2	Hasrianah				17 Desember 2024	2.400.000,00			2.400.000,00
32	Rusus Kaltara 2	Jumari	32	3 April 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
33	Rusus Kaltara 2	Hamsar	33	10 September 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
34	Rusus Kaltara 2	Agus Darhamsyah	34	3 April 2020	2.100.000,00			3 Juni 2024	2.100.000,00	-
	Rusus Kaltara 2	Muhammad Fadli Buyung				3 Juli 2024	2.400.000,00			2.400.000,00
35	Rusus Kaltara 2	Yuliana	35	3 Juli 2020	2.100.000,00			3 Des 2024	2.100.000,00	-
36	Rusus Kaltara 2	Muksin	36	3 April 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
37	Rusus Kaltara 2	Nirma	37	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
38	Rusus Kaltara 2	Andri Susanto	38	7 Februari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
39	Rusus Kaltara 2	Rika Monika	39	9 Desember 2022	2.100.000,00					2.100.000,00
40	Rusus Kaltara 2	Abdul Hafid (Rizky)	40	7 Februari 2020	2.100.000,00			28 Agust 2024	2.100.000,00	-
	Rusus Kaltara 2	Dodi Apriadi				13 Sept 2024	2.400.000,00			2.400.000,00
41	Rusus Kaltara 2	Shalahudin	41	13 Ferbuari 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
42	Rusus Kaltara 2	Hapriyana	42	19 Mei 2020	2.100.000,00					2.100.000,00
Jumlah Jaminan Rusus Kaltara 2					**88.200.000,00**		**9.600.000,00**		**10.500.000,00**	**87.300.000,00**
1	Rusus Juata Permai	Bagus Arba'ul M	B/26			5 Maret 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
2	Rusus Juata Permai	Eko Ariyanda	B/34			5 Maret 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
3	Rusus Juata Permai	Eggi Ahmad	B/31			5 Maret 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
4	Rusus Juata Permai	Dina Dwi Primatiwi	A/01			23 Feb 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
5	Rusus Juata Permai	Amin Abdullah	B/29			23 Feb 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
6	Rusus Juata Permai	Adi Faisal	B/33			23 Feb 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
7	Rusus Juata Permai	Sutarmono	E/10			23 Feb 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
8	Rusus Juata Permai	Faizal Rozi	E/14			23 Feb 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
9	Rusus Juata Permai	Wahyu Rezeki	G/64			23 Feb 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
10	Rusus Juata Permai	Agus Susanto	G/66			23 Feb 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
11	Rusus Juata Permai	Abdul Wahab	G/68			23 Feb 2024	1.500.000,00	8 Juli 2024	1.500.000,00	-
12	Rusus Juata Permai	Izal Arfian	G/69			23 Feb 2024	1.500.000,00	8 Juli 2024	1.500.000,00	-
13	Rusus Juata Permai	Irwan Kurniawan	H/94			23 Feb 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
14	Rusus Juata Permai	M. Zainuddin	B/28			5 April 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
15	Rusus Juata Permai	Muchlis Mustakim	B/32			5 April 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
16	Rusus Juata Permai	Ari Indra Setiawan	A/02			5 April 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
17	Rusus Juata Permai	Mulyono	E/12			13 Maret 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
18	Rusus Juata Permai	Dramenra Silaban	E/08			18 April 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
19	Rusus Juata Permai	Dikma Gangsar Luhuring P	A/27			2 Mei 2025	1.500.000,00			1.500.000,00
20	Rusus Juata Permai	Hj. Herawati	A/03			7 Mei 2024	1.500.000,00	11 Nov 2024	1.500.000,00	-
21	Rusus Juata Permai	Tambrin	H/99			26 Maret 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
22	Rusus Juata Permai	Wati	A/05			02 Okt 2024	1.500.000,00			1.500.000,00

DAFTAR DANA JAMINAN RUSUNAWA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Tempat	Nama	Nomor Unit	Saldo awal		Mutasi Masuk		Mutasi Keluar		Saldo Akhit
				Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
23	Rusus Juata Permai	Busra	A/23			7 Juni 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
24	Rusus Juata Permai	Supardi	D/85			30 Sept 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
25	Rusus Juata Permai	Miftah Mahendra	A/24			4 Sept 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
26	Rusus Juata Permai	Arief Rachman	E/11			2 Oktober 2024	1.500.000,00			1.500.000,00
Jumlah Jaminan Rusus Juata Permai					**-**		**39.000.000,00**		**4.500.000,00**	**34.500.000,00**
Total					**316.875.000,00**		**123.150.000,00**		**55.875.000,00**	**384.150.000,00**

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Mulawarman No.98, Tarakan, Kalimantan Utara
Telp. (0551) 33939 , Fax. (0551) 30538
www.kaltara.bpk.go.id

Buku II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024
DI TARAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DI TARAKAN

Nomor : 71.B/LHP/XIX.TJS/V/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

Buku II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024
DI TARAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DI TARAKAN

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **vi**

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN **1**

BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN **3**

A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN **3**

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan tentang Koreksi Kesalahan Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan 3
2. Kesalahan Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 5

B. PENDAPATAN **7**

1. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tidak Tertib dan Terdapat Penggunaan Langsung Pendapatan Retribusi 7
2. Pengelolaan Retribusi Los dan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tidak Tertib 12
3. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak sesuai Perjanjian Kerja Sama dan Ketentuan yang Berlaku 21
4. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Oleh Bidang Pendapatan BPKPAD Belum Memadai 26

C. BELANJA **29**

1. Kelebihan pembayaran senilai Rp88.715.922,29 dan Potensi Kelebihan Pembayaran senilai Rp19.425.001,23 atas Honorarium Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan 29
2. Kekurangan Volume Tiga Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp34.888.382,62 31

3. Kelebihan Pembayaran atas Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sembilan SKPD senilai Rp455.082.256,00 33
4. Pemberian Bantuan Biaya Transportasi Berobat pada Dinas Kesehatan Belum Sepenuhnya Diberikan kepada Penerima yang Memenuhi Kriteria Penerima Bantuan Sosial 36
5. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Modal pada Tiga SKPD senilai Rp2.814.600.365,81 dan Kelebihan Pembayaran atas Penambahan Volume Pekerjaan Menggunakan Harga Satuan Timpang pada Empat Paket Pekerjaan senilai Rp106.524.328,11 38
6. Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Ketentuan 43

D. ASET 51

1. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah Belum Optimal 51
2. Penatausahaan dan Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kota Tarakan Tidak Tertib 55
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan Belum Memadai 63
4. Pengelolaan Aset Tak Berwujud Tidak Tertib 72
5. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Lain-lain Belum Dilaksanakan Secara Memadai 76

BAB II IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA 82

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

RENCANA AKSI

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Hal-hal yang Belum Sesuai dan/atau Belum Diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan tentang Koreksi Kesalahan 3

Tabel I.2 Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD 6

Tabel I.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Penyewaan Tanah TA 2024 7

Tabel I.4 Perhitungan Kekurangan Setor Retribusi oleh Petugas Pemungut ke Bendahara Penerimaan DPUPR.....10

Tabel I.5 Rincian Belanja atas Selisih Pemungutan Retribusi pada UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi 10

Tabel I.6 Rincian Tarif Retribusi Los dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Nomor 3 Tahun 2023.....13

Tabel I.7 Rincian Perhitungan Potensi Retribusi Los.....14

Tabel I.8 Perbandingan Potensi dengan Realisasi Pendapatan Retribusi Los.....14

Tabel I.9 Penerimaan Retribusi yang Tidak Disetorkan kepada Bendahara Penerimaan 16

Tabel I.10 Pungutan Retribusi Tidak Disetorkan Kepada Petugas Pemungut 16

Tabel I.11 Penerimaan Retribusi Los yang Dibagikan 17

Tabel I.12 Rincian Kekurangan Setor Retribusi oleh Bendahara Penerimaan 17

Tabel I.13 Wajib Pajak yang Tidak Melaporkan SPTPD dan Membayar PBJT Makanan dan/atau Minuman secara Rutin Tahun 2024.....27

Tabel I.14 Kekurangan Volume atas Tiga Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan 32

Tabel I.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 36

Tabel I.16 Penerima Bantuan Biaya Transportasi Berobat Tidak Sesuai Kriteria.....37

Tabel I.17 Kekurangan Volume Pekerjaan dan Kelebihan Pembayaran atas Harga Timpang.....39

Tabel I.18 Kekurangan Volume atas Lima Paket Pekerjaan Dinas Budporapar 39

Tabel I.19 Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan Disdik 40

Tabel I.20 Kekurangan Volume atas 17 Paket Pekerjaan DPUPR.....40

Tabel I.21 Kelebihan Pembayaran atas Penambahan Volume Menggunakan Harga Timpang.....41

Tabel I.22 Kekurangan Volume Pembangunan SMPN 11 Tahap III.....45

Tabel I.23 Perubahan Lokasi DPTD dari Badan Jalan 46

Tabel I.24 Rincian Piutang Pajak dan Piutang Retribusi Tahun 2024 51

Tabel I.25 Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah yang Tidak Memiliki Data Lengkap ..53

Tabel I.26 Rincian Piutang Retribusi Daerah Tidak Didukung Data/Data Lengkap.....54
Tabel I.27 Rincian Saldo Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2024 55
Tabel I.28 Hal-Hal yang Belum Sesuai dan/atau Diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan tentang Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir.....57
Tabel I.29 Hasil Pendataan Ulang Atas Debitur DBEK yang Menunggak Per 31 Desember 2024 58
Tabel I.30 Debitur yang Penyalurannya Tidak dilengkapi dengan Jaminan 59
Tabel I.31 Debitur yang Masih Menunggak Tetapi Dokumen Jaminan Tidak Ditemukan 59
Tabel I.32 Rincian data Debitur yang Menunggak Per 31 Desember 2024 59
Tabel I.33 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 63
Tabel I.34 Daftar Aset Tetap Tanah Dengan Perbedaan Pencatatan Luas Antara e-BMD dan Sertifikat.....64
Tabel I.35 Daftar Aset Tetap Tanah dengan Nomor Sertifikat Belum Tercatat pada e-BMD.....65
Tabel I.36 Daftar BMD Rusak Berat.....68
Tabel I.37 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024.....72
Tabel I.38 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024.....76
Tabel I.39 Rincian Aset Lain-lain berupa Gedung dan Bangunan serta JIJ yang akan diserahkan TA 2024 78
Tabel II.1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2024 82

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1 Lokasi pekerjaan siring dan timbunan tanah luar bangunan.....45

Gambar I.2 Lokasi DPT dari Badan Jalan Utama 47

Gambar I.3 Indikasi Penurunan Tanah Timbunan 47

Gambar I.4 Konstruksi DPT mengalami keretakan 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal dan Internal Pemerintah atas Perolehan Barang Milik Daerah (Aset Tetap) Tahun 2023 dan 2024
Lampiran 2	Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum antara Pemerintah Kota Tarakan dan Perumda Aneka Usaha
Lampiran 3	WP yang Tidak Pernah Menyampaikan SPTPD kepada Bidang Pendapatan BPKPAD untuk ditetapkan SKP-Daerah nya Selama Periode tahun 2024
Lampiran 4	Pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman (Pajak Restoran) atas WP Selama Periode Tahun 2024
Lampiran 5	Rekalkulasi Honor Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLU RSUKT
Lampiran 6	Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Pemeliharaan TA 2024
Lampiran 7	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas atas Bukti Tiket Pesawat yang Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya
Lampiran 8	Kelebihan Pembayaran atas Bukti Penginapan yang Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya TA 2024
Lampiran 9	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas atas Beberapa Pelaksanaan Penugasan di Hari yang Sama Pada Dinas Perikanan
Lampiran 10	Perhitungan Kekurangan Volume atas Lima Paket Pekerjaan pada Disbudporapar
Lampiran 11	Perhitungan Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan
Lampiran 12	Perhitungan Kekurangan Volume atas 17 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran 13	Perhitungan Harga Satuan Timpang atas Empat Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran 14	Rincian Item Pekerjaan Siring dan Timbunan Tanah Luar Bangunan (Dikerjakan Mendahului Kontrak)
Lampiran 15	Rincian Debitur Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan yang Ditemukan
Lampiran 16	Rincian Debitur Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan yang Meninggal Dunia
Lampiran 17	Rincian Debitur Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan yang Pindah Domisili
Lampiran 18	Rincian Debitur Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan yang Tidak Dapat Ditemukan
Lampiran 19	Rincian Debitur Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan yang Penagihannya Diserahkan ke KPKNL
Lampiran 20	Rincian Tunggakan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan di Bawah Rp8.000.000,00
Lampiran 21	Rincian Tunggakan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan di Atas Rp8.000.000,00

Lampiran 22	Daftar BMD Tanah dengan Nomor Sertifikat Belum Tercatat pada e-BMD
Lampiran 23	Daftar BMD Peralatan dan Mesin yang Belum Dicatat pada e-BMD
Lampiran 24	Daftar BMD Mesin Rusak Berat
Lampiran 25	Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD Per 31 Desember 2024
Lampiran 26	Rincian Aset Tidak Berwujud yang Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran 27	Rincian Aset Tidak Berwujud yang Tidak Digunakan Operasional
Lampiran 28	Rincian Aset Tidak Berwujud yang Tidak Memenuhi Klasifikasi Aset Tidak Berwujud
Lampiran 29	Aset Lain-lain Berupa Tanah Jalan pada DPRKPP Belum Diserahterimakan ke Pemerintah Pusat
Lampiran 30	Rincian Aset Lain-lain Berupa Gedung dan Bangunan yang Telah Dilengkapi dengan BAST Per 31 Desember 2024
Lampiran 31	Rincian Aset Lain-lain Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Telah Dilengkapi dengan BAST Per 31 Desember 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 71.A/LHP/XIX.TJS/V/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pekerjaan atas belanja modal pada tiga SKPD dan kelebihan pembayaran atas penambahan volume pekerjaan menggunakan harga satuan timpang pada empat paket pekerjaan mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2.814.600.365,81 dan senilai Rp106.524.328,11;
2. Pelaksanaan dua paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1.088.742.701,69;
3. Pengelolaan piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah belum optimal mengakibatkan saldo piutang pajak daerah senilai Rp3.197.111.587,36 dan piutang retribusi daerah senilai Rp853.418.443,00 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya;
4. Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Tarakan belum memadai mengakibatkan aset tanah senilai Rp5.000.800.00,00 tidak dapat dipastikan

keberadaannya dan satu bidang tanah senilai Rp1.887.600.000,00 dikuasai oleh pihak lain berpotensi menyulitkan dalam melakukan penelusuran keberadaan dan pengamanan aset, serta aset tetap dalam kondisi rusak berat senilai Rp6.620.628.700,00 tidak menggambarkan kondisi riil;

5. Pengelolaan dan penatausahaan aset lain-lain belum dilaksanakan secara memadai mengakibatkan penyajian aset lain-lain berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp130.185.280.750,35 tidak menggambarkan nilai dan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Disbudporapar, Disdik dan DPUPR untuk menginstruksikan PPK supaya melaksanakan tupoksinya mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melakukan reviu atas dokumen MC dan *backup* data yang disusun oleh Penyedia;
2. Kepala DPUPR untuk menunjuk penilai ahli supaya menetapkan kelayakan konstruksi bangunan sesuai fungsi dan peruntukan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Mamburungan - Karungan;
3. Kepala BPKPAD untuk menginstruksikan Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan supaya meningkatkan pengelolaan atas piutang pajak dan retribusi daerah yang berada dalam pengelolaannya;
4. Kepala SKPD terkait selaku pengguna barang untuk melakukan inventarisasi, pencatatan, pengamanan, pemeliharaan, pemantauan atas pemanfaatan dan penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya, serta mengusulkan penghapusan aset dalam kondisi rusak berat kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKPAD selaku pengurus barang Pengelola untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh atas aset lain-lain yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2024 khususnya satu bidang tanah jalan pada DPUPR senilai Rp119.364.222.966,00 yang belum dapat diidentifikasi dan menindaklanjuti hasil inventarisasi sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Tarakan, 26 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
P. Penanggung Jawab Pemeriksaan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ★ PROVINSI KALIMANTAN UTARA ★ KEPALA PERWAKILAN

Dwi Sabardiana S.E., M.A., CFrA, CA, ERMCP

BAB I

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 17 temuan pemeriksaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan tentang Koreksi Kesalahan Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Daerah perlu menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.

Pemerintah Kota Tarakan menetapkan kebijakan akuntansi berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Tarakan. Hasil reviu atas kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tarakan tentang Koreksi Kesalahan (Bab XVII) diketahui terdapat pengaturan tentang perlakuan atas kesalahan pencatatan aset selain kas yang belum sesuai dan/atau belum diatur dibandingkan dengan SAP Pernyataan Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan (SAP Pernyataan Nomor 10). Matriks perbandingan Kebijakan Akuntansi tentang Koreksi Kesalahan dan SAP Pernyataan Nomor 10 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel I. 1 Hal-hal yang Belum Sesuai dan/atau Belum Diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan tentang Koreksi Kesalahan

No.	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan (Perwali No. 35/2022)	SAP Pernyataan No. 10 (PMK No. 221/PMK.05/2020)	Keterangan
1	Jenis kesalahan berdasarkan sifat kejadian		
	Jenis kesalahan berdasarkan sifat kejadian • Kesalahan tidak berulang • Kesalahan berulang (Bab XVII, huruf C)	• Menghilangkan pengaturan jenis kesalahan tidak berulang dan berulang • Koreksi kesalahan terdiri atas: kesalahan pencatatan aset, kewajiban, pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja dan Beban (DK 8)	Belum sesuai
2	Kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas Contoh: kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit		
	Tidak diatur	• Koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan akun lain yang terkait (par 29, 30)	Belum diatur

Hasil reviu atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 dan 2024 diketahui terdapat hasil pemeriksaan berupa kemahalan harga dan/atau kekurangan volume pada 28 paket pekerjaan senilai Rp997.509.671,03, dimana atas hasil pemeriksaan tersebut tidak dilakukan koreksi nilai perolehan aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 10 (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**).

Berdasarkan keterangan dari Kepala Subbidang Pelaporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) diketahui bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kota Tarakan belum melakukan koreksi atas nilai harga perolehan aset berdasarkan hasil pemeriksaan auditor, baik auditor eksternal maupun internal. Hal tersebut disebabkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tarakan belum memuat aturan terkait perlakuan akuntansi koreksi atas kesalahan pencatatan Aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan auditor eksternal maupun internal pemerintah. Tahun 2022 Pemerintah Kota Tarakan telah berupaya melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi atas SAP No. 10. Pada kebijakan akuntansi tersebut telah ditambahkan contoh dan pembetulan koreksi kesalahan terhadap akun Kas dan selain Kas. Namun untuk akun aset tetap tidak diatur lebih spesifik. Kendala dalam penyusunan kebijakan akuntansi adalah perubahan terhadap kebijakan akuntansi memerlukan koordinasi dan konsultasi yang intensif serta melibatkan banyak pihak dan bidang terutama terkait kesiapan dalam penerapannya.

Atas kebijakan akuntansi yang belum sesuai Pemerintah Kota Tarakan telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, berkoordinasi dengan Bidang Aset BPKPAD serta Inspektorat terkait masukan perubahan agar sesuai SAP Nomor 10 dan data koreksi kekurangan volume paket pekerjaan yang akan serta dipelajari lebih lanjut untuk perbaikan kebijakan dan penerapan penyajian koreksi kesalahannya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (revisi 2020), Lampiran PMK Nomor 221/PMK.05/2020 pada:

a. Paragraf 29 yang menyatakan bahwa kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait;

b. Paragraf 30 yang menyatakan bahwa contoh kesalahan perolehan aset selain kas antara lain kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas;

c. Dasar Kesimpulan (DK) 8 yang antara lain menyatakan bahwa pengaturan tentang jenis kesalahan yang terbagi menjadi kesalahan berulang, tidak berulang serta sistemik, tidak sistemik dihilangkan sehingga pengaturan tentang koreksi kesalahan juga tidak dilakukan atas kesalahan berulang, tidak berulang, sistemis, dan tidak sistemis, namun koreksi kesalahan dilakukan atas kesalahan pencatatan aset, kewajiban, pendapatan LRA, pendapatan-LO, belanja dan beban; dan

d. Contoh Ilustrasi, Nomor CI 3 dan CI 4, yang antara lain menjelaskan bahwa jurnal atas adanya kesalahan pencatatan aset berupa kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu: Ekuitas (debit) dan Aset Tetap (kredit).

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Penyajian saldo Aset Tetap lebih dalam menggambarkan kondisi sebenarnya; dan

b. Penyajian saldo Akumulasi dan Beban Penyusutan kurang dalam menggambarkan kondisi sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan Kepala Bidang Akuntansi BPKPAD menyusun kebijakan akuntansi terkait koreksi kesalahan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP Nomor 10.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Kepala BPKPAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Akuntansi supaya menyesuaikan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tarakan terkait koreksi kesalahan mengacu pada PSAP Nomor 10.

2. Kesalahan Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran (TA) 2024 menyajikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah masing-masing senilai Rp16.050.205.889,70 dan Rp74.968.422.059,01 atau sebesar 98,90% dan 98,88% dari anggaran masing-masing senilai Rp16.228.846.172,00 dan Rp75.814.678.527,00. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan kesehatan termasuk diantaranya pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pada TA 2024, terdapat delapan BLUD pada Pemerintah Kota Tarakan yaitu: Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tarakan, Puskesmas Gunung Lingkas, Puskesmas Karang Rejo, Puskesmas Mamburungan, Puskesmas Sebengkok, Puskesmas Juata, Puskesmas Pantai Amal, Laboratorium Kesehatan Daerah. Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang merupakan dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

RBA merupakan kesatuan dari RKA dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan realisasi anggaran, BLUD menyusun laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara berkala dan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD. Selanjutnya, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Hasil pemeriksaan atas dokumen anggaran dan realisasi belanja menunjukkan bahwa seluruh anggaran dan realisasi pendapatan BLUD TA 2024 disajikan sebagai Lain-lain

PAD yang Sah. Laporan realisasi pendapatan BLUD TA 2024 menunjukkan bahwa terdapat realisasi atas Retribusi Pelayanan Kesehatan senilai Rp3.488.739.826,53 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel I. 2 Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD

No.	Nama BLUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Rp)
1	Puskesmas Karang Rejo	410.611.479,00
2	Puskesmas Gunung Lingkas	136.224.600,00
3	Puskesmas Mamburungan	147.092.113,00
4	Puskesmas Juata	108.817.550,00
5	Puskesmas Sebengkok	187.381.204,00
6	Puskesmas Pantai Amal	73.241.800,00
7	Labkesda	251.383.000,00
8	RSU Kota Tarakan	2.173.988.080,53
	Total	**3.488.739.826,53**

Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Anggaran dan Penyusunan APBD BPKPAD selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan bahwa pada saat melakukan telaah atas RKA BLUD, TAPD memastikan nilai yang diinput pada RKA telah sesuai dengan nilai yang disusun pada RBA. Kepala Subbidang Anggaran dan Penyusunan APBD menyatakan bahwa dia tidak meneliti pedoman penyusunan APBD TA 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 sehingga tidak sepenuhnya mengevaluasi kesesuaian usulan RKA SKPD dengan Permendagri.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Penjelasan Bagian Umum Paragraf 6 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah;

b. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan; dan

c. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Huruf C angka 2 (n) yang menyatakan penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas

pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah yang bersumber dari pendapatan BLUD tidak menggambarkan substansi yang sebenarnya senilai Rp3.488.739.826,53.

Hal tersebut disebabkan TAPD tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan evaluasi atas RKA dan RKA Perubahan BLUD TA 2024 secara khusus terkait anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memedomani pedoman penyusunan APBD dan kebijakan terkait lainnya dalam mengevaluasi RKA dan RKA Perubahan BLUD.

B. PENDAPATAN

1. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tidak Tertib dan Terdapat Penggunaan Langsung Pendapatan Retribusi

LRA Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 menyajikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp16.050.205.889,70 atau 98,90% dari anggaran senilai Rp16.228.846.172,00. Realisasi Pendapatan Retribusi mengalami kenaikan senilai Rp3.190.380.591,70 atau 24,81% dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023 senilai Rp12.859.825.298,00. Realisasi pendapatan retribusi tersebut diantaranya merupakan pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan senilai Rp5.446.611.947,70 atau 115,06% dari anggaran senilai Rp4.733.643.950,00. Rincian pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan TA 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel I. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan TA 2024

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BPKPAD	2.124.792.750,00	2.242.947.640,70	105,56
2	Disbudporapar	634.400.000,00	644.485.007,00	101,59
3	DKPP	21.328.000,00	10.192.000,00	47,79
4	DKUKMP	0,00	5.500.000,00	0,00
5	DPUPR	300.000.000,00	595.422.000,00	198,47
6	Dinas Pendidikan	302.563.200,00	261.831.300,00	86,54
7	Dinas Perikanan	10.000.000,00	17.085.000,00	170,85
8	DPRKPP	1.074.600.000,00	1.400.010.000,00	130,28
9	Kec. Tarakan Tengah	255.960.000,00	262.389.000,00	102,51
10	Kec. Tarakan Utara	10.000.000,00	6.750.000,00	67,50
Jumlah		**4.733.643.950,00**	**5.446.611.947,70**	**115,06**

Dari anggaran pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan senilai Rp4.733.643.950,00 diantaranya merupakan anggaran pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) senilai

Rp300.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp595.422.000,00 atau 198,47% dari anggaran. Retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada DPUPR merupakan pendapatan yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Bahan Konstruksi berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium Pekerjaan Umum (Retribusi Pemakaian Laboratorium) yaitu pendapatan dari penyediaan jasa pengujian mutu bahan konstruksi tanah, agregat, beton dan aspal. Hal tersebut menunjukkan terdapat kesalahan dalam penganggaran pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan yang seharusnya dianggarkan sebagai pendapatan retribusi pemakaian laboratorium.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan retribusi pemakaian laboratorium pada UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi ditemukan kelemahan, dengan uraian sebagai berikut.

a. Petugas Pemungut Retribusi ditunjuk secara lisan oleh Kepala UPT

Pemungutan retribusi pemakaian laboratorium Tahun 2024 pada UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha (TU). Penunjukan Kepala Subbagian TU sebagai petugas pemungut dilakukan berdasarkan penunjukan secara lisan oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi. Wali Kota Tarakan selalu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tidak menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada DPUPR secara khusus pada UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi.

DPUPR memiliki Bendahara Penerimaan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-III/208/2024 tanggal 1 Maret 2024. Berdasarkan keterangan dari Bendahara Penerimaan diketahui dalam pelaksanaan penerimaan retribusi pemakaian laboratorium, Bendahara Penerimaan menerima laporan pendapatan retribusi dari petugas pemungut setiap bulan dan setoran retribusi dilakukan secara tunai. Selanjutnya, atas penerimaan setoran dari petugas pemungut, Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan menyetorkan ke Kas Daerah dilanjutkan dengan melakukan penginputan data penerimaan retribusi pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

b. Pemerintah Kota Tarakan belum menetapkan peraturan pelaksana pengelolaan retribusi daerah

Dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terkait pemungutan retribusi pemakaian laboratorium, Perda Nomor 3 Tahun 2023 antara lain mengatur tentang jenis dan tarif pengujian yang diselenggarakan oleh Pemda dan objek retribusi pemakaian laboratorium yang antara lain meliputi pengujian mutu bahan konstruksi tanah, agregat, beton, aspal dan pembuatan mix desain.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 13 Mei 2025 diketahui bahwa Pemerintah Kota Tarakan belum menetapkan peraturan pelaksana atas Perda Nomor 3 Tahun 2023, yang antara lain mengatur tentang tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan retribusi.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD diketahui bahwa Bidang Pendapatan sedang menyusun konsep peraturan kepala daerah tentang peraturan pelaksanaan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023.

c. Pemungutan retribusi tidak disertai dengan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa dalam pemungutan retribusi pemakaian laboratorium, petugas pemungut tidak menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dokumen penetapan nilai retribusi yang dipungut kepada pengguna layanan atau Wajib Retribusi (WR). Petugas pemungut menggunakan kuitansi yang ditulis tangan sebagai dasar pemungutan retribusi, yang mana kuitansi tersebut tidak bernomor urut cetak dan tanpa perforasi oleh Bidang Pendapatan BPKPAD.

Lebih lanjut diketahui bahwa pembayaran retribusi oleh WR atas tagihan yang disampaikan petugas pemungut tidak dilakukan di hari yang sama dengan penyampaian tagihan kepada WR, namun pembayaran dilakukan beberapa hari kemudian. Petugas pemungut menerima pembayaran dari WR melalui dua cara yaitu secara tunai dan non tunai (transfer). Pembayaran melalui transfer dilakukan menggunakan rekening pribadi petugas pemungut yaitu rekening BNI Nomor 020**18** dan rekening salah seorang pegawai yaitu rekening Bank Mandiri, Nomor 1480***762***.

Atas penerimaan retribusi dari WR, baik secara tunai maupun non tunai, petugas pemungut tidak langsung menyetorkan pendapatan yang diterima kepada Bendahara Penerimaan, melainkan disimpan di laci meja kerja. Setoran retribusi disampaikan kepada Bendahara Penerimaan secara gabungan dalam satu waktu tertentu.

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi diketahui bahwa Kepala UPT belum dapat melakukan pengawasan atas pemungutan dan penyetoran retribusi oleh petugas pemungut karena belum memahami tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi yang seharusnya.

d. Petugas pemungut mengenakan tarif retribusi pemakaian laboratorium pengujian *density* aspal lebih besar dari tarif berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2023

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa tarif retribusi jasa laboratorium - pengujian *density* aspal adalah sebesar Rp55.000,00 per contoh (sampel) pengujian. Sesuai kuitansi pembayaran retribusi dari WR diketahui tarif yang dikenakan oleh petugas pemungut kepada WR adalah sebesar Rp125.000,00/sampel. Tarif retribusi tersebut lebih besar senilai Rp70.000,00/sampel dari tarif yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2024.

Berdasarkan keterangan dari petugas pemungut diketahui bahwa pengenaan tarif retribusi jasa laboratorium pengujian d*ensity* aspal senilai Rp125.000,00/sampel telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir dan WR telah mengetahui dan menerima besaran tarif tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengenaan tarif tersebut diketahui dan disetujui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi.

e. Penggunaan Langsung Retribusi Pemakaian Laboratorium senilai Rp16.505.000,00

Hasil pemeriksaan atas laporan realisasi pendapatan retribusi pemakaian laboratorium TA 2024 yang disusun oleh bendahara penerimaan DPUPR dan konfirmasi kepada WR diketahui terdapat kekurangan setor retribusi oleh petugas pemungut ke

bendahara penerimaan senilai Rp16.505.000,00. Kekurangan setor retribusi tersebut terjadi karena pada periode Januari s.d. Juni 2024, petugas pemungut mengenakan tarif senilai Rp125.000,00/sampel kepada WR dan menyetorkan senilai yang sama kepada bendahara penerimaan. Namun, pada periode Juli s.d. Desember 2024 petugas pemungut hanya menyetorkan senilai Rp55.000,00/sampel atau kurang setor senilai Rp70.000,00/sampel.

Perhitungan kekurangan setor retribusi pemakaian laboratorium pengujian *density* aspal oleh petugas pemungut kepada bendahara penerimaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel I. 4 Perhitungan Kekurangan Setor Retribusi oleh Petugas Pemungut ke Bendahara Penerimaan DPUPR

No.	Bulan	Jumlah Sampel (Buah)		Jumlah Retribusi (Rp)		Kekurangan Setor (Rp)
		Dipungut	Disetor	Dipungut	Disetor	
1	Januari	63	63	7.875.000,00	7.875.000,00	-
2	Februari	54	54	6.750.000,00	6.750.000,00	-
3	Maret	13	13	1.625.000,00	1.625.000,00	-
4	April	194	194	24.250.000,00	24.250.000,00	-
5	Mei	8	8	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6	Juni	32	32	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7	Juli	43	43	5.375.000,00	2.365.000,00	3.010.000,00
8	Agustus	3	3	375.000,00	165.000,00	210.000,00
9	September	25	24	3.125.000,00	1.320.000,00	1.805.000,00
10	Oktober	91	91	11.375.000,00	5.005.000,00	6.370.000,00
11	November	30	30	3.750.000,00	1.650.000,00	2.100.000,00
12	Desember	43	43	5.375.000,00	2.365.000,00	3.010.000,00
Jumlah		**599**	**598**	**74.875.000,00**	**58.370.000,00**	**16.505.000,00**

Berdasarkan permintaan keterangan dari Kepala Subbagian TU selaku petugas pemungut diketahui yang bersangkutan mengakui adanya kekurangan setor retribusi kepada bendahara penerimaan senilai Rp16.505.000,00. Petugas pemungut menyatakan mengubah dan menulis ulang kuitansi pembayaran dari WR agar sesuai dengan STS kepada bendahara penerimaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selisih senilai Rp16.505.000,00 telah digunakan untuk mendanai biaya operasional UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi yang tidak dianggarkan TA 2024 dan hal tersebut dilakukan atas persetujuan Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi.

Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi selaku atasan langsung dari petugas pemungut menjelaskan mengetahui adanya kekurangan setor retribusi oleh petugas pemungut kepada bendahara penerimaan. Selisih setoran retribusi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebutuhan operasional UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi. Rincian belanja atas penggunaan selisih setoran retribusi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel I. 5 Rincian Belanja atas Selisih Pemungutan Retribusi pada UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi

No.	Nama Barang	Jumlah Barang (Unit)	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Printer Epson L3210	1	unit	2.700.000,00	2.700.000,00
2	PC Komputer Proc 2nd Core I 7	1	unit	6.500.000,00	6.500.000,00
3	*Stabilizer* 10atsunaga 1000 watt	2	unit	950.000,00	1.900.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah Barang (Unit)	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
4	*Service* dan Kalibrasi *Injection Pump* Mobil Ford Ranger	1	unit	5.405.000,00	5.405.000,00
Jumlah				**-**	**16.505.000,00**

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

1) Pasal 137 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari;

2) Pasal 137 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran;

3) Pasal 138 ayat (3) yang menyatakan bahwa bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:

a) Lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2); dan/atau

b) Atas nama pribadi.

b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran pada:

1) Bab I, Huruf E, angka 1 yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku KPA mempunyai tugas antara lain melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

2) Bab V, pada:

a) Huruf A yang antara lain menyatakan bahwa penerimaan perangkat daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Huruf G, angka 2, huruf c yang antara lain menyatakan bahwa tahap penyetoran pendapatan dalam hal: 1) pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah; 2) dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari; dan

c) Huruf J, angka 1 yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

c. Perda Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi pada Lampiran yang antara lain menyatakan tarif retribusi jasa usaha - pengujian *density* aspal sebesar Rp55.000,00/contoh.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Pendapatan retribusi pemakaian laboratorium dan realisasi belanja untuk operasional UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi senilai Rp16.505.000,00 tidak tersaji dalam LK Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024 dan berisiko disalahgunakan; dan

b. Masyarakat selaku pengguna layanan UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi dibebani tarif retribusi pengujian *density* aspal lebih tinggi dari yang seharusnya.

Hal tersebut disebabkan:

a. Wali Kota Tarakan belum menetapkan peraturan pelaksanaan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023;

b. Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi menetapkan petugas pemungut retribusi tanpa melalui surat penunjukan dan menyetujui penggunaan langsung retribusi untuk biaya operasional; dan

c. Petugas pemungut tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan retribusi pemakaian laboratorium.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar:

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023;

b. Memerintahkan Kepala DPUPR untuk:

1) Menetapkan petugas pemungut retribusi pada UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi melalui Surat Keputusan (SK);

2) Menginstruksikan Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi supaya mengusulkan anggaran biaya operasional UPT sesuai kebutuhan riil dalam penyusunan RKA SKPD dan memedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan retribusi; dan

3) Menginstruksikan Kepala Subbagian TU selaku petugas pemungut memedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan retribusi pemakaian laboratorium.

2. Pengelolaan Retribusi Los dan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tidak Tertib

LRA Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 menyajikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp16.050.205.889,70 atau 98,90% dari anggaran senilai Rp16.228.846.172,00. Realisasi Pendapatan Retribusi mengalami kenaikan senilai Rp3.190.380.591,70 atau sebesar 24,81% dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah

tahun 2023 senilai Rp12.859.825.298,00. Realisasi pendapatan retribusi tersebut diantaranya merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Los dan Retribusi Tempat Khusus Parkir masing-masing senilai Rp214.098.000,00 dan Rp735.219.000,00.

Pengelolaan Retribusi Los dan Retribusi Tempat Khusus Parkir mengacu pada Perda Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut.

a. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu;

b. Pemungutan Retribusi Los dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilakukan oleh petugas pemungut dengan menggunakan Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas. Petugas pemungut menggunakan karcis sebagai dasar pemungutan retribusi kepada WR serta setiap petugas pemungut bertanggung jawab atas pungutan retribusi pada masing-masing pasar sesuai dengan pembagian tugas; dan

c. Hasil pemungutan Retribusi Los dan Retribusi Tempat Khusus Parkir harus disetorkan kepada bendahara penerimaan selambat-lambatnya 1 x 24 jam secara tunai.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Retribusi Los dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2024 oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) menunjukkan beberapa permasalahan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. DKUKMP kehilangan potensi Pendapatan Retribusi Los TA 2024 senilai Rp886.605.000,00

Tarif Retribusi Los dan Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pengenaan tarif kepada WR berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan. Rincian tarif dan masa Retribusi Los yang dikenakan kepada WR, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel I. 6 Rincian Tarif Retribusi Los dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2023

No.	Kelompok Retribusi	Jenis	Satuan	Masa Retribusi	Tarif per meter (Rp)
1	Retribusi los	Kios Permanen	m²	Bulanan	30.000,00
		Kios Semi Permanen	m²	Bulanan	27.000,00
		Los Permanen	m²	Bulanan	27.000,00
		Los Semi Permanen	m²	Bulanan	24.000,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Truck,Bus dan sejenisnya	unit	sekali parkir	5.000,00
		Sedan,jeep dan sejenisnya	unit	sekali parkir	4.000,00
		Truck Gandeng	unit	sekali parkir	5.000,00
		Sepeda Motor dan sejenisnya	unit	sekali parkir	2.000,00
		Kendaraan tidak bermotor	unit	sekali parkir	1.000,00

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DKUKMP diatur bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengendalian, pengamanan, pengaturan

pedagang, ketertiban, kebersihan pasar, dan pemungutan retribusi pasar menjadi tugas Bidang Pengembangan Ekspor. Hasil pemeriksaan atas dokumen anggaran dan wawancara dengan Plt. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor diketahui Plt. Kepala Bidang belum menyusun dan menetapkan potensi pendapatan retribusi Tahun 2024 berdasarkan jumlah pedagang aktif di masing-masing pasar sebagai dasar penetapan target bagi petugas pemungut di Tahun 2024.

Hasil analisis atas dokumen Nama Pedagang dari Bidang Pengembangan Ekspor DKUKMP dan Perda terkait tarif retribusi kemudian dibandingkan dengan realisasi pendapatan Retribusi Los menunjukkan potensi penerimaan lebih besar dari realisasi pendapatan retribusi, dengan rincian disajikan pada **Tabel I.7** dan **Tabel I.8** berikut.

Tabel I. 7 Rincian Perhitungan Potensi Retribusi Los
(Sesuai Data Kios yang Disewakan)

No.	Nama Pasar	Jumlah Kios Tersewa	Tarif/ bulan (Rp)	Potensi Penerimaan Setahun (Rp)
1	Pasar Sebengkok	23	180.000,00	49.680.000,00
2	Pasar THM	165	108.000,00	213.840.000,00
3	Pasar Gusher	100	81.000,00	97.200.000,00
4	Pasar Tenguyun	107	180.000,00	231.120.000,00
		374	81.000,00	363.528.000,00
		48	108.000,00	62.208.000,00
		12	72.000,00	10.368.000,00
		9	135.000,00	14.580.000,00
		7	150.000,00	12.600.000,00
Jumlah Potensi Retribusi Los				**1.055.124.000,00**

Tabel I. 8 Perbandingan Potensi dengan Realisasi Pendapatan Retribusi Los TA 2024

No.	Nama Pasar	Pendapatan Retribusi Los (Rp)		Selisih (Rp)
		Potensi (Jumlah Los Tersewa)	Realisasi (STS)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)=(3)-(4)*
1	Pasar Sebengkok	49.680.000,00	10.260.000,00	39.420.000,00
2	Pasar THM	213.840.000,00	44.604.000,00	169.236.000,00
3	Pasar Gusher	97.200.000,00	15.309.000,00	81.891.000,00
4	Pasar Tenguyun	694.404.000,00	98.346.000,00	596.058.000,00
Jumlah		**1.055.124.000,00**	**168.519.000,00**	**886.605.000,00**

Tabel I.7 dan Tabel I.8 di atas menunjukkan terdapat selisih lebih antara potensi pendapatan retribusi (jumlah los tersewa) dengan Pendapatan Retribusi Los atau terdapat kehilangan potensi Pendapatan Retribusi Los TA 2024 senilai Rp886.605.000,00 (Rp1.055.124.000,00 - Rp168.519.000,00).

Berdasarkan permintaan keterangan dari petugas pemungut diketahui bahwa WR tidak melakukan pembayaran Retribusi Los secara rutin dengan alasan menurunnya jumlah pendapatan akibat kondisi pasar yang sepi pengunjung dan penyewa tidak dapat dihubungi atau ditemui. Selanjutnya hasil inspeksi yang dilakukan tim pemeriksa pada empat pasar tersebut diperoleh informasi dari pedagang bahwa petugas pemungut jarang melakukan pemungutan atau melakukan pemungutan pada waktu yang tidak

tepat, yaitu ketika pedagang sudah pulang dari pasar sehingga pedagang tidak dapat menyetorkan retribusi di bulan berjalan.

Selain itu diperoleh informasi dari pedagang Pasar Tenguyun bahwa terdapat transaksi jual beli atas hak sewa los dan kios yang tanpa melalui DKUKMP, diantaranya:

1) Los Pasar Tenguyun disewakan oleh penyewa sebelumnya kepada penyewa baru dengan harga sewa antara Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 per tahun tergantung dengan posisi strategisnya;

2) Kios Pasar Tenguyun disewakan oleh penyewa sebelumnya kepada penyewa baru dengan harga sewa antara Rp150.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00; dan

3) Kios Pasar THM disewakan oleh penyewa sebelumnya kepada penyewa baru dengan harga sewa antara Rp17.000.000,00 per tahun.

Berdasarkan penelusuran diketahui bahwa penyewaan los dan kios tidak seluruhnya memiliki perjanjian sewa menyewa. Bidang Pengembangan Ekspor hanya dapat menunjukkan 12 perjanjian sewa atas kios pada Pasar Tenguyun untuk masa sewa Tahun 2024.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada Plt. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan mengakui belum melakukan pembaharuan data pedagang yang menyewa los dan kios.

b. Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Los Belum Disetor Ke Kas Daerah Senilai Rp152.714.000,00

Dalam rangka pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Los, DKUKMP menunjuk petugas pemungut sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas DKUKMP Nomor 090.1/08/DKUKMP tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Pemungut. Di dalamnya mengatur tentang petugas pemungut Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir di Kawasan THM dan Pasar Tenguyun dan Retribusi Los pada Pasar Tenguyun, Pasar THM, Pasar Sebengkok dan Pasar Gusher.

Mekanisme pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dilakukan petugas pemungut yaitu mengambil setoran dari juru parkir setiap hari kerja, sedangkan pada hari libur setoran baru akan diambil di hari kerja berikutnya. Sedangkan, petugas pemungut Retribusi Los melakukan pemungutan retribusi sebanyak satu kali dalam satu bulan atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan komitmen dari WR.

Hasil konfirmasi kepada beberapa pedagang penyewa kios/los/meja secara uji petik pada Pasar Tenguyun, Pasar THM, Pasar Sebengkok dan Pasar Gusher bersama Inspektorat dan DKUKMP, diketahui bahwa petugas pemungut menerima pembayaran retribusi dari pedagang tanpa memberikan potongan karcis kepada pedagang sebagai bukti telah dibayarkannya retribusi yang ditagihkan.

Hasil pemeriksaan atas realisasi penyetoran Retribusi Los dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dari petugas pemungut kepada bendahara penerimaan dan setoran dari bendahara penerimaan ke kas daerah TA 2024 diketahui terdapat kekurangan setoran penerimaan retribusi senilai Rp152.714.000,00, dengan uraian sebagai berikut.

1) Sdr. HW - petugas pemungut pada Pasar THM

Hasil wawancara dengan Sdr. HW selaku petugas pemungut di Pasar THM dijelaskan bahwa saat menerima pembayaran retribusi dari pedagang, yang bersangkutan memberikan bukti tanda terima berupa karcis atau kuitansi. Atas pemungutan retribusi yang diberikan karcis seluruhnya disetorkan ke Bendahara Penerimaan. Sedangkan pemungutan retribusi yang diberikan kuitansi sebagai tanda terima pembayaran tidak disetorkan ke Bendahara Penerimaan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel I. 9 Penerimaan Retribusi yang Tidak Disetorkan kepada Bendahara Penerimaan

No.	Jenis Retribusi	Jumlah Karcis	Tarif	Jumlah (Rp)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5) =(3)x(4)*	*(6)*
1	Retribusi Los Pasar THM	89	108.000,00	9.612.000,00	Retribusi Los Tahun 2023
2	Retribusi Los Pasar THM	44	108.000,00	4.752.000,00	Retribusi Bulan Maret 2025
	Jumlah			**14.364.000,00**	

2) Sdr. SF - Pendamping petugas pemungut

Sdr. SF adalah pegawai honorer yang ditugaskan untuk mendampingi petugas pemungut untuk memungut retribusi kios/los pada Pasar THM, Pasar Sebengkok dan Pasar Gusher. Hasil wawancara kepada Sdr. SF diketahui bahwa yang bersangkutan sering dibekali karcis retribusi oleh petugas pemungut untuk melakukan penagihan retribusi kepada pedagang di pasar. Karena telah sering melakukan pemungutan retribusi sendiri, maka selain menggunakan karcis Sdr. SF juga menggunakan kuitansi untuk pedagang yang membayar retribusi.

Hasil pemungutan menggunakan karcis diserahkan Sdr. SF ke Petugas Pemungut, sedangkan yang menggunakan kuitansi digunakan untuk kepentingan pribadi minimal senilai Rp17.656.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel I. 10 Pungutan Retribusi Tidak Disetorkan kepada Petugas Pemungut

No.	Jenis Retribusi	Jumlah Karcis	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)=(3)x(4)*	*(6)*
1	Retribusi Los Pasar THM	40	108.000,00	4.320.000,00	Retribusi Los Tahun 2024
2	Retribusi Los Pasar Sebengkok	28	180.000,00	5.040.000,00	Retribusi Los Tahun 2024 dan Tahun 2025
3	Retribusi Los Pasar Gusher	12	81.000,00	972.000,00	Retribusi Los Tahun 2024
4	Retribusi Los Pasar Gusher	2	81.000,00	162.000,00	Retribusi Los Tahun 2024
5	Retribusi Los Pasar Gusher	3	81.000,00	243.000,00	Retribusi Los Tahun 2025
6	Retribusi Los Pasar Gusher	4	81.000,00	324.000,00	Retribusi Los Februari Tahun 2025
7	Retribusi Los Pasar THM	6	108.000,00	648.000,00	Retribusi Los Maret Tahun 2025
8	Retribusi Los Pasar THM	12	108.000,00	1.296.000,00	Retribusi Los Tahun 2024

No.	Jenis Retribusi	Jumlah Karcis	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
9	Retribusi Los Pasar Tenguyun	17	135.000,00	2.295.000,00	Retribusi Los Tahun 2024
10	Retribusi Los Pasar Sebengkok	36	180.000,00	6.480.000,00	Retribusi Los Tahun 2024
	Jumlah			**21.780.000,00**	

Sdr. SF menjelaskan lebih lanjut bahwa penerimaan retribusi los pasar sebengkok senilai Rp6.480.000,00 yang disajikan pada tabel di atas dibagikan kepada Bendahara Penerimaan dan Petugas Pemungut dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel I. 11 Penerimaan Retribusi Los yang Dibagikan

No.	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Sdr. SP	1.944.000,00	Retribusi Los Pasar Sebengkok Tahun 2024
2	Sdr. HW	1.100.000,00	Retribusi Los Pasar Sebengkok Tahun 2024
3	Sdr. RP	1.080.000,00	Retribusi Los Pasar Sebengkok Tahun 2024
Jumlah		**4.124.000,00**	

Dengan demikian hasil pemungutan retribusi yang digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. SF adalah senilai Rp17.656.000,00 (Rp21.780.000,00 - Rp4.124.000,00).

3) Bendahara Penerimaan tidak menyetorkan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Los Tahun 2024 senilai Rp116.570.000,00 ke Kas Daerah

Sdr. SP ditetapkan selaku bendahara penerimaan DKUKMP berdasarkan SK Wali Kota Tarakan nomor 100.3.3.3/HK-V/296/2024 tanggal 31 Mei 2024, namun telah melakukan tugas dan fungsi sebagai bendahara penerimaan sejak Januari 2024. Hasil pemeriksaan atas laporan realisasi pendapatan retribusi Tahun 2024 diketahui bahwa bendahara penerimaan telah menerima setoran Retribusi Tempat Khusus Parkir dari petugas pemungut senilai Rp396.711.000,00 dan Retribusi Los senilai Rp212.154.000,00 dengan total jumlah setoran senilai Rp608.865.000,00.

Berdasarkan perhitungan atas bukti setor (STS) bendahara penerimaan ke kas daerah Tahun 2024 diketahui jumlah setoran Retribusi Tempat Khusus Parkir senilai Rp323.776.000,00 dan Retribusi Los senilai Rp168.519.000,00 atau terdapat kekurangan setor Retribusi Tempat Khusus Parkir senilai Rp72.935.000,00 (Rp396.711.000,00 - Rp323.776.000,00) dan Retribusi Los senilai Rp43.635.000,00 (Rp212.154.000,00 - Rp168.519.000,00). Dengan demikian, jumlah kurang setor Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Los Tahun 2024 senilai Rp116.570.000,00 (Rp72.935.000,00 + Rp43.635.000,00), dengan rincian pada tabel berikut ini.

Tabel I. 12 Rincian Kekurangan Setor Retribusi oleh Bendahara Penerimaan

No.	Jenis Retribusi	Kuitansi Tanda Terima Juru Pungut	Nilai STS pada Tahun 2024	Selisih Kurang Setor (Rp)
I	**Pelayanan tempat khusus parkir**	**396.711.000,00**	**323.776.000,00**	**72.935.000,00**
a	Parkir Kawasan THM	37.000.000,00		
b	Parkir Pasar Tenguyun	359.711.000,00		

No.	Jenis Retribusi	Kuitansi Tanda Terima Juru Pungut	Nilai STS pada Tahun 2024	Selisih Kurang Setor (Rp)
II	**Los**	**212.154.000,00**	**168.519.000,00**	**43.635.000,00**
a	Los Pasar Tenguyun	135.699.000,00		
b	Los Pasar Pasar Sebengkok	13.140.000,00		
c	Los Pasar Pasar THM	44.604.000,00		
d	Los Pasar Pasar Gusher	18.711.000,00		
Jumlah retribusi daerah yang belum di setorkan ke Kas Daerah (I + II)			**116.570.000,00**	

Atas hal tersebut, Sdr. SP menjelaskan bahwa selama Tahun 2024 setoran retribusi tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah 1 x 24 jam melainkan dibawa pulang ke rumah dan salinan kuitansi tanda terima setoran dari petugas pemungut (yang tidak disetorkan ke kas daerah) disimpan secara pribadi. Sdr. SP menyatakan menggunakan uang setoran retribusi yang tidak disetor ke kas daerah untuk keperluan pribadi.

Atas kekurangan setor penerimaan retribusi senilai Rp116.570.000,00, Sdr. SP telah menyetorkan ke kas daerah senilai Rp2.880.000,00 berdasarkan STS 017/DKUKMP/2025 tanggal 4 Februari 2025. Selanjutnya, bendahara penerimaan telah menyetorkan sisa kekurangan setor retribusi ke kas daerah senilai Rp113.690.000,00 berdasarkan STS Nomor 002/Bend-17/DKUKMP/2025 tanggal 25 April 2025. Selain itu, Sdr. SP juga telah menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp1.944.000,00 sesuai STS Nomor 008/Bend-17/DKUKMP/2025 tanggal 7 Mei 2025 atas penerimaan retribusi los pasar sebengkok yang diterima dari Sdr. SF.

Dengan demikian nilai kekurangan setor penerimaan retribusi Tahun 2024 senilai Rp34.200.000,00 terdiri dari kekurangan setor Sdr. HW selaku petugas pemungut pada Pasar THM senilai Rp15.464.000,00 (Rp14.364.000,00 + Rp1.100.000,00), Sdr. SF selaku pendamping petugas pemungut senilai Rp17.656.000,00, dan Sdr. Rp1.080.000,00.

c. Pengelolaan Basis Data WR dan Karcis Retribusi Los Belum Memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan data WR dari DKUKMP pada Pasar Tenguyun, Pasar THM, Pasar Sebengkok dan Pasar Gusher, diketahui bahwa:

1) Basis data WR belum diperbaharui dan DKUKMP belum memiliki basis data yang berisi rincian nama pedagang kios/los/meja yang masih aktif berjualan. DKUKMP belum melakukan pemutakhiran basis data pedagang kios/los/meja, sehingga basis data yang dimiliki dan digunakan saat ini merupakan basis data yang sebelumnya dikelola oleh UPT Pasar;

2) Hasil inspeksi atas proses pemungutan retribusi pada Pasar Tenguyun, Pasar THM, Pasar Sebengkok dan Pasar Gusher diketahui bahwa karcis yang diberikan oleh petugas pemungut kepada WR masih menggunakan karcis dengan tarif lama sesuai Perda Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 dan belum menggunakan karcis dengan tarif retribusi baru berdasarkan Perda Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023.

Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor diketahui bahwa Bidang Pengembangan Ekspor belum pernah melakukan pemutakhiran data WR

dengan rincian nama pedagang kios/los/meja yang masih aktif berjualan di Pasar Tenguyun, Pasar THM, Pasar Sebengkok dan Pasar Gusher disebabkan mutasi pejabat yang cukup sering di DKUKMP. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari pengurus barang DKUKMP diketahui tidak ada arahan penarikan karcis dari BPKPAD atas perubahan tarif retribusi dan menyebabkan pengurus barang masih memberikan karcis lama dalam pemungutan Retribusi Los kepada petugas pemungut. Berdasarkan permintaan keterangan dari Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD diketahui bahwa yang bersangkutan mengakui belum mengeluarkan surat edaran kepada SKPD pemungut retribusi untuk mengembalikan karcis berdasarkan Perda lama.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 66 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran:

    1) Bab I, Huruf J, angka 1 pada:

        a) Huruf b, yang menyatakan bahwa bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;

        b) Huruf c angka (3) yang menyatakan bahwa selain tugas dan wewenang tersebut, bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;

        c) Huruf c angka (4) yang menyatakan bahwa selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan

    2) Bab V, huruf G, pada angka 2 huruf b, angka 1) yang menyatakan bahwa penerimaan pendapatan melalui bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu secara tunai, dilakukan antara lain bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

d. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Lampiran pada Huruf C, angka 2, huruf a, angka 1), huruf a), angka (2), huruf g) yang menyatakan bahwa

penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

e. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan pada pasal 28 yang menyatakan bahwa Bidang Pengembangan Ekspor dalam melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi, diantaranya:

   1) Huruf o, yang menyatakan melaksanakan kebijakan pengelolaan, pengendalian, pengamanan, pengaturan pedagang, ketertiban, kebersihan pasar, dan pemungutan retribusi pasar; dan

   2) Huruf p, yang menyatakan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian sistem penyelenggaraan pemungutan dan pengelolaan pasar.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Pemerintah Kota Tarakan kehilangan potensi pendapatan Retribusi Los senilai Rp886.605.000,00; dan

b. Kekurangan penerimaan atas Retribusi Los yang belum disetor oleh petugas pemungut dan pendamping petugas pemungut ke Kas Daerah senilai Rp34.200.000,00 (Rp152.714.000,00 – Rp2.880.000,00 – Rp113.690.000,00 – Rp1.944.000,00).

Hal tersebut disebabkan:

a. Plt. Kepala DKUKMP:

   1) Belum melakukan pendataan atas potensi pendapatan Retribusi Los sebagai dasar penetapan target pendapatan retribusi tahunan;

   2) Belum memperbaharui perjanjian sewa los dan kios;

   3) Tidak melakukan penutupan kas di Bendahara Penerimaan secara periodik.

b. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor belum:

   1) Melakukan pengawasan atas ketertiban pelaksanaan pemungutan Retribusi Los;

   2) Melakukan evaluasi atas pengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Los;

   3) Melakukan pemutakhiran data wajib retribusi los dan kios secara periodik;

   4) Melakukan sosialisasi tentang mekanisme pemungutan retribusi Los kepada pedagang di pasar.

c. Bendahara Penerimaan DKUKMP, petugas pemungut, dan pembantu petugas pemungut tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Kepala DKUKMP untuk:

a. Mengendalikan dan mengawasi pemungutan retribusi pada satuan kerja yang dipimpinnya dan melakukan penutupan kas pada Bendahara Penerimaan setiap bulan.

b. Menginstruksikan Kepala Bidang Pengembangan Ekspor supaya melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan retribusi parkir dan retribusi los;

c. Menginstruksikan petugas pemungut dan pendamping petugas pemungut supaya:

   1) Memedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan retribusi; dan

   2) Menyetorkan kekurangan penerimaan retribusi senilai Rp34.200.000,00 ke Kas Daerah.

3. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak sesuai Perjanjian Kerja Sama dan Ketentuan yang Berlaku

LRA Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 menyajikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp16.050.205.889,70 atau 98,90% dari anggaran senilai Rp16.228.846.172,00. Realisasi Pendapatan Retribusi mengalami kenaikan senilai Rp3.190.380.591,70 atau sebesar 24,81% dibandingkan Pendapatan Retribusi tahun 2023 senilai Rp12.859.825.298,00. Realisasi pendapatan retribusi tersebut diantaranya merupakan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum senilai Rp612.851.040,00.

Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum (retribusi parkir tepi jalan) adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak Tahun 2022, pengelolaan dan penyelenggaraan parkir tepi jalan Kota Tarakan diserahkan oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada Perusahaan Umum Daerah Kota (Perumda) Tarakan Aneka Usaha melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perhubungan Kota Tarakan dengan Perumda Aneka Usaha.

Berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tarakan TA 2023 Nomor 68.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, BPK mengungkapkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak sesuai ketentuan. Pengaturan pemberian imbal jasa kepada Perumda Aneka Usaha selaku pihak ketiga melalui mekanisme bagi hasil pengelolaan retribusi parkir tidak sesuai dengan ketentuan, dimana penerimaan retribusi oleh pihak ketiga seharusnya disetor ke kas daerah secara bruto dan pemberian imbal hasil dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah. Atas kondisi tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar:

a. Memerintahkan Kepala Dishub untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan kerja sama pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

b. Memerintahkan Kepala Dishub menyetorkan ke Kas Daerah atas retribusi parkir secara bruto ataupun dengan melakukan perubahan kontrak atau pemutusan kontrak kerja.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan sampai dengan Semester II 2024 menunjukkan status tindak lanjut atas rekomendasi tersebut belum sesuai

rekomendasi karena belum terdapat dokumen perubahan kontrak atau pemutusan kontrak kerja sama dan bukti setor secara bruto.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan PKS tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan umum Tahun 2024 ditemukan hal-hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

a. Penyetoran bagi hasil atas pengelolaan retribusi parkir oleh Perumda Aneka Usaha tidak memedomani PKS. Laporan pendapatan parkir Perumda Tarakan Aneka Usaha tahun 2024 menunjukkan total pendapatan bersih/netto sebesar Rp908.076.383,00 dan bagi hasil yang disetorkan ke kas daerah sebesar Rp612.851.040,00 atau 67,49% dari total pendapatan netto.

   Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil yang disetor belum memenuhi 70% sebagaimana diatur dalam PKS sebesar Rp635.653.468,10 atau terdapat kekurangan setor sebesar Rp22.802.428,10 (rincian disajikan pada **Lampiran 2**).

b. Pendapatan bagi hasil yang disetor oleh Perumda Aneka Usaha dicatat oleh Pemerintah Kota Tarakan sebagai Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan secara netto yaitu sebesar Rp612.851.040,00. Menurut ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan dari hasil retribusi harus disetor dan dicatat secara bruto atau senilai Rp908.076.383,00. Selanjutnya, hak Perumda Aneka Usaha sebesar 30% atau senilai Rp272.422.914,90 akan dikembalikan kepada Perumda Aneka Usaha melalui pengeluaran Belanja Barang dan Jasa – Jasa kepada Pihak Ketiga.

c. Pemerintah Kota Tarakan disepakati akan menerima bagi hasil Retribusi Parkir Tepi Jalan dari Perumda Tarakan Aneka Usaha paling sedikit sebesar Rp1.612.800.000,00 per tahun dari target pendapatan bersih per tahun sebesar Rp2.304.000.000,00. Kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh Perumda Aneka Usaha di Tahun 2024 dimana terdapat kekurangan pencapaian target pendapatan sebesar Rp1.395.923.617,00 (Rp2.304.000.000,00 - Rp908.076.383,00). Dengan demikian, target penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Tarakan dari Retribusi Parkir Tepi Jalan juga tidak tercapai senilai Rp999.948.960,00 (Rp1.612.800.000,00 - Rp612.851.040,00). Hasil penelusuran atas target yang disepakati tersebut diketahui penetapan target tidak diketahui dasar perhitungannya.

d. Perumda Aneka Usaha tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum kepada Dinas Perhubungan setiap bulan. Hasil pemeriksaan diketahui laporan penyelenggaraan parkir disampaikan oleh Perumda Aneka Usaha kepada Dinas Perhubungan pada Tahun 2025 saat pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

e. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh tim pemeriksa tanggal 13 Mei 2025, Dinas Perhubungan tidak pernah melakukan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan retribusi parkir oleh Perumda Aneka Usaha.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengawasan dan pengendalian pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan pada Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya kegiatan terkait koordinasi dengan Perumda Aneka Usaha dan SKPD terkait penganggaran dan pengeluaran belanja Barang dan Jasa – Jasa kepada Pihak Ketiga, baik dalam hal penertiban mekanisme penyetoran penerimaan pendapatan retribusi maupun terkait upaya penetapan dan pencapaian target Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan.

Lebih lanjut, Direktur Perumda Aneka Usaha menjelaskan bahwa laporan penyelenggaraan parkir tepi jalan Tahun 2024 baru diserahkan Perumda Aneka Usaha kepada Dinas Perhubungan pada tanggal 7 Januari 2025. Manajemen menyatakan belum optimal dalam melaksanakan PKS, khususnya terkait kewajiban penyampaian laporan dan penyetoran penerimaan retribusi ke kas daerah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 66:
    1) Ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto;
    2) Ayat (5) yang antara lain menyatakan bahwa pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
    3) Ayat (6) yang antara lain menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga diatur dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 003/HK-XII/495/2021 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum pada angka (5) yang menyatakan menetapkan bagi hasil pendapatan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dari pendapatan bersih, yang telah dikurangi biaya operasional yang disepakati oleh Dinas Perhubungan dan Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha yaitu:
    1) Pemerintah Kota Tarakan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
    2) Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha sebesar 30% (tiga puluh persen).
c. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kota Tarakan dan Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Nomor 550/148/Dishub/2021; Nomor 011/PERUMDA TRK-AU/PKS/XII/2021:
    1) Pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban:
        a) Ayat 1 yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan berhak:
            (1) Huruf (a) memberikan saran/masukan dan teguran kepada Perumda Tarakan Aneka Usaha atas hasil pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
            (2) Huruf (b) menerima laporan penyelenggaraan dan setoran retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum setiap 1 (satu) bulan dari Perumda Tarakan Aneka Usaha; dan
            (3) Huruf (c) menerima bagi hasil retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dari Perumda Tarakan Aneka Usaha sesuai kesepakatan.
        b) Ayat 2 yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan berkewajiban:

(1) huruf (a) melakukan pembinaan dan pengawasan terkait teknis penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum kepada Dinas Perhubungan;

(2) huruf (b) melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

(3) huruf (c) melakukan koordinasi secara aktif dengan Perumda Tarakan Aneka Usaha.

c) Ayat 3 yang antara lain menyatakan bahwa Perumda Tarakan Aneka Usaha berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Perhubungan terkait teknis penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.

d) Ayat 3 yang menyatakan Perumda Tarakan Aneka Usaha berhak:

(1) Huruf (d) menyampaikan laporan penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum setiap bulan kepada Dinas Perhubungan, termasuk setoran retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan

(2) Huruf (f) melakukan koordinasi secara aktif dengan Dinas Perhubungan.

2) Pasal 6 tentang Bagi Hasil:

a) Ayat 1, yang menyatakan bahwa bagi hasil retribusi parkir di tepi jalan umum dari pendapatan bersih yang telah dikurangi biaya operasional yang disepakati oleh para pihak, sebagai berikut:

(1) Dinas Perhubungan atau Pemerintah Kota Tarakan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

(2) Perumda Tarakan Aneka Usaha sebesar 30% (tiga puluh persen).

b) Ayat 2, yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan menerima bagi hasil retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dari Perumda Aneka Usaha paling sedikit sebesar Rp 1.612.800.000,00 (satu miliar enam ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun dari target pendapatan bersih per tahun sebesar Rp2.304.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat juta rupiah) per tahun; dan

c) Ayat 3, yang menyatakan bahwa Perumda Aneka Usaha mendapatkan bagi hasil retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp691.200.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun, dari target pendapatan bersih per tahun sebesar Rp 2.304.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat juta rupiah) per tahun.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan retribusi parkir Tahun 2024 atas bagi hasil pendapatan retribusi yang belum disetor Perumda Aneka Usaha senilai Rp22.802.428,10.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala Dinas Perhubungan:

1) Belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk memperbaharui perjanjian kerja sama pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan terkait mekanisme penyetoran penerimaan dari Perumda Aneka Usaha;

2) Belum menganggarkan Belanja Barang dan Jasa untuk memenuhi hak pihak kedua sesuai perjanjian kerja sama pengelolaan pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang harus disetor secara bruto ke Kas Daerah;

3) Belum melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam menyusun dan menetapkan mekanisme penerimaan pendapatan dari hasil perjanjian kerja sama agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

4) Belum sepenuhnya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perumda Aneka Usaha selaku pihak kedua dalam upaya pencapaian target penerimaan pendapatan dari Retribusi Parkir Tepi Jalan.

b. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan:

1) Tidak mengawasi pelaksanaan kewajiban dari Perumda Aneka Usaha untuk menyerahkan laporan penyelenggaraan dan setoran retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum setiap 1 (satu) bulan; dan

2) Tidak memiliki kertas kerja perhitungan target pendapatan dari pengelolaan retribusi parkir tepi jalan.

c. Direktur Perumda Aneka Usaha tidak memedomani kewajiban penyetoran bagi hasil kepada Pemerintah Kota Tarakan dan belum memenuhi target penerimaan dari Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan sesuai perjanjian kerja sama

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan:

a. Kepala Dinas Perhubungan untuk:

1) Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK supaya memperbaharui perjanjian kerja sama pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan terkait mekanisme penyetoran penerimaan dari Perumda Aneka Usaha;

2) Menganggarkan Belanja Barang dan Jasa dalam memenuhi hak pihak kedua sesuai perjanjian kerja sama pengelolaan pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang menurut ketentuan harus disetor secara bruto ke Kas Daerah terlebih dahulu;

3) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam menyusun dan menetapkan mekanisme penerimaan pendapatan dari hasil perjanjian kerja sama agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perumda Aneka Usaha selaku pihak kedua dalam upaya pencapaian target penerimaan pendapatan dari Retribusi Parkir Tepi Jalan;

5) Menginstruksikan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan untuk:

a) Mengawasi pelaksanaan kewajiban dari Perumda Aneka Usaha supaya menyerahkan laporan penyelenggaraan dan setoran retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum setiap 1 (satu) bulan; dan

b) Menyusun kertas kerja perhitungan target pendapatan dari pengelolaan retribusi parkir tepi jalan dan membahasnya dengan Perumda Aneka Usaha sebelum disepakati melalui perjanjian kerja sama.

b. Direktur Perumda Aneka Usaha untuk:

1) Memedomani kewajiban penyetoran bagi hasil kepada Pemerintah Kota Tarakan;

2) Memenuhi target penerimaan dari Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan sesuai perjanjian kerja sama; dan

3) Menyetorkan bagi hasil pendapatan retribusi Tahun 2024 senilai Rp22.802.428,10 ke Kas Daerah.

4. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Oleh Bidang Pendapatan BPKPAD Belum Memadai

LRA Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 menyajikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp98.648.559.407,53 atau 108,51% dari anggaran senilai Rp90.911.161.903,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan senilai Rp11.988.263.212,81 atau 13,83% dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 senilai Rp86.660.296.194,72. Realisasi pendapatan pajak tersebut diantaranya merupakan pendapatan pajak restoran senilai Rp24.257.200.888,59.

Pemeriksaan atas realisasi Pendapatan Pajak Restoran diketahui bahwa pemungutannya didasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Perda ini objek Pajak Restoran berganti nama menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan objek pajak adalah makanan dan/atau minuman yang dijual oleh restoran, rumah makan, kafe, dan katering.

PBJT adalah jenis pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, yaitu makanan dan/atau minuman yang dijual oleh restoran, rumah makan, kafe, dan katering. Tarif pajak PBJT yang ditetapkan dalam perda sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima dari konsumen makanan dan/atau minuman. Dengan demikian, subjek pajaknya adalah konsumen makanan dan/atau minuman, namun yang menjadi Wajib Pajak (WP) PBJT adalah yang menjual makanan dan/ atau minuman.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2023, Pajak PBJT makanan dan/atau minuman merupakan pajak daerah yang dipungut dengan menggunakan metode *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada penghitungan sendiri oleh WP. Dengan sistem ini, WP PBJT makanan dan/atau minuman wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) berdasarkan omzet yang diterima per bulan dan menyampaikannya kepada Bidang Pendapatan BPKPAD sebagai dasar perhitungan dan pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah). SKP-Daerah selanjutnya menjadi dasar bagi WP untuk menyetorkan kewajiban PBJT makanan dan/atau minuman wajib ke Kas Daerah.

Hasil Pemeriksaan terhadap daftar wajib PBJT makanan dan/atau minuman yaitu restoran diketahui terdapat 1.331 WP dengan status aktif sampai dengan tahun 2024.

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dan diketahui bahwa sebanyak 875 atau sebesar 65,74% WP yang tidak pernah menyampaikan SPTPD kepada Bidang Pendapatan BPKPAD untuk ditetapkan SKP-Daerah nya selama periode tahun 2024, dengan rincian disajikan pada **Lampiran 3.** Lebih lanjut, tim pemeriksa melakukan observasi secara uji petik untuk melihat aktivitas usaha WP yang aktivitas usahanya berjalan lancar dan pengunjungnya ramai dan diketahui bahwa terdapat lima WP yaitu BC, SC, KJ, S, dan RMCM yang tidak menyampaikan SPTPD kepada Bidang Pendapatan BPKPAD untuk ditetapkan SKP-Daerah nya. Kemudian, hasil pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan PBJT makanan dan/atau minuman pada Tahun 2024 terhadap 456 WP dengan rincian disajikan pada **Lampiran 4**, diketahui terdapat delapan WP yang tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajak dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 13 WP yang Tidak Melaporkan SPTPD dan Membayar PBJT Makanan dan/atau Minuman secara Rutin Tahun 2024

No.	Nama Usaha	Periode yang di Laporan SPTPD		Periode SPTPD Yang Tidak Dilaporkan
		Yang di Laporan SPTPD	Pembayaran Pajak Selama Tahun 2024 (Rp)	
1	RMDR	Juli	265.455,00	Januari s.d. Juni dan Agustus s.d. Desember
2	RMHB	Januari dan Desember	347.000,00	Februari s.d. November
3	WCPBKE	Juli	2.100.000,00	Januari s.d. Juni dan Agustus s.d. Desember
4	WCPBT	Juli	2.700.000,00	Januari s.d. Juni dan Agustus s.d. Desember
5	WA	September	3.600.000,00	Januari s.d. Agustus dan Oktober s.d. Desember
6	WS	Juli dan Oktober	3.950.000,00	Januari s.d. Juni, Juli sd. September dan November s.d. Desember
7	WCPBKB	Desember	4.700.000,00	Januari s.d. November
8	WA 2	September	4.800.000,00	Januari s.d. Agustus dan Oktober s.d Desember

Berdasarkan permintaan keterangan dari Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan BPKPAD diketahui bahwa atas WP PBJT makanan dan/atau minuman yang statusnya masih aktif terdaftar dan/atau aktivitas usahanya masih berjalan lancar, namun belum menyampaikan SPTPD dan juga belum diterbitkan SKP-Daerah nya belum pernah dilakukan verifikasi. Sementara itu, atas ketidakpatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Kasubid Pengawasan dan Kepatuhan menjelaskan bahwa BPKPAD belum memiliki pemeriksa pajak untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan atas kepatuhan WP. Tahun 2024, Subbidang Pengawasan dan Kepatuhan BPKPAD telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap pajak *self assestment system*, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Subbidang Pengawasan dan Kepatuhan BPKPAD hanya memiliki tiga orang pegawai (ditambah satu orang kasubbid), yang melakukan fungsi pemeriksaan pajak dan juga dilibatkan dalam kegiatan intensifikasi pajak. Pemeriksaan pajak tahun 2024, diprioritaskan atas WP yang memiliki omzet penjualan tinggi.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Bidang Pendapatan BPKPAD diketahui bahwa untuk mendorong kepatuhan WP melaksanakan kewajiban

perpajakannya dapat dilaksanakan oleh sub Bidang Pengawasan dan kepatuhan melalui pelaksanaan fungsinya yaitu penyiapan bahan dan pemantauan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengawasan dan kepatuhan Pendapatan Asli Daerah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perda Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada:

   1) Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan bahwa wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu;

   2) Pasal 30 Ayat (1) Huruf a yang menyatakan bahwa dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman; dan

   3) Pasal 33 Ayat (2) Huruf a yang menyatakan bahwa saat terutang PBJT ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makan dan/atau minuman.

b. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, pada:

   1) Pasal 4 Huruf (c) yang menyatakan bahwa Kepala Badan menyelenggarakan fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perbendaharaan, akuntansi, anggaran, pendapatan dan Pengelolaan aset Daerah;

   2) Pasal 46 Huruf (d) yang menyatakan bahwa Kepala Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, keberatan, pengawasan kepatuhan dan pelaporan pendapatan asli daerah;

   3) Pasal 56 Huruf (c) yang menyatakan bahwa Kepala Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kepatuhan pendapatan asli Daerah;

   4) Pasal 56 Huruf (d) yang menyatakan bahwa Kepala Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengawasan kepatuhan pendapatan asli Daerah; dan

   5) Pasal 56 Huruf (e) yang menyatakan bahwa Kepala Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah Daerah di bidang pengawasan kepatuhan pendapatan asli Daerah.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi PBJT makanan dan/atau minuman (pajak restoran) Tahun 2024 belum menggambarkan potensi yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD:

   1) Belum melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan PBJT makanan dan/atau minuman (pajak restoran) sesuai potensi pajak baik yang sudah terdata maupun belum terdata; dan

   2) Belum melaksanakan evaluasi dan verifikasi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

b. Kepala Subbidang Pengawasan Kepatuhan BPKPAD belum melaksanakan pengawasan atas kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Kepala BPKPAD untuk menginstruksikan:

a. Kepala Bidang Pendapatan supaya:

   1) Melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan PBJT makanan dan/atau minuman (pajak restoran) sesuai potensi pajak, baik yang sudah terdata maupun belum terdata;

   2) Melakukan verifikasi atas 875 WP yang tidak pernah menyampaikan SPTPD kepada Bidang Pendapatan BPKPAD; dan

b. Kepala Subbidang Pengawasan Kepatuhan supaya menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku hasil evaluasi dan verifikasi atas 875 WP yang tidak tertib melaporkan SPTPD.

C. BELANJA

1. Kelebihan pembayaran senilai Rp88.715.922,29 dan Potensi Kelebihan Pembayaran senilai Rp19.425.001,23 atas Honorarium Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

LRA Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp353.588.944.803,57 atau 91,60% dari anggaran senilai Rp386.025.526.188,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan senilai Rp28.071.388.596,76 atau 8,62% dibandingkan Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 senilai Rp325.517.556.206,81. Dari realisasi tersebut senilai Rp61.291.212.503,95 merupakan Belanja Barang dan Jasa BLUD, yang diantaranya senilai Rp266.865.420,00 dibayarkan untuk honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT) sebagai bentuk remunerasi/imbalan kerja yang diberikan setiap bulan.

Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah RSUKT mengatur bahwa remunerasi dapat diberikan dalam bentuk gaji/honorarium, tunjangan tetap dan/atau insentif yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUKT dan APBD. Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUKT diantaranya berupa insentif atas jasa pelayanan bagi pegawai BLUD RSUKT. Selanjutnya, diatur bahwa gaji dan tunjangan Direktur merupakan acuan dasar penentuan besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. Dengan demikian, jasa

pelayanan adalah insentif yang tidak termasuk bagian dari dasar penentuan besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban pembayaran honorarium dewan pengawas Badan Layanan Umum (BLU) RSUKT Tahun 2024 menunjukkan bahwa atas pembayaran honorarium November 2023 s.d. Oktober 2024 yang dibayarkan pada Tahun 2024 memperhitungkan insentif berupa jasa pelayanan Direktur sebagai salah satu komponen dalam perhitungan pembayaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. Hasil perhitungan ulang atas pembayaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang tidak memasukkan insentif jasa pelayanan Direktur sebagai komponen perhitungan pembayaran honorarium menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp88.715.922,29 di Tahun 2024. Metode yang sama dilakukan atas perhitungan honorarium Oktober 2024 s.d. Desember 2024 yang akan dibayarkan pada Tahun 2025 dan diketahui terdapat potensi kelebihan pembayaran senilai Rp19.425.001,23. Rincian perhitungan disajikan pada **Lampiran 5.**

Berdasarkan wawancara dengan Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) RSUKT Tahun 2024 dan Tahun 2023 diketahui bahwa perhitungan honorarium yang dilaksanakannya telah dilakukan sejak Tahun 2021. Hasil wawancara dengan Pejabat Keuangan RSUKT diketahui bahwa cara perhitungan besaran honorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas mengikuti perhitungan tahun-tahun sebelumnya.

Atas kelebihan pembayaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas telah disetor ke Kas BLUD senilai Rp76.961.200,00 dengan:

a. Kuitansi pembayaran senilai Rp5.654.614,00 tanggal 15 Mei 2025;

b. Kuitansi pembayaran senilai Rp32.267.536,00 tanggal 19 Mei 2025;

c. Kuitansi pembayaran senilai Rp6.771.514,00 tanggal 19 Mei 2025; dan

d. Kuitansi pembayaran senilai Rp32.267.536,00 tanggal 23 Mei 2025.

Penyetoran tersebut senilai Rp64.939.961,48 untuk kelebihan pembayaran honorarium Tahun 2024 dan senilai Rp12.021.238,52 untuk potensi kelebihan pembayaran honorarium Tahun 2025.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan pada Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Honorarium Dewan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pola sebagai berikut:

    1) Ketua Dewan Pengawas maksimal 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;

    2) Anggota Dewan Pengawas maksimal 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan

    3) Sekretaris Dewan Pengawas maksimal 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

b. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 445/HK-IX/376/2021 tentang Alokasi Jasa Pelayanan dan Besaran Honorarium Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan

Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan yang menetapkan besaran honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai berikut.

1) Ketua Dewan Pengawas sebesar 30% dari gaji dan tunjangan Direktur;

2) Anggota Dewan Pengawas sebesar 26% dari gaji dan tunjangan Direktur; dan

3) Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 5% dari gaji dan tunjangan Direktur.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran honorarium dewan pengawas serta sekretaris dewan pengawas RSUKT senilai Rp23.775.960,81 (Rp88.715.922,29 - Rp64.939.961,48);

b. Potensi kelebihan pembayaran honorarium dewan pengawas serta sekretaris dewan pengawas senilai Rp7.403.762,71 (Rp19.425.001,23 - Rp12.021.238,52) pada Tahun 2025; dan

c. Penyajian saldo belanja Barang dan Jasa - LRA dan Beban Barang dan Jasa BLUD - LO lebih dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan oleh Pejabat Teknis Kegiatan dan Pejabat Keuangan RSUKT tidak memedomani ketentuan tentang komponen acuan dasar perhitungan honorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Direktur RSUKT untuk menginstruksikan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pejabat Keuangan supaya:

a. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas senilai Rp23.775.960,81 dan menyetorkan ke Kas RSUKT;

b. Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas senilai Rp7.403.762,71 pada pembayaran honorarium berikutnya; dan

c. Memedomani ketentuan tentang komponen acuan dasar perhitungan honorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas.

2. Kekurangan Volume Tiga Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp34.888.382,62

LRA Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp353.588.944.803,57 atau 91,60% dari anggaran senilai Rp386.025.526.188,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan senilai Rp28.071.388.596,76 atau 8,62% dibandingkan Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 senilai Rp325.517.556.206,81. Dari realisasi tersebut diantaranya Rp12.568.077.634,13 merupakan Belanja Barang dan Jasa - Belanja Pemeliharaan. Dari realisasi Belanja Pemeliharaan senilai Rp12.568.077.634,13 dilakukan uji petik atas realisasi pada Dinas Pendidikan (Disdik) senilai Rp1.614.386.875,00 (12,85%) dan DPUPR senilai Rp3.258.651.750,00 (25,93%).

Hasil pemeriksaan terhadap realisasi Belanja Pemeliharaan pada Disdik dan DPUPR diketahui terdapat kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan senilai Rp34.888.382,62 sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel I. 14 Kekurangan Volume atas Tiga Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan

No.	Paket Pekerjaan	SKPD	Kekurangan Volume (Rp)
1	Rehab Gedung Kantor	Disdik	16.074.499,88
2	Pemeliharaan Rutin Jalan - Jalan Daerah Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur	DPUPR	11.043.075,13
3	Pemeliharaan Rutin Jalan-Jalan Daerah Kelurahan Kr.Anyar Kecamatan Tarakan Barat	DPUPR	7.770.807,61
Total			**34.888.382,62**

Uraian lebih rinci kekurangan volume senilai Rp34.888.382,62 pada masing-masing paket pekerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 6**. Perhitungan kekurangan volume pekerjaan telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Penyedia.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

   1) Pasal 17 ayat (2), yang menyatakan bahwa penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan;

   2) Pasal 27 ayat (6) huruf (b), yang menyatakan bahwa pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;

   3) Pasal 78:

      a) Ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwa dalam hal penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, penyedia dikenakan sanksi administratif; dan

      b) Ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, pada Lampiran II Angka Romawi VII dan VIII:

   1) Angka 7.13 huruf a, yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh pejabat penandatanganan kontrak;

   2) Angka 7.13 huruf b, yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

   3) Angka 8.1 huruf b, yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil

pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis; dan

4) Angka 8.1 huruf c, yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

c. Klausul pada masing-masing Surat Perjanjian/Kontrak dan/atau Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Pasal Hak dan Kewajiban Penyedia yang menyatakan bahwa hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

1) Huruf a, menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

2) Huruf e, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan senilai Rp34.888.382,62, terdiri dari satu paket pekerjaan pada Disdik senilai Rp16.074.499,88 dan dua paket pekerjaan pada Dinas PUPR senilai Rp18.813.882,74; dan

b. Penyajian saldo Belanja Barang Dan Jasa - Belanja Pemeliharaan - LRA dan Beban Pemeliharaan - LO lebih dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan oleh PPK pada Disdik dan DPUPR tidak melaksanakan tupoksinya dalam pengendalian atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Kepala Disdik dan DPUPR untuk menginstruksikan PPK supaya:

a. Melaksanakan tupoksinya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia; dan

b. Memproses kelebihan pembayaran masing-masing senilai Rp16.074.499,88 dan Rp18.813.882,74 serta menyetorkan ke kas daerah.

3. Kelebihan Pembayaran atas Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sembilan SKPD senilai Rp455.082.256,00

LRA Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp353.588.944.803,57 atau 91,60% dari anggaran senilai Rp386.025.526.188,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan senilai Rp28.071.388.596,76 atau 8,62% dibandingkan Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 senilai Rp325.517.556.206,81. Dari realisasi belanja barang dan jasa tersebut diantaranya senilai Rp39.600.311.810,00

direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Kelebihan pembayaran atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas secara uji petik pada sembilan SKPD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menunjukkan bahwa terdapat bukti pertanggungjawaban hotel yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, hasil pengujian bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas secara uji petik pada Sekretariat DPRD menunjukkan terdapat bukti *boarding pass* dan bukti pembayaran tiket pesawat yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaksana perjalanan dinas diketahui bahwa terdapat pelaksana yang berangkat lebih lama dari bukti yang telah dilampirkan atau kembali lebih awal. Hasil perhitungan ulang berdasarkan manifes penerbangan, bukti dokumentasi dan bukti pembayaran asli menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas senilai Rp452.082.256,00. Rincian kelebihan pembayaran atas bukti *boarding pass*, bukti pembayaran tiket dan hotel yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya disajikan pada **Lampiran 7** dan **Lampiran 8**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PPTK Sekretariat DPRD diketahui bahwa PPTK menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pelaksana perjalanan dinas kepada PPTK dan staf PPTK. PPTK melakukan verifikasi terutama atas kelengkapan bukti perjalanan dinas saja.

Hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan verifikasi terutama atas pembayaran penugasan pada tanggal perjalanan dinas yang dilakukan bersamaan (tumpang tindih). Lebih lanjut, hasil wawancara dengan pengelola keuangan Sekretariat DPRD yang merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan diketahui Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak bisa membedakan bukti perjalanan dinas yang asli dan tidak asli.

b. Kelebihan pembayaran atas penugasan di tanggal yang sama pada Dinas Perikanan

Hasil pengujian tanggal Surat Tugas dan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas secara uji petik pada Dinas Perikanan menunjukkan bahwa terdapat pembayaran atas beberapa penugasan di tanggal yang sama kepada pelaksana perjalanan dinas. Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas senilai Rp3.000.000,00 pada Dinas Perikanan. Rincian kelebihan pembayaran disajikan pada **Lampiran 9**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan selaku PPTK diketahui bahwa

pembayaran atas beberapa penugasan di tanggal yang sama terjadi karena jumlah pegawai yang terbatas. Kepala Bidang telah membuat jadwal kegiatan dan telah dikoordinasikan dengan bidang lain. Namun pada pelaksanaannya, sering terjadi saling meminjam pegawai antar bidang. Ketika pegawai dipinjam oleh bidang lain, pegawai masih kurang berkoordinasi untuk menginformasikan kegiatannya di bidang lain.

Selain itu, masing-masing bidang kurang berkoordinasi ketika terdapat perubahan jadwal yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan di hari yang sama dan kurang berkoordinasi saat melaksanakan pengajuan pembayaran perjalanan dinas sehingga mengajukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas di tanggal yang sama.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak menagih.

c. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran tentang Uraian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II Pengelola Keuangan Daerah pada:

    1) Huruf G, Nomor 4 yang menyatakan bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;

    2) Huruf H, Nomor 6 yang menyatakan bahwa verifikasi PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan; dan

    3) Huruf H, Nomor 7 yang menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

d. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024, pada Lampiran, angka 2 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang menyatakan bahwa perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip diantaranya akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp455.082.256,00 (Rp334.550.539,00 + Rp117.531.717,00 + Rp3.000.000,00) atas bukti perjalanan

dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan atas penugasan yang dilakukan pada tanggal yang sama; dan

b. Penyajian saldo belanja barang dan jasa - belanja perjalanan dinas LRA dan beban perjalanan dinas - LO lebih dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. PPK - SKPD terkait tidak melaksanakan tupoksinya menguji kebenaran material atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas;

b. Kurangnya koordinasi pelaksanaan kegiatan antar PPTK pada Dinas Perikanan; dan

c. Pelaksana perjalanan dinas menyampaikan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan:

a. Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan PPK - SKPD supaya menguji kebenaran material atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas;

b. Kepala Dinas Perikanan untuk menginstruksikan PPTK supaya berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan; dan

c. Pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp455.082.256,00 ke Kas Daerah.

4. Pemberian Bantuan Biaya Transportasi Berobat pada Dinas Kesehatan Belum Sepenuhnya Diberikan kepada Penerima yang Memenuhi Kriteria Penerima Bantuan Sosial

LRA Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 menyajikan realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp4.557.572.086,00 atau 95,79% dari anggaran Rp4.757.904.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.833.393.076,00 atau 67,30% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp2.724.179.010,00. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dirinci berdasarkan kategori penerima terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan bantuan sosial kepada keluarga, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Sosial Kepada Individu	2.304.000.000,00	2.113.668.086,00	91,74
2	Bantuan Sosial Kepada Keluarga	2.453.904.000,00	2.443.904.000,00	99,59
	Jumlah	**4.757.904.000,00**	**4.557.572.086,00**	**95,79**

Dari tabel diatas diketahui bahwa bantuan sosial kepada individu disalurkan dalam bentuk uang dalam bidang kesehatan senilai Rp181.451.586,00, bidang Pendidikan senilai Rp1.373.000.000,00, dan bantuan bencana alam senilai Rp224.300.000,00. Bantuan sosial kepada individu juga disalurkan dalam bentuk barang dalam bidang bantuan stimulan pasca bencana dan santunan pemilik rumah tinggal terdampak bencana senilai Rp334.916.500,00. Bantuan sosial kepada keluarga disalurkan dalam bentuk uang dalam bidang bantuan stimulan pasca bencana senilai Rp2.443.904.000,00.

Bantuan sosial kepada individu dalam bentuk uang dalam bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, dalam penganggaran dan pelaksanaannya Dinas Kesehatan menganggarkan belanja bantuan sosial senilai Rp290.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp181.451.586 atau 62,57% dari anggaran. Bantuan sosial pada Dinas Kesehatan senilai Rp181.451.586,00 diperuntukkan untuk pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Tahun 2024 berupa bantuan berobat masyarakat senilai Rp11.910.700,00, bantuan transportasi berobat senilai Rp158.640.886,00 dan bantuan pemulangan jenazah senilai Rp10.900.000,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban penyaluran bantuan biaya transportasi berobat masyarakat diketahui terdapat penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima, yaitu disalurkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif Kota Tarakan yang memiliki penghasilan tetap, dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 16 Penerima Bantuan Biaya Transportasi Berobat Tidak Sesuai Kriteria

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan	Nilai Bantuan (Rp)
1	JM	PNS Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Bidang	5.236.900,00
2	S	PNS Dinas PUPR	Sekretaris	6.585.465,00
3	ASHM	PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas	8.109.198,00
Total				**19.931.563,00**

Sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur kriteria penerima bantuan sosial, antara lain diberikan kepada orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan wawancara dengan PPTK Bantuan Biaya Berobat dan Transportasi Berobat pada Dinas Kesehatan diketahui bahwa adanya penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria sesuai ketentuan terjadi karena dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, PPTK hanya mendasarkan pemberian bantuan pada status kependudukan penerima yaitu warga masyarakat Kota Tarakan yang sedang menjalani pengobatan di luar tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diatur pada Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 460/HK-III/167/2023 tentang Standarisasi Pemberian Bantuan Sosial Biaya Berobat dan Transportasi Berobat Kepada Masyarakat Kota Tarakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial pada:

    1) Pasal 38 ayat (1) yang antara lain menyatakan bahwa bantuan sosial berupa uang yaitu uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, marbot, imam masjid, penjaga makam, guru ngaji, santunan korban kebakaran, bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan lainnya;

2) Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria minimal:

   a) Selektif;

   b) Memenuhi persyaratan penerima bantuan;

   c) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

   d) Sesuai dengan tujuan penggunaan.

3) Pasal 43 ayat (2) yang antara lain menyatakan bahwa perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;

4) Pasal 43 ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

5) Pasal 43 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; dan

6) Pasal 43 ayat (5) yang antara lain menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Hal tersebut mengakibatkan pemberian bantuan sosial berupa biaya transportasi berobat senilai Rp19.931.563,00 tidak tepat sasaran.

Hal tersebut disebabkan PPTK bantuan biaya berobat dan transportasi berobat pada Dinas Kesehatan tidak memedomani ketentuan dalam melakukan penyaluran bantuan sosial.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan PPTK bantuan biaya berobat dan transportasi berobat supaya memedomani ketentuan dalam melakukan penyaluran bantuan sosial.

5. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Modal pada Tiga SKPD senilai Rp2.814.600.365,81 dan Kelebihan Pembayaran atas Penambahan Volume Pekerjaan Menggunakan Harga Satuan Timpang pada Empat Paket Pekerjaan senilai Rp106.524.328,11

LRA Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 menyajikan realisasi Belanja Modal senilai Rp307.874.591.715,14 atau 96,83% dari anggaran senilai Rp317.948.582.684,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp88.165.426.596,38 atau 22,26% dibandingkan realisasi TA 2023 senilai Rp396.040.018.311,52. Realisasi Belanja Modal

Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 terdiri dari Belanja Modal tahun berjalan senilai Rp256.227.354.915,14 dan pembayaran Utang Belanja Modal tahun sebelumnya senilai Rp51.647.236.800,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi Belanja Modal TA 2024 ditemukan permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran atas penambahan volume pekerjaan menggunakan harga timpang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel I. 17 Kekurangan Volume Pekerjaan dan Kelebihan Pembayaran atas Harga Timpang

No.	SKPD	Jumlah Paket Pekerjaan	Kelebihan Pembayaran (Rp)
Kekurangan Volume		**24**	**2.814.600.365,81**
1	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata	5	191.325.458,51
2	Dinas Pendidikan	2	115.036.969,14
3	DPUPR	17	2.508.237.938,16
Kelebihan Pembayaran atas Harga Timpang		**4**	**106.524.328,11**

Penjelasan lebih rinci atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.814.600.365,81 dan kelebihan pembayaran atas harga timpang pada DPUPR senilai Rp106.524.328,11 diuraikan sebagai berikut.

a. Kekurangan volume lima paket pekerjaan realisasi Belanja Modal pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata senilai Rp191.325.458,51

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) TA 2024 menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp11.822.692.000,00 dengan realisasi senilai Rp11.665.166.700,00 atau 98,67% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 pada Disbudporapar diketahui terdapat kekurangan volume pada lima paket pekerjaan senilai Rp191.325.458,51, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 18 Kekurangan Volume atas Lima Paket Pekerjaan Disbudporapar

No.	Paket Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1	Pembangunan Lapangan Bola Kawasan *Sport Center*	10.833.261,24
2	Pemeliharaan Lapangan Tenis Indoor Telaga Keramat	22.280.234,03
3	Pembangunan Jembatan Kaca Kawasan Ratu Intan Pantai Amal	16.824.126,43
4	Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola Stadion Datu Adil	102.848.408,04
5	Pengembangan Kawasan Agrowisata Karungan	38.539.428,77
Jumlah		**191.325.458,51**

Uraian lebih rinci kekurangan volume senilai Rp191.325.458,51 pada masing-masing paket pekerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 10**. Perhitungan kekurangan volume pekerjaan telah disetujui oleh PPK, PPTK dan Penyedia.

b. Kekurangan volume dua paket pekerjaan Realisasi Belanja Modal pada Dinas Pendidikan senilai Rp115.036.969,14

Disdik TA 2024 menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp26.651.110.000,00 dengan realisasi senilai Rp26.502.716.194,26 atau 99,44% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 pada Disdik diketahui terdapat kekurangan volume pada dua paket pekerjaan senilai Rp115.036.969,14, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 19 Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan Disdik

No.	Paket Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1	Pembangunan SDN 052 (Tahap II)	106.623.637,93
2	Pembangunan SMPN 12 (Tahap II)	8.413.331,21
	Jumlah	**115.036.969,14**

Uraian lebih rinci kekurangan volume senilai Rp115.036.969,14 pada masing-masing paket pekerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 11**. Perhitungan kekurangan volume pekerjaan telah disetujui oleh PPK, PPTK dan Penyedia.

c. Kekurangan volume 17 paket pekerjaan Realisasi Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.508.237.938,16 dan kelebihan pembayaran atas penambahan volume pekerjaan menggunakan harga timpang pada empat paket pekerjaan senilai Rp106.524.328,11

DPUPR TA 2024 menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp8.590.857.634,00 dengan realisasi senilai Rp7.992.946.839,00 atau 93,04% dari anggaran dan menganggarkan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp185.935.986.547,00 dengan realisasi senilai Rp183.780.130.811,00 atau 98,84% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 pada DPUPR diketahui terdapat kekurangan volume pada 17 paket pekerjaan senilai Rp2.508.237.938,16 disajikan pada **Tabel I.20** dan kelebihan pembayaran atas penambahan volume pekerjaan menggunakan harga timpang pada empat paket pekerjaan disajikan pada **Tabel I.21**, sebagai berikut.

Tabel I. 20 Kekurangan Volume atas 17 Paket Pekerjaan DPUPR

No.	Paket Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1	Peningkatan Jalan Mangkudulis	142.313.144,89
2	Peningkatan Jalan Agatis	326.935.044,45
3	Pembangunan Jalan Pasar Rakyat KP. Empat	18.471.385,20
4	Peningkatan Jalan Sei Kayan	144.418.781,48
5	Peningkatan Jalan Slamet Riyadi	135.468.167,64
6	Pembangunan Saluran Karang Harapan	229.370.472,56

No.	Paket Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
7	Pembangunan *Landscape* TACC	201.928.954,38
8	Pemasangan Jaringan Listrik Dan Prasarana TPA Juata Kerikil	45.699.017,31
9	Pembangunan Siring RT.46	7.541.640,75
10	Peningkatan Jalan Kasiba Laut	255.396.876,78
11	Pembangunan Jembatan Seroja	13.407.019,11
12	Peningkatan Jalan Cip Deco	215.851.282,41
13	Peningkatan Jalan TPA Juata Kerikil	43.168.853,00
14	Peningkatan Jalan Lestari	263.100.349,86
15	Peningkatan Jalan Damai Bakti	40.914.206,00
16	Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa	330.543.473,58
17	Peningkatan Jalan RE. Martadinata	93.709.268,76
Jumlah		**2.508.237.938,16**

Tabel I. 21 Kelebihan Pembayaran atas Penambahan Volume Menggunakan Harga Timpang

No.	Paket Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1	Pembangunan Jalan Pasar Rakyat KP. Empat	19.644.184,93
2	Peningkatan Jalan Sei Kayan	4.953.714,45
3	Pembangunan *Landscape* TACC	64.477.341,05
4	Peningkatan Jalan Kasiba Laut	17.449.087,68
Jumlah		**106.524.328,11**

Uraian lebih rinci kekurangan volume senilai Rp2.508.237.938,16 pada masing-masing paket pekerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 12** dan kelebihan pembayaran atas penambahan volume menggunakan harga timpang senilai Rp106.524.328,11 dapat dilihat pada **Lampiran 13.** Perhitungan atas kekurangan volume dan kelebihan pembayaran pekerjaan telah disetujui oleh PPK, PPTK dan Penyedia.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

   1) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan;

   2) Pasal 27 ayat (6) huruf (b) yang menyatakan bahwa pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;

3) Pasal 78:

a) Ayat 3 huruf (d) yang menyatakan bahwa dalam hal penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, penyedia dikenakan sanksi administratif; dan

b) Ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, pada Lampiran II Angka Romawi VII dan VIII:

1) Angka 7.13 huruf a, yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh pejabat penandatanganan kontrak;

2) Angka 7.13 huruf b, yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;

3) Angka 8.1 huruf b, yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan serah terima, pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis; dan

4) Angka 8.1 huruf c, yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

c. Klausul pada masing-masing Surat Perjanjian/Kontrak dan/atau SSUK pada Pasal Perubahan Harga yang menyatakan apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

d. Klausul pada masing-masing Surat Perjanjian/Kontrak dan/atau SSUK pada Pasal Hak dan Kewajiban Penyedia yang menyatakan bahwa hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

a) Huruf a, menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

b) Huruf e, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 24 paket pekerjaan senilai Rp2.814.600.365,81 (Rp191.325.458,51 + Rp115.036.969,14 + Rp2.508.237.938,16) dan atas penambahan volume menggunakan harga satuan timpang senilai Rp106.524.328,11;

b. Penyajian saldo:

1) Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan lebih dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan

2) Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan lebih dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan PPK pada Disbudporapar, Disdik dan DPUPR tidak:

a. Melaksanakan tupoksinya mengendalikan pelaksanaan kontrak oleh penyedia; dan

b. Melakukan reviu atas dokumen MC dan *backup data* yang disusun oleh Penyedia.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Kepala Disbudporapar, Disdik dan DPUPR untuk menginstruksikan PPK supaya:

a. Melaksanakan tupoksinya mengendalikan pelaksanaan kontrak oleh penyedia;

b. Melakukan reviu atas dokumen MC dan *backup data* yang disusun oleh Penyedia; dan

c. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.921.124.693,92 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

6. Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Ketentuan

LRA Pemerintah Kota Tarakan TA 2024 menyajikan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp54.193.152.010,71 atau 97,93% dari anggaran senilai Rp55.337.474.978,00 dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp193.413.536.165,43 atau 98,82% dari anggaran senilai Rp195.718.125.547,00. Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut diantaranya direalisasikan pada Disdik senilai Rp26.502.716.194,26 dan dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diantaranya direalisasikan pada DPUPR senilai Rp183.780.130.811,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, diketahui terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa atas dua paket pekerjaan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Pembangunan SMPN 11 (Tahap III)

Pembangunan SMPN 11 (Tahap III) dilaksanakan oleh CV BK berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor PPK.02-SP/2643184/Pemb_SMPN.11 (Tahap III) tanggal 31 Januari 2024 senilai Rp5.405.397.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2024 s.d. 27 Agustus 2024.

Pekerjaan mengalami satu kali perubahan yang dituangkan dalam Addendum Nomor PPK.02-SP/2643184/ADD.1.Pemb_SMPN.11(Tahap III)/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang tambah kurang pekerjaan tanpa perubahan nilai kontrak.

Pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 02/PPK/BA.PHO/PEMB.SMPN.11 (TAHAP III)/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024. Atas penyelesaian pekerjaan, kepada penyedia telah dilakukan

pembayaran secara penuh (lunas) senilai Rp5.405.397.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terakhir Nomor 65.71/04.0/ 000338/LS/ 1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2024 tanggal 11 September 2024 senilai Rp673.387.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan tim pemeriksa bersama dengan PPK, Inspektorat, Konsultan Pengawas, dan Penyedia tanggal 10 Maret 2025, ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1) *Item* pekerjaan siring dan timbunan tanah area luar bangunan senilai Rp1.041.089.586,37 dikerjakan mendahului kontrak

   Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dan wawancara dengan PPK dan Penyedia, diketahui *item* pekerjaan siring dan timbunan tanah area luar bangunan senilai Rp1.041.089.586,37 telah dikerjakan pada bulan September 2023, dengan rincian yang disajikan pada **Lampiran 14**. Atas hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

   a) Terdapat pembangunan atas enam bangunan gedung antara lain ruang laboratorium IPA dan ruang laboratorium komputer yang diperolah dari sumber pendanaan (Dana Alokasi Khusus/DAK) TA 2023. Perencanaan awal lokasi pembangunan berada pada sisi kanan belakang Gedung D.

   b) Sebelum pelaksanaan pekerjaan atas enam gedung tersebut, PPK menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pemindahan lokasi gedung dari sisi kanan belakang Gedung D ke sisi kiri belakang Gedung B.

   c) Pada lokasi baru diketahui masih berupa tanah rawa sehingga diperlukan *item* pekerjaan siring tambahan dan pekerjaan timbunan tanah untuk mendukung konstruksi enam gedung tersebut. Dalam pembangunan enam bangunan tersebut, tidak dipersiapkan adanya dana pendampingan untuk pekerjaan tambahan baik melalui pembiayaan APBD maupun DAK, sehingga ketersediaan dana untuk pekerjaan siring dan timbunan tanah tidak tersedia.

   d) Sebelum pelaksanaan pembangunan enam gedung (DAK) pada bulan Oktober 2023, terdapat juga pekerjaan Pembangunan SMPN 11 Tahap II sedang berlangsung (sumber pendanaan dari APBD). Atas kontrak Pembangunan SMPN 11 Tahap II, terdapat item pekerjaan siring di belakang Gedung C yang telah terbangun sepanjang 118,35 m dan telah masuk dalam Kontrak Pembangunan SMPN 11 Tahap II.

   e) Dalam pelaksanaan Pembangunan SMPN 11 Tahap II, PPK mengintruksikan kepada penyedia untuk melakukan pekerjaan timbunan tanah luar bangunan dan pekerjaan penambahan panjang siring sepanjang 89,55 m yang berada di belakang Gedung B tanpa didasari Perjanjian/Kontrak.

   f) Berdasarkan wawancara dengan Penyedia SMPN.11 Tahap III, Penyedia telah mengetahui pekerjaan siring dan timbunan luar bangunan telah dikerjakan terlebih dahulu oleh Penyedia SMPN.11 Tahap II yang pelaksanannya dimulai pada bulan September 2023 s.d Oktober 2023. Penyedia juga mengetahui pekerjaan tersebut telah dikerjakan sebelum

kontrak Pembangunan SMPN. 11 Tahap III terbit. Lebih lanjut Penyedia juga tidak melakukan cco tambah kurang volume pada pekerjaan siring dan timbunan tanah luar bangunan. Lokasi pekerjaan siring dan pekerjaan timbunan tanah luar bangunan ditunjukkan pada **Gambar I.**

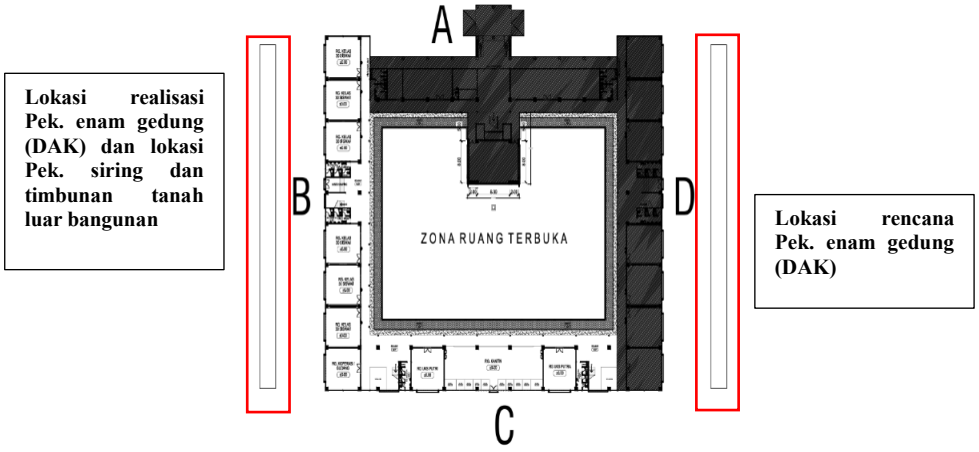

Gambar I. 1 Lokasi pekerjaan siring dan timbunan tanah luar bangunan

Atas kondisi tersebut PPK menjelaskan pekerjaan siring sepanjang 89,55 m tidak masuk ke dalam kontrak pembangunan SMPN 11 Tahap II karena tidak tersedia anggaran untuk menampung item pekerjaan tersebut dalam kontrak, sehingga PPK memutuskan untuk memasukkan item pekerjaan siring dan timbunan tanah luar bangunan senilai Rp1.041.089.586,37 ke dalam kontrak Pembangunan SMPN 11 Tahap III TA 2024 dan pengakuan serta pencatatan atas aset tetap gedung dan bangunan baru dilakukan pada Tahun 2024.

PPK mengakui bahwa hal tersebut melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa, karena pekerjaan telah dikerjakan sebelum kontrak terbit dan menyisipkan pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 ke dalam kontrak Tahun 2024.

2) Terdapat kekurangan volume *item* pekerjaan senilai Rp47.653.115,32

Pemeriksaan fisik yang dilakukan tim pemeriksa atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai kontrak pada Tahun 2024 senilai Rp4.364.307.413,63 (Rp5.405.397.000,00 - Rp1.041.089.586,37). Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp47.653.115,32 dengan rincian disajikan pada **Tabel I.22**. Kekurangan volume pekerjaan telah disetujui oleh PPK dan Penyedia serta dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pada tanggal 3 Mei 2025.

Tabel I. 22 Kekurangan Volume Pembangunan SMPN 11 Tahap III

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume			Harga Satuan (Rp)	Kurang Volume (Rp)
			Kontrak	Cek Fisik	Selisih		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=(4)-(5)*	*(7)*	*(8)=(6)x(7)*
I	Pekerjaan *Drainase* Area Kawasan						
1	Beton mutu K250 *by Ready Mix*	M3	72,01	68,88	3,13	1.680.863,13	5.261.101,60
2	Pembesian	Kg	7.598,53	5.999,57	1.598,96	20.997,39	33.573.986,71

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume			Harga Satuan (Rp)	Kurang Volume (Rp)
			Kontrak	Cek Fisik	Selisih		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=(4)-(5)*	*(7)*	*(8)=(6)x(7)*
3	Bekisting	M2	626,80	612,26	14,54	243.758,60	3.544.250,04
II	Pekerjaan Jalan dan Parkir						
4	Beton mutu K250 *by Ready Mix*	M3	251,70	248,89	2,81	1.680.863,13	4.723.225,40
5	Pembesian	Kg	11.616,29	11.590,07	26,22	20.997,39	550.551,57
Jumlah							**47.653.115,32**

b. Peningkatan Jalan Mamburungan - Karungan

Pekerjaan Peningkatan Jalan Mamburungan - Karungan dilaksanakan oleh CV TA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 00.3.3/04/PPK-JMK/BM/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 senilai Rp2.812.561.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2024 s.d. 8 November 2024.

Pekerjaan mengalami dua kali perubahan yang dituangkan dalam Addendum pertama Nomor 00.3.3/20/ADD-01/04/PPK-JMK/BM/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang tambah kurang pekerjaan dan perubahan jangka waktu pekerjaan menjadi 172 hari dan Addendum kedua Nomor 00.3.3/ADD-02/04/PPK-JMK/BM/III/2025 tanggal 8 Maret 2025 tentang tambah kurang pekerjaan tanpa perubahan nilai kontrak.

Pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan BAST Nomor 09/BAST-JMK/PPK/III/2025 tanggal 15 Maret 2025. Pekerjaan telah dibayar senilai Rp2.812.561.000,00 sesuai dengan SP2D terakhir Nomor 65.71/04.0/001189/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024.

Berdasarkan wawancara dengan PPK dan PPTK diketahui bahwa perencanaan awal Dinding Penahan Tanah (DPT) berjarak 1,5 m dari badan jalan utama. Pada saat perencanaan, dilakukan pengujian penyelidikan tanah menggunakan tes sondir sebanyak dua titik pada jarak 1,5 m dari badan jalan utama. Lokasi titik uji dari jalan tanjung pasir berada di sebelah kanan pada STA DPT 0+30 (S1) dan sebelah kiri pada STA 0+70 (S2). Hasil laporan penyelidikan tanah yang dilaksanakan oleh CV BPK menunjukkan hasil pada (S-1) ditemukan tanah keras pada kedalaman 7,6 m dan (S-2) pada kedalaman 12,4 m dari elevasi badan jalan utama. Mengacu pada hasil pengujian tanah keras di lokasi (S-1), direncanakan pembangunan DPT berada pada sisi kanan badan jalan utama dengan spesifikasi kedalaman pondasi 6 m, ketebalan *pile cap* 0,5 m dan ketinggian DPT 4,5 m.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan tim pemeriksa bersama dengan PPTK, Inspektorat, Konsultan Pengawas dan Penyedia tanggal 23 April 2025 menunjukkan DPT mengalami pergeseran lokasi dari perencanaan awal. Perubahan lokasi DPT disajikan pada **Tabel I.23**. Atas perubahan tersebut tidak didukung dengan pengujian penyelidikan tanah kembali di lokasi yang baru. Lokasi DPT disajikan pada **Gambar I.2**.

Tabel I. 23 Perubahan Lokasi DPT dari Badan Jalan

No.	STA	Lokasi DPT dari badan jalan	
		Perencanaan	Terealisasi
1	0 + 00	1,5 m	1.5 m

No.	STA	Lokasi DPT dari badan jalan	
		Perencanaan	Terealisasi
2	0 + 10	1,5 m	2,1 m
3	0 + 20	1,5 m	3,4 m
4	0 + 30	1,5 m	5,4 m
5	0 + 40	1,5 m	8,0 m
6	0 + 50	1,5 m	9,2 m
7	0 + 60	1,5 m	9,2 m
8	0 + 70	1,5 m	8,7 m
9	0 + 76	1,5 m	8,8 m

Gambar I. 2 Lokasi DPT dari Badan Jalan Utama

PPK dan PPTK menjelaskan pergeseran lokasi awal disebabkan pada saat proses pekerjaan fondasi *bore pile* ditemukan terdapat pipa PDAM dan pipa Telkom yang berada di bawah tanah sepanjang STA DPT 0+10 sd 0+76. Karena pipa tersebut masih aktif dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan, maka lokasi konstruksi DPT disesuaikan untuk menghindari pipa tersebut.

Lebih lanjut PPK dan PPTK menjelaskan bahwa pada akhir Desember 2024 saat pelaksanaan pekerjaan timbunan tanah samping DPT, terjadi indikasi pergerakan tanah yang diketahui dari penurunan permukaan tanah. Atas hal tersebut, menyebabkan retaknya struktur DPT dan potensi penurunan elevasi pada konstruksi DPT. Foto visual indikasi penurunan tanah disajikan pada **Gambar I.3.**

Gambar I. 3 Indikasi Penurunan Tanah Timbunan

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan tim pemeriksa menunjukkan atas konstruksi DPT ditemukan kondisi keretakan pada struktur di STA DPT 0+20 sampai dengan STA 0+30 karena indikasi penurunan tanah yang dapat dilihat pada **Gambar I.4.**

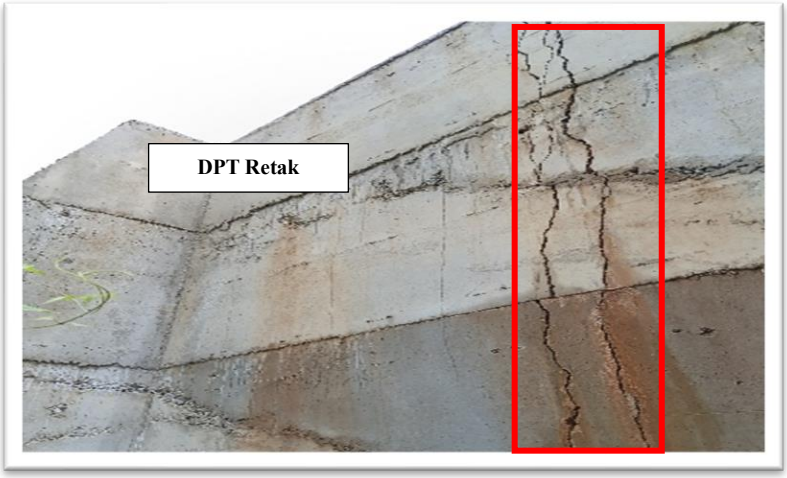

Gambar I. 4 Konstruksi DPT mengalami keretakan

PPK dan PPTK menjelaskan indikasi penurunan tanah tersebut disebabkan oleh karakteristik jenis tanah di lokasi merupakan tanah lempung yang merupakan tanah dengan daya dukung rendah, jenuh air sehingga tanah menjadi plastis dan tidak stabil saat dibebani. Dalam pelaksanaan pekerjaan PPK tidak menginstruksikan kepada penyedia supaya melakukan pengujian penyelidikan tanah ulang di lokasi yang baru untuk menyesuaikan kondisi lapangan yang mengalami pergeseran dari perencanaan awal.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada:

   1) Pasal 47:

      a) Ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa kegiatan perancangan paling sedikit meliputi pemilihan standar dan metode perancangan, pelaksanaan perancangan dan penyajian hasil perancangan Konstruksi; dan

      b) Ayat (5) yang antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan perancangan menggunakan data perencanaan dan data perancangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

   2) Pasal 75:

      a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi; dan

      b) Ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

   1) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan;

   2) Pasal 27 ayat (6) huruf (b) yang menyatakan bahwa pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;

   3) Pasal 78:

      a) Ayat 3 huruf (d) yang menyatakan bahwa dalam hal penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, penyedia dikenakan sanksi administratif; dan

      b) Ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, pada Lampiran II Angka Romawi VII dan VIII:

   1) Angka 7.13 huruf a, yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh pejabat penandatanganan kontrak;

   2) Angka 7.13 huruf b, yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;

   3) Angka 8.1 huruf b, yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan serah terima, pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis; dan

   4) Angka 8.1 huruf c, yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

d. Klausul pada masing-masing Surat Perjanjian/Kontrak dan/atau SSUK pada Pasal Hak dan Kewajiban Penyedia yang menyatakan bahwa hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

   1) Huruf a, menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

   2) Huruf e, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas *item* pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai kontrak Pembangunan SMPN 11 (Tahap III) berupa pekerjaan siring dan timbunan tanah luar bangunan senilai Rp1.041.089.586,37;

b. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan Pembangunan SMPN 11 Tahap III senilai Rp47.653.115,32;

c. Asersi keterjadian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan atas pekerjaan siring dan timbunan tanah luar bangunan senilai Rp1.041.089.586,37 pada TA 2024 tidak terpenuhi;

d. Nilai buku Aset Tetap - Gedung dan Bangunan pada pekerjaan Pembangunan SMPN 11 (Tahap III) tidak menggambarkan kondisi riil atas penggunaan aset selama satu tahun;

e. Risiko kerusakan lebih lanjut terhadap konstruksi DPT pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Mamburungan - Karungan; dan

f. Pemerintah Kota Tarakan berisiko mendapatkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak.

Hal tersebut disebabkan:

a. PPK pada Disdik tidak:

   1) Mematuhi ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait syarat pembayaran yang dilakukan sesuai dengan hasil pekerjaan dalam kontrak;

   2) Mempertimbangkan dampak dari pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak terhadap pengakuan dan pencatatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan; dan

   3) Melaksanakan tupoksinya mengendalikan pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

b. PPK pada DPUPR tidak melaksanakan tupoksinya:

   1) Mengevaluasi dan mengendalikan perencanaan teknik dan preservasi jalan; dan

   2) Mengendalikan pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan:

a. Kepala Disdik untuk menginstruksikan PPK supaya:

   1) Mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam melaksanakan pembayaran sesuai dengan hasil pekerjaan dalam kontrak;

   2) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan SKPD terkait lainnya untuk mengatasi dampak dari adanya pelaksanaan pekerjaan yang mendahului kontrak; dan

   3) Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp1.088.742.701,69 dan menyetorkan ke kas daerah.

b. Kepala DPUPR untuk menunjuk penilai ahli supaya menetapkan kelayakan konstruksi bangunan sesuai fungsi dan peruntukan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Mamburungan – Karungan.

D. ASET

1. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah Belum Optimal

Neraca Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2024 menyajikan saldo Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah masing-masing senilai Rp63.465.528.714,79 dan Rp2.117.565.706,00. Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah tersebut mengalami kenaikan masing-masing senilai Rp3.068.142.507,26 dan Rp710.486.203,00 atau 5,08% dan 50,49% dibandingkan Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah tahun 2023 senilai Rp60.397.386.207,53,00 dan Rp1.407.079.503,00. Rincian Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel I. 24 Rincian Piutang Pajak dan Piutang Retribusi Tahun 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	**Piutang Pajak**	**63.465.528.714,79**
1	Pajak Hotel	122.762.915,00
2	Pajak Restoran	1.450.976.167,88
3	Pajak Hiburan	139.018.750,00
4	Pajak Reklame	1.823.933.020,18
5	Pajak Galian C	66.393.050,00
6	Pajak PJU	300.003,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	124.277.179,73
8	Pajak Parkir	5.278.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	59.732.589.629,00
B	**Piutang Retribusi**	**2.117.565.706,00**
1	Pengendalian Menara Telekomunikasi	170.124.700,00
2	Izin Gangguan	814.524.443,00
3	Pelayanan Kepelabuhanan	13.207.330,00
4	Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	6.000.000,00
5	Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	355.044.443,00
6	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.122.000,00
7	Pemakaian Kekayaan Daerah	554.173.010,00
8	Pemakaian Laboratorium	215.000,00
9	Pemanfaatan Aset Daerah	4.200.000,00
10	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.800.000,00
11	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.917.120,00
12	Penyewaan Bangunan	87.750,00
13	Penyewaan Tanah dan Bangunan	171.149.910,00

Berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara atas LKPD Kota Tarakan TA 2023 Nomor 68.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, BPK menemukan permasalahan penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum dilaksanakan secara tertib. Atas kondisi tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPKPAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pendapatan supaya:

a. Lebih cermat dalam melakukan verifikasi (*cleansing*) atas kebenaran data subjek dan objek pajak PBB-P2;

b. Lebih cermat mengendalikan dan mengawasi pemungutan PBB-P2;

c. Menyusun sistem pengendalian dalam pengelolaan *database* PBB-P2;

d. Lebih cermat memutakhirkan data serta memverifikasi penetapan PBB-P2;

e. Berkoordinasi dengan WP yang Objek Pajaknya bukan merupakan Objek Pajak PBB-P2 terkait pemutakhiran data dan penghapusan tagihan;

f. Berkoordinasi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pemutakhiran data perubahan status kepemilikan; dan

g. Lebih optimal dalam pemungutan PBB-P2 Kota Tarakan.

Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2024 diketahui bahwa tindak lanjut Pemerintah Kota Tarakan atas permasalahan tersebut belum sepenuhnya sesuai rekomendasi, yaitu belum terdapat SK Wali Kota Tarakan terkait penghapusan piutang PBB-P2, belum terdapat laporan hasil koordinasi WP dan *cleansing* Objek Pajak yang bukan merupakan Objek Pajak PBB-P2, dan belum terdapat data hasil koordinasi terkait pemutakhiran data perubahan status kepemilikan dengan ATR/BPN

Hasil pemeriksaan atas rincian daftar Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, reviu dokumen serta permintaan keterangan dari pejabat terkait atas pengelolaan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Rincian Piutang PBB-P2 di Neraca lebih kecil dibandingkan nominal pada SIP-PBB senilai Rp620.163.900,00

Pemerintah Kota Tarakan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan PBB (SIP-PBB) dalam pengelolaan PBB-P2 sejak tahun 2013. Aplikasi ini mengelola PBB-P2 mulai dari pendaftaran, perekaman, pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan pelaporan pembayaran Piutang PBB-P2. Saldo piutang PBB-P2 berdasarkan data SIP-PBB per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp59.732.589.629,00 atas ketetapan pajak tahun 1995-2024.

Pengujian terhadap nilai Piutang PBB-P2 sebagai berikut:

1) Nilai piutang yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2024 merupakan nilai tarikan data dari aplikasi SISMIOP dengan menambahkan nilai ketetapan dan pembayaran yang berasal dari SIP-PBB;

2) Berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara atas LKPD Kota Tarakan TA 2023 Nomor 68.B/LHP/XIX.TJS/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023 senilai Rp584.681.043,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan belum sepenuhnya sesuai rekomendasi; dan

3) Terdapat selisih senilai Rp620.163.900,00 (Rp60.352.753.529,00 – Rp59.732.589.629,00) antara rekapan Piutang PBB-P2 pada SIP-PBB dengan piutang PBB-P2 yang tersaji di Neraca.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan BPKPAD menjelaskan bahwa:

1) Adanya penerimaan pembayaran PBB-P2 yang status pembayarannya tidak terbaca secara otomatis oleh sistem aplikasi dikarenakan jaringan sehingga menyebabkan status pembayaran tidak terbaca; dan

2) Adanya penerimaan pembayaran PBB-P2 melalui transfer atau giro yang langsung ke rekening kas daerah.

b. Piutang atas delapan jenis pajak daerah senilai Rp2.576.947.684,36 tidak didukung data dan dokumen dasar pengakuan dan berpotensi tidak tertagih

Berdasarkan pemeriksaan atas rincian delapan jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Galian C, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir diketahui terdapat saldo piutang senilai Rp2.576.947.684,36 yang telah tercatat sejak Tahun 2004 s.d. 2019 namun tidak didukung dengan informasi/data/dokumen yang lengkap. Rincian piutang pajak tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 25 Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah yang Tidak Memiliki Data Lengkap

No.	Jenis Piutang Pajak Daerah	Nilai (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	122.762.915,00
2	Piutang Pajak Restoran	797.337.691,17
3	Piutang Pajak Hiburan	109.018.750,00
4	Piutang Pajak Reklame	1.393.731.948,06
5	Piutang Galian C	66.393.050,00
6	Pajak Penerangan Jalan	300.003,00
7	Pajak Air Tanah	82.125.330,13
8	Pajak Parkir	5.278.000,00
Jumlah		**2.576.947.687,36**

Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan BPKPAD diketahui bahwa data piutang pajak daerah yang telah tercatat sejak tahun 2004 s.d. 2019 tersebut sulit untuk ditelusuri karena piutang tersebut sebelumnya dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Pengelolaan piutang pajak beralih ke BPKPAD sejak Tahun 2022.

Hasil reviu atas rincian piutang pajak menunjukkan bahwa kertas kerja piutang hanya mencantumkan informasi nama dan tidak mencantumkan informasi alamat WP, sehingga konfirmasi kepada WP sulit dilakukan. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan telah berupaya melakukan pencarian di gudang dan dokumen-dokumen peninggalan BPPRD, namun dokumen tidak dapat ditemukan. Tidak adanya dokumen tersebut menjadi kendala bagi subbidang dalam melakukan penagihan piutang pajak daerah.

c. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan senilai Rp853.418.443,00 berpotensi tidak tertagih

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rincian daftar piutang retribusi daerah diketahui terdapat piutang retribusi daerah senilai Rp853.418.443,00 yang telah tercatat sejak tahun 2007 s.d. 2019, namun tidak didukung dengan informasi/data/dokumen yang lengkap. Piutang pajak tersebut terdiri dari piutang retribusi izin gangguan senilai Rp814.524.443,00 dan piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan senilai Rp38.894.000,00.

Hasil reviu atas daftar piutang, diketahui piutang tersebut merupakan saldo piutang yang tercatat sejak tahun 2007 s.d. 2019, dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 26 Rincian Piutang Retribusi Daerah Tidak Didukung Data/Data Lengkap

No.	Jenis Piutang Pajak Daerah	Tahun	Nilai (Rp)
1	Retribusi Izin Gangguan	2007	74.688.820,75
		2008	38.275.712,00
		2009	53.297.856,35
		2010	63.571.627,40
		2011	4.899.192,50
		2012	116.715.954,00
		2013	173.871.660,00
		2014	3.104.620,00
		2015	2.205.000,00
		2016	283.894.000,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2016	13.064.000,00
		2017	24.750.000,00
		2019	1.080.000,00
Jumlah			**853.418.443,00**

Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan BPKPAD diketahui bahwa data piutang retribusi izin gangguan dan retribusi penyewaan tanah dan bangunan telah tercatat sejak tahun 2007 s.d. 2019, seperti halnya piutang pajak daerah, informasi/data/dokumen pendukung piutang retribusi tersebut sulit untuk ditelusuri karena sebelumnya dikelola oleh BPPRD hingga Tahun 2022.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 198 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.

b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 01 Kerangka Konseptual Paragraf 38 yang menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

c. PMK Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Negara pada:

   1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

      a) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau

      b) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

   2) Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:

a) Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;

b) Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;

c) Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/ atau

d) Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut mengakibatkan saldo piutang pajak daerah senilai Rp3.197.111.587,36 (Rp620.163.900,00 + Rp2.576.947.687,36) dan piutang retribusi daerah senilai Rp853.418.443,00 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan:

a. Wali Kota Tarakan belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas permasalahan Piutang PBB-P2; dan

b. Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan BPKPAD tidak melakukan tupoksinya dalam mengelola piutang pajak dan retribusi daerah yang berada dalam pengelolaannya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas permasalahan Piutang PBB-P2 dan memerintahkan kepala BPKPAD untuk menginstruksikan Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan supaya meningkatkan pengelolaan atas piutang pajak dan retribusi daerah yang berada dalam pengelolaannya.

2. Penatausahaan dan Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kota Tarakan Tidak Tertib

Neraca Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2024 menyajikan saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir senilai Rp3.077.613.647,31. Saldo tersebut mengalami peningkatan senilai Rp11.435.000,00 atau 0,37% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp3.066.178.647,31 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel I. 27 Rincian Saldo Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Investasi Non Permanen Dana Bergulir	4.964.457.454,00	4.964.457.454,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (macet 100%)	(1.886.843.806,69)	(1.898.278.806,69)
Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV)	**3.077.613.647,31**	**3.066.178.647,31**

Berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara atas LKPD Kota Tarakan TA 2021 Nomor 62.B/LHP/XIX.TJS/IV/2022 tanggal 28 April 2022, BPK menemukan permasalahan dalam pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan senilai Rp715.161.685,33 berpotensi tidak tertagih dan diantaranya senilai Rp8.018.902,09 tidak diyakini kewajarannya. Atas kondisi tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan

agar memerintahkan Ketua Pokja DBEK untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelunasan piutang dana bergulir. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2024 diketahui bahwa tindak lanjut Pemerintah Kota Tarakan atas permasalahan tersebut belum selesai atau belum sesuai rekomendasi.

Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan (DBEK) merupakan perkuatan permodalan dalam bentuk dana bergulir dari Pemerintah Kota Tarakan kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil yang bersumber dari APBD Kota Tarakan. Setelah tahun 2017, Pemerintah Kota Tarakan tidak lagi menggulirkan DBEK. Untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan Dana Bergulir, Pemerintah Kota Tarakan melalui Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan pada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Tarakan membentuk Tim Pengarah, Kelompok Kerja (Pokja) DBEK dan Tim Negosiator, yang bertugas antara lain:

a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

b. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan Dana Bergulir setiap triwulan kepada Wali Kota.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pokja, dibentuk sekretariat Pokja yang berkedudukan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) yang sekarang menjadi DKUKMP dengan susunan keanggotaan pegawai pada Bidang Koperasi dan UKM yang ditunjuk/diangkat oleh Kepala Dinas DKUKMP Kota Tarakan selaku Ketua Pokja. Tugas dari sekretariat antara lain melakukan kegiatan administrasi/penatausahaan program DBEK Kota Tarakan.

Penyaluran DBEK dilakukan melalui Bankaltimtara sebagai bank pelaksana penyaluran dan penerimaan DBEK sesuai dengan perjanjian kerja sama nomor 119/05-PEM/III/2022 dan 856/C-2/BPD-TRK/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan berlaku tiga tahun sejak tanggal ditandatangani PKS. Bankaltimtara berkewajiban antara lain:

a. Menyalurkan DBEK kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dinyatakan layak oleh Pokja DBEK yang dilampiri proposal pengajuan pinjaman dan surat berharga sebagai jaminan;

b. Melakukan Penataan administrasi keuangan berupa data penyaluran dan realisasi DBEK;

c. Membantu memberikan informasi penyelesaian tagihan apabila penerima kredit tidak lancar dalam pengembalian angsuran; dan

d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi per-triwulan dan tahunan terhadap kinerja Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil kepada Pokja DBEK dengan tembusan kepada Wali Kota Tarakan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan DBEK tahun 2024 menunjukkan beberapa permasalahan, sebagai berikut.

a. Kebijakan akuntansi mengenai penentuan besaran penyisihan dana bergulir belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tarakan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan termasuk BLUD dalam menyusun Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar entitas dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

Hasil reviu atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tarakan diketahui terdapat pengaturan tentang penentuan besaran penyisihan dana bergulir yang belum sesuai dan/atau tidak diatur dibandingkan dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 28 Hal-Hal yang Belum Sesuai dan/atau Diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan tentang Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir

Uraian	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan (Perwali No. 35/2022)	Permendagri Nomor 73 Tahun 2015	Keterangan
Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir	Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria: a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan. Besaran Penyisihan Dana Bergulir 50%	Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)	Belum sesuai karena Perwali belum mempertimbangkan nilai agunan
	Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria: a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*). Besaran Penyisihan Dana Bergulir 100%	Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)	Belum sesuai karena Perwali belum mempertimbangkan nilai agunan

Berdasarkan keterangan dari Kepala Subbidang Pelaporan Keuangan BPKPAD diketahui pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tarakan sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Lampiran Perwali Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual telah terdapat pengaturan tentang penentuan kualitas dana bergulir dengan memperhitungkan nilai agunan atau barang sitaan. Namun, pada kebijakan akuntansi yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2022, besaran penyisihan dana bergulir disajikan dalam bentuk tabel sehingga kebijakan atas penentuan besaran penyisihan dana bergulir menjadi tidak tersaji.

b. DKUKMP belum mengadministrasikan data/informasi debitur DBEK dengan lengkap dan mutakhir

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data penerima DBEK yang menunggak, diketahui bahwa data debitur DBEK yang dimiliki oleh DKUKMP hanya atas nama, alamat, sektor sampai dengan data jaminan tetapi tidak dilengkapi dengan nomor identitas dan

nomor telepon yang dapat dihubungi. Dokumen atas identitas debitur hanya dimiliki oleh Bank Kaltimtara dan tidak disajikan dalam laporan pembayaran tunggakan yang dilaporkan ke DKUKMP.

Hasil pendataan ulang bersama DKUKMP dibantu oleh kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan diperoleh data pada tabel sebagai berikut.

Tabel I. 29 Hasil Pendataan Ulang Atas Debitur DBEK yang Menunggak Per 31 Desember 2024

Hasil Pendataan Ulang	Jumlah Debitur	Nilai Tunggakan (Rp)
Ditemukan	40	731.597.654,57
Meninggal Dunia	10	125.954.998,67
Pindah Domisili	8	134.454.200,97
Tidak Ditemukan	21	383.834.533,48
Penagihan telah diserahterimakan kepada KPKNL	5	511.002.419,00
Jumlah	**84**	**1.886.843.806,69**

Atas data debitur DBEK yang ditemukan sebagian telah berpindah alamat tetapi masih berada di Kota Tarakan. Rincian atas hasil pendataan ulang debitur DBEK dapat dilihat pada **Lampiran 15 s.d. 19**

Berdasarkan permintaan keterangan kepada Plt. Kepala Bidang Koperasi dan UKM DKUKMP diketahui tidak dilakukannya pemutakhiran data debitur DBEK karena adanya keterbatasan administrasi sekretariat, mengingat dokumen dan berkas debitur merupakan arsip lama serta adanya pergantian pegawai yang menangani pengelolaan DBEK dari waktu ke waktu, sehingga memengaruhi kontinuitas pencatatan dan dokumentasi.

c. Terdapat perbedaan nilai tunggakan DBEK dengan hasil konfirmasi

Hasil konfirmasi tim pemeriksa bersama DKUKMP dan Inspektorat kepada delapan debitur DBEK, diketahui debitur atas nama HK berdasarkan data debitur menunggak senilai Rp3.178.000,00, telah melunasi pinjaman DBEK dan memperoleh kembali jaminan berupa Surat Izin Memakai Tanah Negara (SIMTN). Atas hal ini telah dilakukan konfirmasi dengan Bankaltimtara, dan ditelusuri berdasarkan data mutasi rekening DBEK terdapat keterangan pelunasan atas nama HK Tanggal 30 Januari 2018. Sampai pemeriksaan berakhir Bank Kaltimtara masih menelusuri dokumen pendukung atas pelunasan tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan rekening penampungan sementara atas penerimaan angsuran DBEK yang dimiliki Bank Kaltimtara per 31 Desember 2024 diketahui terdapat mutasi kredit atau setoran Rp1.837.444,44 yang belum dipindahkan ke rekening DBEK milik DKUKMP. Berdasarkan keterangan Bank Kaltimtara, angsuran dibayarkan dengan transfer dari bank lain sehingga kesulitan untuk menemukan debitur yang menyetorkan dana tersebut.

d. Terdapat debitur DBEK yang tidak dilengkapi dengan dokumen jaminan

Berdasarkan data debitur DBEK Kota Tarakan diketahui terdapat tiga debitur dengan tunggakan macet yang penyalurannya tanpa dilengkapi dengan dokumen jaminan sebagai berikut.

Tabel I. 30 Debitur yang Penyalurannya Tidak dilengkapi dengan Jaminan

No.	Debitur	Tanggal cair	Jatuh Tempo	Nilai Tunggakan (Rp)
1	J	30 Januari 2004	30 Januari 2006	2.386.000,00
2	S	28 Oktober 2005	28 Oktober 2007	4.544.000,00
3	KSA	28 Oktober 2005	28 Oktober 2007	4.315.901,00
Jumlah				**11.245.901,00**

Hasil peninjauan lapangan yang dilakukan tim pemeriksa bersama dengan DKUKMP dan Inspektorat atas jaminan yang tersimpan pada Bankaltimtara terdapat enam debitur yang terdata masih menunggak dan dilengkapi jaminan tetapi dokumen jaminan tidak ditemukan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel I. 31 Debitur yang Masih Menunggak Tetapi Dokumen Jaminan Tidak Ditemukan

No.	Debitur	Tanggal cair	Jatuh Tempo	Nilai Tunggakan (Rp)	Jenis Jaminan
1	H	12 April 2012	12 April 2014	39.466.664,00	SHM Tanah
2	HK	17 Desember 2015	17 Desember 2017	3.178.000,00	Tanah dan Bangunan dengan SIMTN
3	AS	28 Agustus 2002	28 November 2004	7.499.998,00	BPKB Kendaraan roda empat
4	E	28 Agustus 2002	22 November 2004	9.583.333,00	Tnh&Bngn SP tgl.13 Januari 1992 a.n. M
5	Kube Pers. Angkot Jalur F/AA	15 Maret 2005	15 Maret 2007	22.726.000,00	Tnh.ksg SKUMTDSK a.n. Su
6	Kube Pers. Angkot Jalur F/MY	15 Maret 2005	15 Maret 2007	20.000.000,00	BPKB Kendaraan roda empat
Jumlah				**102.453.995,00**	

Hingga pemeriksaan berakhir tanggal 13 Mei 2025, dokumen jaminan tersebut masih dilakukan penelusuran oleh Bank Kaltimtara dan DKUKMP.

Hasil konfirmasi yang dilakukan tim pemeriksa bersama DKUKMP dan Inspektorat kepada delapan debitur DBEK, diketahui debitur atas nama RS berdasarkan data debitur menunggak senilai Rp11.356.000,00 dengan jaminan berupa BPKB motor, sudah tidak memiliki secara fisik motor yang diajukan sebagai jaminan tersebut.

e. Upaya penyelesaian tunggakan DBEK senilai Rp1.886.843.806,69 belum optimal

Pemerintah Kota Tarakan menyajikan tunggakan DBEK senilai Rp1.886.843.806,69, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel I. 32 Rincian data Debitur yang Menunggak Per 31 Desember 2024

Tunggakan	Jumlah Debitur	Nilai (Rp)
< Rp8.000.000,00	22	104.935.435,48
Diatas Rp8.000.000,00	62	1.781.908.371,21
Jumlah	**84**	**1.886.843.806,69**

Rincian data debitur yang menunggak dapat dilihat pada **Lampiran 20** dan **21**.

Atas tunggakan tersebut, selama tahun 2024 Pemerintah Kota Tarakan belum melakukan upaya penagihan atas tunggakan macet secara tertulis melalui surat tagihan dan/atau dengan kegiatan optimalisasi penagihan. Lebih lanjut diketahui, Pemerintah Kota Tarakan pernah menyerahkan penagihan kepada KPKNL atas lima debitur yang memiliki sisa kewajiban/tunggakan di atas Rp8.000.000,00. Namun, penyelesaian tunggakan tersebut masih berlarut-larut karena rekomendasi KPKNL belum ditindaklanjuti DKUKMP yaitu melakukan penagihan minimal sebanyak tiga kali.

Plt. Kepala Bidang Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa selama tahun 2024 tidak terdapat upaya penagihan kepada debitur DBEK yang menunggak senilai Rp1.886.843.806,69 karena adanya pergantian pejabat dan yang saat ini menjabat adalah pejabat teknis yang sebelumnya tidak menangani UKM dan DBEK. Selain itu tidak aktifnya pokja DBEK mengakibatkan penagihan tidak dilakukan secara optimal. Pemantauan yang dilakukan hanya atas pembayaran tunggakan berdasarkan data laporan Bank Kaltimtara setiap bulannya.

Selain itu, Pemerintah Kota Tarakan belum menetapkan kebijakan penyelesaian atas DBEK dengan kategori macet terutama bagi debitur dengan sisa kewajiban di bawah Rp8.000.000,00, yang sudah meninggal, pindah alamat atau yang tidak dapat ditemukan, baik dalam bentuk sita jaminan hingga penghapusan tunggakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Pasal 2:

   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam perundang-undangan; dan

   2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih negara/daerah.

b. Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana bergulir pada:

   1) Pasal 13 yang menyatakan bahwa penentuan besaran penyisihan dana bergulir diantaranya diklasifikasikan atas:
      a) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

      b) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

   2) Pasal 16 pada:
      a) Ayat (1) yang menyatakan penghapusan dana bergulir meliputi:
         (1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
         (2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.

      b) Ayat (2) yang menyatakan penghapusan dana bergulir berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada:

1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:

   a) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau

   b) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

2) Pasal 5 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang:

   a) Menetapkan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah; dan

   b) Menugaskan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai Peraturan Menteri ini.

3) Pasal 7 pada:

   a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:

      1)) Penghapusan Secara Bersyarat; dan

      2)) Penghapusan Secara Mutlak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

4) Pasal 8 pada:

   a) Ayat (1) yang antara lain menyatakan bahwa penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan;

   b) Ayat (2) yang antara lain menyatakan bahwa upaya penagihan dilakukan dengan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan dan/atau penagihan dengan kegiatan optimalisasi;

   c) Ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa penagihan secara tertulis dengan surat tagihan wajib dilakukan; dan

   d) Ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa penagihan dengan kegiatan optimalisasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan pada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Tarakan pada:

1) Pasal 5 Ayat (2) huruf e yang menyatakan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan merupakan dana yang disalurkan dengan memenuhi karakteristik bersifat pinjaman lunak yang wajib dikembalikan oleh penerima dana bergulir dan dibukukan sebagai hutang untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun; dan

2) Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) huruf (j) yang menyatakan bahwa Kelompok Kerja Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan memilik tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

e. Keputusan Ketua Tim Kelompok Kerja DBEK Kota Tarakan Nomor 500/1302.a/DBEK/DPPK&UMKM tentang Penunjukan sekretariat Kelompok Kerja DBEK Kota Tarakan Diktum KEDUA yang menyatakan bahwa tugas ketua/sekretaris sekretariat dan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU antara lain pada poin (5) melakukan kegiatan administrasi/penatausahaan program DBEK Kota Tarakan.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Penyajian saldo Dana Bergulir senilai Rp3.077.613.647,31 belum mencerminkan Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV) yang sebenarnya;

b. Penyisihan DBEK berkategori diragukan dan macet yang belum memperhitungkan nilai agunan/jaminan berpotensi salah saji;

c. Tunggakan DBEK senilai Rp1.886.843.806,69 berpotensi tidak dapat tertagih; dan

d. Jaminan atas piutang berpotensi tidak dapat dieksekusi untuk menutupi piutang yang macet dan bermasalah.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala DKUKMP selaku ketua pokja DBEK belum optimal melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan tunggakan DBEK yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Kepala Bidang Akuntansi BPKPAD:

1) Dalam menyusun kebijakan akuntansi belum sepenuhnya memedomani Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir; dan

2) Belum memperhitungkan nilai agunan/jaminan sebagai komponen pengurang penyisihan DBEK berkategori diragukan dan macet.

c. Bank Kaltimtara selaku bank pelaksana penyaluran dan penerimaan DBEK belum menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan:

a. Kepala DKUKMP selaku ketua Pokja DBEK supaya:

1) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan tunggakan DBEK yang menjadi tanggung jawabnya; dan

2) Berkoordinasi dengan Bank Kaltimtara selaku bank pelaksana penyaluran dan penerimaan DBEK menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

b. Kepala Bidang Akuntansi BPKPAD:

1) Agar menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan memedomani Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir; dan

2) Memperhitungkan nilai agunan/jaminan sebagai komponen pengurang penyisihan DBEK berkategori diragukan dan macet.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan Belum Memadai

Neraca Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2024 menyajikan saldo Aset Tetap senilai Rp5.093.987.698.030,63. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp6.251.238.670,10 atau 0,12% dibandingkan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp5.100.238.936.700,73. Berdasarkan penyajian pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 terdiri dari enam jenis Aset Tetap dengan rincian mutasi pada tabel berikut.

Tabel I. 33 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Aset	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Persentasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)=(3)-(4)*	*(6)=(5)/(4)x100%*
1	Tanah	2.158.674.371.945,00	2.185.318.151.262,00	(26.643.779.317,00)	(1,22)
2	Peralatan dan Mesin	595.394.778.865,32	552.928.049.826,43	42.466.729.038,89	7,68
3	Gedung dan Bangunan	2.751.787.450.162,91	2.663.750.139.489,32	88.037.310.673,59	3,31
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.817.921.099.216,89	2.702.269.781.293,32	115.651.317.923,57	4,28
5	Aset Tetap Lainnya	15.600.663.301,20	15.155.179.301,20	445.484.000,00	2,94
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.845.610.173,49	13.396.887.346,15	20.448.722.827,34	152,64
Nilai Perolehan Aset Tetap		**8.373.223.973.664,81**	**8.132.818.188.518,42**	**240.405.785.146,39**	**2,96**
7	Akumulasi Penyusutan	(3.279.236.275.634,18)	(3.032.579.251.817,69)	(246.657.023.816,50)	8,13
Jumlah		**5.093.987.698.030,63**	**5.100.238.936.700,73**	**(6.251.238.670,10)**	**(0,12)**

Berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara atas LKPD Kota Tarakan TA 2023 Nomor 68.A/LHP/XIX.TJS/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, BPK menemukan permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu penatausahaan BMD belum memadai dan pemanfaatan BMD oleh pihak lain belum sesuai ketentuan. Atas kondisi tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tupoksinya sebagai pengelola barang milik daerah dan segera melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait pengelolaan BMD;

b. Kepala DPRKPP untuk menginstruksikan pejabat terkait melakukan pencatatan nilai bidang tanah sesuai hasil inventarisasi Utang Jangka Pendek Lainnya;

c. Kepala SKPD terkait selaku pengguna barang untuk:

   1) Mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya; dan

   2) Menginstruksikan pengurus barang pengguna pada masing-masing unit kerja yang dipimpinnya untuk memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penatausahaan BMD sesuai tupoksi utamanya dalam menertibkan pembuatan KIR penyajian informasi Kartu Inventaris Barang (KIB) BMD dan penatausahaan BMD yang dalam kondisi rusak berat.

d. Kepala SKPD terkait bersama Kepala BPKPAD sebagai pejabat penatausahaan barang daerah untuk melakukan koordinasi dengan instansi lainnya terkait pencatatan BMD yang sudah di BAST dan yang tercatat di instansi lain.

Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2024 diketahui bahwa tindak lanjut Pemerintah Kota Tarakan atas permasalahan tersebut belum sesuai rekomendasi disebabkan belum terdapat dokumen antara lain surat usulan pemanfaatan BMD yang digunakan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan laporan rekonsiliasi aset rusak berat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMD Tahun 2024 ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Pencatatan Aset Tetap Tanah pada Kartu Inventaris Barang e-BMD belum mencantumkan informasi secara lengkap dan akurat

Hasil pemeriksaan atas daftar Aset Tetap Tanah Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024 menunjukkan masih terdapat pencatatan yang belum mencantumkan informasi secara lengkap. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1) Terdapat tujuh persil bidang tanah yang tercatat dalam e-BMD memiliki luasan yang lebih kecil dibandingkan dengan luasan yang tertera pada sertifikat. Rincian Aset Tetap Tanah tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel I. 34 Daftar Aset Tetap Tanah Dengan Perbedaan Pencatatan Luas Antara e-BMD dan Sertifikat

No.	Penggunaan	Nomor Sertifikat	Luas dalam Sertifikat (m2)	Luas dalam e-BMD (m2)
1	Gedung Dinas Pendidikan	16.06.**.06.4.00***	984	969
2	SDN 019 Karang Anyar Pantai	16.07.**.04.4.00***	4.340	2.000
3	SMPN 1 Pamusian	16.07.**.02.4.00***	21.340	2.134
4	SMPN 7 Pamusian	16.07.**.02.4.00***	13.000	1.300
5	SMPN 8 Karang Harapan	16.07.**.03.4.00***	6.806	1.000
6	SDN II Pamusian	16.07.**.02.4.00***	6.125	169,75
7	SMPN 6 Juata Laut	16.07.**.01.4.00***	7.269	7.029

2) Terdapat 32 persil tanah yang telah memiliki sertifikat, namun informasi nomor sertifikat belum dicatat dalam e-BMD

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 32 persil tanah yang telah memiliki sertifikat, namun informasi nomor sertifikat belum dicatat dalam e-BMD. Atas

32 persil tanah tersebut terdiri dari 12 sertifikat tanah sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel I. 35 Daftar Aset Tetap Tanah dengan Nomor Sertifikat Belum Tercatat pada e-BMD

No	Penggunaan	Nomor Sertifikat	Keterangan
1	Tanah Kantor Kel. Selumit Pantai	16.07.**0007***.0	Dari 1 persil tanah
2	Tanah SMPN. 12	16.07.**.04.4.00***	Dari 2 persil tanah
3	Tanah Fasum/Fasos Kel.Lingkas Ujung	16.07.**0007***.0	Dari 9 persil tanah
4	Tanah TPA Aki Babu	16.07.**.04.4.00***	Dari 9 persil tanah
5	Tanah Jl SDN.049	16.07.**.01.4.00***	Dari 2 persil tanah
6	Tanah Perluasan SDN.006 Kp.4	16.07.**.03.4.00***	Dari 1 persil tanah
7	Tanah Lahan Cadangan Juata Krikil	16.07.**0005***.0	Dari 2 persil tanah
8	Tanah Posyandu Sebengkok RT.30	16.07.**0006***.0	Dari 1 persil tanah
9	Tanah eks Kantor Kel. Selumit	16.07.**.05.4.00***	Dari 1 persil tanah
10	Tanah Fasum Pamusian	16.07.**.02.4.00***	Dari 1 persil tanah
11	Tanah eks Kantor Kel. Mamburungan	16.07.**.05.4.00***	Dari 2 persil tanah
12	Tanah Kantor Kel. Karang Harapan	16.07.**.01.4.00***	Dari 1 persil tanah

(**Rincian dapat dilihat pada Lampiran 22**)

Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset diketahui bahwa ketidaksesuaian antara luas tanah yang tercatat dalam e-BMD dan atas aset tetap tanah yang telah memiliki sertifikat namun belum dicatat pada e-BMD disebabkan pengurus barang belum melakukan rekonsiliasi dengan Bidang Aset BPKPAD. Pengurus Barang harus melakukan verifikasi awal terlebih dahulu atas luas tanah dan nomor sertifikat dengan Subbidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Aset selanjutnya setelah data sesuai disampaikan ke Subbidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset.

Hasil wawancara dengan Pengurus Barang SKPD terkait diketahui bahwa Pengurus Barang tidak melakukan konfirmasi dan pengecekan kembali atas luas tanah dan nomor sertifikat ke Bidang Aset BPKPAD untuk memastikan bahwa pencatatan telah sesuai.

b. Terdapat satu bidang tanah senilai Rp5.008.000.000,00 yang tidak dapat dipastikan keberadaannya dan satu bidang tanah senilai Rp1.887.600.000,00 dikuasai oleh pihak lain

Aset tetap tanah merupakan salah satu jenis aset tetap berwujud yang memiliki karakteristik khusus antara lain tidak mengalami penyusutan dan harus dikelola dengan prinsip legalitas, keteraturan administrasi, serta kejelasan status kepemilikan.

Hasil pemeriksaan atas keberadaan dan penguasaan tanah milik Pemerintah Kota Tarakan ditemukan permasalahan, sebagai berikut:

1) Terdapat satu bidang tanah senilai Rp5.008.000.000,00 yang tidak dapat dipastikan keberadaannya

Dalam KIB A BPKPAD pada e-BMD diketahui terdapat satu persil tanah dengan luas 8 m x 10 m yang diperoleh dari hibah Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 1998, dengan spesifikasi nama barang: tanah bangunan pasar, berlokasi di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara dengan nilai perolehan Rp5.008.000.000,00. Hasil peninjauan lapangan bersama staf Subbidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Aset BPKPAD dan Inspektorat tanggal 25 April 2025 diketahui bahwa lokasi tersebut bukan merupakan pasar tetapi merupakan kawasan fasilitas umum berupa masjid. Kepala Subbidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Aset yang mendampingi tim pemeriksa tidak dapat memastikan lokasi sebenarnya dari bidang tanah dimaksud.

Hasil pemeriksaan terhadap bukti penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Pemerintah Kota Tarakan sesuai BAST Nomor 028/190/PLK-XII/1998 tentang Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota madya Daerah Tingkat II Tarakan pada halaman 4, Tanah dan Gedung Bangunan menunjukkan keterangan jenis barang Tanah Bangunan Pasar Juata Laut dengan ukuran 8 m x 10 m dengan keterangan di Desa Juata Laut tanpa mencantumkan nilai perolehan atas tanah tersebut.

2) Terdapat satu bidang tanah senilai Rp1.887.600.000,00 dikuasai pihak lain

Dalam KIB A BPKPAD pada e-BMD diketahui terdapat satu persil tanah dengan ukuran 30 m x 40 m yang diperoleh dari Hibah Kabupaten Bulungan pada Tahun 1998, dengan spesifikasi nama barang: tanah bangunan pertokoan/rumah toko/koperasi berlokasi di kelurahan Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah dengan nilai perolehan Rp1.887.600.000,00. Hasil peninjauan lapangan bersama Subbidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Aset BPKAD dan Inspektorat tanggal 25 April 2025 diketahui bahwa lokasi tersebut berupa tanah dengan ukuran 23 m x 24 m dan terdapat bangunan rumah yang digunakan oleh pihak lain, namun dalam keadaan kosong.

Berdasarkan BAST Nomor 028/190/PLK-XII/1998 tentang Daftar Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan yang diserahkan Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan pada halaman 4, Tanah dan Gedung Bangunan menunjukkan keterangan jenis barang tanah bangunan rumah dengan ukuran 30 m x 40 m dengan keterangan Jl Sebengkok Waru.

Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Aset terkait dengan aset tanah pada pasar juata dengan luas 8 m x 10 m dijelaskan bahwa atas lokasi tanah yang telah dihibahkan dari Kabupaten Bulungan pada Tahun 1998 tidak mencantumkan lokasi secara spesifik dan tidak terdapat bukti peninjauan lokasi yang dihibahkan, Pemerintah Kota Tarakan mencatat aset tersebut sejak Tahun 2009 dengan berdasarkan BAST yang diberikan Kabupaten Bulungan tanpa melakukan konfirmasi ulang dan peninjauan lokasi bersama Bidang Aset Kabupaten Bulungan.

Lebih lanjut dijelaskan atas aset berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sebengkok Waru diterima sebagai hibah dari Pemerintah Kabupaten Bulungan

pada tahun 1998 dengan luas 30 m x 40 m. Pada tahun 2019, Bidang Aset melakukan inventarisasi terhadap aset tersebut melalui koordinasi dengan Kelurahan Sebengkok untuk memperoleh informasi terkait lokasi tanah yang dimaksud dan status kepemilikan. Hasil koordinasi tersebut mengungkapkan bahwa aset telah dihuni oleh pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Untuk memperoleh informasi terkait penguasaan bangunan tersebut, tanggal 3 Mei 2025 tim pemeriksa melakukan wawancara dengan penghuni bangunan tersebut (istri dari pegawai BMKG). Hasil wawancara diketahui bahwa penghuni mulai menempati sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2023. Penghuni menempati rumah tersebut berdasarkan penugasan yang diberikan kepada suami selaku pegawai BMKG dari Kepala Stasiun Metereologi Kota Tarakan pada Tahun 2012. Penghuni tidak mengetahui bahwa bangunan tersebut masih tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Tarakan. Sampai dengan tanggal 3 Mei 2025, Bidang Aset tidak pernah melakukan konfirmasi kepada penghuni dan BMKG atas status kepemilikan dan penguasaan atas aset tersebut.

Hasil peninjauan lapangan dan pengukuran diketahui luas tanah adalah 23 m x 24 m dengan kondisi bangunan rumah tidak berpenghuni dan tidak terdapat papan nama/plang atas nama Pemerintah Kota Tarakan.

c. Terdapat Aset yang belum dicatat pada Kartu Inventaris Barang e-BMD

Salah satu wewenang dan tanggung jawab Kepala SKPD selaku Pengguna Barang adalah melakukan pencatatan dan inventarisasi aset yang berada dalam penguasaannya. Pencatatan dan inventarisasi dilakukan dalam rangka memudahkan pemeliharaan dan pengamanan aset dimaksud.

Hasil reviu atas pencatatan aset oleh SKPD pada KIB B - Peralatan dan Mesin di e-BMD, diketahui terdapat sebanyak 92 aset pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DPTK) berupa peralatan komputer yang diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas bantuan peralatan pelatihan UPTD TA 2022 belum tercatat dalam e-BMD. Rincian aset yang belum tercatat disajikan pada **Lampiran 23.**

Hasil peninjauan lapangan bersama pengurus barang DPTK dan Inspektorat pada tanggal 14 Maret 2025 diketahui hal sebagai berikut:

1) Diketahui bahwa atas aset berupa peralatan komputer dan peralatan meja sebanyak 92 unit dalam kondisi baik dan telah digunakan untuk pelatihan komputer di Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Latihan Kerja (UPTD LLK). Berdasarkan wawancara dengan pengurus barang DPTK diketahui atas barang berupa peralatan komputer sebanyak 41 unit diterima oleh saudara ES selaku Staf sarana dan prasarana pada bulan Desember 2022 dari PT Central Plotter Indonesia sesuai dengan BAST Nomor /BAST-BLKPL/CPI/12/2022 dan aset berupa peralatan meja diterima pada Bulan Maret 2023 sebanyak 51 unit sesuai dengan BAST Nomor 017/MAR/SPB/INS/2023 dari PT Lancar Berlian Berkah.

2) Atas BAST tersebut, tidak menyebutkan nilai perolehan dari masing-masing barang tersebut, tetapi hanya menyebutkan nama barang, spesifikasi dan

kuantitas barang. Atas hal tersebut Pengurus Barang tidak dapat melakukan pencatatan atas aset tersebut.

3) DPTK belum pernah melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendapatkan dokumen lengkap berupa daftar harga rincian barang atau dokumen kontrak pengadaan untuk dapat mengetahui harga nilai perolehan.

d. Terdapat Aset Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak berat masih dicatat sebagai Aset Tetap dan belum reklasifikasi ke Aset Lainnya

Aset Tetap merupakan aset yang diadakan dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Pemerintah daerah harus menyajikan informasi tentang nilai dan keadaan Aset Tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan penghapusan atas aset - aset yang secara teknis, ekonomis, dan keberadaannya sudah tidak dapat mendukung pelaksanaan pelayanan pemerintahan.

Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat 21 unit aset peralatan dan mesin senilai Rp6.620.628.700,00 pada tiga SKPD berupa alat kesehatan, kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dalam kondisi rusak berat, namun belum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya, sebagaimana disajikan pada **Tabel I.36** dan **Lampiran 24**.

Tabel I. 36 Daftar BMD Rusak Berat

No.	SKPD	Spesifikasi Nama Barang	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
1	RSUKT	*Electro Cardiography*	1	42.900.000,00
2	RSUKT	U S G	2	1.460.250.000,00
3	RSUKT	Lain Alat kedokteran Bedah	1	2.486.000.000,00
4	RSUKT	*Operating Table* Jantung	1	921.389.700,00
5	Dinas Pendidikan	*Station Wagon*	2	381.689.000,00
6	Dinas Pendidikan	Sepeda Motor	7	59.800.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	*Dump Truck*	4	1.235.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	Sepeda Motor	3	33.600.000,00
Jumlah				**6.620.628.700,00**

Hasil wawancara dengan pengurus barang pada SKPD terkait diketahui bahwa atas BMD dalam kondisi rusak tersebut belum dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya dan belum ditindaklanjuti dengan penghapusan karena inventarisasi masih dilakukan sampai dengan akhir Tahun 2024. Sampai dengan Pemeriksaan berakhir belum dilakukan usulan reklasifikasi ke Aset Lainnya.

Lebih lanjut, berdasarkan permintaan keterangan dari Kepala Subbidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset diketahui pengurus barang SKPD belum melaporkan BMD dalam kondisi rusak berat kepada Subbidang Penatausahaan, Pemindatanganan dan Penghapusan Aset BPKPAD sehingga belum terdapat usulan dari SKPD untuk melakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya.

e. Terdapat satu unit Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp168.849.000,00 tanpa status penggunaan yang jelas dan satu unit Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp555.327.000,00 yang dimanfaatkan oleh Perumda Agrobisnis Mandiri tanpa perikatan

Pemanfaatan BMD adalah kegiatan pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas fungsi SKPD dan optimalisasi dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap serta harus dipindahkan ke akun Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Hasil pemeriksaan atas pemanfaatan aset diketahui terdapat BMD yang digunakan oleh pihak lain masih tercatat sebagai Aset Tetap.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait pemanfaatan BMD berupa gedung dan bangunan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Terdapat BMD gedung dan bangunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) yang digunakan oleh DKUKMP tanpa status penggunaan yang jelas

   Berdasarkan pencatatan KIB C pada e-BMD terdapat satu unit aset dengan status penggunaan pada DKPP dengan spesifikasi barang: Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen berupa kios daging ayam di kompleks Pasar Tenguyun Boom Panjang diperoleh dari pendanaan APBD Tahun 2012 dengan nilai perolehan Rp168.849.000,00. Hasil peninjauan lapangan bersama pengurus barang DKPP dan Inspektorat tanggal 25 April 2025 menunjukkan bahwa lokasi tersebut telah digunakan oleh DKUKMP.

   Hasil wawancara dengan pengurus barang menjelaskan bahwa aset tersebut sejak dibangun Tahun 2012 dikelola oleh UPT Pasar tanpa didasari penyerahan atau perubahan status penggunaan aset. Setelah UPT Pasar dibubarkan, aset tersebut beralih ke DKUKMP sampai dengan saat ini.

   Atas hal tersebut status penggunaan yang seharusnya oleh DKPP menjadi beralih ke DKUKMP. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, belum dilakukan koordinasi antara DKPP dengan DKUKMP atas status penggunaan aset tersebut.

2) Terdapat BMD gedung dan bangunan pada DKPP yang digunakan oleh Perumda Agrobisnis Mandiri tanpa dasar perikatan

   Berdasarkan pencatatan KIB C pada e-BMD terdapat satu BMD DKPP dengan spesifikasi barang: Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen yang berupa gedung kantor dan rumah tempat tinggal pegawai diperoleh dari pendanaan APBD Tahun 1995 dengan nilai perolehan Rp555.327.000,00. Hasil peninjauan lapangan bersama pengurus barang DKPP dan Inspektorat tanggal 25 April 2025 menunjukkan bahwa Gedung kantor tersebut telah digunakan oleh Perumda Agrobisnis Mandiri sebagai tempat kantor pemasaran. Berdasarkan Perda Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Derah Kota Tarakan pada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan

Aneka Usaha, dan Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi ditemukan bahwa atas BMD tersebut tidak termasuk dalam penyertaan modal.

Hasil wawancara dengan Pengurus Barang menjelaskan bahwa BMD tersebut sejak Tahun 2022 digunakan oleh Perumda Agrobisnis Mandiri sebagai kantor untuk pemasaran tanpa adanya perikatan pemanfaatan. Penyerahan BMD kepada Perumda Agrobisnis Mandiri untuk digunakan dalam operasional terjadi pada periode kepemimpinan EB sebagai Kepala DKPP dan pada saat itu beliau juga menjabat sebagai Dewas di Perumda Agrobisnis Mandiri.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 pada:

   1) Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab:

      a) Huruf c, melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

      b) Huruf d, menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

      c) Huruf e, mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan

      d) Huruf h, mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

   2) Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengurus barang pengelola berwenang dan bertanggung jawab:

      a) Huruf d, meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat penatausahaan barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; dan

      b) Huruf h, melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah.

   3) Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengurus barang pengguna berwenang dan bertanggung jawab antara lain:

      a) Huruf c, melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

      b) Huruf d, membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan

      c) Huruf g, menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

   4) Pasal 68 ayat (3) yang menyatakan bahwa penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian antara pengguna barang dengan pimpinan pihak lain; dan

5) Pasal 299 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.

b. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Bab XI tentang Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap, angka 11.1 tentang Penghentian Penggunaan Aset Tetap yang antara lain menyatakan bahwa Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Penyajian informasi aset yang tidak lengkap, aset tanah senilai Rp5.008.000.000,00 yang tidak dapat dipastikan keberadaannya, dan satu bidang tanah senilai Rp1.887.600.000,00 dikuasai oleh pihak lain berpotensi menyulitkan dalam melakukan penelusuran keberadaan dan pengamanan aset;

b. Penyajian aset tetap dalam kondisi rusak berat senilai Rp6.620.628.700,00 tidak menggambarkan kondisi riil; dan

c. Potensi penyalahgunaan atas BMD Peralatan dan Mesin yang belum tercatat dan BMD Bangunan dan Gedung yang dikuasai dan digunakan pihak lain tanpa persetujuan pengguna barang dan perikatan yang jelas.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang belum sepenuhnya melakukan tupoksi dalam:

1) Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;

2) Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

3) Mengamankan, memelihara dan memantau pemanfaatan dan penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya; dan

4) Mengusulkan penghapusan aset dengan kondisi rusak berat kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

b. Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKPAD selaku Pengurus Barang Pengelola belum sepenuhnya melakukan tupoksi dalam:

1) Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD; dan

2) Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD.

c. Pengurus Barang pada SKPD terkait belum sepenuhnya melaksanakan tupoksi dalam:

1) Pencatatan dan inventarisasi BMD secara periodik;

2) Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan

3) Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan:

a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang untuk melakukan inventarisasi, pencatatan, pengamanan, pemeliharaan, pemantauan atas pemanfaatan dan penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya, serta mengusulkan penghapusan aset dalam kondisi rusak berat kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

b. Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKPAD untuk:

   1) Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan dari Pengguna Barang; dan

   2) Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD.

c. Pengurus Barang pada SKPD terkait untuk

   1) Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD secara periodik;

   2) Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan

   3) Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD.

4. Pengelolaan Aset Tak Berwujud Tidak Tertib

Neraca Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2024 menyajikan saldo ATB senilai Rp15.520.217.354,00, saldo tersebut mengalami peningkatan senilai Rp2.178.662.540,00 atau 16,33% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp13.341.554.814,00. Rincian ATB disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 37 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024

No.	Jenis ATB	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	*Software*	11.909.285.814,00	11.507.794.814,00
2	Kajian	3.610.931.540,00	1.833.760.000,00
Jumlah		**15.520.217.354,00**	**13.341.554.814,00**

ATB adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB pada Neraca Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2024 terdapat pada 26 SKPD/Unit SKPD. Rincian ATB per SKPD disajikan pada **Lampiran 25**.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan ATB menunjukkan beberapa kelemahan sebagai berikut.

a. Terdapat 119 ATB berupa *software* tidak diketahui keberadaannya senilai Rp8.311.954.879,00

Hasil pemeriksaan data rincian ATB dan permintaan keterangan kepada Pengurus Barang diketahui terdapat 119 ATB berupa *software* pada 19 SKPD tidak diketahui keberadaannya senilai harga perolehan Rp8.311.954.879,00 dengan nilai buku Rp268.672.083,31. Berdasarkan keterangan dari Pengurus Barang, diketahui ATB tersebut merupakan aset lama sehingga tidak pernah mengetahui keberadaan aset tersebut. Rincian ATB yang tidak diketahui keberadaannya dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

b. Terdapat 16 ATB berupa *software* tidak digunakan untuk operasional senilai Rp1.043.635.500,00

Hasil reviu atas rincian ATB dan permintaan keterangan kepada Pengurus Barang diketahui terdapat 16 ATB berupa *software* pada empat SKPD yang tidak digunakan untuk operasional tetapi masih tercatat sebagai ATB senilai harga perolehan Rp1.043.635.500,00 dengan nilai buku Rp65.598.750,00. ATB tersebut tidak digunakan lagi karena sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang makin berkembang dan digantikan dengan aplikasi/*software* yang disediakan oleh pemerintah pusat. Rincian ATB yang tidak digunakan untuk operasional dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

c. Terdapat 12 ATB berupa *software* tidak memenuhi karakteristik ATB senilai Rp815.088,000,00

Hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada Pengurus Barang diketahui terdapat 12 ATB berupa *software* pada tujuh SKPD yang tidak memenuhi klasifikasi ATB senilai harga perolehan Rp815.088.000,00 dengan nilai buku Rp422.576.333,32. Setelah pengurus barang melakukan penelusuran ke dokumen pengadaan dan informasi dari PPTK Kegiatan, diketahui:

1) Empat *Software* merupakan kegiatan Pemeliharan *software*;
2) Enam *software* merupakan *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu;
3) Satu *software* berupa Anti Virus *Kaspersky* memiliki masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan; dan
4) Satu *software* merupakan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin berupa *scanner*.

Rincian ATB yang tidak memenuhi klasifikasi ATB dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset BPKPAD, diketahui selama ini inventarisasi yang dilakukan hanya atas Aset Tetap sedangkan inventarisasi ATB belum pernah dilakukan. Lebih lanjut, pengklasifikasian ATB dilakukan berdasarkan keterangan dari Pengurus Barang SKPD.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:
   1) Pasal 12, pada:

a) Ayat (1) yang menyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;

b) Ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:

(1) Huruf c, melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

(2) Huruf e, mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

(3) Huruf h, mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; dan

(4) Huruf i, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

2) Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggung jawab antara lain:

a) Huruf c, melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

b) Huruf d, membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan

c) Huruf g, menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud pada:

1) Paragraf 5, yang menyatakan bahwa ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;

2) Paragraf 70, yang menyatakan bahwa ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya;

3) Paragraf 71, yang menyatakan bahwa ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan

4) Paragraf 72, yang menyatakan bahwa penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual pada:

1) Bab II tentang Aset Tak Berwujud, Angka 2.1. tentang Pengertian Aset Tak Berwujud yang antar lain menyatakan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan; dan

2) Bab V tentang Amortisasi, Penurunan Nilai dan Pelepasan Aset Tak Berwujud, Nomor 5.3 yang menyatakan ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

d. Peraturan Wali kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada Bab X tentang Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, yang menyatakan bahwa:

1) Huruf C, Angka 2, huruf a, yang menyatakan bahwa *software* komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah s*oftware* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Dengan kata lain, *software* yang dimaksud di sini adalah software yang dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.

2) Huruf C, Angka 3 yang menyatakan bahwa Dalam pembelian software perlu diperhatikan mengenai Hak Cipta dari *software*. Entitas mengakui ATB berupa *software* apabila terdapat potensi Hak Cipta yang dapat dimiliki oleh entitas. Dalam hal Hak Cipta dimiliki oleh pihak lain maka pembelian yang dilakukan pada dasarnya merupakan izin penggunaan/lisensi atas *software* tersebut, misalnya sistem operasi (*operating system*), aplikasi pengolah data, dan aplikasi pengolah gambar yang dijual secara umum dengan spesifikasi yang sama.

3) Huruf C, Angka 3 yang menyatakan bahwa *Software* yang memiliki masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi; dan

4) Huruf C, Angka 3 yang menyatakan bahwa Aset Tak Berwujud diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Saldo ATB senilai Rp9.355.590.379,00 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, terdiri dari ATB yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp8.311.954.879,00 dan yang tidak digunakan lagi senilai Rp1.043.635.500,00;

b. Penyajian saldo ATB lebih dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya senilai Rp815.088,000,00 atas ATB yang tidak memenuhi karakteristik; dan

c. Penyajian saldo Beban Amortisasi ATB lebih dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya senilai Rp420.140.499,82 (Rp332.478.949,82 + Rp28.402.250,00 + Rp59.259.300,00).

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang belum melaksanakan tupoksinya dalam mengendalikan kegiatan inventarisasi, pencatatan, pengamanan, pemeliharaan, pengajuan usul pemusnahan dan penghapusan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD berupa ATB di lingkungan SKPD yang dipimpinnya; dan

b. Pengurus Barang SKPD terkait belum memahami tugasnya dalam melaksanakan inventarisasi, pencatatan, pengamanan BMD dan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD berupa ATB.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan:

a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang untuk melakukan pengendalian atas kegiatan inventarisasi, pencatatan, pengamanan, pemeliharaan, pengajuan usul pemusnahan dan penghapusan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan BMD berupa ATB yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya; dan

b. Pengurus Barang SKPD terkait untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan inventarisasi, pencatatan, pengamanan, dan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD berupa ATB.

5. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Lain-lain Belum Dilaksanakan Secara Memadai

Neraca Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2024 menyajikan saldo Aset Lain-lain senilai Rp392.773.382.679,15, saldo tersebut mengalami penurunan senilai Rp203.794.532.364,66 atau 34,16% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp596.567.915.043,81. Dalam saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp596.567.915.043,81 terdapat saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya senilai Rp167.652.424.000,00 yang pada tahun 2024 di reklasifikasi keluar dari Aset Lain-lain. Rincian Aset Lain-lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 38 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	167.652.424.000,00	0,00
Tanah dan Bangunan di Wilayah Kerja Pertamina	12.577.622.298,60	12.577.622.298,60
Tanah yang akan diserahkan	2.384.668.750,00	2.384.668.750,00
Peralatan dan Mesin - yang akan diserahkan	321.244.770,00	20.982.500,00
Peralatan dan Mesin - Hilang	16.240.000,00	16.240.000,00
Gedung yang akan diserahkan	94.806.660.271,02	60.494.576.045,02
Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) akan diserahkan	157.883.498.878,71	157.883.498.878,71

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan dihapuskan	1.318.088.521,00	1.318.088.521,00
Aset yang masih dalam penelusuran	133.216.967.330,00	132.866.461.330,00
Aset Rusak Berat	15.863.557.466,60	14.506.030.416,60
TPTGR	10.526.942.757,88	10.705.213.939,22
Jumlah	**596.567.915.043,81**	**392.773.382.679,15**

Hasil Pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan Aset Lain-lain diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Terdapat Aset Lain-lain berupa tanah belum diserahterimakan dan tidak dapat diidentifikasi

Hasil pemeriksaan atas rincian Aset Lain-lain berupa tanah diketahui.

1) Sepuluh tanah pada DPRKPP belum diserahterimakan ke pemerintah pusat senilai Rp2.303.488.750,00

Berdasarkan data rincian Aset Lain-lain – tanah akan diserahkan diketahui terdapat sepuluh tanah DPRKPP dengan keterangan pembayaran ganti rugi berupa bangunan dan tanam tumbuh dalam rangka pelebaran jalan P. Aji Iskandar. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset BPKPAD Kota Tarakan menyatakan bahwa jalan P. Aji Iskandar saat ini telah berstatus jalan nasional sesuai dengan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 Tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektir Primer-1 (JKP-1). Sebelumnya jalan P. Aji Iskandar telah diserahterimakan ke Provinsi Kalimantan Utara sebelum menjadi jalan nasional. Pernah dilakukan koordinasi dengan Balai Pengerjaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk memindahkan aset tersebut. Akan tetapi, BPJN meminta untuk menyerahkannya melalui Provinsi Kalimantan Utara.

Rincian tanah DPRPKP yang akan diserahterimakan ke pemerintah pusat dapat dilihat pada **Lampiran 29.**

2) Satu tanah jalan pada DPUPR belum dapat diidentifikasi senilai Rp119.364.222.966,00

Hasil wawancara kepada Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset BPKPAD Kota Tarakan dan Pengurus Barang Pembantu DPUPR, diketahui tanah jalan senilai Rp119.364.222.966,00 tahun perolehan 2005 dan merupakan penataan atas kebakaran kawasan beringin yang lahannya merupakan milik masyarakat. Sebelumnya Nilai tersebut disajikan dalam Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jembatan yang pada tahun 2023 direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Nilai yang tersaji telah terkapitalisasi dari beberapa kegiatan seperti santunan dan pengadaan fisik seperti penimbunan dan pengaspalan. Lokasi atas aset tersebut hingga pemeriksaan berakhir, BPK belum memperoleh dokumen pendukung atas pengadaan tanah jalan tersebut.

b. Terdapat Aset Lain-lain berupa kendaraan roda dua yang dinyatakan hilang belum ditindaklanjuti dengan proses penyelesaian ganti kerugian daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data rincian Aset Lain-lain, diketahui terdapat satu unit kendaraan roda dua pada Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur dengan nomor polisi KU 2491 J (Eks KT 4034 JK) dan nilai perolehan Rp16.240.000,00 yang hilang tahun 2023 dan telah dilengkapi dengan dokumen laporan kehilangan dari kepolisian, namun atas aset tersebut belum dilakukan proses penyelesaian ganti kerugian daerah.

Hasil wawancara dengan ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kota Tarakan Tahun 2024 diketahui berdasarkan SK Wali Kota Tarakan Nomor 700/HK-X/372/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, TPKD akan mulai memproses laporan apabila telah menerima informasi/ laporan dugaan kerugian daerah secara tertulis dari Sumber Informasi Kerugian Daerah. Sampai saat ini TPKD belum menerima informasi/ laporan tertulis dugaan kerugian daerah terkait hilangnya satu unit kendaraan roda dua pada Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur.

c. Terdapat Aset Lain-lain yang telah diserahkan kepada pihak lain tetapi masih tercatat dalam Neraca

CaLK Pemerintah Kota Tarakan menyajikan Gedung dan Bangunan serta JIJ yang akan diserahkan sebagai berikut.

Tabel I. 39 Rincian Aset Lain-lain berupa Gedung dan Bangunan serta JIJ yang akan diserahkan TA 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Gedung yang akan diserahkan	94.806.660.271,02	60.494.576.045,02
JIJ akan diserahkan	157.883.498.878,71	157.883.498.878,71
Jumlah	**252.690.159.149,73**	**218.378.074.923,73**

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat aset yang telah diserahkan kepada pihak lain dengan dilengkapi BAST namun belum dilakukan proses penghapusan pada:

1) Aset Lain-lain berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 24 aset dengan nilai Rp1.437.318.034,35 dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran 30**; dan

2) Aset Lain-lain berupa Jalan, Irigasi dan Jembatan sebanyak 99 aset dengan nilai Rp7.080.251.000,00 dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Barang Pembantu DPUPR, diketahui aset-aset tersebut merupakan aset lama. Bidang-bidang yang membawahi belanja tersebut tidak melaporkan BAST ke Bidang Sekretariat DPUPR. Selain itu, Pengurus Barang Pembantu tidak mengetahui harus mengajukan usulan penghapusan aset yang telah dilengkapi dengan BAST.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset BPKPAD Kota Tarakan, diketahui bahwa DPUPR tidak

mengajukan usulan penghapusan atas Aset yang telah diserahkan dan dilengkapi dengan BAST.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Paragraf 16 tentang Pengakuan Aset Tetap yang menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

   1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

   2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

   3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

   4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:

   1) Pasal 1, pada:

      a) Ayat (27) menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan

      b) Ayat (46) menyatakan bahwa Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   2) Pasal 12, pada:

      a) Ayat (1) menyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;

      b) Ayat (3) menyatakan bahwa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:

         (1) Huruf c, melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

         (2) Huruf h, mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; dan

         (3) Huruf i, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

   3) Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengurus barang pengelola berwenang dan bertanggung jawab antara lain pada huruf d, meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.

   4) Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggungjawab antara lain:

a) Huruf c, melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; dan

b) Huruf g, menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

5) Pasal 431, yang menyatakan penghapusan barang milik daerah meliputi:

a) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;

b) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan

c) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

6) Pasal 432 pada ayat (3) penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disebabkan karena huruf a pemindahtanganan atas barang milik daerah.

7) Pasal 433, pada:

a) ayat (1) menyatakan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena: disebabkan karena poin (3) Pemindahtanganan atas barang milik dan poin (8) sebab lain; dan

b) Ayat (2) menyatakan Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

8) Pasal 434, pada:

a) Ayat (1) menyatakan bahwa Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Wali Kota; dan

b) Ayat (2) menyatakan bahwa Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota.

c. Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, pada:

1) Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan

2) Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Penyajian Aset Lain-lain berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta JIJ senilai Rp130.185.280.750,35 (Rp2.303.488.750,00 + Rp119.364.222.966,00 + Rp1.437.318.034,35 + Rp7.080.251.000,00 tidak menggambarkan nilai dan kondisi yang sebenarnya; dan

b. Pemulihan kerugian atas hilangya barang milik daerah berupa satu unit kendaraan bermotor pada Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur belum terwujud.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. TPKD belum memproses penyelesaian ganti kerugian daerah atas BMD yang hilang;

b. Kepala DPUPR dan DPRKPP sebagai pengguna barang belum melaksanakan pengendalian atas kegiatan inventarisasi, pencatatan, penyampaian usulan pemusnahan dan penghapusan aset dalam kondisi rusak berat kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

c. Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKPAD selaku Pengurus Barang Pengelola belum melaksanakan tupoksinya dalam melakukan inventarisasi Aset Lainnya yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2024; dan

d. Pengurus Barang DPUPR dan DPRKPP belum sepenuhnya memahami tugasnya dalam melaksanakan inventarisasi, pencatatan, penyiapan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD berupa Aset Lainnya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan:

a. TPKD untuk memproses penyelesaian ganti kerugian daerah atas satu unit kendaraan bermotor yang hilang pada Kelurahan Lingkas Ujung;

b. Kepala DPUPR dan DPRKPP selaku pengguna barang untuk melaksanakan pengendalian atas kegiatan inventarisasi, pencatatan, penyampaian usulan pemusnahan dan penghapusan aset dalam kondisi rusak berat kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

c. Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKPAD selaku Pengurus Barang Pengelola untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh atas Aset Lain-lain yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2024 khususnya satu bidang tanah jalan pada DPUPR senilai Rp119.364.222.966,00 yang belum dapat diidentifikasi dan menindaklanjuti hasil inventarisasi sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah; dan

d. Pengurus Barang DPUPR dan DPRKPP untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan inventarisasi, pencatatan, penyiapan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD berupa Aset Lainnya.

BAB II

IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan TA 2024, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah Kota Tarakan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2020 s.d. 2024. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tarakan dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kota Tarakan terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel II. 1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2024

No.	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2020	14	26	2	-	-
2	2021	12	28	3	-	-
3	2022	13	19	15	-	-
4	2023	15	17	12	-	-
5	2024	18	26	20	-	-
Jumlah		**72**	**116**	**52**	-	-

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Tarakan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai:

1. Wali Kota Tarakan telah memerintahkan Kepala Bidang Pengelola Aset BPKPAD untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penatausahaan aset, khususnya dalam perhitungan penyusutan;
2. Wali Kota Tarakan telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur RSUKT untuk melakukan pengendalian secara berkala terhadap penatausahaan persediaan oleh pengurus barang;
3. Wali Kota Tarakan telah memerintahkan Kepala BPKPAD untuk memprioritaskan kegiatan verifikasi (*cleansing*) atas piutang PBB-P2 agar nilai piutang benar-benar riil;
4. Wali Kota Tarakan telah memerintahkan Kepala BPKPAD untuk segera mengevaluasi SISMIOP/SIP-PBBP2 dan melakukan kegiatan verifikasi (*cleansing*) atas piutang PBB-P2 supaya mendapatkan nilai piutang PBB-P2 yang wajar;
5. Wali Kota Tarakan telah menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK Nomor 65.A/LHP/XIX.TJS/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 terkait permasalahan Piutang PBB-P2 dan memerintahkan Kepala BPKPAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pendapatan supaya:
    a. Lebih cermat dalam melakukan verifikasi (*cleansing*) atas kebenaran data subjek dan objek pajak PBB-P2;
    b. Lebih cermat mengendalikan dan mengawasi pemungutan PBB-P2; dan

c. Menyusun sistem pengendalian dalam pengelolaan database PBB-P2.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain:

1. Wali Kota Tarakan berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Utara terkait bagi hasil PAD atas pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I dan II serta KKMB;
2. Wali Kota Tarakan belum memerintahkan POKJA DBEK untuk melaksanakan pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan perkembangan pelaksanaan program dana bergulir termasuk mengkaji keberlanjutan program dana bergulir, dan menyelesaikan tunggakan dana bergulir senilai Rp2.220.882.365,62;
3. Wali Kota Tarakan belum memerintahkan Kepala DPUPR dan Kepala DPRKPP menyerahkan persediaan kepada masyarakat dan pihak ketiga disertai dengan BAST;
4. Wali Kota Tarakan belum menyusun Peraturan Wali Kota terkait prosedur pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya yang minimal memuat perencanaan penyelesaian utang dan prosedur pemberian bantuan hukum; dan
5. Wali Kota Tarakan belum memerintahkan Kepala SKPD terkait bersama Kepala BPKPAD sebagai pejabat penatausahaan barang daerah untuk melakukan koordinasi dengan instansi lainnya terkait pencatatan BMD yang sudah di BAST dan yang tercatat di instansi lain.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal dan Internal Pemerintah
Atas Perolehan Barang Milik Daerah (Aset Tetap) Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	SKPD	Jenis Aset	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)			
					Kontrak/ Perolehan	Temuan		
						Kelebihan Pembayaran	Akumulasi Penyusutan	Perolehan seharusnya
A	**Hasil Pemeriksaan BPK**							
	- LHP atas LKPD Tahun 2023							
	Kelebihan pembayaran atas sebelas paket pekerjaan di lima SKPD							
	1) Pekerjaan pembangunan SMPN 11 (Tahap II)	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	2023	28.306.340.000,00	273.344.323,28	5.922.460,34	28.032.995.676,72
	2) Pembangunan landscape SMPN 7	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	2023	2.357.502.000,00	9.684.217,14	209.824,70	2.347.817.782,86
	3) Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga (lapangan *outdoor*) Sekolah Catur, Sekretariat KONI, dan KORMI (MY)	DPUPR	Gedung dan Bangunan	2023	9.595.216.300,00	193.627.658,45	4.195.265,93	9.401.588.641,55
	4) Penataan Pantai Amal Tahap III (MY 2022)	Disbudporapar	Gedung dan Bangunan	2023	19.556.213.800,00	75.114.645,04	1.627.483,98	19.481.099.154,96
	5) Pekerjaan pembangunan TPA Juata Kerikil	DLH	Tanah	2023	19.056.018.800,00	63.548.509,26	1.376.884,37	18.992.470.290,74
	6) Pekerjaan pemeliharaan berkala Jl. Sebengkok Tiram	DPUPR	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2023	1.423.000.000,00	64.925.327,12	7.033.577,10	1.358.074.672,88
	7) Pekerjaan pemeliharaan berkala Jl. Kamboja	DPUPR	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2023	1.881.700.000,00	29.417.124,70	3.186.855,18	1.852.282.875,30
	8) Pekerjaan peningkatan Jl. Damai Bakti	DPUPR	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2023	1.311.668.000,00	26.368.185,48	2.856.553,43	1.285.299.814,52
	9) Pekerjaan peningkatan Jl. Juata Kerikil	DPUPR	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2023	1.853.375.000,00	16.092.277,18	1.743.330,03	1.837.282.722,82
	10) Pekerjaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Museum Sejarah dan Situs Cagar Budaya Peningki Laid	Disbudporapar	Gedung dan Bangunan	2023	8.917.254.000,00	16.445.000,00	356.308,33	8.900.809.000,00
	11) Pembangunan gedung Paviliun Rawat Inap Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	RSUD Kota Tarakan	Gedung dan Bangunan	2023	17.460.441.400,00	115.517.723,38	2.502.884,01	17.344.923.676,62
	Jumlah				**111.718.729.300,00**	**884.084.991,03**	**31.011.427,39**	**110.834.644.308,97**
B	**Hasil Pemeriksaan Inspektorat**							
	-LHP NO 700.1.2.1/07/2023/KETAATAN							
	Kelebihan pembayaran (Kekurangan Volume) atas enam belas paket pekerjaan pada PSDA DPUPR TA 2022							
	1) Pembangunan Siring RT 06 Kel Mamburungan Timur	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	95.833.000,00	1.555.600,00	168.523,33	94.277.400,00
	2) Pembangunan Saluran Drainase RT 06 Kel Mamburungan	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	47.823.000,00	916.580,00	99.296,17	46.906.420,00
	3) Pembangunan Saluran Drainase Jl Padat Karya RT 01 Kel P. Amal	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	95.738.000,00	3.148.300,00	341.065,83	92.589.700,00
	4) Pembangunan Saluran Drainase Jl Binalatung RT 10 Kel P. Amal	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	47.844.000,00	789.500,00	85.529,17	47.054.500,00
	5) Pembangunan Saluran Drainase RT 17 Kel Mamburungan	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	47.844.000,00	2.150.900,00	233.014,17	45.693.100,00
	6) Pembangunan Siring Gg Salak RT 54 Kel Karang Anyar	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	95.761.000,00	2.518.100,00	272.794,17	93.242.900,00
	7) Pembangunan Saluran Drainase Jl Gajah Mada RT 7 Kel Kr Rejo	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	191.766.000,00	9.091.000,00	984.858,33	182.675.000,00
	8) Pembangunan Saluran Drainase Jl Rawasari Gg 84 RT 02	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	47.771.000,00	698.200,00	75.638,33	47.072.800,00
	9) Pembangunan Saluran Drainase Jl Rukun Gg Jeruk RT 29	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	47.778.000,00	983.700,00	106.567,50	46.794.300,00
	10) Pembangunan Siring RT 05 Kel Pamusian	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	47.772.000,00	1.083.000,00	117.325,00	46.689.000,00
	11) Pembuatan Penutup Parit RT 03 Kelurahan Karang Harapan	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	47.840.000,00	1.067.200,00	115.613,33	46.772.800,00
	12) Pembangunan Saluran Drainase RT 27 Kel Karang Anyar Pantai	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	47.840.000,00	650.900,00	70.514,17	47.189.100,00
	13) Pembangunan Saluran Drainase RT 29 Kel Karang Anyar	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	66.967.000,00	1.107.900,00	9.232,50	65.859.100,00

No.	Uraian	SKPD	Jenis Aset	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)			
					Kontrak/ Perolehan	Temuan		
						Kelebihan Pembayaran	Akumulasi Penyusutan	Perolehan seharusnya
	14) Pembangunan Saluran Drainase RT 68 Kel Karang Anyar	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	47.810.000,00	1.894.300,00	205.215,83	45.915.700,00
	15) Pembangunan Saluran Drainase Jl Ronggolawe RT 12 Kel Pamusian	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	47.862.000,00	3.184.900,00	345.030,83	44.677.100,00
	16) Pembangunan Saluran Drainase Jl Cempaka RT 06 Kel Juata Permai	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	47.862.000,00	3.995.600,00	432.856,67	43.866.400,00
	Jumlah				**1.072.111.000,00**	**34.835.680,00**	**3.663.075,33**	**1.037.275.320,00**
	LHP NO 700.1.2.1/01/II/2024/RIKSUS							
	1) Rekonstruksi Jalan Anggrek SMPN 8 (DAK) TA 2022	DPUPR	Jalan, irigasi, dan jaringan	2022	313.436.381,00	78.589.000,00	8.513.808,33	234.847.381,00
	Jumlah				**313.436.381,00**	**78.589.000,00**	**8.513.808,33**	**234.847.381,00**
	Total				**113.104.276.681,00**	**997.509.671,03**	**43.188.311,06**	**112.106.767.009,97**

Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum antara Pemerintah Kota Tarakan dan Perumda Aneka Usaha

Laporan Pendapatan Perumda Tarakan Aneka Usaha Bulanan yang Diserahkan ke Dishub					Bagi Hasil Pemkot Tarakan Sesuai PKS		Realisasi Setoran ke Kas Daerah		Bagi Hasil Perumda Aneka Usaha Sesuai PKS		Kekurangan Setor (Rp)
No.	Bulan	Pendapatan Bruto (Rp)	Biaya Operasional (Honor Petugas Parkir dan biaya cetak karcis)	Total Pendapatan Bersih (Rp)	PKS	Jumlah (Rp)	Jumlah	%	PKS	Jumlah (Rp)	
1	Januari	173.492.000,00	106.656.480,00	66.835.520,00	70%	46.784.864,00	53.335.360,00	79,80%	30%	20.050.656,00	- 6.550.496,00
2	Februari	165.260.000,00	84.186.921,00	81.073.079,00	70%	56.751.155,30	51.172.160,00	63,12%	30%	24.321.923,70	5.578.995,30
3	Maret	149.664.000,00	86.485.612,00	63.178.388,00	70%	44.224.871,60	44.374.400,00	70,24%	30%	18.953.516,40	- 149.528,40
4	April	144.709.000,00	70.359.934,00	74.349.066,00	70%	52.044.346,20	48.629.440,00	65,41%	30%	22.304.719,80	3.414.906,20
5	Mei	168.667.000,00	84.511.416,00	84.155.584,00	70%	58.908.908,80	56.965.480,00	67,69%	30%	25.246.675,20	1.943.428,80
6	Juni	151.881.000,00	76.864.145,00	75.016.855,00	70%	52.511.798,50	46.881.280,00	62,49%	30%	22.505.056,50	5.630.518,50
7	Juli	170.203.000,00	89.864.145,00	80.338.855,00	70%	56.237.198,50	56.335.800,00	70,12%	30%	24.101.656,50	- 98.601,50
8	Agustus	163.262.000,00	82.053.558,00	81.208.442,00	70%	56.845.909,40	50.423.040,00	62,09%	30%	24.362.532,60	6.422.869,40
9	September	153.804.000,00	90.743.987,00	63.060.013,00	70%	44.142.009,10	49.541.120,00	78,56%	30%	18.918.003,90	- 5.399.110,90
10	Oktober	159.514.000,00	79.332.461,00	80.181.539,00	70%	56.127.077,30	52.625.240,00	65,63%	30%	24.054.461,70	3.501.837,30
11	November	151.725.000,00	75.590.930,00	76.134.070,00	70%	53.293.849,00	43.813.800,00	57,55%	30%	22.840.221,00	9.480.049,00
12	Desember	168.750.000,00	86.205.028,00	82.544.972,00	70%	57.781.480,40	58.753.920,00	71,18%	30%	24.763.491,60	- 972.439,60
Jumlah		**1.920.931.000,00**	**1.012.854.617,00**	**908.076.383,00**		**635.653.468,10**	**612.851.040,00**	**67,49%**		**272.422.914,90**	**22.802.428,10**

WP yang Tidak Pernah Menyampaikan SPTPD kepada Bidang Pendapatan BPKPAD untuk ditetapkan SKP-Daerah nya Selama Periode tahun 2024

No.	Nama WP	Status	keterangan
1	P . 2 . 0015605 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
2	P . 2 . 0016407 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
3	P . 2 . 0017352 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
4	P . 2 . 0010890 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
5	P . 2 . 0005611 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
6	P . 1 . 0007378 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
7	P . 1 . 0016566 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
8	P . 2 . 0016265 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
9	P . 2 . 0006386 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
10	P . 2 . 0011068 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
11	P . 2 . 0017351 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
12	P . 2 . 0014179 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
13	P . 2 . 0014233 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
14	P . 2 . 0014214 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
15	P . 2 . 0017355 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
16	P . 2 . 0017353 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
17	P . 1 . 0015947 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
18	P . 2 . 0005650 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
19	P . 2 . 0000026 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
20	P . 2 . 0016267 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
21	P . 2 . 0014731 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
22	P . 2 . 0016266 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
23	P . 2 . 0017288 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
24	P . 2 . 0017287 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
25	P . 2 . 0012354 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
26	P . 2 . 0011086 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
27	P . 2 . 0016201 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
28	P . 2 . 0016239 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
29	P . 2 . 0007275 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
30	P . 2 . 0011436 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
31	P . 2 . 0013126 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
32	P . 2 . 0013104 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
33	P . 2 . 0014366 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
34	P . 2 . 0014694 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
35	P . 1 . 0007200 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
36	P . 2 . 0017525 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
37	P . 2 . 0014223 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
38	P . 2 . 0016439 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
39	P . 2 . 0011033 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
40	P . 2 . 0016312 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
41	P . 2 . 0013187 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
42	P . 1 . 0015922 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
43	P . 2 . 0016859 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
44	P . 2 . 0015425 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
45	P . 2 . 0012837 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
46	P . 1 . 0015923 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
47	P . 2 . 0004004 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
48	P . 2 . 0016440 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
49	P . 2 . 0012272 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
50	P . 2 . 0007060 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
51	P . 2 . 0015563 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
52	P . 2 . 0007481 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
53	P . 2 . 0015942 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
54	P . 2 . 0017350 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
55	P . 2 . 0016158 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
56	P . 2 . 0016402 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
57	P . 2 . 0007867 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
58	P . 2 . 0014236 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
59	P . 2 . 0016328 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
60	P . 2 . 0016359 . 41 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
61	P . 1 . 0015943 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
62	P . 2 . 0014723 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
63	P . 2 . 0006973 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
64	P . 2 . 0014165 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
65	P . 2 . 0014294 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
66	P . 2 . 0016446 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
67	P . 1 . 0015680 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
68	P . 2 . 0010996 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
69	P . 1 . 0015423 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
70	P . 2 . 0016450 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
71	P . 2 . 0016871 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
72	P . 2 . 0017566 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
73	P . 2 . 0015636 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
74	P . 2 . 0015623 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
75	P . 2 . 0015622 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
76	P . 2 . 0011355 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
77	P . 2 . 0007910 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
78	P . 2 . 0013106 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
79	P . 2 . 0007111 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
80	P . 2 . 0007054 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
81	P . 2 . 0011140 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
82	P . 2 . 0006972 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
83	P . 2 . 0007904 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
84	P . 2 . 0007097 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
85	P . 2 . 0012754 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
86	P . 2 . 0007627 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
87	P . 2 . 0007181 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
88	P . 2 . 0006975 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
89	P . 2 . 0014781 . 10 . 6	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
90	P . 2 . 0016550 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
91	P . 2 . 0010028 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
92	P . 2 . 0011157 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
93	P . 2 . 0014303 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
94	P . 2 . 0016670 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
95	P . 2 . 0017354 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
96	P . 2 . 0016259 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
97	P . 2 . 0016088 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
98	P . 2 . 0015948 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
99	P . 2 . 0015255 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
100	P . 2 . 0000187 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
101	P . 2 . 0002724 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
102	P . 1 . 0015681 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
103	P . 2 . 0011056 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
104	P . 2 . 0013652 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
105	P . 2 . 0005495 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
106	P . 2 . 0004826 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
107	P . 2 . 0002231 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
108	P . 2 . 0004902 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
109	P . 2 . 0006291 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
110	P . 2 . 0005499 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
111	P . 2 . 0005115 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
112	P . 2 . 0005594 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
113	P . 1 . 0006414 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
114	P . 1 . 0006463 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
115	P . 2 . 0004793 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
116	P . 2 . 0006854 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
117	P . 2 . 0003539 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
118	P . 2 . 0002289 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
119	P . 2 . 0004537 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
120	P . 2 . 0004353 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
121	P . 2 . 0006814 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
122	P . 2 . 0004770 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
123	P . 2 . 0004908 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
124	P . 1 . 0006482 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
125	P . 2 . 0006324 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
126	P . 2 . 0004322 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
127	P . 2 . 0006322 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
128	P . 2 . 0004384 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
129	P . 2 . 0004417 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
130	P . 2 . 0003875 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
131	P . 2 . 0006391 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
132	P . 2 . 0004118 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
133	P . 2 . 0011523 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
134	P . 2 . 0004147 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
135	P . 2 . 0003827 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
136	P . 2 . 0007335 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
137	P . 2 . 0016473 . 52 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
138	P . 2 . 0007187 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
139	P . 2 . 0015835 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
140	P . 2 . 0012399 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
141	P . 2 . 0004529 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
142	P . 2 . 0016095 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
143	P . 2 . 0006343 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
144	P . 2 . 0015116 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
145	P . 2 . 0005225 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
146	P . 2 . 0004209 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
147	P . 2 . 0016474 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
148	P . 2 . 0005336 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
149	P . 2 . 0011585 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
150	P . 2 . 0004737 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
151	P . 2 . 0003895 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
152	P . 2 . 0011653 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
153	P . 2 . 0005788 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
154	P . 2 . 0016224 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
155	P . 2 . 0013747 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
156	P . 2 . 0017514 . 41 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
157	P . 2 . 0006299 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
158	P . 2 . 0004200 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
159	P . 2 . 0016052 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
160	P . 2 . 0010762 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
161	P . 2 . 0004189 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
162	P . 2 . 0012891 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
163	P . 2 . 0012658 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
164	P . 2 . 0002858 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
165	P . 2 . 0007649 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
166	P . 2 . 0015468 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
167	P . 2 . 0001910 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
168	P . 2 . 0012448 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
169	P . 2 . 0004578 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
170	P . 2 . 0015349 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
171	P . 2 . 0004119 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
172	P . 2 . 0011312 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
173	P . 2 . 0007526 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
174	P . 2 . 0011677 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
175	P . 2 . 0015359 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
176	P . 2 . 0016183 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
177	P . 2 . 0015510 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
178	P . 2 . 0004799 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
179	P . 2 . 0015075 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
180	P . 2 . 0005200 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
181	P . 2 . 0005775 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
182	P . 2 . 0012325 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
183	P . 2 . 0016231 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
184	P . 2 . 0011617 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
185	P . 2 . 0012456 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
186	P . 2 . 0005016 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
187	P . 2 . 0004634 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
188	P . 2 . 0010829 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
189	P . 2 . 0011784 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
190	P . 2 . 0001072 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
191	P . 2 . 0011262 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
192	P . 2 . 0004051 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
193	P . 2 . 0016526 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
194	P . 2 . 0006333 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
195	P . 2 . 0015650 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
196	P . 2 . 0005884 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
197	P . 2 . 0003849 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
198	P . 2 . 0007808 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
199	P . 2 . 0005012 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
200	P . 2 . 0016494 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
201	P . 2 . 0006155 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
202	P . 2 . 0005082 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
203	P . 2 . 0015864 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
204	P . 2 . 0015646 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
205	P . 2 . 0005657 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
206	P . 2 . 0012552 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
207	P . 2 . 0011310 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
208	P . 2 . 0015653 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
209	P . 2 . 0010906 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
210	P . 2 . 0011952 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
211	P . 2 . 0004961 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
212	P . 2 . 0014759 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
213	P . 2 . 0005757 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
214	P . 2 . 0007474 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
215	P . 2 . 0016205 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
216	P . 2 . 0004374 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
217	P . 2 . 0001957 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
218	P . 2 . 0011327 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
219	P . 1 . 0016170 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
220	P . 2 . 0015403 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
221	P . 1 . 0015824 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
222	P . 2 . 0006752 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
223	P . 2 . 0016016 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
224	P . 2 . 0016061 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
225	P . 2 . 0016322 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
226	P . 2 . 0005555 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
227	P . 2 . 0006943 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
228	P . 2 . 0000523 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
229	P . 2 . 0011933 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
230	P . 2 . 0015968 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
231	P . 2 . 0000163 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
232	P . 2 . 0000450 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
233	P . 2 . 0000277 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
234	P . 2 . 0001526 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
235	P . 2 . 0008015 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
236	P . 2 . 0007273 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
237	P . 2 . 0013099 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
238	P . 2 . 0007677 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
239	P . 2 . 0010842 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
240	P . 2 . 0006948 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
241	P . 2 . 0007042 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
242	P . 2 . 0007862 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
243	P . 2 . 0015476 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
244	P . 2 . 0011874 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
245	P . 2 . 0007050 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
246	P . 2 . 0015802 . 41 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
247	P . 2 . 0016063 . 52 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
248	P . 2 . 0013973 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
249	P . 2 . 0007006 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
250	P . 2 . 0006926 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
251	P . 2 . 0007357 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
252	P . 2 . 0016009 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
253	P . 2 . 0016136 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
254	P . 2 . 0010931 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
255	P . 2 . 0011258 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
256	P . 2 . 0011229 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
257	P . 2 . 0009390 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
258	P . 2 . 0011201 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
259	P . 2 . 0006915 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
260	P . 2 . 0016773 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
261	P . 2 . 0013062 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
262	P . 2 . 0013063 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
263	P . 2 . 0005394 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
264	P . 2 . 0013595 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
265	P . 2 . 0015598 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
266	P . 2 . 0011450 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
267	P . 2 . 0015270 . 52 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
268	P . 2 . 0016255 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
269	P . 2 . 0007869 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
270	P . 2 . 0011348 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
271	P . 2 . 0016392 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
272	P . 2 . 0016326 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
273	P . 2 . 0012303 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
274	P . 2 . 0012280 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
275	P . 2 . 0012301 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
276	P . 2 . 0011024 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
277	P . 2 . 0012369 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
278	P . 2 . 0011291 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
279	P . 2 . 0007156 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
280	P . 2 . 0011448 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
281	P . 2 . 0011279 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
282	P . 2 . 0007140 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
283	P . 2 . 0011173 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
284	P . 2 . 0012127 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
285	P . 2 . 0014316 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
286	P . 2 . 0014319 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
287	P . 2 . 0014338 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
288	P . 2 . 0014304 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
289	P . 2 . 0014325 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
290	P . 2 . 0014298 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
291	P . 2 . 0014285 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
292	P . 2 . 0014326 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
293	P . 2 . 0014317 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
294	P . 2 . 0014314 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
295	P . 2 . 0014196 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
296	P . 2 . 0014322 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
297	P . 2 . 0014356 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
298	P . 2 . 0014266 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
299	P . 2 . 0015633 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
300	P . 2 . 0011179 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
301	P . 2 . 0014268 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
302	P . 2 . 0014222 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
303	P . 2 . 0014242 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
304	P . 2 . 0012292 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
305	P . 2 . 0011592 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
306	P . 2 . 0012393 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
307	P . 2 . 0011273 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
308	P . 2 . 0012407 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
309	P . 2 . 0011439 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
310	P . 2 . 0011251 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
311	P . 2 . 0011207 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
312	P . 2 . 0012186 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
313	P . 2 . 0011205 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
314	P . 2 . 0015412 . 41 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
315	P . 2 . 0016260 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
316	P . 2 . 0014773 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
317	P . 2 . 0006799 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
318	P . 2 . 0013068 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
319	P . 2 . 0016165 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
320	P . 2 . 0017612 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
321	P . 2 . 0007553 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
322	P . 2 . 0000471 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
323	P . 2 . 0004214 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
324	P . 2 . 0001556 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
325	P . 2 . 0000302 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
326	P . 2 . 0000268 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
327	P . 2 . 0003643 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
328	P . 2 . 0015172 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
329	P . 2 . 0016247 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
330	P . 2 . 0011256 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
331	P . 2 . 0012339 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
332	P . 2 . 0011221 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
333	P . 2 . 0011223 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
334	P . 2 . 0016309 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
335	P . 2 . 0017356 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
336	P . 1 . 0015424 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
337	P . 2 . 0013007 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
338	P . 2 . 0012139 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
339	P . 2 . 0011227 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
340	P . 2 . 0011452 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
341	P . 2 . 0011070 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
342	P . 2 . 0014302 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
343	P . 2 . 0011193 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
344	P . 2 . 0012309 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
345	P . 2 . 0012391 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
346	P . 2 . 0014235 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
347	P . 2 . 0014703 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
348	P . 2 . 0015638 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
349	P . 2 . 0014730 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
350	P . 2 . 0002127 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
351	P . 2 . 0007164 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
352	P . 2 . 0007016 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
353	P . 2 . 0012177 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
354	P . 2 . 0012156 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
355	P . 2 . 0012171 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
356	P . 2 . 0016271 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
357	P . 2 . 0007065 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
358	P . 2 . 0011185 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
359	P . 2 . 0010846 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
360	P . 2 . 0012267 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
361	P . 2 . 0011649 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
362	P . 2 . 0011020 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
363	P . 2 . 0013246 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
364	P . 2 . 0011247 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
365	P . 2 . 0011909 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
366	P . 2 . 0012151 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
367	P . 2 . 0010968 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
368	P . 2 . 0000517 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
369	P . 2 . 0005726 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
370	P . 2 . 0017505 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
371	P . 2 . 0014056 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
372	P . 2 . 0014166 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
373	P . 2 . 0006965 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
374	P . 2 . 0015495 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
375	P . 1 . 0015878 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
376	P . 2 . 0016257 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
377	P . 2 . 0014963 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
378	P . 2 . 0017518 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
379	P . 2 . 0016092 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
380	P . 2 . 0016588 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
381	P . 1 . 0015872 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
382	P . 2 . 0016380 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
383	P . 2 . 0016545 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
384	P . 2 . 0013114 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
385	P . 2 . 0015627 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
386	P . 2 . 0011209 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
387	P . 2 . 0016002 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
388	P . 2 . 0015892 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
389	P . 2 . 0015903 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
390	P . 2 . 0007059 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
391	P . 2 . 0007389 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
392	P . 2 . 0007043 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
393	P . 2 . 0006982 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
394	P . 2 . 0007018 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
395	P . 2 . 0007057 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
396	P . 2 . 0007376 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
397	P . 2 . 0007025 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
398	P . 2 . 0007365 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
399	P . 2 . 0006958 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
400	P . 2 . 0006950 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
401	P . 2 . 0006938 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
402	P . 2 . 0007011 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
403	P . 2 . 0007020 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
404	P . 2 . 0007036 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
405	P . 2 . 0006992 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
406	P . 2 . 0006945 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
407	P . 2 . 0006974 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
408	P . 2 . 0011037 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
409	P . 2 . 0011266 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
410	P . 2 . 0017569 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
411	P . 2 . 0007072 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
412	P . 2 . 0013697 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
413	P . 2 . 0012073 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
414	P . 2 . 0007970 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
415	P . 2 . 0011084 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
416	P . 2 . 0012041 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
417	P . 2 . 0016743 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
418	P . 2 . 0011557 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
419	P . 2 . 0007039 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
420	P . 2 . 0016298 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
421	P . 2 . 0017510 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
422	P . 2 . 0015993 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
423	P . 2 . 0015916 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
424	P . 2 . 0016005 . 10 . 6	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
425	P . 2 . 0015928 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
426	P . 2 . 0015914 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
427	P . 2 . 0015941 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
428	P . 2 . 0015913 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
429	P . 2 . 0007478 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
430	P . 2 . 0005950 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
431	P . 1 . 0015945 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
432	P . 1 . 0016140 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
433	P . 1 . 0012255 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
434	P . 2 . 0014885 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
435	P . 2 . 0011074 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
436	P . 2 . 0012389 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
437	P . 2 . 0013140 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
438	P . 2 . 0012167 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
439	P . 2 . 0007528 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
440	P . 2 . 0004151 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
441	P . 2 . 0003028 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
442	P . 2 . 0007148 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
443	P . 2 . 0011017 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
444	P . 2 . 0007347 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
445	P . 2 . 0007138 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
446	P . 2 . 0007150 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
447	P . 2 . 0011621 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
448	P . 2 . 0012405 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
449	P . 2 . 0007469 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
450	P . 2 . 0011683 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
451	P . 2 . 0011681 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
452	P . 2 . 0015296 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
453	P . 2 . 0012175 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
454	P . 2 . 0012173 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
455	P . 2 . 0016006 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
456	P . 2 . 0012225 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
457	P . 2 . 0015342 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
458	P . 2 . 0013148 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
459	P . 2 . 0012200 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
460	P . 1 . 0012227 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
461	P . 2 . 0012282 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
462	P . 2 . 0013112 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
463	P . 2 . 0007551 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
464	P . 2 . 0016245 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
465	P . 2 . 0012387 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
466	P . 2 . 0011122 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
467	P . 2 . 0011177 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
468	P . 2 . 0012432 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
469	P . 2 . 0011195 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
470	P . 2 . 0011335 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
471	P . 2 . 0011241 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
472	P . 2 . 0011387 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
473	P . 2 . 0012321 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
474	P . 2 . 0011490 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
475	P . 2 . 0011217 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
476	P . 2 . 0011233 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
477	P . 2 . 0011124 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
478	P . 2 . 0011175 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
479	P . 2 . 0012198 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
480	P . 2 . 0013039 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
481	P . 2 . 0011117 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
482	P . 2 . 0011119 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
483	P . 2 . 0016258 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
484	P . 2 . 0013144 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
485	P . 2 . 0017359 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
486	P . 1 . 0015924 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
487	P . 2 . 0007166 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
488	P . 2 . 0016293 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
489	P . 2 . 0005801 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
490	P . 2 . 0015422 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
491	P . 2 . 0012274 . 10 . 6	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
492	P . 2 . 0012209 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
493	P . 2 . 0014740 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
494	P . 2 . 0011042 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
495	P . 2 . 0011044 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
496	P . 2 . 0016652 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
497	P . 2 . 0013347 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
498	P . 2 . 0005031 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
499	P . 2 . 0016339 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
500	P . 2 . 0014238 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
501	P . 2 . 0017594 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
502	P . 1 . 0015679 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
503	P . 2 . 0016280 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
504	P . 2 . 0013122 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
505	P . 2 . 0015062 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
506	P . 2 . 0015678 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
507	P . 2 . 0013193 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
508	P . 2 . 0013703 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
509	P . 2 . 0014668 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
510	P . 2 . 0014042 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
511	P . 2 . 0007308 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
512	P . 2 . 0014045 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
513	P . 2 . 0016286 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
514	P . 2 . 0003974 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
515	P . 2 . 0011064 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
516	P . 2 . 0010977 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
517	P . 2 . 0003979 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
518	P . 2 . 0014260 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
519	P . 2 . 0008544 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
520	P . 2 . 0006387 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
521	P . 2 . 0016602 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
522	P . 2 . 0012188 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
523	P . 2 . 0017512 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
524	P . 2 . 0016306 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
525	P . 2 . 0017570 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
526	P . 1 . 0015946 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
527	P . 2 . 0017545 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
528	P . 2 . 0012348 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
529	P . 2 . 0016269 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
530	P . 2 . 0001056 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
531	P . 2 . 0017358 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
532	P . 2 . 0011368 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
533	P . 2 . 0011237 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
534	P . 2 . 0012294 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
535	P . 2 . 0012165 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
536	P . 2 . 0013136 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
537	P . 2 . 0007849 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
538	P . 2 . 0008482 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
539	P . 2 . 0013027 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
540	P . 2 . 0010786 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
541	P . 2 . 0007933 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
542	P . 2 . 0007877 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
543	P . 2 . 0007817 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
544	P . 2 . 0009345 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
545	P . 2 . 0007896 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
546	P . 2 . 0014784 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
547	P . 2 . 0014791 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
548	P . 2 . 0014789 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
549	P . 2 . 0014788 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
550	P . 2 . 0008164 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
551	P . 2 . 0007923 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
552	P . 2 . 0009801 . 10 . 6	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
553	P . 2 . 0007902 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
554	P . 2 . 0012887 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
555	P . 2 . 0007906 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
556	P . 2 . 0007851 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
557	P . 2 . 0013147 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
558	P . 2 . 0011495 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
559	P . 2 . 0010760 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
560	P . 2 . 0013058 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
561	P . 2 . 0010242 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
562	P . 2 . 0013178 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
563	P . 2 . 0012903 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
564	P . 2 . 0016547 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
565	P . 2 . 0011211 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
566	P . 2 . 0011594 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
567	P . 2 . 0014913 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
568	P . 2 . 0007304 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
569	P . 2 . 0016697 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
570	P . 2 . 0011134 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
571	P . 2 . 0007298 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
572	P . 2 . 0012262 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
573	P . 2 . 0012141 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
574	P . 2 . 0011149 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
575	P . 2 . 0011213 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
576	P . 2 . 0006898 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
577	P . 2 . 0012179 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
578	P . 2 . 0013078 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
579	P . 2 . 0016010 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
580	P . 2 . 0013664 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
581	P . 2 . 0012090 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
582	P . 2 . 0007779 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
583	P . 2 . 0012131 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
584	P . 2 . 0012367 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
585	P . 2 . 0007162 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
586	P . 2 . 0016397 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
587	P . 2 . 0016768 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
588	P . 2 . 0011249 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
589	P . 2 . 0011443 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
590	P . 2 . 0011318 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
591	P . 2 . 0012076 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
592	P . 2 . 0015895 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
593	P . 2 . 0016825 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
594	P . 2 . 0011293 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
595	P . 2 . 0011432 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
596	P . 2 . 0015035 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
597	P . 2 . 0011159 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
598	P . 2 . 0011078 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
599	P . 2 . 0010896 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
600	P . 2 . 0012196 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
601	P . 2 . 0015934 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
602	P . 2 . 0012335 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
603	P . 2 . 0010957 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
604	P . 2 . 0014955 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
605	P . 2 . 0011640 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
606	P . 2 . 0002283 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
607	P . 2 . 0005700 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
608	P . 2 . 0014631 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
609	P . 2 . 0013049 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
610	P . 2 . 0010191 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
611	P . 2 . 0004765 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
612	P . 2 . 0015860 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
613	P . 2 . 0015356 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
614	P . 2 . 0010922 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
615	P . 2 . 0013238 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
616	P . 2 . 0012502 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
617	P . 2 . 0016543 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
618	P . 2 . 0016432 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
619	P . 2 . 0013037 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
620	P . 2 . 0007331 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
621	P . 2 . 0016327 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
622	P . 2 . 0000177 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
623	P . 2 . 0013071 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
624	P . 2 . 0000695 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
625	P . 2 . 0000504 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
626	P . 2 . 0006900 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
627	P . 2 . 0011092 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
628	P . 2 . 0011552 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
629	P . 1 . 0015686 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
630	P . 2 . 0006285 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
631	P . 2 . 0011034 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
632	P . 2 . 0014309 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
633	P . 2 . 0014310 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
634	P . 2 . 0014311 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
635	P . 2 . 0014306 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
636	P . 2 . 0014307 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
637	P . 2 . 0014308 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
638	P . 2 . 0000152 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
639	P . 2 . 0001617 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
640	P . 2 . 0000566 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
641	P . 2 . 0001704 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
642	P . 2 . 0001523 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
643	P . 2 . 0005768 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
644	P . 2 . 0005842 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
645	P . 2 . 0000297 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
646	P . 2 . 0014660 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
647	P . 2 . 0000453 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
648	P . 2 . 0013146 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
649	P . 2 . 0001520 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
650	P . 2 . 0002146 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
651	P . 2 . 0000660 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
652	P . 2 . 0003521 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
653	P . 2 . 0000455 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
654	P . 2 . 0000273 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
655	P . 2 . 0005976 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
656	P . 2 . 0003031 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
657	P . 2 . 0003085 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
658	P . 2 . 0001726 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
659	P . 2 . 0013669 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
660	P . 2 . 0001999 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
661	P . 2 . 0007394 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
662	P . 2 . 0016308 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
663	P . 2 . 0013952 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
664	P . 2 . 0014054 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
665	P . 2 . 0014506 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
666	P . 2 . 0012682 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
667	P . 2 . 0008526 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
668	P . 2 . 0015988 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
669	P . 2 . 0012215 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
670	P . 2 . 0012206 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
671	P . 2 . 0012265 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
672	P . 2 . 0012243 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
673	P . 2 . 0012839 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
674	P . 2 . 0016229 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
675	P . 2 . 0012213 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
676	P . 2 . 0012219 . 40 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
677	P . 2 . 0016358 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
678	P . 2 . 0016720 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
679	P . 2 . 0016469 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
680	P . 2 . 0014583 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
681	P . 2 . 0015080 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
682	P . 2 . 0013009 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
683	P . 2 . 0012299 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
684	P . 2 . 0007243 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
685	P . 2 . 0007259 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
686	P . 2 . 0007235 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
687	P . 2 . 0007249 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
688	P . 2 . 0007245 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
689	P . 2 . 0007265 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
690	P . 2 . 0007251 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
691	P . 2 . 0007247 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
692	P . 2 . 0011917 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
693	P . 2 . 0007255 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
694	P . 2 . 0007943 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
695	P . 2 . 0007239 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
696	P . 2 . 0007945 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
697	P . 2 . 0011911 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
698	P . 2 . 0011915 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
699	P . 2 . 0016111 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
700	P . 2 . 0011187 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
701	P . 2 . 0014734 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
702	P . 2 . 0016141 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
703	P . 2 . 0016204 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
704	P . 2 . 0016157 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
705	P . 2 . 0015254 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
706	P . 2 . 0016262 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
707	P . 2 . 0017511 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
708	P . 2 . 0016325 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
709	P . 2 . 0012211 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
710	P . 2 . 0012239 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
711	P . 2 . 0012278 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
712	P . 2 . 0016412 . 40 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
713	P . 2 . 0012223 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
714	P . 2 . 0014803 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
715	P . 2 . 0012858 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
716	P . 2 . 0013726 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
717	P . 2 . 0011032 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
718	P . 2 . 0016441 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
719	P . 2 . 0014305 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
720	P . 2 . 0016611 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
721	P . 2 . 0011762 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
722	P . 2 . 0011045 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
723	P . 2 . 0011947 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
724	P . 2 . 0017509 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
725	P . 2 . 0016323 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
726	P . 2 . 0016156 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
727	P . 2 . 0014277 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
728	P . 2 . 0014046 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
729	P . 2 . 0009376 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
730	P . 2 . 0004580 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
731	P . 2 . 0014291 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
732	P . 2 . 0016294 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
733	P . 2 . 0005688 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
734	P . 2 . 0013514 . 20 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
735	P . 2 . 0011082 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
736	P . 2 . 0006959 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
737	P . 2 . 0013699 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
738	P . 2 . 0015273 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
739	P . 2 . 0015662 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
740	P . 2 . 0015857 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
741	P . 2 . 0013655 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
742	P . 2 . 0015264 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
743	P . 2 . 0014771 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
744	P . 2 . 0017504 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
745	P . 2 . 0015278 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
746	P . 2 . 0015691 . 10 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
747	P . 2 . 0011203 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
748	P . 2 . 0011389 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
749	P . 2 . 0016609 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
750	P . 2 . 0007786 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
751	P . 2 . 0014368 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
752	P . 2 . 0016789 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
753	P . 2 . 0014758 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
754	P . 2 . 0004292 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
755	P . 2 . 0015963 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
756	P . 2 . 0016261 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
757	P . 2 . 0017381 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
758	P . 2 . 0014964 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
759	P . 1 . 0015925 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
760	P . 2 . 0011031 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
761	P . 2 . 0011295 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
762	P . 2 . 0000169 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
763	P . 2 . 0000185 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
764	P . 2 . 0006571 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
765	P . 2 . 0000527 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
766	P . 2 . 0000292 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
767	P . 2 . 0000529 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
768	P . 2 . 0000707 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
769	P . 2 . 0000506 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
770	P . 2 . 0000183 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
771	P . 2 . 0000528 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
772	P . 2 . 0000171 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
773	P . 2 . 0014329 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
774	P . 2 . 0014358 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
775	P . 2 . 0014288 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
776	P . 2 . 0015976 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
777	P . 2 . 0014355 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
778	P . 2 . 0014276 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
779	P . 1 . 0015427 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
780	P . 2 . 0002187 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
781	P . 2 . 0000166 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
782	P . 2 . 0000508 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
783	P . 2 . 0014312 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
784	P . 2 . 0011030 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
785	P . 1 . 0015870 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
786	P . 2 . 0016594 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
787	P . 1 . 0015873 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
788	P . 1 . 0015868 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
789	P . 2 . 0007758 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
790	P . 2 . 0014262 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
791	P . 2 . 0000173 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
792	P . 2 . 0000286 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
793	P . 2 . 0015677 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
794	P . 2 . 0016256 . 53 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
795	P . 2 . 0011053 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
796	P . 2 . 0000460 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
797	P . 2 . 0002147 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
798	P . 2 . 0000284 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
799	P . 2 . 0000492 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
800	P . 2 . 0000180 . 30 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
801	P . 2 . 0000540 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
802	P . 2 . 0017527 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
803	P . 2 . 0000283 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
804	P . 2 . 0015921 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
805	P . 2 . 0002463 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
806	P . 2 . 0015285 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
807	P . 2 . 0000172 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
808	P . 2 . 0013205 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
809	P . 2 . 0014180 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
810	P . 2 . 0011504 . 20 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
811	P . 2 . 0006771 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
812	P . 2 . 0006880 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
813	P . 2 . 0014053 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
814	P . 2 . 0016872 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
815	P . 2 . 0000709 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
816	P . 1 . 0015871 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
817	P . 1 . 0015875 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
818	P . 2 . 0000538 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
819	P . 2 . 0004546 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
820	P . 2 . 0003234 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
821	P . 2 . 0016565 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
822	P . 2 . 0006897 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
823	P . 2 . 0013151 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
824	P . 2 . 0013266 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
825	P . 2 . 0001513 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
826	P . 2 . 0013489 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
827	P . 2 . 0012061 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
828	P . 2 . 0013198 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
829	P . 2 . 0015856 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
830	P . 2 . 0014293 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
831	P . 2 . 0014111 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
832	P . 2 . 0002216 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
833	P . 2 . 0011559 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
834	P . 2 . 0014324 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
835	P . 2 . 0002554 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
836	P . 2 . 0003291 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
837	P . 2 . 0002364 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
838	P . 2 . 0013344 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
839	P . 2 . 0016314 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
840	P . 2 . 0016315 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
841	P . 2 . 0016278 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
842	P . 1 . 0015867 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
843	P . 2 . 0014328 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
844	P . 2 . 0014349 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
845	P . 2 . 0014282 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
846	P . 2 . 0000702 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
847	P . 2 . 0003864 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
848	P . 2 . 0006969 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
849	P . 2 . 0003084 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
850	P . 2 . 0011043 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
851	P . 2 . 0001522 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

No.	Nama WP	Status	keterangan
852	P . 2 . 0014340 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
853	P . 2 . 0014177 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
854	P . 2 . 0017530 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
855	P . 2 . 0014332 . 10 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
856	P . 2 . 0016290 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
857	P . 1 . 0015466 . 30 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
858	P . 2 . 0016282 . 20 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
859	P . 2 . 0017591 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
860	P . 2 . 0000507 . 20 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
861	P . 2 . 0012528 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
862	P . 2 . 0011036 . 10 . 1	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
863	P . 2 . 0011061 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
864	P . 2 . 0011057 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
865	P . 2 . 0011029 . 20 . 3	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
866	P . 2 . 0011138 . 30 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
867	P . 2 . 0011353 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
868	P . 2 . 0015684 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
869	P . 2 . 0015850 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
870	P . 2 . 0011434 . 30 . 4	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
871	P . 2 . 0013939 . 10 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
872	P . 2 . 0014896 . 30 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
873	P . 2 . 0006960 . 40 . 2	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
874	P . 2 . 0016599 . 10 . 7	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak
875	P . 2 . 0015863 . 10 . 5	Aktif	Tidak Pernah Bayar Pajak

Pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman (Pajak Restoran) atas WP Selama Periode Tahun 2024

No.	Nama Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (Rp)
1	K												-	-
2	CVKM	2.000,00												2.000,00
3	SM1T												8.000,00	8.000,00
4	MLAM	17.523,00												17.523,00
5	TELT						25.740,00							25.740,00
6	SKAS									35.000,00				35.000,00
7	YENY												38.400,00	38.400,00
8	SRAS										48.000,00			48.000,00
9	KERK										56.000,00			56.000,00
10	KUNK												60.000,00	60.000,00
11	SRAS									75.000,00				75.000,00
12	SRAS				62.000,00							17.200,00		79.200,00
13	PINP		80.000,00											80.000,00
14	KANK											100.000,00		100.000,00
15	SOYS												104.000,00	104.000,00
16	AGKA									116.132,00				116.132,00
17	SIHS												139.500,00	139.500,00
18	WOWW												150.000,00	150.000,00
19	T 0T			158.400,00										158.400,00
20	SDIS			80.000,00		40.000,00				40.000,00				160.000,00
21	K TK						60.000,00			60.000,00			60.000,00	180.000,00
22	TNNT												195.000,00	195.000,00
23	W/PW	200.000,00												200.000,00
24	KUDK	235.000,00												235.000,00
25	CERC								100.000,00			139.300,00		239.300,00
26	SRAS		120.000,00						48.000,00		66.000,00	20.000,00		254.000,00
27	TUTT					256.000,00								256.000,00
28	RDAR							265.455,00						265.455,00
29	TINT											175.000,00	112.000,00	287.000,00
30	NNIN	300.000,00												300.000,00
31	SAKS			196.000,00		26.000,00							80.000,00	302.000,00
32	TANT												302.300,00	302.300,00
33	KRUK												331.500,00	331.500,00
34	RBAR	145.000,00											202.000,00	347.000,00
35	DSYD									350.000,00				350.000,00
36	SRAS	364.700,00												364.700,00
37	RUSR		143.000,00	70.000,00								160.714,00		373.714,00
38	ALIA									404.100,00				404.100,00
39	SRAS							444.000,00						444.000,00
40	KNGK		470.000,00											470.000,00
41	PIKP												494.600,00	494.600,00
42	DERD			510.000,00										510.000,00
43	PANP			510.000,00										510.000,00
44	AUSA									512.652,00				512.652,00
45	SRAS					33.000,00			74.000,00	32.000,00	48.000,00	310.000,00	22.000,00	519.000,00
46	SKAS												519.000,00	519.000,00
47	SRAS										360.000,00		172.000,00	532.000,00
48	CARC			600.000,00										600.000,00
49	ROER	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
50	WASW												600.000,00	600.000,00
51	SRAS		270.000,00	139.500,00		120.000,00		96.000,00						625.500,00
52	STAS		240.000,00					103.500,00		261.800,00			24.000,00	629.300,00
53	SU S											642.500,00		642.500,00
54	TINT												653.400,00	653.400,00
55	R99R					135.000,00	100.000,00	105.000,00	150.000,00	101.350,00		65.500,00		656.850,00
56	TINT												659.300,00	659.300,00
57	C JC						120.000,00		552.000,00					672.000,00
58	KNTK												681.000,00	681.000,00
59	NERN											684.000,00		684.000,00
60	AINA									684.051,00				684.051,00
61	SRAS			689.000,00										689.000,00
62	CSEC			700.000,00										700.000,00
63	SUDS		400.000,00			300.000,00								700.000,00
64	PCOP							105.100,00	134.800,00	125.200,00	107.900,00	122.800,00	113.200,00	709.000,00
65	SRAS				52.000,00					426.000,00		244.000,00		722.000,00
66	SRAS								32.000,00	122.500,00			569.000,00	723.500,00

7 F.

No.	Nama Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (Rp)
67	ORAO		67.387,00					657.000,00						724.387,00
68	TAAT												744.200,00	744.200,00
69	WWAW			750.000,00										750.000,00
70	C JC					120.000,00				250.000,00			390.000,00	760.000,00
71	TLUT	760.000,00												760.000,00
72	C IC											768.181,00		768.181,00
73	ABAA									779.254,00				779.254,00
74	PARP											782.000,00		782.000,00
75	SRAS				56.000,00		10.000,00	404.000,00		10.000,00		282.000,00	20.000,00	782.000,00
76	CAYC			378.000,00						300.000,00	118.000,00			796.000,00
77	CKUC		800.000,00											800.000,00
78	PANP		552.000,00								336.000,00			888.000,00
79	RWAR	120.000,00	50.000,00	100.000,00		115.000,00	105.000,00	100.000,00	145.000,00	101.000,00		65.000,00		901.000,00
80	SANS												909.000,00	909.000,00
81	SERS							320.000,00	280.000,00		312.400,00			912.400,00
82	PDOP	920.000,00												920.000,00
83	YAKY					952.000,00								952.000,00
84	SANS	640.000,00						120.000,00				200.000,00		960.000,00
85	PERP												966.000,00	966.000,00
86	SKAS			81.600,00		200.000,00			126.000,00	40.800,00	304.800,00	184.800,00	40.800,00	978.800,00
87	PBAP												980.000,00	980.000,00
88	SRAS	241.500,00			72.000,00	28.000,00			48.000,00	94.000,00	40.000,00	160.000,00	306.000,00	989.500,00
89	WGAW	200.000,00				800.000,00								1.000.000,00
90	PANP												1.025.000,00	1.025.000,00
91	SRAS			12.000,00		84.000,00	48.000,00		26.000,00	168.000,00	278.000,00	406.000,00	50.000,00	1.072.000,00
92	SRAS		30.000,00			206.000,00	12.000,00	438.000,00	118.000,00		292.000,00			1.096.000,00
93	PARP											1.118.000,00		1.118.000,00
94	GING			1.150.000,00										1.150.000,00
95	SUNS											542.000,00	619.500,00	1.161.500,00
96	SHIS										644.000,00		520.000,00	1.164.000,00
97	STAS	88.000,00						176.000,00					909.000,00	1.173.000,00
98	P LP												1.181.500,00	1.181.500,00
99	SRAS								420.000,00		482.000,00	282.000,00		1.184.000,00
100	P EP												1.200.000,00	1.200.000,00
101	RRER	93.000,00	108.000,00	108.000,00	113.000,00	99.000,00	88.000,00	90.000,00	104.000,00	123.000,00	93.000,00	90.000,00	99.000,00	1.208.000,00
102	AU A			150.000,00						1.110.785,00				1.260.785,00
103	RNDR						1.000.000,00						262.500,00	1.262.500,00
104	NRIN				320.000,00	321.500,00			162.500,00			474.500,00		1.278.500,00
105	SRAS			10.000,00		26.000,00						846.000,00	414.000,00	1.296.000,00
106	PUSP												1.298.000,00	1.298.000,00
107	MBUM		1.300.000,00											1.300.000,00
108	SRAS									244.500,00			1.106.000,00	1.350.500,00
109	WRIW	375.000,00				500.000,00				500.000,00				1.375.000,00
110	IERI	1.387.500,00												1.387.500,00
111	SAKS												1.395.000,00	1.395.000,00
112	DAND			1.247.500,00		150.000,00								1.397.500,00
113	WNTW	350.000,00	350.000,00	350.000,00					350.000,00					1.400.000,00
114	SNGS									336.500,00			1.076.400,00	1.412.900,00
115	DHID			1.220.000,00				100.000,00			65.000,00		30.000,00	1.415.000,00
116	PR P		200.000,00			40.000,00	40.000,00				40.000,00		1.100.000,00	1.420.000,00
117	PANP											1.433.500,00		1.433.500,00
118	SRAS			110.000,00		54.000,00			732.000,00	84.000,00	256.000,00	180.000,00	24.000,00	1.440.000,00
119	C AC											1.448.000,00		1.448.000,00
120	CRIC			1.450.000,00										1.450.000,00
121	P 1P												1.470.000,00	1.470.000,00
122	P BP												1.480.000,00	1.480.000,00
123	RWAR											1.490.000,00		1.490.000,00
124	ARAA							1.500.000,00						1.500.000,00
125	T AT												1.521.000,00	1.521.000,00
126	BHOB		205.000,00	180.000,00	150.000,00	145.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	145.000,00		145.000,00	140.000,00	1.550.000,00
127	WANW	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.560.000,00
128	SRAS		24.000,00	86.000,00	2.000,00	12.000,00		804.000,00	14.000,00			467.000,00	191.000,00	1.600.000,00
129	TNGT										1.616.000,00			1.616.000,00
130	WN W			220.000,00	424.000,00	830.000,00	160.000,00							1.634.000,00
131	KRTK						1.644.000,00							1.644.000,00
132	SRAS		80.000,00	34.000,00		8.000,00	542.000,00		266.000,00	10.000,00	120.000,00	70.000,00	518.000,00	1.648.000,00
133	WKAW					1.650.000,00								1.650.000,00

No.	Nama Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (Rp)
134	DIND					1.674.400,00								1.674.400,00
135	PNGP												1.680.000,00	1.680.000,00
136	SRAS					132.000,00		540.000,00		48.000,00	726.000,00	236.000,00		1.682.000,00
137	SUTS									184.000,00			1.498.000,00	1.682.000,00
138	CATC											1.700.000,00		1.700.000,00
139	WWIW			1.710.000,00										1.710.000,00
140	SRAS	21.000,00					592.500,00		425.000,00				677.000,00	1.715.500,00
141	SANS		1.720.000,00											1.720.000,00
142	PRAP												1.732.500,00	1.732.500,00
143	CA C				134.000,00				55.000,00	255.600,00	309.300,00	662.300,00	334.886,00	1.751.086,00
144	SRAS		531.500,00			24.000,00		213.500,00			813.500,00	114.000,00	80.000,00	1.776.500,00
145	SALS	150.000,00	150.000,00	150.000,00		300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
146	SNTS	150.000,00	150.000,00		300.000,00	150.000,00		300.000,00					750.000,00	1.800.000,00
147	WIRW	150.000,00	150.000,00		300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
148	WNJW	150.000,00	150.000,00	150.000,00			300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		300.000,00	150.000,00	1.800.000,00
149	WNDW		300.000,00		300.000,00	150.000,00	150.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	1.800.000,00
150	WONW	150.000,00	150.000,00			450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
151	SRAS			120.000,00		22.000,00	290.000,00		224.000,00	30.000,00		797.800,00	344.000,00	1.827.800,00
152	SRAS			23.000,00		8.000,00	157.000,00		472.500,00	340.000,00		816.000,00	36.000,00	1.852.500,00
153	MAKM			174.825,00	79.200,00					89.000,00	50.000,00	1.385.700,00	95.000,00	1.873.725,00
154	SEMS			263.950,00		332.170,00	205.180,00	212.050,00	211.650,00	218.550,00			438.050,00	1.881.600,00
155	WKAW	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.920.000,00
156	SRAS			912.000,00			26.000,00			566.000,00	396.000,00	22.000,00		1.922.000,00
157	SRAS			38.700,00		57.200,00	620.500,00	14.500,00	367.500,00	494.000,00	151.200,00	67.000,00	125.700,00	1.936.300,00
158	SKAS					26.000,00	32.000,00	1.280.000,00		44.000,00	44.000,00	535.600,00	16.000,00	1.977.600,00
159	MLIM												1.980.000,00	1.980.000,00
160	CNDC			1.995.000,00										1.995.000,00
161	SRAS										894.000,00		1.102.000,00	1.996.000,00
162	W SW	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.000.000,00
163	SRAS	1.049.000,00											980.500,00	2.029.500,00
164	PTIP		935.000,00										1.108.500,00	2.043.500,00
165	BGKB						2.050.000,00							2.050.000,00
166	DAND			2.085.000,00										2.085.000,00
167	L CL									2.100.000,00				2.100.000,00
168	WMBW							2.100.000,00						2.100.000,00
169	PUNP	900.000,00											1.204.000,00	2.104.000,00
170	AY A		140.000,00	420.000,00	1.000.000,00		195.000,00	358.400,00						2.113.400,00
171	SKAS				15.000,00			511.500,00			448.000,00		1.141.000,00	2.115.500,00
172	B GB									2.160.000,00				2.160.000,00
173	DAND					238.000,00			572.000,00	660.000,00		260.000,00	450.000,00	2.180.000,00
174	SDIS			1.090.000,00						760.000,00			350.000,00	2.200.000,00
175	WA W		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.200.000,00
176	WGEW		600.000,00			600.000,00			600.000,00				400.000,00	2.200.000,00
177	SRAS			20.000,00		28.000,00	240.000,00	524.500,00	144.000,00	63.000,00	164.500,00	767.000,00	252.500,00	2.203.500,00
178	WETW	1.250.000,00				1.000.000,00								2.250.000,00
179	RRHR	271.500,00	305.000,00		105.000,00	245.500,00	289.000,00	130.000,00		304.000,00	203.000,00	220.000,00	218.000,00	2.291.000,00
180	DERD											758.400,00	1.580.000,00	2.338.400,00
181	BRAB												2.350.000,00	2.350.000,00
182	SRAS			360.000,00		68.000,00		310.000,00				1.146.500,00	482.800,00	2.367.300,00
183	GUNG		2.375.000,00											2.375.000,00
184	CLIC	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
185	DEKD	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
186	DT D			600.000,00				800.000,00					1.000.000,00	2.400.000,00
187	HNTH	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
188	KENK		600.000,00		400.000,00	200.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		2.400.000,00
189	RROR			600.000,00				800.000,00					1.000.000,00	2.400.000,00
190	TBRT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					2.400.000,00
191	W BW	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
192	SRIS								535.500,00			922.250,00	975.800,00	2.433.550,00
193	SRAS											830.000,00	1.624.000,00	2.454.000,00
194	SIHS					112.000,00		645.344,00			791.000,00		912.000,00	2.460.344,00
195	WANW		1.590.400,00						901.400,00					2.491.800,00
196	WGKW					2.500.000,00								2.500.000,00
197	PEMP	962.500,00											1.540.000,00	2.502.500,00
198	PNGP	1.004.000,00											1.510.000,00	2.514.000,00
199	SRAS		10.000,00	537.100,00	174.000,00						1.245.000,00		621.500,00	2.587.600,00
200	MSOM									2.700.000,00				2.700.000,00

No.	Nama Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (Rp)
201	SN S												2.700.000,00	2.700.000,00
202	TK T	1.000.000,00		1.000.000,00		500.000,00							200.000,00	2.700.000,00
203	WMBW							2.700.000,00						2.700.000,00
204	SN S			72.250,00			293.480,00	23.000,00	1.160.000,00	70.000,00	625.000,00	72.000,00	391.000,00	2.706.730,00
205	SRAS					131.200,00	686.000,00	934.000,00		422.000,00		316.000,00	230.000,00	2.719.200,00
206	CRSC		46.973,00	794.430,00	701.037,00	967.600,00						245.807,00	2.193,00	2.758.040,00
207	BNIB		2.800.000,00											2.800.000,00
208	MHIM	2.800.000,00												2.800.000,00
209	SRAS					409.500,00		286.000,00	640.000,00		454.000,00	856.500,00	166.000,00	2.812.000,00
210	PARP	168.000,00	122.300,00					14.000,00	126.000,00	96.000,00		2.350.000,00		2.876.300,00
211	SNGS												2.900.000,00	2.900.000,00
212	SRAS						118.000,00			640.500,00	494.000,00	398.000,00	1.323.500,00	2.974.000,00
213	MS M	250.000,00				1.000.000,00							1.750.000,00	3.000.000,00
214	CURC			3.100.000,00										3.100.000,00
215	P TP												3.130.000,00	3.130.000,00
216	TGAT												3.145.727,00	3.145.727,00
217	SRAS						355.000,00		608.000,00		1.009.000,00		1.181.500,00	3.153.500,00
218	SKAS				76.000,00	119.500,00	960.000,00	1.040.000,00	559.500,00		389.500,00	70.500,00		3.215.000,00
219	K HK						1.566.300,00				1.656.324,10			3.222.624,10
220	PHAP	3.252.000,00												3.252.000,00
221	RESR	330.000,00	325.000,00	320.000,00	195.000,00	317.500,00	242.050,00	251.500,00	265.000,00	261.500,00	255.000,00	255.000,00	245.000,00	3.262.550,00
222	RYAR		400.000,00			600.000,00	525.000,00	400.000,00	42.000,00	202.000,00		929.500,00	164.500,00	3.263.000,00
223	GJEG												3.325.000,00	3.325.000,00
224	YERY			1.170.000,00		934.892,00		942.000,00			300.000,00			3.346.892,00
225	WBUW												3.450.000,00	3.450.000,00
226	MTAM											3.501.000,00		3.501.000,00
227	WIEW									3.600.000,00				3.600.000,00
228	WK W	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.600.000,00
229	CATC		1.750.000,00									1.875.000,00		3.625.000,00
230	SRAS			20.000,00							1.429.520,00		2.276.040,00	3.725.560,00
231	HSTH			1.500.000,00	1.000.000,00	750.000,00		500.000,00						3.750.000,00
232	SRAS						1.178.000,00	256.000,00	12.000,00		1.206.000,00		1.150.000,00	3.802.000,00
233	WAWW							2.350.000,00			1.600.000,00			3.950.000,00
234	F LF								3.404.200,00	251.350,00	317.300,00			3.972.850,00
235	PKAP		1.047.500,00										3.120.000,00	4.167.500,00
236	JERJ										420.000,00	1.700.000,00	2.051.000,00	4.171.000,00
237	PAMP	273.000,00			120.000,00			40.000,00	76.000,00	142.000,00	540.900,00	2.986.000,00		4.177.900,00
238	PARP											4.200.000,00		4.200.000,00
239	DN D	320.000,00	280.000,00	300.000,00		630.000,00	370.000,00	380.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	380.000,00	410.000,00	4.240.000,00
240	WJAW								2.435.000,00	1.875.000,00				4.310.000,00
241	M.BM			2.074.000,00				2.270.900,00						4.344.900,00
242	A CA	1.300.000,00	645.900,00	226.429,00	499.958,00	285.950,00	242.739,00	288.153,00		557.768,00			350.002,00	4.396.899,00
243	SGSS	951.300,00		160.000,00							172.000,00		3.142.500,00	4.425.800,00
244	WAFW	1.400.000,00					1.750.000,00			1.050.000,00	350.000,00			4.550.000,00
245	SRAS	804.000,00	702.000,00		28.000,00	54.000,00	28.000,00		438.000,00	156.000,00	164.000,00		2.222.000,00	4.596.000,00
246	CALC	289.500,00	478.000,00	485.300,00	413.200,00	509.700,00		886.900,00		736.300,00	426.140,00	418.100,00		4.643.140,00
247	WMBW												4.700.000,00	4.700.000,00
248	SSTS							1.436.000,00	3.265.000,00					4.701.000,00
249	RHOR					1.760.000,00		1.760.000,00			1.210.000,00			4.730.000,00
250	WABW									4.800.000,00				4.800.000,00
251	HNAH	735.800,00	432.500,00	704.000,00	277.200,00	448.800,00	440.850,00	277.750,00	393.250,00	416.950,00	246.450,00	233.200,00	198.000,00	4.804.750,00
252	S CS	1.780.000,00		445.000,00	375.000,00	321.500,00	395.000,00	371.000,00		725.000,00		400.000,00		4.812.500,00
253	CORC			200.000,00			358.800,00			864.000,00	470.000,00	532.000,00	2.400.000,00	4.824.800,00
254	IOKI		1.650.000,00									3.235.000,00		4.885.000,00
255	C LC				177.000,00	129.800,00	1.730.840,00		320.000,00	960.000,00		1.480.000,00	100.000,00	4.897.640,00
256	C HC												5.000.000,00	5.000.000,00
257	GALG	400.000,00	450.000,00	450.000,00		750.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	5.050.000,00
258	JERJ				672.000,00	1.050.000,00	222.727,00	200.000,00			552.000,00	2.481.000,00		5.177.727,00
259	ONEO				4.000.000,00	1.200.000,00								5.200.000,00
260	SRAS				420.000,00	245.400,00	192.400,00	26.000,00	1.538.200,00	644.000,00	595.200,00	407.000,00	1.172.400,00	5.240.600,00
261	SAKS						292.700,00	1.119.700,00		728.000,00	284.000,00		2.855.800,00	5.280.200,00
262	DAND	2.645.000,00										1.495.000,00	1.150.000,00	5.290.000,00
263	DJID												5.328.000,00	5.328.000,00
264	UKEU							2.074.700,00	630.000,00			2.631.600,00		5.336.300,00
265	T DT						778.000,00		1.936.500,00	520.000,00		640.200,00	1.704.500,00	5.579.200,00
266	WSAW	2.450.000,00		700.000,00			1.050.000,00			700.000,00		700.000,00		5.600.000,00
267	SRAS			316.800,00		159.900,00	158.400,00	1.044.400,00		745.800,00	16.800,00	3.144.300,00	38.400,00	5.624.800,00

No.	Nama Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (Rp)
268	W		1.714.000,00	320.000,00	138.000,00	22.000,00		390.000,00	1.090.000,00	200.000,00	190.000,00	871.000,00	749.250,00	5.684.250,00
269	SRAS			60.000,00		138.000,00	532.000,00	1.360.000,00	96.000,00		1.064.000,00	1.214.000,00	1.259.500,00	5.723.500,00
270	RECR												5.982.000,00	5.982.000,00
271	WORW	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
272	FSHF					6.105.700,00								6.105.700,00
273	MISM					1.500.000,00	1.000.000,00	857.000,00	820.665,00	568.755,00	511.500,00	463.890,00	391.320,00	6.113.130,00
274	DTAD							5.250.000,00		500.000,00	250.000,00	250.000,00		6.250.000,00
275	KURK		930.000,00	450.000,00	336.000,00			130.000,00	90.000,00		1.368.000,00	2.638.000,00	600.000,00	6.542.000,00
276	FERF			780.000,00			1.810.000,00		1.400.000,00	360.000,00	672.000,00	1.754.000,00		6.776.000,00
277	RENR	569.000,00	553.500,00	603.000,00	579.500,00	536.500,00	505.000,00	600.000,00	603.000,00	606.000,00	560.000,00	605.000,00	603.000,00	6.923.500,00
278	R BR			7.004.000,00										7.004.000,00
279	SSES		1.137.420,00	817.300,00		376.740,00	2.356.710,00	579.770,00		855.140,00		705.540,00	219.100,00	7.047.720,00
280	HPLH	646.352,00	563.877,00	706.341,00	1.041.839,00	833.900,00	723.782,00	219.092,00	340.973,00	431.945,00	686.868,00	565.994,00	316.764,00	7.077.727,00
281	SAKS					493.500,00	1.074.500,00	1.037.000,00	2.478.000,00		794.500,00	1.249.000,00		7.126.500,00
282	DN D						1.920.000,00		1.400.000,00	732.000,00	300.000,00	1.738.000,00	1.068.000,00	7.158.000,00
283	GANG												7.167.500,00	7.167.500,00
284	RN R											4.899.350,00	2.293.950,00	7.193.300,00
285	SRAS						84.000,00		87.500,00		2.107.500,00	1.007.500,00	3.952.500,00	7.239.000,00
286	P PP	1.444.163,00	1.148.531,00	1.098.959,00	1.049.550,00		1.845.600,00	782.400,00						7.369.203,00
287	SAKS								1.222.500,00	537.500,00	1.956.000,00		3.735.700,00	7.451.700,00
288	CMIC					3.339.600,00						4.222.800,00		7.562.400,00
289	WSMW	2.700.000,00						2.700.000,00					2.250.000,00	7.650.000,00
290	WREW	592.500,00	572.500,00	618.500,00	578.500,00	567.000,00	794.000,00	602.000,00	640.000,00	697.000,00	663.000,00	727.000,00	689.000,00	7.741.000,00
291	SBOS		1.200.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.400.000,00	800.000,00	750.000,00	700.000,00		7.850.000,00
292	SRAS				6.183.340,00					1.707.000,00				7.890.340,00
293	URAU			50.000,00			366.000,00	1.100.000,00			1.058.000,00		5.336.000,00	7.910.000,00
294	SAKS		140.000,00	975.000,00	252.000,00	345.300,00			1.620.000,00	2.363.700,00	334.000,00	367.000,00	1.613.400,00	8.010.400,00
295	DPED		120.000,00					3.074.000,00		3.079.400,00	194.000,00	1.590.100,00		8.057.500,00
296	AL A				2.000.000,00	1.550.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	500.000,00	8.200.000,00
297	KRAK			3.902.000,00		60.000,00				195.000,00	2.776.000,00	1.312.000,00	372.000,00	8.617.000,00
298	SAKS		370.000,00		240.000,00	40.000,00		1.353.000,00		2.820.600,00			4.146.300,00	8.969.900,00
299	CPUC		502.900,00	362.600,00		1.350.000,00	120.000,00	280.000,00	710.000,00	50.000,00	528.000,00	5.090.000,00	50.000,00	9.043.500,00
300	CK C					1.390.000,00		3.378.000,00		1.167.000,00		714.000,00	2.574.000,00	9.223.000,00
301	BERB			180.000,00								6.108.745,00	2.956.200,00	9.244.945,00
302	WNIW	953.300,00	711.900,00	856.700,00	575.100,00	570.100,00	833.600,00	780.700,00	909.200,00	709.600,00	748.700,00	971.200,00	910.900,00	9.531.000,00
303	PHAP		6.767.200,00										2.783.000,00	9.550.200,00
304	WNDW	800.000,00		1.600.000,00		1.740.000,00	800.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	9.740.000,00
305	CABC				1.817.727,00	4.563.637,00			2.098.182,00			1.309.091,00		9.788.637,00
306	SAKS		2.666.000,00		1.810.000,00			1.031.000,00	968.800,00		767.500,00	1.674.000,00	947.200,00	9.864.500,00
307	U CU	1.566.000,00	1.519.000,00	1.018.000,00	905.000,00	930.000,00	720.000,00	940.000,00	795.000,00	545.000,00	560.000,00	335.000,00	220.000,00	10.053.000,00
308	CERC		100.000,00	2.190.000,00		80.000,00	2.900.000,00			1.940.000,00		2.684.000,00	360.000,00	10.254.000,00
309	CULC	3.120.000,00		2.680.000,00				560.000,00	500.000,00			1.000.000,00	2.480.000,00	10.340.000,00
310	RRAR							2.197.650,00	1.889.550,00	2.065.750,00	1.404.300,00	1.715.950,00	1.411.200,00	10.684.400,00
311	TRAT										6.403.000,00		4.516.000,00	10.919.000,00
312	YORY		11.150.000,00											11.150.000,00
313	SAKS	1.045.440,00		352.800,00				737.200,00	2.652.400,00	200.800,00			6.348.600,00	11.337.240,00
314	KERK											6.913.500,00	4.681.000,00	11.594.500,00
315	KBAK				1.200.000,00	231.500,00	2.375.900,00	1.655.000,00	1.268.000,00	1.708.310,00	1.017.600,00	850.000,00	1.330.000,00	11.636.310,00
316	SRAS		10.185.000,00			1.579.204,00								11.764.204,00
317	P AP			2.538.000,00	1.318.000,00	1.972.000,00		1.822.000,00	360.000,00		960.000,00	2.830.000,00		11.800.000,00
318	R TR		1.312.000,00	479.500,00		128.700,00	715.950,00	544.500,00	1.549.300,00	751.780,00	552.690,00	2.739.100,00	3.046.600,00	11.820.120,00
319	ROFR	1.070.500,00	1.359.700,00	1.373.800,00	621.900,00	814.700,00	1.156.200,00	1.012.200,00	978.500,00	694.200,00	221.100,00	1.295.100,00	1.401.400,00	11.999.300,00
320	GTOG	1.096.181,00	2.255.636,00	1.985.181,00	1.236.454,00	990.600,00	834.909,00	772.636,00	661.789,00	684.249,00	546.913,00	683.664,00	538.583,00	12.286.795,00
321	SERS	6.138.000,00							2.497.500,00				3.765.000,00	12.400.500,00
322	CENC		2.216.000,00	1.650.000,00	2.400.000,00	6.362.000,00								12.628.000,00
323	CMUC			1.200.000,00			1.177.200,00		1.060.000,00		2.100.000,00	6.569.000,00	648.000,00	12.754.200,00
324	S SS										7.500.000,00	5.260.000,00		12.760.000,00
325	PKAP			250.000,00		3.968.000,00	610.000,00	1.534.000,00	900.000,00	994.000,00	1.094.000,00	2.034.000,00	1.430.000,00	12.814.000,00
326	JNJJ	3.065.000,00	3.297.000,00	3.213.000,00	3.671.000,00									13.246.000,00
327	D DD				120.000,00	1.240.000,00	240.000,00	1.698.000,00	1.464.000,00		4.752.000,00	1.682.000,00	2.172.000,00	13.368.000,00
328	KLAK	2.356.000,00		2.936.900,00		2.465.800,00	1.185.700,00	1.068.000,00				2.481.800,00	1.463.400,00	13.957.600,00
329	PKAP												13.975.000,00	13.975.000,00
330	DRED			1.440.000,00		978.000,00	1.668.000,00	816.000,00	3.298.000,00	800.000,00	3.264.000,00	1.370.000,00	598.000,00	14.232.000,00
331	NKEN	1.081.775,00	693.075,00	655.375,00	227.000,00					3.597.230,00	2.906.006,00	2.548.484,00	2.631.920,00	14.340.865,00
332	SRAS	2.113.432,00		96.000,00			2.328.000,00	363.000,00	1.750.000,00	2.366.000,00	3.582.400,00	421.000,00	1.343.500,00	14.363.332,00
333	CERC							859.091,00		927.272,00	10.181.818,00		2.454.546,00	14.422.727,00
334	P RP					710.000,00	3.856.000,00	3.298.000,00	1.476.000,00				5.410.000,00	14.750.000,00

No.	Nama Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (Rp)
335	IOFI	1.035.800,00	1.241.000,00	842.000,00	471.000,00	376.000,00	640.000,00	1.010.300,00	1.259.300,00	1.500.000,00	1.671.000,00	2.215.600,00	2.612.600,00	14.874.600,00
336	CEIC			813.636,00	11.863.636,00		1.309.091,00	818.182,00		203.636,00				15.008.181,00
337	RKER	1.425.000,00	1.383.000,00	1.385.000,00	1.095.000,00	1.381.000,00	1.158.000,00	1.250.000,00	1.290.000,00	1.220.000,00	1.200.000,00	1.096.000,00	1.160.000,00	15.043.000,00
338	C TC		480.000,00	3.768.000,00		372.000,00	3.158.000,00	484.000,00	1.385.560,00	666.000,00	360.000,00	2.890.181,81	1.536.000,00	15.099.741,81
339	KBAK			3.683.500,00	1.320.000,00	60.000,00	1.415.400,00	2.248.000,00	520.000,00	116.000,00	4.594.000,00	1.456.500,00		15.413.400,00
340	KOMK	1.607.400,00	1.557.700,00	1.382.000,00	1.326.100,00	1.468.000,00	1.361.100,00	1.275.200,00	1.188.900,00	1.165.400,00	1.181.600,00	1.088.400,00	1.014.900,00	15.616.700,00
341	SRAS		175.000,00	215.000,00	630.700,00	167.500,00	1.015.000,00	370.000,00	2.719.000,00	1.576.000,00	620.500,00		8.692.500,00	16.181.200,00
342	JN J			2.151.267,00		2.816.078,00		2.288.558,00	3.187.927,00		6.157.892,00			16.601.722,00
343	PRAP										6.048.500,00	10.594.000,00		16.642.500,00
344	ABAA			4.122.000,00	2.155.000,00		4.170.000,00		3.705.000,00		2.885.000,00			17.037.000,00
345	DRID		69.400,00		590.000,00	157.300,00	2.122.000,00	1.158.000,00	1.709.650,00	107.750,00	340.000,00	10.924.950,00	250.000,00	17.429.050,00
346	E CE	1.618.906,00	1.346.201,00	1.424.584,00	774.455,00	965.328,00	1.578.685,00	1.800.824,00	1.893.017,00	1.696.528,00	1.558.381,00	1.641.728,00	1.513.284,00	17.811.921,00
347	DKED				932.000,00	3.700.000,00				2.350.000,00	112.500,00	852.500,00	10.141.000,00	18.088.000,00
348	SRAS		972.000,00	670.000,00	100.000,00			3.201.500,00		914.500,00	3.420.000,00	1.430.000,00	8.580.000,00	19.288.000,00
349	R TR	8.311.900,00	6.269.400,00	5.840.000,00										20.421.300,00
350	BHOB			6.671.000,00	5.000.500,00	2.984.300,00	1.835.000,00	1.060.400,00	751.300,00	848.700,00	828.800,00		448.400,00	20.428.400,00
351	DWID	2.455.900,00		1.982.000,00		1.168.000,00	200.000,00	1.544.000,00			2.200.000,00	3.418.000,00	7.590.000,00	20.557.900,00
352	ICII					7.380.000,00	2.753.500,00	2.580.000,00	2.700.000,00	2.452.500,00		1.677.000,00	1.611.000,00	21.154.000,00
353	HMOH		3.549.000,00		260.000,00								17.362.000,00	21.171.000,00
354	SRAS	21.206.500,00												21.206.500,00
355	KTAK	1.868.076,00	1.890.065,00	1.648.896,00	2.266.594,00		5.170.700,00	1.527.200,00	1.294.880,00	1.548.200,00	1.607.213,00		2.815.175,00	21.636.999,00
356	DKED	6.444.000,00		140.000,00	98.400,00	28.000,00	1.328.000,00	573.780,00	1.166.000,00	298.000,00	2.633.700,00	736.500,00	8.710.001,00	22.156.381,00
357	BBEB			1.191.000,00		1.087.500,00		3.160.000,00	3.570.000,00	1.589.000,00	216.000,00	11.650.680,00	723.580,00	23.187.760,00
358	RSIR		5.350.000,00	3.550.000,00		2.280.000,00				1.196.000,00	5.380.000,00	5.400.000,00	400.000,00	23.556.000,00
359	BTAB							16.948.840,00		8.176.779,00				25.125.619,00
360	BGAB			2.464.000,00			1.340.000,00	1.250.000,00	2.220.000,00		1.200.000,00	340.000,00	16.420.000,00	25.234.000,00
361	A LA	3.553.000,00	2.714.000,00	3.072.000,00			3.355.000,00	2.565.000,00	2.435.000,00	2.514.000,00	2.572.000,00	2.811.000,00	2.012.000,00	27.603.000,00
362	YLAY		27.675.000,00											27.675.000,00
363	A CA			480.000,00		4.480.000,00		2.225.000,00	4.500.000,00			5.670.000,00	10.417.500,00	27.772.500,00
364	FOFF	4.769.300,00	5.700.000,00	4.936.900,00				5.991.002,00					6.596.100,00	27.993.302,00
365	HCAH						13.454.200,00			4.198.400,00	3.793.200,00	3.884.000,00	3.511.500,00	28.841.300,00
366	KPIK	625.110,00	546.710,00	565.890,00	631.030,00	629.670,00	677.860,00	740.290,00	4.050.780,00	3.917.000,00	5.528.700,00	6.599.880,00	5.651.000,00	30.163.920,00
367	BNTB	2.500.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	4.300.000,00	30.200.000,00
368	CAHC	86.700,00	149.400,00	4.408.741,00	3.138.000,00	4.346.000,00	990.000,00	1.256.000,00	4.860.000,00	1.105.000,00	2.234.000,00	7.796.000,00	1.012.818,00	31.382.659,00
369	K DK	160.000,00	4.136.000,00					1.572.000,00	270.000,00		16.730.000,00	4.813.000,00	3.850.000,00	31.531.000,00
370	O(OO	4.110.000,00	3.280.000,00	3.770.000,00	4.240.000,00	2.770.000,00		5.635.000,00	2.965.000,00		6.900.000,00			33.670.000,00
371	EOFE	7.000.000,00	6.500.000,00		5.100.000,00		5.950.000,00				3.100.000,00	6.300.000,00		33.950.000,00
372	WA W	2.622.150,00	2.132.544,00	2.717.115,00	2.128.817,00	2.860.271,00	2.332.293,00	3.321.949,00	3.176.505,00	3.269.981,00	3.154.765,10	3.077.110,00	3.222.658,00	34.016.158,10
373	MBAM	3.400.000,00	3.200.000,00	3.100.000,00	2.110.000,00	3.510.000,00	3.100.000,00	2.915.000,00	2.815.000,00	2.615.000,00	2.530.000,00	2.460.000,00	2.550.000,00	34.305.000,00
374	SRIS	15.165.900,00						562.500,00	4.822.500,00				14.138.500,00	34.689.400,00
375	TRRT	6.200.000,00	2.800.000,00	3.323.200,00		3.900.000,00							18.470.000,00	34.693.200,00
376	D KD								4.111.080,00	8.025.700,00	6.336.343,00		16.291.971,00	34.765.094,00
377	MLUM	3.100.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	2.455.000,00	3.654.000,00	3.200.000,00	3.032.000,00	2.930.000,00	2.730.000,00	2.415.000,00	2.580.000,00	2.640.000,00	34.836.000,00
378	DHAD			4.274.000,00	462.000,00	1.218.000,00	2.812.000,00	1.948.000,00	6.134.050,00	6.604.600,00	4.866.000,00	5.202.000,00	1.380.000,00	34.900.650,00
379	PDOP	4.544.636,00	2.910.273,00	2.489.273,00	2.581.327,00	4.204.218,00	2.866.818,00	3.021.909,00	3.236.364,00	2.327.645,00	1.992.373,00	2.270.582,00	2.688.545,00	35.133.963,00
380	CHTC		700.000,00		900.000,00		306.000,00	4.296.000,00	1.688.000,00	1.731.400,00	6.540.409,00	14.403.500,00	4.750.000,00	35.315.309,00
381	CHTC		14.775.000,00	3.800.000,00								17.650.000,00		36.225.000,00
382	WEGW	27.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00	37.000.000,00
383	C JC		11.205.000,00	3.660.000,00	1.900.000,00							22.337.500,00		39.102.500,00
384	K KK	4.356.660,00	6.181.655,00	4.122.745,00	3.243.900,00	6.423.490,00	6.872.100,00	4.830.760,00	4.264.070,00	716.800,00	3.331.200,00			44.343.380,00
385	NG)N	10.573.000,00	3.034.000,00	9.086.200,00		1.607.000,00	8.053.500,00	3.338.000,00		458.000,00	1.077.150,00	7.915.000,00		45.141.850,00
386	METM										10.164.000,00	17.943.310,00	20.706.180,00	48.813.490,00
387	KLTK		10.073.700,00		9.381.400,00		8.908.800,00		9.826.600,00		11.310.970,00			49.501.470,00
388	RI R	4.557.300,00	4.358.600,00	4.036.900,00	3.952.900,00	4.289.900,00	4.131.000,00	4.241.900,00	4.177.900,00	4.131.000,00	4.059.000,00	4.187.000,00	4.080.000,00	50.203.400,00
389	BRAB	27.305.824,00							23.648.246,00					50.954.070,00
390	W RW	5.867.900,00	1.114.200,00	184.800,00	4.442.000,00	8.095.500,00	6.788.800,00	4.766.500,00	4.489.200,00	3.775.000,00	3.944.500,00	3.766.100,00	3.825.100,00	51.059.600,00
391	HHTH	6.981.200,00	6.867.700,00		4.255.950,00	4.327.650,00	2.288.800,00	1.714.950,00	3.419.650,00	4.772.500,00	6.093.400,00	5.467.850,00	4.883.350,00	51.073.000,00
392	RAIR				5.490.913,00	2.452.600,00	4.730.000,00	6.464.300,00	6.769.000,00	6.625.000,00	6.276.400,00	6.168.200,00	6.439.000,00	51.415.413,00
393	MBAM	5.230.000,00	4.800.000,00	4.128.000,00	3.475.000,00	4.363.000,00	4.424.000,00	4.701.000,00	4.451.000,00	4.652.000,00	3.857.000,00	4.011.000,00	4.151.000,00	52.243.000,00
394	RNAR	3.522.400,00	3.307.900,00	3.823.800,00	3.837.800,00	5.772.900,00	3.595.000,00	5.467.500,00	5.133.600,00	4.012.100,00	4.773.700,00	4.955.100,00	4.519.600,00	52.721.400,00
395	C(SC	5.215.313,00	4.744.149,00	5.006.090,00	4.830.040,00	4.478.064,00	4.466.614,00	4.525.293,00	4.484.518,00	4.661.761,00	4.184.440,90	4.851.684,00	3.847.625,00	55.295.591,90
396	LLIL	5.197.000,00	4.242.000,00	5.136.500,00	4.534.000,00	4.762.000,00	4.267.000,00	3.989.000,00	4.192.000,00	5.347.000,00	5.362.000,00	5.491.000,00	4.350.000,00	56.869.500,00
397	RSAR	4.454.960,00	4.357.050,00	5.605.100,00	4.295.470,00	4.437.980,00	4.492.240,00	4.783.815,00	5.380.200,00	5.171.600,00	4.386.200,00	6.033.400,00	6.244.700,00	59.642.715,00
398	WINW	4.749.455,00	5.366.364,00	4.513.909,00	3.993.182,00	3.820.364,00	6.431.091,00	5.798.545,00	6.460.182,00	5.236.636,00	4.624.455,00	4.580.818,00	6.097.000,00	61.672.001,00
399	MUMM	7.373.400,00			4.357.100,00	5.407.018,00		23.315.452,00	6.275.800,00	4.099.400,00	5.060.000,00	4.372.100,00	3.697.660,00	63.957.930,00
400	C (C	10.234.843,00	6.756.433,00	6.594.428,00	6.723.318,00	6.032.845,00	5.221.613,00	5.924.922,00	5.581.109,00	4.746.032,00	4.119.857,00	2.432.570,00		64.367.970,00
401	GHOG				1.500.000,00				12.600.000,00	28.660.000,00	9.450.000,00	10.925.000,00	7.500.000,00	70.635.000,00

No.	Nama Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (Rp)
402	RR R	12.800.000,00	8.067.000,00	9.064.000,00	8.463.000,00	10.449.000,00				3.857.000,00	5.330.000,00	6.307.000,00	6.320.000,00	70.657.000,00
403	BCAB	8.453.000,00	7.486.600,00	6.779.600,00	5.329.700,00	6.095.200,00	5.992.500,00	6.573.400,00	6.459.000,00	6.627.900,00		12.768.000,00		72.564.900,00
404	R BR	1.015.000,00	6.412.500,00	1.048.000,00	8.135.000,00	460.000,00	6.696.000,00	1.995.500,00	14.967.000,00	416.000,00	388.000,00	32.727.000,00	2.027.500,00	76.287.500,00
405	RDAR	1.920.500,00	1.510.000,00	4.718.182,00	4.390.000,00	7.260.500,00	1.345.000,00	6.945.000,00	9.506.000,00			26.795.000,00	14.330.000,00	78.720.182,00
406	G CG		12.695.000,00					29.917.845,00			18.468.180,00	20.309.430,00		81.390.455,00
407	CRCC	11.448.600,00	9.164.900,00	10.685.200,00	9.066.900,00	7.226.400,00	8.467.800,00	6.342.700,00	5.777.200,00	5.096.300,00	5.350.500,00	4.850.200,00	4.231.200,00	87.707.900,00
408	RRNR	7.845.600,00	7.195.300,00	6.513.700,00	6.805.800,00	6.970.500,00	9.068.100,00	7.603.900,00	8.574.700,00	7.510.100,00	7.751.800,00	8.075.800,00	7.834.300,00	91.749.600,00
409	TNDT	5.978.900,00	6.006.700,00	6.218.300,00	6.803.500,00	7.307.500,00	9.973.000,00	8.359.200,00	8.043.600,00	9.168.100,00	8.788.700,00	7.984.000,00	7.698.600,00	92.330.100,00
410	KI K					14.596.595,00	7.775.450,00	30.091.647,00	8.156.281,00	9.141.858,00	8.929.143,00	8.894.973,00	8.268.366,00	95.854.313,00
411	WAMW	10.296.000,00	8.011.300,00	8.300.400,00	9.166.500,00	8.222.650,00	8.407.100,00	8.017.650,00	8.176.450,00	7.539.900,00	6.464.700,00	6.020.700,00	7.493.350,00	96.116.700,00
412	HAMH	20.171.317,00	7.190.500,00	203.500,00	199.500,00	216.500,00	4.948.500,00	4.502.682,00	13.032.273,00	1.950.773,00	2.867.364,00	37.245.728,00	3.940.927,00	96.469.564,00
413	W AW	11.669.900,00	7.547.000,00	11.974.108,00	7.042.500,00	5.882.100,00	11.215.700,00	11.409.400,00	11.759.100,00	6.875.200,00	6.038.700,00	4.069.200,00	3.079.500,00	98.562.408,00
414	KO K								14.167.670,00	20.666.800,00	23.085.040,00	26.917.110,00	28.906.350,00	113.742.970,00
415	M CM	13.986.540,00	11.490.706,00	11.072.278,00	7.973.604,00	9.360.057,00	12.916.173,00	12.180.239,00	10.677.113,00	11.224.421,00	10.844.396,10	8.285.775,00	9.060.375,00	129.071.677,10
416	CSAC	310.000,00	4.214.390,00	7.944.000,00	4.314.995,00	17.895.500,00	8.239.000,00	13.982.455,00	16.746.500,00	7.252.000,00	11.747.090,00	27.116.700,00	24.323.625,00	144.086.255,00
417	WANW	14.222.535,00	10.111.113,00	11.295.835,00	18.317.170,00	15.269.975,00	11.702.920,00	11.245.040,00	11.472.300,00	11.940.800,00	9.663.310,00	10.543.100,00	10.395.000,00	146.179.098,00
418	RAHR	11.511.400,00	15.185.300,00	9.598.200,00	10.945.400,00	10.964.700,00	12.162.000,00	12.939.100,00	13.879.700,00	10.479.700,00	15.913.600,00	12.975.900,00	13.387.500,00	149.942.500,00
419	CUTC		2.750.000,00	5.055.000,00	18.913.000,00	2.934.000,00	8.196.000,00	7.410.680,00	44.886.300,00	9.633.000,00	13.502.000,00	28.725.000,00	12.574.000,00	154.578.980,00
420	ESPE	16.300.000,00	17.350.000,00	13.000.000,00	9.300.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	12.500.000,00	12.700.000,00	9.600.000,00	9.650.000,00	9.800.000,00	10.600.000,00	154.800.000,00
421	CPEC							13.321.300,00	48.176.190,00	38.016.057,00	21.621.320,00	16.144.700,00	22.896.480,00	160.176.047,00
422	WKAW	650.000,00	4.788.648,00	3.627.639,00	4.101.250,00	3.440.000,00	10.576.750,00	4.432.000,00	17.691.000,00	33.076.000,00	34.302.240,00	27.341.350,00	17.527.740,00	161.554.617,00
423	PDOP	17.639.862,00	14.100.947,00	14.925.508,00	13.864.655,00	15.001.258,00	13.073.531,00	13.855.167,00	14.216.467,00	13.006.712,00	11.849.528,00	12.807.986,00	11.137.714,00	165.479.335,00
424	CYLC	13.481.364,00	12.300.000,00	11.207.773,00	14.614.342,00	14.392.182,00	13.665.127,00	15.976.891,00	15.746.636,00	14.340.636,00	13.953.045,50	13.780.127,00	16.932.182,00	170.390.305,50
425	D BD				22.600.000,00	45.298.300,00		59.983.750,00	22.377.300,00	12.596.600,00	4.871.600,00	5.021.000,00	2.333.000,00	175.081.550,00
426	S PS		41.393.000,00	19.236.000,00	20.648.000,00	18.922.618,00	14.010.000,00	15.690.000,00	13.950.190,00	10.677.518,00	9.379.000,00	9.890.627,00	11.011.950,00	184.808.903,00
427	NURN	42.306.273,00	14.735.909,00	34.958.909,00	18.662.091,00	24.817.985,00	13.592.273,00	33.387.091,00	16.158.636,00					198.619.167,00
428	COFC	17.870.000,00	18.390.000,00	19.177.500,00	15.100.000,00	14.395.900,00	16.715.000,00	16.779.000,00	17.465.000,00	16.480.000,00	15.155.000,00	15.255.000,00	15.990.000,00	198.772.400,00
429	PDOP	25.463.818,00	17.882.909,00	18.230.036,00	17.706.764,00	19.037.964,00	17.876.273,00	16.943.273,00	16.890.182,00	13.466.455,00	13.696.964,00	13.454.581,00	14.008.182,00	204.657.401,00
430	PTRP									38.853.000,00			169.325.000,00	208.178.000,00
431	G LG	16.114.289,00	19.362.311,00	17.847.180,00	29.211.243,00	18.542.650,00	16.550.832,00	14.251.573,00	13.716.700,00	16.843.046,00	14.858.388,00	17.696.957,00	18.300.000,00	213.295.169,00
432	CARC	23.694.300,00	16.824.000,00	18.190.700,00	18.190.800,00	16.607.000,00	20.857.300,00	22.021.500,00	24.622.400,00	19.852.100,00	18.492.400,00	23.745.450,00	16.550.360,00	239.648.310,00
433	AKAA	32.168.572,00	21.658.118,00	25.242.272,00	26.612.345,00	21.445.981,00	20.169.700,00	21.815.609,00	17.539.991,00	14.851.946,00	15.461.181,80	14.362.181,00	14.481.636,00	245.809.532,80
434	S.KS	71.250.003,00	26.659.093,00	2.318.182,00		28.977.275,00			16.227.274,00			77.727.300,00	27.818.184,00	250.977.311,00
435	IREI							42.134.740,00	78.633.369,00	44.093.380,00	31.645.835,00	42.109.745,00	42.148.330,00	280.765.399,00
436	C HC	198.427.578,00	11.884.230,00	10.249.860,00	11.500.000,00			30.225.750,00	11.746.600,00	10.699.520,00	7.514.800,00	7.797.301,00	8.405.070,00	308.450.709,00
437	COFC	24.977.545,00	22.864.273,00	24.215.364,00	16.202.091,00	22.603.818,00	27.545.545,00	28.381.455,00	28.117.363,00	29.876.818,00	31.326.818,10	34.789.091,00	32.071.545,00	322.971.726,10
438	RAMR	30.272.109,00	27.442.392,00	26.025.660,00	31.817.630,00	28.374.470,00	27.266.460,00	27.273.040,00	27.749.965,00	24.943.636,00	25.076.936,40	26.081.563,00	27.364.409,00	329.688.270,40
439	CIAC		8.800.000,00	27.680.971,00	30.160.000,00	21.557.500,00	7.451.525,00	25.178.108,00	6.056.324,00	39.695.500,00	49.444.320,00	48.917.126,00	65.719.073,00	330.660.447,00
440	P,TP	64.202.534,00			28.691.901,00	31.092.316,00		29.456.711,00	62.475.172,00		29.952.129,00		115.965.734,00	361.836.497,00
441	CAKC	39.259.510,00	32.187.207,00	32.675.049,00	31.943.535,00	30.036.120,00	29.870.222,00	28.804.744,00	31.543.136,00	30.156.227,00	25.360.545,40	30.233.636,00	28.311.500,00	370.381.431,40
442	W TW	33.771.400,00	33.383.300,00	29.263.900,00	32.463.500,00	32.684.300,00	36.172.100,00	33.562.100,00	33.528.800,00	31.495.300,00	32.332.900,00	30.042.500,00	31.902.864,00	390.602.964,00
443	N CN	37.471.149,00	35.142.600,00	31.235.225,00	44.849.849,00	37.434.056,00	30.508.334,00	32.817.194,00	33.300.190,00	32.990.680,00	33.822.230,00	32.099.550,00	35.098.550,00	416.769.607,00
444	KOHK	46.326.060,00	33.126.170,00	37.408.940,00	27.994.890,00	32.392.590,00		34.767.700,00	69.891.180,00	37.046.350,00	30.639.400,00	33.944.570,00	36.255.560,00	419.793.410,00
445	SHOS	54.262.245,00	25.370.445,00	31.507.406,00	58.915.572,00	32.429.012,00	40.555.645,00	41.499.440,00	49.254.987,00	44.486.636,00	49.623.263,00	49.019.825,00	38.382.932,00	515.307.408,00
446	P(EP	54.182.900,00	46.226.500,00	49.660.600,00	39.060.100,00	51.329.100,00	44.392.100,00	48.403.800,00	49.120.300,00	42.393.400,00	40.669.400,00	40.669.400,00	40.726.100,00	546.833.700,00
447	KRUK	43.318.000,00	37.760.900,00	37.853.770,00	41.703.570,00	47.263.588,00	49.849.615,00	53.281.000,00	55.342.000,00	52.679.832,00	49.193.718,00	51.677.602,00	54.024.284,00	573.947.879,00
448	C& C	32.203.455,00	26.545.875,00	23.458.840,00	58.784.010,00	63.563.845,00	72.723.785,00	64.317.375,00	65.042.400,00	63.434.731,00	60.732.148,00	64.562.040,00	65.180.560,00	660.549.064,00
449	PA P	64.068.016,00	47.564.744,00	54.295.012,00	45.643.865,00	63.482.326,00	56.666.183,00	54.133.034,00	54.255.578,00	57.055.326,00	52.004.132,00	60.711.383,00	61.216.477,00	671.096.076,00
450	R/PR	92.472.871,00	66.142.820,00	69.581.059,00	101.803.077,00	85.685.873,00	50.733.434,00	61.044.982,00	77.431.944,00	68.886.149,00	67.819.154,00	62.538.114,00	64.341.982,00	868.481.459,00
451	PA P	84.537.816,00	50.431.534,00	96.013.805,00	64.612.911,00	57.565.040,00	93.922.132,00	82.350.497,00	74.656.250,00	78.353.479,00	61.694.402,00	63.170.401,00	76.821.700,00	884.129.967,00
452	WTEW	93.181.950,00	73.732.750,00	79.610.600,00	86.714.000,00	70.989.800,00	67.992.600,00	81.213.300,00	89.634.750,00	87.733.350,00	85.080.600,00	89.193.850,00	76.392.800,00	981.470.350,00
453	WREW	667.354.622,12	66.827.513,00	98.089.208,90	126.720.490,00	56.691.170,00	70.776.910,00	71.685.135,00	76.088.108,00		71.214.980,00	72.099.250,00	74.810.310,00	1.452.357.697,02
454	PA P	264.515.453,00			133.405.879,00	162.659.052,00		162.774.764,00		177.322.558,00	129.578.407,00	131.396.406,00	552.812.867,00	1.714.465.386,00
455	PD P	241.664.438,00	171.234.893,00	165.551.698,00	148.088.413,00	183.366.672,00	124.322.872,00	126.121.968,00	121.888.931,00	108.537.064,00	106.516.672,00	113.492.749,00	115.210.118,00	1.725.996.488,00
456	PNDP		202.417.183,00	187.409.150,00	160.222.998,00	198.728.230,00	159.226.638,00	149.643.772,00	148.559.095,00	129.570.363,00	124.031.226,00	135.500.868,00	147.717.367,00	1.743.026.890,00
Jumlah		**2.878.060.423,12**	**1.635.780.716,00**	**1.646.658.333,90**	**1.829.872.377,00**	**1.907.458.137,00**	**1.499.086.591,00**	**2.007.497.663,00**	**1.985.267.842,00**	**1.810.076.942,00**	**1.840.646.484,40**	**2.183.389.648,81**	**2.843.837.631,00**	**24.067.632.789,23**

Rekalkulasi Honor Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLU RSUKT

A. Rekalkulasi Acuan Dasar Penentuan Besaran Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dengan Mengurangkan Jasa Pelayanan

Tahun	2024												2025		Jumlah (Rp)
Bulan	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	
Gaji dan Tunjangan Kotor Direktur	16.241.354,00	16.162.134,00	16.261.159,00	16.201.744,00	16.559.356,00	16.559.356,00	16.573.566,00	16.559.356,00	16.515.517,00	16.579.161,00	16.579.161,00	16.539.551,00	16.618.771,00	16.598.966,00	230.549.152,00
Besaran maksimal Honor Dewan Pengawas (Ketua=30%)	4.872.406,20	4.848.640,20	4.878.347,70	4.860.523,20	4.967.806,80	4.967.806,80	4.972.069,80	4.967.806,80	4.954.655,10	4.973.748,30	4.973.748,30	4.961.865,30	4.985.631,30	4.979.689,80	69.164.745,60
Besaran maksimal Honor Dewan Pengawas (Anggota=26%)	4.222.752,04	4.202.154,84	4.227.901,34	4.212.453,44	4.305.432,56	4.305.432,56	4.309.127,16	4.305.432,56	4.294.034,42	4.310.581,86	4.310.581,86	4.300.283,26	4.320.880,46	4.315.731,16	59.942.779,52
Besaran maksimal Honor Dewan Pengawas (Sekretaris=5%)	812.067,70	808.106,70	813.057,95	810.087,20	827.967,80	827.967,80	828.678,30	827.967,80	825.775,85	828.958,05	828.958,05	826.977,55	830.938,55	829.948,30	11.527.457,60

B. Realisasi Pembayaran Honorarium

Tahun Pembayaran	2024												2025		Jumlah (Rp)
Bulan	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	
Ketua	8.105.925,60	8.267.608,50	8.472.625,50	8.107.597,50	8.208.402,00	7.677.065,10	7.774.991,70	8.072.428,50	8.228.698,50	8.030.603,40	7.915.818,60	-	7.936.189,80	8.001.284,70	7.700.022,30	112.499.261,70
Anggota I	7.025.135,52	7.025.135,52	7.342.942,10	7.342.942,10	7.342.942,10	6.653.456,42	6.738.326,14	6.996.104,70	7.131.538,70	6.959.856,28	6.860.376,12	6.878.031,16	-	6.934.446,74	6.673.352,66	97.904.586,26
Anggota II	7.025.135,52	7.025.135,52	7.342.942,10	7.342.942,10	7.342.942,10	6.653.456,42	6.738.326,14	6.996.104,70	7.131.538,70	6.959.856,28	6.860.376,12	-	6.878.031,16	6.934.446,74	6.673.352,66	97.904.586,26
Sekretaris	1.350.987,60	1.350.987,60	1.412.104,25	1.283.702,94	1.368.067,00	1.279.510,85	1.295.831,95	1.345.404,75	1.371.449,75	1.338.433,90	1.319.303,10	-	1.322.698,30	1.333.547,45	1.283.337,05	18.655.366,49
JUMLAH	**23.507.184,24**	**23.668.867,14**	**24.570.613,95**	**24.077.184,64**	**24.262.353,20**	**22.263.488,79**	**22.547.475,93**	**23.410.042,65**	**23.863.225,65**	**23.288.749,86**	**22.955.873,94**	**6.878.031,16**	**16.136.919,26**	**23.203.725,63**	**22.330.064,67**	**326.963.800,71**

C. Selisih Perhitungan Sebelum Dikurangi Pajak

Tahun	2024												2025		Jumlah (Rp)
Bulan	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	
Ketua	3.233.519,40	3.418.968,30	3.594.277,80	3.247.074,30	3.240.595,20	2.709.258,30	2.802.921,90	3.104.621,70	3.274.043,40	3.056.855,10	2.942.070,30	-	2.974.324,50	3.015.653,40	2.720.332,50	43.334.516,10
Anggota I	2.802.383,48	2.822.980,68	3.115.040,76	3.130.488,66	3.037.509,54	2.348.023,86	2.429.198,98	2.690.672,14	2.837.504,28	2.649.274,42	2.549.794,26	2.577.747,90	-	2.613.566,28	2.357.621,50	37.961.806,74
Anggota II	2.802.383,48	2.822.980,68	3.115.040,76	3.130.488,66	3.037.509,54	2.348.023,86	2.429.198,98	2.690.672,14	2.837.504,28	2.649.274,42	2.549.794,26	-	2.577.747,90	2.613.566,28	2.357.621,50	37.961.806,74
Sekretaris	538.919,90	542.880,90	599.046,30	473.615,74	540.099,20	451.543,05	467.153,65	517.436,95	545.673,90	509.475,85	490.345,05	-	495.720,75	502.608,90	453.388,75	7.127.908,89
JUMLAH	**9.377.206,26**	**9.607.810,56**	**10.423.405,62**	**9.981.667,36**	**9.855.713,48**	**7.856.849,07**	**8.128.473,51**	**9.003.402,93**	**9.494.725,86**	**8.864.879,79**	**8.532.003,87**	**2.577.747,90**	**6.047.793,15**	**8.745.394,86**	**7.888.964,25**	**126.386.038,47**

D. Perhitungan Pajak

Tahun	2024												2025		Jumlah (Rp)
Bulan	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	
Ketua (15%)	485.027,91	512.845,25	539.141,67	487.061,15	486.089,28	406.388,75	420.438,29	465.693,26	491.106,51	458.528,27	441.310,55	-	446.148,68	452.348,01	408.049,88	6.500.177,46
Anggota I (15%)	420.357,52	423.447,10	467.256,11	469.573,30	455.626,43	352.203,58	364.379,85	403.600,82	425.625,64	397.391,16	382.469,14	386.662,19	-	392.034,94	353.643,23	5.694.271,01
Anggota II (15%)	420.357,52	423.447,10	467.256,11	469.573,30	455.626,43	352.203,58	364.379,85	403.600,82	425.625,64	397.391,16	382.469,14	-	386.662,19	392.034,94	353.643,23	5.694.271,01
Sekretaris (5%)	26.946,00	27.144,05	29.952,32	23.680,79	27.004,96	22.577,15	23.357,68	25.871,85	27.283,70	25.473,79	24.517,25	-	24.786,04	25.130,45	22.669,44	356.395,47
JUMLAH	**1.352.688,95**	**1.386.883,50**	**1.503.606,21**	**1.449.888,54**	**1.424.347,10**	**1.133.373,06**	**1.172.555,67**	**1.298.766,75**	**1.369.641,49**	**1.278.784,38**	**1.230.766,08**	**386.662,19**	**857.596,91**	**1.261.548,34**	**1.138.005,78**	**18.245.114,95**

E. Selisih Perhitungan Setelah Dikurangi Pajak

Tahun	2024												2025		Jumlah (Rp)
Bulan	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	
Ketua	2.748.491,49	2.906.123,05	3.055.136,13	2.760.013,15	2.754.505,92	2.302.869,55	2.382.483,61	2.638.928,44	2.782.936,89	2.598.326,83	2.500.759,75	-	2.528.175,82	2.563.305,39	2.312.282,62	36.834.338,64
Anggota I	2.382.025,96	2.399.533,58	2.647.784,65	2.660.915,36	2.581.883,11	1.995.820,28	2.064.819,13	2.287.071,32	2.411.878,64	2.251.883,26	2.167.325,12	2.191.085,71	-	2.221.531,34	2.003.978,27	32.267.535,73
Anggota II	2.382.025,96	2.399.533,58	2.647.784,65	2.660.915,36	2.581.883,11	1.995.820,28	2.064.819,13	2.287.071,32	2.411.878,64	2.251.883,26	2.167.325,12	-	2.191.085,71	2.221.531,34	2.003.978,27	32.267.535,73
Sekretaris	511.973,90	515.736,85	569.093,98	449.934,95	513.094,24	428.965,90	443.795,97	491.565,10	518.390,20	484.002,06	465.827,80	-	470.934,71	477.478,45	430.719,31	6.771.513,42
JUMLAH	**8.024.517,31**	**8.220.927,06**	**8.919.799,41**	**8.531.778,82**	**8.431.366,38**	**6.723.476,01**	**6.955.917,84**	**7.704.636,18**	**8.125.084,37**	**7.586.095,41**	**7.301.237,79**	**2.191.085,71**	**5.190.196,24**	**7.483.846,52**	**6.750.958,47**	**108.140.923,52**
Total Kelebihan Pembayaran atas Tahun 2024 (November 2023 s.d Oktober 2024)	**88.715.922,29**														
Total Potensi Kelebihan Pembayaran (Oktober 2024 s.d. Desember 2024)	**19.425.001,23**														

Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Pemeliharaan TA 2024

Pekerjaan: Rehab Gedung Kantor (Dinas Pendidikan)

Penyedia : CV AA

Nomor Kontrak : PPK.02/SP/2812184/Rehab.Gdg-Kantor/DISDIK/2024

Nilai Kontrak : Rp291.955.913,00

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6 - 5*	*8 = (4 x 7)*	*10*
1	Pembongkaran Penutup Atap Eksisting	M2	14.930,30	574,16	518,60	55,56	829.527,47	-
2	Pemasangan Penutup Atap (MultiRoof)	M2	182.676,65	574,16	518,60	55,56	10.149.514,67	-
3	Pekerjaan Waterproof Atap DAK (SikaTop - Seal 107) + *Screed*	M2	114.956,93	209,44	201,28	8,16	938.048,55	-
4	Pemasangan Penutup Lantai (*homogenous tile* 60x60 *unpolished*)	M2	509.486,42	209,44	201,28	8,16	4.157.409,19	-
Jumlah							**16.074.499,88**	

Pekerjaan: Pemeliharaan Rutin Jalan - Jalan Daerah Kelurahan Kampung Empat (DPUPR)

Penyedia : CV BIP

Nomor Kontrak : 00.3.3/05/PPK-PML.KP.4/BM/DPUPR/2024

Nilai Kontrak : Rp199.533.000,00

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6 - 5*	*8 = (4 x 7)*	*10*
1	CPHMA Kemasan Kantong - *Baby Roller*	ton	3.511.609,51	17,84	15,23	2,61	9.165.300,82	Depan Taman Berkampung - Baby Roller
2	Pengecatan Median dan Kerb + Pembersihan	M2	67.400,37	1.101,34	1.073,48	27,86	1.877.774,31	Kerb Median Taman Berkampung
Jumlah							**11.043.075,13**	

Pekerjaan: Pemeliharaan Rutin Jalan-Jalan Daerah Kelurahan Kr.Anyar Kecamatan Tarakan Barat (DPUPR)

Penyedia : CV GJ

Nomor Kontrak : 00.3.3/06/SPK/PPK-PML.KRANYR/BM/DPUPR/2024

Nilai Kontrak : Rp199.596.000,00

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Uji Fisik	Selisih	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6 - 5*	*8 = (4 x 7)*	*10*
1	CPHMA Kemasan Kantong (*Stemper*)	ton	3.484.667,09	7,60	5,37	2,23	7.770.807,61	DEPAN MASJID BAITURAHMAN PAS-PUTIH
Jumlah							**7.770.807,61**	

Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas atas Bukti Tiket Pesawat yang Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya

No.	Nama	SKPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Keterangan	Kelebihan Uang Harian (Rp)	Kelebihan Uang Representasi (Rp)	Kelebihan Uang Penginapan (Rp)	Kelebihan Uang Transportasi (Rp)	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k = g + h + i + j*
1	AK	Sekretariat DPRD	26/6/2024	29/6/2024	Lanjutan dari perjalanan 23 Juni s.d. 26 Juni 2024. Kondisi sebenarnya kembali pada tanggal 26 Juni 2024, namun terdapat SPJ s.d. 29 Juni 2024. Kelebihan pembayaran Uang Harian, Uang Representasi dan Biaya Penginapan 27 s.d. 29 Juni 2024.	1.110.000,00	750.000,00	12.306.000,00		14.166.000,00
2	AR	Sekretariat DPRD	7/1/2024	10/1/2024	Kelebihan pembayaran atas tiket kembali				2.558.700,00	2.558.700,00
3	AR	Sekretariat DPRD	14/1/2024	17/1/2024	Perjalanan dinas lanjutan sehingga kelebihan atas tiket kembali				2.558.700,00	2.558.700,00
4	AR	Sekretariat DPRD	17/1/2024	20/1/2024	Tanggal kembali adalah 19 Januari 2024 sehingga terdapat kelebihan pembayaran satu hari atas uang harian, uang representasi dan uang penginapan	530.000,00	250.000,00	8.720.000,00		9.500.000,00
5	AR	Sekretariat DPRD	4/2/2024	7/2/2024	Kelebihan pembayaran satu hari atas uang harian, uang representasi dan uang penginapan pada tanggal 4 Februari	530.000,00	250.000,00	8.720.000,00		9.500.000,00
6	AR	Sekretariat DPRD	18/2/2024	21/2/2024	Tanggal keberangkatan adalah 19 Februari 2024 sehingga terdapat kelebihan pembayaran satu hari atas uang harian, uang representasi, dan uang penginapan	530.000,00	250.000,00	8.720.000,00		9.500.000,00
7	AR	Sekretariat DPRD	21/2/2024	24/2/2024	Perjalanan dinas dilanjutkan di Jakarta sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas tiket Jakarta - Tarakan				2.558.700,00	2.558.700,00
8	AR	Sekretariat DPRD	3/4/2024	6/4/2024	Kembali tanggal 5 April 2024 sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas uang harian, uang representasi dan uang penginapan tanggal 6 April	530.000,00	250.000,00	8.720.000,00		9.500.000,00
9	AR	Sekretariat DPRD	12/5/2024	15/5/2024	Berangkat tanggal 17 Mei 2024, sehingga terdapat kelebihan atas seluruh pertanggungjawaban perjalanan dinas	2.120.000,00	1.000.000,00	26.160.000,00		29.280.000,00
10	AR	Sekretariat DPRD	15/5/2024	18/5/2024	Berangkat 17 Mei 2024, sehingga terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas selama 2 hari	1.060.000,00	500.000,00	17.440.000,00		19.000.000,00
11	AR	Sekretariat DPRD	20/5/2024	23/5/2024	Lanjutan dari perjalanan dinas sebelumnya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas tiket PP				5.117.400,00	5.117.400,00
12	AR	Sekretariat DPRD	2/6/2024	4/6/2024	Lanjutan dari perjalanan dinas sebelumnya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas tiket				2.558.700,00	2.558.700,00
13	AR	Sekretariat DPRD	23/6/2024	26/6/2024	Kembali tanggal 25 Juni 2024 sehingga terdapat kelebihan pembayaran satu hari	530.000,00	250.000,00	8.720.000,00		9.500.000,00
14	AR	Sekretariat DPRD	7/7/2024	10/7/2024	Perjalanan dinas lanjutan sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas tiket berangkat				2.558.700,00	2.558.700,00
15	AR	Sekretariat DPRD	10/7/2024	13/7/2024	Kembali tanggal 12 Juli 2024, sehingga terdapat kelebihan pembayaran satu hari	530.000,00	250.000,00	8.720.000,00		9.500.000,00
16	AR	Sekretariat DPRD	31/7/2024	3/8/2024	Perjalanan dinas dilanjutkan dan tidak kembali ke Tarakan sehingga terdapat kelebihan atas pembayaran tiket				2.558.700,00	2.558.700,00
17	AR	Sekretariat DPRD	4/8/2024	7/8/2024	Kembali tanggal 6 Agustus 2024, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebanyak 1 hari	530.000,00	250.000,00	8.720.000,00		9.500.000,00

No.	Nama	SKPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Keterangan	Kelebihan Uang Harian (Rp)	Kelebihan Uang Representasi (Rp)	Kelebihan Uang Penginapan (Rp)	Kelebihan Uang Transportasi (Rp)	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)
18	AR	Sekretariat DPRD	1/12/2024	4/12/2024	Kembali pada tanggal 3 Desember 2024, sehingga terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas satu hari	430.000,00	250.000,00	1.496.099,00		2.176.099,00
19	AR	Sekretariat DPRD	18/12/2024	21/12/2024	Perjalanan dinas dilanjutkan dan tidak kembali ke Tarakan sehingga terdapat kelebihan atas pembayaran tiket				2.176.800,00	2.176.800,00
20	AR	Sekretariat DPRD	22/12/2024	25/12/2024	Perjalanan dinas dilanjutkan dan tidak berangkat dari Tarakan sehingga terdapat kelebihan atas pembayaran tiket dan tanggal kembali adalah tanggal 24 Desember 2024, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran tiket dan perjalanan dinas 1 hari	430.000,00	250.000,00	1.648.450,00	2.435.870,00	4.764.320,00
21	AMPW	Sekretariat DPRD	26/6/2024	29/6/2024	Lanjutan dari perjalanan 23 Juni s.d. 26 Juni 2024. Kondisi sebenarnya kembali pada tanggal 26 Juni 2024, namun terdapat SPJ s.d. 29 Juni 2024. Kelebihan pembayaran Uang Harian, Uang Representasi dan Biaya Penginapan 27 s.d. 29 Juni 2024.	1.110.000,00	750.000,00	12.306.000,00		14.166.000,00
22	Bhr	Sekretariat DPRD	10/11/2024	13/11/2024	Berangkat tanggal 11 November karena *reschedule* , namun hotel telah dibayar. Kelebihan pembayaran Uang Harian 1 hari.	370.000,00	250.000,00	-		620.000,00
23	DA	Sekretariat DPRD	17/1/2024	20/1/2024	Kembali 19 Januari 2024 sehingga kelebihan pembayaran 1 hari uang harian, uang penginapan dan uang respresentasi	530.000,00	250.000,00	2.063.000,00		2.843.000,00
24	DA	Sekretariat DPRD	28/2/2024	2/3/2024	Kembali 1 Maret 2024, sehingga kelebihan pembayaran 1 hari uang harian, uang penginapan dan uang respresentasi	430.000,00	250.000,00	2.755.000,00		3.435.000,00
25	DA	Sekretariat DPRD	3/3/2024	6/3/2024	Kembali 5 Maret 2024, sehingga kelebihan pembayaran 1 hari uang harian, uang penginapan, dan uang representasi	480.000,00	250.000,00	2.433.000,00		3.163.000,00
26	DA	Sekretariat DPRD	15/4/2024	18/4/2024	Berangkat 16 April 2024, kelebihan pembayaran atas Uang Harian, representasi dan uang penginapan satu hari	430.000,00	250.000,00	1.938.000,00		2.618.000,00
27	DA	Sekretariat DPRD	24/4/2024	27/4/2024	Kelebihan pembayaran pada tanggal 24 April 2024	430.000,00	250.000,00	2.755.000,00		3.435.000,00
28	DA	Sekretariat DPRD	28/4/2024	1/5/2024	Perjalanan dinas merupakan lanjutan dari penugasan tanggal 24 April 2024 sehingga yang kelebihan pembayaran adalah tiket berangkat tanggal 28 April 2024				2.558.700,00	2.558.700,00
29	DA	Sekretariat DPRD	15/5/2024	18/5/2024	Kembali tanggal 17 Mei 2024, sehingga kelebihan pembayaran 1 hari uang harian, uang penginapan, dan uang representasi	430.000,00	250.000,00	1.938.000,00		2.618.000,00
30	DA	Sekretariat DPRD	9/6/2024	12/6/2024	Kembali 11 Juni 2024 sehingga kelebihan pembayaran satu hari atas uang harian, uang penginapan, dan uang representasi	530.000,00	250.000,00	2.063.000,00		2.843.000,00
31	DA	Sekretariat DPRD	19/6/2024	22/6/2024	Kembali 21 Juni 2024 sehingga kelebihan pembayaran satu hari atas uang harian, uang penginapan, dan uang representasi	410.000,00	250.000,00	2.007.000,00		2.667.000,00
32	DA	Sekretariat DPRD	15/7/2024	18/7/2024	Kembali 17 Juli 2024 sehingga kelebihan pembayaran satu hari atas uang harian, uang penginapan, dan uang representasi	530.000,00	250.000,00	2.063.000,00		2.843.000,00

No.	Nama	SKPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Keterangan	Kelebihan Uang Harian (Rp)	Kelebihan Uang Representasi (Rp)	Kelebihan Uang Penginapan (Rp)	Kelebihan Uang Transportasi (Rp)	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)
33	DA	Sekretariat DPRD	24/7/2024	27/7/2024	Kembali 26 Juli 2024 sehingga kelebihan pembayaran satu hari atas uang harian, uang penginapan, dan uang representasi	530.000,00	250.000,00	2.063.000,00		2.843.000,00
34	HH	Sekretariat DPRD	26/6/2024	29/6/2024	Lanjutan dari perjalanan 23 Juni s.d. 26 Juni 2024. Kondisi sebenarnya kembali pada tanggal 26 Juni 2024, namun terdapat SPJ s.d. 29 Juni 2024. Kelebihan pembayaran Uang Harian, Uang Representasi dan Biaya Penginapan 27 s.d. 29 Juni 2024.	1.110.000,00	750.000,00	12.306.000,00		14.166.000,00
35	HS	Sekretariat DPRD	4/2/2024	7/2/2024	Keberangkatan tanggal 5 Februari 2024. Kelebihan pembayaran pada tanggal 4 Februari 2024	430.000,00	250.000,00	1.938.000,00		2.618.000,00
36	HS	Sekretariat DPRD	17/3/2024	20/3/2024	Kelebihan pembayaran pada tanggal 20 Maret 2024	430.000,00	250.000,00	2.755.000,00	-	3.435.000,00
37	HS	Sekretariat DPRD	24/3/2024	27/3/2024	Kelebihan pembayaran pada tanggal berangkat 24 Maret 2024	420.000,00	250.000,00	2.695.000,00	284.000,00	3.649.000,00
38	HS	Sekretariat DPRD	4/4/2024	6/4/2024	Kelebihan pembayaran pada tanggal kembali 6 April 2024	430.000,00	250.000,00	1.938.000,00	170.000,00	2.788.000,00
39	HS	Sekretariat DPRD	17/4/2024	20/4/2024	Perjalanan dinas lanjutan. Kelebihan pembayaran atas tiket pesawat				2.812.400,00	2.812.400,00
40	HS	Sekretariat DPRD	12/5/2024	15/5/2024	Tidak dapat disampaikan dokumen pendukung lainnya dan nama tidak ada pada manifes berangkat. Kelebihan pembayaran pada hari berangkat.	430.000,00	250.000,00	1.938.000,00		2.618.000,00
41	HS	Sekretariat DPRD	26/5/2024	29/5/2024	Berangkat tanggal 29 Mei TRK-YIA. Kelebihan pembayaran uang harian, representasi, taksi, dan penginapan tanggal 26 sd 28 Mei karena ada perjalanan dinas lanjutan di Yogyakarta pada tanggal 29 mei	1.260.000,00	750.000,00	8.085.000,00		10.095.000,00
42	HS	Sekretariat DPRD	19/6/2024	22/6/2024	Berangkat ke makassar tanggal 11 Juni. Terdapat perjalanan dinas sebelumnya pada tanggal ini. Kelebihan pembayaran atas tiket keberangkatan.				2.812.400,00	2.812.400,00
43	MAL	Sekretariat DPRD	21/4/2024	24/4/2024	Berangkat 23 April 2024, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas tanggal 21 dan 22 April 2024	1.060.000,00	500.000,00	4.126.000,00	-	5.686.000,00
44	MAL	Sekretariat DPRD	24/4/2024	27/4/2024	Terdapat perjalanan dinas lanjutan pada tanggal 27 April, sehingga uang harian pada tanggal 27 April menjadi kelebihan pembayaran. Pembayaran penginapan telah sesuai	430.000,00				430.000,00
45	MH	Sekretariat DPRD	18/4/2024	20/4/2024	Kembali tanggal 19 April sehingga kelebihan pembayaran tanggal 20 April 2024	430.000,00	250.000,00	1.938.000,00		2.618.000,00
46	MH	Sekretariat DPRD	19/5/2024	22/5/2024	Ke Solo tanggal 21 Mei 2024, sehingga UH, Uang Representasi dan Biaya Penginapan tanggal 22 Mei di Bogor kelebihan pembayaran	420.000,00	250.000,00	2.695.000,00		3.365.000,00
47	MH	Sekretariat DPRD	5/6/2024	8/6/2024	Berangkat tanggal 6 Juni, sehingga kelebihan pembayaran Uang Harian, Biaya Penginapan dan Uang Representasi tanggal 5 Juni 2024	530.000,00	250.000,00	2.063.000,00		2.843.000,00
48	MH	Sekretariat DPRD	12/6/2024	15/6/2024	Berangkat tanggal 13 Juni, sehingga kelebihan Uang Harian, Biaya Penginapan dan Uang Representasi tanggal 12 Juni 2024	430.000,00	250.000,00	2.188.000,00		2.868.000,00

No.	Nama	SKPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Keterangan	Kelebihan Uang Harian (Rp)	Kelebihan Uang Representasi (Rp)	Kelebihan Uang Penginapan (Rp)	Kelebihan Uang Transportasi (Rp)	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)
49	MH	Sekretariat DPRD	26/6/2024	29/6/2024	Lanjutan dari perjalanan 23 Juni s.d. 26 Juni 2024. Kondisi sebenarnya kembali pada tanggal 26 Juni 2024, namun terdapat SPJ s.d. 29 Juni 2024. Kelebihan pembayaran Uang Harian, Uang Representasi dan Biaya Penginapan 27 s.d. 29 Juni 2024.	1.110.000,00	750.000,00	12.306.000,00		14.166.000,00
50	MR	Sekretariat DPRD	26/6/2024	29/6/2024	Lanjutan dari perjalanan 23 Juni s.d. 26 Juni 2024. Kondisi sebenarnya kembali pada tanggal 26 Juni 2024, namun terdapat SPJ s.d. 29 Juni 2024. Kelebihan pembayaran Uang Harian, Uang Representasi dan Biaya Penginapan 27 s.d. 29 Juni 2024.	1.110.000,00	750.000,00	12.306.000,00		14.166.000,00
51	RS	Sekretariat DPRD	18/12/2024	21/12/2024	Kembali lebih awal 1 hari, kelebihan pembayaran untuk 1 hari.	430.000,00	250.000,00			680.000,00
52	RRE	Sekretariat DPRD	15/12/2024	18/12/2024	Kembali tanggal 17 Desember 2024, sehingga kelebihan pembayaran pada tanggal 18 desember atas uang harian, representasi, penginapan	430.000,00	250.000,00	826.500,00		1.506.500,00
53	SUH	Sekretariat DPRD	15/4/2024	18/4/2024	Bukti yang dapat disampaikan yaitu dokumentasi di makassar tanggal 16 april 2024 sehingga tanggal 15 april kelebihan pembayaran atas uang harian, uang representasi dan uang penginapan.	430.000,00	250.000,00	1.938.000,00		2.618.000,00
54	SUH	Sekretariat DPRD	21/4/2024	24/4/2024	*Boarding pas* s tidak menunjukkan kondisi sebenarnya tanggal 21 April. Bukti pendukung yang dapat ditampilkan adalah mulai 22 April 2024. Kelebihan pembayaran pada tanggal 22 April atas uang harian, uang representasi dan uang penginapan.	530.000,00	250.000,00	2.063.000,00		2.843.000,00
55	SUH	Sekretariat DPRD	24/4/2024	27/4/2024	Boarding pass tidak menunjukkan kondisi sebenarnya tanggal 27 April. Bukti pendukung yang dapat ditampilkan adalah mulai 26 April 2024. Kelebihan pembayaran pada tanggal 27 april atas uang harian, uang representasi dan uang penginapan.	430.000,00	250.000,00	2.755.000,00		3.435.000,00
56	MN	Sekretariat DPRD	11/1/2024	13/1/2024	Tiket pesawat berangkat PP tidak menunjukkan kondisi sebenarnya	1.290.000,00		1.000.000,00	5.568.960,00	7.858.960,00
57	MN	Sekretariat DPRD	31/3/2024	3/4/2024	Tiket pesawat berangkat PP tidak menunjukkan kondisi sebenarnya	2.120.000,00	-	1.500.000,00	2.883.900,00	6.503.900,00
58	MN	Sekretariat DPRD	21/4/2024	24/4/2024	Tiket pesawat berangkat PP tidak menunjukkan kondisi sebenarnya	1.640.000,00	-	1.500.000,00	4.294.680,00	7.434.680,00
59	FM	Sekretariat DPRD	4/8/2024	7/8/2024	Kembali tanggal 6 Agustus 2024	530.000,00		500.000,00		1.030.000,00
60	IS	Sekretariat DPRD	15/4/2024	16/4/2024	Tiket kembali tidak menunjukkan kondisi sebenarnya				2.488.780,00	2.488.780,00
61	IS	Sekretariat DPRD	19/6/2024	22/6/2024	Tiket kembali tidak menunjukkan kondisi sebenarnya				1.150.400,00	1.150.400,00
62	NH	Sekretariat DPRD	4/8/2024	7/8/2024	Kembali tanggal 6 Agustus 2024	530.000,00		150.000,00		680.000,00
Jumlah										**334.550.539,00**

Kelebihan Pembayaran atas Bukti Penginapan yang Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya TA 2024

No.	Nama	SKPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Jumlah Hari Penginapan Dibayarkan	Biaya Penginapan (Rp)	Nilai pada Bukti Asli (Rp)	Standar Harga Penginapan (Rp)	30% dari Standar Harga per Hari yang Dapat Dibayarkan sebagai Pengurang (Rp)	Total Pengurang (Rp)	Perhitungan Kelebihan Pembayaran (Rp)
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l = g - k*
1	An	Sekretariat DPRD	15/12/2024	17/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
2	AA	Sekretariat DPRD	31/7/2024	3/8/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
3	AA	Sekretariat DPRD	27/11/2024	29/11/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
4	AA	Sekretariat DPRD	15/12/2024	18/12/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
5	Ar	Sekretariat DPRD	18/2/2024	20/2/2024	2	800.000,00		400.000,00	120.000,00	240.000,00	560.000,00
6	Ar	Sekretariat DPRD	25/4/2024	26/4/2024	1	427.500,00		500.000,00	150.000,00	150.000,00	277.500,00
7	Ar	Sekretariat DPRD	31/7/2024	3/8/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
8	Ar	Sekretariat DPRD	4/8/2024	7/8/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
9	Ar	Sekretariat DPRD	4/9/2024	7/9/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
10	Ar	Sekretariat DPRD	27/11/2024	29/11/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
11	Ar	Sekretariat DPRD	15/12/2024	18/12/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
12	Ar	Sekretariat DPRD	29/12/2024	31/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
13	DF	Sekretariat DPRD	15/12/2024	18/12/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
14	EH	Sekretariat DPRD	26/5/2024	29/5/2024	3	1.650.000,00	1.376.998,00		-	1.376.998,00	273.002,00
15	FM	Sekretariat DPRD	11/12/2024	14/12/2024	3	1.484.997,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.034.997,00
16	FM	Sekretariat DPRD	15/12/2024	18/12/2024	3	1.484.997,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.034.997,00
17	Gu	Sekretariat DPRD	24/4/2024	27/4/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
18	Hmd	Sekretariat DPRD	7/1/2024	10/1/2024	2	932.180,00	466.091,00	550.000,00	165.000,00	631.091,00	301.089,00
19	Hms	Sekretariat DPRD	13/3/2024	16/3/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
20	Hms	Sekretariat DPRD	24/3/2024	26/3/2024	2	800.000,00		400.000,00	120.000,00	240.000,00	560.000,00
21	Hms	Sekretariat DPRD	3/4/2024	4/4/2024	1	400.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00
22	Hms	Sekretariat DPRD	2/5/2024	4/5/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
23	Hms	Sekretariat DPRD	20/6/2024	21/6/2024	1	400.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00
24	Hms	Sekretariat DPRD	29/8/2024	30/8/2024	1	400.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00
25	Hms	Sekretariat DPRD	10/10/2024	11/10/2024	1	400.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00
26	Has	Sekretariat DPRD	27/11/2024	29/11/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
27	HI	Sekretariat DPRD	15/7/2024	17/7/2024	2	700.000,00		400.000,00	120.000,00	240.000,00	460.000,00
28	HI	Sekretariat DPRD	29/7/2024	31/7/2024	2	608.000,00		400.000,00	120.000,00	240.000,00	368.000,00
29	Jai	Sekretariat DPRD	17/3/2024	20/3/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
30	Jai	Sekretariat DPRD	20/3/2024	23/3/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
31	Jai	Sekretariat DPRD	12/5/2024	15/5/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
32	Jai	Sekretariat DPRD	15/5/2024	18/5/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
33	Jai	Sekretariat DPRD	14/11/2024	16/11/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
34	Jai	Sekretariat DPRD	27/11/2024	29/11/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
35	JG	Sekretariat DPRD	27/11/2024	29/11/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
36	Jun	Sekretariat DPRD	10/11/2024	13/11/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
37	Jul	Sekretariat DPRD	28/11/2024	29/11/2024	1	400.000,00		500.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
38	Jur	Sekretariat DPRD	14/7/2024	17/7/2024	3	1.500.000,00	386.154,00	500.000,00	150.000,00	686.154,00	813.846,00
39	Jur	Sekretariat DPRD	23/12/2024	25/12/2024	1	500.000,00		500.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00
40	LC	Sekretariat DPRD	23/12/2024	25/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
41	MA	Sekretariat DPRD	8/12/2024	10/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
42	MA	Sekretariat DPRD	29/12/2024	31/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
43	Mu	Sekretariat DPRD	27/11/2024	29/11/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
44	Mu	Sekretariat DPRD	29/12/2024	31/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
45	MJ	Sekretariat DPRD	28/11/2024	30/11/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00

No.	Nama	SKPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Jumlah Hari Penginapan Dibayarkan	Biaya Penginapan (Rp)	Nilai pada Bukti Asli (Rp)	Standar Harga Penginapan (Rp)	30% dari Standar Harga per Hari yang Dapat Dibayarkan sebagai Pengurang (Rp)	Total Pengurang (Rp)	Perhitungan Kelebihan Pembayaran (Rp)
46	MJ	Sekretariat DPRD	15/12/2024	18/12/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
47	MJ	Sekretariat DPRD	23/12/2024	25/12/2024	2	500.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	200.000,00
48	NU	Sekretariat DPRD	17/4/2024	20/4/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
49	NU	Sekretariat DPRD	31/10/2024	2/11/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
50	NU	Sekretariat DPRD	15/12/2024	18/12/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
51	NH	Sekretariat DPRD	15/7/2024	17/7/2024	2	700.000,00		350.000,00	105.000,00	210.000,00	490.000,00
52	Nrj	Sekretariat DPRD	21/3/2024	22/3/2024	1	350.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	230.000,00
53	Nrm	Sekretariat DPRD	14/1/2024	17/1/2024	3	1.434.537,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	984.537,00
54	Nrm	Sekretariat DPRD	22/2/2024	24/2/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
55	Nrm	Sekretariat DPRD	15/4/2024	18/4/2024	3	1.125.000,00	375.364,00	500.000,00	150.000,00	675.364,00	449.636,00
56	Nrm	Sekretariat DPRD	15/7/2024	17/7/2024	2	800.000,00	316.500,00	400.000,00	120.000,00	436.500,00	363.500,00
57	Nrm	Sekretariat DPRD	6/11/2024	8/11/2024	2	908.298,00	471.900,00	500.000,00	150.000,00	621.900,00	286.398,00
58	Pr	Sekretariat DPRD	23/12/2024	25/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
59	R	Sekretariat DPRD	28/11/2024	30/11/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
60	R	Sekretariat DPRD	3/12/2024	5/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
61	Srt	Sekretariat DPRD	28/2/2024	2/3/2024	3	946.485,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	496.485,00
62	Srt	Sekretariat DPRD	13/3/2024	16/3/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
63	Srt	Sekretariat DPRD	16/10/2024	19/10/2024	3	1.500.000,00		500.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00
64	Srt	Sekretariat DPRD	15/12/2024	17/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
65	VAB	Sekretariat DPRD	3/12/2024	5/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
66	VAB	Sekretariat DPRD	23/12/2024	25/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
67	WS	Sekretariat DPRD	14/11/2024	16/11/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
68	YA	Sekretariat DPRD	28/4/2024	1/5/2024	3	1.521.450,00	671.336,00	550.000,00	165.000,00	836.336,00	685.114,00
69	YA	Sekretariat DPRD	14/7/2024	16/7/2024	2	1.100.000,00		550.000,00	165.000,00	330.000,00	770.000,00
70	YA	Sekretariat DPRD	15/12/2024	18/12/2024	3	1.620.354,00	407.880,00	550.000,00	165.000,00	737.880,00	882.474,00
71	YSS	Sekretariat DPRD	21/3/2024	23/3/2024	2	800.000,00		400.000,00	120.000,00	240.000,00	560.000,00
72	YSS	Sekretariat DPRD	3/4/2024	4/4/2024	1	400.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00
73	YT	Sekretariat DPRD	4/12/2024	6/12/2024	2	1.000.000,00		500.000,00	150.000,00	300.000,00	700.000,00
74	AK	Sekretariat DPRD	8/12/2024	11/12/2024	1	2.529.981,00		2.695.000,00	808.500,00	808.500,00	1.721.481,00
75	Ady	Sekretariat DPRD	8/12/2024	11/12/2024	3	4.470.000,00		1.490.000,00	447.000,00	1.341.000,00	3.129.000,00
76	Ady	Sekretariat DPRD	11/12/2024	14/12/2024	3	6.300.000,00		2.755.000,00	826.500,00	2.479.500,00	3.820.500,00
77	Bhr	Sekretariat DPRD	29/12/2024	31/12/2024	2	2.400.000,00		2.188.000,00	656.400,00	1.312.800,00	1.087.200,00
78	Brk	Sekretariat DPRD	11/12/2024	14/12/2024	3	8.100.000,00		2.755.000,00	826.500,00	2.479.500,00	5.620.500,00
79	Brk	Sekretariat DPRD	8/12/2024	11/12/2024	3	4.470.000,00		1.490.000,00	447.000,00	1.341.000,00	3.129.000,00
80	DS	Sekretariat DPRD	6/11/2024	9/11/2024	3	6.201.000,00		2.967.000,00	890.100,00	2.670.300,00	3.530.700,00
81	DS	Sekretariat DPRD	16/10/2024	19/10/2024	3	4.470.000,00		1.490.000,00	447.000,00	1.341.000,00	3.129.000,00
82	Hbs	Sekretariat DPRD	5/12/2024	7/12/2024	2	2.800.000,00		2.188.000,00	656.400,00	1.312.800,00	1.487.200,00
83	Hbs	Sekretariat DPRD	8/12/2024	11/12/2024	3	4.470.000,00		1.490.000,00	447.000,00	1.341.000,00	3.129.000,00
84	Hbs	Sekretariat DPRD	11/12/2024	14/12/2024	3	6.300.000,00		2.755.000,00	826.500,00	2.479.500,00	3.820.500,00
85	HS	Sekretariat DPRD	15/10/2024	17/10/2024	1	1.587.728,00		2.188.000,00	656.400,00	656.400,00	931.328,00
86	HRC	Sekretariat DPRD	20/10/2024	23/10/2024	3	8.265.000,00		2.755.000,00	826.500,00	2.479.500,00	5.785.500,00
87	Jml	Sekretariat DPRD	20/10/2024	23/10/2024	3	7.148.100,00		2.755.000,00	826.500,00	2.479.500,00	4.668.600,00
88	RS	Sekretariat DPRD	1/12/2024	4/12/2024	2	3.587.300,00		2.695.000,00	808.500,00	1.617.000,00	1.970.300,00
89	RRE	Sekretariat DPRD	13/10/2024	16/10/2024	3	5.494.500,00		2.755.000,00	826.500,00	2.479.500,00	3.015.000,00
90	YI	Sekretariat DPRD	13/10/2024	16/10/2024	3	3.877.500,00		2.188.000,00	656.400,00	1.969.200,00	1.908.300,00
91	YI	Sekretariat DPRD	17/10/2024	19/10/2024	2	2.226.400,00		2.188.000,00	656.400,00	1.312.800,00	913.600,00
92	YI	Sekretariat DPRD	28/11/2024	30/11/2024	2	2.226.400,00		2.188.000,00	656.400,00	1.312.800,00	913.600,00
93	ES	Dinas Perikanan	18/10/2024	19/10/2024	1	398.475,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	278.475,00
94	ATT	Dinas Perikanan	21/3/2024	22/3/2024	1	400.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00

No.	Nama	SKPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Jumlah Hari Penginapan Dibayarkan	Biaya Penginapan (Rp)	Nilai pada Bukti Asli (Rp)	Standar Harga Penginapan (Rp)	30% dari Standar Harga per Hari yang Dapat Dibayarkan sebagai Pengurang (Rp)	Total Pengurang (Rp)	Perhitungan Kelebihan Pembayaran (Rp)
95	AR	BPBD	28/10/2024	29/10/2024	1	399.000,00		500.000,00	150.000,00	150.000,00	249.000,00
96	AM	BPBD	28/10/2024	29/10/2024	1	449.000,00	350.000,00			350.000,00	99.000,00
97	Drm	Dinas Perpustakaan & kearsipan	4/9/2024	6/9/2024	2	800.000,00		600.000,00	180.000,00	360.000,00	440.000,00
98	PNH	Dinas Perpustakaan & kearsipan	15/8/2024	16/8/2024	1	550.000,00		500.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00
99	Y	DPRKPP	19/11/2024	20/11/2024	1	500.000,00	400.000,00			400.000,00	100.000,00
100	NH	DPRKPP	19/11/2024	20/11/2024	1	500.000,00		500.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00
101	Isk	Dinas Lingkungan Hidup	19/2/2024	20/2/2024	1	385.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	265.000,00
102	Hry	Dinas Lingkungan Hidup	18/1/2024	19/1/2024	1	593.995,00		600.000,00	180.000,00	180.000,00	413.995,00
103	AP	Dinas Lingkungan Hidup	14/3/2024	15/3/2024	1	380.863,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	260.863,00
104	AP	Dinas Lingkungan Hidup	19/2/2024	20/2/2024	1	385.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	265.000,00
105	Bhr	Kesbangpol	6/2/2024	7/2/2024	1	450.000,00		600.000,00	180.000,00	180.000,00	270.000,00
106	Mr	Kesbangpol	6/2/2024	7/2/2024	1	400.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00
107	ZF	Kesbangpol	6/2/2024	7/2/2024	1	400.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00
108	DA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11/7/2024	12/7/2024	1	400.000,00		500.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
109	ES	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18/1/2024	19/1/2024	1	550.000,00		850.000,00	255.000,00	255.000,00	295.000,00
110	AM	DINSOSPM	29/1/2024	30/1/2024	1	499.000,00		550.000,00	165.000,00	165.000,00	334.000,00
111	AFS	DINSOSPM	30/5/2024	31/5/2024	1	350.000,00		400.000,00	120.000,00	120.000,00	230.000,00
112	MS	Sekretariat DPRD	8/12/2024	11/12/2024	3	4.470.000,00		1.490.000,00	447.000,00	1.341.000,00	3.129.000,00
113	MS	Sekretariat DPRD	11/12/2024	14/12/2024	3	6.300.000,00		2.755.000,00	826.500,00	2.479.500,00	3.820.500,00
Jumlah Kelebihan Pembayaran											**117.531.717,00**

Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas atas Beberapa Pelaksanaan Penugasan di Hari yang Sama pada Dinas Perikanan

No.	Nama	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Nomor SP2D	Jumlah Dibayarkan (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	DR	05/08/2024	09/08/2024	000120/SP2D/2024	8.083.772,00	450.000,00
2	DR	06/08/2024	06/08/2024	000245/SP2D/2024	150.000,00	
3	DR	07/08/2024	07/08/2024	000245/SP2D/2024	150.000,00	
4	DR	08/08/2024	08/08/2024	000245/SP2D/2024	150.000,00	
5	AAM	15/01/2024	15/01/2024	000245/SP2D/2024	150.000,00	150.000,00
6	AAM	15/01/2024	15/01/2024	000246/SP2D/2024	150.000,00	
7	AAM	18/01/2024	18/01/2024	000245/SP2D/2024	150.000,00	150.000,00
8	AAM	18/01/2024	18/01/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
9	AAM	30/01/2024	30/01/2024	000245/SP2D/2024	150.000,00	150.000,00
10	AAM	30/01/2024	30/01/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
11	AAM	10/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	150.000,00
12	AAM	11/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
13	Swt	14/08/2024	16/08/2024	000121/SP2D/2024	1.675.000,00	150.000,00
14	Swt	16/08/2024	16/08/2024	000245/SP2D/2024	150.000,00	
15	HD	14/08/2024	16/08/2024	000121/SP2D/2024	1.247.500,00	150.000,00
16	HD	16/08/2024	16/08/2024	000245/SP2D/2024	150.000,00	
17	MA	14/08/2024	16/08/2024	000121/SP2D/2024	1.445.000,00	150.000,00
18	MA	16/08/2024	16/08/2024	000245/SP2D/2024	150.000,00	
19	GS	14/11/2024	15/11/2024	000213/SP2D/2024	1.640.000,00	150.000,00
20	GS	14/11/2024	14/11/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
21	GS	10/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	150.000,00
22	GS	11/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
23	AI	10/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	300.000,00
24	AI	11/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
25	AI	10/06/2024	11/06/2024	000084/SP2D/2024	1.650.000,00	
26	HED	10/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	150.000,00
27	HED	11/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
28	Hrm	10/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	150.000,00
29	Hrm	11/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
30	U	10/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	150.000,00
31	U	11/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
32	R	10/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	150.000,00
33	R	11/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
34	R	30/01/2024	30/01/2024	000245/SP2D/2024	150.000,00	150.000,00
35	R	30/01/2024	30/01/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
36	F	10/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	150.000,00
37	F	11/06/2024	11/06/2024	000249/SP2D/2024	150.000,00	
Jumlah						**3.000.000,00**

Perhitungan Kekurangan Volume atas Lima Paket Pekerjaan pada Disbudporapar

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Volume		Kekurangan Volume (Rp)
					Nilai (Rp)	%						Kontrak	Cek Fisik	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*		*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n = (jxl) - (kxm)*
1	Pembangunan Lapangan Bola Kawasan *Sport Center*	PT KJR	Nomor : 0122.e/PPK-KHS/DISBUDPORAPAR.III, Tanggal 2 Mei 2024 Add.1 : 0241.c/PPK-ADD/DISBUDPORAPAR.III, Tanggal 29 Agustus 2024 Nilai Kontrak : Rp979.838.200,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 180 hari kalender (2 Mei 2024 s.d 28 Oktober 2024)	Nomor : 0299.c/PPK-BASTP/DISBUDPORAPAR.III Tanggal : 26 Oktober 2024	979.838.200,00	100,00%	1	Urugan Pasir dibawah Saluran	M3	209.070,00	209.070,00	12,32	-	2.575.742,40
							2	Cor Lantai Kerja K-100	M3	1.377.343,50	1.377.343,50	3,69	2,76	1.280.929,46
							3	Besi Polos Pekerjaan Saluran	Kg	21.019,70	21.019,70	2.193,94	2.151,74	887.031,34
							4	Mengurug dengan Tanah Urug	M3	181.470,00	181.470,00	1.176,07	1.160,56	2.814.599,70
							5	Pondasi Beton Bertulang	M3	1.509.197,39	1.509.197,39	6,53	4,36	3.274.958,34
							Jumlah Kekurangan Volume							**10.833.261,24**
2	Pemeliharaan Lapangan Tenis Indoor Telaga Keramat	CV A B	Nomor : 0122.c/PPK-KHS/DISBUDPORAPAR.III, Tanggal 2 Mei 2024 Add.1 : 0250/PPK-SPTADD/DISBUDPORAPAR.III, Tanggal 28 Agustus 2024 Nilai Kontrak : Rp1.363.659.000,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 180 hari kalender (2 Mei 2024 s.d 28 Oktober 2024)	Nomor : 0301.m/PPK-BASTP/DISBUDPORAPAR.III Tanggal : 28 Oktober 2024	1.363.659.000,00	100,00%	I	Pekerjaan Plat Beton						
							1	Cor Beton Bertulang, Mutu K-225	M3	2.098.175,00	2.098.175,00	159,86	155,39	9.378.842,25
							2	Pembesian dengan besi polos	Kg	19.371,75	19.371,75	9.014,99	8.765,43	4.834.413,93
							II	Pekerjaan Saluran U-Ditch						
							3	Pembesian dengan besi polos	Kg	19.371,75	19.371,75	1.701,95	1.285,52	8.066.977,85
							Jumlah Kekurangan Volume							**22.280.234,03**
3	Pembangunan Jembatan Kaca Kawasan Ratu Intan Pantai Amal	CV A	Nomor : 0122.k/PPK-KHS/DISBUDPORAPAR.IV, Tanggal 2 Mei 2024 Add.1 : 0230.H/PPK-ADD/DISBUDPORAPAR.IV, Tanggal 16 Agustus 2024 Nilai Kontrak : Rp1.630.111.500,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 180 hari kalender (2 Mei 2024 s.d 28 Oktober 2024)	Nomor : 0230.m/PPK-BASTHP/DISBUDPORAPAR.IV Tanggal : 27 Desember 2024	1.630.111.500,00	100,00%	I	Pekerjaan Pile Cap						
							1	Beton (K-250)	M3	1.727.939,92	1.727.939,92	15,23	13,13	3.628.673,83
							2	Besi Ulir	Kg	23.091,43	23.091,43	1.852,58	1.757,84	2.187.682,08
							II	Pekerjaan Sloof 30/15						
							3	Besi Ulir	Kg	23.091,43	23.091,43	208,56	151,68	1.313.440,54
							4	Besi Polos	Kg	22.216,85	22.216,85	189,73	48,29	3.142.351,26
							III	Pekerjaan Balok (B1 20 / 30)						
							5	Besi Ulir	Kg	23.091,43	23.091,43	335,97	289,71	1.068.209,55
							6	Besi Polos	Kg	22.216,85	22.216,85	87,89	67,77	447.003,02
							IV	Pile Cap (Dudukan Tangga)						
							7	Besi Polos	Kg	22.216,85	22.216,85	396,16	257,83	3.073.256,86
							V	Pekerjaan Tangga						
							8	Besi Siku 5 x 5 x 0,5cm	Kg	54.178,50	54.178,50	809,25	775,05	1.852.904,70
							9	Pekerjaan Pengecatan Besi Siku	Kg	60.771,75	60.771,75	52,32	50,50	110.604,59
							Jumlah Kekurangan Volume							**16.824.126,43**

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Volume		Kekurangan Volume (Rp)
					Nilai (Rp)	%						Kontrak	Cek Fisik	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*		*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n = (jxl) - (kxm)*
4	Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola Stadion Datu Adil	CV ST	Nomor : 0122.i/PPK-KHS/DISBUDPORAPAR.III, Tanggal 2 Mei 2024 Add.1 : 0250.a/PPK-SPTADD/DISBUDPORAPAR.III, Tanggal 28 Agustus 2024 Nilai Kontrak : Rp2.968.528.200,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 180 hari kalender (2 Mei 2024 s.d 28 Oktober 2024)	Nomor : 0301.p/PPK-BASTHP/DISBUDPORAPAR.III Tanggal : 28 Oktober 2024	2.968.528.200,00	100,00%	I	Pek. Jalan Lingkar Stadion						
							1	Beton K-250 (Ready Mix)	M3	1.961.555,00	1.961.555,00	524,16	485,58	75.676.791,90
							2	Besi Polos	Kg	20.752,33	20.752,33	30.966,86	30.799,63	3.470.412,15
							3	Begisting (2 kali Pakai)	M2	285.625,50	285.625,50	212,08	129,10	23.701.203,99
													Jumlah Kekurangan Volume	**102.848.408,04**
5	Pengembangan Kawasan Agrowisata Karungan	CV CAF	Nomor : 0122.n/PPK-KHS/DISBUDPORAPAR.IV, Tanggal 2 Mei 2024 Add.1 : 0199.j/PPK-ADD/DISBUDPORAPAR.IV, Tanggal 18 Juli 2024 Nilai Kontrak : Rp1.793.556.000,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 180 hari kalender (2 Mei 2024 s.d 28 Oktober 2024)	Nomor : 0301.e/PPK-BASTHP/DISBUDPORAPAR.IV Tanggal : 28 Oktober 2024	1.793.556.000,00	100,00%		Pekerjaan Lantai dan dinding Kolam						
							1	Pekerjaan Lantai Kerja t=10cm						
								- Beton Mutu fc : 10 Mpa, tebal 10cm	M3	1.653.368,23	1.653.368,23	37,82	36,72	1.818.705,05
							2	Pekerjaan Lantai Kolam						
								- Beton Mutu fc : 18 Mpa, tebal 15cm	M3	1.733.548,78	1.733.548,78	57,88	54,60	5.686.040,00
								- Pembesian Besi Polos	Kg	20.819,60	20.819,60	4.767,43	4.699,89	1.406.155,78
							3	Pekerjaan Balok 10/10						
								- Pembesian Besi Polos	Kg	20.819,60	20.819,60	2.496,13	2.306,93	3.939.068,32
								Pekerjaan Jalan Depan Air Terjun						
							4	Pembesian Besi Polos	Kg	20.819,60	20.819,60	91,32	83,50	162.809,27
								Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding						
							5	Pasang Dinding Keramik 40 x 40 cm (Romah/Setara) (Kolam)	M2	475.147,80	475.147,80	161,02	107,30	25.526.650,35
													Jumlah Kekurangan Volume	**38.539.428,77**
													Total Jumlah Kekurangan Volume	**191.325.458,51**

Perhitungan Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Volume		Kekurangan Volume (Rp)
					Nilai (Rp)	%						Kontrak	Cek Fisik	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*		*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n = (jxl) - (kxm)*
1	Pembangunan SDN 052 (Tahap II)	CV BK	Nomor : PPK.02-SP/2642184/Pemb_SDN 052 (Tahap II)/2024, Tanggal 19 Januari 2024 Add.1 : 01/ADD/PPK.02-SP/2642184/PEM_SDN 052 (TahapII)/2024, Tanggal 5 April 2024 Add.2 : 02/ADD/PPK.02-SP/2642184/PEM_SDN 052 (TahapII)/2024, Tanggal 15 Agustus 2024 Nilai Kontrak : Rp4.410.000.000,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 255 hari kalender (31 Januari 2024 s.d 29 September 2024)	Nomor : 02/PPK/BA.PHO/PEMB.SDN 052 (TAHAP II)/IX/2024 Tanggal : 27 September 2024	4.410.000.000,00	100,00%	I	Pekerjaan Tanah						
							1	Urugan Tanah Peninggian Lantai Halaman	M3	253.276,00	253.276,00	1.918,15	1.678,38	60.727.986,52
							2	Galian Tanah Rentaining Walls	M3	94.139,23	94.139,23	75,00	56,36	1.754.755,25
							3	Cor Plat Lantai Kerja t = 10 cm	M3	1.911.890,72	1.911.890,72	16,60	15,00	3.059.025,15
							4	Pembesian Ø10-200 mm	Kg	20.992,22	20.992,22	844,69	745,43	2.083.687,76
							5	Pancang Beton 10/10 Panjang 2 m	Btg	212.750,00	212.750,00	83,00	82,00	212.750,00
							6	Pas. Batu Gunung Retaining Walls	M3	1.481.895,75	1.481.895,75	133,42	130,91	3.719.558,33
							7	Pipa Resapan PVC 2"	M	80.000,00	80.000,00	106,08	105,86	17.600,00
							8	Plesteran Retaining Walls	M2	103.075,74	103.075,74	181,33	176,98	448.379,47
							II	Pekerjaan Konstruksi Struktur						
								RING BALK						
							1	Cor beton Balok RB1 (20/40) K-250	M3	1.911.890,72	1.911.890,72	9,66	9,02	1.223.610,06
							2	Pembesian 6D16	Kg	20.992,22	20.992,22	1.145,18	1.128,12	358.127,27
							3	Pembesian 2Ø10	Kg	20.992,22	20.992,22	215,02	146,73	1.433.558,70
							4	Cor beton Balok RB2 (20/30) K-250	M3	1.911.890,72	1.911.890,72	5,15	3,48	3.192.857,50
							5	Pembesian 4D13	Kg	20.992,22	20.992,22	535,39	361,92	3.641.520,40
							6	Pembesian 2Ø8	Kg	20.992,22	20.992,22	66,92	45,24	455.111,33
							7	Pembesian Ø8	Kg	20.992,22	20.992,22	201,47	136,19	1.370.372,12
							8	Bekisting	M2	571.914,55	571.914,55	68,64	46,40	12.719.379,59
								KOLOM						
							1	Pembesian 12D19	Kg	20.992,22	20.992,22	2.226,43	2.119,75	2.239.450,03
							2	Pembesian 10D19	Kg	20.992,22	20.992,22	856,32	815,29	861.310,79

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Volume		Kekurangan Volume (Rp)
					Nilai (Rp)	%						Kontrak	Cek Fisik	
							III	Pekerjaan Dinding dan Lantai						
								Lantai 1						
							1	Pasang Lantai Keramik 40 x 40 cm dalam ruangan	M2	325.179,75	325.179,75	215,09	214,29	260.143,80
							2	Pasang Lantai Keramik 40 x 40 cm Teras/Kasar	M2	325.179,75	325.179,75	96,60	95,00	520.287,60
								Lantai 2						
							1	Pasang Lantai Keramik 40 x 40 cm dalam ruangan	M2	325.179,75	325.179,75	215,09	210,29	1.560.862,80
							2	Pasang Lantai Keramik 40 x 40 cm Teras/Kasar	M2	325.179,75	325.179,75	87,60	86,00	520.287,60
							IV	Pekerjaan Atap						
							1	Rangka Atap Baja Ringan	M2	296.285,77	296.285,77	645,85	645,05	237.028,62
							2	Atap Multiroof	M2	262.418,50	262.418,50	645,85	645,05	209.934,80
							IV	Pekerjaan Plafond						
								Lantai 1						
							1	Pasang Plafond Triplek 4 mm + Rangka	M2	395.422,13	395.422,13	338,19	333,39	1.898.026,22
								Lantai 2						
							2	Pasang Plafond Triplek 4 mm + Rangka	M2	395.422,13	395.422,13	347,19	342,39	1.898.026,22
													Jumlah Kekurangan Volume	**106.623.637,93**
2	Pembangunan SMPN 12 (Tahap II)	CV SA	Nomor : PPK.02-SP/2667184/Pemb_SMPN.12 (Tahap II)/2024, Tanggal 26 Januari 2024 Add.1 : PPK.02-SP/2667184/Pemb_SMPN.12 (Tahap II)/Add.1/2024, Tanggal 15 Februari 2024 Nilai Kontrak : Rp3.017.055.000,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 210 hari kalender (26 Januari 2024 s.d 22 Agustus 2024)	Nomor : 02/PPK/BA.PHO/PEMB.SMPN.12 (TAHAP II)/VIII/2024 Tanggal : 15 Agustus 2024	3.017.055.000,00	100,00%	I	Pekerjaan Pasangan Lt. 2						
							1	Pasangan Dinding Batu Bata Campuran 1 : 4	M2	170.522,00	170.522,00	415,32	411,44	661.625,36
							II	Pekerjaan Struktur Beton Bertulang Lt. 3						
							1	Ring Balk						
							-	Tulangan BJTD	Kg	20.994,98	20.994,98	3.114,86	2.925,75	3.970.360,67
							-	Tulangan BJTP	Kg	20.994,98	20.994,98	1.397,83	1.371,02	562.875,41
							2	Kolom K1						
							-	Tulangan BJTD	Kg	20.994,98	20.994,98	3.425,28	3.345,00	1.685.476,99
							III	Pekerjaan Pasangan Lt. 3						
							1	Pasangan Dinding Batu Bata Campuran 1 : 4	M2	170.522,00	170.522,00	415,32	406,33	1.532.992,78
													Jumlah Kekurangan Volume	**8.413.331,21**
													Total Jumlah Kekurangan Volume	**115.036.969,14**

Perhitungan Kekurangan Volume atas 17 Paket Pekerjaan pada DPUPR

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Volume		Kekurangan Volume (Rp)	Keterangan
					Nilai (Rp)	%						Kontrak	Cek Fisik		
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*		*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n = (jxl) - (kxm)*	*o*
1	Peningkatan Jalan Mangkudulis	CV N	Nomor : 00.3.3/04/PPK-P.MGKD/BM/VI/2024, Tanggal 28 Juni 2024 Add.1 : 00.3.3/15/PPK-P.MGKD/BM/IX/2024, Tanggal 26 September 2024 Nilai Kontrak : Rp2.697.865.000,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 134 hari kalender (28 Juni 2024 s.d 8 November 2024)	Nomor : 09/PPK-BASTP/P.MGKD/BM/2024 Tanggal : 8 November 2024	2.697.865.000,00	100,00%	I	DIVISI 2. DRAINASE & SIRING							
							1	Pasangan Batu Gunung	M3	1.303.788,37	1.303.788,37	82,28	73,76	11.108.276,91	
							II	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR							
							1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	819.326,63	819.326,63	621,43	544,30	63.194.662,97	
							III	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL							
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.398.753,76	18,66	16,50	11.721.556,45	STA 0+30 sd STA 0+50 (Segmen 1)
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.398.753,76	19,70	17,56	12.178.482,67	STA 0+50 sd STA 0+70 (Segmen 1)
							3	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	21,45	20,73	1.342.803,61	STA 0+75 sd STA 0+100 (Segmen 3)
							4	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	21,46	20,74	1.342.803,61	STA 0+100 sd STA 0+125 (Segmen 3)
							5	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	21,91	20,50	2.629.657,06	STA 0+125 sd STA 0+150 (Segmen 3)
							6	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	22,74	21,34	2.611.007,01	STA 0+150 sd STA 0+175 (Segmen 3)
							7	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	20,88	19,47	2.629.657,06	STA 0+175 sd STA 0+200 (Segmen 3)
							8	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	9,05	8,46	1.100.352,96	STA 0+200 sd STA 0+225 (Segmen 3)
							9	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.398.753,76	4,82	3,87	3.576.147,10	STA 0+245 sd STA 0+250 (Segmen 3)
							10	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.398.753,76	10,91	8,96	7.814.370,97	STA 0+250 sd STA 0+260 (Segmen 3)
							11	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	3,37	3,26	205.150,55	STA 0+285 sd STA 0+289 (Segmen 3)
							12	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	21,49	21,12	690.051,85	STA 0+175 sd STA 0+200 (Segmen 5)
							13	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	21,30	20,93	690.051,85	STA 0+200 sd STA 0+225 (Segmen 5)
							14	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.492.004,01	22,22	21,16	9.869.606,47	STA 0+275 sd STA 0+300 (Segmen 5)
							15	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.492.004,01	7,73	7,36	3.435.339,21	STA 0+300 sd STA 0+310 (Segmen 5)
							16	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	23,40	22,32	2.014.205,41	STA 0+375 sd STA 0+400 (Segmen 5)
							17	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	23,18	22,09	2.032.855,46	STA 0+400 sd STA 0+425 (Segmen 5)
							18	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	21,98	21,15	1.547.954,16	STA 0+475 sd STA 0+500 (Segmen 5)
							19	Laston Lapis Pondasi (AC - BASE)	Ton	1.865.005,01	1.865.005,01	7,23	6,92	578.151,55	STA 0+500 sd STA 0+510 (Segmen 5)
												Jumlah Kekurangan Volume		**142.313.144,89**	
2	Peningkatan Jalan Agatis	CV Q	Nomor : 00.3.3/04/PPK-P.AGT/BM/VIII/2024, Tanggal 30 Agustus 2024 Add.1 : 00.3.3/15/ADD/PPK-P.AGT/BM/IX/2024, Tanggal 17 September 2024 Nilai Kontrak : Rp4.508.846.000,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 120 hari kalender (30 Agustus 2024 s.d 27 Desember 2024)	Nomor : 09/PPK-BASTP/P.AGT/BM/2024 Tanggal : 24 Desember 2024	4.508.846.000,00	100,00%	II	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL							
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.285.138,94	1.828.111,15	65,63	62,17	36.319.998,44	STA 0+100 sd 0+200
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.285.138,94	1.828.111,15	63,36	57,38	39.889.385,45	STA 0+200 sd 0+300
							3	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.285.138,94	1.828.111,15	57,30	54,92	30.538.596,90	STA 0+300 sd 0+400
							4	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.285.138,94	2.285.138,94	56,92	54,70	5.073.008,45	STA 0+400 sd 0+500
							5	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.285.138,94	1.828.111,15	59,39	56,92	31.658.314,99	STA 0+800 sd 0+900
							6	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.285.138,94	1.828.111,15	61,11	54,90	39.281.538,49	STA 0+900 sd 0+1000
							7	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.285.138,94	1.828.111,15	62,03	57,94	35.826.408,42	STA 0+1000 sd 0+1100
														-	
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.183.066,90	1.964.760,21	86,43	84,21	23.230.014,88	STA 0+800 sd 0+900
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.183.066,90	1.746.453,52	84,60	79,85	45.233.146,17	STA 0+900 sd 0+1000
							3	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.183.066,90	1.746.453,52	80,19	77,40	39.884.632,26	STA 0+1000 sd 0+1100
												Jumlah Kekurangan Volume		**326.935.044,45**	

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Volume		Kekurangan Volume (Rp)	Keterangan
					Nilai (Rp)	%						Kontrak	Cek Fisik		
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*		*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n = (jxl) - (kxm)*	*o*
3	Pembangunan Jalan Pasar Rakyat KP. Empat (Sei Mahakam Tembus Masjid Raya)	CV N	Nomor : 00.3.3/04/PPK-PSR/BM/II/2024, Tanggal 12 Februari 2024 Add.1 : 00.3.3/ADD/04/PPK-PSR/BM/II/2024, Tanggal 8 Maret 2024 Nilai Kontrak : Rp3.765.492.255,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 120 hari kalender (12 Februari 2024 s.d 10 Juni 2024)	Nomor : 09/BASTP-PSR/BM/DPUPR/2024 Tanggal : 5 Juni 2024	3.765.492.255,00	100,00%	I	DIV 2. DRAINASE							
							1	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.420.045,25	1.420.045,25	242,25	233,48	12.453.796,84	
							II	DIV 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						-	
							1	Galian Biasa	M3	70.674,08	70.674,08	882,42	831,32	3.611.445,49	
							I	DIV 6. PERKERASAN ASPAL							
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.021.968,80	2.021.968,80	84,90	84,45	909.885,96	STA 0+25 sd 0+50
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.021.968,80	2.021.968,80	84,43	83,98	909.885,96	STA 0+50 sd 0+75
							3	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.021.968,80	2.021.968,80	85,32	85,03	586.370,95	STA 0+125 sd 0+150
													Jumlah Kekurangan Volume	**18.471.385,20**	
4	Peningkatan Jalan Sei Kayan	CV TA	Nomor : 00.3.3/04/PPK-SK/BM/III/2024, Tanggal 28 Maret 2024 Add.1 : 00.3.3/15/PPK-SK/BM/IV/2024, Tanggal 25 April 2024 Nilai Kontrak : Rp3.145.053.600,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 134 hari kalender (28 Maret 2024 s.d 8 Agustus 2024)	Nomor : 09/BASTP-PEN.SK/BM/DPUPR/2024 Tanggal : 18 Juli 2024	3.145.053.600,00	100,00%	I	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL							
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	1.222.541,11	19,58	16,94	19.185.745,22	STA 0+75 sd 0+100
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	1.222.541,11	17,30	14,75	17.217.454,02	STA 0+100 sd 0+125
							3	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	2.037.568,52	6,27	6,13	285.259,59	STA 0+167 sd 0+177
							4	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	2.037.568,52	10,86	2,56	16.911.818,72	STA 0+218,3 sd 0+222
							5	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	1.120.662,69	12,93	10,03	15.105.514,18	STA 0+234 sd 0+251
							6	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	1.528.176,39	32,88	29,12	22.494.756,46	STA 0+575 sd 0+600
							7	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	1.120.662,69	29,70	26,13	31.232.868,95	STA 0+600 sd 0+625
							8	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	2.037.568,52	28,99	26,42	5.236.551,10	STA 0+625 sd 0+650
							9	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	2.037.568,52	24,46	22,06	4.890.164,45	STA 0+650 sd 0+675
							10	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	2.037.568,52	20,60	18,79	3.687.999,02	STA 0+675 sd 0+700
							11	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	2.037.568,52	21,55	19,71	3.749.126,08	STA 0+700 sd 0+725
							12	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	2.037.568,52	25,28	24,16	2.282.076,74	STA 0+825 sd 0+850
							13	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.037.568,52	2.037.568,52	22,63	21,58	2.139.446,95	STA 0+850 sd 0+875
													Jumlah Kekurangan Volume	**144.418.781,48**	
5	Peningkatan Jalan Slamet Riyadi	CV TA	Nomor : 00.3.3/04/PPK-SR/BM/VII/2024, Tanggal 16 Juli 2024 Add.1 : 00.3.3/15/ADD/PPK-SR/BM/VIII/2024, Tanggal 22 Agustus 2024 Nilai Kontrak : Rp2.412.923.700,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 120 hari kalender (16 Juli 2024 s.d 12 November 2024)	Nomor : 09/BASTP-PEN.SR/BM/DPUPR/2024 Tanggal : 11 November 2024	2.412.923.700,00	100,00%	III	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL							
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	2.087.557,99	27,10	26,66	918.525,52	STA 0+75 sd 0+100 (Segmen 1)
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	2.087.557,99	27,03	26,59	918.525,52	STA 0+100 sd 0+125 (Segmen 1)
							3	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	1.148.156,89	28,20	23,95	31.370.777,80	STA 0+175 sd 0+200 (Segmen 1)
							4	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	1.148.156,89	28,73	24,68	31.639.029,01	STA 0+200 sd 0+225 (Segmen 1)
							5	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	2.087.557,99	30,29	30,11	375.760,44	STA 0+225 sd 0+250 (Segmen 1)
							6	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	2.087.557,99	30,39	30,20	396.636,02	STA 0+250 sd 0+275 (Segmen 1)
							7	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	1.565.668,49	25,92	22,02	19.633.482,95	STA 0+275 sd 0+300 (Segmen 1)
							8	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	1.565.668,49	23,78	20,07	18.219.162,41	STA 0+300 sd 0+325 (Segmen 1)
							9	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	2.087.557,99	24,33	24,17	334.009,28	STA 0+325 sd 0+350 (Segmen 1)
							10	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	1.148.156,89	23,78	21,04	25.484.908,04	STA 0+75 sd 0+100 (Segmen 2)
							11	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	1.148.156,89	4,74	4,18	5.095.729,07	STA 0+100 sd 0+105 (Segmen 2)
							12	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	2.087.557,99	13,03	12,83	417.511,60	STA 0+536 sd 0+550 (Segmen 5)
							13	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.087.557,99	2.087.557,99	16,75	16,49	542.765,08	STA 0+550 sd 0+568 (Segmen 5)
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.022.415,06	2.022.415,06	0,64	0,59	101.120,75	STA 0+268 sd 0+269 (Segmen 3)
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.022.415,06	2.022.415,06	0,11	0,10	20.224,15	STA 0+575 sd 0+576 (Segmen 5)
													Jumlah Kekurangan Volume	**135.468.167,64**	

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Volume		Kekurangan Volume (Rp)	Keterangan
					Nilai (Rp)	%						Kontrak	Cek Fisik		
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*		*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n = (jxl) - (kxm)*	*o*
6	Pembangunan Saluran Kr. Harapan (2024)	CV KIP	Nomor : 04/PPK/SAL.KH/VI/PSDA.DPUPR , Tanggal 19 Juni 2024 Add.1 : 13/PPK/SAL.KH-ADD/VIII/PSDA.DPUPR, Tanggal 23 Agustus 2024 Add.2 : 70/PPK/SAL.KH-ADD.II/XI/PSDA.DPUPR , Tanggal 6 November 2024 Nilai Kontrak : Rp9.319.572.400,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 180 hari kalender (19 Juni 2024 s.d 15 Desember 2024)	Nomor : 10/PPK/PSDA/DPUPR/2025 Tanggal : 13 Januari 2025	9.319.572.400,00	100,00%	1	Galian Tanah Biasa Di Buang Setempat (Mekanis)	M3	35.103,18	35.103,18	9.489,91	7.454,92	71.434.620,27	
							2	Timbunan Tanah Kembali	M3	44.681,75	44.681,75	1.897,98	1.649,98	11.081.074,00	
							3	Beton Lantai Kerja (K-225) Mekanis	M3	1.443.318,18	1.443.318,18	530,03	522,52	10.839.319,53	
							4	Pembesian beton bertulang (Besi Polos)	Kg	19.179,70	19.179,70	61.599,84	61.107,98	9.433.727,24	
							5	Bekisting Lantai	M2	116.259,25	116.259,25	589,96	588,68	148.811,84	
							6	Pasangan Batu Gunung	M3	1.499.206,93	1.499.206,93	3.086,35	3.007,69	117.927.617,11	
							7	Plesteran t = 1,5cm	M2	88.084,30	88.084,30	3.932,31	3.877,78	4.803.236,88	
							8	Plat Deuker Pembesian beton bertulang	Kg	19.179,70	19.179,70	6.364,06	6.171,04	3.702.065,69	
													Jumlah Kekurangan Volume	**229.370.472,56**	
7	Pembangunan *Landscape* TACC	CV TA	Nomor : 00.3/02/SP/PPK-TACC/CKPR-DPUPR/II/2024 , Tanggal 16 Februari 2024 Add.1 : 00.3/08/SP-ADD/PPK-TACC/CKPR-DPUPR/V/2024, Tanggal 14 Mei 2024 Nilai Kontrak : Rp4.842.655.400,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 120 hari kalender (16 Februari 2024 s.d 14 Juni 2024)	Nomor : 6/BASTHP/Pembangunan Landscape TACC/CKPR/2024 Tanggal : 24 Juni 2024	4.842.655.400,00	100,00%	I	Pek. Tanah							
							1	Penyiapan Badan Jalan dan Halaman	M2	16.522,05	16.522,05	11.678,64	11.427,90	4.142.738,82	
							2	Timbunan Biasa dari Luar Lokasi	M3	193.720,89	193.720,89	1.298,00	1.142,64	30.096.477,47	
							3	Galian Biasa Di Buang Sekitar Lokasi	M3	18.300,89	18.300,89	3.068,42	1.142,64	35.243.487,94	
							II	Pek. Lapis Pondasi						-	
							1	Agregat Kelas B	M3	857.670,09	857.670,09	3.787,00	3.697,83	76.478.441,93	
							2	Pembesian Polos	Kg	25.415,50	25.415,50	3.530,51	2.890,28	16.271.765,57	
							3	Cor Jalan T = 25 cm	M3	3.248.824,84	3.248.824,84	67,65	56,38	36.614.255,95	
							III	Pek. Saluran Drainase							
							1	Pasangan Batu Mortar	M3	1.564.358,73	1.564.358,73	62,62	60,65	3.081.786,70	
													Jumlah Kekurangan Volume	**201.928.954,38**	
8	Pemasangan Jaringan Listrik Dan Prasarana TPA Juata Kerikil	CV NAS	Nomor : 2826184/04/SP/PPK-PJL.TPA/CKPR/VIII/2024, Tanggal 8 Agustus 2024 Add.1 : 11/SP.ADD/PPK-PJL.TPA/CKPR/VIII/2024, Tanggal 14 Agustus 2024 Add.2 : 18/SP.ADD-II/PPK-PJL.TPA/CKPR/IX/2024 , Tanggal 11 September 2024 Nilai Kontrak : Rp1.896.020.000,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 135 hari kalender (8 Agustus 2024 s.d 20 Desember 2024)	Nomor : 04/BASTPPJL.TPA/CKPR/2025 Tanggal : 28 Januari 2025	1.896.020.000,00	100,00%	I	Bangunan Kantor Pengelola TPA							
							a	Cor Beton Foot Plate (80x80x30) dan kolom pedestail 20/20							
							1	Cor Beton K-225	M3	1.593.798,32	1.593.798,32	0,69	0,66	47.813,95	
							2	Pembesian d.12 dan d.8	Kg	19.742,58	19.742,58	111,17	104,33	135.039,25	
							3	Bekisting	M2	202.946,37	202.946,37	4,96	4,68	56.824,98	
							b	Beton bertulang Kolom 12/12 (K1)							
							1	Cor Beton K-175	M3	1.515.770,50	1.515.770,50	1,57	1,29	424.415,74	
							2	Pembesian Polos d.12 dan d.8	Kg	19.742,58	19.742,58	378,44	287,47	1.795.982,50	
							3	Bekisting	M2	202.946,37	202.946,37	26,21	21,53	949.789,01	
							c	Pasangan dan Plesteran							
							1	Pasangan Dinding 1/2 Bata Camp. 1:4	M2	218.664,22	218.664,22	274,70	234,90	8.702.835,96	
							d	Pengecatan							
							1	Pengecatan Dinding dan Struktur Expose Exterior	M2	40.087,97	40.087,97	152,34	128,64	950.084,89	
							2	Pengecatan Dinding dan Struktur Expose Interior	M2	40.087,97	40.087,97	435,06	374,16	2.441.357,37	

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Volume		Kekurangan Volume (Rp)	Keterangan
					Nilai (Rp)	%						Kontrak	Cek Fisik		
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*		*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n = (jxl) - (kxm)*	*o*
							II	Bangunan Jembatan Timbang 4 x 8 m							
							a	Pasangan dan Plesteran	M2						
							1	Pasangan Dinding 1/2 Bata Camp. 1:4	M2	218.664,22	218.664,22	12,58	12,14	96.212,26	
							2	Plesteran Dinding 1:4	M2	99.464,88	99.464,88	25,16	24,27	88.523,74	
							III	Bangunan Hanggar Alat Berat Uk. 8 x 12 m						-	
							a	Beton bertulang sloof 25/40 (SL1)						-	
							1	Cor Beton K-250	M3	1.612.816,62	1.612.816,62	6,29	5,60	1.112.843,47	
							2	Pembesian Polos d.16 dan d.10	Kg	19.742,58	19.742,58	764,41	629,47	2.664.063,75	
							3	Bekisting	M2	202.946,37	202.946,37	54,40	44,80	1.948.285,15	
							IV	Penyambungan PLN Baru Daya 66.000 VA							
							1	Tiang Besi 9 meter	Btg	7.800.000,00	7.800.000,00	7,00	6,00	7.800.000,00	
							IV	Jalan Masuk L. 5 M							
							1	Cor Beton K-250 T.20	M3	1.612.816,62	1.612.816,62	36,28	27,26	14.547.605,91	
							2	Pembesian Polos d.10 -20	Kg	19.742,58	19.742,58	1.274,17	1.176,04	1.937.339,38	
													Jumlah Kekurangan Volume	**45.699.017,31**	
9	Pembangunan Siring RT.46	CV CKM	Nomor : 02/07/PPK/PSDA/DPUPR/2024 , Tanggal 11 November 2024 Nilai Kontrak : Rp805.562.700,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 45 hari kalender (11 November 2024 s.d 25 Desember 2024)	Nomor : 15/07/PPK/PSDA/DPUPR/2024 Tanggal : 13 Februari 2025	805.562.700,00	100,00%		Pekerjaan Dinding Penahan Tanah							
							1	Pembesian beton bertulang (Besi Ulir)	Kg	21.099,63	21.099,63	15.933,00	15.575,57	7.541.640,75	
													Jumlah Kekurangan Volume	**7.541.640,75**	
10	Peningkatan Jalan Kasiba Laut	CV N	Nomor : 00.3.3/04/PPK-JKSB/BM/IV/2024, Tanggal 5 April 2024 Add.1 : 00.3.3/16/ADD/PPK-PJKJL/BM/VI/2024, Tanggal 2 Oktober 2024 Nilai Kontrak : Rp9.684.548.600,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 270 hari kalender (5 April 2024 s.d 30 Desember 2024)	Nomor : 08/BAST-JKSB/PPK/BM/I/2025 Tanggal : 20 Januari 2025	9.684.548.600,00	100,00%		DIV. 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK							
							1	Galian Biasa	M3	30.806,20	30.806,20	3.075,00	539,87	78.097.721,81	
							2	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M3	156.403,63	156.403,63	29.926,19	28.792,59	177.299.154,97	
													Jumlah Kekurangan Volume	**255.396.876,78**	
11	Pembangunan Jembatan Seroja	CV AAA	Nomor : 00.3.3/04/PPK-JBS/BM/VII/2024, Tanggal 5 Juli 2024 Add.1 : 00.3.3/16/ADD/PPK-JBS/BM/VII/2024, Tanggal 30 Juli 2024 Nilai Kontrak : Rp2.413.331.900,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 165 hari kalender (5 Juli 2024 s.d 16 Desember 2024)	Nomor : 08/BAST-JB/PPK/BM/XII/2024 Tanggal : 13 Desember 2024	2.413.331.900,00	100,00%	I	Pek.Beton Abutment							
							1	Pembesian Ulir BJTS 420 B	Kg	23.072,50	23.072,50	6.802,26	6.755,48	1.079.331,55	
								PEKERJAAN ATAS JEMBATAN							
							2	Pengadaan Baja Diafragma IWF (200 x100 x 5.5 x 8 mm)	Kg	50.082,29	50.082,29	1.390,38	1.274,28	5.814.553,87	
								Pek. Plate Lantai Jembatan t = 20 cm							
							3	Pembesian Ulir BJTS 420 B	Kg	23.072,50	23.072,50	2.201,43	2.164,59	849.990,90	
								Pek. Beton Plate Injak(0.25 m x 2.25 m x 9.00 m)							
							4	Pembesian Ulir BJTS 420 B	Kg	23.072,50	23.072,50	5.624,88	5.394,82	5.308.059,35	
								Cor Beton Oprit Jembatan +Beton Rigid Jalan Seroja							
							5	Pembesian Ulir BJTS 420 B	Kg	50.082,29	50.082,29	426,67	419,58	355.083,44	
													Jumlah Kekurangan Volume	**13.407.019,11**	

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Volume		Kekurangan Volume (Rp)	Keterangan
					Nilai (Rp)	%						Kontrak	Cek Fisik		
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*		*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n = (jxl) - (kxm)*	*o*
12	Peningkatan Jalan Cip Deco	PT WJK	Nomor :00.3.3/04/PPK-CD/BM/IV/2024, Tanggal 19 April 2024 Add.1 : 00.3.3/14/ADD/PPK-CD/BM/IV/2024, Tanggal 25 April 2024 Nilai Kontrak : Rp2.816.873.800,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 90 hari kalender (19 April 2024 s.d 17 Juli 2024)	Nomor : 08/BAST-CD/PPK/BM/VI/2024 Tanggal : 8 Juli 2024	2.816.873.800,00	100,00%	1	Marshall Asphalt Test	Sampel	120.000,00	120.000,00	1,00	-	120.000,00	
							2	Extraction Test, Centrifuge/Refflux Method	Sampel	120.000,00	120.000,00	3,00	-	360.000,00	
							III	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						-	
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	1.818.963,00	56,23	55,01	13.583.611,47	STA 0+50 sd STA 0+100
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	1.818.963,00	54,92	53,72	13.282.472,04	STA 0+100 sd STA 0+150
							3	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	51,62	50,84	1.576.434,60	STA 0+150 sd STA 0+200
							4	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	52,17	51,38	1.596.645,30	STA 0+200 sd STA 0+250
							5	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	55,08	49,07	12.146.630,70	STA 0+250 sd STA 0+300
							6	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	55,39	45,18	20.635.124,70	STA 0+300 sd STA 0+350
							7	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	55,14	43,75	23.019.987,30	STA 0+350 sd STA 0+400
							8	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	54,92	46,05	17.926.890,90	STA 0+400 sd STA 0+450
							9	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	1.818.963,00	54,01	51,26	15.917.947,32	STA 0+450 sd STA 0+500
							10	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	1.818.963,00	50,87	49,64	12.518.507,58	STA 0+500 sd STA 0+550
							11	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	44,97	40,27	9.499.029,00	STA 0+550 sd STA 0+600
							12	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	44,62	38,04	13.298.640,60	STA 0+600 sd STA 0+650
							13	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	49,50	42,18	14.794.232,40	STA 0+650 sd STA 0+700
							14	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	50,11	43,51	13.339.062,00	STA 0+700 sd STA 0+750
							15	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	48,51	44,22	8.670.390,30	STA 0+750 sd STA 0+800
							16	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	50,36	46,70	7.397.116,20	STA 0+800 sd STA 0+850
							17	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	52,59	48,34	8.589.547,50	STA 0+850 sd STA 0+900
							18	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	49,99	48,36	3.294.344,10	STA 0+900 sd STA 0+950
							19	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	48,40	47,77	1.273.274,10	STA 0+950 sd STA 0+1000
							20	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	49,39	48,75	1.293.484,80	STA 0+1000 sd STA 0+1050
							21	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	49,07	48,64	869.060,10	STA 0+1050 sd STA 0+1100
							22	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.021.070,00	2.021.070,00	48,35	47,93	848.849,40	STA 0+1100 sd STA 0+1150
													Jumlah Kekurangan Volume	**215.851.282,41**	
13	Peningkatan Jalan TPA Juata Kerikil	CV VK	Nomor : 00.3.3/04/PPK-TPA/BM/VI/2024, Tanggal 14 Juni 2024 Add.1 : 00.3.3/14/ADD/PPK-TPA/BM/VI/2024, Tanggal 25 Juni 2024 Add.2 : 00.3.3/18/ADD02/PPK-TPA/BM/VIII/2024, Tanggal 8 Agustus 2024 Add.3 : 00.3.3/22/ADD03/PPK-TPA/BM/IX/2024, Tanggal 25 September 2024 Nilai Kontrak : Rp2.812.468.000,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 165 hari kalender (14 Juni 2024 s.d 25 November 2024)	Nomor : 08/BAST-TPA/PPK/BM/XI/2024 Tanggal : 7 November 2024	2.812.468.000,00	100,00%		DIVISI 7. Struktur							
							1	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	20.050,00	20.050,00	24.150,62	21.997,56	43.168.853,00	
													Jumlah Kekurangan Volume	**43.168.853,00**	

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Volume		Kekurangan Volume (Rp)	Keterangan
					Nilai (Rp)	%						Kontrak	Cek Fisik		
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*		*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n = (jxl) - (kxm)*	*o*
14	Peningkatan Jalan Lestari	CV VK	Nomor : 00.3.3/04/PPK-PJL/BM/III/2024, Tanggal 15 Maret 2024 Add.1 : 00.3.3/14/ADD/PPK-PJL/BM/VI/2024, Tanggal 7 Juni 2024 Nilai Kontrak : Rp3.058.418.700,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 120 hari kalender (15 Maret 2024 s.d 12 Juli 2024)	Nomor : 09/PPK-BASTP/PJL/BM/2024 Tanggal : 13 Juni 2024	3.058.418.700,00	100,00%	1	Marshall Asphalt Test	Sampel	120.000,00	120.000,00	2,00	-	240.000,00	
							2	Extraction Test, Centrifuge/Refflux Method	Sampel	120.000,00	120.000,00	10,00	-	1.200.000,00	
							III	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL							
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	28,85	28,72	287.760,20	STA 0+50 sd STA 0+100 (Segmen I)
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	31,88	31,74	309.895,60	STA 0+100 sd STA 0+150 (Segmen I)
							3	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.992.186,00	38,83	36,44	13.356.500,36	STA 0+158 sd STA 0+200 (Segmen I)
							4	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.992.186,00	39,95	37,60	13.524.729,40	STA 0+200 sd STA 0+250 (Segmen I)
							5	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	33,36	32,85	1.128.905,40	STA 0+250 sd STA 0+300 (Segmen I)
							6	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	31,01	30,54	1.040.363,80	STA 0+300 sd STA 0+350 (Segmen I)
							7	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	29,80	29,34	1.018.228,40	STA 0+350 sd STA 0+400 (Segmen I)
							8	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	29,88	29,34	1.195.311,60	STA 0+400 sd STA 0+450 (Segmen I)
							9	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	30,99	30,52	1.040.363,80	STA 0+450 sd STA 0+500 (Segmen I)
							10	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	32,33	31,83	1.106.770,00	STA 0+500 sd STA 0+550 (Segmen I)
							11	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	33,69	33,32	819.009,80	STA 0+550 sd STA 0+600 (Segmen I)
							12	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	35,22	34,84	841.145,20	STA 0+600 sd STA 0+640 (Segmen I)
							13	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.992.186,00	27,32	26,73	7.222.781,02	STA 0+50 sd STA 0+100 (Segmen II)
							14	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.992.186,00	27,26	25,60	9.341.138,80	STA 0+100 sd STA 0+150 (Segmen II)
							15	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	30,28	25,68	10.182.284,00	STA 0+150 sd STA 0+200 (Segmen II)
							16	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	11,52	10,19	2.944.008,20	STA 0+200 sd STA 0+220 (Segmen II)
							17	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	15,86	15,13	1.615.884,20	STA 0+220 sd STA 0+250 (Segmen II)
							18	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	27,54	23,80	8.278.639,60	STA 0+250 sd STA 0+300 (Segmen II)
							19	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	27,23	23,56	8.123.691,80	STA 0+300 sd STA 0+350 (Segmen II)
							20	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	13,83	13,21	1.372.394,80	STA 0+350 sd STA 0+375,5 (Segmen II)
							21	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.770.832,00	14,24	13,74	7.189.577,92	STA 0+375,5 sd STA 0+400 (Segmen II)
							22	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.770.832,00	30,17	29,13	15.198.165,64	STA 0+400 sd STA 0+450 (Segmen II)
							23	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.770.832,00	30,53	27,65	18.615.871,40	STA 0+450 sd STA 0+500 (Segmen II)
							24	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.770.832,00	29,19	26,14	18.323.684,12	STA 0+500 sd STA 0+550 (Segmen II)
							25	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.992.186,00	27,63	26,78	7.809.369,12	STA 0+550 sd STA 0+600 (Segmen II)
							26	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.992.186,00	29,41	28,77	7.785.020,18	STA 0+600 sd STA 0+650 (Segmen II)
							27	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.770.832,00	33,33	31,88	17.323.164,04	STA 0+650 sd STA 0+700 (Segmen II)
							28	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.770.832,00	31,14	29,79	16.176.550,32	STA 0+700 sd STA 0+750 (Segmen II)
							29	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.770.832,00	26,60	24,81	14.945.822,08	STA 0+750 sd STA 0+800 (Segmen II)
							30	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.770.832,00	27,34	25,09	16.088.008,72	STA 0+800 sd STA 0+850 (Segmen II)
							31	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.992.186,00	28,50	25,86	11.567.960,04	STA 0+850 sd STA 0+900 (Segmen II)
							32	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	1.992.186,00	27,37	21,45	17.852.200,10	STA 0+900 sd STA 0+950 (Segmen II)
							33	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	4,01	3,99	44.270,80	STA 0+950 sd STA 0+959 (Segmen II)
							34	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.213.540,00	2.213.540,00	5,93	2,32	7.990.879,40	STA 0+959 sd STA 0+976,9 (Segmen II)
													Jumlah Kekurangan Volume	**263.100.349,86**	
15	Peningkatan Jalan Damai Bakti	CV VK	Nomor : 00.3.3/04/PPK-PJDB/BM/III/2024, Tanggal 15 Maret 2024 Add.1 : 00.3.3/14/ADD/PPK-PJDB/BM/III/2024, Tanggal 25 Maret 2024 Nilai Kontrak : Rp2.483.370.000,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 90 hari kalender (15 Maret 2024 s.d 12 Juni 2024)	Nomor : 09/PPK-BASTP/PJDB/BM/2024 Tanggal : 12 Juni 2024	2.483.370.000,00	100,00%	1	Marshall Asphalt Test	Sampel	120.000,00	120.000,00	1,00	-	120.000,00	
							2	Extraction Test, Centrifuge/Refflux Method	Sampel	120.000,00	120.000,00	1,00	-	120.000,00	
							III	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL							
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.126.200,00	2.126.200,00	51,03	50,36	1.424.554,00	STA 0+50 sd STA 0+100
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.126.200,00	2.126.200,00	45,53	44,48	2.232.510,00	STA 0+100 sd STA 0+150
							3	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.126.200,00	2.126.200,00	42,67	36,72	12.650.890,00	STA 0+158 sd STA 0+200
							4	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.126.200,00	2.126.200,00	39,87	34,64	11.120.026,00	STA 0+200 sd STA 0+250
							5	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.126.200,00	2.126.200,00	42,26	41,99	574.074,00	STA 0+250 sd STA 0+300
							6	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.126.200,00	2.126.200,00	40,90	40,64	552.812,00	STA 0+300 sd STA 0+350
							7	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.126.200,00	2.126.200,00	35,26	34,96	637.860,00	STA 0+350 sd STA 0+400
							8	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.126.200,00	2.126.200,00	36,69	36,37	680.384,00	STA 0+400 sd STA 0+450
							9	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.126.200,00	2.126.200,00	43,56	38,90	9.908.092,00	STA 0+450 sd STA 0+500
							10	Laston Lapis Pondasi (AC - BC)	Ton	2.126.200,00	2.126.200,00	5,06	4,64	893.004,00	STA 0+500 sd STA 0+505
													Jumlah Kekurangan Volume	**40.914.206,00**	

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Volume		Kekurangan Volume (Rp)	Keterangan
					Nilai (Rp)	%						Kontrak	Cek Fisik		
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*		*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n = (jxl) - (kxm)*	*o*
16	Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa	CV WK	Nomor : 00.3.3/04/PPK-KB/BM/II/2024, Tanggal 21 Februari 2024 Nilai Kontrak : Rp3.888.144.000,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 90 hari kalender (21 Februari 2024 s.d 20 Mei 2024)	Nomor : 09/BASTP-KB/BM/DPUPR/2024 Tanggal : 8 Mei 2024	3.888.144.000,00	100,00%	1	Marshall Asphalt Test	Sampel	120.000,00	120.000,00	2,00	-	240.000,00	
							2	Extraction Test, Centrifuge/Refflux Method	Sampel	120.000,00	120.000,00	10,00	-	1.200.000,00	
							III	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL							
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	0,95	0,93	40.272,58	STA 0+00 sd STA 0+2,5 (STB - Indoor)
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	1.812.265,97	40,44	39,44	9.955.381,24	STA 0+2,5 sd STA 0+50 (STB - Indoor)
							3	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	1.812.265,97	47,69	46,10	12.484.499,12	STA 0+50 sd STA 0+100 (STB - Indoor)
							4	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	45,79	45,38	825.587,83	STA 0+100 sd STA 150 (STB - Indoor)
							5	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	40,40	38,72	3.382.896,48	STA 0+150 sd STA 186 (STB - Indoor)
							6	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	1,41	1,40	20.136,29	STA 0+00 sd STA 0+2,5 (Indoor - STB)
							7	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	1.610.903,09	52,29	43,71	34.880.079,03	STA 0+2,5 sd STA 0+50 (Indoor - STB)
							8	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	1.610.903,09	52,80	43,33	36.519.172,92	STA 0+50 sd STA 0+100 (Indoor - STB)
							9	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	46,64	44,65	4.007.121,43	STA 0+100 sd STA 150 (Indoor - STB)
							10	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	45,13	43,72	2.839.216,69	STA 0+150 sd STA 200 (Indoor - STB)
							11	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	47,73	47,03	1.409.540,20	STA 0+200 sd STA 250 (Indoor - STB)
							12	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	49,31	48,89	845.724,12	STA 0+250 sd STA 300 (Indoor - STB)
							13	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	43,86	43,56	604.088,66	STA 0+2,5 sd STA 0+50 (STB - Katakita)
							14	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	39,16	37,85	2.637.853,81	STA 0+50 sd STA 0+100 (STB - Katakita)
							15	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	40,39	39,34	2.114.310,30	STA 0+100 sd STA 0+150 (STB - Katakita)
							16	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	42,95	38,89	8.175.333,17	STA 0+150 sd STA 0+200 (STB - Katakita)
							17	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	42,15	37,99	8.376.696,06	STA 0+200 sd STA 0+250 (STB - Katakita)
							18	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	39,79	38,38	2.839.216,69	STA 0+250 sd STA 0+300 (STB - Katakita)
							19	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	40,85	36,54	8.678.740,39	STA 0+300 sd STA 0+350 (STB - Katakita)
							20	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	45,36	32,13	26.640.309,82	STA 0+350 sd STA 0+400 (STB - Katakita)
							21	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	46,34	34,45	23.942.047,15	STA 0+400 sd STA 0+450 (STB - Katakita)
							22	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	44,28	43,73	1.107.495,87	STA 0+450 sd STA 0+500 (STB - Katakita)
							23	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	50,85	49,94	1.832.402,26	STA 0+500 sd STA 0+550 (STB - Katakita)
							24	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	1.610.903,09	65,39	56,99	39.865.824,06	STA 0+550 sd STA 0+600 (STB - Katakita)
							25	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	1.610.903,09	64,17	53,59	42.886.267,35	STA 0+600 sd STA 0+650 (STB - Katakita)
							26	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	49,29	44,84	8.960.648,43	STA 0+650 sd STA 0+700 (STB - Katakita)
							27	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	40,71	39,46	2.517.036,08	STA 0+700 sd STA 0+750 (STB - Katakita)
							28	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	36,83	36,39	885.996,70	STA 0+750 sd STA 0+800 (STB - Katakita)
							29	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	37,77	37,45	644.361,24	STA 0+800 sd STA 0+850 (STB - Katakita)
							30	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	44,50	35,93	17.256.799,33	STA 0+850 sd STA 0+900 (STB - Katakita)
							31	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	48,11	38,14	20.075.879,73	STA 0+900 sd STA 0+950 (STB - Katakita)
							32	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.013.628,86	2.013.628,86	14,34	13,42	1.852.538,55	STA 0+950 sd STA 0+965 (STB - Katakita)
												Jumlah Kekurangan Volume		**330.543.473,58**	
17	Peningkatan Jalan RE. Martadinata	CV WK	Nomor : 00.3.3/04/PPK-PJM/BM/III/2024, Tanggal 15 Maret 2024 Add.1 : 00.3.3/14/ADD/PPK-PJM/BM/III/2024 , Tanggal 22 Maret 2024 Nilai Kontrak : Rp2.817.456.000,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 90 hari kalender (15 Maret 2024 s.d 12 Juni 2024)	Nomor : 09/BASTP-KB/BM/DPUPR/2024 Tanggal : 31 Mei 2024	2.817.456.000,00	100,00%	1	Marshall Asphalt Test	Sampel	120.000,00	120.000,00	3,00	-	360.000,00	
							2	Extraction Test, Centrifuge/Refflux Method	Sampel	120.000,00	120.000,00	3,00	-	360.000,00	
							III	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL							
							1	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.215.560,00	2.215.560,00	13,87	12,30	3.478.429,20	STA 0+192 sd STA 0+200 (Segmen I)
							2	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.215.560,00	2.215.560,00	116,26	104,59	25.855.585,20	STA 0+200 sd STA 0+250 (Segmen I)
							3	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.215.560,00	1.994.004,00	192,07	196,61	33.501.482,76	STA 0+250 sd STA 0+300 (Segmen I)
							4	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.215.560,00	1.994.004,00	88,42	86,50	23.418.469,20	STA 0+300 sd STA 0+320,4 (Segmen I)
							5	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.215.560,00	2.215.560,00	123,84	123,31	1.174.246,80	STA 0+4,6 sd STA 0+50 (Segmen Halmahera)
							6	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.215.560,00	2.215.560,00	111,40	110,92	1.063.468,80	STA 0+50 sd STA 0+100 (Segmen Halmahera)
							7	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.215.560,00	2.215.560,00	55,47	54,39	2.392.804,80	STA 0+125 sd STA 0+150 (Segmen Halmahera)
							8	Laston Lapis Pondasi (AC - WC)	Ton	2.215.560,00	2.215.560,00	48,60	47,65	2.104.782,00	STA 0+150 sd STA 0+175 (Segmen Halmahera)
												Jumlah Kekurangan Volume		**93.709.268,76**	
												Total Jumlah Kekurangan Volume		**2.508.237.938,16**	

Perhitungan Harga Satuan Timpang atas Empat Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Pekerjaan	Penyedia	SPK/Kontrak/Addendum	Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Realisasi Pembayaran		Uraian Pekerjaan			Satuan	Harga Satuan (Rp)			Volume			Kelebihan Pembayaran (Rp)
					Nilai (Rp)	%					HPS	Kontrak	Selisih	Kontrak	Addendum	Selisih	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*		*h*		*i*	*j*	*k*	*l = k - j*	*m*	*n*	*o = n - m*	*p = l x o*
1	Pembangunan Jalan Pasar Rakyat KP. Empat (Sei Mahakam Tembus Masjid Raya)	CV N	Nomor : 00.3.3/04/PPK-PSR/BM/II/2024, Tanggal 12 Februari 2024 Add.1 : 00.3.3/ADD/04/PPK-PSR/BM/II/2024, Tanggal 8 Maret 2024	Nomor : 09/BASTP-PSR/BM/DPUPR/2024 Tanggal : 5 Juni 2024	3.765.492.255,00	100,00%	1	Galian Biasa		M3	25.950,73	70.674,08	44.723,35	570,05	831,32	261,27	11.684.869,65
							2	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		Ltr	38.269,42	42.903,26	4.633,84	1.376,35	3.094,00	1.717,65	7.959.315,28
																Jumlah	**19.644.184,93**
2	Peningkatan Jalan Sei Kayan	CV TA	Nomor : 00.3.3/04/PPK-SK/BM/III/2024, Tanggal 28 Maret 2024 Add.1 : 00.3.3/15/PPK-SK/BM/IV/2024, Tanggal 25 April 2024 Nilai Kontrak : Rp3.145.053.600,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 134 hari kalender (28 Maret 2024 s.d 8 Agustus 2024)	Nomor : 09/BASTP-PEN.SK/BM/DPUPR/2024 Tanggal : 18 Juli 2024	3.145.053.600,00	100,00%	1	Baja Tulangan Polos BJTP 280		Kg	21.194,50	26.125,00	4.930,50	4.618,99	5.534,69	915,70	4.514.858,85
							2	Pemotongan Pohon		Bh	74.210,00	85.181,39	10.971,39	15,00	55,00	40,00	438.855,60
																Jumlah	**4.953.714,45**
3	Pembangunan *Landscape* TACC	CV TA	Nomor : 00.3/02/SP/PPK-TACC/CKPR-DPUPR/II/2024 , Tanggal 16 Februari 2024 Add.1 : 00.3/08/SP-ADD/PPK-TACC/CKPR-DPUPR/V/2024, Tanggal 14 Mei 2024 Nilai Kontrak : Rp4.842.655.400,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 120 hari kalender (16 Februari 2024 s.d 14 Juni 2024)	Nomor : 6/BASTHP/Pembangunan Landscape TACC/CKPR/2024 Tanggal : 24 Juni 2024	4.842.655.400,00	100,00%	I	Pek. Tanah										
							1	Timbunan Biasa dari Luar Lokasi		M3	135.711,76	193.720,89	58.009,13	172,70	1.142,64	969,94	56.265.375,55
							II	Pek. Lapis Pondasi									
							2	Pembesian Polos		Kg	19.936,40	25.415,50	5.479,10	1.391,50	2.890,28	1.498,78	8.211.965,50
																Jumlah	**64.477.341,05**
4	Peningkatan Jalan Kasiba Laut	CV N	Nomor : 00.3.3/04/PPK-JKSB/BM/IV/2024, Tanggal 5 April 2024 Add.1 : 00.3.3/16/ADD/PPK-PJKJL/BM/VI/2024, Tanggal 2 Oktober 2024 Nilai Kontrak : Rp9.684.548.600,00 (Termasuk PPN 11 %) Jangka Waktu : 270 hari kalender (5 April 2024 s.d 30 Desember 2024)	Nomor : 08/BAST-JKSB/PPK/BM/I/2025 Tanggal : 20 Januari 2025	9.684.548.600,00	100,00%	I	DIV. 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
							1	Penyiapan Badan Jalan		M3	8.405,70	10.308,96	1.903,26	2.832,00	12.000,00	9.168,00	17.449.087,68
																Jumlah	**17.449.087,68**
																Total Jumlah	**106.524.328,11**

Rincian Item Pekerjaan Siring dan Timbunan Tanah Luar Bangunan
(Dikerjakan Mendahului Kontrak)

	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume			Nilai (Rp)	Keterangan
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih		
	a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g = (c x f)*	*h*
I	**Pekerjaan Siring**							
1	Galian tanah	m3	116.437,50	174,15	-	174,15	20.277.590,63	Dikerjakan mendahului Kontrak
2	Pek.Pancang Beton 20x20x6m	Btg	2.003.350,11	90,00	-	90,00	180.301.509,90	Dikerjakan mendahului Kontrak
3	Pek pasangan Batu Gunung Camp. 1:4	m3	1.659.829,50	168,35	-	168,35	279.432.296,33	Dikerjakan mendahului Kontrak
4	Pas.Pipa Pvc 2''	Btg	92.630,13	80,00	-	80,00	7.410.410,40	Dikerjakan mendahului Kontrak
5	Pek.Plesteran Camp. 1:4	m2	91.476,06	205,41	-	205,41	18.790.097,48	Dikerjakan mendahului Kontrak
6	Pasir Urug t= 10cm	m3	270.963,00	11,61	-	11,61	3.145.880,43	Dikerjakan mendahului Kontrak
7	Plat Beton t= 12cm							
-	Beton K-250	m3	1.680.863,13	13,93	-	13,93	23.414.423,40	Dikerjakan mendahului Kontrak
-	Pembesian dengan besi polos	Kg	20.997,39	1.401,79	-	1.401,79	29.433.931,33	Dikerjakan mendahului Kontrak
-	Begisting	m2	243.758,60	21,43	-	21,43	5.223.746,80	Dikerjakan mendahului Kontrak
8	Beton Sloof 30/30							
-	Beton K-250	m3	1.680.863,13	8,04	-	8,04	13.514.139,57	Dikerjakan mendahului Kontrak
-	Pembesian dengan besi polos	Kg	20.997,39	721,73	-	721,73	15.154.446,28	Dikerjakan mendahului Kontrak
-	Begisting	m2	243.758,60	53,58	-	53,58	13.060.585,79	Dikerjakan mendahului Kontrak
II	**Pekerjaan Timbunan Tanah Area Kawasan**							
1	Timbunan tanah Luar bangunan	m3	193.832,50	2.228,37	-	2.228,37	431.930.528,03	Dikerjakan mendahului Kontrak
						Jumlah	**1.041.089.586,37**	

Rincian Debitur Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan yang Ditemukan

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tgl/ Cair	Plafond Kredit	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan	Kualitas Dana Bergulir	Keterangan	Klasifikasi
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*n*	*o*
1	HATJ	Jl. Jembatan Besi RT.VII Tarakan	26/8/2002	10.000.000,00	26/11/2004	6,00	8.749.999,00	100,00%	8.749.999,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
2	HJ	Jembatan Besi RT.I Tarakan	20/9/2002	25.000.000,00	7/1/2005	6,00	23.958.333,00	100,00%	23.958.333,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
3	Smd	Jl. Martadinata RT.II Pamusian Tarakan	20/9/2002	10.000.000,00	8/1/2005	6,00	8.749.999,00	100,00%	8.749.999,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
4	SL	Jl. P. Diponegoro RT.20 Tarakan	6/9/2002	100.000.000,00	6/12/2004	6,00	94.737.333,00	100,00%	94.737.333,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
5	Mly	Jl. Sebengkok Pasar RT.24 Tarakan	24/7/2003	30.000.000,00	24/10/2005	6,00	27.065.000,00	100,00%	27.065.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
6	SH	Jl. Sebengkok Waru 07 RT.21 Tarakan	17/4/2003	10.000.000,00	17/7/2005	6,00	7.499.998,00	100,00%	7.499.998,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
7	AM	Jembatan Besi RT.I Tarakan	23/3/2004	10.000.000,00	23/3/2006	6,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
8	DT	Jl. P. Aji Iskandar RT.12 Juata Laut Tarakan	15/7/2004	7.500.000,00	15/7/2006	6,00	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
9	Ys	Jl. P. Diponegoro RT.16 Sebengkok Tarakan	6/1/2004	10.000.000,00	6/1/2006	6,00	8.181.800,00	100,00%	8.181.800,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
10	KSA	Jl. Purna Bhakti RT.7 Tarakan	28/10/2005	5.000.000,00	28/10/2007	4,00	4.315.901,00	100,00%	4.315.901,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
11	Ssw	Jl. Sebengkok RT.9 Tarakan	21/10/2005	10.000.000,00	21/10/2007	4,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
12	Shb	Juata Laut RT.3 Tarakan	19/10/2005	20.000.000,00	19/10/2007	4,00	16.000.000,00	100,00%	16.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
13	Syb	Jl. Purna Bhakti RT.12 Tarakan	28/10/2005	5.000.000,00	28/10/2007	4,00	4.544.000,00	100,00%	4.544.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
14	IS	Jl. P. Diponegoro RT.18 Tarakan	22/12/2006	5.000.000,00	22/12/2008	2,00	3.632.000,00	100,00%	3.632.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
15	M	Jl. Diponegoro RT.22 Trk	20/2/2006	10.000.000,00	20/2/2008	4,00	9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
16	U	Jl. Sebengkok RT.25	14/12/2006	10.000.000,00	14/12/2008	2,00	6.360.000,00	100,00%	6.360.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
17	K	Sebengkok RT.19 Trk	18/6/2007	50.000.000,00	18/6/2009	2,00	43.181.571,42	100,00%	43.181.571,42	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
18	MSM	Selumit Pantai RT.1 Trk	13/6/2007	5.000.000,00	13/6/2009	2,00	4.772.000,00	100,00%	4.772.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
19	AH	Jl. Seroja RT.20	13/10/2009	25.000.000,00	13/10/2011	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
20	CM	Jl. Purnawirawan RT.03	8/10/2009	35.000.000,00	8/10/2011	2,00	30.227.000,00	100,00%	30.227.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
21	K	Selumit RT.007 Kel.Selumit	8/3/2011	10.000.000,00	8/3/2013	2,00	5.906.333,33	100,00%	5.906.333,33	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
22	Hsn	Selumit Pantai RT. 001	12/4/2012	50.000.000,00	12/4/2014	6,00	39.466.664,00	100,00%	39.466.664,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
23	RS	Jl. Niaga I RT. 012 Karang	13/4/2012	25.000.000,00	13/4/2014	2,00	11.356.000,00	100,00%	11.356.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
24	AS	JL. Cendawang GG. Tuna 3 Rt. 005 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah	10/10/2013	20.000.000,00	10/10/2015	2,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
25	MH	JL. SAROJANO. 018 KARANG ANYAR	9/10/2014	35.000.000,00	9/10/2016	2,00	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
26	Sbr	JL. KUSUMA BANGSA RT. 014 KEL. GUNUNG LINGKAS	7/10/2014	50.000.000,00	7/10/2016	6,00	41.666.664,00	100,00%	41.666.664,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
27	Sbn	Jl. Gajah Mada RT. 01 No. 54 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan barat	6/11/2014	35.000.000,00	6/11/2016	2,00	30.227.000,00	100,00%	30.227.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
28	Spr	JL. LUMPURAN RT. 16 RW. 002 KEL. KAMP. 1 SKIP	10/10/2014	15.000.000,00	10/10/2016	2,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
29	Syt	JL. TEUKU UMAR RT. 016 KEL. PAMUSIAN	25/9/2014	25.000.000,00	25/9/2016	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
30	Z	JL. AKI BALAK GG. AKASIA NO. 64 RT. 3 KEL. JUATA KERIKIL	24/9/2014	20.000.000,00	25/9/2016	2,00	17.270.000,00	100,00%	17.270.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
31	ESW	JL.PURNA BHAKTI RT. 012 RW.002 KEL.KAMPUNG I SKIP TARAKAN TENGAH	17/12/2015	25.000.000,00	17/12/2017	2,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tgl/ Cair	Plafond Kredit	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan	Kualitas Dana Bergulir	Keterangan	Klasifikasi
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*n*	*o*
32	HK	Tarakan	17/12/2015	35.000.000,00	17/12/2017	2,00	3.178.000,00	100,00%	3.178.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
33	I	SELUMIT PANTAI RT. 019 RW.004 KEL. SELUMIT PANTAI KEC. TARAKAN TENGAH	10/12/2015	35.000.000,00	10/12/2017	2,00	14.037.058,82	100,00%	14.037.058,82	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
34	Slv	JL.P.IKAN RT. 001 RW.001 KEL.KAMPUNG I SKIP KEC. TARAKAN TENGAH	18/12/2015	20.000.000,00	18/12/2017	2,00	18.180.000,00	100,00%	18.180.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
35	J	JL. MULAWARMAN NO.23 RT.015 KARANG ANYAR PANTAI	24/1/2016	30.000.000,00	24/1/2019	2,00	19.088.000,00	100,00%	19.088.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
36	ML	JL.TERATAI RT.070 KARANG ANYAR TARAKAN BARAT	30/1/2017	25.000.000,00	30/1/2019	2,00	8.600.000,00	100,00%	8.600.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
37	A	JL.P.AJI ISKANDAR RT.016 JUATA LAUT TARAKAN UTARA	24/1/2017	25.000.000,00	24/1/2019	2,00	8.219.000,00	100,00%	8.219.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
38	Msl	JL.P.AJI ISKANDAR RT.001 JUATA PERMAI TARAKAN UTARA	27/1/2017	35.000.000,00	27/1/2019	2,00	23.863.000,00	100,00%	23.863.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
39	Sbr	JL.YOS SUDARSO RT.012 NO.63 KARANG REJO TARAKAN BARAT	24/1/2017	25.000.000,00	24/1/2019	2,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
40	W	JI.P.BANDA RT/RW 015 KAMPUNG I SKIP TARAKAN	30/1/2017	10.000.000,00	30/1/2019	2,00	9.545.000,00	100,00%	9.545.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
Jumlah				**942.500.000,00**			**731.597.654,57**		**731.597.654,57**	**-**			

Rincian Debitur Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan yang Meninggal

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tgl/ Cair	Plafond Kredit	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan	Kualitas Dana Bergulir	Keterangan	Klasifikasi
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
1	MHB	Jl. Yos Sudarso RT.XI Tarakan	13/9/2002	50.000.000,00	13/12/2004	6,00	22.663.332,00	100,00%	22.663.332,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
2	Kms	Jl. Gn. Selumit RT.10 No.01 Tarakan.	29/12/2003	25.000.000,00	29/12/2005	4,00	4.538.666,67	100,00%	4.538.666,67	0,00	Macet	Meninggal	<Rp8.000.000,00
3	Msr	Jl. Pesisir Indah RT.13 Tarakan.	30/12/2003	20.000.000,00	30/12/2005	6,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
4	Hs	Jl. Kaka Tua RT.15 Juata Kerikil Tarakan	14/10/2005	10.000.000,00	14/10/2007	4,00	8.635.000,00	100,00%	8.635.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
5	Id	Jl. Hangtuah RT.10 Selumit Tarakan	18/10/2005	7.500.000,00	18/10/2007	4,00	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	0,00	Macet	Meninggal	<Rp8.000.000,00
6	Nra	Jl. Pattimura RT.XVI Pamusian Tarakan	7/3/2005	5.000.000,00	5/3/2007	4,00	2.850.000,00	100,00%	2.850.000,00	0,00	Macet	Meninggal	<Rp8.000.000,00
7	PS	Selumit Dalam RT.02 Tarakan	27/10/2005	10.000.000,00	27/10/2007	4,00	9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
8	SS	Jl. Kusuma Bangsa RT.25 Pamusian Tarakan	19/10/2005	10.000.000,00	19/10/2007	4,00	9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
9	YS	Sebengkok RT.3 Tarakan	12/6/2007	15.000.000,00	12/6/2009	2,00	14.318.000,00	100,00%	14.318.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
10	Fsl	Jl.Elang RT.14 Kr.Anyar	28/12/2009	50.000.000,00	28/12/2011	2,00	27.270.000,00	100,00%	27.270.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
Jumlah				**202.500.000,00**			**125.954.998,67**		**125.954.998,67**	**-**			

Rincian Debitur Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan yang Pindah Domisili

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Cair	Plafond Kredit (Rp)	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet (Rp)	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan	Kualitas Dana Bergulir	Keterangan	Klasifikasi
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
1	RN	Jl. Dewi Sartika RT.12 Selumit Tarakan	15/3/2004	10.000.000,00	15/3/2006	6,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
2	YKS	Jl. Bhayangkara RT.68 Kr. Anyar Tarakan	20/7/2004	50.000.000,00	20/7/2006	6,00	32.727.000,00	100,00%	32.727.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
3	RS	Jl. P. Diponegoro RT.22 Trk	18/12/2006	10.000.000,00	18/12/2008	2,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
4	AP	JL. Slamet Riyadi Rt. 008 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat	1/10/2013	30.000.000,00	1/10/2015	2,00	13.996.000,00	100,00%	13.996.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
5	ADH	Selumit Pantai No.08 Rt.009/ RW.003 Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah	6/12/2013	28.000.000,00	6/12/2015	2,00	12.062.200,97	100,00%	12.062.200,97	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
6	Sy	Jl.KH.Agus Salim Rt.019 Kel.Sebengkok Kec.Tarakan Tengah	5/12/2013	50.000.000,00	5/12/2015	2,00	22.724.000,00	100,00%	22.724.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
7	YK	JL. Damai Bhakti Rt. 007 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat	7/10/2013	20.000.000,00	7/10/2015	2,00	13.630.000,00	100,00%	13.630.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
8	T	JL.SUKAR LAMFANI RT.29 PAMUSIAN TARAKAN TENGAH	14/12/2015	25.000.000,00	14/12/2017	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
Jumlah				**223.000.000,00**			**134.454.200,97**		**134.454.200,97**	**-**			

Rincian Debitur Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan yang Tidak Dapat Ditemukan

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Cair	Plafond Kredit (Rp)	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet (Rp)	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan (Rp)	Kualitas Dana Bergulir	Keterangan	Klasifikasi
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
1	AMHP	Jl. Griya Persemaian B.II RT.06 Tarakan	7/10/2002	50.000.000,00	7/11/2005	4,00	23.505.000,00	100,00%	23.505.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
2	AS	Jl. P. Diponegoro RT.19 Tarakan	28/8/2002	10.000.000,00	28/11/2004	6,00	7.499.998,00	100,00%	7.499.998,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
3	Am	Jl. Yos Sudarso RT.22 Tarakan	20/8/2002	10.000.000,00	20/11/2004	6,00	4.994.541,48	100,00%	4.994.541,48	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
4	AAH	Jl. Teuku Umar RT.XIV Pamusian Tarakan	20/9/2002	100.000.000,00	1/1/2005	6,00	60.500.000,00	100,00%	60.500.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
5	D	Jl. Selumit Gg. Delima RT.11 Tarakan	16/9/2002	5.000.000,00	10/1/2005	6,00	4.791.666,00	100,00%	4.791.666,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
6	SIP	Kp. Enam RT.VII Tarakan	7/10/2002	10.000.000,00	23/1/2005	6,00	7.499.998,00	100,00%	7.499.998,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
7	E	Jl. Dr. Sutomo RT.70 Tarakan	22/8/2002	10.000.000,00	22/11/2004	6,00	9.583.333,00	100,00%	9.583.333,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
8	JMD	Mamburungan RT.IX Tarakan	16/9/2002	50.000.000,00	10/1/2005	6,00	43.749.998,00	100,00%	43.749.998,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
9	MH	Jl. P. Aji Iskandar RT.12 Juata Laut Tarakan	21/8/2002	10.000.000,00	21/11/2004	6,00	5.596.333,00	100,00%	5.596.333,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
10	MR	Jl. Yos Sudarso RT.22 Tarakan	20/8/2002	50.000.000,00	20/11/2004	6,00	48.000.000,00	100,00%	48.000.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
11	S	Mamburungan Tarakan	16/9/2002	50.000.000,00	11/1/2005	6,00	47.916.666,00	100,00%	47.916.666,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
12	NA	Jl. P. Diponegoro RT.19 No.50 Tarakan.	31/12/2003	30.000.000,00	31/12/2005	6,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
13	B	Jl. Mulawarman RT.64 Kr. Anyar Tarakan	24/3/2004	10.000.000,00	24/3/2006	6,00	1.770.000,00	100,00%	1.770.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
14	J	Jl. Cendrawasih RT.07 Kr. Anyar Pantai Tarakan.	30/1/2004	2.500.000,00	30/1/2006	6,00	2.386.000,00	100,00%	2.386.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
15	Az	Jl. Mulawarman RT.73 Karang Anyar Tarakan	7/3/2005	10.000.000,00	5/3/2007	4,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
16	IK	Jl. Selumit RT.I Tarakan	7/3/2005	10.000.000,00	5/3/2007	4,00	6.315.000,00	100,00%	6.315.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
17	AA	Abdul Azis Lingkas Ujung RT.02 Tarakan	15/3/2005	25.000.000,00	15/3/2007	4,00	22.726.000,00	100,00%	22.726.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
18	MY	Martinus Yakob Jl. Aki Balak RT.79 Tarakan	15/3/2005	20.000.000,00	15/3/2007	4,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
19	B	Jl. Mulawarman RT.17 Trk	14/12/2006	10.000.000,00	14/12/2008	2,00	6.360.000,00	100,00%	6.360.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
20	HE	Karang Rejo RT.12 Tarakan	19/3/2004	10.000.000,00	19/3/2006	6,00	1.325.000,00	100,00%	1.325.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
21	PS	JL. P. DIPONEGORO RT. 23 KEL. SEBENGKOK	25/9/2014	25.000.000,00	25/9/2016	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
Jumlah				**507.500.000,00**			**383.834.533,48**		**383.834.533,48**	**-**			

Rincian Debitur Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan yang Penagihannya Diserahkan ke KPKNL

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Cair	Plafond Kredit (Rp)	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet (Rp)	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan	Kualitas Dana Bergulir	Keterangan	Klasifikasi
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
1	AA	Selumit RT.07 Tarakan	10/12/2001	30.000.000,00	10/3/2004	6,00	27.500.000,00	100,00%	27.500.000,00	0,00	Macet	Diserahkan ke KPKNL	Diatas Rp8.000.000,00
2	DD	Jl. KH. Agus Salim RT.01 No.62 Tarakan	6/12/2001	250.000.000,00	6/3/2004	6,00	131.915.000,00	100,00%	131.915.000,00	0,00	Macet	Diserahkan ke KPKNL	Diatas Rp8.000.000,00
3	AS	Jl. Gajah Mada RT.21 Kr. Anyar Tarakan	6/12/2001	200.000.000,00	6/3/2004	6,00	68.254.087,00	100,00%	68.254.087,00	0,00	Macet	Diserahkan ke KPKNL	Diatas Rp8.000.000,00
4	RH	Jl. Pasar Beringin RT.I No.55 A Tarakan	6/12/2001	200.000.000,00	6/3/2004	6,00	183.333.332,00	100,00%	183.333.332,00	0,00	Macet	Diserahkan ke KPKNL	Diatas Rp8.000.000,00
5	AS	Jl. Gajah Mada RT.21 Kr. Anyar Tarakan	7/10/2002	100.000.000,00	7/1/2005	6,00	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	0,00	Macet	Diserahkan ke KPKNL	Diatas Rp8.000.000,00
Jumlah				**780.000.000,00**			**511.002.419,00**		**511.002.419,00**	**-**			

Rincian Tunggakan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan di Bawah Rp8.000.000,00

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tgl/ Cair	Plafond Kredit (Rp)	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet (Rp)	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan (Rp)	Kualitas Dana Bergulir	Keterangan	Klasifikasi
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
1	AS	Jl. P. Diponegoro RT.19 Tarakan	28/8/2002	10.000.000,00	28/11/2004	6,00	7.499.998,00	100,00%	7.499.998,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
2	A	Jl. Yos Sudarso RT.22 Tarakan	20/8/2002	10.000.000,00	20/11/2004	6,00	4.994.541,48	100,00%	4.994.541,48	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
3	D	Jl. Selumit Gg. Delima RT.11 Tarakan	16/9/2002	5.000.000,00	10/1/2005	6,00	4.791.666,00	100,00%	4.791.666,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
4	SIP	Kp. Enam RT.VII Tarakan	7/10/2002	10.000.000,00	23/1/2005	6,00	7.499.998,00	100,00%	7.499.998,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
5	MH	Jl. P. Aji Iskandar RT.12 Juata Laut Tarakan	21/8/2002	10.000.000,00	21/11/2004	6,00	5.596.333,00	100,00%	5.596.333,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
6	Bsr	Jl. Mulawarman RT.64 Kr. Anyar Tarakan	24/3/2004	10.000.000,00	24/3/2006	6,00	1.770.000,00	100,00%	1.770.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
7	J	Jl. Cendrawasih RT.07 Kr. Anyar Pantai Tarakan.	30/1/2004	2.500.000,00	30/1/2006	6,00	2.386.000,00	100,00%	2.386.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
8	IL	Jl. Selumit RT.I Tarakan	7/3/2005	10.000.000,00	5/3/2007	4,00	6.315.000,00	100,00%	6.315.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
9	Bkr	Jl. Mulawarman RT.17 Trk	14/12/2006	10.000.000,00	14/12/2008	2,00	6.360.000,00	100,00%	6.360.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
10	HE	Karang Rejo RT.12 Tarakan	19/3/2004	10.000.000,00	19/3/2006	6,00	1.325.000,00	100,00%	1.325.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	<Rp8.000.000,00
11	SH	Jl. Sebengkok Waru 07 RT.21 Tarakan	17/4/2003	10.000.000,00	17/7/2005	6,00	7.499.998,00	100,00%	7.499.998,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
12	DT	Jl. P. Aji Iskandar RT.12 Juata Laut Tarakan	15/7/2004	7.500.000,00	15/7/2006	6,00	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
13	KSA	Jl. Purna Bhakti RT.7 Tarakan	28/10/2005	5.000.000,00	28/10/2007	4,00	4.315.901,00	100,00%	4.315.901,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
14	S	Jl. Purna Bhakti RT.12 Tarakan	28/10/2005	5.000.000,00	28/10/2007	4,00	4.544.000,00	100,00%	4.544.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
15	IS	Jl. P. Diponegoro RT.18 Tarakan	22/12/2006	5.000.000,00	22/12/2008	2,00	3.632.000,00	100,00%	3.632.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
16	U	Jl. Sebengkok RT.25	14/12/2006	10.000.000,00	14/12/2008	2,00	6.360.000,00	100,00%	6.360.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
17	MSM	Selumit Pantai RT.1 Trk	13/6/2007	5.000.000,00	13/6/2009	2,00	4.772.000,00	100,00%	4.772.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
18	K	Selumit RT.007 Kel.Selumit	8/3/2011	10.000.000,00	8/3/2013	2,00	5.906.333,33	100,00%	5.906.333,33	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
19	HK	Tarakan	17/12/2015	35.000.000,00	17/12/2017	2,00	3.178.000,00	100,00%	3.178.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	<Rp8.000.000,00
20	K	Jl. Gn. Selumit RT.10 No.01 Tarakan.	29/12/2003	25.000.000,00	29/12/2005	4,00	4.538.666,67	100,00%	4.538.666,67	0,00	Macet	Meninggal	<Rp8.000.000,00
21	I	Jl. Hangtuah RT.10 Selumit Tarakan	18/10/2005	7.500.000,00	18/10/2007	4,00	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	0,00	Macet	Meninggal	<Rp8.000.000,00
22	N	Jl. Pattimura RT.XVI Pamusian Tarakan	7/3/2005	5.000.000,00	5/3/2007	4,00	2.850.000,00	100,00%	2.850.000,00	0,00	Macet	Meninggal	<Rp8.000.000,00
Jumlah				**217.500.000,00**			**104.935.435,48**		**104.935.435,48**	**-**			

Rincian Tunggakan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan di Atas Rp8.000.000,00

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Cair	Plafond Kredit (Rp)	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet (Rp)	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan (Rp)	Kualitas Dana Bergulir	Keterangan	Klasifikasi
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
1	AMHP	Jl. Griya Persemaian B.II RT.06 Tarakan	7/10/2002	50.000.000,00	7/11/2005	4,00	23.505.000,00	100,00%	23.505.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
2	AHA	Jl. Teuku Umar RT.XIV Pamusian Tarakan	20/9/2002	100.000.000,00	1/1/2005	6,00	60.500.000,00	100,00%	60.500.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
3	E	Jl. Dr. Sutomo RT.70 Tarakan	22/8/2002	10.000.000,00	22/11/2004	6,00	9.583.333,00	100,00%	9.583.333,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
4	JMN	Mamburungan RT.IX Tarakan	16/9/2002	50.000.000,00	10/1/2005	6,00	43.749.998,00	100,00%	43.749.998,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
5	MR	Jl. Yos Sudarso RT.22 Tarakan	20/8/2002	50.000.000,00	20/11/2004	6,00	48.000.000,00	100,00%	48.000.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
6	Sgr	Mamburungan Tarakan	16/9/2002	50.000.000,00	11/1/2005	6,00	47.916.666,00	100,00%	47.916.666,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
7	NA	Jl. P. Diponegoro RT.19 No.50 Tarakan.	31/12/2003	30.000.000,00	31/12/2005	6,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
8	Az	Jl. Mulawarman RT.73 Karang Anyar Tarakan	7/3/2005	10.000.000,00	5/3/2007	4,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
9	AA	Abdul Azis Lingkas Ujung RT.02 Tarakan	15/3/2005	25.000.000,00	15/3/2007	4,00	22.726.000,00	100,00%	22.726.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
10	MY	Martinus Yakob Jl. Aki Balak RT.79 Tarakan	15/3/2005	20.000.000,00	15/3/2007	4,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
11	PS	JL. P. DIPONEGORO RT. 23 KEL. SEBENGKOK	25/9/2014	25.000.000,00	25/9/2016	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet	Tidak Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
12	ATJ	Jl. Jembatan Besi RT.VII Tarakan	26/8/2002	10.000.000,00	26/11/2004	6,00	8.749.999,00	100,00%	8.749.999,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
13	HJ	Jembatan Besi RT.I Tarakan	20/9/2002	25.000.000,00	7/1/2005	6,00	23.958.333,00	100,00%	23.958.333,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
14	S	Jl. Martadinata RT.II Pamusian Tarakan	20/9/2002	10.000.000,00	8/1/2005	6,00	8.749.999,00	100,00%	8.749.999,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
15	SL	Jl. P. Diponegoro RT.20 Tarakan	6/9/2002	100.000.000,00	6/12/2004	6,00	94.737.333,00	100,00%	94.737.333,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
16	Mly	Jl. Sebengkok Pasar RT.24 Tarakan	24/7/2003	30.000.000,00	24/10/2005	6,00	27.065.000,00	100,00%	27.065.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
17	AM	Jembatan Besi RT.I Tarakan	23/3/2004	10.000.000,00	23/3/2006	6,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
18	Y	Jl. P. Diponegoro RT.16 Sebengkok Tarakan	6/1/2004	10.000.000,00	6/1/2006	6,00	8.181.800,00	100,00%	8.181.800,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
19	Ssw	Jl. Sebengkok RT.9 Tarakan	21/10/2005	10.000.000,00	21/10/2007	4,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
20	Shb	Juata Laut RT.3 Tarakan	19/10/2005	20.000.000,00	19/10/2007	4,00	16.000.000,00	100,00%	16.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
21	Mch	Jl. Diponegoro RT.22 Trk	20/2/2006	10.000.000,00	20/2/2008	4,00	9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
22	K	Sebengkok RT.19 Trk	18/6/2007	50.000.000,00	18/6/2009	2,00	43.181.571,42	100,00%	43.181.571,42	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
23	AH	Jl. Seroja RT.20	13/10/2009	25.000.000,00	13/10/2011	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
24	CM	Jl. Purnawirawan RT.03	8/10/2009	35.000.000,00	8/10/2011	2,00	30.227.000,00	100,00%	30.227.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
25	H	Selumit Pantai RT. 001	12/4/2012	50.000.000,00	12/4/2014	6,00	39.466.664,00	100,00%	39.466.664,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
26	RS	Jl. Niaga I RT. 012 Karang	13/4/2012	25.000.000,00	13/4/2014	2,00	11.356.000,00	100,00%	11.356.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
27	AS	JL. Cendawang GG. Tuna 3 Rt. 005 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah	10/10/2013	20.000.000,00	10/10/2015	2,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
28	MH	JL. SAROJANO. 018 KARANG ANYAR	9/10/2014	35.000.000,00	9/10/2016	2,00	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
29	Sbr	JL. KUSUMA BANGSA RT. 014 KEL. GUNUNG LINGKAS	7/10/2014	50.000.000,00	7/10/2016	6,00	41.666.664,00	100,00%	41.666.664,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
30	Sbi	Jl. Gajah Mada RT. 01 No. 54 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan barat	6/11/2014	35.000.000,00	6/11/2016	2,00	30.227.000,00	100,00%	30.227.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
31	Spr	JL. LUMPURAN RT. 16 RW. 002 KEL. KAMP. 1 SKIP	10/10/2014	15.000.000,00	10/10/2016	2,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
32	Syt	JL. TEUKU UMAR RT. 016 KEL. PAMUSIAN	25/9/2014	25.000.000,00	25/9/2016	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
33	Z	JL. AKI BALAK GG. AKASIA NO. 64 RT. 3 KEL. JUATA KERIKIL	24/9/2014	20.000.000,00	25/9/2016	2,00	17.270.000,00	100,00%	17.270.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
34	ESW	JL.PURNA BHAKTI RT. 012 RW.002 KEL.KAMPUNG I SKIP TARAKAN TENGAH	17/12/2015	25.000.000,00	17/12/2017	2,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
35	I	SELUMIT PANTAI RT. 019 RW.004 KEL. SELUMIT PANTAI KEC. TARAKAN TENGAH	10/12/2015	35.000.000,00	10/12/2017	2,00	14.037.058,82	100,00%	14.037.058,82	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
36	Slv	JL.P.IRIAN RT. 001 RW.001 KEL.KAMPUNG I SKIP KEC. TARAKAN TENGAH	18/12/2015	20.000.000,00	18/12/2017	2,00	18.180.000,00	100,00%	18.180.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Cair	Plafond Kredit (Rp)	Jatuh Tempo	Bunga (%)	Baki Debet (Rp)	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan (Rp)	Kualitas Dana Bergulir	Keterangan	Klasifikasi
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
37	J	JL. MULAWARMAN NO.23 RT.015 KARANG ANYAR PANTAI	24/1/2016	30.000.000,00	24/1/2019	2,00	19.088.000,00	100,00%	19.088.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
38	ML	JL.TERATAI RT.070 KARANG ANYAR TARAKAN BARAT	30/1/2017	25.000.000,00	30/1/2019	2,00	8.600.000,00	100,00%	8.600.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
39	Ald	JL.P.AJI ISKANDAR RT.016 JUATA LAUT TARAKAN UTARA	24/1/2017	25.000.000,00	24/1/2019	2,00	8.219.000,00	100,00%	8.219.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
40	M	JL.P.AJI ISKANDAR RT.001 JUATA PERMAI TARAKAN UTARA	27/1/2017	35.000.000,00	27/1/2019	2,00	23.863.000,00	100,00%	23.863.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
41	Sbr	JL.YOS SUDARSO RT.012 NO.63 KARANG REJO TARAKAN BARAT	24/1/2017	25.000.000,00	24/1/2019	2,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
42	W	Jl.P.BANDA RT/RW 015 KAMPUNG I SKIP TARAKAN	30/1/2017	10.000.000,00	30/1/2019	2,00	9.545.000,00	100,00%	9.545.000,00	0,00	Macet	Ditemukan	Diatas Rp8.000.000,00
43	MHB	Jl. Yos Sudarso RT.XI Tarakan	13/9/2002	50.000.000,00	13/12/2004	6,00	22.663.332,00	100,00%	22.663.332,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
44	Msr	Jl. Pesisir Indah RT.13 Tarakan.	30/12/2003	20.000.000,00	30/12/2005	6,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
45	Hs	Jl. Kaka Tua RT.15 Juata Kerikil Tarakan	14/10/2005	10.000.000,00	14/10/2007	4,00	8.635.000,00	100,00%	8.635.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
46	PS	Selumit Dalam RT.02 Tarakan	27/10/2005	10.000.000,00	27/10/2007	4,00	9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
47	Ssw	Jl. Kusuma Bangsa RT.25 Pamusian Tarakan	19/10/2005	10.000.000,00	19/10/2007	4,00	9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
48	YS	Sebengkok RT.3 Tarakan	12/6/2007	15.000.000,00	12/6/2009	2,00	14.318.000,00	100,00%	14.318.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
49	F	Jl.Elang RT.14 Kr.Anyar	28/12/2009	50.000.000,00	28/12/2011	2,00	27.270.000,00	100,00%	27.270.000,00	0,00	Macet	Meninggal	Diatas Rp8.000.000,00
50	RN	Jl. Dewi Sartika RT.12 Selumit Tarakan	15/3/2004	10.000.000,00	15/3/2006	6,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
51	YKS	Jl. Bhayangkara RT.68 Kr. Anyar Tarakan	20/7/2004	50.000.000,00	20/7/2006	6,00	32.727.000,00	100,00%	32.727.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
52	R	Jl. P. Diponegoro RT.22 Trk	18/12/2006	10.000.000,00	18/12/2008	2,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
53	AP	JL. Slamet Riyadi Rt. 008 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat	1/10/2013	30.000.000,00	1/10/2015	2,00	13.996.000,00	100,00%	13.996.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
54	ADH	Selumit Pantai No.08 Rt.009/ RW.003 Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah	6/12/2013	28.000.000,00	6/12/2015	2,00	12.062.200,97	100,00%	12.062.200,97	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
55	Syh	Jl.KH.Agus Salim Rt.019 Kel.Sebengkok Kec.Tarakan Tengah	5/12/2013	50.000.000,00	5/12/2015	2,00	22.724.000,00	100,00%	22.724.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
56	YK	JL. Damai Bhakti Rt. 007 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat	7/10/2013	20.000.000,00	7/10/2015	2,00	13.630.000,00	100,00%	13.630.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
57	T	JL.SUKAR LAMFANI RT.29 PAMUSIAN TARAKAN TENGAH	14/12/2015	25.000.000,00	14/12/2017	2,00	19.315.000,00	100,00%	19.315.000,00	0,00	Macet	Pindah Domisili	Diatas Rp8.000.000,00
58	AA	Selumit RT.07 Tarakan	10/12/2001	30.000.000,00	10/3/2004	6,00	27.500.000,00	100,00%	27.500.000,00	0,00	Macet	Diserahkan ke KPKNL	Diatas Rp8.000.000,00
59	Dhl	Jl. KH. Agus Salim RT.01 No.62 Tarakan	6/12/2001	250.000.000,00	6/3/2004	6,00	131.915.000,00	100,00%	131.915.000,00	0,00	Macet	Diserahkan ke KPKNL	Diatas Rp8.000.000,00
60	AS	Jl. Gajah Mada RT.21 Kr. Anyar Tarakan	6/12/2001	200.000.000,00	6/3/2004	6,00	68.254.087,00	100,00%	68.254.087,00	0,00	Macet	Diserahkan ke KPKNL	Diatas Rp8.000.000,00
61	RH	Jl. Pasar Beringin RT.I No.55 A Tarakan	6/12/2001	200.000.000,00	6/3/2004	6,00	183.333.332,00	100,00%	183.333.332,00	0,00	Macet	Diserahkan ke KPKNL	Diatas Rp8.000.000,00
62	AS	Jl. Gajah Mada RT.21 Kr. Anyar Tarakan	7/10/2002	100.000.000,00	7/1/2005	6,00	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	0,00	Macet	Diserahkan ke KPKNL	Diatas Rp8.000.000,00
Jumlah				**2.438.000.000,00**			**1.781.908.371,21**		**1.781.908.371,21**	**-**			

Daftar BMD Tanah dengan Nomor Sertifikat Belum Tercatat pada e-BMD

No.	Penggunaan	Nomor Sertifikat	Keterangan
1	Tanah Kantor Kel. Selumit Pantai	16.07.**0007***.0	1 Persil
2	Tanah SMPN. 12	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
3	Tanah SMPN. 12	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
4	Tanah Fasum/Fasos Kel.Lingkas Ujung	16.07.**0007***.0	1 Persil
5	Tanah Fasum/Fasos Kel.Lingkas Ujung	16.07.**0007***.0	1 Persil
6	Tanah Fasum/Fasos Kel.Lingkas Ujung	16.07.**0007***.0	1 Persil
7	Tanah Fasum/Fasos Kel.Lingkas Ujung	16.07.**0007***.0	1 Persil
8	Tanah Fasum/Fasos Kel.Lingkas Ujung	16.07.**0007***.0	1 Persil
9	Tanah Fasum/Fasos Kel.Lingkas Ujung	16.07.**0007***.0	1 Persil
10	Tanah Fasum/Fasos Kel.Lingkas Ujung	16.07.**0007***.0	1 Persil
11	Tanah Fasum/Fasos Kel.Lingkas Ujung	16.07.**0007***.0	1 Persil
12	Tanah Fasum/Fasos Kel.Lingkas Ujung	16.07.**0007***.0	1 Persil
13	Tanah TPA Aki Babu	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
14	Tanah TPA Aki Babu	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
15	Tanah TPA Aki Babu	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
16	Tanah TPA Aki Babu	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
17	Tanah TPA Aki Babu	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
18	Tanah TPA Aki Babu	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
19	Tanah TPA Aki Babu	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
20	Tanah TPA Aki Babu	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
21	Tanah TPA Aki Babu	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
22	Tanah Jl SDN.049	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
23	Tanah Jl SDN.049	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
24	Tanah Perluasan SDN.006 Kp.4	16.07.**.04.4.00***	1 Persil
25	Tanah Lahan Cadangan Juata Krikil	16.07.**0005***.0	1 Persil
26	Tanah Lahan Cadangan Juata Krikil	16.07.**0005***.0	1 Persil
27	Tanah Posyandu Sebengkok RT.30	16.07.**0006***.0	1 Persil
28	Tanah Fasum Pamusian	16.07.**.05.4.00***	1 Persil
29	Tanah eks Kantor Kel. Selumit	16.07.**.02.4.00***	1 Persil
30	Tanah eks Kantor Kel. Mamburungan	16.07.**.05.4.00***	1 Persil
31	Tanah eks Kantor Kel. Mamburungan	16.07.**.05.4.00***	1 Persil
32	Tanah Kantor Kel. Karang Harapan	16.07.**.01.4.00***	1 Persil
Total			**32 Persil**

Daftar BMD Peralatan dan Mesin yang Belum Dicatat pada e-BMD

No.	Jenis	Tahun Perolehan	Nama Barang	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	2023	MEJA KOMPUTER TYPE : MKS-01 54111/3292679/3172097 INNOLA (R+P)	16
2	Peralatan dan Mesin	2023	KURSI SISWA (ADJUST) TYPE : PRV-BK 53914/3311863 PRONOV	16
3	Peralatan dan Mesin	2023	KURSI STAFF TYPE : SRS-27 53603/ 3310281/3243326 INNOLA ®	1
4	Peralatan dan Mesin	2023	RAK CPU TYPE : CT-1 3169599 INNOLA (R+P)	16
5	Peralatan dan Mesin	2023	WHITE BOARD (MEDIUM STANDING) TYPE : GERANIUM STAND-140 INNOLA	1
6	Peralatan dan Mesin	2023	MEJA GURU TYPE : NASTUTIUM-02 INNOLA	1
7	Peralatan dan Mesin	2023	Optiplex 3000 Tower-016 4524000001-PEP-020528072	16
8	Peralatan dan Mesin	2023	Latitude 3420-053 4524000001-PEP-020530870	1
9	Peralatan dan Mesin	2023	Precision 3660 Tower-014 4524000001-PEP-020532952	1
10	Peralatan dan Mesin	2023	HP Laser MFP 135a 4526400999-PEP-002222717	1
11	Peralatan dan Mesin	2023	Canon G3010 4526300001-PEP-001597183	1
12	Peralatan dan Mesin	2023	Tp-link TL-SF1024M(UN) 4528100999-PEP-001840523	1
13	Peralatan dan Mesin	2023	tp-link TL-WR840N(EU) 452810999-PEP-001804120	1
14	Peralatan dan Mesin	2023	Infocus IN1 14XV 4472002999-PEP-002332206	1
15	Peralatan dan Mesin	2023	Perfecto Tripod Screen TSPF2121L 4831404000-PEP-001532565	1
16	Peralatan dan Mesin	2023	Back-UPS 1200V A, 230V, AVR, Universal Sockets 4612202001-PEP-002267626	17
Total				**92**

Daftar BMD Peralatan dan Mesin Rusak Berat

No.	SKPD	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nomor Register	Jumlah	Nilai (Rp)
1	RSUKT	*Electro Cardiography* (Alat Kedokteran Umum)	30/12/2013	1201657102000000010000201313 20701010600000001	1	42.900.000,00
2	RSUKT	U S G	30/12/2013	1201657102000000010000201313 20701011520000001	1	693.000.000,00
3	RSUKT	U S G	30/12/2013	1201657102000000010000201313 20701011520000002	1	767.250.000,00
4	RSUKT	Lain Alat kedokteran Bedah	12/6/2014	1201657102000000010000201413 20701041900000004	1	2.486.000.000,00
5	RSUKT	*Operating Table Jantung*	12/6/2014	1201657102000000010000201413 20701140020000001	1	921.389.700,00
6	Disdik	Station Wagon	5/11/2010	1201657101000000000000201013 20201010030000002	1	190.844.500,00
7	Disdik	Station Wagon	5/11/2010	1201657101000000000000201013 20201010030000004	1	190.844.500,00
8	Disdik	Sepeda Motor	29/6/2007	1201657101000000000000200713 20201040010000005	1	8.500.000,00
9	Disdik	Sepeda Motor	29/6/2007	1201657101000000000000200713 20201040010000006	1	8.500.000,00
10	Disdik	Sepeda Motor	29/6/2007	1201657101000000000000200713 20201040010000008	1	8.500.000,00
11	Disdik	Sepeda Motor	29/6/2007	1201657101000000000000200713 20201040010000012	1	8.500.000,00
12	Disdik	Sepeda Motor	11/12/2008	1201657101000000000000200813 20201040010000004	1	8.600.000,00
13	Disdik	Sepeda Motor	11/12/2008	1201657101000000000000200813 20201040010000010	1	8.600.000,00
14	Disdik	Sepeda Motor	11/12/2008	1201657101000000000000200813 20201040010000012	1	8.600.000,00
15	DLH	*Dump Truck*	12/3/2000	1201657110000000000000200013 20101050030000001	1	85.000.000,00
16	DLH	*Dump Truck*	12/3/2000	1201657110000000000000200013 20101050030000002	1	225.000.000,00
17	DLH	*Dump Truck*	12/3/2000	1201657110000000000000200013 20101050030000003	1	225.000.000,00
18	DLH	*Dump Truck*	12/3/2005	1201657110000000000000200513 20101050030000003	1	700.000.000,00
19	DLH	Sepeda Motor	31/12/2003	1201657110000000000000200313 20201040010000002	1	11.200.000,00
20	DLH	Sepeda Motor	14/11/2008	1201657110000000000000200813 20201040010000010	1	11.200.000,00
21	DLH	Sepeda Motor	14/11/2008	1201657110000000000000200813 20201040010000011	1	11.200.000,00
Total					**21**	**6.620.628.700,00**

Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD Per 31 Desember 2024

No.	SKPD/Unit SKPD	Tanggal	Jenis	Kategori	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	31/12/2009	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen PKP	49.500.000,00	49.500.000,00		49.500.000,00	-
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	19/4/2010	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan *Software* Komputer dan perlengkapan untuk keperluan Bappeda Kota Tarakan	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	-
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	30/11/2010	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan *Software* Komputer dan Belanja Modal Pengadaan *Software* Komputer kegiatan penyusunan aplikasi perkantoran dan Belanja Modal Pengadaan Software Komputer kegiatan penyusunan aplikasi perkantoran	125.050.000,00	125.050.000,00		125.050.000,00	-
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	29/12/2010	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan SIM PKP	29.590.000,00	29.590.000,00		29.590.000,00	-
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	21/12/2011	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Belanja Pengadaan *Software* Komputer (Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Perkantoran dan Belanja Pengadaan *Software* Komputer (Inventarisasi Database Pengembangan Pembangunan Daerah) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Perkantoran dan Belanja Pengadaan Software Komputer (Pengembangan Elektronik Office Management) Keg. Pengembangan Aplikasi Perkantoran	212.500.000,00	212.500.000,00		212.500.000,00	-
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	26/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Belanja Pengadaan *Software* Komputer (Pengembangan e-Plann) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik dan Belanja Pengadaan Software Komputer (SIM-PKP) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	94.750.000,00	94.750.000,00		94.750.000,00	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8/10/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan *Sofware* Komputer Aplikasi KLA	78.650.000,00	78.650.000,00		78.650.000,00	-
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Belanja Pengadaan *Software* Komputer dan Belanja Modal Pengadaan Software Komputer berupa Aplikasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	85.500.000,00	85.500.000,00		85.500.000,00	-
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	19/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan *Software* Komputer dan Belanja Modal Pengadaan Software	165.220.000,00	165.220.000,00		165.220.000,00	-
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	01/09/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Penannggulangan Kemiskinan	171.600.000,00	160.160.000,00	11.440.000,00	171.600.000,00	-
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12/11/2015	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan *Software* Komputer berupa Pengembangan Aplikasi Simusrenbang Kegiatan Penyusunan Informasi terhadap Pelayanan Publik	80.300.000,00	65.578.333,33	8.030.000,00	73.608.333,33	6.691.666,67
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10/06/2015	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan peralatan dan mesin berupa pengembangan aplikasi e-data	79.550.000,00	68.280.416,67	7.955.000,00	76.235.416,67	3.314.583,33
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	28/8/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan	48.400.000,00	31.056.666,67	4.840.000,00	35.896.666,67	12.503.333,33
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12/12/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Pengembangan Aplikasi	33.440.000,00	20.342.666,67	3.344.000,00	23.686.666,67	9.753.333,33
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	30/11/2015	*Software*	Tidak Memenuhi Kriteria ATB	Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan	2.500.000,00	2.041.666,67	250.000,00	2.291.666,67	208.333,33
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	31/12/2021	*Software*	Masih digunakan	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kota Tarakan	74.978.000,00	15.620.416,67	7.497.800,00	23.118.216,67	51.859.783,33
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	25/06/2021	Kajian	Masih digunakan	Kajian Pengembangan Perencanaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Kedokteran Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan	230.000.000,00	59.416.666,67	23.000.000,00	82.416.666,67	147.583.333,33

No.	SKPD/Unit SKPD	Tanggal	Jenis	Kategori	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18/12/2023	Kajian	Masih digunakan	Penyusunan Kajian Tata Niaga Perikanan Kota Tarakan pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.	270.000.000,00	2.250.000,00	27.000.000,00	29.250.000,00	240.750.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18/12/2023	Kajian	Masih digunakan	Kajian Studi Penelitian dan bantuan teknik (Penyusunan Dokumen Evaluasi RPD) pada sub kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.	150.000.000,00	1.250.000,00	15.000.000,00	16.250.000,00	133.750.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	07/12/2023	Kajian	Masih digunakan	Kajian Studi Penelitian dan bantuan teknik (Pengukuran Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur IKLI Pemerintah Kota Tarakan) pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.	90.000.000,00	750.000,00	9.000.000,00	9.750.000,00	80.250.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	02/10/2023	Kajian	Masih digunakan	Kajian Studi Penelitian dan bantuan teknik (Penyusunan Dokumen RPD) pada sub kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.	150.000.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00	18.750.000,00	131.250.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	07/12/2023	Kajian	Masih digunakan	Kajian Studi Penelitian dan bantuan teknik (Penyusunan Borang Fakultas Kedokteran Universitas Borneo Tarakan) pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.	250.000.000,00	2.083.333,33	25.000.000,00	27.083.333,33	222.916.666,67
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18/12/2023	Kajian	Masih digunakan	Kajian Penyusunan Dokumen Rancangan Perwali RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045	300.000.000,00	2.500.000,00	30.000.000,00	32.500.000,00	267.500.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	22/7/2024	Kajian	Masih digunakan	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029	120.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	114.000.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5/8/2024	Kajian	Masih digunakan	Penyusunan Rancangan, Rancangan Akhir, Naskah Akademik, dan Ranperda RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2029	300.000.000,00	-	12.500.000,00	12.500.000,00	287.500.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	24/7/2024	Kajian	Masih digunakan	Kajian Peningkatan Kualitas Rumput Laut Melalui Kultur Jaringan	250.000.000,00	-	12.500.000,00	12.500.000,00	237.500.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18/10/2024	Kajian	Masih digunakan	Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kota Sehat Kota Tarakan	100.000.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	97.500.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	28/11/2024	Kajian	Masih digunakan	Survey IKLI Tahun 2024	110.000.000,00	-	1.833.333,33	1.833.333,33	108.166.666,67
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5/12/2024	Kajian	Masih digunakan	Kajian Pengembangan Modal Diseminasi Hasil Pembangunan di Kota Tarakan	150.000.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	148.750.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5/12/2024	Kajian	Masih digunakan	Kajian Penguatan Zona Integritas menuju Layanan Publik Prima di Pukesmas Kota Tarakan Tahun 2024	150.000.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	148.750.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5/12/2024	Kajian	Masih digunakan	Kajian Penguatan Zona Integritas menuju Layanan Publik Prima di Pukesmas Kota Tarakan Tahun 2024	150.000.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	148.750.000,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	29/10/2024	Kajian	Masih digunakan	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD)Kota Tarakan	58.000.000,00	-	1.450.000,00	1.450.000,00	56.550.000,00
33	Dinas Lingkungan Hidup	17/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Komputer Kegiatan Pengembangan Informasi Lingkungan - BPLH	37.180.000,00	37.180.000,00		37.180.000,00	-
34	Dinas Lingkungan Hidup	19/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pembuatan website DKPP Tarakan kepada CV Gloria Akar Daya DKPP	25.300.000,00	25.300.000,00		25.300.000,00	-
35	Dinas Lingkungan Hidup	24/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pembuatan data base pemakaman di kecamatan tarakan timur kepada CV KOISSON PRATAMA - DKPP	29.820.000,00	29.820.000,00		29.820.000,00	-
36	Dinas Lingkungan Hidup	10/08/2016	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Aplikasi Pengawasan dan Pelaporan Tenaga Lapangan - DKPP	38.000.000,00	28.183.333,33	3.800.000,00	31.983.333,33	6.016.666,67
37	Dinas Lingkungan Hidup	29/11/2024	Kajian	Masih digunakan	Dokumen Inventarisasi Jenis Tanaman di Hutan Kota Sawah Lunto	39.571.500,00		659.525,00	659.525,00	38.911.975,00
38	Dinas Lingkungan Hidup	13/12/2024	Kajian	Masih digunakan	Dokumen KLHS RPJMD	94.489.000,00		787.408,33	787.408,33	93.701.591,67
40	Dinas Lingkungan Hidup	14/12/2024	Kajian	Masih digunakan	Dokumen Keanekaragaman Hayati	99.400.500,00		828.337,50	828.337,50	98.572.162,50

No.	SKPD/Unit SKPD	Tanggal	Jenis	Kategori	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
41	Dinas Lingkungan Hidup	17/12/2024	Kajian	Masih digunakan	Dokumen Inventarisasi Dan Identifikasi Pengelolaan Limbah B3	43.745.100,00		364.542,50	364.542,50	43.380.557,50
42	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29/12/2010	*Software*	Tidak Memenuhi Kriteria ATB	Pengadaan Sistem E-Office BPMPPKB	71.100.000,00	71.100.000,00	-	71.100.000,00	-
43	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31/10/2024	Kajian	Masih digunakan	dokumen kajian grand design pembangunan kependudukan (GDPK) kegiatan penyediaan dan pengolahan data kependudukan	70.285.440,00		1.757.136,00	1.757.136,00	68.528.304,00
44	BPKPAD	22/11/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pembuatan Website Bandiklat Kota Tarakan Tahun 2013	29.700.000,00	29.700.000,00		29.700.000,00	-
45	BPKPAD	31/12/2009	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi Info SPM dan SP2D	39.500.000,00	39.500.000,00		39.500.000,00	-
46	BPKPAD	31/12/2009	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan *Software* Simpatda	47.850.000,00	47.850.000,00		47.850.000,00	-
47	BPKPAD	29/12/2010	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengembangan Aplikasi Info SPM dan SP2D	44.950.000,00	44.950.000,00		44.950.000,00	-
48	BPKPAD	29/12/2010	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengembangan *Software* Simpatda	47.000.000,00	47.000.000,00		47.000.000,00	-
49	BPKPAD	28/12/2012	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan *Software* Komputer berupa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan PBB untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana PBB	198.000.000,00	198.000.000,00		198.000.000,00	-
50	BPKPAD	7/5/2013	*Software*	Tidak Memenuhi Kriteria ATB	Pengadaan *Software* Mesin Sidik Jari Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Jaringan Informasi Keuangan untuk keperluan DPPKA Kota Tarakan	29.755.000,00	29.755.000,00		29.755.000,00	-
51	BPKPAD	18/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi e-office untuk keperluan DPPKA Kota Tarakan	55.000.000,00	55.000.000,00		55.000.000,00	-
52	BPKPAD	18/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan 1 (Satu) *Unit Electricity Treatment System* (ETS) untuk keperluan DPPKA Kota Tarakan Tahun 2013	54.850.000,00	54.850.000,00		54.850.000,00	-
53	BPKPAD	29/12/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Belanja Pengadaan Mainframe/Server, Peralatan E-Paper, Pengadaan Website dan Pembuatan E-Paper Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor - DISHUTAMBEN	99.990.000,00	90.824.250,00	9.165.750,00	99.990.000,00	-
54	BPKPAD	16/09/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software SMS Gateway untuk Keperluan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan	60.445.000,00	56.415.333,33	4.029.666,67	60.445.000,00	-
55	BPKPAD	16/09/2014	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan *Software* Komputer berupa Aplikasi Pengelolaan data BPHTB untuk Keperluan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan	104.885.000,00	97.892.666,67	6.992.333,33	104.885.000,00	-
56	BPKPAD	30/12/2016	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan *Software* Komputer Lab Bahasa	14.750.000,00	10.447.916,67	1.475.000,00	11.922.916,67	2.827.083,33
57	BPKPAD	27/12/2016	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Perkantoran	199.700.000,00	141.454.166,67	19.970.000,00	161.424.166,67	38.275.833,33
58	BPKPAD	30/12/2016	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan *Software* Pengadaan Aplikasi Online Payment PBB	49.500.000,00	35.062.500,00	4.950.000,00	40.012.500,00	9.487.500,00
59	BPKPAD	18/4/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi TPP PNS Berbasis Kehadiran dan Kinerja	99.700.000,00	67.297.500,00	9.970.000,00	77.267.500,00	22.432.500,00
60	BPKPAD	17/09/2018	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan *Software* Aplikasi TPP PNS Berbasis Kehadiran	29.350.000,00	15.653.333,33	2.935.000,00	18.588.333,33	10.761.666,67
61	BPKPAD	21/12/2020	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Aplikasi *Host To Host* BPHTB Sesuai SPK Nomor 47/SPK/BPPRD/XI/2020 Tanggal 04 Nopember 2020 untuk Keperluan BPPRD Kota Tarakan Tahun 2020	120.835.000,00	37.257.458,33	12.083.500,00	49.340.958,33	71.494.041,67

No.	SKPD/Unit SKPD	Tanggal	Jenis	Kategori	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
62	BPKPAD	21/12/2020	*Software*	Tidak Memenuhi Kriteria ATB	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi PBB Sesuai SPK Nomor 46/SPK/BPPRD/XI/2020 Tanggal 02 Nopember 2020 untuk Keperluan BPPRD Kota Tarakan Tahun 2020	87.560.000,00	26.997.666,67	8.756.000,00	35.753.666,67	51.806.333,33
63	BPKPAD	08/11/2021	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jaringan Berdasarkan SPK No. 209.2/SPK/BPKPAD/XI/2021 TGL. 8 November 2021	165.000.000,00	35.750.000,00	16.500.000,00	52.250.000,00	112.750.000,00
64	BPKPAD	11/11/2021	*Software*	Tidak Memenuhi Kriteria ATB	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi PBB Berdasarkan SPK No.212/SPK/BPKPAD/XI/2021 TGL. 11 November 2021	154.000.000,00	33.366.666,67	15.400.000,00	48.766.666,67	105.233.333,33
67	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17/9/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengembangan sistem software Display informasi Harga Pasar Kegiatan Pembangunan Pusat Penampungan Produksi Hasil Tani dan Kebun Masyarakat	33.286.000,00	33.286.000,00		33.286.000,00	-
68	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Website kegiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor	56.100.000,00	56.100.000,00		56.100.000,00	-
69	Dinas Pendidikan	8/12/2011	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan *Software Management* dan Laporan Keuangan Dana BOS	95.744.000,00	95.744.000,00		95.744.000,00	-
70	Dinas Pendidikan	29/12/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	BELANJA PENGADAAN APLIKASI SIMPEG	198.500.000,00	180.304.166,67	18.195.833,33	198.500.000,00	-
71	Dinas Pendidikan	29/12/2015	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi SIMPTK	180.000.000,00	145.500.000,00	18.000.000,00	163.500.000,00	16.500.000,00
72	Dinas Pendidikan	31/12/2016	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	(SDN 048) Aplikasi Tunjangan Kinerja	5.000.000,00	3.541.666,67	500.000,00	4.041.666,67	958.333,33
73	Dinas Pendidikan	31/12/2017	*Software*	Masih digunakan	(SMPN 2) Microsoft Office 2016	27.524.500,00	16.744.070,83	2.752.450,00	19.496.520,83	8.027.979,17
74	Dinas Pendidikan	18/12/2024	*Software*	Masih digunakan	PEMBUATAN WEBSITE	10.500.000,00		87.500,00	87.500,00	10.412.500,00
75	DKUKMP	15/10/2014	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan software komputer berupa pengadaan pengembangan aplikasi operasional UKM Center (point of sales) pada keg. penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	14.960.000,00	13.838.000,00	1.122.000,00	14.960.000,00	-
76	DKUKMP	01/12/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan software komputer berupa pengadaan pengembangan aplikasi e-Commerce (online store) KUMKM pada keg. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	26.400.000,00	23.980.000,00	2.420.000,00	26.400.000,00	-
77	DKUKMP	09/12/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan software IT Data Base KUKM tahap 2 pada kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	33.000.000,00	29.975.000,00	3.025.000,00	33.000.000,00	-
78	DKUKMP	15/12/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan software dan jaringan komputer (upgrade aplikasi website) pada keg. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	44.429.000,00	40.356.341,67	4.072.658,33	44.429.000,00	-
79	DKUKMP	6/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Database Koperasi pada kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Koperasi (RM)	62.315.000,00	62.315.000,00		62.315.000,00	-
80	DKUKMP	23/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan software komputer kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dan Biaya belanja modal pengadaan software komputer berupa pengembangan sistem aplikasi pendataan (data base) keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	99.275.000,00	99.275.000,00		99.275.000,00	-
81	DKUKMP	16/12/2022	*Software*	Tidak Memenuhi Kriteria ATB	Pengadaan Aplikasi Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Berupa Software Parkir Pasar Tenguyun	28.127.000,00	3.047.091,67	2.812.700,00	5.859.791,67	22.267.208,33
82	DKUKMP	16/12/2022	*Software*	Tidak Memenuhi Kriteria ATB	Pengadaan Aplikasi Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Berupa Software Parkir Pasar THM	40.027.000,00	4.336.258,33	4.002.700,00	8.338.958,33	31.688.041,67
83	Dinas Kesehatan	27/12/2010	*Software*	Tidak digunakan operasional	Pengadaan pengembangan software SIK on line	42.800.000,00	42.800.000,00	-	42.800.000,00	-
84	Dinas Kesehatan	29/12/2010	*Software*	Tidak digunakan operasional	Pengadaan Jasa pengadaan software SIMPEG dan Software Barang	87.250.000,00	87.250.000,00	-	87.250.000,00	-
85	Dinas Kesehatan	28/12/2011	*Software*	Tidak digunakan operasional	Pengadaan software program pelaporan P2TB	96.000.000,00	96.000.000,00	-	96.000.000,00	-
86	Dinas Kesehatan	28/12/2011	*Software*	Tidak digunakan operasional	Pengadaan software klinik sanitasi survellans based	48.965.000,00	48.965.000,00	-	48.965.000,00	-

No.	SKPD/Unit SKPD	Tanggal	Jenis	Kategori	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
87	Dinas Kesehatan	28/12/2011	*Software*	Tidak digunakan operasional	Pengadaan/pengembangan software SIMPUS on line	98.000.000,00	98.000.000,00	-	98.000.000,00	-
88	Disbuporapar	13/8/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pembuatan software data base cagar budaya Kegiatan pengembangan Data base sistem informasi sejarah purbakala 2012 Disbudparpora Kota Tarakan - DISBUDPARPORA	36.025.000,00	36.025.000,00	-	36.025.000,00	-
89	Disbuporapar	31/3/2022	*Software*	tidak memenuhi kriteria ATB	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tarakan Berupa Software Parking dan Ticketing Pantai Amal	164.400.000,00	30.140.000,00	16.440.000,00	46.580.000,00	117.820.000,00
90	Dinas Perhubungan	19/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angk. berupa Pembuatan Software Komptr tentang Sist. Informasi dan Transp. Jalan Kota Tarakan berupa Aplikasi Adm. Trayek dan Ops Kend. (ATOK) dan Perlengkapannya kep. Dishub Tahun 2012	196.360.000,00	196.360.000,00	-	196.360.000,00	-
91	Dinas Perhubungan	19/12/2012	*Software*	tidak memenuhi kriteria ATB	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ dan ASDP berupa Pembuatan Software tentang Pembuatan Sist. Infor. Data Kendaraan WAjib Uji berupa Pembuatan dan Pemasangan Aplikasi Sist. Adm. Hasil Uji Kend. Bermotor keperluan Dishub Tahun 2012	97.640.000,00	97.640.000,00	-	97.640.000,00	-
92	Dinas Perhubungan	6/9/2021	*Software*	tidak memenuhi kriteria ATB	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Uji PKB sebanyak 1 (satu) paket untuk keperluan dishub 2021 Berdasarkan No. 03/SPK/KIR/IX/DISHUB	43.829.000,00	10.226.766,67	4.382.900,00	14.609.666,67	29.219.333,33
93	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13/12/2011	*Software*	tidak memenuhi kriteria ATB	Pengadaan Mail Server Kegiatan Pemeliharaan WLAN	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-
94	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13/12/2011	*Software*	Tidak digunakan Operasional	Pengadaan Aplikasi Bank Data Kegiatan Pemeliharaan WLAN	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-
95	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	26/12/2012	*Software*	Tidak digunakan Operasional	Pengadaan Software SIM e-Goverment Keperluan Diskominfo	195.000.000,00	195.000.000,00	-	195.000.000,00	-
96	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30/12/2016	*Software*	Tidak digunakan Operasional	Pengadaan Aplikasi SMS Gateway	47.300.000,00	33.504.166,67	4.730.000,00	38.234.166,67	9.065.833,33
97	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30/12/2016	*Software*	Tidak digunakan Operasional	Pengadaan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	47.000.000,00	33.291.666,67	4.700.000,00	37.991.666,67	9.008.333,33
98	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30/12/2016	*Software*	Tidak digunakan Operasional	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat	47.800.000,00	33.858.333,33	4.780.000,00	38.638.333,33	9.161.666,67
99	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30/12/2016	*Software*	Tidak digunakan Operasional	Pengadaan Aplikasi Paperless System	47.350.000,00	33.539.583,33	4.735.000,00	38.274.583,33	9.075.416,67
100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19/12/2019	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Aplikasi Layanan Berbasis WEB (Programer Dokumentasi Aplikasi Sistem Pelayanan Customer Service Disdukcapil & Kecamatan) dan Aplikasi untuk Sistem Pelayanan (Customer Service)	38.032.500,00	15.529.937,50	3.803.250,00	19.333.187,50	18.699.312,50
101	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20/12/2019	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Aplikasi Layanan Publik Berbasis Web (Analisis Sistem Informasi Pelayanan Customer Service Disdukcapil dan Kecamatan)	38.032.500,00	15.529.937,50	3.803.250,00	19.333.187,50	18.699.312,50
102	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	03/08/2020	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Software Aplikasi untuk Layanan Publik (Aplikasi PPDB Online)	59.000.000,00	20.158.333,33	5.900.000,00	26.058.333,33	32.941.666,67
103	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10/12/2020	*Software*	Tidak digunakan Operasional	Pengadaan Software Aplikasi untuk Layanan Publik (Aplikasi E-Parkir)	49.500.000,00	15.262.500,00	4.950.000,00	20.212.500,00	29.287.500,00
104	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10/12/2020	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Software Aplikasi Untuk Layanan Publik (Aplikasi Perpustakaan Online)	43.000.000,00	13.258.333,33	4.300.000,00	17.558.333,33	25.441.666,67
105	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10/12/2020	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Software Aplikasi Untuk Layanan Publik (Aplikasi Pelaporan Penanaman Modal)	13.500.000,00	4.162.500,00	1.350.000,00	5.512.500,00	7.987.500,00
106	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11/12/2020	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Software Aplikasi untuk Layanan Publik (E-Presensi)	63.800.000,00	19.671.666,67	6.380.000,00	26.051.666,67	37.748.333,33
107	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	28/06/2021	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Aplikasi untuk Layanan Publik (Pemeliharaan aplikasi PPDB)	23.800.000,00	6.148.333,33	2.380.000,00	8.528.333,33	15.271.666,67
108	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11/12/2023	*Software*	tidak memenuhi kriteria ATB	Pengadaan Software Aplikasi Dashboard TCC keperluan TCC	72.150.000,00	601.250,00	7.215.000,00	7.816.250,00	64.333.750,00
109	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	22/11/2024	*Software*	Masih digunakan	Sofware Aplikasi Simpeg keperluan DKISP	31.000.000,00	-	516.666,67	516.666,67	30.483.333,33
110	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	14/11/2024	*Software*	Masih digunakan	Pengembangan Aplikasi Streaming CCTV keperluan DKISP	27.750.000,00	-	462.500,00	462.500,00	27.287.500,00
111	DPUPR	27/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software E-Office Sesuai dengan SPK No : 471.B/SPK/DPU-TR/XI/2012 Tanggal 23 Nopember 2012	49.742.000,00	49.742.000,00		49.742.000,00	-

No.	SKPD/Unit SKPD	Tanggal	Jenis	Kategori	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
112	DPUPR	30/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pembuatan Software SIM DPUTR Sesuai dengan SPK No : 613.A/SPK/DPUTR/HD/XII/2013 Tanggal 6 November 2013	199.070.000,00	199.070.000,00		199.070.000,00	-
113	DPUPR	29/12/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Komputer Pembuatan Database Perencanaan, Sesusai dengan kontrak No : 02/SPK/PL-DBASE-PRC/2014 Tgl. 25 September 2014	146.375.180,00	132.957.455,17	13.417.724,83	146.375.180,00	-
114	DPUPR	22/12/2023	Kajian	Masih digunakan	Kajian Pembuatan dan Updating Sumber Data Peta dasar Kec.Trk Barat SPK No. 03/PPK/SPK/PETA DASAR TARBA/XI/2023 Tgl. 10 Nopember 2023	98.579.000,00	821.491,67	9.857.900,04	10.679.391,71	87.899.608,29
115	DPUPR	22/12/2023	Kajian	Masih digunakan	Kajian Pendampingan Pembuatan dan Updating Sumber Data Peta dasar Kec.Trk Tengah SPK No. 03/PPK/SPK/PETA DASAR TARTENG/XI/2023 Tgl. 10 Nopember 2023	98.579.000,00	821.491,67	9.857.900,04	10.679.391,71	87.899.608,29
116	DPUPR	22/12/2023	Kajian	Masih digunakan	Kajian Pendampingan Pembuatan dan Updating Sumber Data Peta dasar Kec.Trk Utara SPK No. 03/PPK/SPK/PETA DASAR TARUT/XI/2023 Tgl. 10 Nopember 2023	98.301.000,00	819.175,00	9.830.100,00	10.649.275,00	87.651.725,00
117	DPUPR	22/12/2023	Kajian	Masih digunakan	Kajian Pendampingan Pembuatan dan Updating Sumber Data Peta dasar Kec.Trk Timur SPK No. 03/PPK/SPK/PETA DASAR TARTIM/XI/2023 Tgl. 10 Nopember 2023	98.301.000,00	819.175,00	9.830.100,00	10.649.275,00	87.651.725,00
118	DPUPR	22/11/2024	*Software*	Masih digunakan	Geoportal Enablement ArcGIS PRO ESRI	345.000.000,00		5.750.000,00	5.750.000,00	339.250.000,00
119	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17/4/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan Keperluan Kaperpus-KD dan Bayar Kegiatan Pendapatan / Penataan / Dokumen / Arsip Daerah Keperluan Kaperpus - KD	99.535.700,00	99.535.700,00	-	99.535.700,00	-
120	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16/7/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Keperluan Kaperpus-KD	59.360.000,00	59.360.000,00	-	59.360.000,00	-
121	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26/4/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Biaya Penyempurnaan Software program Kearsipan Keperluan kaperpus-Kd	34.100.000,00	34.100.000,00		34.100.000,00	-
122	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22/7/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Biaya pemeliharaan Peralatan jaringan Informasi Kearsipan keperluan Kaperpus-Kd	34.985.000,00	34.985.000,00		34.985.000,00	-
123	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Program Database Penyimpanan Data Dilingkungan Instansi Pemerintah	24.772.000,00	24.772.000,00		24.772.000,00	-
124	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12/7/2010	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pembelian software otomatis arsip in aktif	35.000.000,00	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
125	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9/2/2011	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pembuatan database arsip on line dan Bayar Pengadaan maintenance program otomatis arsip in aktif	70.000.000,00	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-
126	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31/10/2011	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan software perpustakaan	74.096.000,00	74.096.000,00	-	74.096.000,00	-
127	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28/5/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengembangan Program data base dan Anjungan Kaperpus-Kd	79.612.500,00	79.612.500,00		79.612.500,00	-
128	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16/06/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengembangan Upgrade/Penyempurnaan Sofware Program Kearsipan Keperluan Kaperpus-KD Kota Tarakan	34.900.000,00	33.445.833,33	1.454.166,67	34.900.000,00	-
129	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6/8/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penduplikatan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika	10.000.000,00	6.416.666,67	1.000.000,00	7.416.666,67	2.583.333,33
130	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18/9/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Database Sistem Informasi arsip statis	20.000.000,00	12.666.666,67	2.000.000,00	14.666.666,67	5.333.333,33
131	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10/4/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
132	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10/4/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00

No.	SKPD/Unit SKPD	Tanggal	Jenis	Kategori	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
133	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10/4/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
134	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10/4/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
135	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10/4/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
136	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29/11/2017	*Software*	Masih digunakan	Pembuatan website Perpustakaan	15.000.000,00	9.250.000,00	1.500.000,00	10.750.000,00	4.250.000,00
137	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9/11/2018	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pembangunan Sistem Keamanan Penyimoanan Data	25.000.000,00	12.916.666,67	2.500.000,00	15.416.666,67	9.583.333,33
138	Kec. Tarakan Barat	14/8/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penyusunan Sistem Infomasi Tehadap Layanan Publik Berupa Pengadaan Sofware Komputer Sistem Informasi Simpaten Pada Kantor Camat Tarakan Barat Tahun 2012	51.500.000,00	51.500.000,00	-	51.500.000,00	-
139	Kec. Tarakan Barat	8/11/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Berupa Belanja Perawatan Dan Update Software Sistem Informasi Layanan Publik Tahun 2013	34.450.000,00	34.450.000,00		34.450.000,00	-
140	Kec. Tarakan Barat	20/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Komputer Aplikasi Administrasi Pelayanan Informasi Kelurahan Kr. Anyar Pantai Th. 2012 - Kel. Kr. Anyar Pantai	194.600.000,00	194.600.000,00	-	194.600.000,00	-
141	Kec. Tarakan Barat	30/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Barang Hardware Kegiatan E-Document Kantor Kelurahan Karang Rejo Ta 2013 - Kel. Kr. Rejo	4.899.999,00	4.899.999,00		4.899.999,00	-
142	Kec. Tarakan Tengah	27/12/2011	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Sistem Pelayanan Terpadu	82.500.000,00	82.500.000,00	-	82.500.000,00	-
143	Kec. Tarakan Tengah	14/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Komputer Software Sistem Informasi Surat (Speakless) (CV. TUNAS MUDA JAYA)	28.880.000,00	28.880.000,00	-	28.880.000,00	-
144	Kec. Tarakan Tengah	21/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Komputer (Pembuatan Aplikasi One Stop Service) (CV. Tunas Muda Jaya)	34.980.000,00	34.980.000,00	-	34.980.000,00	-
145	Kec. Tarakan Tengah	4/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Komputer (Pemutakhiran Aplikasi Surat) (CV. TUNAS MUDA JAYA)	14.850.000,00	14.850.000,00	-	14.850.000,00	-
146	Kec. Tarakan Tengah	24/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi Electronic Management System (EDMS) Keg. Penyususnan Informasi Terhadap Layanan Publik 2013 - Kel Kampung 1 Skip	74.850.000,00	74.850.000,00	-	74.850.000,00	-
147	Kec. Tarakan Tengah	31/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik berupa (EDMS) Kantor Kelurahan Sebengkok tahun 2013	47.000.000,00	47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
148	Kec. Tarakan Tengah	12/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Sistem Informasi Kelurahan Selumit Thn. 2013 (Pembuatan Sarana Informasi Publik)	49.940.000,00	49.940.000,00	-	49.940.000,00	-
149	Kec. Tarakan Tengah	31/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi EDMS Kel. Selumit Thn. 2013	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
150	Kec. Tarakan Tengah	31/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Kelurahan Selumit Pantai TA 2013	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
151	Kec. Tarakan Utara	18/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Komputer/PC dan Software Komputer pada Kantor Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2013	34.215.500,00	34.215.500,00	-	34.215.500,00	-
152	Kec. Tarakan Utara	17/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Pada Kelurahan Juata Laut Tahun Anggaran 2013 - Kel Juata Laut	73.900.000,00	73.900.000,00	-	73.900.000,00	-
153	Kec. Tarakan Utara	31/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Komputer Mainframe Server, Scanner, Software Aplikasi E-Document Manajemen System Kelurahan Juata Permai Tahun 2013 - Kel Juata Permai	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
154	Kec. Tarakan Timur	17/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Sistem Informasi Kelurahan Kampung Empat Tahun Anggaran 2013 - Kel Kampung Empat	49.940.000,00	49.940.000,00	-	49.940.000,00	-

No.	SKPD/Unit SKPD	Tanggal	Jenis	Kategori	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
155	Kec. Tarakan Timur	31/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penyusunan system informasi terhadap layanan public berupa belanja, komputer PC, Scanner, Aplikasi - Kel Kampung Enam	47.000.000,00	47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
156	Kec. Tarakan Timur	19/12/2012	*Software*	Tidak digunakan Operasional	Pengadaan Software Komputer Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Kantor Kelurahan Mamburungan Tahun 2012 - Kel. Mamburungan	44.500.500,00	44.500.500,00	-	44.500.500,00	-
157	Kec. Tarakan Timur	31/12/2013	*Software*	Tidak digunakan Operasional	Pengadaan Aplikasi (EDMS) Kantor Kelurahan Mamburungan Tahun 2013 - Kel. Mamburungan	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
158	Kec. Tarakan Timur	31/12/2013	*Software*	Tidak digunakan Operasional	Pengadaan Aplikasi E-Document Management System (EDMS) untuk Kantor Kel. Mamburungan Timur Tahun 2013	71.800.000,00	71.800.000,00	-	71.800.000,00	-
159	Kec. Tarakan Timur	26/4/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap layanan Publik TA 2013 - Kelurahan Lingkas Ujung	72.000.000,00	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-
160	Kec. Tarakan Timur	31/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi E Document Management System Kelurahan Lingkas Ujung TA 2013	47.350.000,00	47.350.000,00	-	47.350.000,00	-
161	Kec. Tarakan Timur	09/05/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi Sms Gateway Kelurahan Lingkas Ujung Tahun Anggaran 2014	65.000.000,00	62.833.333,33	2.166.666,67	65.000.000,00	-
162	Kec. Tarakan Timur	09/05/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi E-Library dan Komputer Desktop Kelurahan Lingkas Ujung Tahun Anggaran 2014	75.000.000,00	72.500.000,00	2.500.000,00	75.000.000,00	-
163	Kec. Tarakan Timur	17/06/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Komputer Kantor Kelurahan Lingkas Ujung Tahun Anggaran 2014	8.895.000,00	8.524.375,00	370.625,00	8.895.000,00	-
164	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Badan Kesbang, Pol dan Linmas 2012	69.900.000,00	69.900.000,00	-	69.900.000,00	-
165	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30/4/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Sistem Informasi Administrasi Berkas pada KPPT Tarakan TA 2012	74.900.000,00	74.900.000,00	-	74.900.000,00	-
166	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12/11/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penyempurnaan Software Pelayanan Administrasi Perizinan pada KPPT Kota Tarakan Tahun Anggaran 2012	99.900.000,00	99.900.000,00	-	99.900.000,00	-
167	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28/11/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software SMS Gateway dan KartuTanda Anggota Pengurusan Izin Usaha pada KPPT Kota Tarakan Ta 2012	99.900.000,00	99.900.000,00	-	99.900.000,00	-
168	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah untuk KPPT Kota Tarakan TA 2012	99.740.000,00	99.740.000,00	-	99.740.000,00	-
169	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20/6/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Sistem Informasi Administrasi Berkas pada KPPT Kota Tarakan TA 2013	99.760.000,00	99.760.000,00	-	99.760.000,00	-
170	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19/12/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Website u/ KPPT Kota Tarakan TA. 2014	3.000.000,00	2.725.000,00	275.000,00	3.000.000,00	-
171	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	05/12/2015	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Sistem Perizinan daerah On-Line (Aplikasi Izin IMB dan Ho) 1 paket - KPPT	19.000.000,00	15.358.333,33	1.900.000,00	17.258.333,33	1.741.666,67
172	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	07/09/2016	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi Perizinan Online yang terintegrasi SPIPISE - KPPT	24.900.000,00	18.260.000,00	2.490.000,00	20.750.000,00	4.150.000,00
173	Sekretariat Daerah	5/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (Simbangda) Kota Tarakan Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan, Sesuai Dengan Bukti Yang Terlampir.	104.385.000,00	104.385.000,00	-	104.385.000,00	-
174	Sekretariat Daerah	18/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pembuatan program Sofware SPPD dan pelaporan serapan anggaran keperluan bagian umum setda kota tarakan	7.997.000,00	7.997.000,00	-	7.997.000,00	-
175	Sekretariat Daerah	21/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengembangan Sofware SIMEK Kep. Bagian Perkonomian Setda Kota Tarakan Tahun 2012 Pada CV. Cahaya Mas, Sesuai Dengan Bukti Yang terlampir.	24.200.000,00	24.200.000,00	-	24.200.000,00	-

No.	SKPD/Unit SKPD	Tanggal	Jenis	Kategori	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
176	Sekretariat Daerah	27/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (Simbangda) pada bagian pembangunan setda kota tarakan	243.565.000,00	243.565.000,00	-	243.565.000,00	-
177	Sekretariat Daerah	27/12/2012	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Rencana Kegiatan Walikota Tarakan Pada CV 3d, Sesuai Dengan Butki yang terlampir.	4.950.000,00	4.950.000,00	-	4.950.000,00	-
178	Sekretariat Daerah	20/12/2013	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan software keperluan Kantor Setda Kota Tarakan kepada CV.Gloria Akar Daya Tarakan, sesuai bukti terlampir.	14.960.000,00	14.960.000,00	-	14.960.000,00	-
179	Sekretariat Daerah	06/11/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi Manajemen Geoserver Bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV. CLASNET	168.025.000,00	154.022.916,67	14.002.083,33	168.025.000,00	-
180	Sekretariat Daerah	25/11/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi SIMKEL (Sistem Informasi Kelurahan) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Bagian Pemerintahan Setda Kota Tarakan pada CV. PROTIKA KOMPUTINDO	136.972.000,00	125.557.666,67	11.414.333,33	136.972.000,00	-
181	Sekretariat Daerah	27/11/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengembangan Software SIMEK Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik pada CV. SABDA GUNA	49.885.000,00	45.727.916,67	4.157.083,33	49.885.000,00	-
182	Sekretariat Daerah	29/12/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Daerah) Kegiatan penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV.DAMO IDEKU	193.500.000,00	175.762.500,00	17.737.500,00	193.500.000,00	-
183	Sekretariat Daerah	29/12/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi SIMTA (Sistem Informasi Kecamatan) Bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV. CLASNET	71.918.000,00	65.325.516,67	6.592.483,33	71.918.000,00	-
184	Sekretariat Daerah	30/12/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi Pemetaan Pertanahan Serta Kependudukan Bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV. PROTIKA KOMPUTINDO	181.555.000,00	164.912.458,33	16.642.541,67	181.555.000,00	-
185	Sekretariat Daerah	29/12/2015	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi Perjalanan Dinas 1 Paket & Aplikasi Surat Dinas 1 Paket	49.830.000,00	40.279.250,00	4.983.000,00	45.262.250,00	4.567.750,00
186	Sekretariat Daerah	29/12/2015	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Barang 1 Paket & Aplikasi Data Kepegawaian	49.830.000,00	40.279.250,00	4.983.000,00	45.262.250,00	4.567.750,00
187	Sekretariat Daerah	29/12/2015	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi SIMKEL Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Bagian Pemerintahan	160.875.000,00	130.040.625,00	16.087.500,00	146.128.125,00	14.746.875,00
188	Sekretariat Daerah	29/12/2015	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi SIMTA Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Bagian Pemerintahan	70.070.000,00	56.639.916,67	7.007.000,00	63.646.916,67	6.423.083,33
189	Sekretariat Daerah	30/12/2015	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Biaya Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Utilitas dan Basis dan Jaringan Utilitas pada Bagian Pembangunan	391.765.000,00	316.676.708,33	39.176.500,00	355.853.208,33	35.911.791,67
190	Sekretariat Daerah	30/12/2016	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software Aplikasi TPP Berbasis Kinerja	199.700.000,00	141.454.166,67	19.970.000,00	161.424.166,67	38.275.833,33
191	Sekretariat Daerah	25/9/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Aplikasi dan Peralatan Jaringan SIMEK Bag Perekonomian Setda	19.965.000,00	12.644.500,00	1.996.500,00	14.641.000,00	5.324.000,00
192	Sekretariat Daerah	14/12/2017	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Aplikasi dan Peralatan Jaringan PIHPS Bag Perekonomian	22.275.000,00	13.550.625,00	2.227.500,00	15.778.125,00	6.496.875,00
193	Sekretariat Daerah	27/9/2024	*Software*	Masih digunakan	Website JDIH Kota Tarakan	19.536.000,00		651.200,00	651.200,00	18.884.800,00
194	Sekretariat DPRD	18/12/2014	*Software*	Tidak digunakan Operasional	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Perkantoran/Pengadaan Software Kantor Set.DPRD Kota Tarakan Tahun 2014	49.170.000,00	44.662.750,00	4.507.250,00	49.170.000,00	-
195	Sekretariat DPRD	14/07/2021	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Software website kantor	83.011.500,00	20.752.875,00	8.301.150,00	29.054.025,00	53.957.475,00
196	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	31/12/2017	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan Software keperluan Windows Server	7.040.000,00	4.282.666,67	704.000,00	4.986.666,67	2.053.333,33
197	Inspektorat	15/12/2020	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan (Aplikasi Sistem Informasi) Kantor Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2020	49.000.000,00	15.108.333,33	4.900.000,00	20.008.333,33	28.991.666,67

No.	SKPD/Unit SKPD	Tanggal	Jenis	Kategori	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
198	Dinas Perikanan	20/05/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan sofware komputer (Pendataan dan pembuatan kartu nelayan) - DKP	30.000.000,00	29.000.000,00	1.000.000,00	30.000.000,00	-
199	Dinas Perikanan	22/12/2014	*Software*	Tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya	Pengadaan software komputer keperluan DKP	14.000.000,00	12.716.666,67	1.283.333,33	14.000.000,00	-
200	Dinas Perikanan	19/12/2024	*Software*	Masih Digunakan	Pembuatan Aplikasi Layanan SKAI	47.800.000,00		398.333,33	398.333,33	47.401.666,67
201	Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	31/12/2021	*Software*	Masih digunakan	Pengadaan Software SIMRS Khanza dan perjalanan dinas	52.887.435,00	11.018.215,63	5.288.743,50	16.306.959,13	36.580.475,87
202	DPRKPP	21/12/2024	Kajian	Masih digunakan	Baseline Pengurangan Kawasan Kumuh Kec. Tarakan Barat Kepada CV. Faqih Engineering Konsultan	41.680.000,00		347.333,33	347.333,33	41.332.666,67
Saldo Per 31 Desember 2024						**15.520.217.354,00**	**9.683.276.249,01**	**758.692.292,72**	**10.441.968.541,73**	**5.078.248.812,27**

Rincian Aset Tidak Berwujud yang Tidak Diketahui Keberadaannya

No.	SKPD	No.	Tanggal	Jenis	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1	31/12/2009	*Software*	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen PKP	49.500.000,00	49.500.000,00	-	49.500.000,00	-
		2	19/4/2010	*Software*	Pengadaan Software Komputer dan perlengkapan untuk keperluan Bappeda Kota Tarakan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		3	30/11/2010	*Software*	Pengadaan Software Komputer dan Belanja Modal Pengadaan Software Komputer kegiatan penyusunan aplikasi perkantoran dan Belanja Modal Pengadaan Software Komputer kegiatan penyusunan aplikasi perkantoran	125.050.000,00	125.050.000,00	-	125.050.000,00	-
		4	29/12/2010	*Software*	Pengadaan SIM PKP	29.590.000,00	29.590.000,00	-	29.590.000,00	-
		5	21/12/2011	*Software*	Belanja Pengadaan Software Komputer (Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Perkantoran dan Belanja Pengadaan Software Komputer (Inventarisasi Database Pengembangan Pembangunan Daerah) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Perkantoran dan Belanja Pengadaan Software Komputer (Pengembangan Elektronik Office Management) Keg. Pengembangan Aplikasi Perkantoran	212.500.000,00	212.500.000,00	-	212.500.000,00	-
		6	26/12/2012	*Software*	Belanja Pengadaan Software Komputer (Pengembangan e-Plann) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik dan Belanja Pengadaan Software Komputer (SIM-PKP) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	94.750.000,00	94.750.000,00	-	94.750.000,00	-
		7	8/10/2013	*Software*	Pengadaan Sofware Komputer Aplikasi KLA	78.650.000,00	78.650.000,00	-	78.650.000,00	-
		8	17/12/2013	*Software*	Belanja Pengadaan Software Komputer dan Belanja Modal Pengadaan Software Komputer berupa Aplikasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	85.500.000,00	85.500.000,00	-	85.500.000,00	-
		9	19/12/2013	*Software*	Pengadaan Software Komputer dan Belanja Modal Pengadaan Software	165.220.000,00	165.220.000,00	-	165.220.000,00	-
		10	01/09/2014	*Software*	Pengadaan sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Penannggulangan Kemiskinan	171.600.000,00	160.160.000,00	11.440.000,00	171.600.000,00	-
		11	12/11/2015	*Software*	Pengadaan Software Komputer berupa Pengembangan Aplikasi Simusrenbang Kegiatan Penyusunan Informasi terhadap Pelayanan Publik	80.300.000,00	65.578.333,33	8.030.000,00	73.608.333,33	6.691.666,67

No.	SKPD	No.	Tanggal	Jenis	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
		12	10/06/2015	*Software*	Pengadaan peralatan dan mesin berupa pengembangan aplikasi e-data	79.550.000,00	68.280.416,67	7.955.000,00	76.235.416,67	3.314.583,33
		13	28/8/2017	*Software*	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan	48.400.000,00	31.056.666,67	4.840.000,00	35.896.666,67	12.503.333,33
		14	12/12/2017	*Software*	Pengadaan Software Pengembangan Aplikasi	33.440.000,00	20.342.666,67	3.344.000,00	23.686.666,67	9.753.333,33
2	Dinas Lingkungan Hidup	15	17/12/2013	*Software*	Pengadaan Software Komputer Kegiatan Pengembangan Informasi Lingkungan - BPLH	37.180.000,00	37.180.000,00	-	37.180.000,00	-
		16	19/12/2012	*Software*	Pembuatan website DKPP Tarakan kepada CV Gloria Akar Daya - DKPP	25.300.000,00	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-
		17	24/12/2013	*Software*	Pembuatan data base pemakaman di kecamatan tarakan timur kepada CV KOISSON PRATAMA - DKPP	29.820.000,00	29.820.000,00	-	29.820.000,00	-
		18	10/08/2016	*Software*	Aplikasi Pengawasan dan Pelaporan Tenaga Lapangan - DKPP	38.000.000,00	28.183.333,33	3.800.000,00	31.983.333,33	6.016.666,67
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	19	22/11/2013	*Software*	Pembuatan Website Bandiklat Kota Tarakan Tahun 2013	29.700.000,00	29.700.000,00	-	29.700.000,00	-
		20	31/12/2009	*Software*	Pengadaan Aplikasi Info SPM dan SP2D	39.500.000,00	39.500.000,00	-	39.500.000,00	-
		21	31/12/2009	*Software*	Pengadaan Software Simpatda	47.850.000,00	47.850.000,00	-	47.850.000,00	-
		22	29/12/2010	*Software*	Pengembangan Aplikasi Info SPM dan SP2D	44.950.000,00	44.950.000,00	-	44.950.000,00	-
		23	29/12/2010	*Software*	Pengembangan Software Simpatda	47.000.000,00	47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
		24	18/12/2013	*Software*	Pengadaan Aplikasi e-office untuk keperluan DPPKA Kota Tarakan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	55.000.000,00	-
		25	18/12/2013	*Software*	Pengadaan 1 (Satu) Unit Electricity Treatment System (ETS) untuk keperluan DPPKA Kota Tarakan Tahun 2013	54.850.000,00	54.850.000,00	-	54.850.000,00	-
		26	29/12/2014	*Software*	Belanja Pengadaan Mainframe/Server, Peralatan E-Paper, Pengadaan Website dan Pembuatan E Paper Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor - DISHUTAMBEN	99.990.000,00	90.824.250,00	9.165.750,00	99.990.000,00	-
		27	16/09/2014	*Software*	Pengadaan Software SMS Gateway untuk Keperluan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan	60.445.000,00	56.415.333,33	4.029.666,67	60.445.000,00	-
		28	30/12/2016	*Software*	Pengadaan Software Komputer Lab Bahasa	14.750.000,00	10.447.916,67	1.475.000,00	11.922.916,67	2.827.083,33
		29	27/12/2016	*Software*	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Perkantoran	199.700.000,00	141.454.166,67	19.970.000,00	161.424.166,67	38.275.833,33
		30	18/4/2017	*Software*	Pengadaan Aplikasi TPP PNS Berbasis Kehadiran dan Kinerja	99.700.000,00	67.297.500,00	9.970.000,00	77.267.500,00	22.432.500,00
		31	17/09/2018	*Software*	Pengadaan Software Aplikasi TPP PNS Berbasis Kehadiran	29.350.000,00	15.653.333,33	2.935.000,00	18.588.333,33	10.761.666,67
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32	17/9/2013	*Software*	Pengembangan sistem software Display informasi Harga Pasar Kegiatan Pembangunan Pusat Penampungan Produksi Hasil Tani dan Kebun Masyarakat	33.286.000,00	33.286.000,00	-	33.286.000,00	-
		33	19/12/2012	*Software*	Pengadaan Website kegiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor	56.100.000,00	56.100.000,00	-	56.100.000,00	-
5	Dinas Pendidikan	34	8/12/2011	*Software*	Pengadaan Software Management dan Laporan Keuangan Dana BOS	95.744.000,00	95.744.000,00	-	95.744.000,00	-
		35	29/12/2014	*Software*	BELANJA PENGADAAN APLIKASI SIMPEG	198.500.000,00	180.304.166,67	18.195.833,33	198.500.000,00	-
		36	29/12/2015	*Software*	Pengadaan Aplikasi SIMPTK	180.000.000,00	145.500.000,00	18.000.000,00	163.500.000,00	16.500.000,00

No.	SKPD	No.	Tanggal	Jenis	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
		37	31/12/2016	*Software*	(SDN 048) Aplikasi Tunjangan Kinerja	5.000.000,00	3.541.666,67	500.000,00	4.041.666,67	958.333,33
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	38	01/12/2014	*Software*	Pengadaan software komputer berupa pengadaan pengembangan aplikasi e-Commerce (online store) KUMKM pada keg. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	26.400.000,00	23.980.000,00	2.420.000,00	26.400.000,00	-
		39	09/12/2014	*Software*	Pengadaan software IT Data Base KUKM tahap 2 pada kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	33.000.000,00	29.975.000,00	3.025.000,00	33.000.000,00	-
		40	15/12/2014	*Software*	Pengadaan software dan jaringan komputer (upgrade aplikasi website) pada keg. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	44.429.000,00	40.356.341,67	4.072.658,33	44.429.000,00	-
		41	6/12/2012	*Software*	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Database Koperasi pada kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Koperasi (RM)	62.315.000,00	62.315.000,00	-	62.315.000,00	-
		42	23/12/2013	*Software*	Pengadaan software komputer kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dan Biaya belanja modal pengadaan software komputer berupa pengembangan sistem aplikasi pendataan (data base) keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	99.275.000,00	99.275.000,00	-	99.275.000,00	-
7	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	43	13/8/2012	*Software*	Pembuatan software data base cagar budaya Kegiatan pengembangan Data base sistem informasi sejarah purbakala 2012 Disbudparpora Kota Tarakan - DISBUDPARPORA	36.025.000,00	36.025.000,00	-	36.025.000,00	-
8	Dinas Perhubungan	44	19/12/2012	*Software*	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angk. berupa Pembuatan Software Komptr tentang Sist. Informasi dan Transp. Jalan Kota Tarakan berupa Aplikasi Adm. Trayek dan Ops Kend. (ATOK) dan Perlengkapannya kep. Dishub Tahun 2012	196.360.000,00	196.360.000,00	-	196.360.000,00	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45	27/12/2012	*Software*	Pengadaan Software E-Office Sesuai dengan SPK No : 471.B/SPK/DPU-TR/XI/2012 Tanggal 23 Nopember 2012	49.742.000,00	49.742.000,00	-	49.742.000,00	-
		46	30/12/2013	*Software*	Pembuatan Software SIM DPUTR Sesuai dengan SPK No : 613.A/SPK/DPUTR/HD/XII/2013 Tanggal 6 November 2013	199.070.000,00	199.070.000,00	-	199.070.000,00	-
		47	29/12/2014	*Software*	Pengadaan Software Komputer Pembuatan Database Perencanaan, Sesusai dengan kontrak No : 02/SPK/PL-DBASE-PRC/2014 Tgl. 25 September 2014	146.375.180,00	132.957.455,17	13.417.724,83	146.375.180,00	-
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48	17/4/2012	*Software*	Pengadaan Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan Keperluan Kaperpus-KD dan Bayar Kegiatan Pendapatan / Penataan / Dokumen / Arsip Daerah Keperluan Kaperpus - KD	99.535.700,00	99.535.700,00	-	99.535.700,00	-

No.	SKPD	No.	Tanggal	Jenis	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
		49	16/7/2012	*Software*	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Keperluan Kaperpus-KD	59.360.000,00	59.360.000,00	-	59.360.000,00	-
		50	26/4/2013	*Software*	Biaya Penyempurnaan Software program Kearsipan Keperluan kaperpus-Kd	34.100.000,00	34.100.000,00	-	34.100.000,00	-
		51	22/7/2013	*Software*	Biaya pemeliharaan Peralatan jaringan Informasi Kearsipan keperluan Kaperpus-Kd	34.985.000,00	34.985.000,00	-	34.985.000,00	-
		52	18/12/2013	*Software*	Pengadaan Software Program Database Penyimpanan Data Dilingkungan Instansi Pemerintah	24.772.000,00	24.772.000,00	-	24.772.000,00	-
		53	12/7/2010	*Software*	Pembelian software otomatis arsip in aktif	35.000.000,00	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
		54	9/2/2011	*Software*	Pembuatan database arsip on line dan Bayar Pengadaan maintenance program otomatis arsip in aktif	70.000.000,00	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-
		55	31/10/2011	*Software*	Pengadaan software perpustakaan	74.096.000,00	74.096.000,00	-	74.096.000,00	-
		56	28/5/2013	*Software*	Pengembangan Program data base dan Anjungan Kaperpus-Kd	79.612.500,00	79.612.500,00	-	79.612.500,00	-
		57	16/06/2014	*Software*	Pengembangan Upgrade/Penyempurnaan Sofware Program Kearsipan Keperluan Kaperpus-KD Kota Tarakan	34.900.000,00	33.445.833,33	1.454.166,67	34.900.000,00	-
		58	6/8/2017	*Software*	Penduplikatan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika	10.000.000,00	6.416.666,67	1.000.000,00	7.416.666,67	2.583.333,33
		59	18/9/2017	*Software*	Database Sistem Informasi arsip statis	20.000.000,00	12.666.666,67	2.000.000,00	14.666.666,67	5.333.333,33
		60	10/4/2017	*Software*	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
		61	10/4/2017	*Software*	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
		62	10/4/2017	*Software*	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
		63	10/4/2017	*Software*	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
		64	10/4/2017	*Software*	Aplikasi Otomatisasi Perpustakaan dan Jaringan	3.000.000,00	2.025.000,00	300.000,00	2.325.000,00	675.000,00
		65	9/11/2018	*Software*	Pembangunan Sistem Keamanan Penyimoanan Data	25.000.000,00	12.916.666,67	2.500.000,00	15.416.666,67	9.583.333,33
11	Kec. Tarakan Barat	66	14/8/2012	*Software*	Penyusunan Sistem Infomasi Tehadap Layanan Publik Berupa Pengadaan Sofware Komputer Sistem Informasi Simpaten Pada Kantor Camat Tarakan Barat Tahun 2012	51.500.000,00	51.500.000,00	-	51.500.000,00	-
		67	8/11/2013	*Software*	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Berupa Belanja Perawatan Dan Update Software Sistem Informasi Layanan Publik Tahun 2013	34.450.000,00	34.450.000,00	-	34.450.000,00	-
		68	20/12/2012	*Software*	Pengadaan Software Komputer Aplikasi Administrasi Pelayanan Informasi Kelurahan Kr. Anyar Pantai Th. 2012 - Kel. Kr. Anyar Pantai	194.600.000,00	194.600.000,00	-	194.600.000,00	-
		69	30/12/2013	*Software*	Pengadaan Barang Hardware Kegiatan E-Document Kantor Kelurahan Karang Rejo Ta 2013 - Kel. Kr. Rejo	4.899.999,00	4.899.999,00	-	4.899.999,00	-

No.	SKPD	No.	Tanggal	Jenis	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
12	Kec. Tarakan Tengah	70	27/12/2011	*Software*	Pengadaan Software Sistem Pelayanan Terpadu	82.500.000,00	82.500.000,00	-	82.500.000,00	-
		71	14/12/2012	*Software*	Pengadaan Software Komputer Software Sistem Informasi Surat (Speakless) (CV. TUNAS MUDA JAYA)	28.880.000,00	28.880.000,00	-	28.880.000,00	-
		72	21/12/2012	*Software*	Pengadaan Software Komputer (Pembuatan Aplikasi One Stop Service) (CV. Tunas Muda Jaya)	34.980.000,00	34.980.000,00	-	34.980.000,00	-
		73	4/12/2013	*Software*	Pengadaan Software Komputer (Pemutakhiran Aplikasi Surat) (CV. TUNAS MUDA JAYA)	14.850.000,00	14.850.000,00	-	14.850.000,00	-
		74	24/12/2013	*Software*	Pengadaan Aplikasi Electronic Management System (EDMS) Keg. Penyususnan Informasi Terhadap Layanan Publik 2013 - Kel Kampung 1 Skip	74.850.000,00	74.850.000,00	-	74.850.000,00	-
		75	31/12/2013	*Software*	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik berupa (EDMS) Kantor Kelurahan Sebengkok tahun 2013	47.000.000,00	47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
		76	12/12/2013	*Software*	Pengadaan Sistem Informasi Kelurahan Selumit Thn. 2013 (Pembuatan Sarana Informasi Publik)	49.940.000,00	49.940.000,00	-	49.940.000,00	-
		77	31/12/2013	*Software*	Pengadaan Aplikasi EDMS Kel. Selumit Thn. 2013	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
		78	31/12/2013	*Software*	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Kelurahan Selumit Pantai TA 2013	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
13	Kec. Tarakan Utara	79	18/12/2013	*Software*	Pengadaan Komputer/PC dan Software Komputer pada Kantor Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2013	34.215.500,00	34.215.500,00	-	34.215.500,00	-
		80	17/12/2013	*Software*	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Pada Kelurahan Juata Laut Tahun Anggaran 2013 - Kel Juata Laut	73.900.000,00	73.900.000,00	-	73.900.000,00	-
		81	31/12/2013	*Software*	Pengadaan Komputer Mainframe Server, Scanner, Software Aplikasi E-Document Manajemen System Kelurahan Juata Permai Tahun 2013 - Kel Juata Permai	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
14	Kec. Tarakan Timur	82	17/12/2013	*Software*	Pengadaan Sistem Informasi Kelurahan Kampung Empat Tahun Anggaran 2013 - Kel Kampung Empat	49.940.000,00	49.940.000,00	-	49.940.000,00	-
		83	31/12/2013	*Software*	Penyusunan system informasi terhadap layanan public berupa belanja, komputer PC, Scanner, Aplikasi - Kel Kampung Enam	47.000.000,00	47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
		84	26/4/2013	*Software*	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap layanan Publik TA 2013 - Kelurahan Lingkas Ujung	72.000.000,00	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-
		85	31/12/2013	*Software*	Pengadaan Aplikasi E Document Management System Kelurahan Lingkas Ujung TA 2013	47.350.000,00	47.350.000,00	-	47.350.000,00	-
		86	09/05/2014	*Software*	Pengadaan Aplikasi Sms Gateway Kelurahan Lingkas Ujung Tahun Anggaran 2014	65.000.000,00	62.833.333,33	2.166.666,67	65.000.000,00	-
		87	09/05/2014	*Software*	Pengadaan Aplikasi E-Library dan Komputer Desktop Kelurahan Lingkas Ujung Tahun Anggaran 2014	75.000.000,00	72.500.000,00	2.500.000,00	75.000.000,00	-

No.	SKPD	No.	Tanggal	Jenis	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
		88	17/06/2014	*Software*	Pengadaan Software Komputer Kantor Kelurahan Lingkas Ujung Tahun Anggaran 2014	8.895.000,00	8.524.375,00	370.625,00	8.895.000,00	-
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89	5/12/2012	*Software*	Pengadaan Software Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Badan Kesbang, Pol dan Linmas 2012	69.900.000,00	69.900.000,00	-	69.900.000,00	-
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90	30/4/2012	*Software*	Pengadaan Software Sistem Informasi Administrasi Berkas pada KPPT Tarakan TA 2012	74.900.000,00	74.900.000,00	-	74.900.000,00	-
		91	12/11/2012	*Software*	Penyempurnaan Software Pelayanan Administrasi Perizinan pada KPPT Kota Tarakan Tahun Anggaran 2012	99.900.000,00	99.900.000,00	-	99.900.000,00	-
		92	28/11/2012	*Software*	Pengadaan Software SMS Gateway dan KartuTanda Anggota Pengurusan Izin Usaha pada KPPT Kota Tarakan Ta 2012	99.900.000,00	99.900.000,00	-	99.900.000,00	-
		93	13/12/2012	*Software*	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah untuk KPPT Kota Tarakan TA 2012	99.740.000,00	99.740.000,00	-	99.740.000,00	-
		94	20/6/2013	*Software*	Pengadaan Software Sistem Informasi Administrasi Berkas pada KPPT Kota Tarakan TA 2013	99.760.000,00	99.760.000,00	-	99.760.000,00	-
		95	19/12/2014	*Software*	Pengadaan Website u/ KPPT Kota Tarakan TA. 2014	3.000.000,00	2.725.000,00	275.000,00	3.000.000,00	-
		96	05/12/2015	*Software*	Pengadaan Sistem Perizinan daerah On-Line (Aplikasi Izin IMB dan Ho) 1 paket - KPPT	19.000.000,00	15.358.333,33	1.900.000,00	17.258.333,33	1.741.666,67
		97	07/09/2016	*Software*	Pengadaan Aplikasi Perizinan Online yang terintegrasi SPIPISE - KPPT	24.900.000,00	18.260.000,00	2.490.000,00	20.750.000,00	4.150.000,00
17	Sekretariat Daerah	98	5/12/2012	*Software*	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (Simbangda) Kota Tarakan Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan, Sesuai Dengan Bukti Yang Terlampir.	104.385.000,00	104.385.000,00	-	104.385.000,00	-
		99	18/12/2012	*Software*	Pembuatan program Sofware SPPD dan pelaporan serapan anggaran keperluan bagian umum setda kota tarakan	7.997.000,00	7.997.000,00	-	7.997.000,00	-
		100	21/12/2012	*Software*	Pengembangan Sofware SIMEK Kep. Bagian Perkonomian Setda Kota Tarakan Tahun 2012 Pada CV. Cahaya Mas, Sesuai Dengan Bukti Yang terlampir.	24.200.000,00	24.200.000,00	-	24.200.000,00	-
		101	27/12/2012	*Software*	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (Simbangda) pada bagian pembangunan setda kota tarakan	243.565.000,00	243.565.000,00	-	243.565.000,00	-
		102	27/12/2012	*Software*	Pengadaan Software Rencana Kegiatan Walikota Tarakan Pada CV 3d, Sesuai Dengan Butki yang terlampir.	4.950.000,00	4.950.000,00	-	4.950.000,00	-
		103	20/12/2013	*Software*	Pengadaan software keperluan Kantor Setda Kota Tarakan kepada CV.Gloria Akar Daya Tarakan, sesuai bukti terlampir.	14.960.000,00	14.960.000,00	-	14.960.000,00	-
		104	06/11/2014	*Software*	Pengadaan Aplikasi Manajemen Geoserver Bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV. CLASNET	168.025.000,00	154.022.916,67	14.002.083,33	168.025.000,00	-

No.	SKPD	No.	Tanggal	Jenis	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
		105	25/11/2014	*Software*	Pengadaan Aplikasi SIMKEL (Sistem Informasi Kelurahan) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Bagian Pemerintahan Setda Kota Tarakan pada CV. PROTIKA KOMPUTINDO	136.972.000,00	125.557.666,67	11.414.333,33	136.972.000,00	-
		106	27/11/2014	*Software*	Pengembangan Software SIMEK Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik pada CV. SABDA GUNA	49.885.000,00	45.727.916,67	4.157.083,33	49.885.000,00	-
		107	29/12/2014	*Software*	Pengadaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Daerah) Kegiatan penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV.DAMO IDEKU	193.500.000,00	175.762.500,00	17.737.500,00	193.500.000,00	-
		108	29/12/2014	*Software*	Pengadaan Aplikasi SIMTA (Sistem Informasi Kecamatan) Bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV. CLASNET	71.918.000,00	65.325.516,67	6.592.483,33	71.918.000,00	-
		109	30/12/2014	*Software*	Pengadaan Aplikasi Pemetaan Pertanahan Serta Kependudukan Bagian Pemerintahan Tahun 2014 pada CV. PROTIKA KOMPUTINDO	181.555.000,00	164.912.458,33	16.642.541,67	181.555.000,00	-
		110	29/12/2015	*Software*	Pengadaan Aplikasi Perjalanan Dinas 1 Paket & Aplikasi Surat Dinas 1 Paket	49.830.000,00	40.279.250,00	4.983.000,00	45.262.250,00	4.567.750,00
		111	29/12/2015	*Software*	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Barang 1 Paket & Aplikasi Data Kepegawaian	49.830.000,00	40.279.250,00	4.983.000,00	45.262.250,00	4.567.750,00
		112	29/12/2015	*Software*	Pengadaan Aplikasi SIMKEL Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Bagian Pemerintahan	160.875.000,00	130.040.625,00	16.087.500,00	146.128.125,00	14.746.875,00
		113	29/12/2015	*Software*	Pengadaan Aplikasi SIMTA Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Bagian Pemerintahan	70.070.000,00	56.639.916,67	7.007.000,00	63.646.916,67	6.423.083,33
		114	30/12/2015	*Software*	Biaya Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Utilitas dan Basis dan Jaringan Utilitas pada Bagian Pembangunan	391.765.000,00	316.676.708,33	39.176.500,00	355.853.208,33	35.911.791,67
		115	30/12/2016	*Software*	Pengadaan Software Aplikasi TPP Berbasis Kinerja	199.700.000,00	141.454.166,67	19.970.000,00	161.424.166,67	38.275.833,33
		116	25/9/2017	*Software*	Pengadaan Aplikasi dan Peralatan Jaringan SIMEK Bag Perekonomian Setda	19.965.000,00	12.644.500,00	1.996.500,00	14.641.000,00	5.324.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	117	31/12/2017	*Software*	Pengadaan Software keperluan Windows Server	7.040.000,00	4.282.666,67	704.000,00	4.986.666,67	2.053.333,33
19	Dinas Perikanan	118	20/05/2014	*Software*	Pengadaan sofware komputer (Pendataan dan pembuatan kartu nelayan) - DKP	30.000.000,00	29.000.000,00	1.000.000,00	30.000.000,00	-
		119	22/12/2014	*Software*	Pengadaan software komputer keperluan DKP	14.000.000,00	12.716.666,67	1.283.333,33	14.000.000,00	-
Jumlah						**8.311.954.879,00**	**7.710.803.845,87**	**332.478.949,82**	**8.043.282.795,69**	**268.672.083,31**

Rincian Aset Tidak Berwujud yang Tidak Digunakan Operasional

No.	SKPD	No.	Tanggal	Jenis	Keterangan	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1	27/12/2010	*Software*	Sudah tidak relevan dan	Pengadaan pengembangan *software* SIK on line	42.800.000,00	42.800.000,00	-	42.800.000,00	-
		2	29/12/2010	*Software*	Sudah tidak relevan	Pengadaan Jasa pengadaan *software* SIMPEG dan *Software* Barang	87.250.000,00	87.250.000,00	-	87.250.000,00	-
		3	28/12/2011	*Software*	Sudah tidak relevan	Pengadaan *software* program pelaporan P2TB	96.000.000,00	96.000.000,00	-	96.000.000,00	-
		4	28/12/2011	*Software*	Sudah tidak relevan	Pengadaan *software* klinik sanitasi survellans based	48.965.000,00	48.965.000,00	-	48.965.000,00	-
		5	28/12/2011	*Software*	Sudah tidak relevan	Pengadaan/pengembangan *software* SIMPUS on line	98.000.000,00	98.000.000,00	-	98.000.000,00	-
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6	13/12/2011	*Software*	Sudah tidak relevan	Pengadaan Aplikasi Bank Data Kegiatan Pemeliharaan WLAN	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-
		7	26/12/2012	*Software*	kondisi rusak dan sudah beralih ke SIM Egov	Pengadaan *Software* SIM e-*Goverment* Keperluan Diskominfo	195.000.000,00	195.000.000,00	-	195.000.000,00	-
		8	30/12/2016	*Software*	kondisi rusak dan sudah beralih ke SP4N Lapor	Pengadaan Aplikasi SMS *Gateway*	47.300.000,00	33.504.166,67	4.730.000,00	38.234.166,67	9.065.833,33
		9	30/12/2016	*Software*	kondisi rusak dan sudah beralih ke SP4N Lapor	Pengadaan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	47.000.000,00	33.291.666,67	4.700.000,00	37.991.666,67	9.008.333,33
		10	30/12/2016	*Software*	kondisi rusak dan sudah beralih ke SP4N Lapor	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat	47.800.000,00	33.858.333,33	4.780.000,00	38.638.333,33	9.161.666,67
		11	30/12/2016	*Software*	kondisi rusak dan sudah beralih ke srikandi	Pengadaan Aplikasi *Paperless System*	47.350.000,00	33.539.583,33	4.735.000,00	38.274.583,33	9.075.416,67
		12	10/12/2020	*Software*	Beralih ke Perumda Aneka Usaha	Pengadaan *Software* Aplikasi untuk Layanan Publik (Aplikasi E-Parkir)	49.500.000,00	15.262.500,00	4.950.000,00	20.212.500,00	29.287.500,00
4	Kec. Tarakan Timur	13	19/12/2012	*Software*	Karena sudah tidak relevan	Pengadaan *Software* Komputer Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Kantor Kelurahan Mamburungan Tahun 2012 - Kel. Mamburungan	44.500.500,00	44.500.500,00	-	44.500.500,00	-
		14	31/12/2013	*Software*	Karena sudah tidak relevan	Pengadaan Aplikasi (EDMS) Kantor Kelurahan Mamburungan Tahun 2013 - Kel. Mamburungan	47.200.000,00	47.200.000,00	-	47.200.000,00	-
		15	31/12/2013	*Software*	Karena sudah tidak relevan	Pengadaan Aplikasi E-*Document Management System* (EDMS) untuk Kantor Kel. Mamburungan Timur Tahun 2013	71.800.000,00	71.800.000,00	-	71.800.000,00	-
5	Sekretariat DPRD	16	18/12/2014	*Software*	Sudah digantikan aplikasi baru	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Perkantoran/Pengadaan Software Kantor Set.DPRD Kota Tarakan Tahun 2014	49.170.000,00	44.662.750,00	4.507.250,00	49.170.000,00	-
Jumlah							**1.043.635.500,00**	**949.634.500,00**	**28.402.250,00**	**978.036.750,00**	**65.598.750,00**

Rincian Aset Tidak Berwujud yang Tidak Memenuhi Klasifikasi Aset Tidak Berwujud

No.	SKPD	No.	Tanggal	Jenis	Keterangan	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1	30/11/2015	*Software*	Anti Virus Kaspersky	Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan	2.500.000,00	2.041.666,67	250.000,00	2.291.666,67	208.333,33
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	29/12/2010	*Software*	*Scanner*	Pengadaan Sistem E-Office BPMPPKB	71.100.000,00	71.100.000,00	-	71.100.000,00	-
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3	7/5/2013	*Software*	*Software* menyatu dengan *hardware*	Pengadaan Software Mesin Sidik Jari Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Jaringan Informasi Keuangan untuk keperluan DPPKA Kota Tarakan	29.755.000,00	29.755.000,00	-	29.755.000,00	-
		4	21/12/2020	*Software*	Beban Pemeliharaan SIM PBB	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi PBB Sesuai SPK Nomor 46/SPK/BPPRD/XI/2020 Tanggal 02 Nopember 2020 untuk Keperluan BPPRD Kota Tarakan Tahun 2020	87.560.000,00	26.997.666,67	8.756.000,00	35.753.666,67	51.806.333,33
		5	11/11/2021	*Software*	Beban Pemeliharaan atas aplikasi	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi PBB Berdasarkan SPK No.212/SPK/BPKPAD/XI/2021 TGL. 11 November 2021	154.000.000,00	33.366.666,67	15.400.000,00	48.766.666,67	105.233.333,33
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	6	16/12/2022	*Software*	*Software* menyatu dengan *hardware* (kondisi baik)	Pengadaan Aplikasi Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Berupa Software Parkir Pasar Tenguyun	28.127.000,00	3.047.091,67	2.812.700,00	5.859.791,67	22.267.208,33
		7	16/12/2022	*Software*	*Software* menyatu dengan *hardware* (kondisi rusak)	Pengadaan Aplikasi Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Berupa Software Parkir Pasar THM	40.027.000,00	4.336.258,33	4.002.700,00	8.338.958,33	31.688.041,67
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	8	31/3/2022	*Software*	*Software* melekat ke *hardware* nya (kondisi baik)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tarakan Berupa Software Parking dan Ticketing Pantai Amal	164.400.000,00	30.140.000,00	16.440.000,00	46.580.000,00	117.820.000,00

No.	SKPD	No.	Tanggal	Jenis	Keterangan	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024 (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
6	Dinas Perhubungan	9	19/12/2012	*Software*	*Software* melekat ke *hardware* nya (masih digunakan)	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ dan ASDP berupa Pembuatan Software tentang Pembuatan Sist. Infor. Data Kendaraan WAjib Uji berupa Pembuatan dan Pemasangan Aplikasi Sist. Adm. Hasil Uji Kend. Bermotor keperluan Dishub Tahun 2012	97.640.000,00	97.640.000,00	-	97.640.000,00	-
		10	6/9/2021	*Software*	*Software* melekat ke *hardware* nya (masih digunakan)	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Uji PKB sebanyak 1 (satu) paket untuk keperluan dishub 2021 Berdasarkan No. 03/SPK/KIR/IX/DISHUB	43.829.000,00	10.226.766,67	4.382.900,00	14.609.666,67	29.219.333,33
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11	13/12/2011	*Software*	Beban Jasa Pemeliharaan	Pengadaan Mail Server Kegiatan Pemeliharaan WLAN	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-
		12	11/12/2023	*Software*	Beban Jasa Pemeliharaan	Pengadaan Software Aplikasi Dashboard TCC keperluan TCC	72.150.000,00	601.250,00	7.215.000,00	7.816.250,00	64.333.750,00
Jumlah							**815.088.000,00**	**333.252.366,68**	**59.259.300,00**	**392.511.666,68**	**422.576.333,32**

Aset Lain-lain Berupa Tanah Jalan pada DPRKPP Belum Diserahterimakan ke Pemerintah Pusat

No.	Uraian	Kode Barang	Kode	Tahun Perolehan	Alamat	Sumber	Nilai (Rp)	SKPD	Keterangan
1	Tanah Untuk Jalan Nasional	04030010011000559	2	2011	Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara	Pembelian	21.668.000,00	DPRKPP	Reklas Dari KIB A berdasarkan Surat Pernyataan Kepala DPKPP Tanggal 13 April 2020 Pembayaran santunan bangunan kegiatan pembongkaran rumah tinggal pada lokasi pelebaran jalan P. Aji Iskandar di Kel. Juata Kerikil kepada M
2	Tanah Untuk Jalan Nasional	04030010011000561	4	2011	Kelurahan Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara	Pembelian	7.773.000,00	DPRKPP	Reklas Dari KIB A berdasarkan Surat Pernyataan Kepala DPKPP Tanggal 13 April 2020 Pembayaran ganti rugi bantuan untuk pembongkaran counter HP pada lokasi pelebaran jalan P. Aji Iskandar di kelurahan Juata Kerikil kepada B
3	Tanah Untuk Jalan Nasional	04030010011000563	6	2011	kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara	Pembelian	38.668.000,00	DPRKPP	Reklas Dari KIB A berdasarkan Surat Pernyataan Kepala DPKPP Tanggal 13 April 2020 Pembayaran ganti rugi bangunan untuk pembongkaran rumah tinggal pada lokasi pelebaran jalan P. Aji Iskandar kel Juata Kerikil kepada J AR
4	Tanah Untuk Jalan Nasional	05040010011000291	40	2007	Kelurahan Juata Laut	Pembelian	155.782.000,00	DPRKPP	Pelebaran Jl. Aji Iskandar TL LHP BPK (Pemilik an. A DKK)
5	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	04030010011000595	2	2010	Jl.. Aji.Iskandar	Pembelian	799.502.650,00	DPRKPP	Reklas Dari KIB A berdasarkan Surat Pernyataan Kepala DPKPP Tanggal 13 April 2020 Pembebasan Tanah
6	Tanah Untuk Jalan Desa	04030010011000603	5	2011	Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara	Pembelian	4.504.000,00	DPRKPP	Reklas Dari KIB A berdasarkan Surat Pernyataan Kepala DPKPP Tanggal 13 April 2020 Pembayaran santunan bangunan kegiatan pembongkaran teras dan lantai papan lokasi pelebaran jalan Aji Iskandar Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara An. MLP
7	Tanah Untuk Jalan Desa	04030010011000604	6	2011	kel.juata kerikil kecamatan tarakan utara	Pembelian	47.130.950,00	DPRKPP	Reklas Dari KIB A berdasarkan Surat Pernyataan Kepala DPKPP Tanggal 13 April 2020 Pembayaran ganti rugi bangunan kegiatan pembongkaran bangunan dan tanam tumbuh pada lokasi pelebaran jalan P.Aji Iskandar di Kel.Juata kerikil An. N
8	Tanah Untuk Makam Umum	04030010011000089	20	2011	Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara	Pembelian	21.399.000,00	DPRKPP	Reklas Dari KIB A berdasarkan Surat Pernyataan Kepala DPKPP Tanggal 13 April 2020 Pembayaran santunan bangunan pada pelebaran jalan P. Aji Iskandar di Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan An. S
9	Tanah Kampung	04030010011000005	5	2011	Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan	Pembelian	62.853.000,00	DPRKPP	Reklas Dari KIB A berdasarkan Surat Pernyataan Kepala DPKPP Tanggal 13 April 2020 Pembayaran santunan bangunan pada pelebaran jalan P. Aji Iskandar di Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan An. EL
10	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	05040010011000221	7	2009	Kel. Juata Laut		1.144.208.150,00	DPRKPP	TL LHP BPK (Pemilik Asal No 884-886,910-921,924-925,929-934,957-962,964-966,968,971,973-978,980-984,986-988,993,1000-1002,1033,1073-1076,1083-1084, H) Review Inspektorat
Jumlah							**2.303.488.750,00**		

Rincian Aset Lain-lain Berupa Gedung dan Bangunan yang Telah Dilengkapi dengan BAST Per 31 Desember 2024

No.	Alamat	Umur ekonomis (Bulan)	Umur ekonomis (Tahun)	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan Per Bulan	Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2024	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku	Keterangan	SKPD
1	Jl P Irian	600	50	26/6/2007	6/10/2056	276.521.000,00	460.868,33	91.712.798,33	5.530.419,96	97.243.218,29	179.277.781,71	Pemb Gedung PMI + Pengawasan	DPUPR
2	Pembuatan Taman Bermain, CV.MP, PPTK : YAW	600	50	12/12/2013	25/3/2063	45.728.800	76.214,67	9.221.974,67	914.576,04	10.136.550,71	35.592.249,29	TK ALMustakim Jembatan Besi	DPUPR
3	Pembuatan Taman, CV.BA, PPTK :YAW	600	50	12/9/2013	24/12/2062	46.649.000	77.748,33	9.640.793,33	932.979,96	10.573.773,29	36.075.226,71	Taman Bermain Panti Asuhan Putri Melati Sebengkok	DPUPR
4	Pembuatan Taman Bermain, CV. BA, PPTK : YAW	600	50	12/12/2013	25/3/2063	45.761.400	76.269,00	9.228.549,00	915.228,00	10.143.777,00	35.617.623,00	Panti Asuhan Achmad Dahlan INTRACA JUATA PERMAI	DPUPR
5	Pembuatan Taman Bermain, CV.BA, PPTK : YA	600	50	12/12/2013	25/3/2063	46.791.300	77.985,50	9.436.245,50	935.826,00	10.372.071,50	36.419.228,50	TK AL Irsyad Jl. Cendawasih	DPUPR
6	Pembuatan Taman, CV.MP, PPTK : YAW	600	50	12/12/2013	25/3/2063	79.784.000	132.973,33	16.089.773,33	1.595.679,96	17.685.453,29	62.098.546,71	SDN 024	DPUPR
7	Pembuatan Taman, CV.BA, PPTK : YAW	600	50	12/12/2013	25/3/2063	90.634.600	151.057,67	18.277.977,67	1.812.692,04	20.090.669,71	70.543.930,29	STIE Bulungan Tarakan	DPUPR
8	Pembuatan Taman, CV. MP PPTK : YAW	600	50	12/12/2013	25/3/2063	90.700.900	151.168,17	18.291.348,17	1.814.018,04	20.105.366,21	70.595.533,79	Lembaga Pemasyarakatan	DPUPR
9	Pembuatan Taman. CV.MP PPTK : YAW	600	50	12/12/2013	25/3/2063	90.691.500	151.152,50	18.289.452,50	1.813.830,00	20.103.282,50	70.588.217,50	BRIMOB	DPUPR
10	Lapangan Bulutangkis Kontrak Rp. 46.115.000	600	50	5/11/2010	16/2/2060	48.022.812	80.038,02	12.646.007,16	960.456,24	13.606.463,40	34.416.348,60	RT 31 Kr Anyar	DPUPR
11	Rehab Lap.Volly Kontrak Rp. 37.027.000	600	50	5/11/2010	16/2/2060	38.558.834	64.264,72	10.153.826,29	771.176,64	10.925.002,93	27.633.831,07	RT 14 Kr Harapan	DPUPR
12	Rehab Lapangan Bulutangkis Kontrak Rp. 46.444.000	600	50	5/11/2010	16/2/2060	48.365.423	80.609,04	12.736.228,06	967.308,48	13.703.536,54	34.661.886,46	RT 10 Juata Laut	DPUPR
13	Pemb. Lap. Bulutangkis Kontrak Rp. 36.244.000	600	50	26/11/2010	8/3/2060	37.743.441	62.905,74	9.939.106,13	754.868,88	10.693.975,01	27.049.465,99	RT 2 Selumit	DPUPR
14	Pemb. Lap. Bulutangkis Kontrak Rp. 46.097.000 RT.10 selumit	600	50	5/11/2010	16/2/2060	48.004.067	80.006,78	12.641.070,98	960.081,36	13.601.152,34	34.402.914,66	RT 10 Selumit	DPUPR
15	Pemb. Lap Volly Kontrak Rp. 46.831.000	600	50	5/11/2010	16/2/2060	48.768.433	81.280,72	12.842.354,02	975.368,64	13.817.722,66	34.950.710,34	RT 8 Kp 1	DPUPR
16	Pemb Lap. Volly Kontrak Rp. 37.507.000	600	50	5/11/2010	16/2/2060	39.058.692	65.097,82	10.285.455,56	781.173,84	11.066.629,40	27.992.062,60	RT 7 Pantai Amal	DPUPR
17	Pemb Lap. Volly Kontrak Rp. 44.166.000	600	50	26/11/2010	8/3/2060	45.993.180	76.655,30	12.111.537,40	919.863,60	13.031.401,00	32.961.779,00	Gn Amal Kp 6	DPUPR
18	Pemb. Lap. Volly Hidayatullah Kontrak Rp. 37.179.000	600	50	5/11/2010	16/2/2060	38.717.123	64.528,54	10.195.509,06	774.342,48	10.969.851,54	27.747.271,46	RT. 11 Gn Lingkas	DPUPR
19	Pembangunan Pos Kamling	600	50	21/6/2010	2/10/2059	41.692.918	69.488,20	11.326.576,06	833.858,40	12.160.434,46	29.532.483,54	RT.20 Juata Permai	DPUPR
20	Pembangunan Pos Kamling	600	50	22/6/2010	3/10/2059	46.639.046	77.731,74	12.670.274,16	932.780,88	13.603.055,04	33.035.990,96	RT. 22 Selumit Pantai	DPUPR
21	Pembangunan Pos Kamling	600	50	14/9/2010	26/12/2059	32.905.851	54.843,09	8.774.893,60	658.117,08	9.433.010,68	23.472.840,32	RT. 01 Juata Laut	DPUPR
22	Pembangunan Pos Kamling	600	50	14/9/2010	26/12/2059	37.204.883	62.008,14	9.921.302,13	744.097,68	10.665.399,81	26.539.483,19	RT. 6 Selumit	DPUPR
23	Pembangunan Pos Kamling	600	50	2/11/2007	12/2/2057	26.886.900	44.811,50	8.693.431,00	537.738,00	9.231.169,00	17.655.731,00	Jl Selumit RT II	DPUPR
24	Renovasi Balai Pertemuan Kontrak Rp. 42.697.000	600	50	15/9/2010	27/12/2059	45.493.931	75.823,22	12.131.715,03	909.878,64	13.041.593,67	32.452.337,68	RT.20 Juata Permai	DPUPR
Jumlah						**1.437.318.034,35**		**367.258.199,14**	**28.746.360,84**	**396.004.559,98**	**1.041.313.474,37**		

Rincian Aset Lain-lain Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Telah Dilengkapi dengan BAST Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Umur Ekonomis (Bulan)	Masa Manfaat	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Perolehan	Penyusutan Per Bulan	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Nilai Buku	Keterangan	Kelurahan
1	Pemb Jembatan RT.06 Gg Sentosa Samping Barean Kel Kp I	600	50	31/12/2016	13/4/2066	133.820.000	223.033,33	18.957.833,33	2.676.399,96	21.634.233,29	112.185.766,71	Pembangunan Jembatan Rt. 06 Gg. Sentosa Samping Barean Futsal Kel. Kp. I	
2	Pemb Jembatan RT.68 Gg Senyum Kr Anyar	600	50	31/12/2016	13/4/2066	148.070.000	246.783,33	20.976.583,33	2.961.399,96	23.937.983,29	124.132.016,71	Pembangunan Jembatan Rt. 68 Gg. Senyum Kel. Karang Anyar	
3	Pemb Drainase Depan Rumah Pak FS RT 61 Jl Aki Balak kel. KrAnyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	88.237.000	735.308,33	62.501.208,33	8.823.699,96	71.324.908,29	16.912.091,71	Pembangunan Drainase Depan Rumah Bapak FS Rt. 61 Jl Aki Balak Kel. Karang Anyar	WILAYAH BARAT
4	Pemb Drainase Samping GGP/Depan Rumah Mama Y RT.59 Jl. Aki Balak Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	88.333.000	736.108,33	62.569.208,33	8.833.299,96	71.402.508,29	16.930.491,71	Pembangunan Drainase Samping GGP/Depan Rumah Mama Y Rt. 59 Jl Aki Balak Kel. Karang Anyar	WILAYAH BARAT
5	Pemb Drainase Buka Tutup RT.7 Gg Slamet Riyadi Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	43.883.000	365.691,67	31.083.791,67	4.388.300,04	35.472.091,71	8.410.908,29	Pembangunan Drainase Buka Tutup Rt. 7 Gang Slamet Riyadi Kel. karang Anyar	WILAYAH BARAT
6	Pemb Drainase RT.62 Gg Matahari Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	176.794.000	1.473.283,33	125.229.083,33	17.679.399,96	142.908.483,29	33.885.516,71	Pembangunan Drainase Rt. 62 Gang Matahari Kel Karang Anyar	WILAYAH BARAT
7	Pemb Drainase RT. 65 Jl. Cempaka Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	176.684.000	1.472.366,67	125.151.166,67	17.668.400,04	142.819.566,71	33.864.433,29	Pembangunan Drainase Rt. 65 Jl. Cempaka Kel karang Anyar	WILAYAH BARAT
8	Pemb Draains RT 67 Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	176.748.000	1.472.900,00	125.196.500,00	17.674.800,00	142.871.300,00	33.876.700,00	Pembangunan Drainase Rt 67 Kel. Karang Anyar	WILAYAH BARAT
9	Pemb drainase siring Penahan Tanah RT.27 Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.366.000	369.716,67	31.425.916,67	4.436.600,04	35.862.516,71	8.503.483,29	Pembangunan Drainase Siring Penahan tanah Rt. 27 Kel karang Anyar	WILAYAH BARAT
10	Pemb Drainase RT. 65 Jl. Teratai III Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.350.000	369.583,33	31.414.583,33	4.434.999,96	35.849.583,29	8.500.416,71	Pembangunan Drainase Rt 65 Jl. Teratai III Kel karang Anyar	WILAYAH BARAT
11	Perbaikan siring Pondasi Parit RT. 12 Kel Kr. Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.370.000	369.750,00	31.428.750,00	4.437.000,00	35.865.750,00	8.504.250,00	Perbaikan Siring Pondasi Parit Rt 12 Kel karang Anyar	WILAYAH BARAT
12	Pemb siring RT. 3 Gg Bakri II Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.313.000	369.275,00	31.388.375,00	4.431.300,00	35.819.675,00	8.493.325,00	Pembangunan Siring Rt 3 gang Bakri II Kel Karang Anyar	WILAYAH BARAT
13	Pemb siring jalan RT.27 Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.366.000	369.716,67	31.425.916,67	4.436.600,04	35.862.516,71	8.503.483,29	Pembangunan Siring Jalan rt 27 Kel Karang Anyar	WILAYAH BARAT
14	Pemb Cor Deker RT.52 Jl Wijaya Kusuma VII Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.345.000	369.541,67	31.411.041,67	4.434.500,04	35.845.541,71	8.499.458,29	Pembangunan Cor Deker Rt 52 Jl. Wijaya Kusuma VII Kel. Karang Anyar	WILAYAH BARAT
15	Pem drainase RT. 54 Gg Salak Depan Rumah Pak N Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	176.771.000	1.473.091,67	125.212.791,67	17.677.100,04	142.889.891,71	33.881.108,29	Pembangunan Drainase Rt 54 Gang Salak Depan Rumah Bapak N Kel. Karang Anyar	WILAYAH BARAT
16	Pem Drainase RT.60 Jl Sesanip Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	176.737.000	1.472.808,33	125.188.708,33	17.673.699,96	142.862.408,29	33.874.591,71	Pembangunan Drainase Rt 60 Jl. Sesanip Kel. Karang Anyar	WILAYAH BARAT

No.	Uraian	Umur Ekonomis (Bulan)	Masa Manfaat	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Perolehan	Penyusutan Per Bulan	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Nilai Buku	Keterangan	Kelurahan
17	Pemb drainase RT. 55 Jl Aki Balak Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.339.000	369.491,67	31.406.791,67	4.433.900,04	35.840.691,71	8.498.308,29	Pembangunan Drainase Rt. 55 Jl Aki Balak Kel. Karang Anyar	WILAYAH BARAT
18	Pnk siring/Drainase RT.54 Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.332.000	369.433,33	31.401.833,33	4.433.199,96	35.835.033,29	8.496.966,71	Peningkatan Siring/Drainase Rt. 54 Kel. Karang Anyar	WILAYAH BARAT
19	Pemb Drainase RT 68 Gg slamet Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	66.277.000	552.308,33	46.946.208,33	6.627.699,96	53.573.908,29	12.703.091,71	Pembangunan Drainase Rt 68 Gang damai Kel. Karang Anyar	WILAYAH BARAT
20	Pnk Gorong2 RT.6 (Rofiq) Kel. Kr Rejo	600	50	31/12/2016	13/4/2066	48.783.000	81.305,00	6.910.925,00	975.660,00	7.886.585,00	40.896.415,00	Peningkatan Gorong - gorong Rt 6 (Rofiq) Kelurahan Karang rejo	WILAYAH BARAT
21	Pemb Flat Deker RT. 9 Kel Kr rejo	120	10	31/12/2016	9/11/2026	61.764.000	514.700,00	43.749.500,00	6.176.400,00	49.925.900,00	11.838.100,00	Pembangunan Flat Deker Rt 9 Kelurahan karang rejo	WILAYAH BARAT
22	Pemb Drainase RT.70 Jl Teratai Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	66.236.000	551.966,67	46.917.166,67	6.623.600,04	53.540.766,71	12.695.233,29	pembangunan drainase rt 70 jl. Teratai kel.kr. Anyar	WILAYAH BARAT
23	Pemb Drainase RT.70 Jl Teratai Kel Kr Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.357.000	369.641,67	31.419.541,67	4.435.700,04	35.855.241,71	8.501.758,29	pembangunan drainase rt 70 kel. Kr. Anyar	WILAYAH BARAT
24	Pemb Drainase dan Pnk Bahu Jalan Rt. 27 Kel Kr Anyar Pantai	120	10	31/12/2016	9/11/2026	176.820.000	1.473.500,00	125.247.500,00	17.682.000,00	142.929.500,00	33.890.500,00	Pembangunan Drainase dan Peningkatan Bahu Jalan Rt 27 Kel Karang Anyar Pantai	WILAYAH BARAT
25	Pemb Drainase RT. 32 Depan Rumah H T Kel Kr Anyar Pantai	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.350.000	369.583,33	31.414.583,33	4.434.999,96	35.849.583,29	8.500.416,71	Pembangunan Drainase Rt 32 Depan Rumah H T Kel karang Anyar Pantai	WILAYAH BARAT
26	Pemb Drainase RT. 22 Depan Rumah H. M Kel Kr Anyar Pantai	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.320.000	369.333,33	31.393.333,33	4.431.999,96	35.825.333,29	8.494.666,71	Pembangunan Drainase Rt 22 Depan Rumah H. M Kel Karang Anyar Pantai	WILAYAH BARAT
27	Pemb Drainase RT.27 Blkg Rumah H Y Alm Kel Kr Anyar Pantai	120	10	31/12/2016	9/11/2026	61.840.000	515.333,33	43.803.333,33	6.183.999,96	49.987.333,29	11.852.666,71	Pembangunan Drainase Rt 27 Belakang Rumah H. Y Alm. Kel. Karang Anyar Pantai	WILAYAH BARAT
28	Pemb Plat Deker RT.24 Kel Kr Anyar Pantai	120	10	31/12/2016	9/11/2026	61.720.000	514.333,33	43.718.333,33	6.171.999,96	49.890.333,29	11.829.666,71	Pembangunan Plat Decker Rt. 24 Kel Karang Anyar Pantai	WILAYAH BARAT
29	Pemb Plat Decker RT. 26 Gg Kakap Kel Kr, Anyar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	61.820.000	515.166,67	43.789.166,67	6.182.000,04	49.971.166,71	11.848.833,29	Pembangunan Plaat Decker Rt 26 Gang Kakap Kel. Karang Anyar Pantai	WILAYAH BARAT
30	Pemb Plat Decker RT. 5 Kel Kr, Anyar Pantai	120	10	31/12/2016	9/11/2026	61.820.000	515.166,67	43.789.166,67	6.182.000,04	49.971.166,71	11.848.833,29	Pembangunan Plat Decker Rt 5 Kel. Karang Anyar Pantai	WILAYAH BARAT
31	Pemb Drainase RT. 24 Kel Kr Anyar Pantai	120	10	31/12/2016	9/11/2026	61.830.000	515.250,00	43.796.250,00	6.183.000,00	49.979.250,00	11.850.750,00	Pembangunan Drainase Rt 24 Kel. Karang Anyar pantai	WILAYAH BARAT
32	Pemb Drainase RT. 20 Jl. Mitra Kel. Kr Anyar Pantai	120	10	31/12/2016	9/11/2026	137.400.000	1.145.000,00	97.325.000,00	13.740.000,00	111.065.000,00	26.335.000,00	Pembangunan Drainase Rt 20 Jl. Mitra Kel. Karang Anyar Pantai	WILAYAH BARAT
33	Pemb Drainase RT. 17 Kel. Kr Anyar Pantai	120	10	31/12/2016	9/11/2026	61.830.000	515.250,00	43.796.250,00	6.183.000,00	49.979.250,00	11.850.750,00	pembangunan drainase rt 17 kel kr. Anyar pantai	WILAYAH BARAT
34	Pemb Drainase RT.17 samping rumah Bapak M Kel Kr Anyar Pantai	120	10	31/12/2016	9/11/2026	176.820.000	1.473.500,00	125.247.500,00	17.682.000,00	142.929.500,00	33.890.500,00	pembangunan drainase rt 17 samping rumah bapak M kel . Kr. Anyar pantai	WILAYAH BARAT
35	Drainase Kel Selumit	120	10	31/12/2016	9/11/2026	93.905.000	782.541,67	66.516.041,67	9.390.500,04	75.906.541,71	17.998.458,29	Drainasae Kelurahan Selumit	WILAYAH TENGAH

No.	Uraian	Umur Ekonomis (Bulan)	Masa Manfaat	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Perolehan	Penyusutan Per Bulan	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Nilai Buku	Keterangan	Kelurahan
36	Siring dan drainase RT. 4 Gg Perusda Kel Selumit	120	10	31/12/2016	9/11/2026	79.848.000	665.400,00	56.559.000,00	7.984.800,00	64.543.800,00	15.304.200,00	Siring dan Drainase Rt 4 Gg. Perusda Kelurahan Selumit	WILAYAH TENGAH
37	Siring dan Drainase RT. 4 dan RT, 15 Kel Selumit	120	10	31/12/2016	9/11/2026	79.836.000	665.300,00	56.550.500,00	7.983.600,00	64.534.100,00	15.301.900,00	Siring dan Drainase Rt 4 dan Rt 15 Kelurahan Selumit	WILAYAH TENGAH
38	Drainase RT 19 Sebengkok	120	10	31/12/2016	9/11/2026	39.821.000	331.841,67	28.206.541,67	3.982.100,04	32.188.641,71	7.632.358,29	Drainase Rt 19 Sebegkok	WILAYAH TENGAH
39	Drainase RT. 31 Rusunawa	120	10	31/12/2016	9/11/2026	79.769.000	664.741,67	56.503.041,67	7.976.900,04	64.479.941,71	15.289.058,29	Drainase Rt 31 Rusunawa	WILAYAH TENGAH
40	Drainase samping Rumah P.A RT.9 Ladang dalam Kel Pamusian	120	10	31/12/2016	9/11/2026	49.860.000	415.500,00	35.317.500,00	4.986.000,00	40.303.500,00	9.556.500,00	Drainasse Samping Rumah P. Amat Rt. 9 Ladang Dalam Kelurahan pamusian	WILAYAH TENGAH
41	Drainase samping Rumah P.ES RT.9 Ladang dalam Kel Pamusian	120	10	31/12/2016	9/11/2026	84.736.000	706.133,33	60.021.333,33	8.473.599,96	68.494.933,29	16.241.066,71	Drainase Samping Rumah pak ES Rt 9 ladang Dalam Kelurahan Pamusian	WILAYAH TENGAH
42	Drainase RT. 23 Gg 3 Kel Pamusian	120	10	31/12/2016	9/11/2026	39.867.000	332.225,00	28.239.125,00	3.986.700,00	32.225.825,00	7.641.175,00	Drainase Rt 23 Gg. 3 Kelurahan Pamusian	WILAYAH TENGAH
43	Precast RT.16 Gg. Etam 5 Kel Pamusian	120	10	31/12/2016	9/11/2026	39.876.000	332.300,00	28.245.500,00	3.987.600,00	32.233.100,00	7.642.900,00	Precast Rt 16 Gg. Etam 5 Kelurahan pamusian	WILAYAH TENGAH
44	Precast RT.23 Jl. Imam Bonjol Kel Pamusian	120	10	31/12/2016	9/11/2026	39.875.000	332.291,67	28.244.791,67	3.987.500,04	32.232.291,71	7.642.708,29	Precast Rt 23 Jl. Imam Bonjol Kelurahan pamusian	WILAYAH TENGAH
45	Drainase dan Semenisasi RT. 28 Jl. Danau Jempang Mangga Kel.Pamusian	120	10	31/12/2016	9/11/2026	79.845.000	665.375,00	56.556.875,00	7.984.500,00	64.541.375,00	15.303.625,00	Drianse dan Semenisasi Rt 28 Jl. danau Jempang Mangga Kelurahan pamusian	WILAYAH TENGAH
46	Drainase samping Rumah Bapak LS	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.824.000	373.533,33	31.750.333,33	4.482.399,96	36.232.733,29	8.591.266,71	Drainase Samping Rumah Bapak LS	WILAYAH TENGAH
47	Drainase dan Semenisasi Samping Rumah Bpk YK RT.26 Kel Pamusian	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.698.000	372.483,33	31.661.083,33	4.469.799,96	36.130.883,29	8.567.116,71	Drinase dan Semenisasi Samping Rumah bapak YK Rt 26 Pamusian (ladang Dalam)	WILAYAH TENGAH
48	Drainase/siring blkg rumH FP RT.26 zkel Pamusian	120	10	31/12/2016	9/11/2026	54.859.000	457.158,33	38.858.458,33	5.485.899,96	44.344.358,29	10.514.641,71	Draianse/Siring Belakang Rumah FP Rt 26 pamusian (ladang Dalam)	WILAYAH TENGAH
49	Drainase RT.31 Kel Pamusian	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.857.000	373.808,33	31.773.708,33	4.485.699,96	36.259.408,29	8.597.591,71	Drainase Rt 31 Kelurahan pamusian	WILAYAH TENGAH
50	Drainase RT.15 samping rumah Y Kamp 1	120	10	31/12/2016	9/11/2026	169.801.000	1.415.008,33	120.275.708,33	16.980.099,96	137.255.808,29	32.545.191,71	Drainase Rt 15 Samping Rumah Y Kp 1	WILAYAH TENGAH
51	Drainase RT.15 Perum Kamp 1	120	10	31/12/2016	9/11/2026	169.813.000	1.415.108,33	120.284.208,33	16.981.299,96	137.265.508,29	32.547.491,71	Drainase RT. 15 Perumahan Kp I	WILAYAH TENGAH
52	Drainase RT.15 & 20 Jl Matahari Kel Ksmp I Skip	120	10	31/12/2016	9/11/2026	94.809.000	790.075,00	67.156.375,00	9.480.900,00	76.637.275,00	18.171.725,00	Drainase Rt 15 & rt 20 Jl. Matahari Kel. Kap. I skip	WILAYAH TENGAH
53	Drainase Samping Rumah Bapak N Rt.15 & RT.16 Kel Kamp 1 Skip	120	10	31/12/2016	9/11/2026	169.798.000	1.414.983,33	120.273.583,33	16.979.799,96	137.253.383,29	32.544.616,71	Drainase Samping Rumah Bapak nasir Rt 15 & Rt 16 Kel. Kampung Satu Skip	WILAYAH TENGAH
54	Drainase RT.10 Kampung 1 Skip	120	10	31/12/2016	9/11/2026	39.838.000	331.983,33	28.218.583,33	3.983.799,96	32.202.383,29	7.635.616,71	Drainasse Rt 10 Kp I Skip	WILAYAH TENGAH
55	Drainase RT.18 Kampung 1 Skip	120	10	31/12/2016	9/11/2026	39.955.000	332.958,33	28.301.458,33	3.995.499,96	32.296.958,29	7.658.041,71	Drainase Rt 18 Kampung Satu Skip	WILAYAH TENGAH
56	Drainase RT.18 Jl. Purna Bhakti Gg Syukur 3 Kp.1 (Budidaya lele)	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.821.000	373.508,33	31.748.208,33	4.482.099,96	36.230.308,29	8.590.691,71	Drainase Rt 18 Jl. Purna Bhakti gg. Sukur 3 Kp I (Budidaya Lele)	WILAYAH TENGAH
57	Drainase Rt.19 Kamp 1 Skip Depan Rumah Mus	120	10	31/12/2016	9/11/2026	44.854.000	373.783,33	31.771.583,33	4.485.399,96	36.256.983,29	8.597.016,71	Drainase RT. 19 KP ISKIP DEPAN RUMAH MUS	WILAYAH TENGAH

No.	Uraian	Umur Ekonomis (Bulan)	Masa Manfaat	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Perolehan	Penyusutan Per Bulan	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Nilai Buku	Keterangan	Kelurahan
58	Pemb Drainase/Siring Timbun Gg Tudai RT.17 Kel Lingkas Ujung	120	10	31/12/2016	9/11/2026	160.146.000	1.334.550,00	113.436.750,00	16.014.600,00	129.451.350,00	30.694.650,00	Pembanguan drinase/Siring Timbun gang Tudai Rt. 17 Kel Lingkas Ujung	WILAYAH TIMUR
59	Pemb Drainase Ilinisasi Gg Sakura RT.8 Kel Lks Ujung	120	10	31/12/2016	9/11/2026	126.133.000	1.051.108,33	89.344.208,33	12.613.299,96	101.957.508,29	24.175.491,71	Pembangunan Drainase Ulinisasi Gang Sakura Rt 8 Kel Lingkas Ujung	WILAYAH TIMUR
60	Pembangunan Siring Rt 2 Kel. Lingkas Ujung (Samping Rumah H. En)	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.201.000	351.675,00	29.892.375,00	4.220.100,00	34.112.475,00	8.088.525,00	Pembangunan Siring Rt 2 Kel. Lingkas Ujung (Samping Rumah H. En)	WILAYAH TIMUR
61	Pemb Siring RT.4 Kel Lks Ujung	120	10	31/12/2016	9/11/2026	62.880.000	524.000,00	44.540.000,00	6.288.000,00	50.828.000,00	12.052.000,00	Pembangunan Siring Rt 4 Kel. Lingkas Ujung (Samping rumah Bu he)	WILAYAH TIMUR
62	Pemb Siring RT. 12 Kel. Kp 6	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.056.000	350.466,67	29.789.666,67	4.205.600,04	33.995.266,71	8.060.733,29	Pembangunan Siring rt. 12 Kel. Kampung Enam	WILAYAH TIMUR
63	Pemb Drainase samping Eumah Pak AS RT.12 Kel. Kp. Vi	120	10	31/12/2016	9/11/2026	39.366.000	328.050,00	27.884.250,00	3.936.600,00	31.820.850,00	7.545.150,00	Pembangunan Drainase Samping Rumah pak AS Rt. 12 Kel Kampung Enam	WILAYAH TIMUR
64	Pemb siring RT.13 Gn Amal Kel Kp 6	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.028.000	350.233,33	29.769.833,33	4.202.799,96	33.972.633,29	8.055.366,71	Pembangunan Siring Rt. 13 gunung Amal Kel Kmapung Enam	WILAYAH TIMUR
65	Pemb drainase RT. 9 Jl. Gn Kerinci Kel Kp 6	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.054.000	350.450,00	29.788.250,00	4.205.400,00	33.993.650,00	8.060.350,00	Pembangunan Drainase rt 9 Jl. Gunung Kerinci Kel Kampung Enam	WILAYAH TIMUR
66	Pemb Drainase RT.3 Jl. Gg 2 Kel. Kamp. 6	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.022.000	350.183,33	29.765.583,33	4.202.199,96	33.967.783,29	8.054.216,71	Pembangunan Driense Rt 3 Jl. Gang 2 Kel Kampung Enam	WILAYAH TIMUR
67	Pemb siring RT.09 Jl. Lingkar Kel. Kp 6	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.034.000	350.283,33	29.774.083,33	4.203.399,96	33.977.483,29	8.056.516,71	Pembangunan Siring Rt 9 Jalan Lingkar Kel Kampung Enam	WILAYAH TIMUR
68	Pemb Drainase RT. 10 Jl. Gn Kerinci Gg Mawar 1 &2 Kel Kamp 6	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.008.000	350.066,67	29.755.666,67	4.200.800,04	33.956.466,71	8.051.533,29	Pembangunan Drainase Rt. 10 Jl. Gunung Kerinci Gang mawar 1 & 2 Kel Kampung Enam	WILAYAH TIMUR
69	Pemb drainase depan Rumah Pak Mu Rt.6 Kel Gn Lingkas	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.073.000	350.608,33	29.801.708,33	4.207.299,96	34.009.008,29	8.063.991,71	Pembangunan Drainase Depan Rumah pak Mu Rt. 6 Kel. Gunung Lingkas	WILAYAH TIMUR
70	Pemb. Siring RT.8 Kel. Gn. Lingkas	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.087.000	350.725,00	29.811.625,00	4.208.700,00	34.020.325,00	8.066.675,00	Pembangunan Siring Rt 8 Kel Gunung Lingkas	WILAYAH TIMUR
71	Pemb. Siring RT.8 Kel. Gn. Lingkas	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.065.000	350.541,67	29.796.041,67	4.206.500,04	34.002.541,71	8.062.458,29	Pembangunan Driense Rt 8 Kel. Gunung Lingkas	WILAYAH TIMUR
72	Pemb Drainase RT.13 Kel. Gn Lingkas	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.061.000	350.508,33	29.793.208,33	4.206.099,96	33.999.308,29	8.061.691,71	Pembangunan Drainase Rt 11 Kel. gunung Lingkas	WILAYAH TIMUR
73	Pemb drainase RT.11 Kel Gn Lingkas	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.061.000	350.508,33	29.793.208,33	4.206.099,96	33.999.308,29	8.061.691,71	Pembangunan Drainase rt 13 Kel Gunung Lingkas	WILAYAH TIMUR
74	Pemb Drainase samping Rumah Pak A/Y RT.1 Kel Gn. Lingkas	120	10	31/12/2016	9/11/2026	39.369.000	328.075,00	27.886.375,00	3.936.900,00	31.823.275,00	7.545.725,00	Pembangunan Drainase Samping Rumah Pak A/Y Rt 1 Kel Gunung Lingkas	WILAYAH TIMUR
75	Pemb Drainase RT. 11 Kel Gn Lingkas	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.061.000	350.508,33	29.793.208,33	4.206.099,96	33.999.308,29	8.061.691,71	Pembangunan Drainase Rt 11 Kel Gunung Lingkas	WILAYAH TIMUR
76	Pemb. Siring RT.3 Kel. Gn. Lingkas	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.087.000	350.725,00	29.811.625,00	4.208.700,00	34.020.325,00	8.066.675,00	Pembangunan Siring rt 3 Kel Gunung Lingkas	WILAYAH TIMUR
77	Drainase RT.11 Samping Kuburan Cina	120	10	31/12/2016	9/11/2026	41.955.000	349.625,00	29.718.125,00	4.195.500,00	33.913.625,00	8.041.375,00	Pembangunan Siring Rt 11 Samping Kuburan cina	WILAYAH TIMUR

No.	Uraian	Umur Ekonomis (Bulan)	Masa Manfaat	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Perolehan	Penyusutan Per Bulan	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Nilai Buku	Keterangan	Kelurahan
78	Pemb plat Dekker RT.1 Gg Agathis Kel Gn Lks (Depan H.Latif)	120	10	31/12/2016	9/11/2026	58.896.000	490.800,00	41.718.000,00	5.889.600,00	47.607.600,00	11.288.400,00	Pembangunan Plat Ddeker Rt 1 gang Agatis Kel. Gunung Lingkas (Depan H Latif)	WILAYAH TIMUR
79	Pengawasan Pembangunan Saluran Gunung Lingkas dan Sekitarnya	120	10	31/12/2016	9/11/2026	49.871.000	415.591,67	35.325.291,67	4.987.100,04	40.312.391,71	9.558.608,29	Pengawasan Pembangunan Saluran Gunung Lingkas dan Sekitarnya	WILAYAH TIMUR
80	Pemb Drainase RT.9 Depan Kapolsek Tarakan Timur Kel Kmp 4	120	10	31/12/2016	9/11/2026	83.743.000	697.858,33	59.317.958,33	8.374.299,96	67.692.258,29	16.050.741,71	Pembangunan Drianse Rt 9 depan Kapolsek Tarakan Timur Kel kampung Empat	WILAYAH TIMUR
81	Pemb Drainase RT.2 Depan Mushola Baitul Mansurin	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.000.000	350.000,00	29.750.000,00	4.200.000,00	33.950.000,00	8.050.000,00	Pembangunan Drinase Rt 2 Depan Mushola Baitul Mansurin	WILAYAH TIMUR
82	Drainase RT.10 Kel Mamburunagn	120	10	31/12/2016	9/11/2026	41.998.000	349.983,33	29.748.583,33	4.199.799,96	33.948.383,29	8.049.616,71	Pembangunan Darinase rt 10 Kel. mamburungan	WILAYAH TIMUR
83	Pemb Drainase Gg Kopral Kel Mamburungan	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.030.000	350.250,00	29.771.250,00	4.203.000,00	33.974.250,00	8.055.750,00	Pembangunan Drainase jalan Kopral Kel Mamburungan	WILAYAH TIMUR
84	Pemb Drainase depan Tower Xl menuju Masjid RT.01 Kel. Mamburugan Timur	120	10	31/12/2016	9/11/2026	41.975.000	349.791,67	29.732.291,67	4.197.500,04	33.929.791,71	8.045.208,29	Pembangunan Drainase depan Tower XL Menuju Masjid Rt. 1 Kel. Mamburungan Timur	WILAYAH TIMUR
85	Pemb Drainase RT. 8 Kel. Mamburungan Timur	120	10	31/12/2016	9/11/2026	39.341.000	327.841,67	27.866.541,67	3.934.100,04	31.800.641,71	7.540.358,29	Pembangunan Drainase rt 8 Kel. mamburungan timur	WILAYAH TIMUR
86	Pemb Drainase RT9 Kel Mamburungan Timur	120	10	31/12/2016	9/11/2026	37.862.000	315.516,67	26.818.916,67	3.786.200,04	30.605.116,71	7.256.883,29	Pembangunan Drianse Rt 9 Kel. Mamburungan Timur	WILAYAH TIMUR
87	Pemb drainase RT.10 Kel. Mamburungan Timur	120	10	31/12/2016	9/11/2026	41.924.000	349.366,67	29.696.166,67	4.192.400,04	33.888.566,71	8.035.433,29	Pembangunan Drainasde Rt 10 Kel mamburungan timur (Belakang Ponpes karungan)	WILAYAH TIMUR
88	Pemb Drainase RT.06 Gg Anggrek Jl Amal. Kel Pantai Amal	120	10	31/12/2016	9/11/2026	83.756.000	697.966,67	59.327.166,67	8.375.600,04	67.702.766,71	16.053.233,29	Pembangunan drainase Rt 6 Gang Anggrek Jl Amal Kel Pantai Amal	WILAYAH TIMUR
89	Pemb Drainase RT.03 Amal Pantai Jalan Pemb Masjid Al Kautsar	120	10	31/12/2016	9/11/2026	42.007.000	350.058,33	29.754.958,33	4.200.699,96	33.955.658,29	8.051.341,71	Pembangunan Drainase Rt 3 Amal pantai jalan Pembangunan Masjid Al - Kautsar	WILAYAH TIMUR
90	Pemb Sal. Drainase RT.09 Gg Hanapiah	120	10	31/12/2016	9/11/2026	86.736.000	722.800,00	61.438.000,00	8.673.600,00	70.111.600,00	16.624.400,00	Drainase Rt. 9 Gg. Hanafiah Kelurahan Juata Laut	WILAYAH UTARA
91	Pemb Drainase RT.10 Gg Muhammad	120	10	31/12/2016	9/11/2026	86.731.000	722.758,33	61.434.458,33	8.673.099,96	70.107.558,29	16.623.441,71	Drainase Rt. 10 Gg. Muhammad Kelurahan Juata Laut	WILAYAH UTARA
92	Pemb Sal. Drainase RT.10 Gg Serawak	120	10	31/12/2016	9/11/2026	73.866.000	615.550,00	52.321.750,00	7.386.600,00	59.708.350,00	14.157.650,00	drainase Rt. 10 gg. Serawak Kelurahan Juata Laut	WILAYAH UTARA
93	Pemb Sal. Drainase RT.1 Dekat Rumah PH Kel Kr Harapan	120	10	31/12/2016	9/11/2026	65.758.000	547.983,33	46.578.583,33	6.575.799,96	53.154.383,29	12.603.616,71	Drainase Rt 1 Dekat Rum PH Kel karang harapan	WILAYAH UTARA
94	Pem Sal. Drainase RT.03&11 Dekat Rumah Bpk La	120	10	31/12/2016	9/11/2026	65.784.000	548.200,00	46.597.000,00	6.578.400,00	53.175.400,00	12.608.600,00	Drainase Rt. 3 dan 11 Dekat Rumah bapak La Kel Karang harapan	WILAYAH UTARA
95	Pemb Sal drainase RT.14 Depan Rumah Pak Ce Ra Juata Permai	120	10	31/12/2016	9/11/2026	86.725.000	722.708,33	61.430.208,33	8.672.499,96	70.102.708,29	16.622.291,71	Drainase Rt. 14 Depan Rumah Pak Ce Ra Juata Permai	WILAYAH UTARA

No.	Uraian	Umur Ekonomis (Bulan)	Masa Manfaat	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Perolehan	Penyusutan Per Bulan	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Nilai Buku	Keterangan	Kelurahan
96	Pemb Sal drainase RT.56 Blkg GPSDI Manuel I Aki Balak	120	10	31/12/2016	9/11/2026	86.758.000	722.983,33	61.453.583,33	8.675.799,96	70.129.383,29	16.628.616,71	Drainase Rt. 56 BelakanPSDI Manuel I Aki Balak	WILAYAH UTARA
97	Pemb Sal drainase RT.4 Depan Rumah MM	120	10	31/12/2016	9/11/2026	86.756.000	722.966,67	61.452.166,67	8.675.600,04	70.127.766,71	16.628.233,29	Siring Rt 4 Depan MM karang Harapan	WILAYAH UTARA
98	Universitas Borneo	480	40	2/11/2007	6/4/2047	29.177.000,00	60.785,42	11.792.370,83	729.425,04	12.521.795,87	16.655.204,13	Kabel Feder	
99	Universitas Borneo	480	40	5/3/2008	8/8/2047	98.800.000,00	205.833,33	39.108.333,33	2.469.999,96	41.578.333,29	57.221.666,71	Kabel Feding	
Jumlah						**7.080.251.000,00**		**4.788.046.754,11**	**671.972.984,40**	**5.460.019.738,51**	**1.620.231.261,49**		

DAFTAR SINGKATAN

A

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ATB	:	Aset Tak Berwujud
ATR	:	Agraria dan Tata Ruang

B

BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKPAD	:	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPPRD	:	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
BUD	:	Bendahara Umum Daerah

C

CaLK	:	Catatan Atas Laporan Keuangan
CV	:	*Commanditaire Vennotschaap*

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DBEK	:	Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan
Disbudporapar	:	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata
Disdik	:	Dinas Pendidikan
DK	:	Dasar Kesimpulan

DKUKMP	:	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
DPKUKM	:	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRKPP	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
DPT	:	Dinding Penahan Tanah
DPTK	:	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
DPUPR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

G

GU	:	Ganti Uang

J

JIJ	:	Jalan Irigasi dan Jaringan

K

KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

L

LHA	:	Laporan Hasil Audit
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LLK	:	Lembaga Latihan Kerja
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LS	:	Langsung

N

NRV	:	*Net Realizable Value*

P

P2	:	Perdesaan dan Perkotaan
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBJT	:	Pajak Barang dan Jasa Tertentu
Perda	:	Peraturan Daerah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Plh.	:	Pelaksana harian
Plt.	:	Pelaksana tugas
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PTK	:	Pejabat Teknis Kegiatan

R

RBA	:	Rencana Bisnis dan Anggaran
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RSUKT	:	Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

S

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SIMTN	:	Surat Izin Memakai Tanah Negara
SIP	:	Sistem Informasi Pengelolaan
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

SK	:	Surat Keputusan
SKP2K	:	Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
SKP2KS	:	Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKP-Daerah	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKRD	:	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SMPN	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri
SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kelola
SP2B	:	Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPP	:	Surat Permintaan Pembayaran
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	:	Surat Perintah Tugas
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSUK	:	Syarat-syarat Umum Kontrak
STA	:	*Station*
STS	:	Surat Tanda Setoran

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TPKD	:	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPTGR	:	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
TU	:	Tata Usaha

U

UP	:	Uang Persediaan

UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah

W

WP	:	Wajib Pajak
WR	:	Wajib Retribusi

RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Direktorat Jenderal/Perwakilan BPK: Direktorat Jenderal PKN VI/PerwakiIan Provinsi Kalimantan Utara

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	**Penyusunan Laporan Keuangan**				
1	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan tentang Koreksi Kesalahan Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Kepala BPKPAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Akuntansi supaya menyesuaikan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tarakan terkait koreksi kesalahan mengacu pada PSAP Nomor 10.	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala BPKPAD; b. Surat Kepala BPKPAD kepada Kepala Bidang Akuntansi; dan c. Kebijakan Akuntansi yang telah memedomani SAP Pernyataan Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan.	Desember 2026	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2	Kesalahan Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memedomani pedoman penyusunan APBD dan kebijakan terkait lainnya dalam mengevaluasi RKA dan RKA Perubahan BLUD.	a. Surat perintah Wali Kota kepada Sekretaris Daerah; dan b. RKA yang berisi penganggaran penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi dan penerimaan atas pemanfaatan aset daerah sebagai retribusi daerah.	Januari 2026	
B	**Pendapatan**				
1	Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tidak Tertib dan Terdapat Penggunaan Langsung Pendapatan Retribusi	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar: a. Menetapkan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023; b. Memerintahkan Kepala DPUPR untuk: 1) Menetapkan petugas pemungut retribusi pada UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi melalui Surat Keputusan (SK); 2) Menginstruksikan Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi supaya mengusulkan anggaran biaya operasional UPT sesuai kebutuhan riil dalam penyusunan RKA SKPD dan memedomani ketentuan yang	a. Peraturan Wali Kota Tarakan sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023; b. Surat perintah Wali Kota kepada Kepada DPUPR; c. SK Penunjukan Petugas Pemungut; d. Surat instruksi Kepala DPUR kepada Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi; e. Dokumen usulan anggaran biaya operasional UPT Laboratorium Uji Bahan Konstruksi sesuai kebutuhan rill dan RKA SKPD yang menunjukkan usulan tersebut sudah diakomodir; dan	Juni 2026	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		berlaku dalam pengelolaan retribusi; dan 3) Menginstruksikan Kepala Subbagian TU selaku petugas pemungut memedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan retribusi pemakaian laboratorium.	f. Surat instruksi Kepala DPUR kepada Kepala Subbagian TU selaku petugas pemungut.		
2	Pengelolaan Retribusi Los dan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerinthakan Kepala DKUKMP untuk: a. Mengendalikan dan mengawasi pemungutan retribusi pada satuan kerja yang dipimpinnya dan melakukan penutupan kas pada Bendahara Penerimaan setiap bulan; b. Menginstruksikan Kepala Bidang Pengembangan Ekspor supaya melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan retribusi parkir dan retribusi los; c. Menginstruksikan petugas pemungut dan pendamping petugas pemungut supaya: 1) Memedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan retribusi; dan	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala DKUKMP; b. BA Cash Opname Bendahara Penerimaan DKUKMP; c. Surat Kepala DKUKMP kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekspor; d. Laporan pengawasan dan evaluasi atas ketertiban pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Los; e. Laporan pemutakhiran data wajib rertibusi (WR) los dan kios ; f. Laporan sosialisasi tentang mekanisme pemungutan retribusi Los dan kios kepada pedagang di pasar; dan g. Surat Kepala DKUKMP kepada Bendahara Penerimaan. h. STS senilai Rp34.200.000,00 disetor ke Kas Daerah	Desember 2025	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		2) Menyetorkan kekurangan penerimaan retribusi senilai Rp34.200.000,00 ke Kas Daerah.			
3	Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak sesuai Perjanjian Kerja Sama dan Ketentuan yang Berlaku	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan: a. Kepala Dinas Perhubungan untuk: 1) Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK supaya memperbaharui perjanjian kerja sama pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan terkait mekanisme penyetoran penerimaan dari Perumda Aneka Usaha; 2) Menganggarkan Belanja Barang dan Jasa dalam memenuhi hak pihak kedua sesuai perjanjian kerja sama pengelolaan pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang menurut ketentuan harus disetor secara bruto ke Kas Daerah terlebih dahulu; 3) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam menyusun dan menetapkan mekanisme penerimaan pendapatan dari hasil perjanjian kerja sama agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala Dinas Perhubungan; b. Surat perintah Wali Kota kepada Direktur Perumda Aneka Usaha ; c. Surat Kepala Dinas Perhugungan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan; d. TL terkait PKS sudah mengatur mekanisme penyetoran penerimaan dari Perumda Aneka Usaha (bruto); e. RKA yang mencantumkan Belanja Barang dan Jasa – Jasa kepada Pihak Ketiga dalam memenuhi hak pihak kedua sesuai PKS; f. Aturan terkait menetapkan mekanisme penerimaan pendapatan dari hasil PKS; g. Laporan pembinaan dan pengawasan kepada Perumda Aneka Usaha; h. Laporan penyelenggaraan dan setoran retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum setiap 1 (satu) bulan; dan	Desember 2025	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		4) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perumda Aneka Usaha selaku pihak kedua dalam upaya pencapaian target penerimaan pendapatan dari Retribusi Parkir Tepi Jalan; 5) Menginstruksikan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan untuk: a) Mengawasi pelaksanaan kewajiban dari Perumda Aneka Usaha supaya menyerahkan laporan penyelenggaraan dan setoran retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum setiap 1 (satu) bulan; b) Menyusun kertas kerja perhitungan target pendapatan dari pengelolaan retribusi parkir tepi jalan dan membahasnya dengan Perumda Aneka Usaha sebelum disepakati melalui perjanjian kerja sama. b. Direktur Perumda Aneka Usaha untuk: 1) Memedomani kewajiban penyetoran bagi hasil kepada Pemerintah Kota Tarakan; 2) Memenuhi target penerimaan dari Pendapatan Retribusi Parkir di	i. KK target pendapatan dari pengelolaan retribusi parkir tepi jalan; j. STS pengembalian senilai Rp22.802.428,10 ke Kas Daerah.		

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		Tepi Jalan sesuai perjanjian kerja sama; dan 3) Menyetorkan bagi hasil pendapatan retribusi Tahun 2024 senilai Rp22.802.428,10 ke Kas Daerah.			
4	Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Oleh Bidang Pendapatan BPKPAD Belum Memadai	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Kepala BPKPAD untuk menginstruksikan: a. Kepala Bidang Pendapatan supaya: 1) Melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan PBJT makanan dan/atau minuman (pajak restoran) sesuai potensi pajak, baik yang sudah terdata maupun belum terdata; 2) Melakukan verifikasi atas 875 WP yang tidak pernah menyampaikan SPTPD kepada Bidang Pendapatan BPKPAD; dan b. Kepala Subbidang Pengawasan Kepatuhan supaya menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku hasil evaluasi dan verifikasi atas 875 WP yang tidak tertib melaporkan SPTPD.	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala BPKPAD; b. Surata Kepala BPKPAD kepada Kepala Bidang Pendapatan; c. Laporan pengendalian dan pengawasan pengelolaan PBJT makanan dan/atau minuman (pajak restoran) sesuai potensi pajak baik yang sudah terdata maupun belum terdata; d. Surat Kepala BPKPAD kepada Kasubid Perencanaan, Pendataan, dan Pelaporan; e. Laporan evaluasi dan verifikasi atas 875 WP yang tidak pernah menyampaikan SPTPD; f. Surat Kepala BPKPAD kepada Kepala Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan; dan g. TL atas hasil evaluasi dan verifikasi WP yang tidak tertib dalam melaporkan SPTPD.	Januari 2026	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
C	**Belanja**				
1	Kelebihan Pembayaran senilai Rp88.715.922,29 dan Potensi Kelebihan Pembayaran senilai Rp19.425.001,23 atas Honorarium Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Direktur RSUKT untuk menginstruksikan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pejabat Keuangan RSUKT untuk: a. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas senilai Rp23.775.960,81 dan menyetorkan ke Kas RSUKT; b. Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas senilai Rp7.403.762,71 pada pembayaran honorarium berikutnya; dan c. Memedomani ketentuan tentang komponen acuan dasar perhitungan honorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas.	a. Surat perintah Wali Kota kepada Direktur RSUKT; b. Surat Direktur RSUKT kepada Pejabat Teknis Keuangan dan Pejabat Keuangan ; c. STS pengembalian ke Kas Daerah; dan d. Pembayaran honorarium bulan Januari s.d Juni 2025 sudah memedomani ketentuan terkait komponen acuan dasar.	Juni 2025	
2	Kekurangan Volume Tiga Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp34.888.382,62	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Kepala Disdik dan DPUPR untuk menginstruksikan PPK supaya:	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala Dinas Pendidikan dan DPUPR; b. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan DPUPR kepada PPK; dan	Juni 2027	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		a. Melaksanakan tupoksinya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia; dan b. Memproses kelebihan pembayaran masing-masing senilai Rp16.074.499,88 dan Rp18.813.882,74 serta menyetorkan ke kas daerah.	c. STS pengembalian senilai Rp34.888.382,62 ke Kas Daerah.		
3	Kelebihan Pembayaran atas Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sembilan SKPD senilai Rp455.082.256,00	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan: a. Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan PPK - SKPD supaya menguji kebenaran material atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas; b. Kepala Dinas Perikanan untuk menginstruksikan PPTK supaya berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan; dan c. Pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp455.082.256,00 ke Kas Daerah.	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala SKPD terkait; b. Surat Kepala SKPD terkait kepada PPK SKPD; c. Surat Kepala Dinas Perikanan kepada PPTK; d. Surat Wali Kota kepada Pelaksana Perjalanan Dinas; dan e. Pengembalian senilai Rp455.082.256,00 ke Kas Daerah.	Juni 2027	
4	Pemberian Bantuan Biaya Transportasi Berobat pada Dinas Kesehatan Belum Sepenuhnya Diberikan kepada Penerima yang Memenuhi Kriteria Penerima Bantuan Sosial	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Kepala Dinkes untuk menginstruksikan PPTK bantuan biaya berobat dan transportasi berobat supaya memedomani ketentuan	a. Suat perintah Wali Kota Tarakan kepada Kepala Dinkes; dan b. Surat Kepala Dinkes kepada PPTK; dan	Desember 2025	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		dalam melakukan penyaluran bantuan sosial.	c. Keterbukaan informasi terkait adanya pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat.		
5	Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Modal pada Tiga SKPD senilai Rp2.814.600.365,81 dan Kelebihan Pembayaran atas Penambahan Volume Pekerjaan Menggunakan Harga Satuan Timpang pada Empat Paket Pekerjaan senilai Rp106.524.328,11	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan Kepala Disbudporapar, Disdik dan DPUPR untuk menginstruksikan PPK supaya: a. Melaksanakan tupoksinya mengendalikan pelaksanaan kontrak oleh penyedia; b. Melakukan reviu atas dokumen MC dan *backup data* yang disusun oleh Penyedia; dan c. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.921.124.693,92 dan menyetorkan ke Kas Daerah.	a. Surat perintah kepada Kepala Disbudporapar, Disdik, dan DPUPR; b. Surat Disbudporapar. Disdik, dan DPUPR kepada PPK; dan c. Pengembalian senilai Rp2.921.124.693,92 ke Kas Daerah.	Juni 2027	
6	Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan: a. Kepala Disdik untuk menginstruksikan PPK supaya: 1) Mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam melaksanakan pembayaran sesuai dengan hasil pekerjaan dalam kontrak; 2) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan SKPD terkait lainnya untuk mengatasi dampak	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kepada Disdik dan DPUPR; b. Surat Kepala Disdik kepada PPK; c. Hasil penilaian ahli atas kelayakan konstruksi bangunan sesuai fungsi dan peruntukan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Mamburungan – Karungan; d. Pengembalian senilai Rp1.088.742.701,69 di setor ke Kas Daerah;	Juni 2026	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		dari adanya pelaksanaan pekerjaan yang mendahului kontrak; 3) Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp1.088.742.701,69 dan menyetorkan ke kas daerah; dan b. Kepala DPUPR untuk menunjuk penilai ahli melakukan penilaian atas kelayakan konstruksi bangunan sesuai fungsi dan peruntukan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Mamburungan - Karungan.	e. Hasil rapat koordinasi OPD terkait untuk mengatasi dampak dari adanya pelaksanaan pekerjaan yang mendahului kontrak (Pengembalian senilai Rp1.088.742.701,69); dan f. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi.		
D	**ASET**				
1	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah Belum Optimal	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas permasalahan Piutang PBB-P2 dan memerintahkan kepala BPKPAD untuk menginstruksikan Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan supaya meningkatkan pengelolaan atas piutang pajak dan retribusi daerah yang berada dalam pengelolaannya.	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala BPKPAD; b. Surat dari Kepala BPKPAD kepada Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan; c. TL rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas permasalahan Piutang PBB-P2; dan d. Hasil verifikasi piutang Pajak Daerah selain PBB-P2 dan Piutang Retribusi Daerah.	Juni 2026	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2	Penatausahaan dan Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kota Tarakan Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan: a. Kepala DKUKMP selaku ketua pokja DBEK supaya: 1) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan tunggakan DBEK yang menjadi tanggung jawabnya; dan 2) berkoordinasi dengan Bank Kaltimtara selaku bank pelaksana penyaluran dan penerimaan DBEK agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama. b. Kepala Bidang Akuntansi BPKPAD agar: 1) menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan memedomani Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir; dan 2) memperhitungkan nilai agunan/jaminan sebagai komponen pengurang penyisihan DBEK berkategori diragukan dan macet.	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala DKUKMP; b. Surat perintah Wali Kota kepada Bidang Akuntasni BPKPAD; c. Kebijakan Akuntansi yang sudah memedomani Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir; dan d. Hasil koordinasi dengan Bank Kaltimtara selaku bank pelaksana penyaluran dan penerimaan DBEK agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.	Desember 2026	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan Belum Memadai	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan: a. Kepala SKPD terkait untuk: melakukan inventarisasi, pencatatan, pengamanan, pemeliharaan, pemantauan atas pemanfaatan dan penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya, serta mengusulkan penghapusan aset dalam kondisi rusak berapat kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang; b. Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKPAD untuk: 1) Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan dari Pengguna Barang; dan 2) Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD. c. Pengurus Barang pada SKPD terkait untuk: 1) Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD secara periodik; 2) Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala SKPD terkait ; b. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKPAD; c. Surat perintah Wali Kota kepada Pengurus Barang pada SKPD terkait; d. Hasil Inventarisasi BMD pada SKPD terkait, e. Usulan penghapusan asset rusak berat ke Sekda; dan f. Laporan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD.	Desember 2025	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		3) Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD.			
4	Pengelolaan Aset Tak Berwujud Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerinthakan: a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang untuk melakukan pengendalian atas kegiatan inventarisasi, pencatatan, pengamanan, pemeliharaan, pengajuan usul pemusnahan dan penghapusan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan BMD berupa ATB yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya; dan b. Pengurus Barang SKPD terkait untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan inventarisasi, pencatatan, pengamanan, dan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD berupa ATB.	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala SKPD dan Pengurus Barang SKPD terkait b. Laporan inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan ATB; dan c. Usulan pemusnahan dan penghapusan BMD berupa ATB.	Desember 2025	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
5	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Lain-lain Belum Dilaksanakan Secara Memadai	BPK merekomendasikan Wali Kota Tarakan agar memerintahkan: a. TPKD untuk memproses penyelesaian ganti kerugian daerah atas satu unit kendaraan bermotor yang hilang pada Kelurahan Lingkas Ujung; b. Kepala DPUPR dan DPRKPP selaku pengguna barang untuk melaksanakan pengendalian atas kegiatan inventarisasi, pencatatan, penyampaian usulan pemusnahan dan penghapusan aset dalam kondisi rusak berat kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang; c. Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKPAD selaku pengurus barang pengelola untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh atas aset lain-lain yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2024 khususnya satu bidang tanah jalan pada DPUPR senilai Rp119.364.222.966,00 yang belum dapat diidentifikasi dan menindaklanjuti hasil inventarisasi sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah; dan d. Pengurus Barang DPUPR dan DPRKPP untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam	a. Surat perintah Wali Kota kepada Kuasa Pengguna Barang untuk melaporkan kehilangan kepada TPKD dan selanjutnya TPKD untuk memproses penyelesaian ganti kerugian daerah atas satu unit kendaraan bermotor yang hilang pada Kelurahan Lingkas Ujung; b. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala DPUPR dan DPRKPP; c. Surat perintah Wali Kota kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKAD; d. Surat perintah Wali Kota kepaada Pengurus Barang DPUPR dan DPRKPP; e. Usulan pemusnahan dan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak berat kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang; f. SK Tim Verifikasi Aset; g. Timeline Tim Verifikasi; dan h. Laporan inventarisasi BMD	Desember 2025	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		melaksanakan inventarisasi, pencatatan, penyiapan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD berupa Aset Lainnya.			

Tarakan, 26 Mei 2025

Wali Kota Tarakan

dr. H. Khairul, M.Kes.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Mulawarman No.98, Tarakan, Kalimantan Utara
Telp. (0551) 33939 , Fax. (0551) 30538
www.kaltara.bpk.go.id